



SALINAN

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021–2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang
- a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran lima tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan yang dijabarkan sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Terpilih Masa Bhakti Tahun 2021-2026;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan bertujuan untuk pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, tercukupi kebutuhan dasar baik materiel maupun spiritual;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 265 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
dan
BUPATI PEKALONGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021–2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pekalongan;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005–2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan yang disusun setiap tahun sekali.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021–2026.
8. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

BAB II RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang pelaksanaannya dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD disusun sebagai berikut:
 - a. BAB I : pendahuluan;

- b. BAB II : gambaran umum kondisi Daerah;
- c. BAB III : gambaran keuangan Daerah;
- d. BAB IV : permasalahan dan isu strategis;
- e. BAB V : visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. BAB VI : strategi, arah kebijakan dan program pembangunan;
- g. BAB VII : kerangka pendanaan pembangunan dan program PD;
- h. BAB VIII : kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- i. BAB IX : penutup.

- (2) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu tahun 2021–2026.

Pasal 5

RPJMD dilaksanakan oleh Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan kondisi dan perubahan lingkungan strategis Daerah.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila pelaksanaan RPJMD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah, maka Bupati dapat mengubah RPJMD.

BAB IV PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau
- d. bertentangan dengan kepentingan nasional.

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (2) Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka menengah, perubahan dilaksanakan melalui perubahan RKPD dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

- (1) Dokumen yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021 dan RKPD Tahun 2022 yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005 – 2025 masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya dokumen dan RKPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJMD menjadi pedoman penyusunan RKPD sampai dengan Tahun 2026, dan sebelum tersusunnya RPJMD Tahun 2026 – 2031 yang memuat visi dan misi Bupati terpilih maka penyusunan RKPD tahun 2027 berpedoman pada RPJPD dan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen

Pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



AGUS DWI NUGROHO, S.STP.
Pembina Tk. I
NIP. 19770906 199703 1 005

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH: (5-360/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021–2026

I. UMUM.

RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran lima tahun kelima dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025, dijabarkan sesuai dengan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Terpilih Masa Bhakti Tahun 2021-2026, serta berpedoman dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah. RPJMD Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah, yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2021-2026, dan akan dijabarkan setiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

RPJMD merupakan perspektif masa depan Daerah tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan melalui visi yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”, dimana pernyataan visi tersebut dimaknai sebagai suatu kondisi terpenuhinya kualitas kebutuhan dasar secara materiel dan spiritual masyarakat Kabupaten Pekalongan menuju pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, memiliki tingkat kepuasan hidup yang tercukupi kebutuhan dasar baik materiel dan spiritual atau jasmani dan rohani, sehingga terpenuhi kebahagiaan hidupnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus ditetapkan paling lambat 6 (bulan) setelah Bupati terpilih dilantik. Dengan demikian agar pelaksanaan pembangunan daerah segera terlaksana sesuai dengan visi, misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Terpilih Periode Tahun 2021-2026, maka RPJMD Tahun 2021-2026 harus segera ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

BAB I : PENDAHULUAN. memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, sistematika penulisan, maksud dan tujuan, referensi penyusunan, serta sistematika penulisan dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

Huruf b

BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH, memuat gambaran tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah sebagai dasar pengembangan rencana pemerintahan yang disesuaikan dengan target pembangunan.

Huruf c

BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH, memuat gambaran dan kebijakan keuangan daerah yang telah dilaksanakan dan memberikan rumusan kebijakan rencana ke depan di bidang pendapatan, belanja, serta pembiayaan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk periode 2021 – 2026.

Huruf d

BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS, memuat gambaran tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Daerah dalam berbagai urusan pemerintahan serta isu-isu strategis yang menjadi basis pengembangan perencanaan daerah dalam jangka menengah.

Huruf e

BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, memuat visi dan misi pembangunan di Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, serta menyajikan tujuan dan sasaran pembangunan di daerah untuk menjawab isu strategis daerah.

Huruf f

BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN, memuat strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan daerah, dan arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, sebagai

rumusan perencanaan komprehensif Pemerintah Daerah, yang disertai dengan program pembangunan daerah yang akan direncanakan.

Huruf g

BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH, memuat hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Huruf h

BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH, memuat gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Huruf i

BAB IX : PENUTUP, memuat kesimpulan mengenai perlunya disusun dokumen RPJMD Tahun 2021-2026.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 96

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH BUPATI
PEKALONGAN NOMOR 5 TAHUN
2021 TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHUN 2021-2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I-1
B. Landasan Hukum	I-4
C. Hubungan Antar Dokumen	I-9
D. Maksud dan Tujuan.....	I-12
E. Sistematika Dokumen RPJMD.....	I-13
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH	
A. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-16
3. Rencana Struktur Ruang Wilayah.....	II-28
4. Aspek Demografi.....	II-38
B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-40
1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi.....	II-40
2. Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II-57
3. Fokus Seni Budaya	II-76
C. Aspek Pelayanan Umum.....	II-77
1. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar.....	II-77
2. Fokus Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-113
3. Urusan Pilihan.....	II-134
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-145
D. Aspek Daya Saing	II-150
1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II-150
2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-155
3. Fokus Iklim Berinvestasi	II-157
4. Fokus Sumber Daya Manusia.....	II-157
E. Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021	II-161
1. Indikator Visi.....	II-162
2. Indikator Sasaran	II-165
3. Indikator Program.....	II-175
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	
A. Prospek Perekonomian Daerah	III-1
1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional	III-1
2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah	III-4
B. Kinerja Keuangan Tahun 2016 - 2021	III-6
1. Kinerja Pendapatan Daerah.....	III-6
2. Kinerja Belanja Daerah	III-10
3. Kemampuan Keuangan Daerah	III-14
4. Kinerja Pembiayaan Daerah	III-14

C. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu	III-16
1. Proporsi Penggunaan Anggaran	III-17
2. <i>Lesson Learnt</i> Kebijakan Pengelolaan keuangan Masa Lalu dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa yang Akan Datang	III-18
D. Neraca	III-22
1. Rasio Likuiditas	III-22
2. Rasio Solvabilitas	III-23
E. Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026	III-29
1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III-29
2. Perhitungan Kerangka Pendanaan	III-37

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. Permasalahan Pembangunan	IV-1
1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar	IV-1
2. Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV-3
3. Urusan Pilihan	IV-9
4. Penunjang Urusan Pemerintah	IV-11
B. Isu strategis	IV-12
1. Isu dan Tantangan Global dan Nasional	IV-13
2. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024)	IV-17
3. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023	IV-19
4. Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan 2005-2025	IV-20
5. Isu Pandemi Covid 19	IV-22
6. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kab. Pekalongan Tahun 2021-2026	IV-24

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi	V-1
B. Misi	V-2
C. Tujuan dan Sasaran	V-9

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

A. Strategi	VI-1
B. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan	VI-5
C. Arah Kebijakan Kewilayahan	VI-24
1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019	VI-24
2. Arah Kebijakan Kewilayahan berdasarkan RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040	VI-25
D. Program Pembangunan Daerah	VI-26
E. Keterkaitan Misi dengan Program Unggulan	VI-33
F. Program Unggulan Strategis	VI-35

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

A. Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
B. Program Perangkat Daerah	VII-3

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB IX PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pembagian Administrasi di Wilayah Kabupaten Pekalongan.....	II-2
Tabel 2.2	Ketinggian wilayah per kecamatan Dari permukaan laut	II-3
Tabel 2.3	Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan	II-6
Tabel 2.4	Sungai dan Anak Sungai di Kabupaten Pekalongan.....	II-7
Tabel 2.5	Daerah Irigasi di Kabupaten Pekalongan	II-8
Tabel 2.6	Nama Lumbung/ Embung Di Kabupaten Pekalongan	II-9
Tabel 2.7	Data Kondisi Sumber Mata Air Kabupaten Pekalongan.....	II-9
Tabel 2.8	Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-11
Tabel 2.9	Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2019.	II-13
Tabel 2.10	Luas Penggunaan Lahan Sawah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2019	II-14
Tabel 2.11	Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Pengairan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2019	II-15
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020	II-39
Tabel 2.13	Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	II-40
Tabel 2.14	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah).....	II-41
Tabel 2.15	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-42
Tabel 2.16	Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-42
Tabel 2.17	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-43
Tabel 2.18	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II-45
Tabel 2.19	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II-44
Tabel 2.20	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-46
Tabel 2.21	Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	II-47
Tabel 2.22	Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-49
Tabel 2.23	Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II-49
Tabel 2.24	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-50
Tabel 2.25	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II-51
Tabel 2.26	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-52
Tabel 2.27	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II-52
Tabel 2.28	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-53

Tabel 2.29	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020	II-54
Tabel 2.30	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 (jiwa).....	II-56
Tabel 2.31	Perbandingan IPM Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan dan Nasional Tahun 2016-2020.....	II-58
Tabel 2.32	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 ..	II-59
Tabel 2.33	Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-60
Tabel 2.34	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (tahun).....	II-60
Tabel 2.35	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 (tahun).....	II-61
Tabel 2.36	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-62
Tabel 2.37	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II-62
Tabel 2.38	Usia Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-63
Tabel 2.39	Usia Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II-63
Tabel 2.40	Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-64
Tabel 2.41	Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 ..	II-65
Tabel 2.42	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020	II-66
Tabel 2.43	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II-67
Tabel 2.44	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-67
Tabel 2.45	Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-68
Tabel 2.46	Usia Harapan Hidup (UHH) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-69
Tabel 2.47	Pengeluaran perkapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020	II-69
Tabel 2.48	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-70
Tabel 2.49	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II-71
Tabel 2.50	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	II-72
Tabel 2.51	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 ...	II-72
Tabel 2.52	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-73
Tabel 2.53	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II-75
Tabel 2.54	Jumlah Grup dan Gedung Kesenian Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-76

Tabel 2.55	Jumlah Klub dan Gedung Olahraga Tahun 2016-2020 Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-76
Tabel 2.56.	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020	II-79
Tabel 2.57.	APM Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Pada semua jenjang pendidikan Tahun 2016-2020.....	II-80
Tabel 2.58.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%)	II-80
Tabel 2.59.	Angka Putus Sekolah Pada Semua Jenjang Pendidikan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (%).....	II-82
Tabel 2.60.	Angka Kelulusan Sekolah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (%).....	II-83
Tabel 2.61.	Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTS dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (%).....	II-83
Tabel 2.62.	Perkembangan Fasilitas Pendidikan Kondisi Baik Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-84
Tabel 2.63.	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-85
Tabel 2.64.	Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-85
Tabel 2.65.	Persentase Guru Berkualifikasi SI/D4 Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-86
Tabel 2.66.	Persentase Sekolah Berakreditasi di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2019	II-87
Tabel 2.67.	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2020	II-88
Tabel 2.68.	Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020	II-89
Tabel 2.69.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020	II-90
Tabel 2.70.	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-90
Tabel 2.71.	Kasus Gizi Buruk Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020	II-91
Tabel 2.72.	Persentase Stunting Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020	II-93
Tabel 2.73.	Jumlah Kasus Stunting Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-94
Tabel 2.74.	Kondisi Penyakit Menular Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-95
Tabel 2.75.	Jumlah Kasus Covid-19 Kabupaten Pekalongan Bulan Juli 2020-Mei 2021	II-96
Tabel 2.76.	Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-97
Tabel 2.77.	Rasio Dokter per satuan penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-97
Tabel 2.78.	Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-97
Tabel 2.79.	Rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-98
Tabel 2.80.	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2020	II-99

Tabel 2.81.	Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-101
Tabel 2.82.	Kondisi Jalan berdasarkan Jenis Permukaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-102
Tabel 2.83.	Jenis Jembatan berdasarkan Konstruksinya Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-102
Tabel 2.84.	Capaian Layanan Bidang Irigasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-103
Tabel 2.85.	Kondisi Drainase Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-104
Tabel 2.86.	Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-104
Tabel 2.87.	Capaian Kinerja Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-105
Tabel 2.88.	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2020	II-106
Tabel 2.89.	Capaian Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-107
Tabel 2.90.	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2020	II-108
Tabel 2.91.	Penyelesaian Pelanggaran Perda Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-108
Tabel 2.92.	Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-109
Tabel 2.93.	Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-109
Tabel 2.94.	Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-110
Tabel 2.95.	Jumlah Unjuk Rasa Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II-110
Tabel 2.96.	Kinerja Sub-Urusan Kebakaran Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-110
Tabel 2.97.	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2020	II-111
Tabel 2.98.	Perkembangan Pelayanan Urusan Sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-112
Tabel 2.99.	Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2020	II-112
Tabel 2.100.	Perkembangan Pelayanan Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-114
Tabel 2.101.	Perkembangan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-115
Tabel 2.102.	Jumlah Lumbung Pangan di Kabupaten Pekalongan dan Tahun Pendiannya.....	II-116
Tabel 2.103.	Neraca Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-117
Tabel 2.104.	Capaian Pelayanan Urusan Pangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-117
Tabel 2.105.	Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-120
Tabel 2.106.	Perkembangan Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-121
Tabel 2.107.	Capaian Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II-123

Tabel 2.108.	Perkembangan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-124
Tabel 2.109.	Perkembangan Pelayanan Perhubungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-125
Tabel 2.110.	Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-126
Tabel 2.111.	Capaian Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-128
Tabel 2.112.	Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-129
Tabel 2.113.	Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-130
Tabel 2.114.	Capaian Kinerja Urusan Statistik Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-131
Tabel 2.115.	Capaian Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-131
Tabel 2.116.	Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-132
Tabel 2.117.	Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-133
Tabel 2.118.	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-134
Tabel 2.119.	Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-135
Tabel 2.120.	Perkembangan Perikanan Budidaya Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-135
Tabel 2.121.	Perkembangan Perikanan Tangkap Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-136
Tabel 2.122.	Perkembangan Produksi Pengolahan Ikan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-137
Tabel 2.123.	Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-137
Tabel 2.124.	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-138
Tabel 2.125.	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Pekalongan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-140
Tabel 2.126.	Indikator Capaian Pelayanan Urusan Perindustrian Kabupaten Pekalongan	II-141
Tabel 2.127.	Jumlah Usaha Industri Menurut Kelompok Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-142
Tabel 2.128.	Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (orang).....	II-142
Tabel 2.129.	Jumlah Investasi Menurut Kelompok Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-143
Tabel 2.130.	Jumlah Nilai Produksi Menurut Kelompok Industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-144
Tabel 2.131.	Indikator Capaian Pelayanan Urusan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-145
Tabel 2.132.	Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-145
Tabel 2.133.	Capaian Pelayanan Bidang Keuangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-146

Tabel 2.134. Nominatif Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Pendidikan Per 31 Desember 2020	II-147
Tabel 2.135. Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II-148
Tabel 2.136. Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi Pengawasan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-149
Tabel 2.137. Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi Pemerintahan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II-150
Tabel 2.138. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah).....	II-151
Tabel 2.139. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah).....	II-152
Tabel 2.140. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Persen)	II-152
Tabel 2.141. Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Makanan Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-154
Tabel 2.142. Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-154
Tabel 2.143. Panjang Jalan Kabupaten Pekalongan dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan Tahun 2018-2020	II-155
Tabel 2.144. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-158
Tabel 2.145. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-158
Tabel 2.146. Rasio Ketergantungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	II-159
Tabel 2.147. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Generasi dan Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-161
Tabel 2.148. Realisasi Indikator Visi Tahun 2020 dan Tingkat Capaian terhadap Target RPJMD 2016-2021	II-162
Tabel 2.149. Realisasi Indikator Tujuan Tahun 2020 dan Tingkat Capaian terhadap Target RPJMD 2016-2021	II-163
Tabel 2.150. Realisasi indikator sasaran tahun 2020 dan tingkat capaian terhadap target RPJMD 2016-2021	II-165
Tabel 2.151. Evaluasi Kinerja Program Urusan Pendidikan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-175
Tabel 2.152. Evaluasi Kinerja Program Urusan Kesehatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-177
Tabel 2.153. Evaluasi Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan tahun 2020.....	II-181
Tabel 2.154. Evaluasi Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pekalongan tahun 2020	II-183
Tabel 2.155. Evaluasi Kinerja Program Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan tahun 2020 ..	II-184
Tabel 2.156. Evaluasi Kinerja Program Urusan Sosial Kabupaten Pekalongan tahun 2020	II-187
Tabel 2.157. Evaluasi Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan tahun 2020	II-189
Tabel 2.158. Evaluasi Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan tahun 2020	II-191

Tabel 2.159. Evaluasi Kinerja Program Urusan Pangan Kabupaten Pekalongan tahun 2020	II-192
Tabel 2.160. Evaluasi Kinerja Program Urusan Pertanahan Kabupaten Pekalongan tahun 2020	II-193
Tabel 2.161. Evaluasi Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Pekalongan tahun 2020.....	II-194
Tabel 2.162. Evaluasi Kinerja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tahun 2020	II-195
Tabel 2.163. Evaluasi Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pekalongan tahun 2020	II-196
Tabel 2.164. Evaluasi Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan tahun 2020	II-197
Tabel 2.165. Evaluasi Kinerja Program Urusan Perhubungan Kabupaten Pekalongan tahun 2020	II-199
Tabel 2.166. Evaluasi Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pekalongan tahun 2020	II-200
Tabel 2.167. Evaluasi Kinerja Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Pekalongan tahun 2020	II-201
Tabel 2.168. Evaluasi Kinerja Program Urusan Penanaman Modal Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-202
Tabel 2.169. Evaluasi Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	II-202
Tabel 2.170. Evaluasi Kinerja Program Urusan Statistik Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-204
Tabel 2.171. Evaluasi Kinerja Program Urusan Persandian Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-204
Tabel 2.172. Evaluasi Kinerja Program Urusan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-205
Tabel 2.173. Evaluasi Kinerja Program Urusan Perpustakaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-206
Tabel 2.174. Evaluasi Kinerja Program Urusan Kearsipan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-206
Tabel 2.175. Evaluasi Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-208
Tabel 2.176. Evaluasi Kinerja Program Urusan Pariwisata Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-209
Tabel 2.177. Evaluasi Kinerja Program Urusan Pertanian Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-209
Tabel 2.178. Evaluasi Kinerja Program Urusan Perdagangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-211
Tabel 2.179. Evaluasi Kinerja Program Urusan Perindustrian Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-212
Tabel 2.180. Evaluasi Kinerja Program Urusan Transmigrasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-212
Tabel 2.181. Evaluasi Kinerja Program Urusan Perencanaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-213
Tabel 2.182. Evaluasi Kinerja Program Urusan Keuangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-214
Tabel 2.183. Evaluasi Kinerja Program Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	II-215
Tabel 2.184. Evaluasi Kinerja Program Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	II-216

Tabel 2.185.	Evaluasi Kinerja Program Urusan Pengawasan Kabupaten Pekalongan tahun 2020.....	II-217
Tabel 2.186.	Evaluasi Kinerja Program Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Pekalongan tahun 2020.....	II-218
Tabel 2.187.	Rekapitulasi Rata-rata Realiasi Ketercapaian Kinerja RKPD Tahun 2020.....	II-220
Tabel 3.1.	Pertumbuhan Pengeluaran dalam PDB di Indonesia Selama Tahun 2020 (dalam persen).....	III-4
Tabel 3.2.	Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Y-on-Y) Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 2020 (dalam Persen).....	III-4
Tabel 3.3.	Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Y On Y) Menurut Pengeluaran di Jawa Tengah Tahun 2020 (dalam Persen)	III-5
Tabel 3.4.	Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2020.....	III-7
Tabel 3.5.	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Rp. 000) (Triyun Rupiah).....	III-9
Tabel 3.6.	Persentase Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (%)......	III-11
Tabel 3.7.	Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah).....	III-13
Tabel 3.8.	Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016– 2020.....	III-14
Tabel 3.9.	Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Pekalongan 2016-2020.....	III-16
Tabel 3.10.	Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	III-17
Tabel 3.11.	Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2021 (Rp.000)	III-18
Tabel 3.12.	Perbandingan Kebijakan Pengelolaan Keuangan RPJMD 2016-2021 dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan RPJMD 2021-2026	III-20
Tabel 3.13.	Rasio Likuiditas Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	III-22
Tabel 3.14.	Rasio Solvabilitas Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	III-23
Tabel 3.15.	Neraca Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020.....	III-24
Tabel 3.16.	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 (Rp.000,00).....	III-34
Tabel 3.17.	Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 (Rp.000)	III-37
Tabel 4.1	Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 - 2023	IV-20
Tabel 4.2	Rumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Pekalongan	IV-30
Tabel 5.1.	Penyempurnaan dan Pengelompokan Misi.....	V-2
Tabel 5.2.	Keterkaitan Unsur Visi dengan Rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.....	V-5
Tabel 5.3.	Keterkaitan Misi Jangka Menengah dengan Misi Jangka Panjang	V-6
Tabel 5.4.	Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026.....	V-7
Tabel 5.5.	Keterkaitan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan dengan Visi, Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN	V-8
Tabel 5.6.	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026.....	V-10

Tabel 5.7.	Keterkaitan Indikator RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Guna penyusunan Pohon Kinerja (<i>Cascading</i>) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026	V-19
Tabel 6.1.	Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022-2026	VI-15
Tabel 6.2	Rumusan Arah Kebijakan dan Keterkaitannya dengan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026	VI-17
Tabel 6.3	Program Prioritas Pembangunan untuk mendukung Visi Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026	VI-29
Tabel 6.4	Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Prioritas Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026	VI-39
Tabel 7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026	VII-2
Tabel 7.2	Kerangka Pendanaan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026	VII-20
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026	VIII-2
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kab. Pekalongan Tahun 2021-2026	VIII-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Pelantikan Bupati Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2021-2026.....	I-1
Gambar 1.2.	Tahapan Penyusunan RPJMD	I-4
Gambar 1.3.	Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat dan Daerah dalam Satu Kesatuan SIMRENAS	I-10
Gambar 1.4.	Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan	I-11
Gambar 2.1	Peta Orientasi Kabupaten Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah	II-1
Gambar 2.2	Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan	II-3
Gambar 2.3	Peta Topografi Kabupaten Pekalongan.....	II-4
Gambar 2.4	Peta Struktur Geologi Kabupaten Pekalongan	II-6
Gambar 2.5	Peta Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan	II-7
Gambar 2.6	Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan.....	II-12
Gambar 2.7	Tugu Perbatasan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banjarnegara	II-16
Gambar 2.8	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pekalongan.....	II-17
Gambar 2.9	Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Pekalongan	II-19
Gambar 2.10	Peta Rawan Bencana Kabupaten Pekalongan	II-21
Gambar 2.11	Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Pekalongan	II-23
Gambar 2.12	Peta Wilayah Pertambangan Kabupaten Pekalongan.....	II-25
Gambar 2.13	Peta Rencana Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Pekalongan	II-26
Gambar 2.14	Peta Lokasi Pariwisata Kabupaten Pekalongan	II-27
Gambar 2.15	Peta Lokasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Pekalongan	II-28
Gambar 2.16	Piramida Penduduk Kab. Pekalongan Tahun 2020	II-40
Gambar 2.17	Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-45
Gambar 2.18	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020.....	II-46
Gambar 2.19	PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-47
Gambar 2.20	PDRB Per Kapita Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020	II-47
Gambar 2.21	Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	II-48
Gambar 2.22	Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020	II-49
Gambar 2.23	Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020	II-50
Gambar 2.24	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-50
Gambar 2.25	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020	II-51
Gambar 2.26	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-52
Gambar 2.27	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020	II-53
Gambar 2.28	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	II-53

Gambar 2.29	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II-55
Gambar 2.30	Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-55
Gambar 2.31	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (jiwa).....	II-56
Gambar 2.32	Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019	II-57
Gambar 2.33	Pertumbuhan IPM kabupaten/kota se Jawa Tengah Tahun 2020 ..	II-58
Gambar 2.34	IPM kabupaten/kota se-Jawa Tengah Tahun 2020	II-58
Gambar 2.35	IPM Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020	II-59
Gambar 2.36	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020	II-59
Gambar 2.37	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-60
Gambar 2.38	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020.....	II-61
Gambar 2.39	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 ,.....	II-62
Gambar 2.40	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020.....	II-62
Gambar 2.41	Usia Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-63
Gambar 2.42	Usia Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020	II-64
Gambar 2.43	Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-65
Gambar 2.44	Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-65
Gambar 2.45	Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020.....	II-66
Gambar 2.46	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-66
Gambar 2.47	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020.....	II-67
Gambar 2.48	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-68
Gambar 2.49	Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-68
Gambar 2.50	Usia Harapan Hidup (UHH) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-69
Gambar 2.51	Pengeluaran perkapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020 (Ribu Rupiah/Tahun)	II-70
Gambar 2.52	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-70
Gambar 2.53	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020	II-71
Gambar 2.54	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020	II-72

Gambar 2.55	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020	II-73
Gambar 2.56	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020.....	II-73
Gambar 2.57	Diagram Pohon Pengangguran Kabupaten Pekalongan Tahun 2020.....	II-74
Gambar 2.58	Rata-Rata Usia Penduduk Menganggur Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2020	II-74
Gambar 2.59	Klasifikasi Ketrampilan Penduduk Menganggur Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2020	II-74
Gambar 2.60	Jenis Kelamin Penduduk Menganggur Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2020	II-75
Gambar 2.61	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020.....	II-75
Gambar 2.62.	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2016-2020 Kabupaten Pekalongan	II-78
Gambar 2.63.	Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2020	II-89
Gambar 2.64.	Jumlah Kasus Kematian Ibu Menurut Wilayah Puskesmas di Kabupaten Pekalongan tahun 2020	II-89
Gambar 2.65.	Angka Kematian Bayi menurut Puskesmas Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-91
Gambar 2.66.	Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2020	II-92
Gambar 2.67.	Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk di Wilayah Puskesmas Kabupaten Pekalongan Tahun 2020	II-92
Gambar 2.68.	Persentase Stunting Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020	II-93
Gambar 2.69.	Persentase Jalan Baik dan Sedang Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-101
Gambar 2.70.	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-101
Gambar 2.71.	Persentase Jasa Konstruksi yang dibina Tahun 2016-2020	II-105
Gambar 2.72.	Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang Melewati Wilayah Kabupaten Pekalongan	II-156
Gambar 2.73.	Exit Tol Bojong Kabupaten Pekalongan	II-156
Gambar 2.74.	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	II-159
Gambar 2.75.	Rasio Ketergantungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020... ..	II-160
Gambar 2.76.	Generasi Penduduk berdasarkan kelompok umur	II-161
Gambar 3.1.	Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Mitra Dagang Indonesia (year-on-year) pada Kuartal 4-2019 (Q4/19), Kuartal 3- 2020 (Q3/20) dan Kuartal 4-2020 (Q4/20) (dalam persen).....	III-1
Gambar 3.2.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan 4-2020 (Q4/20), Berbasis Data y-on-y (dalam persen).....	III-2
Gambar 3.3.	Pertumbuhan Sektor PDB di Indonesia Selama Tahun 2020 (dalam persen)	III-2
Gambar 3.4.	Perkembangan Pendapatan Daerah Pekalongan Tahun 2016 – 2020 (Trilyun Rupiah).....	III-7
Gambar 3.5.	Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (%)	III-8
Gambar 3.6.	Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	III-9

Gambar 3.7. Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020	III-9
Gambar 3.8. Perubahan Klasifikasi Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan	III-10
Gambar 3.9. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	III-11
Gambar 3.10. Rasio Belanja Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Tahun 2016-2020	III-12
Gambar 3.11. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Tahun 2016-2020 (%)	III-13
Gambar 3.12. Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)	III-15
Gambar 3.13. Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020	III-15
Gambar 4.1. Perumusan Isu Strategis Kabupaten Pekalongan 2021-2026	IV-13
Gambar 4.2. Data Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Dunia (hingga 5 Oktober 2021)	IV-22
Gambar 4.3. Data Sebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia (hingga 5 Oktober 2021)	IV-22
Gambar 4.4. Data Perkembangan Pandemi COVID-19 di Jawa Tengah (hingga 5 Oktober 2021)	IV-23
Gambar 4.5. Rencana Percepatan Vaksinisasi COVID-19 di Kabupaten Pekalongan sd Akhir Desember 2021	IV-23
Gambar 5.1. Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Panjang dengan Visi Pembangunan Jangka Menengah	V-6
Gambar 6.1. Arah Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022-2026	VI-6
Gambar 7.1. Keterkaitan Program Prioritas dengan Permasalahan Pembangunan serta Strategi dan Arah Kebijakan	VII-4

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021-2026

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang (20 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun perencanaan tahunan. Penyusunan dokumen perencanaan daerah, selain diatur dalam UU-SPPN juga diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 263 UU Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, salah satunya adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan **Surat Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor : 02/PL.02.7-Kpt/3326/KPU-Kab/I/2021** tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 telah menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 yaitu **FADIA ARAFIQ, SE, MM** dan **H. RISWADI, SH** sebagai bupati dan wakil bupati terpilih dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020 dan telah dilantik oleh Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, S.H, M.IP, di Grhadika Bhakti Praja Semarang pada hari **Minggu Tanggal 27 Juni 2021**. Berkaitan dengan hal ini Pemerintah Kabupaten Pekalongan menyusun dokumen RPJMD tahun 2021-2026.



Gambar 1.1. Pelantikan Bupati Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2021-2026

RPJMD ini. merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah, didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Dalam penyusunan RPJMD juga perlu memperhatikan RTRW Daerah lain agar tercipta sinkronisasi dan sinergi pembangunan jangka menengah daerah antar antar kabupaten/kota, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya, terutama yang berdekatan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah

Pemberian kewenangan kepada daerah seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan agar daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab tersebut, implementasinya dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki daerah. Implementasi terencana dan terarah ini terwujud dalam sebuah dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan memedomani beberapa ketentuan mendasar penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang telah ada. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Dokumen RPJMD disusun dengan memperhatikan 4 (empat) pendekatan seperti yang diamanatkan pada pasal 7 s/d pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan teknokratis, pendekatan partisipatif, pendekatan politis, dan pendekatan perpaduan antara *bottom-up* dengan *top down planning*.

Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif merupakan proses penyusunan RPJMD yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat (*stakeholder*) dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan. Pendekatan politik bermakna bahwa penyusunan RPJMD mengacu pada visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih dan dibahas bersama DPRD dan ditetapkan dalam peraturan perundangan daerah. Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas (*bottom-up*) dan atas-bawah (*top-down*), yaitu penyusunan perencanaan pembangunan daerah diselaraskan melalui musyawarah di tingkat kabupaten sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi

pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Penyusunan RPJMD dilaksanakan dengan tahapan yang cukup panjang meliputi 6 tahapan yaitu:

1. Persiapan penyusunan RPJMD

Dalam tahap persiapan dilaksanakan beberapa aktivitas seperti: penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD; orientasi mengenai RPJMD; penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

2. Penyusunan rancangan awal RPJMD

Rancangan awal RPJMD yang merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih. Rancangan awal RPJMD selanjutnya dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD. Rancangan awal RPJMD yang telah dilakukan perbaikan selanjutnya diajukan Kepala Daerah kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan. Selanjutnya dilakukan konsultasi Rancangan awal RPJMD kepada Gubernur untuk memperoleh masukan penyempurnaan. Selanjutnya Bappeda menyampaikan surat edaran Kepala Daerah kepada kepala Perangkat Daerah tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD.

3. Penyusunan rancangan RPJMD

Penyusunan rancangan RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RPJMD berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi.

4. Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) RPJMD

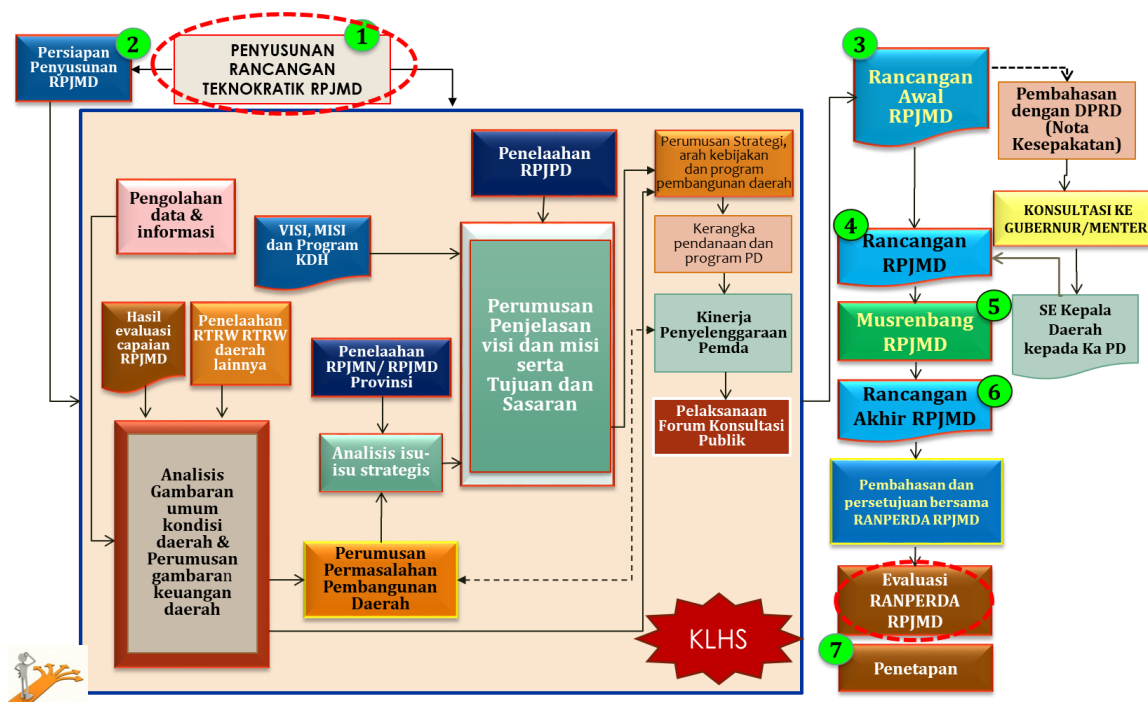
Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD. Musrenbang RPJMD dihadiri oleh pemangku kepentingan. Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

5. Perumusan rancangan akhir RPJMD

Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD. Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

6. Penetapan RPJMD

Pada tahap ini Bupati menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Bupati dan Wakil Bupati dilantik.



Gambar 1.2. Tahapan Penyusunan RPJMD

Dokumen RPJMD ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu lima tahun sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. RPJMD setelah ditetapkan akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang merupakan perencanaan tahunan daerah. RPJMD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah. Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah.

B. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
38. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6633);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6634);
42. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);

43. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, Dan Kawasan Brebes Tegal - Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224)
44. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
45. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
47. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
48. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
49. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Norek Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16-286/2019);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 17);
52. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum “Tirta Kajen” Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 84);
53. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Pekalongan Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 10);
54. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 85);
55. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 93);

56. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 94);
57. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
58. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ; Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
59. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
60. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
61. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
62. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

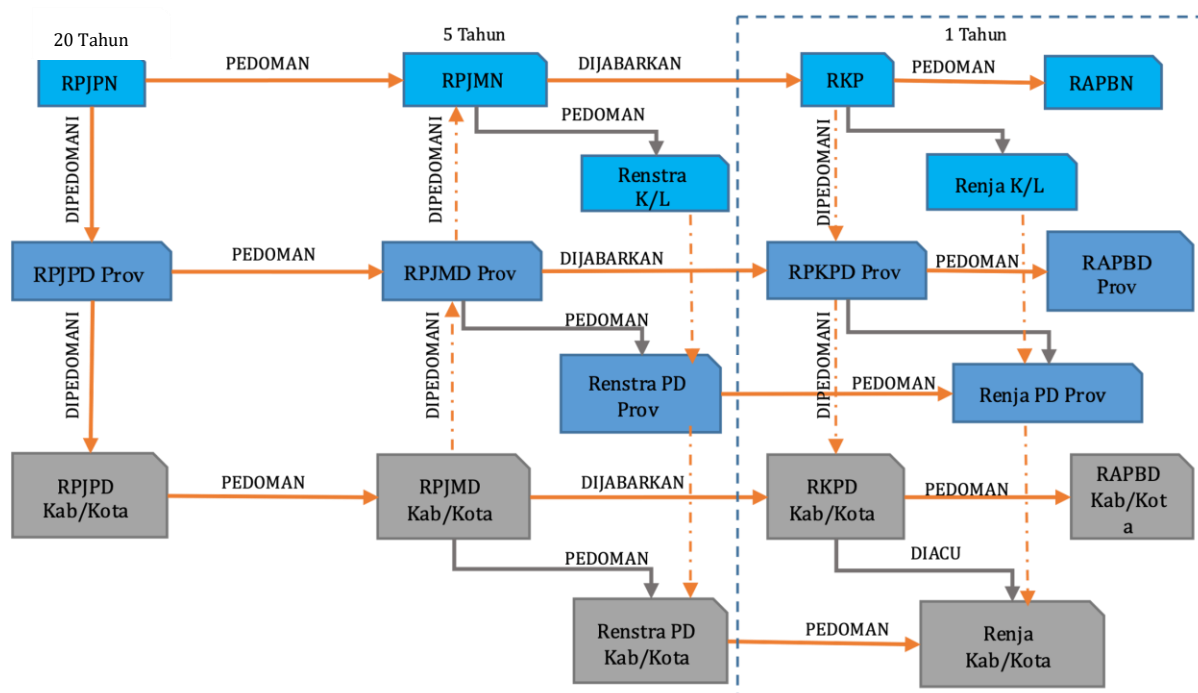
C. Hubungan Antar Dokumen

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih memuat sasaran dan strategi pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun masa pemerintahan. Untuk menjabarkan serta mewujudkan amanat pembangunan jangka menengah, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dapat menjadi acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah untuk mendukung pencapaian program prioritas Kepala Daerah tersebut.

RPJP Nasional memiliki periode 20 (dua puluh) tahun. Pelaksanaan RPJP Nasional 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005-2009, RPJM Nasional II Tahun 2010-2014, RPJM Nasional III Tahun 2015-2019, dan RPJM

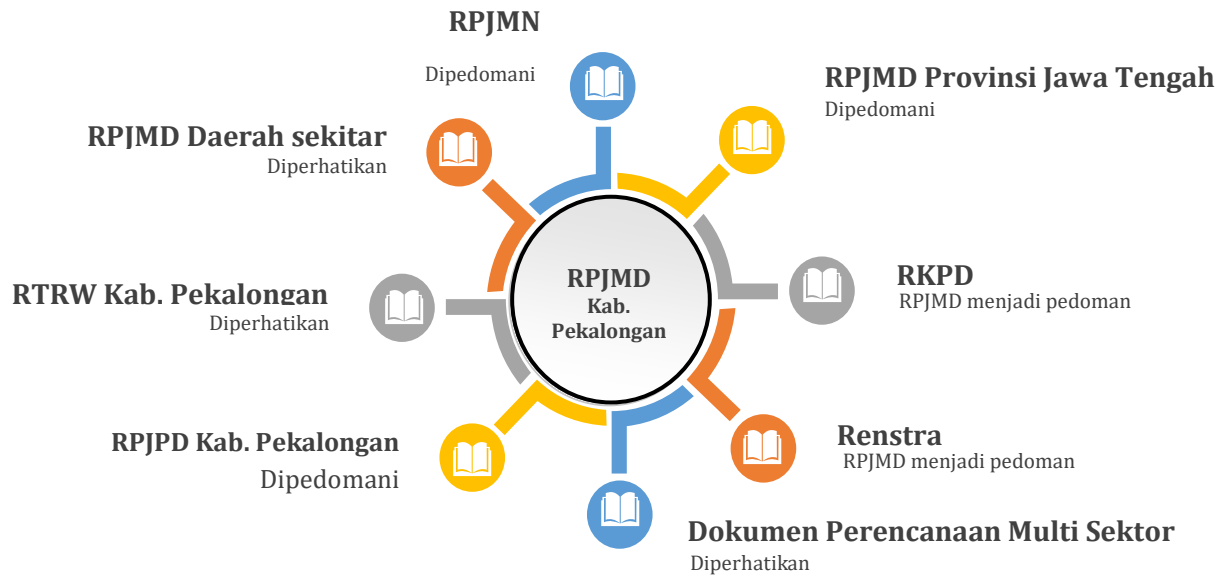
Nasional IV Tahun 2020–2024. Pada saat ini RPJMN mengacu pada tahap IV. RPJMN dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun. RKP merupakan penjabaran tahunan dari RPJMN dan memuat rancangan kerangka ekonomi makro, antara lain adalah arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKP memungkinkan adanya pemutakhiran program prioritas Presiden serta penetapan kebijakan baru. RKP yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). RPJPN dan RPJMD menjadi pedoman bagi Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menyusun RPJMD. RPJMD dijabarkan kedalam Renstra SKPD dan diterjemahkan kedalam RKPD. RPJMD menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui Renstra SKPD. Keberhasilan pencapaian visi & misi kepala daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Renstra SKPD. Sementara itu seluruh program selama lima tahun pada Renstra memedomani program prioritas dalam RPJMD. Dalam periode tahun RPJMD dilaksanakan melalui RKPD. Renja SKPD menerjemahkan program prioritas (RKPD) kedalam kegiatan prioritas. RKPD digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBD.

Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat dan Daerah Dalam Satu Kesatuan SIMRENAS dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :



Gambar 1.3. Sinkronisasi Perencanaan & Penganggaran Pusat dan Daerah Dalam Satu Kesatuan SIMRENAS

Dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya, seperti digambarkan pada bagan berikut ini:



Gambar 1.4. Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan

Penjelasan keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan mempedomani dokumen RPJMN tahun 2019-2024 terutama terkait isu strategis, visi dan misi presiden, sasaran pokok 7 agenda pembangunan, dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMN.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan mempedomani dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 terutama terkait permasalahan, tujuan dan sasaran dan arah kebijakan pembangunan kewilayahan dan indikator kinerja daerah yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pekalongan 2005-2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Pekalongan, pada tahap RPJMD ke 4. RPJMD harus memperhatikan isu strategis, sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan.

4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan 2020-2040

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Pekalongan. RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040 akan menjadi acuan, RPJMD harus memperhatikan struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang.

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Sekitar

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan memperhatikan dokumen RPJMD daerah sekitar (Kabupaten Pemasang, Kabupaten Batang, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara) khususnya terkait dengan kebijakan pembangunan di wilayah perbatasan dengan kabupaten Pekalongan.

6. Dokumen Perencanaan Multi Sektor

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pekalongan memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Rencana Penanggulangan

Kemiskinan Daerah (RPKD), RAD Kelitbangan, dan lain sebagainya. RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 juga harus mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pekalongan untuk menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

7. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. Renstra-PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Renstra PD sebagaimana Permendagri 86 tahun 2017 pasal 111 memuat pendahuluan; gambaran pelayanan SKPD; permasalahan dan isu strategis perangkat daerah; tujuan dan sasaran; strategi dan arah kebijakan; rencana program dan kegiatan serta pendanaan; kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan penutup.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan. RKPD sebagaimana dimaksud dalam Permendagri 86 tahun 2017 pasal 79 memuat pendahuluan; gambaran umum kondisi Daerah; kerangka ekonomi dan keuangan Daerah; sasaran dan prioritas pembangunan Daerah; rencana kerja dan pendanaan Daerah; kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan penutup.

D. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen daerah (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya) dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Pekalongan sesuai dengan visi, misi, dan program pembangunan dari pasangan kepala daerah terpilih masa bakti 2021-2026.

Tujuan Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
- b. Merumuskan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
- c. Menetapkan indikator kinerja sebagai tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

E. Sistematika Dokumen RPJMD

Sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan**, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah**, berisi tentang aspek geografi dan demografi, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- Bab III Gambaran Keuangan Daerah**, berisi tentang kinerja keuangan masa lalu; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan kerangka pendanaan
- Bab IV Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah**, berisi tentang permasalahan pembangunan, dan isu strategis daerah.
- Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran**, berisi tentang visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.
- Bab VI Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah**, berisi tentang rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.
- Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah**, berisi tentang alokasi belanja langsung untuk pendanaan pembangunan, dan perincian program perangkat daerah.
- Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**, berisi tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- Bab IX Penutup**, berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD.

BAB II

GAMBARAN UMUM

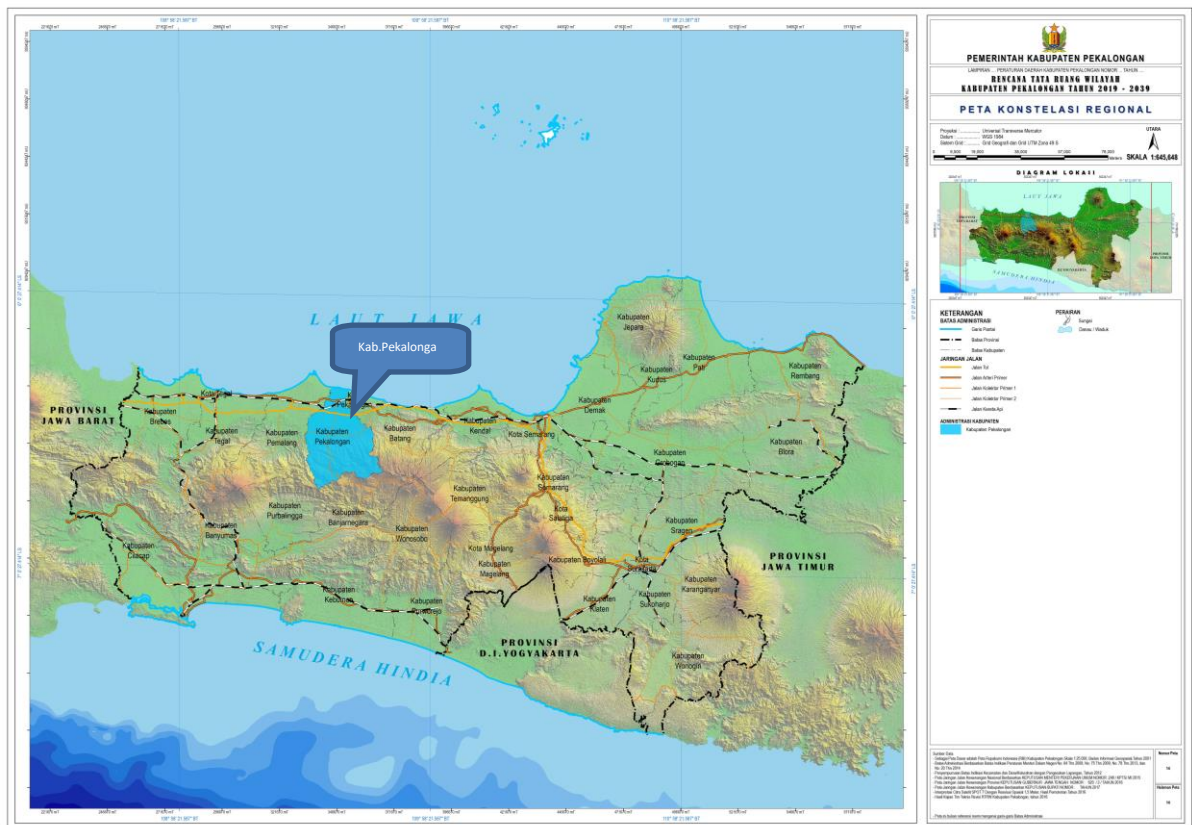
KONDISI WILAYAH

A. Aspek Geografi dan Demografi

1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang berada di daerah pantura bagian barat, memanjang ke arah selatan dengan Kota Kajen sebagai ibukota pusat pemerintahan.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.1 Peta Orientasi Kabupaten Pekalongan terhadap Provinsi Jawa Tengah

Luas wilayah Kabupaten Pekalongan seluas **89.304 hektar** (RTRW Kabupaten Pekalongan 2020-2040). Kabupaten Pekalongan terdiri atas 19 kecamatan dan 285 desa/kelurahan. Dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 11 desa yang merupakan desa pesisir dan 274 desa bukan termasuk desa pesisir.

Kabupaten Pekalongan terdiri dari 19 kecamatan, 272 desa, 13 kelurahan, 1.058 dusun, 1.592 RW, dan 4.454 RT. Kecamatan Kajen dan Kecamatan Kesesi dengan jumlah desa terbanyak yaitu masing-masing sebanyak 24 desa dan 23 desa. Untuk kelurahan hanya terdapat di Kecamatan Kajen, Sragi, Kedungwuni, Buaran, dan Wiradesa, dengan jumlah desa terbanyak terdapat di Kecamatan Wiradesa sebanyak 5 kelurahan. Jumlah dusun terbanyak terdapat di Kecamatan Kajen sebanyak 96 dusun. Jumlah RW terbanyak terdapat di Kecamatan Kesesi sebanyak 181 RW sedangkan untuk RT dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Sragi sebanyak 402 RT.

Tabel 2.1
Pembagian Administrasi di Wilayah Kabupaten Pekalongan

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	Desa	Kelurahan	Dusun	RW	RT
1	Kandangserang	60,55	14	-	68	56	153
2	Paningsaran	92,99	15	-	65	64	206
3	Lebakbarang	58,20	11	-	35	29	86
4	Petungkriyono	73,58	9	-	40	41	91
5	Talun	58,57	10	-	67	30	140
6	Doro	68,45	14	-	48	62	213
7	Karanganyar	63,48	15	-	67	75	203
8	Kajen	75,15	24	1	96	123	321
9	Kesesi	68,52	23	-	65	181	380
10	Sragi	32,40	16	1	75	155	402
11	Siwalan	25,91	13	-	60	97	272
12	Bojong	40,06	22	-	74	92	288
13	Wonopringgo	18,80	14	-	43	42	141
14	Kedungwuni	22,94	16	3	69	133	399
15	Karangdadap	20,99	11	-	56	68	171
16	Buaran	9,54	7	3	26	122	237
17	Tirto	17,39	16	-	41	63	250
18	Wiradesa	12,71	11	5	30	93	296
19	Wonokerto	15,90	11	-	33	66	205
Jumlah		836,13	272	13	1.058	1.592	4.454

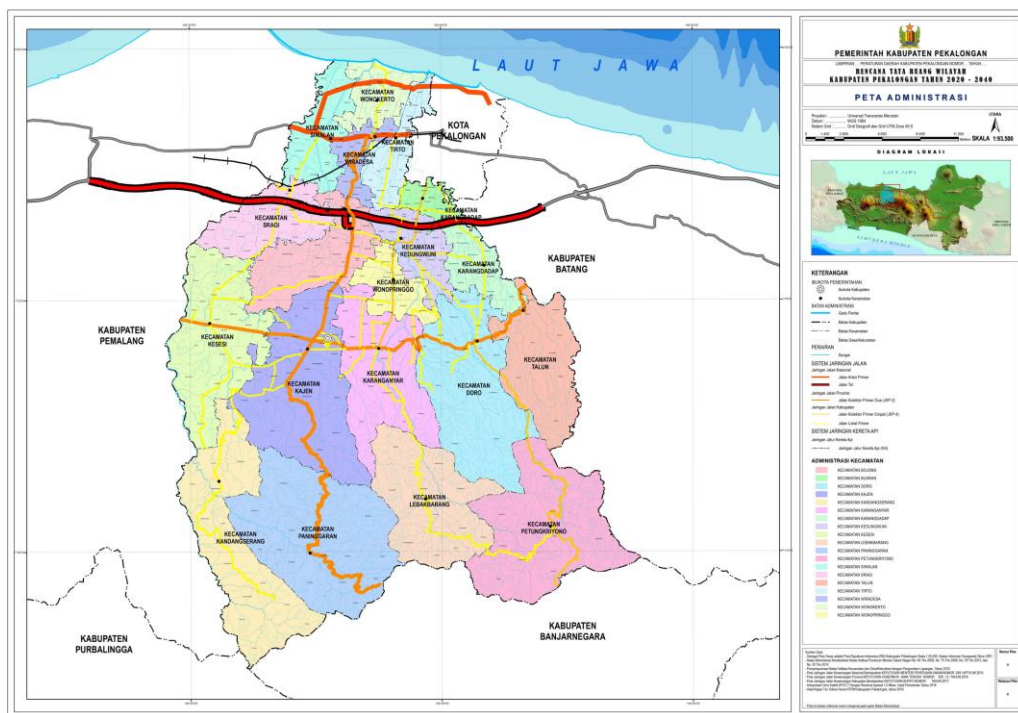
Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2020

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Pekalongan mempunyai bentuk yang memanjang dari utara ke selatan. Di bagian utara termasuk wilayah pantura dan merupakan jalur utama di Pulau Jawa. Secara astronomis letak Kabupaten ini berada di antara 6° - 7° 23' Lintang Selatan dan antara 109° - 109° 78' Bujur Timur. Karena sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Laut Jawa maka dari 285 desa/kelurahan yang ada, terdapat 6 desa pantai. Kabupaten Pekalongan memiliki batas administrasi meliputi :

- Sebelah Utara : Laut Jawa dan Kota Pekalongan;
- Sebelah Timur : Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Purbalingga;
- Sebelah Barat : Kabupaten Pemasang.

Adapun peta administrasi Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.2 Peta Administrasi Kabupaten Pekalongan

c. Kondisi Topografi

Wilayah Kabupaten Pekalongan merupakan perpaduan antara dataran rendah di bagian utara dan dataran tinggi di bagian selatan yang termasuk dalam kawasan dataran tinggi Dieng. Kawasan dataran tinggi berada pada 1.294 meter dari permukaan laut. Secara topografis, terdapat 66 desa/kelurahan (23,16%) yang terdapat di dataran tinggi dan sebanyak 219 desa/kelurahan (76,84%) berada di dataran rendah.

Kelerengan lahan di wilayah Kabupaten Pekalongan cukup bervariasi. Secara umum rona kelerengan di Pekalongan merupakan pegunungan dibagian selatan yang melandai ke arah utara (pantai). Keragaman kelerengan di Kabupaten Pekalongan Bervariasi mulai dari 0-2 % yang meliputi bagian utara sampai dengan bagian tengah Kabupaten Pekalongan, 0-15 % bagian tengah Pekalongan (Kecamatan Doro dan Talun), 15-40% yang meliputi bagian selatan Kecamatan Talun, Doro, sebagian Kecamatan Kandangserang dan Paninggaran serta kelerengan lebih dari 40 % yang meliputi sebagian besar Kecamatan Lebakbarang, Petungkriyono, bagian utara dan selatan Kecamatan Paninggaran, bagian barat Kecamatan Kajen dan bagian selatan Kecamatan Kandangserang.

Adapun tabel ketinggian wilayah per kecamatan dari permukaan laut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

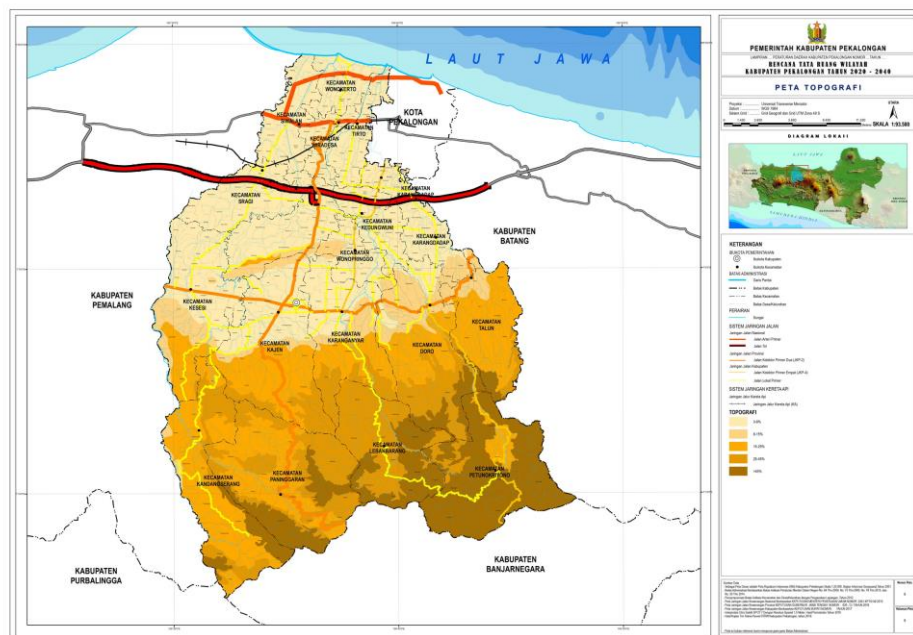
Tabel 2.2
Ketinggian wilayah per kecamatan Dari permukaan laut

No	Kecamatan	Tinggi dari permukaan laut (mdpl)
1	Kandangserang	276
2	Paninggaran	850
3	Lebakbarang	691
4	Petungkriyono	1.294
5	Talun	300
6	Doro	381
7	Karanganyar	70
8	Kajen	60
9	Kesesi	40

No	Kecamatan	Tinggi dari permukaan laut (mdpl)
10	Sragi	9
11	Siwalan	9
12	Bojong	50
13	Wonopringgo	20
14	Kedungwuni	11
15	Karangdadap	11
16	Buaran	8
17	Tirto	4
18	Wiradesa	4
19	Wonokerto	-

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2019

Sedangkan peta topografi Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.3 Peta Topografi Kabupaten Pekalongan

d. Geologi

Struktur Geologi Kabupaten Pekalongan terdiri dari :

1) Daerah Endapan Aluvial

- (1) Aluvium, yang terletak pada ketinggian 0 - 25 m dpl. Daerah meliputi Kecamatan Sragi, Wiradesa, Tirto, Buaran, Kedungwuni, Doro, Wonopringgo, Karanganyar, Kajen, Kesesi dan Bojong dengan luas keseluruhan 25.138,9516 Ha atau sebesar 30,23 % dari luas keseluruhan. Kawasan ini cukup sesuai untuk pengembangan kegiatan pertanian namun harus didukung oleh pengairan atau irigasi yang memadai. Untuk mendukung potensi pertanian yang ada di kawasan ini maka kecamatan-kecamatan tersebut menjadi salah satu prioritas utama dalam pengembangan jaringan irigasi di Kabupaten Pekalongan.
- (2) Aluvium Facies Gunung Api, terletak pada ketinggian antara 25 - 500 dpl. Struktur geologi ini meliputi daerah - daerah di Kecamatan Petungkriyono, Talun, Kandangserang, Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Kedungwuni; luas cakupan wilayahnya seluas 12.970,6250 Ha atau sekitar 14,45 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

Daerah ini merupakan lahan dengan kualitas yang baik bagi pengembangan pertanian karena memiliki sifat menyerap dan menampung air. Namun perlu diperhatikan dalam pengembangannya nanti tetap harus memperhatikan kelayakan lahannya.

2) Daerah Hasil Gunung Api Kwarter Tua

Daerah ini terletak pada daerah dengan ketinggian sekitar 500 meter dpl atau lebih. Struktur geologi ini terdapat di Kecamatan Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriono, Talun, Doro, Karanganyar, Kajen, Kesesi, dan Karanganyar; dengan luas cakupan wilayahnya sebesar 17.681,250 Ha atau sekitar 19,70 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Umumnya bersifat kurang subur, dengan kondisi topografi relatif kasar dimana pelapukan dari daerah ini mudah terbawa oleh hanyutan sungai yang melintasi kawasan tersebut yang berdampak pada penurunan tingkat kesuburan lahan. Karena sifatnya tersebut maka pengembangan di daerah ini diprioritaskan pada pengembangan kegiatan yang mengarah pada perlindungan tanah serta mengurangi dan mencegah kekritisian lahan dengan pengembangan kawasan lindung, hutan produksi terbatas atau hutan rakyat.

a) Daerah Miosen Facies Sedimen

Terdapat pada daerah dengan ketinggian lebih dari 500 m atau-pun lebih dari 1000 m dpl. Pada umumnya merupakan daerah dengan potensi kehutanan dengan total luasan mencapai 18.850,000 Ha atau sekitar 20,26 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan. Terletak di Kecamatan Kesesi, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriono, Karanganyar, Kajen dan sebagian kecil Kecamatan Kesesi. Untuk mendukung potensi tersebut maka pengembangan diarahkan pada pengembangan kegiatan perkebunan, hutan tanaman keras, hutan produksi dan hutan rakyat.

b) Daerah geologi lain

(1) Daerah Hasil Gunung Api

Terdapat di Kecamatan Kesesi, Paninggaran dengan luas keseluruhan mencapai 6.555,8333 Ha atau 7,30% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

(2) Daerah Hasil Gunung Api tak teruraikan

Pada umumnya daerah ini berupa batuan breksi, lava, lapili dan tupa. Umumnya batuan tersebut membentuk bukit-bukit tinggi yang tertutup dan berwarna abu-abu tua sampai coklat dan kuning kemerahan. Jenis lahan ini mencakup wilayah-wilayah di kecamatan Kandangserang, Paninggaran, Talun, Doro, Kajen, Kesesi, Wonopringgo dan Kedungwuni.

(3) Daerah Pra Tertier Sedimen

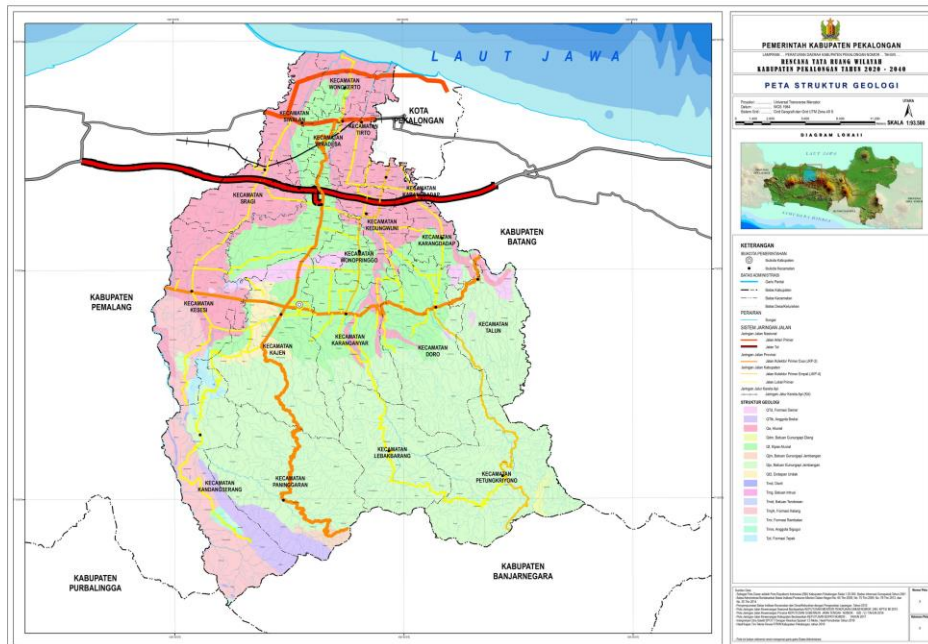
Terdapat di Kecamatan Petungkriono dengan luasan sekotak 2.020 Ha atau sekitar 2,25 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

(4) Daerah Pliosen Facies Sedimen

Terdapat di kecamatan kesesi dan Kajen dengan luasan sekitar 572 Ha atau 0,64 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

- (5) Daerah Oligosen
Terdapat di Kecamatan Kandangserang dan Paninggaran dengan luasan sekitar 262,500 Ha atau sekitar 0,29% dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.
- (6) Daerah Granit
Terdapat di Kecamatan Kesesi dengan luasan sekitar 150 ha atau sekitar 0,13 % dari luas keseluruhan Kabupaten Pekalongan.

Kondisi geologi lingkungan di Kabupaten Pekalongan secara umum dapat dijelaskan dalam gambar sebagai berikut:



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.4 Peta Struktur Geologi Kabupaten Pekalongan

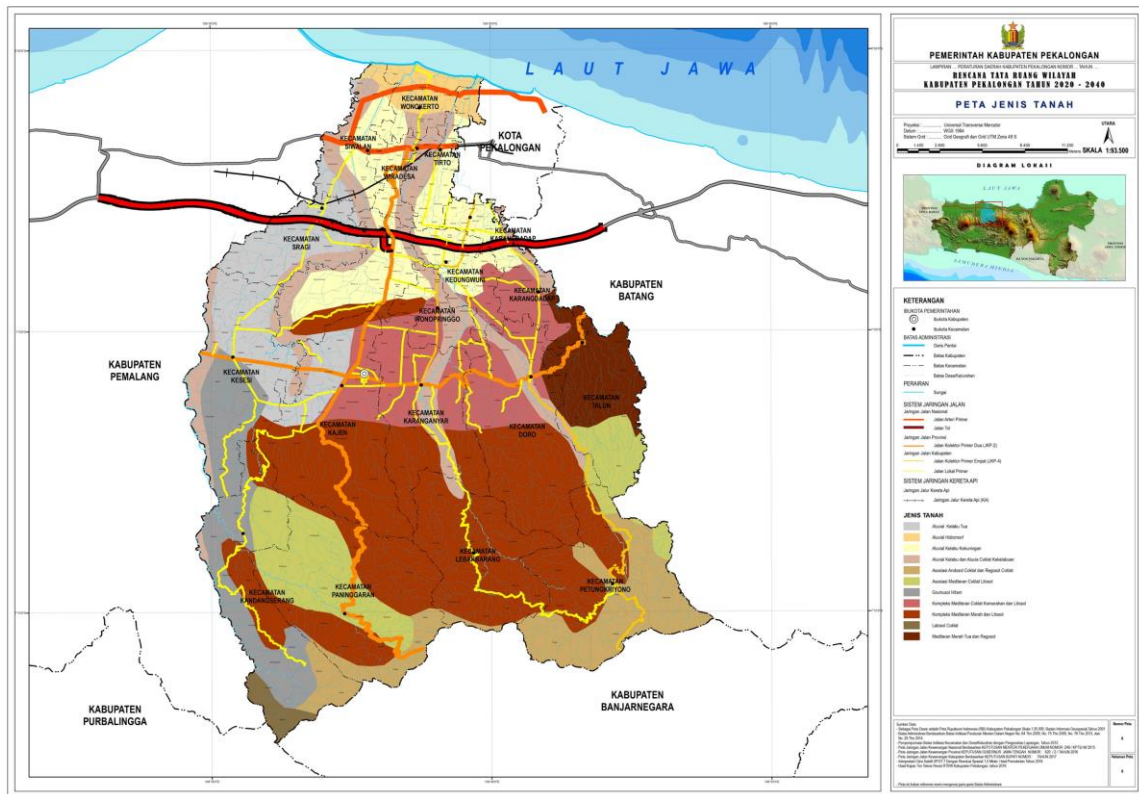
Sebaran jenis tanah di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Sebaran Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan

No.	Jenis Tanah	Kecamatan
1	latosol coklat	Kec. Paninggaran, Kandangserang, Doro
2	aluvial kelabu tua	Kec. Sragi dan Kedungwuni
3	kompleks gromosol mediteran	Kec. Kandangserang
4	latosol coklat	Kec. Paninggaran, Doro, Karanganyar, Kajen, Kesesi, Bojong, Wonopringgo, Kedungwuni
5	alluvial kelabu	Kec. Sragi, Kajen, Kesesi, Bojong, Buaran, Tirto, Wiradesa
6	alluvial coklat	Kec. Sragi, Bojong, Wonopringgi, Kedungwuni, Buaran, Tirto
7	alluvial hidromorf	Kec. Sragi, Wiradesa, Tirto
8	kompleks latosol merah kekuning-kuningan dan latosol coklat kemerahan	Kec. Kandangserang, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono
9	andosol coklat	Kec. Kandangserang, Paninggaran, Lebakbarang, Petungkriyono

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2020

Adapun peta jenis tanah dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Pekalongan

e. Hidrologi

1) Air Permukaan

Keadaan hidrologi ditunjukkan oleh keberadaan sungai, mata air, dan waduk yang terdapat di Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan secara hidrologi terbagi ke dalam 4 Daerah Aliran Sungai, yaitu DAS Kupang, DAS Sekarang, DAS Sragi dan DAS Genteng. Keempat daerah aliran sungai ini merupakan daerah aliran sungai utama yang mencakup beberapa aliran sungai yang ada di Kabupaten Pekalongan yang kesemuanya bermuara di Laut Jawa. Sungai-sungai dan anak sungai yang terdapat di Kabupaten Pekalongan, antara lain:

Tabel 2.4
Sungai dan Anak Sungai di Kabupaten Pekalongan

NAMA SUNGAI/ANAK SUNGAI	PANJANG (Km)	KECAMATAN YANG DILALUI
SUNGAI SRAGI (SWS) DPS= 439,15KM2	39.39	Kec. Bojong, Kasesi, Kajen, Sragi, siwalan
1. Anak Sungai Siwedus	3.10	Kajen
2. Anak Sungai Gutomo; sukoyoso; Kajen; Luwuk	14.21	Kajen, Karanganyar
3. Anak Sungai Tengah	2.75	Kajen
4. Anak Sungai Boro	6.82	Karanganyar, Bojong
5. Anak Sungai Camprang/ Menjangan	4.39	wonopringgo
6. Anak Sungai Mrican	12.00	Wiradesa, Wonokerto
7. Anak Sungai Paingan	19.70	Kandangserang, Kajen, Kasesi, Paninggaran
8. Anak Sungai winong	9.80	Sragi
9. Anak Sungai Gosek	9.88	Sragi, Kasesi
10. Anak Sungai Genteng	19.25	Kandangserang, Paninggaran, Kasesi

NAMA SUNGAI/ANAK SUNGAI	PANJANG (Km)	KECAMATAN YANG DILALUI
SUNGAI SENGGARANG (SWS) DPS= 401,65 KM2	51.50	Kec. Patungkriyono, Lebakbarang, Kedungwuni
		Karanganyar, wonopringgo, Bojong, Wiradesa, Tirto
1. Anak S. Sengkarang Atas Kiri (Sungai Pakis)	4.50	Patungkriyono
2. Anak S. Sengkarang Atas Kanan (S. Banteng)	3.25	Patungkriyono
3. Anak Sungai Kumenyeb	7.50	Lebakbarang
4. Anak Sungai Jurang Garung	1.25	Lebakbarang
5. Anak Sungai Pundutan	2.50	Lebakbarang
6. Anak Sungai Tanjung	1.50	Lebakbarang
7. Anak Sungai Dondong	5.00	Lebakbarang
8. Anak Sungai Parangan	2.50	Lebakbarang
9. Anak Sungai Jangkar	1.50	Lebakbarang
10. Anak Sungai Wadas	1.70	Lebakbarang
11. Anak Sungai Mendolo	1.40	Lebakbarang
12. Anak Sungai Kemuning/Wisnu	8.50	Lebakbarang
13. Anak Sungai Blimbing	12.40	Lebakbarang, Doro, Karanganyar
14. Anak Sungai welo	27.00	Patungkriyono, Doro, kedungwuni, Wonopringgo
15. Anak Sungai Ngalian	5.80	Tirto
16. Anak Sungai Meduri	2.50	Tirto
17. Anak Sungai Pucung	4.20	Tirto
SUNGAI KUPANG (PEKALONGAN) Lintas Batas		
1. Anak Sungai Sumilir	9.00	Talun
2. Anak Sungai Gawe	6.50	Buaran
Jumlah Total	301.29	

Sumber : DKPP; 2021

Sumber air di Kabupaten Pekalongan selain berasal dari sungai juga berasal dari beberapa daerah irigasi serta wadung/ embung/ lumbung air yang ada di Kabupaten Pekalongan. Sumber daya air permukaan tersebut sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian. Dari sumber air tersebut, terbagi dalam 4 daerah irigasi, yaitu:

- a) Daerah Irigasi Rancah;
- b) Daerah Irigasi Longsong;
- c) Daerah Irigasi Watesan; dan
- d) Daerah Irigasi Ontobogo.

Tabel 2.5
Daerah Irigasi di Kabupaten Pekalongan

No	Nama/Lokasi	Koordinat	Debit Air (l/dt)	Konservasi
1	D.I Rancah	07°07'18,9" LS	40	Irigasi dan Keperluan Rumah Tangga
	Desa Kandangserang	109°31'20,3" BT		
	Kec. Kandangserang			
2	D.I Longsong	07°07'7,6" LS	60	Irigasi dan Keperluan Rumah Tangga
	Desa Kandangserang	109°31'11,9" BT		
	Kec. Kandangserang			
3	D.I Watesan	07°07'3,6" LS	85	Irigasi dan Keperluan

No	Nama/Lokasi	Koordinat	Debit Air (l/dt)	Konservasi
				Rumah Tangga
	Desa Kandangserang	109°31'3,1" BT		
	Kec. Kandangserang			
4	D.I Ontobogo	07°04'26,1" LS	85	Irigasi dan Air Bersih (PAM)
	Desa Kandangserang	109°31'10,3" BT		
	Kec. Kandangserang			

Sumber : DKPP; 2021

Sebagai salah satu strategi dalam upaya konservasi sumber daya air yang ditujukan untuk meningkatkan, memulihkan dan mempertahankan daya dukung, daya tampung, dan fungsi daerah aliran sungai untuk menjamin ketersediaan air guna memenuhi kebutuhan yang berkelanjutan dilakukan melalui upaya pemeliharaan berbagai sumber daya air yaitu kawasan danau, waduk, rawa, situ/embung dan mata air sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Dalam upaya peningkatan pemeliharaan sumber air, salah satu strategi dalam pengawetan air yaitu dengan pembangunan waduk atau embung.

Tabel 2.6
Nama Lumbung/ Embung Di Kabupaten Pekalongan

No.	Nama/Lokasi	Luas Lahan	Pengelola
1	Lumbung Air Kampirutan Desa Kesesi Kec. Kesesi	± 2.00 Ha	BBWS Wilayah Pamali Comal
2	Lumbung air Kulu Desa Kulu Kec. Karanganyar	± 1,20 Ha	BBWS Wilayah Pamali Coma
3	Embung Tracas	± 1.50 Ha	DKPP Kab. Pekalongan

Sumber : DKPP; 2021

2) Air Bawah Tanah

Air tanah yang terdapat di Kabupaten Pekalongan meliputi air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal dapat diketahui keberadaannya melalui sumur-sumur penduduk sebagai pengguna utama, sedang air tanah dalam diidentifikasi melalui sumur-sumur artesis yang umumnya dimiliki oleh pengguna sektor industri.

Berdasarkan hasil penelitian dari Direktorat Geologi Bandung, potensi air tanah di Kabupaten Pekalongan adalah sebesar 475.757.000 m³ yang terdiri dari :

- Potensi air tanah dangkal diperkirakan dengan 57.082 sumur penduduk = 57.082x4.051 m³ = 231.239.182m³.
- Potensi air tanah dalam = 244.517.818 m³.

Tabel 2.7
Data Kondisi Sumber Mata Air Kabupaten Pekalongan

No	Nama	Debit	Mengairi	Lokasi Mata Air	
		(Vol/Waktu)	Lahan (Ha)	Desa	Kecamatan
1	Wedang atas	30.00	11.00	Tajur	Kandangserang
2	Wedang Bawah	22.00	25.00	Tajur	Kandangserang
3	Rancah	40.00	30.00	Kandangserang	Kandangserang
4	Longsong	60.00	80.00	Kandangserang	Kandangserang

No	Nama	Debit	Mengairi	Lokasi Mata Air	
		(Vol/Waktu)	Lahan (Ha)	Desa	Kecamatan
5	Watesan	85.00	100.00	Kandangserang	Kandangserang
6	Simende	-	125.00	Kandangserang	Kandangserang
7	Krobokan	-	55.00	Kandangserang	Kandangserang
8	Poh	25.00	33.00	Kandangserang	Kandangserang
9	Sumurup I	80.00	70.00	Kandangserang	Kandangserang
10	Sumurup II	40.00	-	Kandangserang	Kandangserang
11	Bubakan	50.00	-	Kandangserang	Kandangserang
12	Seruni (Winong)	30.50	6.00	Kandangserang	Kandangserang
13	Rancah I	-	110.00	Paninggaran	Paninggaran
14	Rancah II	-	25.00	Kaliombo	Paninggaran
15	Plumbon	-	60.00	Winduaji	Paninggaran
16	Bandingan	-	10.00	Bandingan	Paninggaran
17	Wangan Sabrang	-	98.00	Werdi	Paninggaran
18	Kepoh	-	38.00	Tanggerang	Paninggaran
19	Mejarum	30.00	35.00	Windurojo	Kesesi
20	Gersali	23.00	19.00	Windurojo	Kesesi
21	Sibendo	-	12.00	Gandarum	Kajen
22	Sidudo	-	40.00	Paninggaran	Paninggaran
23	Sinongko	-	52.00	Garungwiro	Kandangserang
24	Gondang	-	20.00	Mendolo	Lebakbarang
25	Suro	-	10.00	Gutomo	Karanganyar
26	Bandot	-	15.00	Yosorejo	Petungkriyono
27	Curug Gempong	-	13.00	Lebakbarang	Lebakbarang
28	Pupu/Pupah	-	110.00	Garungwiro	Kandangserang
29	Sidondang	-	63.00	Timbangsari	Lebakbarang
30	Garung	-	15.00	Garungwiro	Kandangserang
31	Klepu	-	13.00	Garungwiro	Kandangserang
32	Guci	-	25.00	Kutorembet	Lebakbarang
33	Pedawang	33.30	-	Pedawang	Karanganyar
34	Paseh/Beluk/Soga	23.00	-	Gutomo	Karanganyar
35	Ontobogo	40.00	10.00	Gutomo	Karanganyar
36	Gemistri	-	50.00	Sukoharjo	Kandangserang
37	Rowo Bantar	-	23.00	Tlogohendro	Petungkriyono
38	Gondang/ Glidigan	-	37.00	Tlogohendro	Petungkriyono
39	Tlogohendro	-	17.00	Tlogohendro	Petungkriyono
40	Mangunan	-	23.00	Tlogohendro	Petungkriyono
41	Simego	-	15.00	Simego	Petungkriyono
42	Rogojujo	-	20.00	Kasimpar	Petungkriyono
43	Sidoharjo	-	17.00	Sidoharjo	Doro
44	Pungangan	-	35.00	Pungangan	Doro
45	Rogoselo	-	10.00	Rogoselo	Doro
46	Bliugorejo	-	35.00	Bliugorejo	Doro
47	Kutosari	-	15.00	Kutosari	Doro
48	Kalirejo	-	35.00	Kalirejo	Talun
49	Banjarsari	-	36.00	Banjarsari	Talun
50	Kecapi	-	23.00	Krompeng	Talun
51	talun	-	63.00	Batursari	Talun

No	Nama	Debit	Mengairi	Lokasi Mata Air	
		(Vol/Waktu)	Lahan (Ha)	Desa	Kecamatan
52	Picis	-	48.00	Sengare	Talun
53	Sengare	-	92.00	Misoyi	Talun
54	Donowangun	-	90.00	-	Talun
55	Besuki	-	50.00	Paninggaran	Paninggaran
56	Gunung Damar	-	-	Bubak	Kandangserang
57	Banyu Mudal	80.00	440.00	Brengkolang	Kajen
58	Sido Sukmo	60.00	227.00	Dk. Sidosukmo Ds.Gutomo	Karanganyar
59	Sendang	30.00	-	Wangandowo	Bojong
60	Sumur watu	30.00	-	Sumur Jbl Bogo	Bojong
61	Pancuran	50.00	-	Kalipancur	Bojong
62	Santen	20.00	-	Kalipancur	Bojong
63	Grugak	30.00	29.00	Kalipancur	Bojong
Jumlah Total			2,758.00 Ha		

Sumber : DKPP; 2021

f. Klimatologi

Iklim Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kategori iklim tropis basah. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, geografi dan perputaran/pertemuan arus udara. Jumlah hari dan curah hujan selama setahun sangat bervariasi. Selama kurun waktu 2016-2020, jumlah hari hujan dan curah hujan paling banyak terjadi pada tahun 2017 dengan hari hujan sebanyak 150 hari dan curah hujan sebanyak 3.560 mm, sedangkan penurunan paling signifikan curah hujan terjadi pada tahun 2020 dengan hari hujan sebanyak 149 hari dan curah hujan sebanyak 737 mm.

Pada tahun 2020, Kabupaten Pekalongan mengalami rata-rata curah hujan 737 mm, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 192,8 mm. Untuk rata-rata hari hujan tahun 2020 adalah 15 hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 11 hari. Adapun hari hujan dan curah hujan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

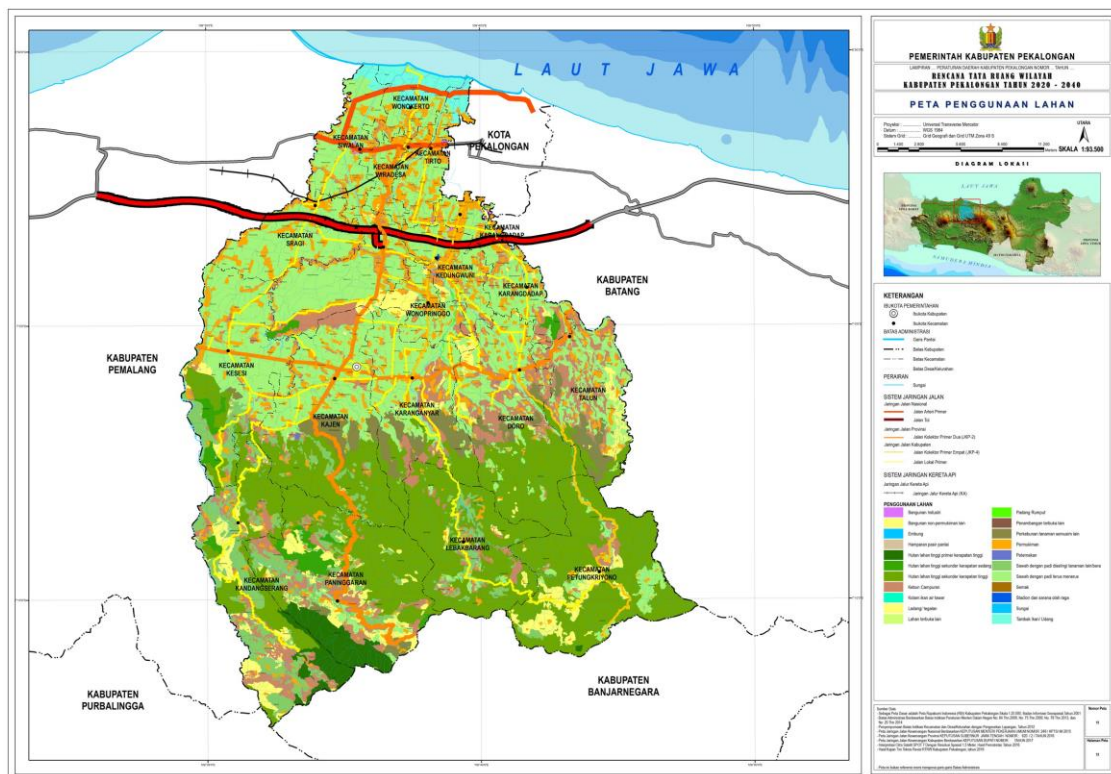
No	Kecamatan	Hari Hujan	Curah Hujan
1	Kandangserang	-	-
2	Paninggaran	-	-
3	Lebakbarang	-	-
4	Petungkriyono	-	-
5	Talun	-	-
6	Doro	-	-
	• Tapak Menjangan	188	896
	• Kutosari	168	724
7	Karanganyar	-	-
	• Karangsari	165	798
	• Karanggondang	143	913
8	Kajen	157	800
9	Kesesi	-	-
	• Gembro	150	699
	• Ponolawen	154	736
	• Brondong	153	587
10	Sragi		

No	Kecamatan	Hari Hujan	Curah Hujan
	• Sumub Kidul	134	589
	• Sragi	138	594
11	Siwalan	-	-
12	Bojong	119	741
13	Wonopringgo	-	-
14	Kedungwuni	-	-
15	Karangdadap	-	-
16	Buaran	-	-
17	Tirto	-	-
18	Wiradesa	113	762
19	Wonokerto	-	-
	Tahun 2020	149	737
	2019	108	1.928
	2018	113	2.412
	2017	150	2.735
	2016	126	3.560

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2020

g. Penggunaan lahan

Penggunaan lahan dapat diartikan sebagai aktivitas manusia terhadap lahan baik langsung maupun tidak langsung sehingga dapat merubah suatu fungsi lahan tersebut. Luas lahan sebesar 83615 Ha atau 836,15 Km2 memiliki perbandingan lahan pertanian dan hutan yang seimbang. Berdasarkan bentuk bentang lahan Kabupaten Pekalongan yang sedikit memiliki lahan perairan (*maritime*) namun juga memiliki daerah dataran tinggi. Berdasarkan data penggunaan lahan dan perubahannya dari tahun 2016 - 2019, tidak berubah cepat dalam perubahan lahan sawah menjadi lahan bukan sawah. Selengkapnya dapat dijelaskan dalam gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.6 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan

Pada gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa Luas total Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 adalah 83.615 Ha yang terdiri dari lahan sawah seluas 24.035,53 ha (28,75%) dan lahan bukan sawah seluas 59.579,47 Ha (71,25%). Luasan lahan sawah sebagian besar terdapat di Kecamatan Kesesi seluas 3.373,94 Ha, Kecamatan Kajen seluas 2.276,24 Ha, dan Kecamatan Sragi seluas 2.241,45 Ha. Untuk lahan bukan sawah dengan luasan terbesar terdapat di Kecamatan Paninggaran seluas 7.960 dan Kecamatan Petungkriyono seluas 7.142 Ha. Luasan wilayah yang paling luas di Kabupaten Pekalongan terdapat di Kecamatan Paninggaran seluas 8.814,03 Ha. Luas penggunaan lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Luas Penggunaan Lahan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2019

No.	Kecamatan	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah	Jumlah
1	Kandangserang	1.561,02	4.305,00	5.866,02
2	Paninggaran	854,03	7.960,00	8.814,03
3	Lebakbarang	675,85	5,357,00	6.032,85
4	Petungkriyono	450,45	7.142,00	7.592,45
5	Talun	1.377,47	4.460,47	5.837,94
6	Doro	1.809,88	5.223,30	7.033,18
7	Karanganyar	1.619,30	4.577,98	6.197,27
8	Kajen	2.276,24	5.220,31	7.496,55
9	Kesesi	3.373,94	3.613,98	6.987,93
10	Sragi	2.241,45	1.084,49	3.325,94
11	Siwalan	1.531,72	1.068,56	2.600,28
12	Bojong	2.147,67	1.819,44	3.967,10
13	Wonopringgo	603,87	1.348,40	1.952,26
14	Kedungwuni	900,25	1.507,00	2.407,25
15	Karangdadap	994,53	999,00	1.993,53
16	Buaran	340,11	614,45	954,56
17	Tirto	540,60	1.340,43	1.881,03
18	Wiradesa	464,14	799,68	1.263,81
19	Wonokerto	273,02	1.138,00	1.411,02
	Jumlah 2019	24.035,53	59.579,47	83.615,00
	2018	23.906,00	59.709,00	83.615,00
	2017	24.381,00	58.637,00	83.018,00
	2016	24.392,00	59.223,00	83.615,00

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2020

Luas penggunaan lahan sawah di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 adalah 24.035,53 Ha. Jenis sawah di Kabupaten Pekalongan meliputi sawah irigasi, sawah irigasi setengah teknis, sawah irigasi sederhana, sawah irigasi desa/non PU, dan sawah tadah hujan. Lahan sawah sebagian besar di Kabupaten Pekalongan adalah sawah irigasi seluas 14.699,05 Ha (61,16%).

Sawah irigasi di Kabupaten Pekalongan hampir terdapat di semua kecamatan kecuali di Kecamatan Kandangserang, Paninggaran, Lebakbarang, dan Petungkriyono. Luas sawah irigasi paling luas di Kecamatan Kesesi seluas 2.647,87 Ha dan Kecamatan Sragi seluas 2.236,11 Ha. Sawah irigasi setengah teknis tidak terdapat di semua kecamatan, paling luas terdapat di Kecamatan Talun seluas 1.126,13 Ha dan Kecamatan Kajen seluas 588,89 Ha. Luas sawah irigasi sederhana paling luas yaitu di Kecamatan Paninggaran seluas 564,36 Ha. Luas sawah irigasi desa/non PU paling luas terdapat di Kecamatan Kandangserang seluas 594,02 Ha

sedangkan untuk sawah tadah hujan paling luas terdapat di Kecamatan Kandangserang seluas 967,00 Ha.

Adapun luas lahan sawah menurut jenis pengairan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Luas Penggunaan Lahan Sawah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2019

No.	Kecamatan	Sawah Irigasi	Sawah Irigasi Setengah Teknis	Sawah Irigasi Sederhana	Sawah Irigasi Desa/Non PU	Sawah Tadah Hujan	Jumlah
1	Kandangserang	-	-	-	594,02	967,00	1.561,02
2	Paninggaran	-	-	564,36	51,67	238,00	854,03
3	Lebakbarang	-	67,02	184,69	95,13	329,00	675,85
4	Petungkriyono	-	-	234,45	-	216,00	450,45
5	Talun	33,00	1.126,13	218,34	-	-	1.377,47
6	Doro	958,38	343,63	144,12	339,76	24,00	1.809,88
7	Karanganyar	1.070,52	223,86	99,25	179,67	46,00	1.619,30
8	Kajen	1.245,60	588,89	170,75	10,00	261,00	2.276,24
9	Kesesi	2.647,87	272,13	163,10	13,84	277,00	3.373,84
10	Sragi	2.236,11	5,34	-	-	-	2.241,45
11	Siwalan	1.211,64	137,26	28,70	135,12	9,00	1.531,72
12	Bojong	2.026,40	70,27	-	-	51,00	2.147,67
13	Wonopringgo	451,88	76,53	-	60,46	15,00	603,87
14	Kedungwuni	818,14	27,06	12,00	42,05	1,00	900,25
15	Karangdadap	630,30	262,73	37,50	64,00	-	994,53
16	Buaran	276,11	-	-	-	64,00	340,11
17	Tirto	401,60	17,00	-	104,00	18,00	540,60
18	Wiradesa	414,47	9,67	-	-	40,00	464,14
19	Wonokerto	267,02	-	-	-	6,00	273,02
	Jumlah 2019	14.699,05	3.227,51	1.857,25	1.689,72	2.562,00	24.035,53
	2018	13.196,00	4.444,00	1.364,00	1.401,00	3.501,00	23.906,00
	2017	14.070,00	3.609,00	1.510,00	1.398,00	3.794,00	24.381,00
	2016	14.067,00	3.597,00	1.514,00	1.423,00	3.791,00	24.392,00

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2020

Sedangkan luas lahan bukan sawah Tahun 2019 seluas 59.579,47 ha. Lahan bukan sawah meliputi tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, hutan rakyat, tambak, kolam/empang, padang/Penggembalaan, sementara tak diusahakan, rumah/bangunan dan halaman sekitarnya dan hutan negara.

Kemudian tegal/kebun paling luas terdapat di Kecamatan Petungkriyono seluas 1.490 ha dan Kecamatan Kandangserang seluas 1.438 Ha. Lahan tegal/kebun tersebar di semua kecamatan. Untuk lahan ladang di Kabupaten Pekalongan tahun 2019 hanya terdapat di Kecamatan Paninggaran seluas 385 ha dan Kecamatan Kesesi seluas 6 ha. Perkebunan di Kabupaten Pekalongan tahun 2019 seluas 3.332 ha, yang terluas terdapat di Kecamatan Karanganyar seluas 1.114 ha. Lahan hutan rakyat di Kabupaten Pekalongan seluas 3.911 ha, yang terluas terdapat di Kecamatan Kandangserang seluas 768 ha. Sedangkan luas penggunaan lahan padang penggembalaan/rumput sebesar 2.060 ha dengan wilayah terluas di Kecamatan Talun sebesar 1.923 ha.

Lahan tambak terdapat di Kecamatan Wonokerto, Siwalan, dan Tirto dengan total luas 834 ha, yang terluas terdapat di Kecamatan Wonokerto seluas 458 ha. Lahan kolam/tebat/empang dengan total luas 163 ha, yang terluas di Kecamatan Doro seluas 100 ha. Untuk lahan rumah, bangunan dan halaman sekitarnya di Kabupaten Pekalongan memiliki total luas 11.987 ha, sebagian besar terdapat di Kecamatan Kedungwuni seluas 1.107 ha, Kecamatan Kesesi seluas 1.045 ha, Kecamatan Bojong seluas 1.031 ha, dan Kecamatan Kajen seluas 1.000 ha.

Adapun luas lahan bukan sawah menurut jenis pengairan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Luas Lahan Bukan Sawah Menurut Jenis Pengairan
di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2019

No.	Kecamatan	Tegal/Kebun	Ladang/Huma	Perkebunan	Hutan Rakyat	Tambak	Kolam/Tebat /Empang	Padang/Penggembalaan /rumput
1	Kandangserang	1.438,00	-	-	768,00	-	3,00	-
2	Paningsgaran	735,00	385,00	725,00	450,00	-	8,00	35,00
3	Lebakbarang	480,00	-	-	179,00	-	1,00	-
4	Petungkriyono	1.490,00	-	104,00	158,00	-	8,00	-
5	Talun	746,47	-	582,00	374,00	-	3,00	1.923,00
6	Doro	714,30	-	246,00	535,00	-	100,00	-
7	Karanganyar	783,98	-	1.114,00	61,00	-	4,00	-
8	Kajen	827,31	-	398,00	360,00	-	1,00	-
9	Kesesi	444,98	6,00	-	560,00	-	20,00	102,00
10	Sragi	70,49	-	-	-	-	-	-
11	Siwalan	174,56	-	8,00	-	150,00	-	-
12	Bojong	583,44	-	-	-	-	-	-
13	Wonopringgo	298,40	-	77,00	231,00	-	15,00	-
14	Kedungwuni	57,00	-	-	184,00	-	-	-
15	Karangdadap	264,00	-	-	20,00	-	-	-
16	Buaran	80,45	-	-	-	-	-	-
17	Tirto	143,43	-	78,00	31,00	226,00	-	-
18	Wiradesa	87,68	-	-	-	-	-	-
19	Wonokerto	270,00	-	-	-	458,00	-	-
	Jumlah 2019	9.689,47	391,00	3.332,00	3.911,00	834,00	163,00	2.060,00
	2018	9.819,00	391,00	3.322,00	3.911,00	834,00	163,00	2.060,00
	2017	9.716,00	391,00	3.255,00	3.655,00	834,00	163,00	2.069,00
	2016	9.843,00	385,00	3.379,00	3.400,00	813,00	64,00	152,00

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2020

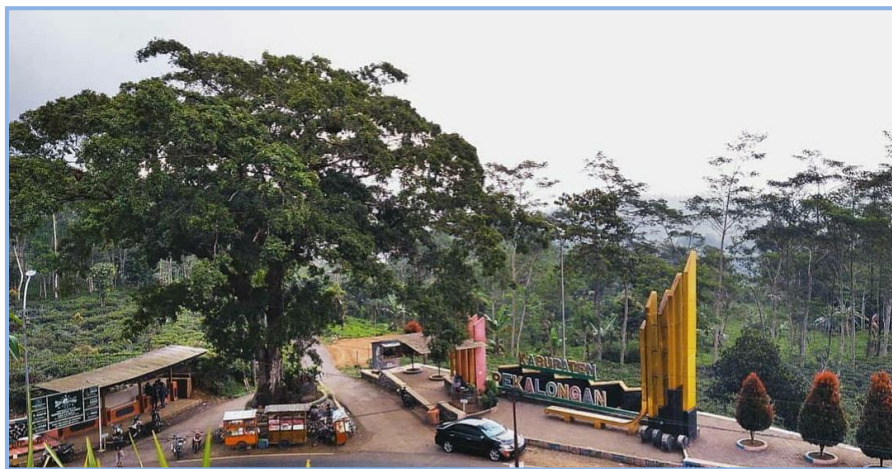
No.	Kecamatan	Sementara Tak Diusahakan	Lainnya	Rumah, Bangunan, dan Halaman Sekitarnya	Hutan Negara	Rawa-rawa tidak ditanami	Lain-Lain	Jumlah
1	Kandangserang	-	88,00	238,00	1.621,00	-	149,00	4.305,00
2	Paningsgaran	60,00	1,00	507,00	4.887,00	-	167,00	7.960,00
3	Lebakbarang	-	-	172,00	4.448,00	-	77,00	5.357,00
4	Petungkriyono	17,00	9,00	97,00	5.190,00	-	69,00	7.142,00
5	Talun	-	-	683,00	-	-	149,00	4.460,47
6	Doro	-	38,00	849,00	2.621,00	-	120,00	5.223,30
7	Karanganyar	-	48,00	879,00	1.595,00	-	93,00	4.577,98
8	Kajen	1,00	-	1.000,00	2.364,00	-	269,00	5.220,31
9	Kesesi	1,00	5,00	1.045,00	1.271,00	-	159,00	3.613,98
10	Sragi	-	1,00	868,00	-	-	145,00	1.084,49
11	Siwalan	-	170,00	398,00	-	-	168,00	1.068,56
12	Bojong	-	-	1.031,00	90,00	-	115,00	1.819,44
13	Wonopringgo	11,00	-	538,00	-	-	178,00	1.348,40
14	Kedungwuni	-	-	1.107,00	-	-	159,00	1.507,00
15	Karangdadap	-	-	423,00	192,00	-	100,00	999,00
16	Buaran	-	22,00	447,00	-	-	65,00	614,45
17	Tirto	39,00	-	733,00	-	-	90,00	1.340,43
18	Wiradesa	-	-	635,00	-	-	77,00	7,99
19	Wonokerto	-	73,00	337,00	-	-	-	1.138,00
	Jumlah 2019	129,00	455,00	11.987,00	24.279,00	-	2.349,00	59.579,47
	2018	129,00	455,00	11.987,00	24.279,00	-	2.349,00	59.709,00
	2017	123,00	597,00	11.907,00	24.279,00	20,00	2.225,00	59.234,00
	2016	96,00	630,00	12.077,00	26.219,00	20,00	2.145,00	59.223,00

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan 2020

2. Potensi Pengembangan Wilayah

Keterkaitan Kabupaten Pekalongan dengan kabupaten/kota lain antara lain interaksi yang cukup kuat terutama terjadi dengan Kota Pekalongan yang dihubungkan dengan jalur pantura dan Jalan Kedungwuni-Buaran-Kota Pekalongan. Interaksi yang terjadi berupa kegiatan perdagangan dan jasa, industri tekstil dan pelayanan seperti PDAM dan Telkom. Sedangkan dengan Kabupaten Batang dan Pemalang selain dihubungkan dengan jalur pantura juga dihubungkan dengan jalur tengah Batang-Kajen-Pemalang. Interaksi antara Kabupaten Pekalongan, Pemalang dan Batang akan meningkatkan aktivitas sepanjang jalur tersebut untuk Kabupaten Pekalongan terutama terjadi di Kecamatan Talun, Doro, Karanganyar, Kajen dan Kesesi. Perkembangan jalur ini diharapkan mampu mendukung pemerataan perkembangan di Kabupaten Pekalongan terutama di wilayah tengah dan selatan. Untuk Kabupaten Banjarnegara interaksi yang terjadi lebih mengarah pada aktivitas wisata, karena wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Wisata Dieng. Berdasarkan kondisi tersebut Jalur Pekalongan-Banjarnegara dapat dikembangkan sebagai pintu masuk menuju Kawasan Wisata Dieng. Dengan pengembangan ini diharapkan dapat memacu aktivitas wisata di Kabupaten Pekalongan.

Adapun Tugu Perbatasan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.7 Tugu Perbatasan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten Banjarnegara

Kawasan kerjasama antar kabupaten untuk lingkup Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pekalongan masuk dalam kawasan strategis Petanglong (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan ini dilalui oleh jalur Pantura yang menghubungkan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Potensi alam yang menonjol adalah potensi wisata alam berupa pantai dan goa-goa serta daerah perbukitan sebagai tempat agrowisata. Potensi lainnya adalah bidang perikanan. Adanya Sungai Comal dapat digunakan untuk irigasi sawah-sawah penduduk dan pengendalian banjir.

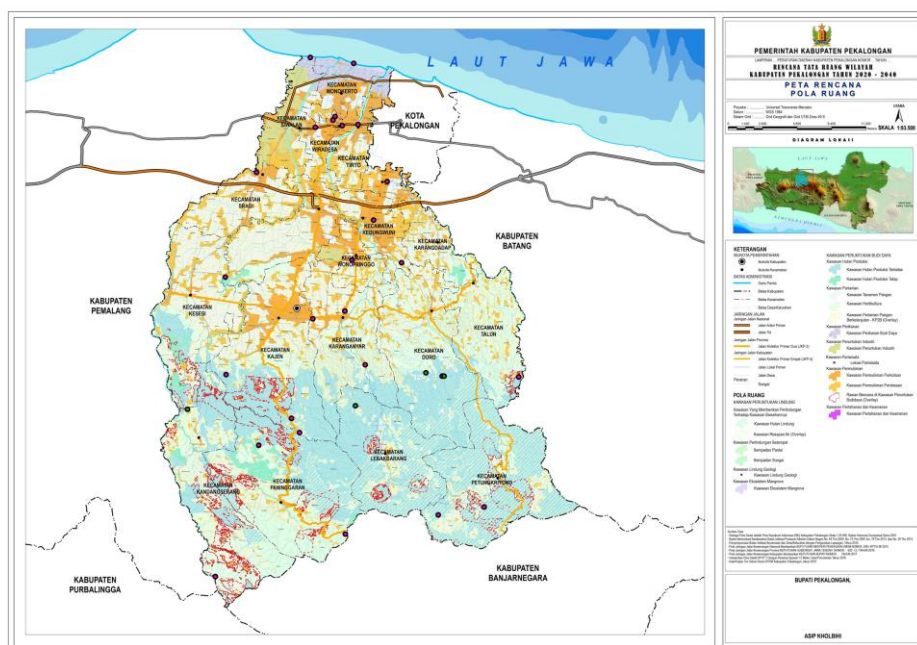
Dalam kawasan kerjasama tersebut terdapat tiga kota utama di Kabupaten Pekalongan yang termasuk dalam lingkup kerjasama yaitu Kecamatan Wiradesa, Kedungwuni dan Kajen. Dalam perkembangannya ketiga kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang perkembangannya sangat pesat di Kabupaten Pekalongan. Dalam mendukung perkembangan kerjasama antar kawasan tersebut maka pengembangan kegiatan transportasi yang dapat dilakukan antara lain :

- a. Pengembangan jaringan jalan, berupa: pembangunan jalan lingkaran Pemalang-Pekalongan (Lingkar utara Petanglong);
- b. Pengembangan sistem terminal regional sebagai titik transit pergerakan manusia di Propinsi Jawa Tengah berupa pemantapan fungsi terminal pada jalur regional Pantura. Dalam hal ini untuk Kabupaten Pekalongan pengembangannya di arahkan di Kota Wiradesa.

Sedangkan tujuan pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan dirumuskan sebagai pedoman dalam mengarahkan rencana pengembangannya. Berdasarkan kondisi dan permasalahan, tujuan dari pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut :

- a. mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah terutama perhubungan dan prasarana wilayah;
- b. menjamin pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan, dengan membuka wilayah yang secara geografis relatif terisolir dibandingkan dengan wilayah lainnya;
- c. menjaga dan melestarikan lingkungan dengan pemantapan kawasan yang berfungsi lindung dan pengarahannya pemanfaatan kawasan peruntukan budidaya;
- d. mengembangkan perekonomian berbasis potensi ekonomi lokal dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan, untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi wilayah;
- e. mengembangkan industri yang berwawasan lingkungan, didukung oleh pengembangan pertanian dan perikanan/kelautan yang mantap;
- f. mengembangkan sistem prasarana wilayah terpadu, sehingga tercipta suatu susunan interrelasi dan interkoneksi jaringan masing-masing komponen prasarana dan sarana wilayah; dan
- g. pengembangan kawasan-kawasan khusus yang perlu mendapat perhatian/ seperti kawasan yang perlu dikendalikan perkembangannya, maupun kawasan yang perlu dipacu perkembangannya.

Berikut diuraikan potensi pengembangan wilayah Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2020 tentang **RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040** mengenai Rencana Pola Ruang sesuai gambar dan penjelasan berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Pekalongan

a. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan peruntukan lindung meliputi :

1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya meliputi:

a) Kawasan hutan lindung

Kawasan hutan lindung berupa kawasan hutan yang dikelola oleh negara dan berfungsi lindung. Kawasan hutan lindung dengan luas 1.899,96 hektar berada di:

- (1) Kecamatan Kandangserang;
- (2) Kecamatan Paninggaran; dan
- (3) Kecamatan Petungkriyono

b) Kawasan resapan air

Kawasan resapan air berupa kawasan yang memiliki ketererangan diatas 45% dengan luas kurang lebih 13.923 hektar. Kawasan resapan air berada di:

- (1) Kecamatan Doro;
- (2) Kecamatan Kajen;
- (3) Kecamatan Kandangserang;
- (4) Kecamatan Lebakbarang;
- (5) Kecamatan Paninggaran;
- (6) Kecamatan Petungkriyono; dan
- (7) Kecamatan Talun

2) Kawasan Perlindungan Setempat

a) Sempadan pantai

Sempadan pantai ditetapkan 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Sempadan pantai dengan luas kurang lebih 70 hektar berada di :

- (1) Kecamatan Siwalan;
- (2) Kecamatan Tirto;
- (3) Kecamatan Wonokerto.

b) Sempadan sungai

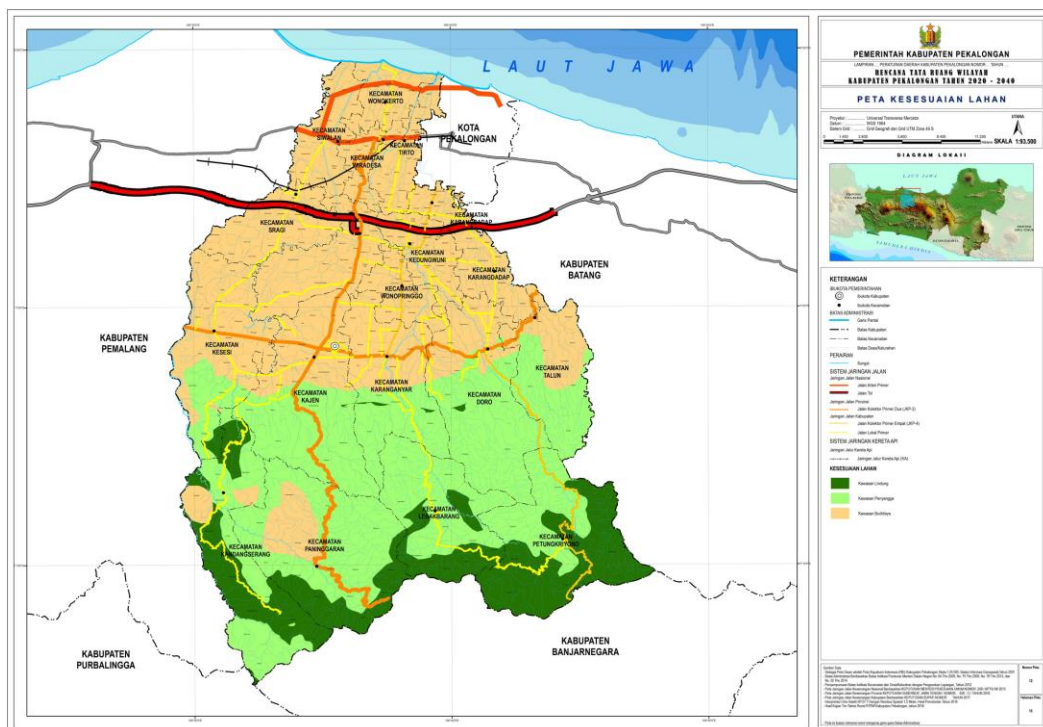
Sempadan sungai dengan luas kurang lebih 1.226 hektar meliputi :

- (1) Sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- (2) Sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- (3) Sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- (4) Sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan; dan
- (5) Sungai yang terpengaruh pasang air laut

Sempadan sungai meliputi :

- (1) Sungai Sragi beserta anak sungainya meliputi :
 - (a) Sungai Boro;
 - (b) Sungai Camprang/Menjangan;
 - (c) Sungai Genteng.
 - (d) Sungai Gosek;
 - (e) Sungai Gutomo, Sukoyoso, Kajen/Luwuk;
 - (f) Sungai Layangan;
 - (g) Sungai Paingan;
 - (h) Sungai Siwedus;
 - (i) Sungai Tengah; dan
 - (j) Sungai Winong.

- (2) Sungai Sengkarang (Pencongan) beserta anak sungainya meliputi :
- (a) Sungai Blimbing;
 - (b) Sungai Dondong;
 - (c) Sungai Gubangan;
 - (d) Sungai Jangkar;
 - (e) Sungai Jurang Garung;
 - (f) Sungai Kemuning / Wisnu;
 - (g) Sungai Kumenyeb;
 - (h) Sungai Meduri;
 - (i) Sungai Mendolo;
 - (j) Sungai Mrican.
 - (k) Sungai Ngalian;
 - (l) Sungai Parangan;
 - (m) Sungai Pucung;
 - (n) Sungai Punduran;
 - (o) Sungai Sengkarang Atas Kanan (Sungai Banteng);
 - (p) Sungai Sengkarang Atas Kiri (Sungai Pakis);
 - (q) Sungai Tanjung;
 - (r) Sungai Wadas; dan
 - (s) Sungai Welo.
- (3) Sungai Kupang (Pekalongan) beserta anak sungainya meliputi :
- (a) Sungai Gawe; dan
 - (b) Sungai Sumilir.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.9 Peta Kesesuaian Lahan Kabupaten Pekalongan

c) Kawasan sekitar danau atau waduk

Kawasan sekitar danau atau waduk meliputi :

(1) Sempadan waduk;

Sempadan waduk ditetapkan dengan kriteria daratan sepanjang tepian waduk dan bendungan yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk paling sedikit 100 meter diukur dari tepi saat pasang tertinggi ke arah darat.

(2) Sempadan embung; dan

(3) Sempadan fasilitas penanggulangan banjir dan rob

Sempadan embung dan fasilitas penanggulangan banjir dan rob sesuai peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan rekomendasi kontruksi.

3) Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung geologi meliputi kawasan cagar alam geologi yaitu berupa kawasan keunikan proses geologi meliputi Kecamatan Doro, Kecamatan Lebakbarang dan Kecamatan Kandangserang.

4) Kawasan Rawan Bencana Alam

Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Pekalongan meliputi:

a) Kawasan rawan banjir dan genangan, meliputi :

- (1) Kecamatan Bojong;
- (2) Kecamatan Buaran;
- (3) Kecamatan Kajen;
- (4) Kecamatan Karanganyar;
- (5) Kecamatan Karangdadap;
- (6) Kecamatan Kedungwuni;
- (7) Kecamatan Kesesi;
- (8) Kecamatan Siwalan;
- (9) Kecamatan Sragi;
- (10) Kecamatan Tirto;
- (11) Kecamatan Wiradesa;
- (12) Kecamatan Wonokerto; dan
- (13) Kecamatan Wonopringgo.

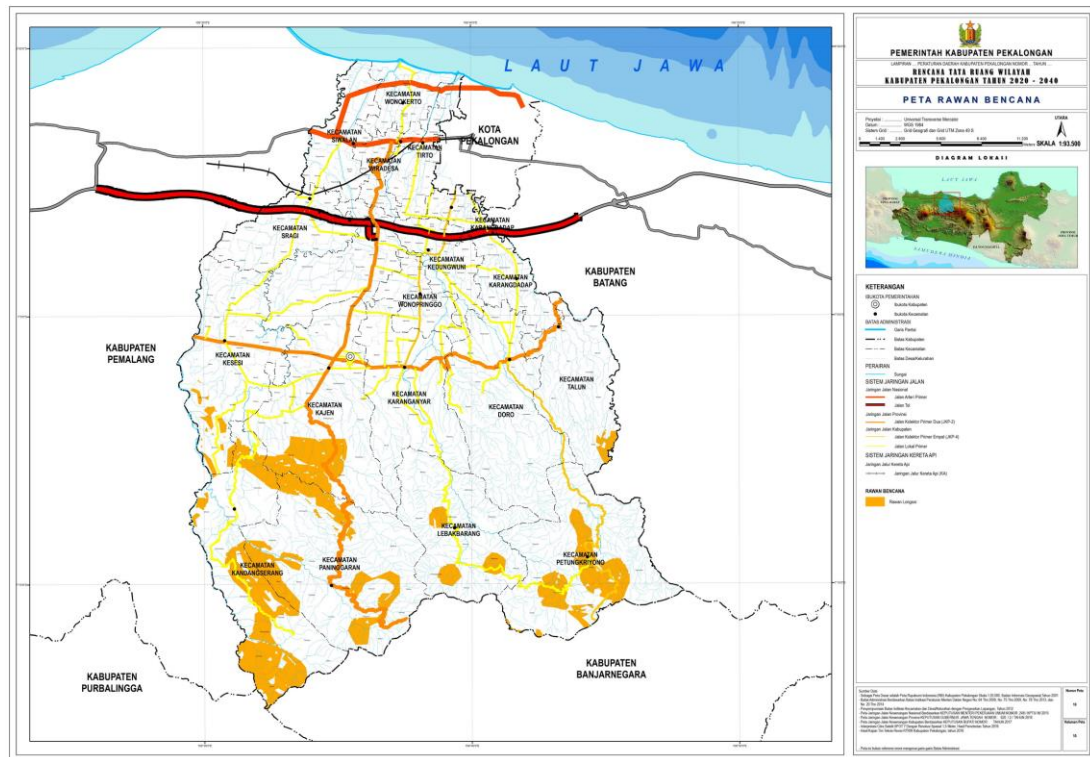
b) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi :

- (1) **Rawan longsor perbukitan, meliputi :**
 - (a) Kecamatan Doro;
 - (b) Kecamatan Kajen;
 - (c) Kecamatan Karanganyar;
 - (d) Kecamatan Kandangserang;
 - (e) Kecamatan Kesesi;
 - (f) Kecamatan Labakbarang;
 - (g) Kecamatan Paninggaran;
 - (h) Kecamatan Petungkriyono; dan
 - (i) Kecamatan Talun.
- (2) **Rawan longsor sungai, meliputi:**
 - (a) Kecamatan Karanganyar;
 - (b) Kecamatan Kedungwuni;
 - (c) Kecamatan Kesesi;
 - (d) Kecamatan Sragi; dan
 - (e) Kecamatan Wonopringgo

c) Kawasan rawan bencana lainnya

Kawasan rawan bencana lainnya berupa bencana alam, bencana non alam maupun bencana sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun peta rawan bencana Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.10 Peta Rawan Bencana Kabupaten Pekalongan

5) Kawasan Cagar Budaya

Kawasan cagar budaya dapat berupa benda, struktur, bangunan atau kawasan yang akan ditetapkan Bupati.

6) Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan ekosistem mangrove dengan luas kurang lebih 66 hektar meliputi:

a) Kawasan muara sungai (estuari), meliputi :

- (1) Kecamatan Siwalan;
- (2) Kecamatan Tirto; dan
- (3) Kecamatan Wonokerto.

b) Kawasan pantai berhutan mangrove. meliputi :

- (1) Kecamatan Siwalan;
- (2) Kecamatan Tirto; dan
- (3) Kecamatan Wonokerto

b. Kawasan Peruntukan Budidaya

Kawasan peruntukan budidaya meliputi :

1) Kawasan hutan produksi

Kawasan hutan produksi dengan luas \pm 26.264,72 hektar meliputi:

a) Kawasan hutan produksi terbatas

Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas kurang lebih 25.065,82 hektar meliputi :

- (1) Kecamatan Doro;
- (2) Kecamatan Kajen;
- (3) Kecamatan Kandangserang;
- (4) Kecamatan Karanganyar;
- (5) Kecamatan Kesesi;
- (6) Kecamatan Lebakbarang;
- (7) Kecamatan Panningaran;
- (8) Kecamatan Petungkriyono; dan
- (9) Kecamatan Talun

b) Kawasan hutan produksi tetap

Kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 1.198,9 hektar meliputi:

- (1) Kecamatan Bojong;
- (2) Kecamatan Kandangserang;
- (3) Kecamatan Karangdadap;
- (4) Kecamatan Kesesi;
- (5) Kecamatan Lebakbarang;
- (6) Kecamatan Panninggaran; dan
- (7) Kecamatan Talun.

2) Kawasan pertanian, meliputi :

a) Kawasan tanaman pangan

Kawasan tanaman pangan dengan luas ± 23.404 hektar meliputi :

- (1) Kecamatan Bojong;
- (2) Kecamatan Buaran;
- (3) Kecamatan Doro;
- (4) Kecamatan Kajen;
- (5) Kecamatan Kandangserang;
- (6) Kecamatan Karanganyar;
- (7) Kecamatan Karangdadap;
- (8) Kecamatan Kedungwuni;
- (9) Kecamatan Kesesi;
- (10) Kecamatan Lebakbarang;
- (11) Kecamatan Panninggaran;
- (12) Kecamatan Petungkriyono;
- (13) Kecamatan Petungkriyono;
- (14) Kecamatan Siwalan;
- (15) Kecamatan Sragi;
- (16) Kecamatan Talun;
- (17) Kecamatan Tirto;
- (18) Kecamatan Wiradesa;
- (19) Kecamatan Wonokerto; dan
- (20) Kecamatan Wonopringgo.

b) Kawasan hortikultura

Kawasan hortikultura dengan luas kurang lebih 17.249 hektar meliputi

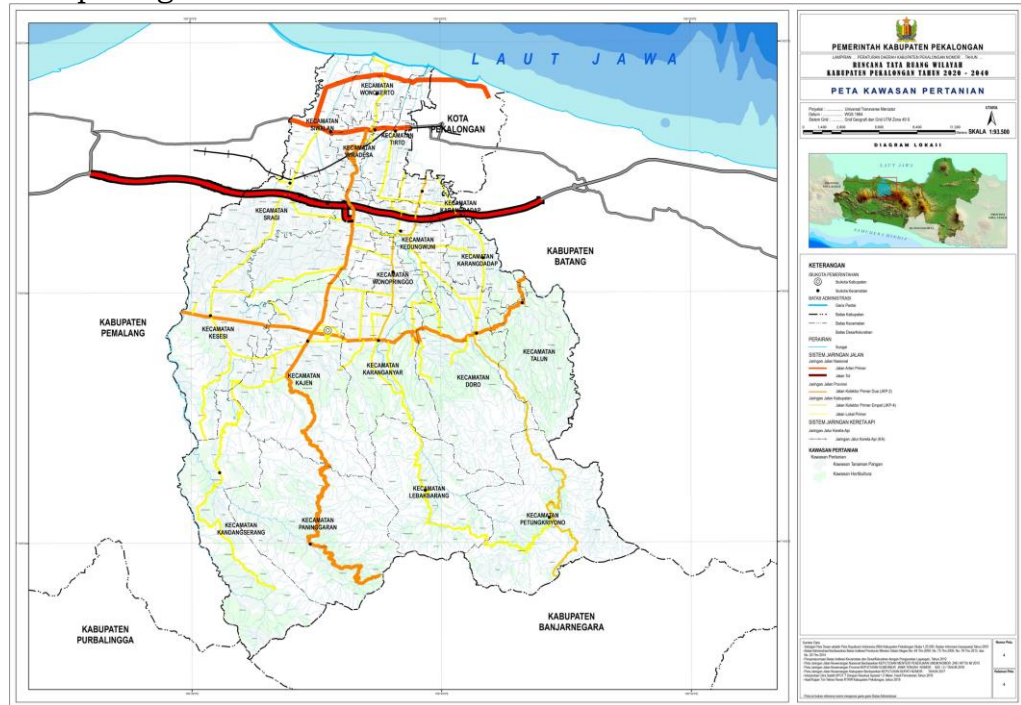
- (1) Kecamatan Bojong;
- (2) Kecamatan Buaran;
- (3) Kecamatan Doro;
- (4) Kecamatan Kajen;
- (5) Kecamatan Kandangserang;
- (6) Kecamatan Karanganyar;
- (7) Kecamatan Karangdadap;
- (8) Kecamatan Kedungwuni;
- (9) Kecamatan Kesesi;
- (10) Kecamatan Lebakbarang;
- (11) Kecamatan Panninggaran;
- (12) Kecamatan Petungkriyono;
- (13) Kecamatan Sragi;
- (14) Kecamatan Talun;
- (15) Kecamatan Tirto;
- (16) Kecamatan Wonokerto; dan
- (17) Kecamatan Wonopringgo.

c) Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan ± 22.211 hektar meliputi :

- (1) Lahan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 19.719 hektar; dan
- (2) Lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 2.492 hektar.

Selengkapnya peta kawasan pertanian Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.11 Peta Kawasan Pertanian Kabupaten Pekalongan

3) Kawasan perikanan

Kawasan perikanan berupa kawasan perikanan budidaya yang meliputi :

a) Budidaya tambak

Budidaya tambak dengan luas ± 1.120 hektar meliputi:

- (1) Kecamatan Siwalan;
- (2) Kecamatan Tirto; dan
- (3) Kecamatan Wonokerto

b) Budidaya air tawar

Budidaya air tawar meliputi seluruh wilayah kecamatan.

c) Fasilitas perikanan tangkap, meliputi :

- (1) Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai beserta sarana pelelangan ikan di Kecamatan Wonokerto;
- (2) Pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Pendaratan Ikan beserta sarana pelelangan ikan di Kecamatan Wonokerto; dan
- (3) Peningkatan sarana dan prasarana pendaratan kapal dan/atau perahu serta sarana dan prasarana TPI berada di Kecamatan Wonokerto.

d) Pengembangan pengolahan perikanan, meliputi:

- Kecamatan Karangdadap;
- (1) Kecamatan Kedungwuni;
 - (2) Kecamatan Siwalan;
 - (3) Kecamatan Sragi;
 - (4) Kecamatan Tirto;

- (5) Kecamatan Wonokerto; dan
- (6) Kecamatan lainnya.

4) Kawasan pertambangan dan energi

a) Kawasan pertambangan, meliputi :

(1) Kawasan pertambangan mineral logam

Kawasan pertambangan mineral logam meliputi wilayah usaha pertambangan yang berada di :

- (a) Kecamatan Doro;
- (b) Kecamatan Kandangserang;
- (c) Kecamatan Karanganyar;
- (d) Kecamatan Lebakbarang;
- (e) Kecamatan Paninggaran;
- (f) Kecamatan Petungkriyono;
- (g) Kecamatan Siwalan;
- (h) Kecamatan Talun;
- (i) Kecamatan Tirto; dan
- (j) Kecamatan Wonokerto.

(2) Kawasan pertambangan mineral bukan logam atau batuan

Kawasan pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi wilayah usaha pertambangan yang berada di :

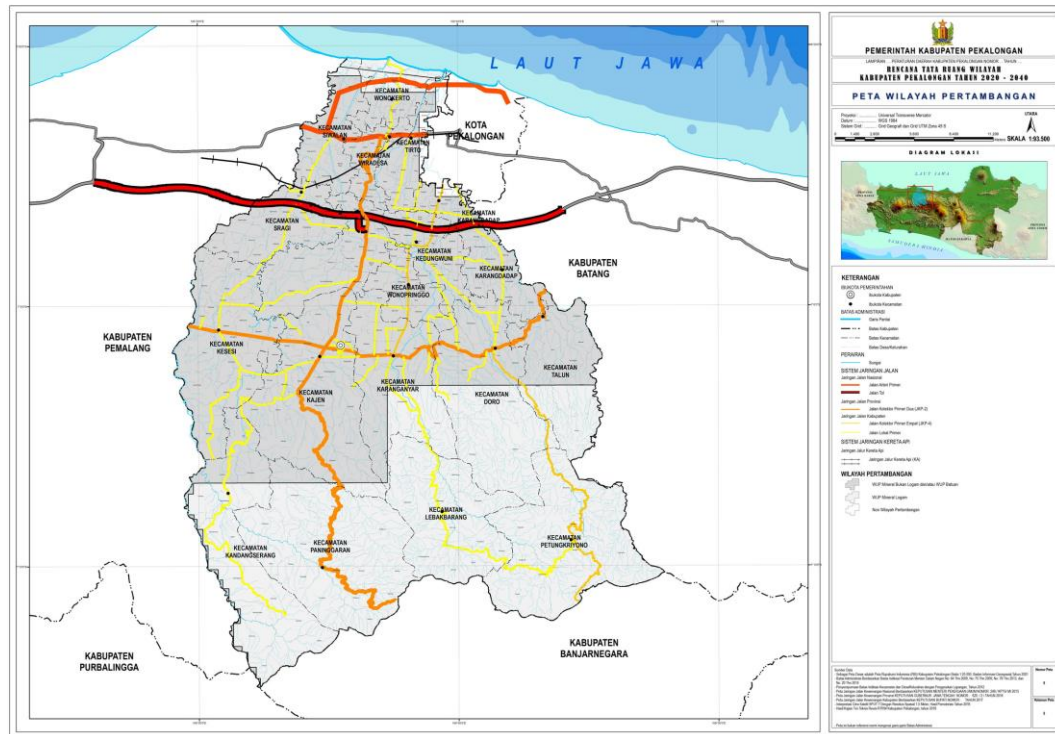
- (a) Kecamatan Bojong;
- (b) Kecamatan Buaran;
- (c) Kecamatan Doro;
- (d) Kecamatan Kajen;
- (e) Kecamatan Kandangserang;
- (f) Kecamatan Karanganyar;
- (g) Kecamatan Karangdadap;
- (h) Kecamatan Kedungwuni;
- (i) Kecamatan Kesesi;
- (j) Kecamatan Paninggaran;
- (k) Kecamatan Siwalan;
- (l) Kecamatan Sragi;
- (m) Kecamatan Talun;
- (n) Kecamatan Tirto;
- (o) Kecamatan Wiradesa;
- (p) Kecamatan Wonokerto; dan
- (q) Kecamatan Wonopringgo.

b) Kawasan panas bumi

Kawasan panas bumi berupa Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Dataran Tinggi Dieng, yang meliputi :

- (1) Kecamatan Lebakbarang; dan
- (2) Kecamatan Petungkriyono.

Selengkapnya peta wilayah pertambangan Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.12 Peta Wilayah Pertambangan Kabupaten Pekalongan

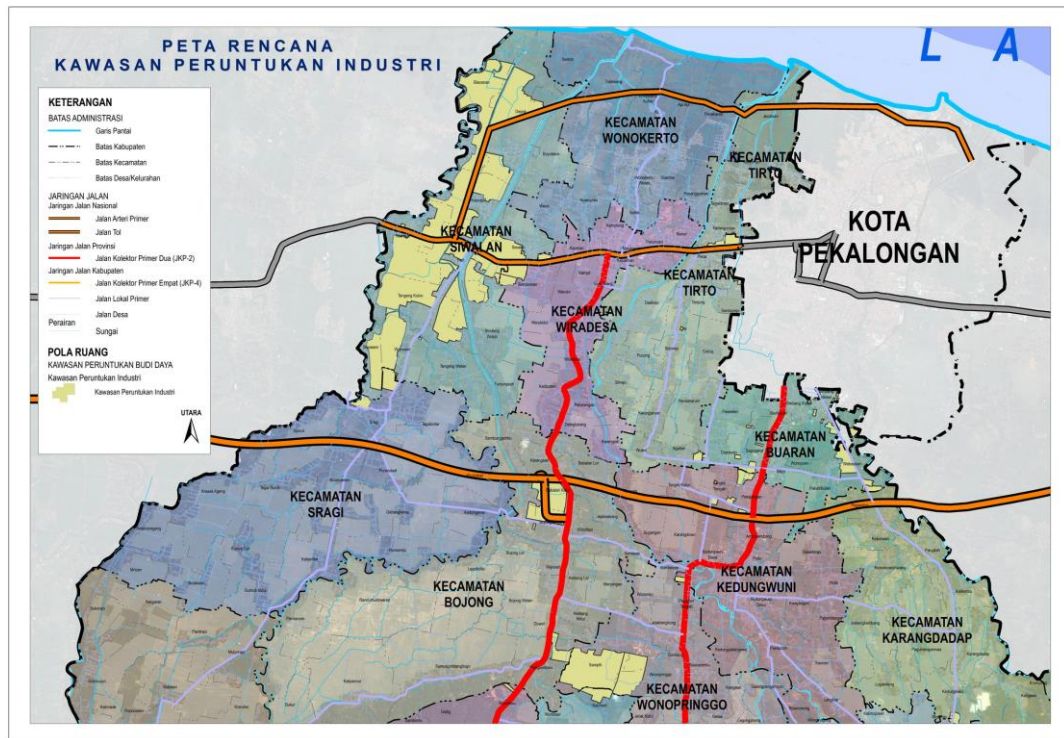
5) Kawasan peruntukan industri

Rencana kawasan peruntukan industri dengan luas \pm 1.533 hektar berada di :

- a) Kecamatan Bojong;
- b) Kecamatan Buaran;
- c) Kecamatan Doro;
- d) Kecamatan Kajen;
- e) Kecamatan Karanganyar;
- f) Kecamatan Karangdadap;
- g) Kecamatan Kedungwuni;
- h) Kecamatan Paninggaran;
- i) Kecamatan Siwalan;
- j) Kecamatan Sragi;
- k) Kecamatan Tirto;
- l) Kecamatan Wiradesa;
- m) Kecamatan Wonokerto; dan
- n) Kecamatan Wonopringgo.

Pengembangan kawasan industri berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri yang akan ditetapkan oleh pemerintah pusat. Perusahaan industri besar dan perusahaan industri menengah wajib berlokasi di kawasan peruntukan industri. Perusahaan industri kecil dan/atau mikro dapat berlokasi diluar kawasan peruntukan industri atau kawasan industri dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Sentra industri kecil menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan harus berlokasi di kawasan peruntukan industri.

Selengkapnya peta rencana peruntukkan industri Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.13 Peta Rencana Kawasan Peruntukan Industri Kabupaten Pekalongan

6) Kawasan pariwisata, meliputi :

a) Pariwisata alam, meliputi :

- (1) Curug Bidadari Desa Jolotigo Kecamatan Talun;
- (2) Curug Cinde Lebakbarang;
- (3) Curug Siwatang – Lambanggalun di Kecamatan Paninggaran;
- (4) Destinasi wisata Kalipahingan di Kecamatan Paninggaran;
- (5) Kabalong (Karanggondang, Limbangan dan Lolong) Karanganyar;
- (6) Kandangserang (Watu Ireng, Lambur, Kandangserang, Tajur);
- (7) Kawasan wisata Linggoasri;
- (8) Kawasan wisata Petungkriono;
- (9) Kebun teh di Desa Kaliboja Kecamatan Paninggaran;
- (10) Pantai Depok di Desa Depok Kecamatan Siwalan;
- (11) Pantai Kisik di Kecamatan Wonokerto;
- (12) Watubahan di Desa Lemah Abang Kecamatan Doro;
- (13) Wisata Air Sigesing Desa Watugajah Kecamatan Kesesi;
- (14) Wisata air sungai Pencongan; dan
- (15) Obyek Wisata Alam lainnya.

b) Pariwisata budaya

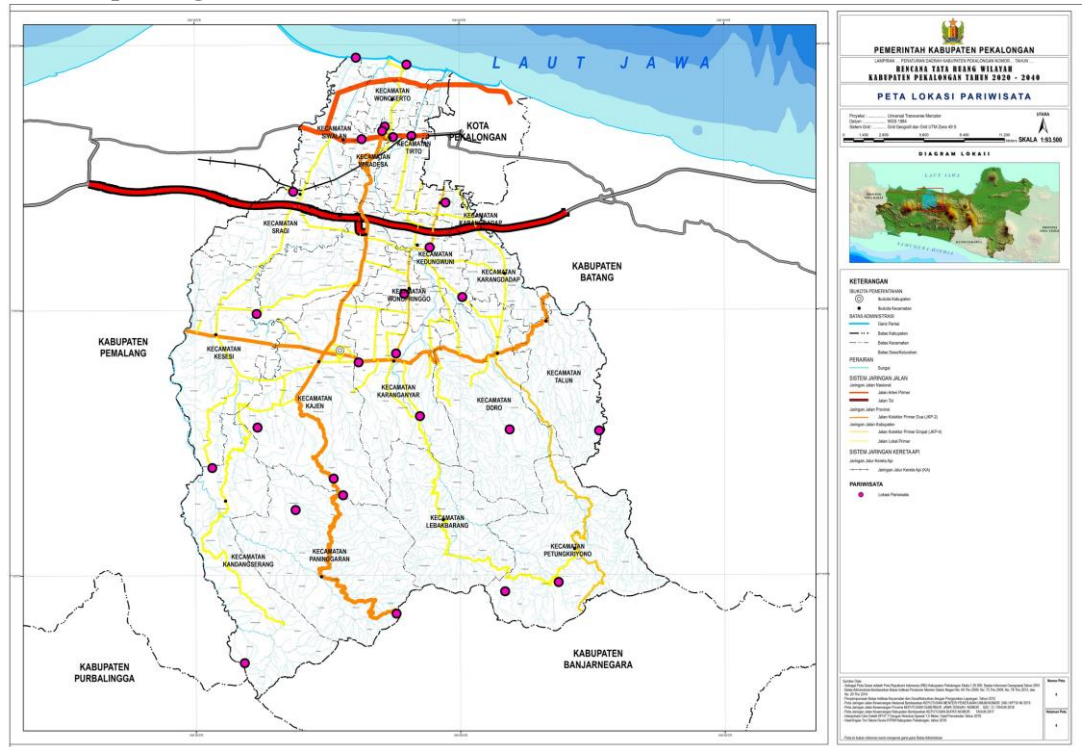
Pariwisata Budaya meliputi wisata kesenian, batik Pekalongan dan budaya lokal Kabupaten Pekalongan yang tersebar diseluruh wilayah daerah

c) Pariwisata buatan, meliputi :

- (1) International Batik Centre (IBC) di Kecamatan Wiradesa;
- (2) Kampung Batik di Desa Kemplong Kecamatan Wiradesa;
- (3) Kolam renang Banyu Biru di Kecamatan Wiradesa;
- (4) Kolam renang Kulu Asri di Kecamatan Karanganyar;
- (5) Kolam renang Langkap Indah di Kecamatan Kedungwuni;
- (6) Kolam renang Prima Graha Wisata di Kecamatan Karanganyar;
- (7) Pabrik Gula di Kecamatan Sragi;
- (8) Pasar Grosir Pantura di Kecamatan Wiradesa;

- (9) Sentra Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) Pakumbulan di Kecamatan Buaran;
- (10) Sentra bordir di Kecamatan Kedungwuni;
- (11) Sentra Kerajinan tempurung kelapa di Kecamatan Wonopringgo; dan
- (12) Wisata buatan lainnya.

Selengkapnya peta lokasi pariwisata Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.14 Peta Lokasi Pariwisata Kabupaten Pekalongan

7) Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman dengan luas ± 15.403 hektar meliputi:

a) Kawasan permukiman perkotaan

Kawasan permukiman perkotaan dengan luas ± 7.194 hektar meliputi:

- (1) Permukiman Perkotaan Kecamatan Bojong;
- (2) Permukiman Perkotaan Kecamatan Buaran;
- (3) Permukiman Perkotaan Kecamatan Doro;
- (4) Permukiman Perkotaan Kecamatan Kajen;
- (5) Permukiman Perkotaan Kecamatan Kandangserang;
- (6) Permukiman Perkotaan Kecamatan Karanganyar;
- (7) Permukiman Perkotaan Kecamatan Karangdadap;
- (8) Permukiman Perkotaan Kecamatan Kedungwuni;
- (9) Permukiman Perkotaan Kecamatan Kesesi;
- (10) Permukiman Perkotaan Kecamatan Lebakbarang;
- (11) Permukiman Perkotaan Kecamatan Paninggaran;
- (12) Permukiman Perkotaan Kecamatan Petungkriyono;
- (13) Permukiman Perkotaan Kecamatan Siwalan;
- (14) Permukiman Perkotaan Kecamatan Sragi;
- (15) Permukiman Perkotaan Kecamatan Talun;
- (16) Permukiman Perkotaan Kecamatan Tirto;
- (17) Permukiman Perkotaan Kecamatan Wiradesa;
- (18) Permukiman Perkotaan Kecamatan Wonokerto; dan
- (19) Permukiman Perkotaan Kecamatan Wonopringgo.

b) Kawasan permukiman perdesaan

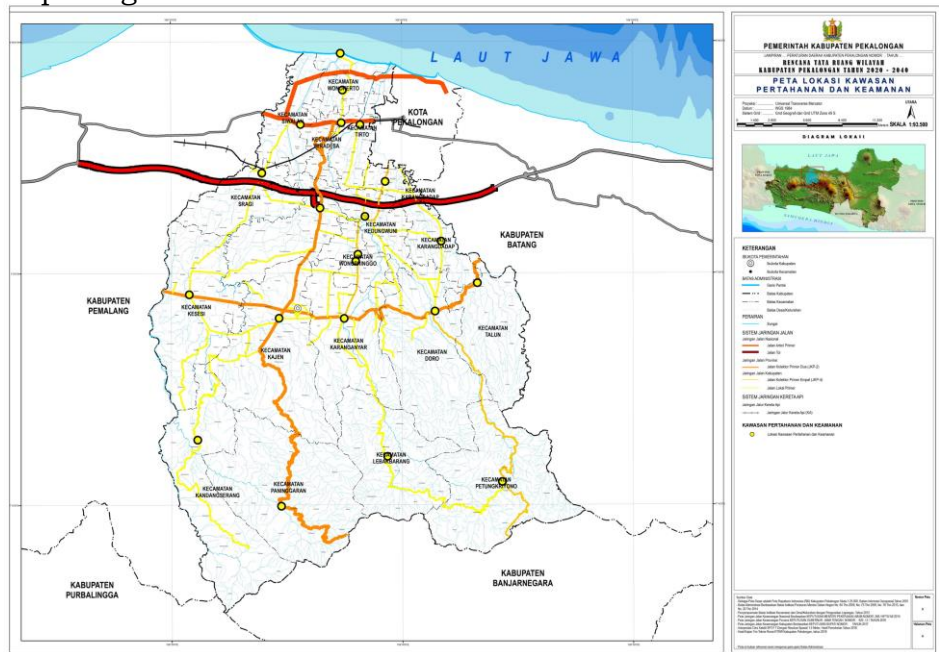
Kawasan permukiman perdesaan dengan luas kurang lebih 8.209 hektar berada di seluruh wilayah daerah diluar kawasan permukiman perkotaan

8) Kawasan Peruntukan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan dengan luas ± 15 hektar meliputi :

- a) Kantor militer yang meliputi:
 - (1) Kantor Komando Distrik Militer (Kodim) Kabupaten Pekalongan;
 - (2) Kantor Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan;
 - dan
 - (3) Pos Angkatan Laut di Kecamatan Wonokerto.
- b) Kesatuan militer berupa Batalyon Infanteri 407 Padmakusuma Kompi Senapan C di Kecamatan Wonopringgo.

Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan lebih lanjut dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : RTRW Kabupaten Pekalongan 2020 – 2040

Gambar 2.15 Peta Lokasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kabupaten Pekalongan

3. Rencana Struktur Ruang Wilayah

Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan, sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040, meliputi :

a. Sistem Perkotaan

Sistem perkotaan berupa rencana sistem pusat pelayanan, meliputi :

1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL)

PKL meliputi:

- a) Kawasan Perkotaan Kajen;
- b) Kawasan Perkotaan Wiradesa; dan
- c) Kawasan Perkotaan Kedungwuni.

2) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)

PPK meliputi:

- a) Kawasan Perkotaan Kecamatan Doro;

- b) Kawasan Perkotaan Kecamatan Kesesi;
- c) Kawasan Perkotaan Kecamatan Panninggaran;
- d) Kawasan Perkotaan Kecamatan Petungkriyono; dan
- e) Kawasan Perkotaan Kecamatan Sragi

3) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)

PPL meliputi:

- a) Desa Kandangserang Kecamatan Kandangserang;
- b) Desa Karangdadap Kecamatan Karangdadap;
- c) Desa Lebakbarang Kecamatan Lebakbarang; dan
- d) Desa Kalirejo Kecamatan Talun.

b. Sistem Jaringan Prasarana

Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana meliputi:

1) Sistem Jaringan Transportasi, meliputi :

a) Sistem Jaringan Transportasi Darat, meliputi :

(1) Sistem Jaringan Jalan, meliputi :

(a) Jaringan jalan nasional

(1) Jalan arteri primer, meliputi :

(a) Ruas batas Kota Pemalang - batas Kota Pekalongan yang melewati wilayah daerah berada di:

- (1) Kecamatan Siwalan;
- (2) Kecamatan Wiradesa; dan
- (3) Kecamatan Tirto.

(b) Jalan lingkar Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan (PETANGLONG) berada di:

- (1) Kecamatan Siwalan;
- (2) Kecamatan Wonokerto; dan
- (3) Kecamatan Tirto

(2) Jalan tol, meliputi :

(1) ruas jalan tol Pemalang – Batang yang melewati wilayah Daerah berada di:

- (a) Kecamatan Sragi;
- (b) Kecamatan Bojong;
- (c) Kecamatan Kedungwuni;
- (d) Kecamatan Buaran; dan
- (e) Kecamatan Karangdadap.

(1) Rencana jalan keluar dan masuk ruas jalan tol ruas jalan tol Pemalang – Batang berada di Kecamatan Bojong

(b) Jaringan jalan provinsi

Jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer 2 (JKP 2) meliputi:

- (1) Wiradesa - Kalibening/ Bts. Kab. Banjarnegara;
- (2) Kesesi/ Batas Kab Pemalang - Kebonagung; dan
- (3) Kebonagung – Wonotunggal/ Batas Kab. Batang

(c) Jaringan jalan kabupaten

Jaringan jalan kabupaten berupa jalan lokal primer, jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan yang ditetapkan oleh Bupati.

(d) Jalan desa

Jalan desa berupa rencana peningkatan dan pengembangan prasarana jalan perdesaan di seluruh wilayah kecamatan.

(e) Jalan khusus

Jalan khusus berupa pengembangan jalan dan fasilitasnya dari dan menuju:

- (1) kawasan industri;
- (2) kawasan pertambangan;
- (3) kawasan wisata; dan
- (4) kawasan lainnya

(f) Terminal penumpang, meliputi :

- (1) Terminal tipe B berada di Kecamatan Kajen;
- (2) Terminal tipe C berada di Kecamatan Wiradesa;
- (3) Terminal tipe C berada di Kecamatan Kedungwuni;
- (4) Terminal tipe C berada di Kecamatan Doro;
- (5) Terminal tipe C berada di Kecamatan Kesesi;
- (6) Terminal tipe C berada di Kecamatan Sragi;
- (7) Terminal tipe C berada di Kecamatan Karanganyar;
- (8) Terminal tipe C berada di Kecamatan Lebakbarang;
- (9) Terminal tipe C berada di Kecamatan Petungkriyono;
- (10) Terminal tipe C berada di Kecamatan Kandangserang; dan
- (11) Terminal tipe C berada di Kecamatan Paninggaran.

(g) Terminal barang

Terminal barang berupa pembangunan dan peningkatan prasarana bongkar muat barang berada di :

- (1) Kecamatan Siwalan;
- (2) Kecamatan Sragi; dan
- (3) Kecamatan Wiradesa

(h) Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal

Pengembangan prasarana dan sarana angkutan umum massal berupa pengembangan angkutan bus perkotaan yang menghubungkan Kajen – Wiradesa – Pekalongan dan Kajen – Kedungwuni – Pekalongan (Kawasan Petanglong)

(2) Sistem jaringan kereta api, meliputi :

(a) jaringan jalur kereta api; meliputi :

(1) Jaringan jalur kereta api umum, meliputi :

(a) Jaringan jalur kereta api antarkota, meliputi :

- jalur kereta api cepat Jakarta – Surabaya;
- jalur Utara menghubungkan Jakarta – Semarang – Surabaya;
- kereta api regional Semarang – Tegal – Brebes; dan
- peningkatan kecepatan kereta api koridor Jakarta – Surabaya.

(b) Jaringan jalur kereta api perkotaan

Jaringan jalur kereta api perkotaan berupa jalur Petanglong yang menghubungkan Pekalongan – Kedungwuni – Kajen dan/atau Pekalongan – Wiradesa– Kajen sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Jaringan jalur kereta api khusus

Jaringan jalur kereta api khusus dari dan menuju :

- (a) kawasan industri;
- (b) kawasan wisata; dan
- (c) kawasan lainnya.

- (b) Stasiun kereta api**, meliputi :
- (1) Stasiun penumpang**
Stasiun penumpang berupa Stasiun Sragi di Kecamatan Sragi.
 - (2) Stasiun barang**
Stasiun barang sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.
- b) Sistem Jaringan Transportasi Laut**, meliputi :
- (1) Pelabuhan umum**
Pelabuhan umum berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal di Kecamatan Wonokerto.
 - (2) Pelabuhan khusus/ terminal khusus**
Pelabuhan khusus/terminal khusus dilaksanakan sesuai hasil studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelabuhan perikanan**
Pelabuhan perikanan berada di Kecamatan Wonokerto meliputi :
 - (a) Pelabuhan Perikanan Jambean; dan
 - (b) Pelabuhan Perikanan Wonokerto.
 - (4) Alur pelayaran**
Alur pelayaran berupa alur-pelayaran keluar masuk pelabuhan yang berada di Kecamatan Wonokerto.
- c) Sistem Jaringan Transportasi Udara**, meliputi :
- (1) Rencana pembangunan dan pengembangan landasan helikopter (*helipad*) sesuai kebutuhan di kawasan perkotaan;
 - (2) Rencana pembangunan dan pengembangan bandar udara sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - (3) Rencana pengembangan sarana dan prasarana transportasi udara lainnya sesuai perkembangan teknologi berdasarkan hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sistem Jaringan Energi**, meliputi :
- a) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi**
Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi berupa rencana sistem jaringan prasarana pipa gas. Rencana sistem jaringan prasarana pipa gas merupakan pengembangan jaringan pipa gas Cirebon – Semarang– Bangkalan oleh Pemerintah yang melalui Kecamatan Siwalan dan/atau Kecamatan Sragi – Kecamatan Wiradesa – Kecamatan Tirto.
 - b) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan**, meliputi :
 - (1) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya**, meliputi :
 - (a) Pengembangan energi mikrohidro dan minihidro berada di :
 - (1) Kecamatan Doro;
 - (2) Kecamatan Kajen;
 - (3) Kecamatan Kandangserang;
 - (4) Kecamatan Karanganyar;
 - (5) Kecamatan Kesesi;
 - (6) Kecamatan Lebakbarang;
 - (7) Kecamatan Panninggaran;
 - (8) Kecamatan Petungkriyono;
 - (9) Kecamatan Talun; dan

- (10) Kecamatan lain yang memenuhi syarat berdasarkan hasil studi kelayakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pengembangan energi surya di seluruh wilayah daerah;
- (c) Pengembangan energi angin di seluruh wilayah daerah; dan
- (d) Rencana pengembangan energi alternatif dengan pemanfaatan sumber daya terbarukan diseluruh wilayah daerah.
- (2) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, meliputi :**
- (a) jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi :**
- (1) jaringan SUTET, melalui:**
- (a) Kecamatan Sragi – Kecamatan Bojong – Kecamatan Kedungwuni – Kecamatan Buaran – Kecamatan Karangdadap; dan
- (b) Kecamatan Kesesi – Kecamatan Sragi – Kecamatan Bojong – Kecamatan Wonopringgo – Kecamatan Kedungwuni dan Kecamatan Karangdadap.
- (2) Jaringan SUTT** melalui Kecamatan Sragi – Kecamatan Siwalan – Kecamatan Wiradesa – Kecamatan Tirto.
- (b) Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi :**
- (1) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) di seluruh daerah; dan
- (2) Pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) dan Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) di seluruh daerah.
- (c) Rencana gardu induk** berada di Kecamatan Siwalan dan/atau kecamatan lain sesuai hasil studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (d) Rencana pembangunan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) daya cepat/fast charging** di kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan di seluruh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Sistem Jaringan Telekomunikasi, meliputi :**
- a) Jaringan tetap, meliputi :**
- (1) Pengembangan sistem prasarana jaringan kabel telekomunikasi
Pengembangan sistem prasarana jaringan kabel telekomunikasi direncanakan sudah melayani seluruh ibukota Kecamatan.
- (2) Pembangunan saluran kabel telekomunikasi.
Pembangunan saluran kabel telekomunikasi direncanakan diseluruh wilayah daerah. Pembangunan kabel telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b) Jaringan bergerak, meliputi :**
- (1) Jaringan bergerak seluler, meliputi :**
- (a) pengembangan cakupan dan kualitas layanan dilakukan melalui pengaturan lokasi dan ketentuan teknis layanan jaringan nirkabel; dan
- (b) pembangunan menara telekomunikasi (menara BTS) mengarahkan penataan dan pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **Jaringan bergerak satelit** berupa pengembangan jaringan layanan internet pada fasilitas umum.

4) Sistem Jaringan Sumber Daya Air, meliputi :

a) Sumber air

Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air merupakan bagian dari pengelolaan sumber daya air WS Pemali-Comal. Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air disinkronkan dengan pola dan rencana PSDA WS Pemali-Comal. Sumber air meliputi :

(1) Sumber air permukaan, meliputi :

(a) Sungai;

Sungai pada wilayah sungai meliputi :

- (1) DAS Comal;
- (2) DAS Kupang;
- (3) DAS Sengkarang;
- (4) DAS Sragi Baru; dan
- (5) DAS Sragi Lama

(b) Mata air, berada di

- (1) Kecamatan Bojong;
- (2) Kecamatan Doro;
- (3) Kecamatan Kajen;
- (4) Kecamatan Kandangserang;
- (5) Kecamatan Karanganyar;
- (6) Kecamatan Kesesi;
- (7) Kecamatan Lebakbarang;
- (8) Kecamatan Paninggaran;
- (9) Kecamatan Petungkriyono; dan
- (10) Kecamatan Talun

(c) Tampungan air alami, dan

(d) Tampungan air buatan, meliputi :

(1) Tampungan air buatan berupa embung, meliputi :

- (a) Embung Bangunadi di Kecamatan Doro;
- (b) Embung Benteng-Sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan;
- (c) Embung Brondong di Kecamatan Kesesi;
- (d) Embung Buangan Buntu di Kecamatan Kesesi;
- (e) Embung Jogoloyo di Kecamatan Talun;
- (f) Embung Kalijoyo di Kecamatan Kajen;
- (g) Embung Karangmoncol di Kecamatan Kesesi;
- (h) Embung Karangmulyo di Kecamatan Kesesi;
- (i) Embung Kulu di Kecamatan Karanganyar;
- (j) Embung Limbangan di Kecamatan Karanganyar;
- (k) Embung Pamutih di Kecamatan Kajen;
- (l) Embung Pododadi di Kecamatan Karanganyar;
- (m) Embung Semampir di Kecamatan Kesesi;
- (n) Embung Siangkrenng di Kecamatan Karanganyar;
- (o) Embung Sikedok di Kecamatan Talun;
- (p) Embung Sudikampir di Kecamatan Karanganyar;
- (q) Embung Sumilir di Kecamatan Talun;
- (r) Embung Wangandowo di Kecamatan Bojong; dan
- (s) Embung Wisnu di Kecamatan Karanganyar.

(2) Tampungan air buatan berupa waduk berupa rencana pembangunan waduk di :

- (a) Kecamatan Kandangserang,
- (b) Kecamatan Paninggaran,
- (c) Kecamatan Lebakbarang,
- (d) Kecamatan Petungkriyono,
- (e) Kecamatan Doro,
- (f) Kecamatan Talun,
- (g) Kecamatan Kajen; dan
- (h) Kecamatan Kesesi sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan

(2) Sumber air tanah pada cekungan air tanah (CAT)

Sumber air tanah pada cekungan air tanah (CAT) berupa Cekungan Air Tanah Pekalongan – Pemasang.

b) Prasarana sumber daya air, meliputi :

(1) Sistem jaringan irigasi, meliputi :

(a) Sistem Jaringan Irigasi Primer, yang meliputi :

- (1) Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Pusat yang berada di :
 - (a) Daerah Irigasi Kaliwadas;
 - (b) Daerah Irigasi Pesantren Kletak;
 - (c) Daerah Irigasi Kupang Krompeng; dan
 - (d) Daerah Irigasi Sragi.
- (2) Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi meliputi:
 - (a) Daerah Irigasi Asem Siketek/Kesetu;
 - (b) Daerah Irigasi Padurekso;
 - (c) Daerah Irigasi Sudikampir; dan
 - (d) Daerah Irigasi Tapak Menjangan.
- (3) Daerah irigasi kewenangan Pemerintah Daerah meliputi 339 daerah irigasi.

(b) Sistem Jaringan Irigasi Sekunder dan Tersier berada di seluruh wilayah daerah

(2) sistem jaringan pengendalian banjir, berupa : sistem pengendalian daya rusak air meliputi :

- (a) Pembangunan tanggul dan long storage di Kecamatan Siwalan, Kecamatan Wonokerto, dan Kecamatan Tirto;
- (b) Perbaikan teknis prasarana drainase dengan cara normalisasi saluran, rehabilitasi saluran, penambahan saluran baru, dan pembangunan bangunan-bangunan dan bangunan penunjang prasarana drainase;
- (c) Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase wilayah kabupaten dan rencana penanganan kawasan rawan banjir;
- (d) Pengendalian Banjir Sistem Sungai Kupang Kabupaten Pekalongan;
- (e) Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sragi Lama dan Sragi Baru Kabupaten Pekalongan;
- (f) Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang Kabupaten Pekalongan; dan
- (g) Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob Kabupaten Pekalongan.

(3) Jaringan air baku untuk air bersih, meliputi :

- (a) Pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air, meliputi :

- (1) Kecamatan Bojong;
 - (2) Kecamatan Doro;
 - (3) Kecamatan Kajen;
 - (4) Kecamatan Kandangserang;
 - (5) Kecamatan Karanganyar;
 - (6) Kecamatan Kesesi;
 - (7) Kecamatan Lebakbarang;
 - (8) Kecamatan Panninggaran;
 - (9) Kecamatan Petungkriyono; dan
 - (10) Kecamatan Talun.
- (b) Pengendalian penggunaan air tanah dalam meliputi :
- (1) Kecamatan Bojong;
 - (2) Kecamatan Buaran;
 - (3) Kecamatan Kedungwuni;
 - (4) Kecamatan Siwalan;
 - (5) Kecamatan Sragi;
 - (6) Kecamatan Tirto;
 - (7) Kecamatan Wiradesa;
 - (8) Kecamatan Wonokerto; dan
 - (9) Kecamatan Wonopringgo.
- (c) Pengawetan air melalui pengembangan fasilitas resapan air meliputi:
- (1) Kecamatan Bojong;
 - (2) Kecamatan Doro;
 - (3) Kecamatan Kajen;
 - (4) Kecamatan Kandangserang;
 - (5) Kecamatan Karanganyar;
 - (6) Kecamatan Karangdadap;
 - (7) Kecamatan Kesesi;
 - (8) Kecamatan Lebakbarang;
 - (9) Kecamatan Panninggaran;
 - (10) Kecamatan Petungkriyono; dan
 - (11) Kecamatan Talun.
- (d) Pemanfaatan air hujan melalui teknologi pemanenan air hujan (*rainharvesting*) di seluruh wilayah Daerah

(4) Jaringan air bersih ke kelompok pengguna

Jaringan air bersih ke kelompok pengguna meliputi pengembangan jaringan perpipaan dan non perpipaan pada wilayah yang rawan air bersih di seluruh wilayah daerah.

5) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya, meliputi :

a) Sistem penyediaan air minum, meliputi :

(1) Jaringan perpipaan, meliputi :

- (a) pengembangan prasarana jaringan perpipaan air minum, meliputi :
 - (1) Penambahan kapasitas dan revitalisasi sambungan rumah (SR) berada diseluruh kecamatan;
 - (2) Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglong; dan
 - (3) Penambahan kapasitas dan revitalisasi jaringan di seluruh wilayah.

- (b) Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum
Peningkatan kualitas air baku menjadi air minum berupa pembangunan fasilitas pengolahnya beserta kelengkapan pendukungnya

(2) Bukan jaringan perpipaan

Bukan jaringan perpipaan dilakukan pada wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan meliputi :

- (1) Penggalian atau pemanfaatan air permukaan;
- (2) Pengeboran air tanah secara terkendali dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan; dan
- (3) Pengolahan air payau di wilayah sekitar pantai.

b) Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), meliputi :

- (1) Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan air limbah industri;

Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah industri berupa pembangunan instalasi pengolahan limbah untuk industri besar, menengah dan kecil.

- (2) Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perkotaan, meliputi :

- (a) Pengembangan instalasi pengolahan lumpur tinja di wilayah Daerah sesuai hasil studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan; dan

- (b) Pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja berbasis masyarakat dan rumah tangga perkotaan

- (3) Pengembangan dan peningkatan instalasi pengolahan limbah domestik terpadu di kawasan perdesaan, meliputi :

- (a) Peningkatan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan pemanfaatan hasil pengolahannya bagi sumber energi alternatif dan pupuk organik; dan

- (b) Pengembangan sistem pengolahan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna.

- (4) Pengelolaan barang bekas, meliputi :

- (a) Pengaturan kegiatan pengumpulan dan pemilahan barang bekas yang berada di kawasan permukiman;

- (b) Pembinaan kepada masyarakat pelaku usaha pengumpulan dan pemilahan barang bekas; dan

- (c) Pengawasan kegiatan pengumpulan dan pemilahan barang bekas.

c) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) berupa pembangunan TPS limbah B3 diseluruh wilayah sesuai studi kelayakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Sistem jaringan persampahan, meliputi :

(1) Rencana lokasi TPA, meliputi :

- (a) Pembangunan dan pengembangan TPA dan/atau TPA Regional berada di :

- (1) Kecamatan Karangdadap; dan/atau

- (2) Lokasi lainnya yang berada di wilayah Daerah yang memenuhi syarat secara teknis maupun non teknis berdasarkan studi kelayakan dan peraturan perundang-undangan;

- (b) Pengelolaan sampah di lokasi TPA dan/atau TPA Regional diarahkan menggunakan pendekatan *sanitary landfill*.
- (2) Rencana lokasi TPS**
Rencana lokasi TPS dan/atau TPST Regional di seluruh wilayah daerah dengan sistem pengelolaan TPS 3R.
- (3) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga;** dan
Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga melalui pendekatan *reduce, reuse, dan recycle (3R)*.
- (4) Rencana pengelolaan sampah perdesaan**
Rencana pengelolaan sampah perdesaan melalui pengelolaan swadaya masyarakat.
- e) Sistem Jaringan Drainase, meliputi :**
- (1) Pembangunan dan peningkatan saluran drainase perkotaan di Daerah khususnya pada kawasan permukiman padat dan kumuh, serta kawasan sekitar pasar tradisional;
 - (2) Pembangunan dan peningkatan saluran drainase kanan-kiri jalan meliputi:
 - (a) ruas jalan arteri;
 - (b) ruas jalan kolektor;
 - (c) ruas jalan lokal; dan
 - (d) ruas jalan lingkungan.
 - (3) Peningkatan saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier di seluruh Kawasan permukiman perkotaan dan permukiman perdesaan.
 - (4) Normalisasi saluran sungai sebagai saluran akhir yang meliputi sungai diseluruh wilayah Daerah.
 - (5) Pembangunan fasilitas resapan dan/atau kolam retensi di kawasan yang sulit dialirkan ke saluran drainase meliputi :
 - (a) Kecamatan Buaran;
 - (b) Kecamatan Kedungwuni;
 - (c) Kecamatan Siwalan;
 - (d) Kecamatan Sragi;
 - (e) Kecamatan Tirto;
 - (f) Kecamatan Wiradesa; dan
 - (g) Kecamatan Wonokerto.
- f) Sistem Evakuasi Bencana, meliputi :**
- (1) Jalur Evakuasi, meliputi :**
- (a) Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir berupa jalan-jalan desa pada lokasi yang lebih tinggi berada di :
 - (1) Kecamatan Bojong;
 - (2) Kecamatan Buaran;
 - (3) Kecamatan Kajen;
 - (4) Kecamatan Karangdadap;
 - (5) Kecamatan Kedungwuni;
 - (6) Kecamatan Kesesi;
 - (7) Kecamatan Siwalan;
 - (8) Kecamatan Sragi;
 - (9) Kecamatan Tirto;
 - (10) Kecamatan Wiradesa; dan
 - (11) Kecamatan Wonokerto.

- (b) Pengembangan jalur evakuasi bencana tanah longsor berupa ruas jalan yang ada atau ruas jalan darurat menuju ruang evakuasi berada di :
 - (1) Kecamatan Doro;
 - (2) Kecamatan Kajen;
 - (3) Kecamatan Kandangserang;
 - (4) Kecamatan Karanganyar;
 - (5) Kecamatan Lebakbarang;
 - (6) Kecamatan Paninggaran;
 - (7) Kecamatan Petungkriyono; dan
 - (8) Kecamatan Talun.
- (c) Pengembangan jalur evakuasi bencana gelombang pasang dan abrasi berupa pengembangan jalan desa yang berada di kawasan yang memiliki pantai berada di:
 - (1) Kecamatan Siwalan;
 - (2) Kecamatan Tirto; dan
 - (3) Kecamatan Wonokerto.

(2) Ruang Evakuasi

Ruang evakuasi berada di seluruh kecamatan yang meliputi :

- (a) lapangan;
- (b) stadion;
- (b) taman publik;
- (c) bangunan rumah;
- (d) bangunan kantor pemerintah;
- (e) bangunan fasilitas sosial;
- (f) bangunan fasilitas umum; dan
- (g) ruang/bangunan lainnya.

(3) Lahan relokasi, meliputi :

Lahan relokasi dilakukan apabila lokasi bencana tidak dapat lagi dimanfaatkan. Penetapan lahan relokasi dilakukan oleh Bupati dengan pertimbangan meliputi:

- (a) Bukan merupakan kawasan lindung;
- (b) Bukan bagian dari kawasan yang rawan terhadap bencana; dan
- (c) Memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang dipindahkan.

4. Aspek Demografi

a. Jumlah Penduduk

Sensus Penduduk Tahun 2020 mencatat penduduk Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sebanyak 968.821 jiwa. Sejak Indonesia menyelenggarakan Sensus Penduduk yang pertama pada tahun 1961, jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan terus mengalami peningkatan. Hasil SP2020 dibandingkan dengan SP2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan sebanyak 130.000an jiwa atau rata-rata sebanyak 13.000 setiap tahun. Selanjutnya jumlah penduduk menurut kecamatan dan jenis kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 seperti dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.12
Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Luas (km ²)	Kepadatan penduduk
1.	Kandangserang	18.005	17.740	35.745	60,55	590
2.	Paninggaran	21.259	20.578	41.837	92,99	450
3.	Lebakbarang	5.602	5.514	11.116	58,20	191
4.	Petungkriyono	6.706	6.473	13.179	73,58	179
5.	Talun	15.740	14.927	30.667	58,57	524
6.	Doro	23.063	22.144	45.207	68,45	660
7.	Karanganyar	22.903	22.185	45.088	63,48	710
8.	Kajen	36.964	36.103	73.067	75,15	972
9.	Kesesi	36.160	35.548	71.708	68,52	1.047
10.	Sragi	32.816	32.635	65.451	32,40	2.020
11.	Siwalan	20.726	20.721	41.447	25,91	1.600
12.	Bojong	37.970	36.711	74.681	40,06	1.864
13.	Wonopringgo	24.079	23.577	47.656	18,80	2.535
14.	Kedungwuni	51.341	49.455	100.796	22,94	4.394
15.	Karangdadap	21.209	20.046	41.255	20,99	1.965
16.	Buaran	23.956	23.066	47.022	9,54	4.929
17.	Tirto	38.175	36.512	74.687	17,39	4.295
18.	Wiradesa	31.438	30.701	62.139	12,71	4.889
19.	Wonokerto	23.495	22.578	46.073	15,91	2.896
JUMLAH 2020		491.607	477.214	968.821	836.13	1.159
	2019	445.790	451.921	897.711	836.13	1.074
	2018	443.009	448.883	891.892	836.13	1.067
	2017	441.086	445.111	886.197	836.13	1.060
	2016	437.203	442.889	880.092	836,13	1.053

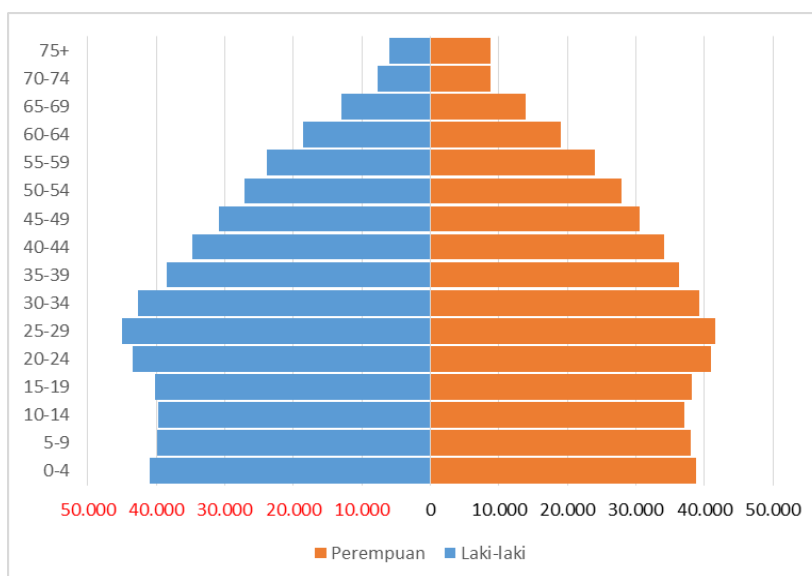
Sumber : BPS Kab. Pekalongan 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebanyak 968.821 jiwa terdiri dari laki-laki 491.607 jiwa (50,74%) dan perempuan 477.214 jiwa (49,26%) dengan **Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)** sebesar 1,53% naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,65%. Dilihat dari rasio jenis kelamin sebesar 103,02, jumlah penduduk tahun 2020 lebih banyak laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Sedangkan kepadatan penduduk mencapai 1.159 jiwa/km² di tahun 2020. Penyebaran penduduk di Kabupaten Pekalongan untuk masing-masing kecamatan belum merata. Ada dua kecamatan dengan tingkat kepadatan yang rendah dibandingkan dengan kecamatan yang lainnya sekitar 200 jiwa/km² yaitu Kecamatan Lebakbarang dan Petungkriyono. Sebaliknya ada empat kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduknya sudah mencapai diatas 4.000 jiwa/km² yakni Kecamatan Kedungwuni, Buaran, Tirto dan Wiradesa.

Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2020 menunjukkan jumlah kelompok usia produktif (15-64 tahun) di Kabupaten Pekalongan sebanyak 676.426 jiwa, sedangkan kelompok usia non produktif sebanyak 292.386 jiwa. Angka dependency ratio Kabupaten Pekalongan sebesar 49.33%, artinya setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 49-50 orang penduduk belum produktif atau sudah tidak produktif. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar sebagai berikut :

Tabel 2.13
Jumlah Penduduk Kabupaten Pekalongan
Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2020

No.	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
1.	0-4	40.953	38.804	79.757
2.	5-9	39.779	37.941	77.720
3.	10-14	39.664	37.035	76.699
4.	15-19	40.217	38.179	78.396
5.	20-24	43.445	40.996	84.441
6.	25-29	44.922	41.519	86.441
7.	30-34	42.620	39.178	81.798
8.	35-39	38.487	36.226	74.713
9.	40-44	34.671	34.127	68.798
10.	45-49	30.759	30.577	61.336
11.	50-54	27.092	27.939	55.031
12.	55-59	23.815	24.095	47.910
13.	60-64	18.536	19.035	37.571
14.	65-69	12.959	13.909	26.868
15.	70-74	7.752	8.814	16.566
16.	75+	5.936	8.840	14.776
	Jumlah	491.607	477.214	968.821



Sumber : Buku Kab. Pekalongan Dalam Angka Tahun 2021, BPS (diolah)

Gambar 2.16 Piramida Penduduk Kab. Pekalongan Tahun 2020

B. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 telah menghambat kegiatan perekonomian masyarakat.

a. Pertumbuhan PDRB

1) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menurut sektor menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap sektor ekonomi dalam suatu daerah. Sektor-sektor

ekonomi yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah. Sementara PDRB Atas Dasar Harga Konstan berguna untuk menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara keseluruhan maupun sektoral dari tahun ke tahun. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar pula.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14

Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No	Sektor	2016	2017	2018	2019*	2020**
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.416.386,04	3.487.876,97	3.638.653,84	3.767.422,28	3.878.724,67
B	Pertambangan & Penggalan	640.611,28	805.190,25	903.875,42	997.946,51	990.308,79
C	Industri pengolahan	5.714.558,95	6.119.953,38	6.641.106,17	7.102.497,93	7.010.931,99
D	Pengadaan Listrik dan Gas	26.658,41	28.668,94	31.067,82	32.819,31	33.647,77
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	6.983,31	7.392,55	7.719,01	8.185,04	8.522,81
F	Konstruksi	1.148.001,98	1.314.975,53	1.488.508,36	1.589.755,34	1.546.617,98
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.441.393,07	2.636.675,00	2.856.931,40	3.086.285,19	3.059.501,22
H	Transportasi dan Pergudangan	441.088,52	481.792,59	506.830,37	556.439,53	450.822,99
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	945.809,13	1.020.685,12	1.111.495,08	1.212.678,69	1.197.711,76
J	Informasi dan Komunikasi	342.687,20	407.503,07	449.099,23	506.397,62	588.205,40
K	Jasa keuangan dan Asuransi	463.250,04	505.748,44	539.748,73	565.543,16	568.637,08
L	Real Estat	247.835,06	269.826,45	286.386,08	303.510,41	307.621,10
M,N	Jasa Perusahaan	52.481,57	59.399,15	67.212,43	76.016,78	76.339,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	610.329,23	651.705,32	681.073,38	717.233,71	722.214,45
P	Jasa Pendidikan	1.117.407,76	1.236.802,46	1.361.804,90	1.520.663,23	1.509.296,68
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	244.098,45	269.839,03	295.719,26	320.311,14	363.879,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	369.115,67	405.19,45	447.080,43	493.357,73	490.208,96
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		18.228.695,67	19.709.225,70	21.314.311,91	22.857.063,60	22.803.192,93

Sumber : BPS; Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2021 *) angka sementara **)Angka sangat sementara

Dari tabel diatas, struktur perekonomian sebagian masyarakat Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 telah bergeser dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan ke sektor ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranannya terhadap pembentukan PBRD Kabupaten Pekalongan. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sebesar 22,80 trilyun **lebih rendah (mengalami perlambatan)** akibat pandemi COVID-19 dari Tahun 2019 sebesar Rp 22,86 trilyun dengan sumbangan sektor terbesar dari industri pengolahan sebesar Rp 7,01 trilyun (30.75%), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 3,88 trilyun (17,01%), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 3,06 trilyun (13,42%) dan sektor konstruksi sebesar Rp 1,55 trilyun (6,78%).

Selanjutnya nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15
Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Sektor	2016	2017	2018	2019*	2020**
		(Juta Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.307.320,38	2.308.782,63	2.347.930,82	2.390.852,86	2.415.676,92
B	Pertambangan & Penggalian	424.571,40	515.228,93	572.036,43	623.600,70	607.289,51
C	Industri pengolahan	4.447.301,16	4.651.905,35	4.915.972,98	5.150.118,50	4.948.693,19
D	Pengadaan Listrik & Gas	24.530,37	25.752,73	27.160,19	28.580,06	29.770,85
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	6.525,18	6.828,60	7.105,57	7.406,29	7.610,70
F	Konstruksi	874.502,65	976.784,58	1.059.213,80	1.107.473,11	1.072.809,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.068.674,87	2.177.767,85	2.309.667,37	2.441.492,14	2.391.408,72
H	Transportasi dan Pergudangan	388.206,46	412.989,96	430.582,50	464.279,40	365.315,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	736.106,30	785.629,02	846.571,56	910.006,35	889.405,96
J	Informasi dan Komunikasi	381.650,64	426.739,37	470.251,82	524.677,12	608.707,47
K	Jasa keuangan dan Asuransi	340.184,82	357.783,65	371.949,67	384.021,32	389.211,30
L	Real Estat	218.012,18	231.598,13	240.734,60	250.930,66	252.244,64
M,N	Jasa Perusahaan	40.184,92	43.410,38	47.738,38	52.669,75	51.598,10
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	453.813,14	464.972,11	480.746,87	499.436,96	493.818,97
P	Jasa Pendidikan	725.441,03	772.483,11	830.022,50	904.962,74	885.186,15
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	183.061,75	199.358,06	216.294,70	231.709,69	260.337,18
R,S,T,U	Jasa lainnya	297.614,58	321.114,26	351.071,18	384.133,34	378.427,21
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		13.917.701,83	14.679.128,72	15.525.050,94	16.356.350,99	16.047.511,77

Sumber : BPS; Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2021 *) angka sementara **)Angka sangat sementara

Dari tabel diatas, Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebesar Rp 16,05 trilyun lebih rendah/mengalami perlambatan dari Tahun 2019 sebesar Rp 16,36 trilyun akibat adanya pandemi COVID-19 dengan sumbangan sektor terbesar dari sektor industri pengolahan sebesar Rp 4,95 trilyun (30,84%), kemudian sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp 2,42 trilyun (15,05%), sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar Rp 2,39 trilyun (14,90%) dan sektor konstruksi sebesar Rp 1,07 trilyun (6,69%).

Adapun Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel 2.15.

Tabel 2.16
Perkembangan Kontribusi Sektor dan PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb)
dan Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Sektor	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	18,74	16,58	17,70	15,73	17,07	15,12	16,48	14,62	17,01	15,05
B	Pertambangan & Penggalian	3,51	3,05	4,09	3,51	4,24	3,68	4,37	3,81	4,34	3,78
C	Industri pengolahan	31,35	31,95	31,05	31,69	31,16	31,66	31,07	31,49	30,75	30,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,18	0,15	0,18	0,15	0,17	0,14	0,17	0,15	0,19
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05	0,04	0,05
F	Konstruksi	6,30	6,28	6,67	6,65	6,98	6,82	6,96	6,77	6,78	6,69
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,39	14,86	13,38	14,84	13,40	14,88	13,50	14,93	13,42	14,90
H	Transportasi dan Pergudangan	2,42	2,79	2,44	2,81	2,38	2,77	2,43	2,84	1,98	2,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,19	5,29	5,18	5,35	5,21	5,45	5,31	5,56	5,25	5,54
J	Informasi dan Komunikasi	1,88	2,74	2,07	2,91	2,11	3,03	2,22	3,21	2,58	3,79

No	Sektor	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)	Hb (%)	Hk (%)
K	Jasa keuangan dan Asuransi	2,54	2,44	2,57	2,44	2,53	2,40	2,47	2,35	2,49	2,43
L	Real Estat	1,36	1,57	1,37	1,58	1,34	1,55	1,33	1,53	1,35	1,57
M,N	Jasa Perusahaan	0,29	0,29	0,30	0,30	0,32	0,31	0,33	0,32	0,33	0,32
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,35	3,26	3,31	3,17	3,20	3,10	3,14	3,05	3,17	3,08
P	Jasa Pendidikan	6,13	5,21	6,28	5,26	6,39	5,35	6,65	5,53	6,62	5,52
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,34	1,32	1,37	1,36	1,39	1,39	1,40	1,42	1,60	1,62
R,S,T,U	Jasa lainnya	2,02	2,14	2,06	2,19	2,10	2,26	2,16	2,35	2,15	2,36
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS; Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2021 *) Angka sementara **)Angka sangat sementara

Dari tabel diatas, perkembangan kontribusi sektor PDRB atas Dasar Harga Berlaku (Hb) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 yang terbesar dihasilkan oleh sektor industri pengolahan sebesar 30,75%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 17,01%, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 13,42% dan sektor konstruksi sebesar 6,78%.

Sedangkan perkembangan kontribusi sektor PDRB atas Dasar Harga Konstan (Hk) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 yang terbesar dihasilkan oleh sektor industri pengolahan sebesar 30,84%, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 15,052%, sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,90% dan sektor konstruksi sebesar 6.69%.

2) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 2.17
Laju Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 - 2020

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2,00	0,05	1,70	1,83	1,04
B	Pertambangan & Penggalian	7,05	21,27	11,03	9,01	-2,62
C	Industri pengolahan	4,31	4,58	5,68	4,76	-3,91
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,11	4,98	5,47	5,23	4,17
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur ulang	2,16	4,65	4,06	4,23	2,76
F	Konstruksi	8,99	11,70	8,44	4,56	-3,13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,41	5,23	6,06	5,71	-2,05
H	Transportasi dan Pergudangan	6,00	6,38	4,26	7,83	-21,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,13	6,64	7,76	7,49	-2,26
J	Informasi dan Komunikasi	8,89	11,73	10,20	11,57	16,02
K	Jasa keuangan dan Asuransi	8,20	5,76	3,96	3,25	1,35
L	Real Estate	7,87	6,13	3,94	4,24	0,52
M.N	Jasa Perusahaan	7,94	8,03	9,97	10,33	-2,03

No	Sektor	2016	2017	2018	2019	2020
O	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,91	2,46	3,39	3,89	-1,12
P	Jasa Pendidikan	4,03	6,45	7,45	9,03	-2,19
Q	Jasa kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,33	7,64	8,50	7,13	12,35
R.S.T. U	Jasa lainnya	6,55	7,81	9,33	9,42	-1,49
Pertumbuhan Ekonomi		5.19	5,44	5,76	5,35	-1,89

Sumber : BPS Kab. Pekalongan. 2021

Dari tabel diatas, berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh sulitnya produksi baik barang maupun jasa di masa pandemi COVID-19. Nilai PDRB Kabupaten Pekalongan atas dasar harga konstan 2010, mencapai 16,05 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 16,36 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar **-1,89 persen**, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai **5,35 persen**.

Pertumbuhan ekonomi selama 2020 masih terjaga oleh adanya peningkatan produksi pada sektor Informasi dan Komunikasi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Real Estate.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi yaitu sebesar 16,02 persen. Salah satu penyebabnya adalah seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran online serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, sebagian besar mengalami pertumbuhan yang negatif. Sepuluh lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif yang cukup dalam. Sedangkan tujuh lapangan usaha lainnya berturut-turut tercatat mengalami pertumbuhan positif. Tujuh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga enam belas persen tersebut antara lain: lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 16,02 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 12,35 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,17 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,76 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 1,35 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 1,04 persen; dan Real Estate sebesar 0,52 persen.

Sedangkan sepuluh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi agak dalam adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar -1,12 persen; Jasa lainnya sebesar -1,49 persen; Jasa Perusahaan sebesar 2,03 persen; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -2,05 persen; Jasa Pendidikan sebesar -2,19 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar -2,26 persen; Pertambangan dan Penggalian sebesar -2,62 persen; Konstruksi sebesar -3,13 persen; Industri Pengolahan sebesar 3,91 persen; dan Transportasi dan Pergudangan sebesar -21,32 persen. Sektor Transportasi dan Pergudangan di Kabupaten Pekalongan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam karena adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran COVID-19

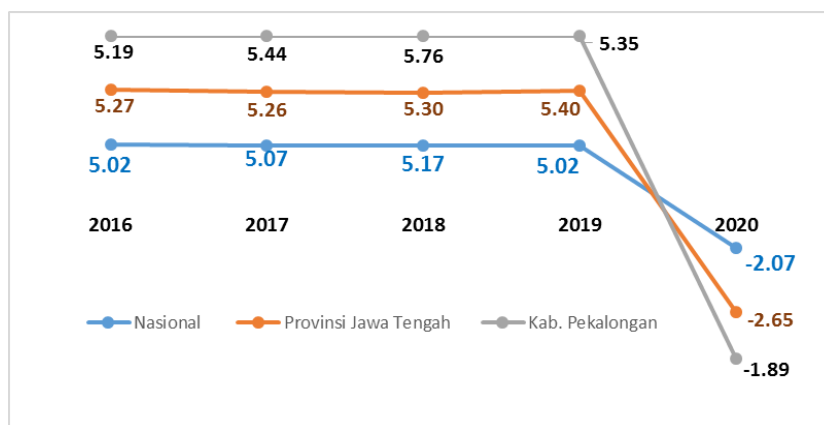
selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), *Work From Home* (bekerja dari rumah), *Study From Home* (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan dari tahun 2016-2020 dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.18
Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nasional	5,02	5,07	5,17	5,02	-2,07
2	Provinsi Jawa Tengah	5,27	5,26	5,30	5,40	-2,65
3	Kab. Pekalongan	5,19	5,44	5,76	5,35	-1,89

Sumber: BPS Kab. Pekalongan. BPS Prov. Jawa Tengah . 2021



Gambar 2.17 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

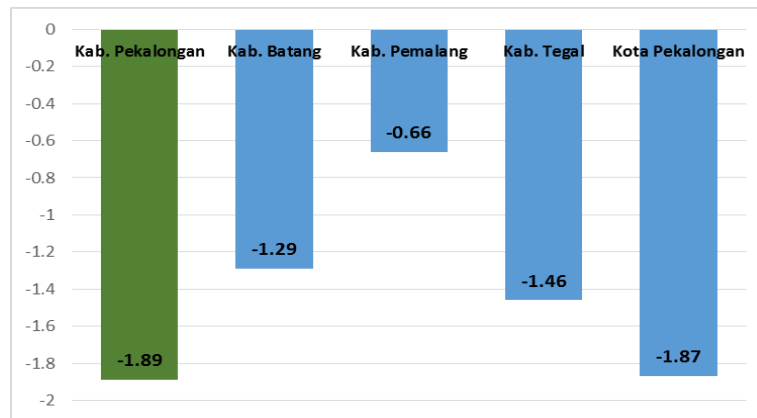
Dari tabel dan gambar diatas, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 mencapai minus 1,89 persen lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah sebesar minus 2,65 persen dan nasional sebesar minus 2,07 persen. Pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali di Jawa Tengah dan Kabupaten Pekalongan.

Kemudian capaian Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.19
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	5,19	5,44	5,76	5,35	-1,89
2	Kab. Batang	5,03	5,55	5,72	5,39	- 1,29
3	Kab. Pemasang	5,43	5,61	5,70	5,80	- 0,66
4	Kab. Tegal	5,92	5,38	5,51	5,58	- 1,46
5	Kota Pekalongan	5,36	5,32	5,69	5,50	- 1,87

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



Gambar 2.18 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020

Dapat dilihat dari tabel dan gambar diatas, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 sebesar minus 1,89 persen lebih rendah dari Kabupaten Batang sebesar minus 1,29 persen, Kabupaten Pemasang sebesar minus 0,66 persen, Kabupaten Tegal sebesar minus 1,46 persen dan Kota Pekalongan sebesar minus 1,87 persen.

b. PDRB Per Kapita

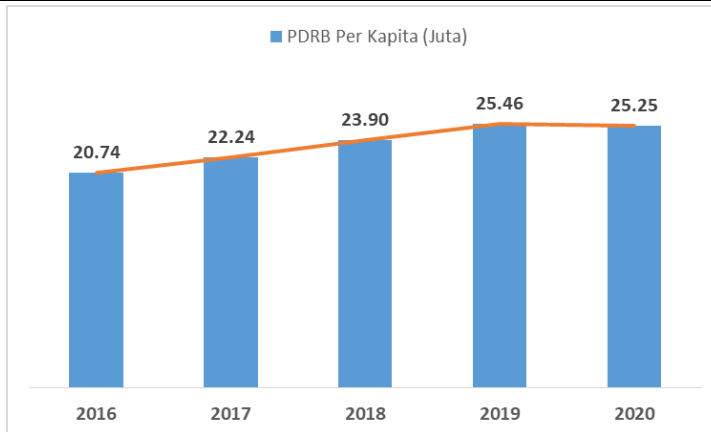
Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB perkapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi di daerah tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB perkepala atau persatu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten pekalongan atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016-2020 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 PDRB per kapita tercatat sebesar 20,74 juta rupiah naik menjadi 25,25 juta rupiah di tahun 2020. Kenaikan angka PDRB perkapita masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Namun demikian PDRB perkapita menurun dari tahun 2019-2020 karena adanya pandemi COVID-19. Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.20
PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020**

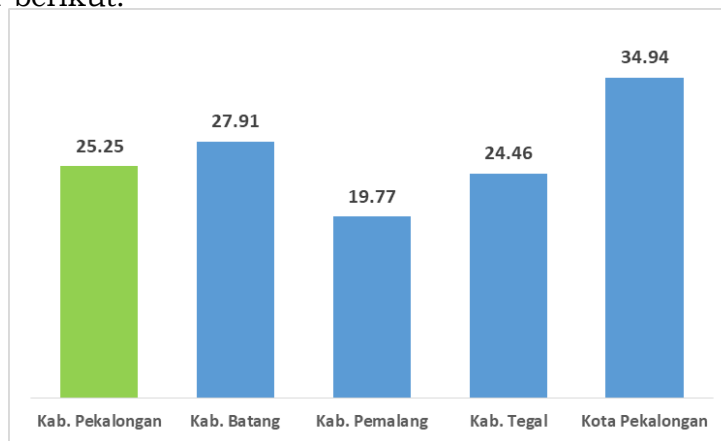
No.	Tahun	PDRB Per Kapita (Juta)
1.	2016	20.743,62
2.	2017	22.240,23
3.	2018	23.897,86
4.	2019	25.461,49
5.	2020	25.249,60

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah; 2021



Gambar 2.19 PDRB Per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

Sedangkan capaian PDRB Per Kapita Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.20 PDRB Per Kapita Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020

Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar pada tahun 2020, PDRB per kapita Kabupaten Pekalongan mencapai 25,25 juta rupiah lebih baik dari Kabupaten Pemalang sebesar 19,77 juta rupiah dan Kabupaten Tegal sebesar 24,46 juta rupiah, namun lebih rendah dibandingkan Kabupaten Batang sebesar 27,91 juta rupiah dan Kota Pekalongan sebesar 34,94 juta rupiah.

c. Laju Inflasi

Inflasi Kabupaten Pekalongan tahun 2020 tercatat sebesar 2,36 persen, lebih rendah dibandingkan dengan inflasi tahun 2019 yang sebesar 2,80 persen. Rekreasi, olahraga dan budaya merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi di tahun 2020. Sementara komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi adalah cabai merah.

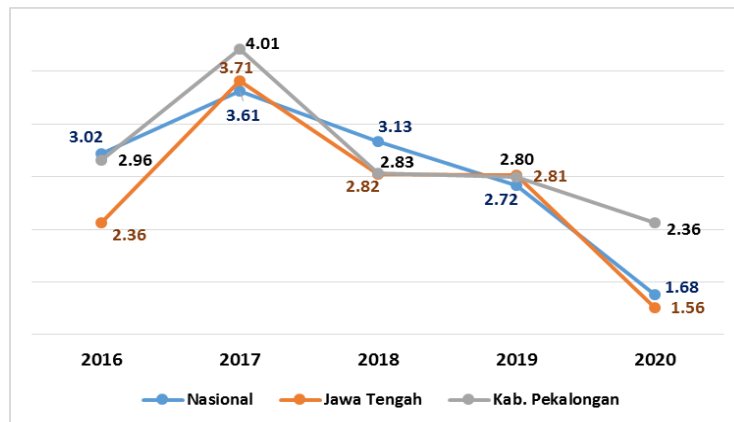
Capaian inflasi di Kabupaten Pekalongan tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Perbandingan Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.19 dan gambar 2.18.

**Tabel 2.21
Inflasi Kabupaten Pekalongan,
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020**

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nasional	3,02	3,61	3,13	2,72	1,68

2.	Jawa Tengah	2,36	3,71	2,82	2,81	1,56
3.	Kab. Pekalongan	2,96	4,01	2,83	2,80	2,36

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar 2.21 Laju Inflasi Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Dari tabel dan gambar diatas, dapat dijelaskan dapat dijelaskan tingginya inflasi di Kabupaten Pekalongan dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional disebabkan adanya kenaikan harga komoditas cabai merah, telur ayam ras, cabai rawit, daging ayam ras, dan tomat. Sedangkan penurunan harga komoditas bawang merah, emas perhiasan, ikan laut/air tawar, tarif kereta api, dan tariff kendaraan roda 2 online menjadi penahan inflasi di Kabupaten Pekalongan.

d. Kemiskinan

Definisi umum kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. meliputi pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Konsep kemiskinan makro adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (*diukur dari sisi pengeluaran*). Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1) Garis Kemiskinan (GK)

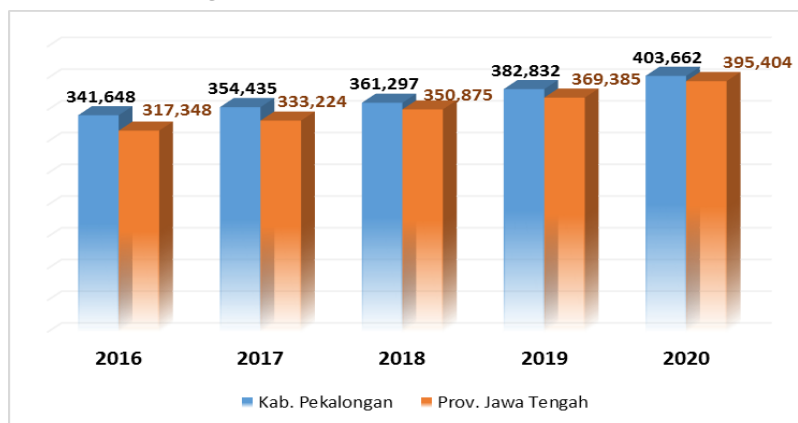
Garis Kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2016-2020.

Adapun Garis Kemiskinan di Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.22
Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (Rp/Kapita/Bulan)

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	341.648	354.435	361.297	382.832	403.662
2	Prov. Jawa Tengah	317.348	333.224	350.875	369.385	395.407

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2021



Gambar 2.22 Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (Rp/Kapita/Bulan)

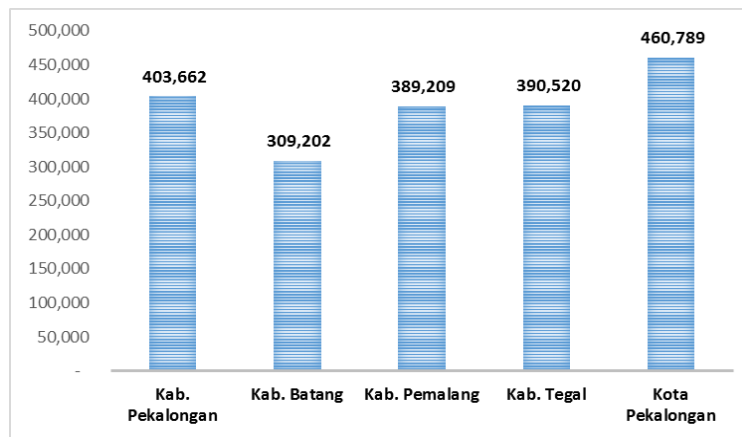
Dari Tabel dan gambar diatas, garis kemiskinan di Kabupaten Pekalongan 2016-2020 selalu naik setiap tahun. Hal ini terjadi karena *trend* akan kebutuhan setiap saat berubah. Tabel di atas juga bisa diartikan bahwa besarnya konsumsi perkapita per bulan penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2020 maksimal sebesar Rp. 403.662,00.

Selama periode 2016-2020 rata-rata kenaikan Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan sebesar 4,27 persen. Garis kemiskinan Kabupaten Pekalongan tahun 2020 lebih besar dibandingkan garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang sebesar Rp. 395.407,00 per kapita hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan dalam mencukupi kebutuhannya lebih besar dibandingkan di Provinsi Jawa Tengah seiring dengan semakin berkurangnya tingkat dan jumlah penduduk miskin. Dengan kata lain, Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kelompok Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang tergolong memiliki **Garis Kemiskinan Sedang**. Garis kemiskinan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.23
Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 (Rp/Kapita/Bulan)

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	341.648	354.435	361.297	382.832	403.662
2	Kab. Batang	240.541	249.292	256.549	286.116	309.202
3	Kab. Pemasang	319.434	331.584	351.183	372.115	389.209
4	Kab. Tegal	308.270	319.758	332.298	365.334	390.520
5	Kota Pekalongan	375.600	390.555	415.172	425.026	460.789

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2021



Gambar 2.23 Garis Kemiskinan Kabupaten Pekalongan, Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020

Dari tabel dan gambar di atas, garis Kabupaten Pekalongan sebesar Rp. 403.662,- lebih tinggi bila dibandingkan dengan Kabupaten Batang, Pemalang dan Tegal dan lebih rendah dari Kota Pekalongan. Dengan kata lain, dapat diketahui apabila penduduk Kabupaten Pekalongan tinggal di 3 (tiga) kabupaten tersebut diatas tidak termasuk kategori warga miskin.

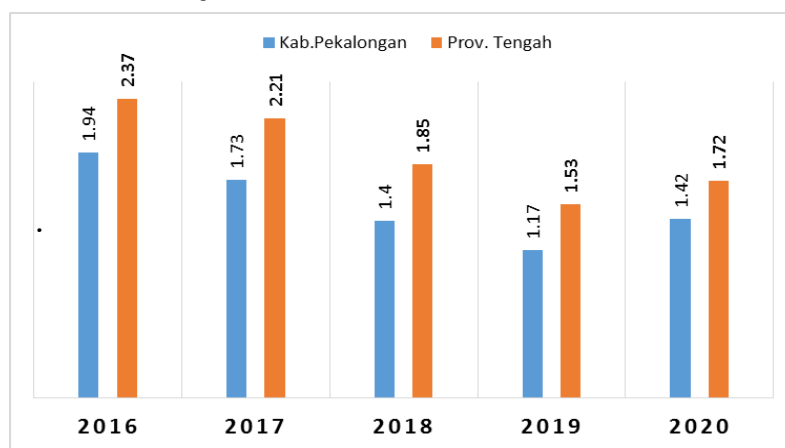
2) Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dijelaskan dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.24 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab.Pekalongan	1,94	1,73	1,40	1,17	1,42
2	Prov. Tengah	2,37	2,21	1,85	1,53	1,72

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2021



Gambar 2.24 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pekalongan selama periode 2016-2020 mengalami kenaikan. Angka P1 dari Tahun 2019 ke 2020 mengalami kenaikan dari 1,17 menjadi 1,42. Hal ini diakibatkan meningkatnya jumlah penduduk miskin dengan adanya pandemi COVID-19. Meskipun garis kemiskinan naik, pendapatan

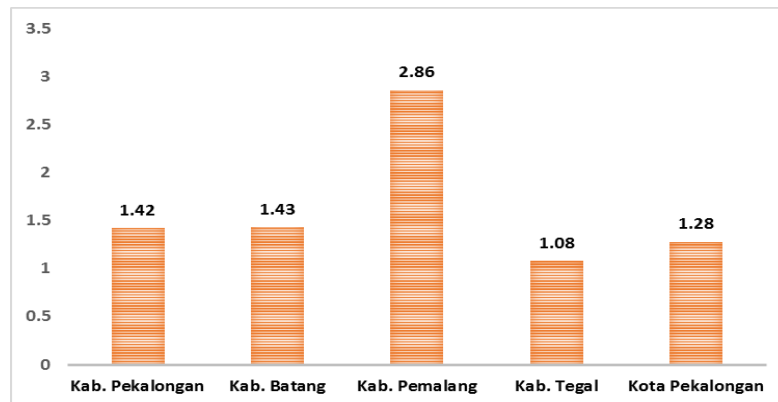
penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan. Rata-rata capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2016-2020 Kabupaten Pekalongan masih di bawah (lebih baik) dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan **Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Rendah**.

Sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.25
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	1,94	1,73	1,40	1,17	1,42
2	Kab. Batang	1,65	1,51	1,08	0,69	1,43
3	Kab. Pemalang	3,04	3,52	2,96	2,55	2,86
4	Kab. Tegal	1,03	1,27	1,41	0,64	1,08
5	Kota Pekalongan	0,80	0,92	1,01	0,92	1,28

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Maret 2021



Gambar 2.25 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020

Dari tabel dan gambar diatas, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di Kabupaten Pekalongan sebesar 1,42 lebih tinggi dari Kabupaten Tegal sebesar 1,08 dan Kota Pekalongan sebesar 1,28. Sedangkan capaian P1 Kabupaten Pekalongan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 1,43 dan Kabupaten Pemalang sebesar 2,86. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Pekalongan lebih rendah atau lebih baik disebabkan masyarakat di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan kesejahteraan dan pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan apabila dibandingkan Kabupaten Batang dan Pemalang.

3) Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

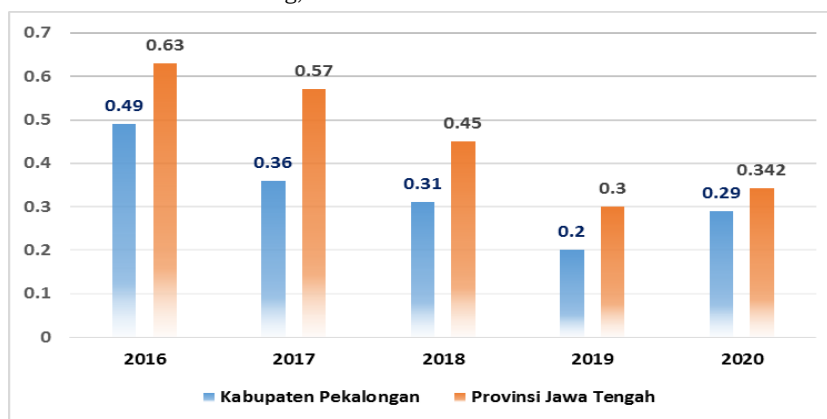
Indeks keparahan kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Tak berbeda jauh dengan P1, P2 juga mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Namun di tahun 2020 mengalami peningkatan dengan adanya pandemi COVID-19. Adapun Indeks

Keparahan Kemiskinan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dijelaskan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.26
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kabupaten Pekalongan	0,49	0,36	0,31	0,20	0,29
2	Provinsi Jawa Tengah	0,63	0,57	0,45	0,30	0,342

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



Gambar 2.26 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Dari tabel dan gambar diatas, Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan cenderung menurun dalam 4 tahun terakhir, namun mengalami peningkatan di tahun 2020. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan naik dari 0,20 pada tahun 2019 menjadi 0,29 pada tahun 2020. Hal ini mengindikasikan terjadinya perubahan distribusi pengeluaran diantara masyarakat di bawah garis kemiskinan. Ada penurunan pendapatan di antara penduduk miskin dengan adanya pandemi COVID-19. Adanya perubahan tingkat pengeluaran pada masyarakat di bawah garis kemiskinan yang tidak merata sehingga penanganan kepada penduduk miskin harus lebih fokus dan tepat sasaran. Capaian Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Tahun 2016-2020 Kabupaten Pekalongan secara umum masih di bawah (lebih baik) dari Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan termasuk dalam kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan **Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Rendah**.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.27
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	0,49	0,36	0,31	0,20	0,29
2	Kab. Batang	0,39	0,31	0,23	0,08	0,32
3	Kab. Pemasang	0,80	1,00	0,83	0,57	0,68
4	Kab. Tegal	0,21	0,27	0,44	0,09	0,19
5	Kota Pekalongan	0,13	0,20	0,22	0,18	0,30

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



Gambar 2.27 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 sebesar 0,29 lebih tinggi dari Kabupaten Tegal sebesar 0,19. Sedangkan capaian P2 Kabupaten Pekalongan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 0,32, Kabupaten Pemalang sebesar 0,68 dan Kota Pekalongan sebesar 0,30. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Pekalongan lebih rendah atau lebih baik disebabkan masyarakat di bawah garis kemiskinan mengalami peningkatan kesejahteraan dan pendapatan penduduk miskin mengalami peningkatan apabila dibandingkan Kabupaten Batang, Pemalang dan Kota Pekalongan.

4) Persentase Penduduk Miskin

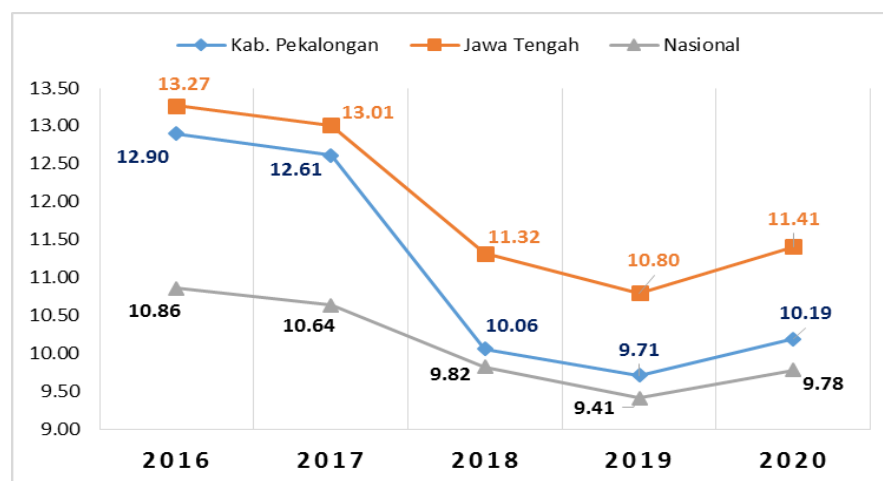
Sedangkan persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.28

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	12,90	12,61	10,06	9,71	10,19
2	Jawa Tengah	13,27	13,01	11,32	10,80	11,41
3	Nasional	10,86	10,64	9,82	9,41	9,78

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



Gambar 2.28 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Dari tabel dan gambar diatas, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2019 sebesar 9,71 persen naik menjadi 10,19 persen di Tahun 2020, dengan rata-rata capaian di bawah provinsi Jawa Tengah dan di atas Nasional. Hal dindikasikan akibat pandemi Covid-19. Jika mengikuti tren peningkatan kemiskinan di nasional maka **peningkatan kemiskinan terjadi di perkotaan**, sementara di perdesaan trennya masih menurun. Adanya kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan diakibatkan oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada ekonomi masyarakat yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Pandemi COVID-19 membawa dampak yang luar biasa mengganggu aktivitas ekonomi sehingga akhirnya mempengaruhi pendapatan masyarakat;
- b) Disparitas kemiskian di perkotaan dan perdesaan juga masih tinggi. Dari hasil survei BPS, masyarakat berpendapatan rendah mengalami penurunan pendapatan. Begitu pula untuk yang berpendapatan tinggi mengaku hal yang sama. Bukan hanya soal jumlah penduduk miskin yang meningkat, namun kedalaman dan keparahan kemiskinan juga meningkat;
- c) Selain pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi, terdapat tiga faktor lain yang turut menyumbang kemiskinan. Yakni pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang mengalami perlambatan, terpuruknya sektor pariwisata, serta harga eceran komoditas pokok yang naik.

Namun demikian, adanya penurunan kemiskinan Kabupaten Pekalongan tahun 2019 yang mencapai *single digit* perlu mendapatkan apresiasi karena dampak intervensi mendasarkan analisis data Basis Data Terpadu yang merupakan bagian kerja Pemerintah Daerah dan kerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK). Salah satu usaha dalam percepatan penurunan angka kemiskinan adalah **Laboratorium Penanganan Kemiskinan**. Terhitung selama 2,5 tahun, Laboratorium Kemiskinan, sebuah program pengentasan kemiskinan milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah mampu mengentaskan 70 persen penduduk sasaran. Laboratorium Kemiskinan sebagai bentuk ikhtiar percepatan pengurangan angka kemiskinan, menempatkan si miskin sebagai subyek, membangun kolaborasi antar *stakeholders* (pentahelix), menjadikan desa miskin sebagai laboratorium dengan basis data yang jelas dan yang lebih penting lagi adalah mencoba menghidupkan kembali sosial capital di tengah masyarakat. Konsep pengembangan dan pelaksanaan telah diterbitkan dalam **Buku Panduan Pengembangan “Laboratorium Kemiskinan (Jurus Jitu Pengentasan Kemiskinan Berkearifan Lokal)** oleh Bappeda Litbang Kab. Pekalongan di Tahun 2020.

Selanjutnya persentase penduduk miskin Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.29
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan
dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020

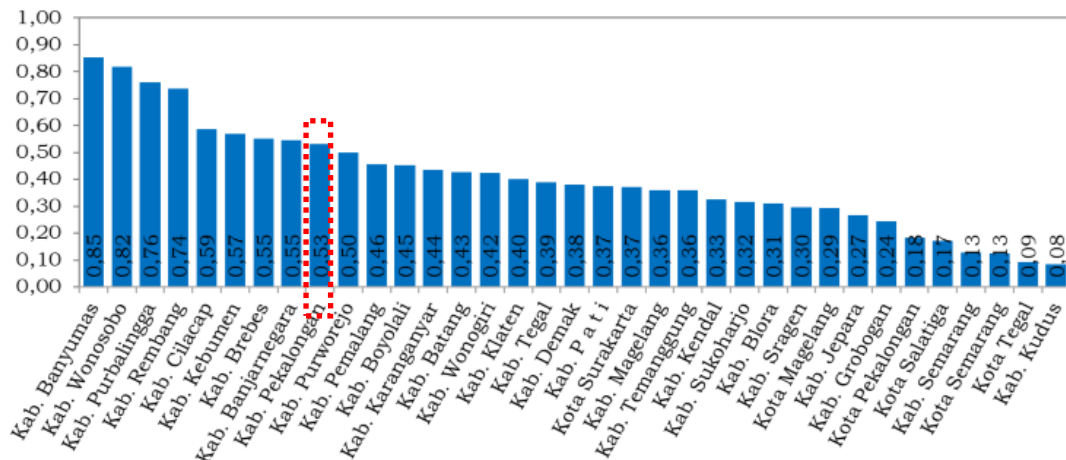
No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	12,90	12,61	10,06	9,71	10,19
2	Kab. Batang	11,04	10,80	8,69	8,35	9,13

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
3	Kab. Pemalang	17,58	17,37	16,04	15,41	16,02
4	Kab. Tegal	10,10	9,90	7,94	7,64	8,14
5	Kota Pekalongan	7,92	7,47	6,75	6,60	7,17

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



Gambar 2.29 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan, Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020



Gambar 2.30 Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Dari tabel dan gambar diatas, persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebesar 10,19 persen hanya lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pemalang sebesar 16,02 persen dan lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 9,13 persen, Kabupaten Tegal sebesar 8,14 persen dan Kota Pekalongan sebesar 7,17 persen. Namun demikian Kabupaten Pekalongan berhasil menurunkan angka kemiskinan rata-rata sebesar 0,53 persen, paling besar di bandingkan dengan kabupaten/kota sekitar selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan **masih perlu percepatan dan inovasi kegiatan** dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pekalongan seiring dengan masih adanya pandemi COVID-19.

5) Jumlah Penduduk Miskin

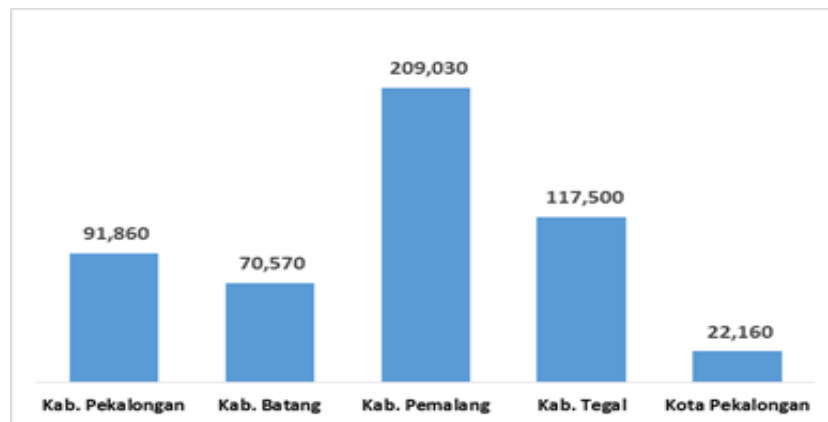
Jumlah penduduk miskin Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan selama 4 (empat) tahun terakhir dari 113.310 jiwa di Tahun 2016 menjadi 87.010 jiwa di Tahun 2019 dan mengalami peningkatan sebesar 91.860 jiwa di tahun 2020 seiring adanya pandemi COVID-19. Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan

kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.30
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan
dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 (jiwa)

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	113.310	111.580	89.540	87.010	91.860
2	Kab. Batang	82.600	81.500	66.100	64.070	70.570
3	Kab. Pemasang	227.100	225000	208.300	200.670	209.030
4	Kab. Tegal	144.200	141.800	114.100	109.940	117.500
5	Kota Pekalongan	23.600	22.500	20.500	20.210	22.160
6.	Prov. Jawa Tengah	4.506.890	4 450.720	3.897.200	3.743.230	3.980.900

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021

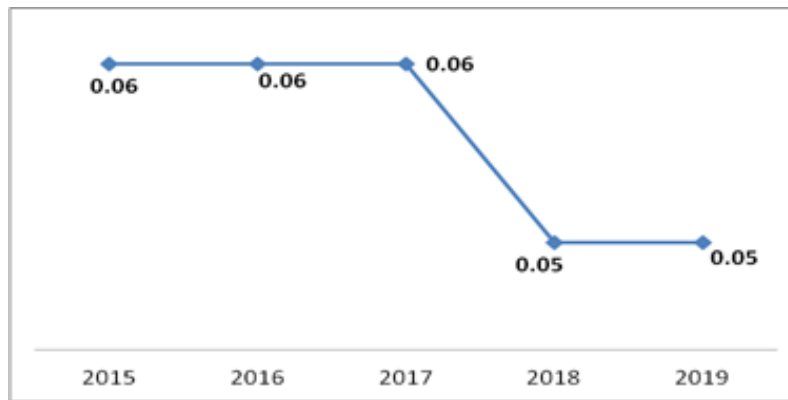


Gambar 2.31 Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (jiwa)

Dari tabel dan gambar diatas, jumlah penduduk miskin Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebesar 91.860 jiwa lebih rendah dari Kabupaten Pemasang sebesar 209.030 jiwa dan Kabupaten Tegal sebesar 117.500 jiwa dan lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 70.570 jiwa dan Kota Pekalongan sebesar 22.160 jiwa.

e. Indeks Ketimpangan Williamson

Ukuran ketimpangan pendapatan yang lebih penting lagi untuk menganalisis seberapa besarnya kesenjangan antarwilayah/daerah adalah dengan melalui perhitungan indeks *Williamson*. Dasar perhitungannya adalah dengan menggunakan PDRB per kapita dalam kaitannya dengan jumlah penduduk per kecamatan. Indeks ketimpangan *Williamson* yang diperoleh terletak antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika ketimpangan *Williamson* mendekati 0 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara daerah merata. Jika ketimpangan *Williamson* mendekati 1 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan di Kabupaten Pekalongan adalah tinggi atau pertumbuhan ekonomi antara daerah tidak merata. Untuk mengetahui tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2.32 Indeks Ketimpangan Williamson Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019

Nilai ketimpangan *williamson* Tahun 2019 sebesar 0,05 (mendekati 0), maka di Kabupaten Pekalongan terjadi ketimpangan distribusi yang rendah yaitu terjadinya pertumbuhan ekonomi antara daerah yang merata. Kondisi ini sama jika dibandingkan dengan indeks pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 yang sebesar 0,05 artinya pemerataan pembangunan mengalami perbaikan. Indeks *williamson* yang terus mengalami perbaikan juga bisa diartikan suatu keberhasilan dalam upaya pemerataan pembangunan di Kabupaten Pekalongan.

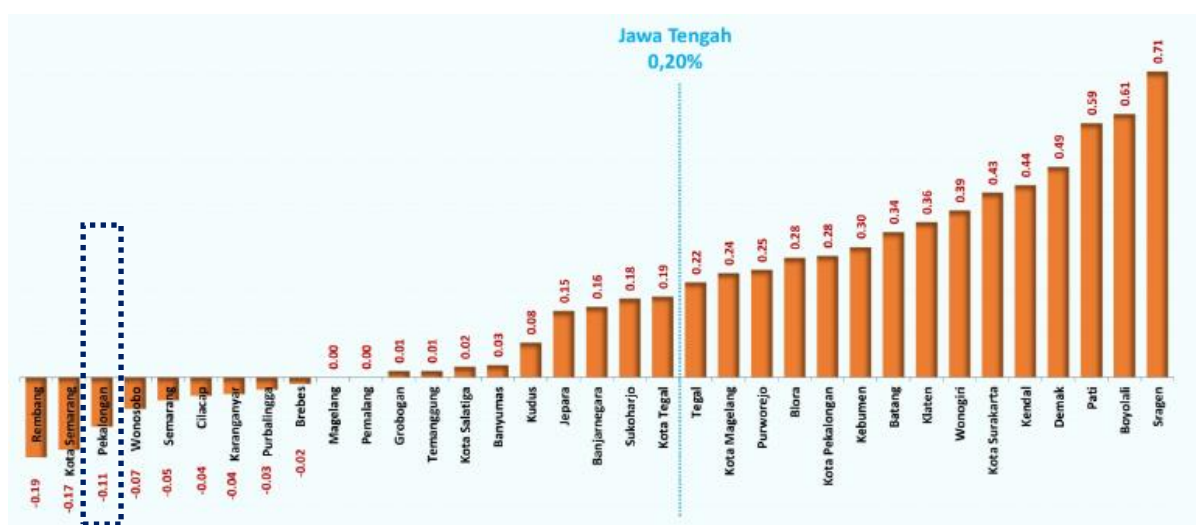
2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Manfaat IPM antara lain : (1)**Ukuran Keberhasilan**; IPM merupakan indikator penting untuk *mengukur keberhasilan* dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk); (2)**Target Pembangunan**; IPM merupakan salah satu indikator *target pembangunan* pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI (Rancangan RKP dan RAPBN); (3)**Dana Alokasi Umum**; IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan *Dana Alokasi Umum (DAU)*; (4)**Dana Insentif Daerah**; Komponen IPM (HLS, RLS dan Pengeluaran) merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan *Dana Insentif Daerah (DID)*.

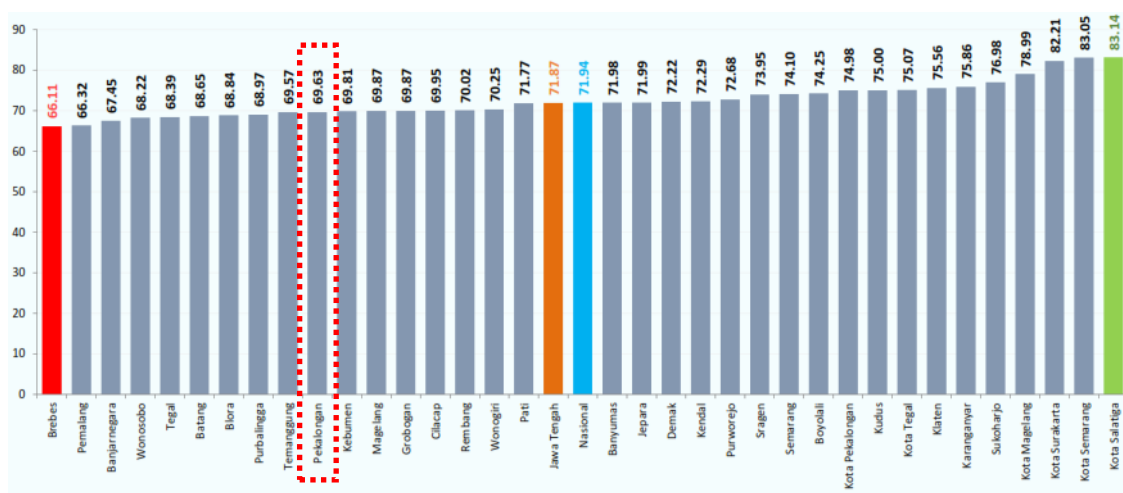
IPM merupakan indikator jangka panjang sehingga perlu kehati-hatian dalam memaknainya. Kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat dari (1)Kecepatan IPM; kecepatan IPM menggambarkan hasil dari upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode dan (2)Status IPM; status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode.

Perkembangan IPM Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 2016-2020 cenderung meningkat walaupun sedikit mengalami penurunan di tahun 2020. IPM Kabupaten Pekalongan meningkat dari 68,97 pada tahun 2018 menjadi 69,63 pada tahun 2020. Dari kecepatan IPM Kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2019-2020, Kabupaten Pekalongan (-0,11%) termasuk **3 besar** Kabupaten/kota yang mengalami penurunan paling tinggi bersama-sama Kabupaten Rembang (-0,19%) dan Kota Semarang (-0,17%). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.33 Pertumbuhan IPM kabupaten/kota se Jawa Tengah Tahun 2020

Meskipun selama periode 2016-2020 IPM Kabupaten Pekalongan menunjukkan kemajuan yang besar, status pembangunan manusia Kabupaten Pekalongan masih stagnan. Hingga saat ini, pembangunan manusia Kabupaten Pekalongan masih berstatus “sedang ($60 \leq IPM < 70$)”, dan masih sama sejak tahun 2014. Secara umum capaian IPM Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 masih di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Selisih antara IPM tertinggi dan terendah 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah pada tahun 2020 sebesar 17,03 poin, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2019 yang besarnya 17,07 poin. Hal ini dapat dilihat dalam gambar berikut.



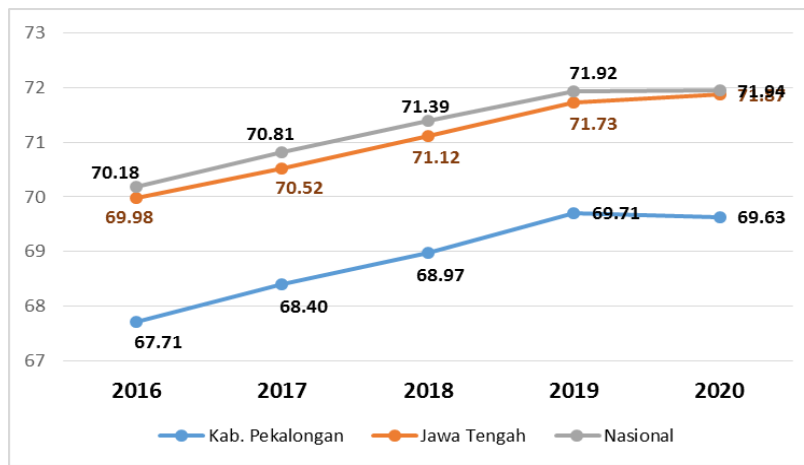
Gambar 2.34 IPM kabupaten/kota se-Jawa Tengah Tahun 2020

Perkembangan IPM Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.31 Perbandingan IPM Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan	67,71	68,40	68,97	69,71	69,63
2.	Jawa Tengah	69,98	70,52	71,12	71,73	71,87
3.	Nasional	70,18	70,81	71,39	71,92	71,94

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



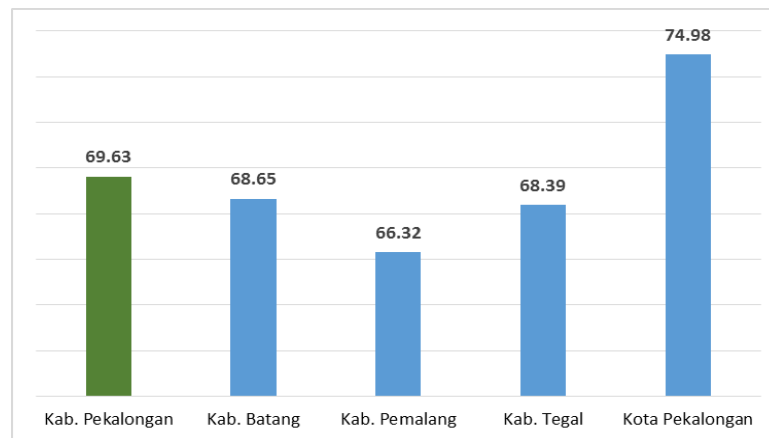
Gambar 2.35 IPM Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.32
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	67,71	68,40	68,97	69,71	69,63
2	Kab. Batang	66,38	67,35	67,86	68,42	68,65
3	Kab. Pemalang	64,17	65,04	65,67	66,32	66,32
4	Kab. Tegal	65,84	66,44	67,33	68,24	68,39
5	Kota Pekalongan	73,32	73,77	74,24	74,77	74,98

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



Gambar 2.36 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020

Dari gambar tabel dan gambar diatas, IPM Kabupaten Pekalongan pada 2020 sebesar 69,63% lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 68,65%, Kabupaten Pemalang sebesar 66,32% dan Kabupaten Tegal sebesar 68,39% dan lebih rendah dibandingkan dengan Kota Pekalongan sebesar 74,98%. Salah satu penyebab IPM kabupaten Pekalongan cukup tinggi diantaranya adanya **Gerakan KUDU Sekolah** (Kembali Upayakan Dukungan untuk Sekolah) sebagai salah satu upaya terobosan untuk memperkuat indeks pendidikan, sekaligus mendorong peningkatan IPM Kabupaten Pekalongan.

Adapun komponen pembentuk IPM secara lengkap yang meliputi meliputi Umur Harapan Hidup (UHH); pendidikan diukur dengan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS); serta dimensi pengeluaran diukur dengan pengeluaran per kapita dapat dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.33
Komponen Pembentuk IPM Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Umur Harapan Hidup/UHH (th)	Harapan Lama Sekolah/HLS (th)	Rata-rata Lama Sekolah/RLS (th)	Pengeluaran Perkapita disesuaikan (ribu Rp)	IPM
2016	73,41	12,15	6,56	9.300	67,71
2017	73,46	12,16	6,73	9.702	68,40
2018	73,53	12,17	6,74	10.221	68,97
2019	73,57	12,40	6,88	10.508	69,71
2020	73,69	12,41	6,91	10.312	69,63

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021

b. Harapan Lama Sekolah

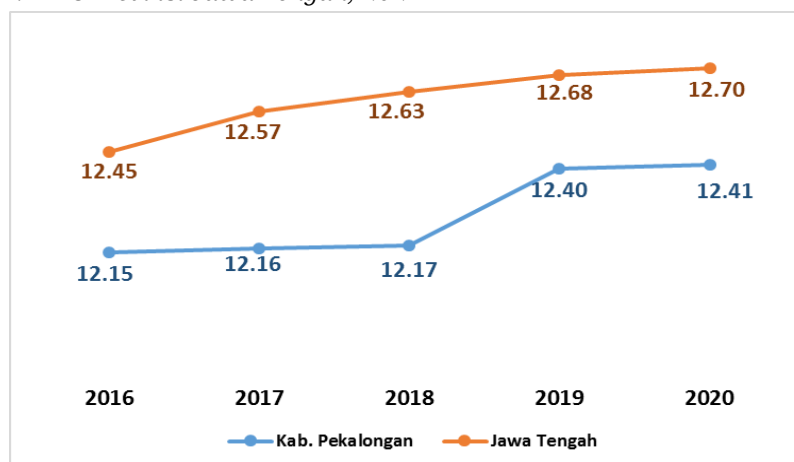
HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perkembangan HLS Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.34
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (tahun)

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan (tahun)	12,15	12,16	12,17	12,40	12,41
2.	Jawa Tengah (tahun)	12,45	12,57	12,63	12,68	12,70

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar 2.37 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa bahwa HLS di Kabupaten Pekalongan meningkat sebesar 12,40 tahun di Tahun 2019 menjadi 12,41 tahun di Tahun 2020. Namun demikian rata-rata capaian HLS Kabupaten Pekalongan masih lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,70.

Sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.35
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan
Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-
2020 (tahun)

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	12,15	12,16	12,17	12,40	12,41
2	Kab. Batang	11,51	11,87	11,88	12,00	12,01
3	Kab. Pemasang	11,87	11,88	11,95	11,94	11,95
4	Kab. Tegal	12,01	12,06	12,34	12,58	12,67
5	Kota Pekalongan	12,77	12,78	12,79	12,83	12,84

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



Gambar 2.38 **Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Pekalongan**
dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun
2020 (tahun)

Dari tabel dan gambar diatas, HLS Kabupaten Pekalongan pada 2020 sebesar 12,41 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 12,01 tahun dan Kabupaten Pemasang sebesar 11,95 tahun dan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Tegal sebesar 12,67 tahun dan Kota Pekalongan sebesar 12,84 tahun.

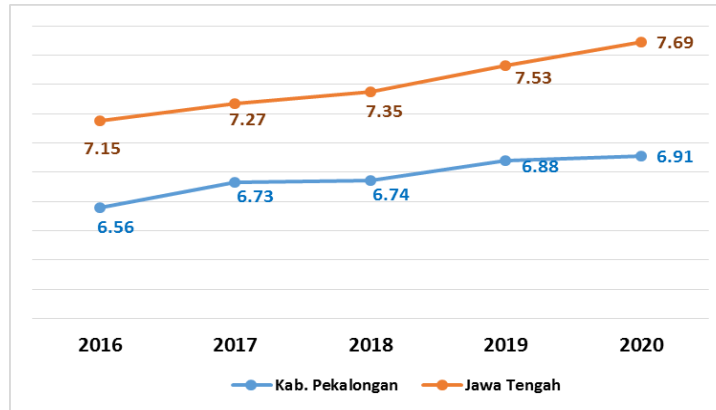
c. Rata-rata lama sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.36
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (tahun)

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan (tahun)	6,56	6,73	6,74	6,88	6,91
2.	Jawa Tengah (tahun)	7,15	7,27	7,35	7,53	7,69

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



Gambar 2.39 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

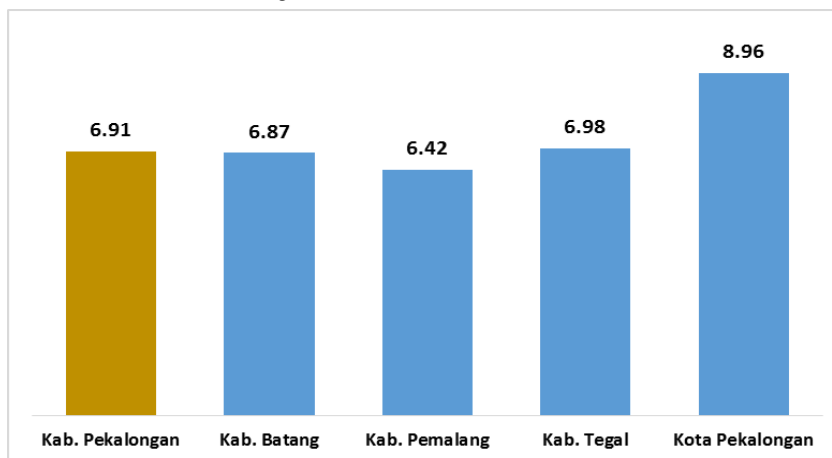
Berdasarkan tabel dan gambar diatas, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Pekalongan meningkat dari 6,88 tahun di Tahun 2019 menjadi 6,91 tahun di Tahun 2020. Namun demikian rata-rata capaian RLS Kabupaten Pekalongan masih lebih rendah dari capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 7,69 tahun.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.37
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	6,56	6,73	6,74	6,88	6,91
2	Kab. Batang	6,42	6,61	6,62	6,63	6,87
3	Kab. Pemasang	6,05	6,31	6,32	6,41	6,42
4	Kab. Tegal	6,54	6,55	6,70	6,86	6,98
5	Kota Pekalongan	8,29	8,56	8,57	8,71	8,96

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



Gambar 2.40 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020

Dari gambar diatas, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Pekalongan pada 2020 sebesar 6,91 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 6,87 tahun, dan Kabupaten Pemalang sebesar 6,42 tahun dan lebih rendah dengan Kabupaten Tegal sebesar 6,98 tahun serta Kota Pekalongan sebesar 8,96 tahun.

d. Umur Harapan Hidup (UHH)

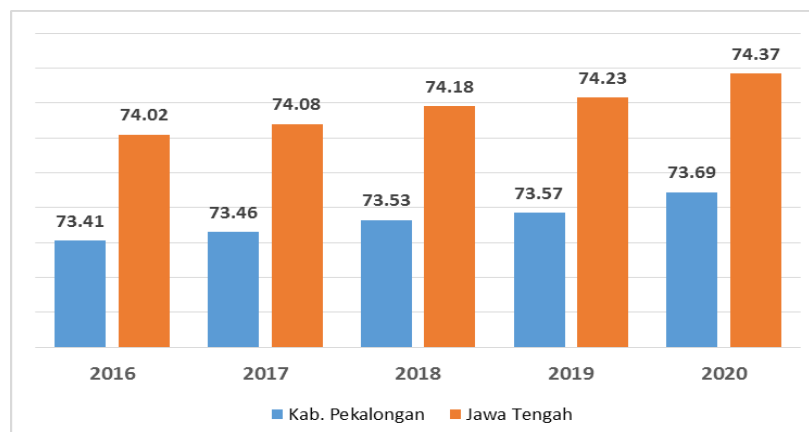
UHH adalah angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang yang dihitung sejak dilahirkan dan merupakan ukuran terhadap peningkatan kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Pekalongan secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata umur harapan hidup yang semakin panjang.

Perkembangan UHH Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.38
Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (tahun)

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan (tahun)	73,41	73,46	73,53	73,57	73,69
2.	Jawa Tengah (tahun)	74,02	74,08	74,18	74,23	74,37

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar 2.41 Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (tahun)

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa Umur Harapan hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan dari 73,57 tahun di tahun 2019 menjadi sebesar 73,69 tahun di Tahun 2020. Namun angka tersebut masih di bawah angka Provinsi Jawa Tengah yaitu 74,37 tahun. Pertumbuhan ekonomi pada sub kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial pada tahun 2020 sebesar 12,35% ikut andil mendorong tumbuhnya komponen UHH disamping program kesehatan yang dilaksanakan pemerintah pusat dan daerah.

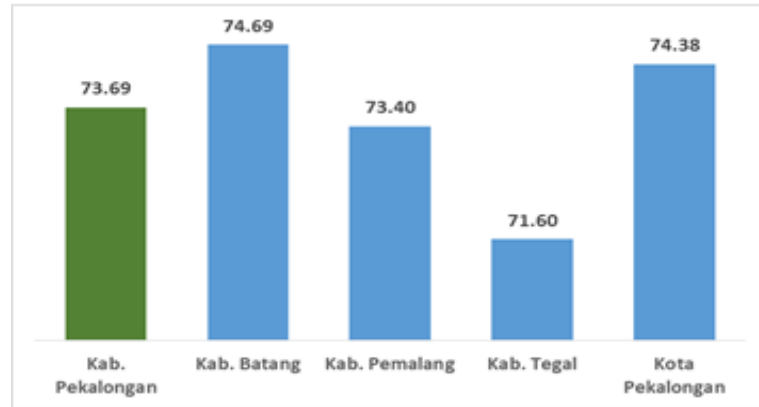
Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.39
Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	73,41	73,46	73,53	73,57	73,69
2	Kab. Batang	74,46	74,50	74,56	74,59	74,69

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
3	Kab. Pemalang	72,87	72,98	73,11	73,22	73,40
4	Kab. Tegal	71,02	71,14	71,28	71,40	71,60
5	Kota Pekalongan	74,15	74,19	74,25	74,28	74,38

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



Gambar 2.42 Umur Harapan Hidup (UHH) Saat Lahir Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020

Dari tabel dan gambar diatas, Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Pekalongan pada 2020 sebesar 73,69 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Pemalang sebesar 73,40 tahun dan Kabupaten Tegal sebesar 71,60 tahun dan lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 74,69 tahun dan Kota Pekalongan sebesar 74,38 tahun.

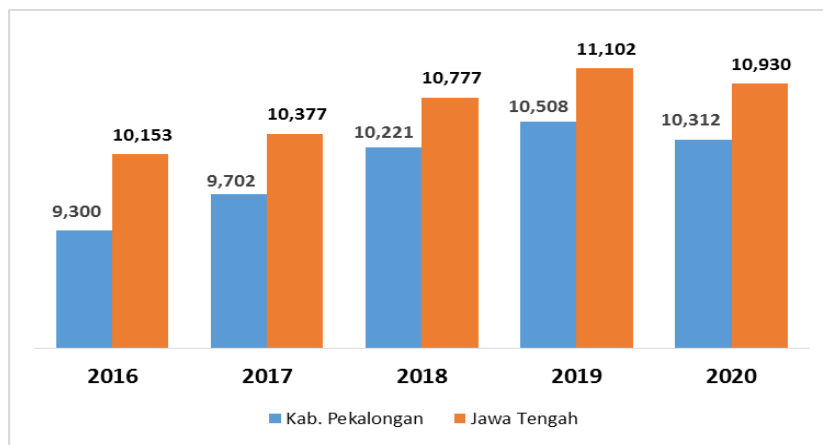
e. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita disesuaikan di Kabupaten Pekalongan menurun dari Rp. 10.508.000,- di tahun 2019 menjadi Rp.10.312.000.00 di tahun 2020. Capaian Kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Pekalongan mengalami penurunan seiring dengan adanya pandemi COVID-19. Capaian pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Pekalongan dari 2016-2020 secara umum di bawah pencapaian Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengeluaran perkapita di Kabupaten Pekalongan semakin meningkat, namun peningkatan daya beli rumah tangga masih di bawah Provinsi Jawa Tengah. Perkembangan pengeluaran perkapita (d disesuaikan) Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.40 Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

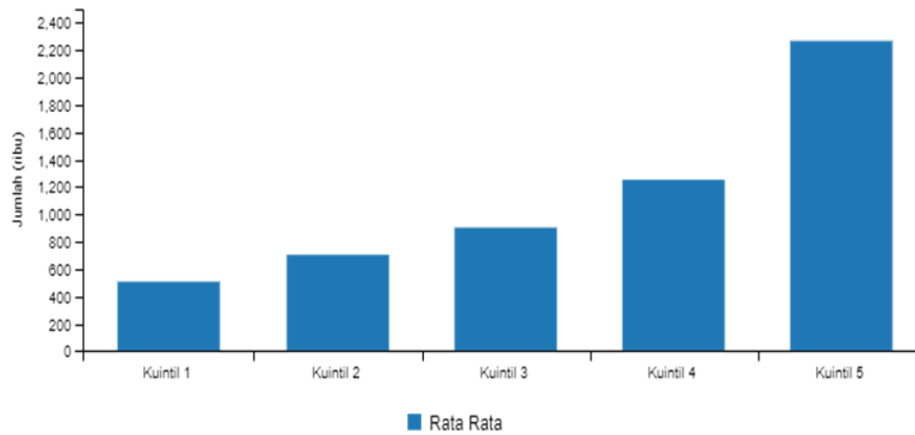
No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan (ribu Rp/org/th)	9.300	9.702	10.221	10.508	10.312
2.	Jawa Tengah (Ribu Rp/org/th)	10.153	10.377	10.777	11.102	10.930

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



Gambar 2.43 Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Selain kemiskinan, isu ketimpangan juga masih menjadi persoalan yang serius dan juga berpotensi meningkat di Kabupaten Pekalongan berikut hasil data analisa rata – rata pengeluaran penduduk dapat dilihat pada gambar dibawah ini dimana Penduduk kuintil 1 berpenghasilan rerata hanya Rp 508 rb, sedangkan kuintil 5 rerata Rp 2,265 Juta.



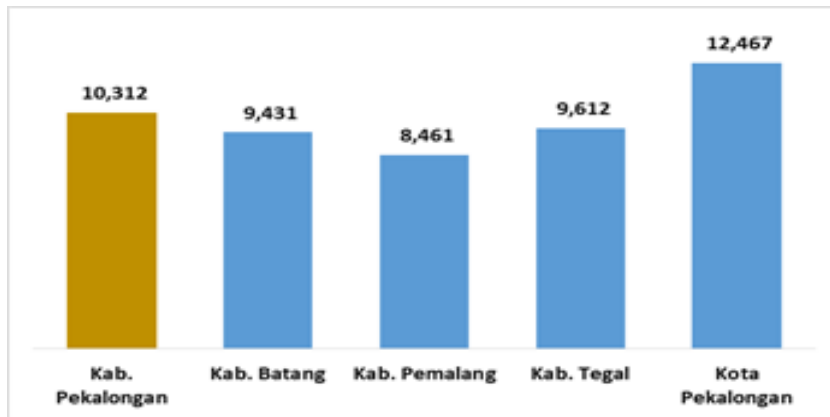
Gambar 2.44 Rata-Rata Pengeluaran Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2020 (ribu Rp/tahun)

Pengeluaran perkapita disesuaikan Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.41 Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	9.300	9.702	10.221	10.508	10 312
2	Kab. Batang	8.568	8.805	9.203	9.573	9.431
3	Kab. Pemasang	7.447	7.785	8.186	8.546	8.461
4	Kab. Tegal	8.709	9.136	9.433	9.798	9.612
5	Kota Pekalongan	11.721	11.800	12.312	12.680	12.467

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2016-2020



Gambar 2.45 Pengeluaran per kapita Disesuaikan Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2020

Dari gambar 2.45, pengeluaran per kapita disesuaikan Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebesar Rp.10.312.000,- lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar Rp.9.431.000,-, Kabupaten Pemalang sebesar Rp. 8.461.000,- dan lebih rendah dibandingkan Kabupaten Tegal sebesar Rp.9.612.000,- dan Kota Pekalongan sebesar Rp.12.467.000,-.

f. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

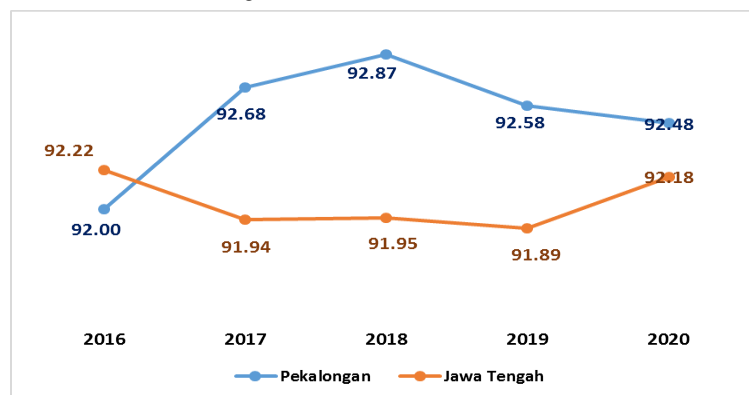
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan tercapai apabila angka IPM perempuan dibanding IPM laki-laki berada pada angka 100. Angka tersebut ditunjukkan pada capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG), yang didukung peningkatan pembangunan bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan.

Perbandingan IPG Kabupaten Pekalongan dengan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.42
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	92,00	92,68	92,87	92,58	92,48
2	Jawa Tengah	92,22	91,94	91,95	91,89	92,18

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



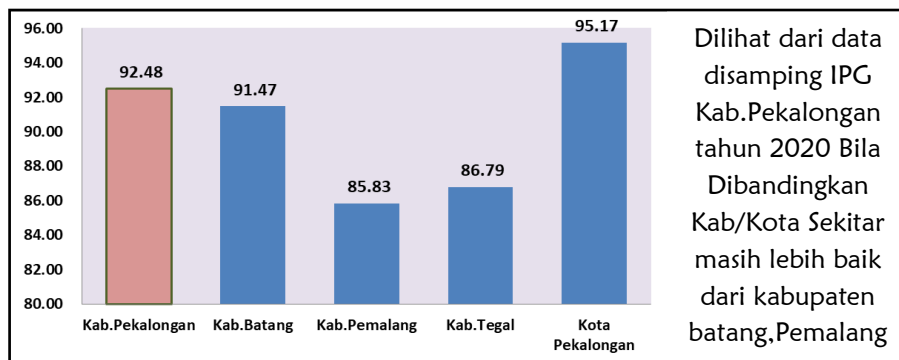
Gambar 2.46 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel dan gambar diatas, capaian IPG Kabupaten Pekalongan capaian rata-rata di atas Provinsi Jawa Tengah. Kemudian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.43
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan
Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	91,84	92,68	92,87	92,58	92,48
2	Kab. Batang	90,99	90,49	90,65	91,08	91,47
3	Kab. Pemalang	84,46	85,47	85,49	85,81	85,83
4	Kab. Tegal	87,03	87,52	86,95	86,74	86,79
5	Kota Pekalongan	94,71	94,43	94,59	94,92	95,17

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar 2.47 **Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Pekalongan**
Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020

Adapun faktor-faktor pembentuk IPG di Kabupaten Pekalongan dapat dijelaskan sebagai berikut :

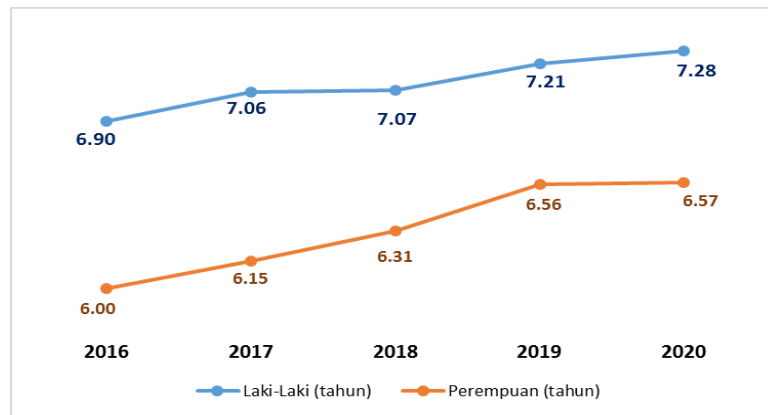
1) Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin

Capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin, dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki selama kurun waktu tahun 2016-2020 lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2020 RLS penduduk laki-laki sebesar 7,28 tahun sedangkan perempuan sebesar 6,57 tahun. Tentunya perlu ada peningkatan partisipasi pendidikan penduduk perempuan agar tercipta kesetaraan lama sekolah. Hal ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.44
Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin
Kabupaten Pekalongan 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laki-Laki (tahun)	6,90	7,06	7,07	7,21	7,28
2	Perempuan (tahun)	6,00	6,15	6,31	6,56	6,57

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar 2.48 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020 (tahun)

Dari tabel dan gambar diatas, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) perempuan lebih rendah daripada laki-laki dikarenakan antara lain masih melekatnya budaya patriarki (menempatkan kedudukan/hak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan) termasuk hak mendapatkan pendidikan formal, serta masih dijumpainya pernikahan usia anak di beberapa daerah yang mengakibatkan putus sekolah pada anak perempuan.

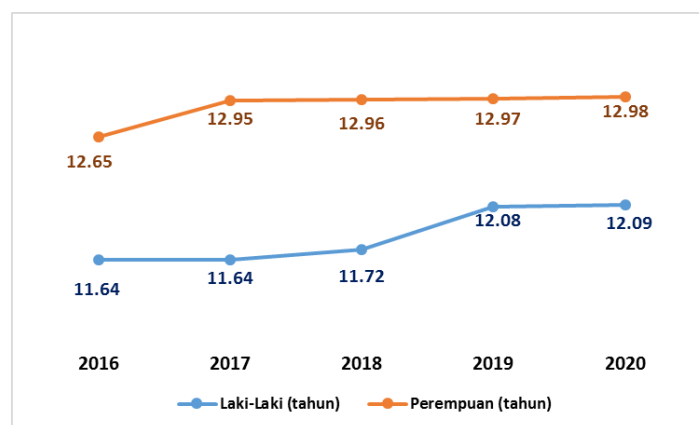
2) Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin

Kondisi Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan tahun 2015-2019 untuk penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan penduduk perempuan. Pada tahun 2020 HLS perempuan sebesar 12,98 tahun, sedangkan laki-laki sebesar 12,09 tahun. Hal ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.45 Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laki-Laki (tahun)	11,64	11,64	11,72	12,08	12,09
2	Perempuan (tahun)	12,65	12,95	12,96	12,97	12,98

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar 2.49 Harapan Lama Sekolah (HLS) menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020 (tahun)

3) Umur Harapan Hidup (UHH) menurut jenis kelamin

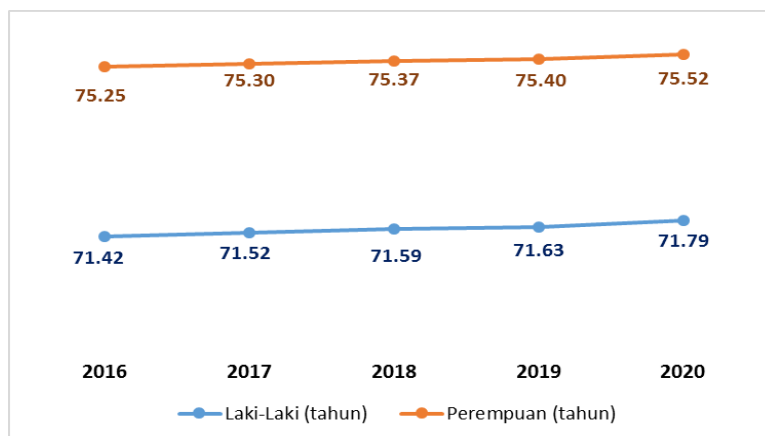
Capaian Umur Harapan Hidup (UHH), perempuan dari tahun 2017-2020 selalu lebih tinggi dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup (UHH) Laki-laki. Pada Tahun 2016 UHH perempuan sebesar 75,25 tahun naik menjadi 75,52 tahun pada tahun 2020. Sedangkan UHH laki-laki pada

tahun 2016 sebesar 71,42 tahun naik menjadi 71,79 tahun pada tahun 2020. Hal ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.46
Umur Harapan Hidup (UHH) menurut jenis kelamin
Kabupaten Pekalongan 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laki-Laki (tahun)	71,42	71,52	71,59	71,63	71,79
2	Perempuan (tahun)	75,25	75,30	75,37	75,40	75,52

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar 2.50 Umur Harapan Hidup (UHH) menurut jenis kelamin
Kabupaten Pekalongan 2016-2020 (tahun)

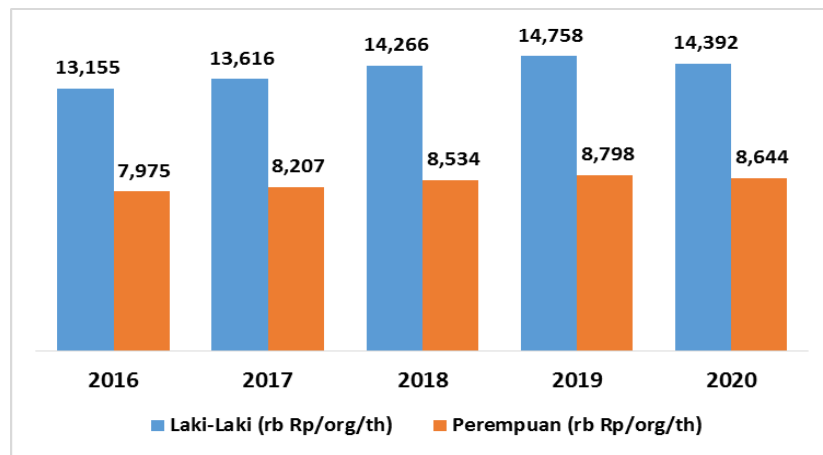
4) Pengeluaran perkapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin

Capaian pengeluaran perkapita yang disesuaikan dari Tahun 2016-2020 untuk penduduk laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Pengeluaran perkapita penduduk laki-laki meningkat dari sebesar 13.155 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2016 menjadi 14.392 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2020. Sementara itu pengeluaran perkapita penduduk perempuan naik dari sebesar 7.975 ribu rupiah/orang/tahun pada tahun 2016 menjadi 8.644 ribu rupiah/orang/tahun di tahun 2020. Ketimpangan pengeluaran perkapita yang disesuaikan antara perempuan dan laki-laki disebabkan oleh kompetensi perempuan yang masih rendah dan akses ekonomi terhadap perempuan masih terbatas, sehingga masih belum bisa bersaing dengan laki-laki. Selain itu capaian pengeluaran perkapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019 yang disebabkan adanya pandemi COVID-19. Hal ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.47
Pengeluaran perkapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin
Kabupaten Pekalongan 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Laki-Laki (rb Rp/org/th)	13.155	13.616	14.266	14.758	14.392
2	Perempuan (rb Rp/org/th)	7.975	8.207	8.534	8.798	8.644

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar 2.51 Pengeluaran perkapita yang disesuaikan menurut jenis kelamin Kabupaten Pekalongan 2016-2020 (Ribu Rupiah/Tahun)

g. Indeks Pemberdayaan Gender

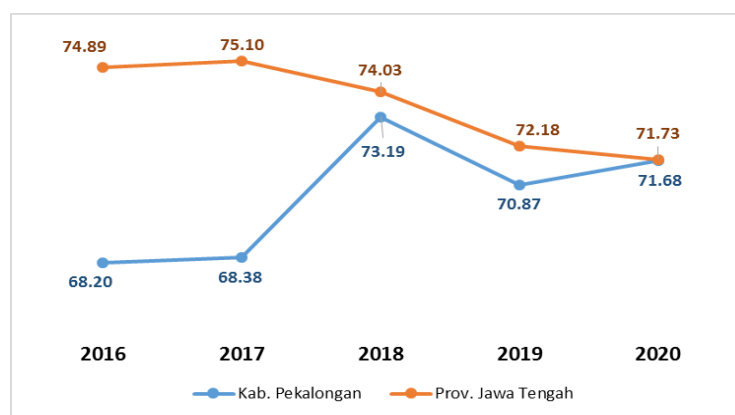
Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Komponen pembentuk IDG tahun 2020 di Kabupaten Pekalongan antara lain : keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

IDG Kabupaten Pekalongan naik dari 70,87 di tahun 2019 menjadi 71,68 di Tahun 2020. Rata-rata capaian IDG masih berada di bawah Provinsi Jawa Tengah. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

**Tabel 2.48
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Pekalongan	68,20	68,38	73,19	70,87	71,68
2	Jawa Tengah	74,89	75,10	74,03	72,18	71,73

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar 2.52 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

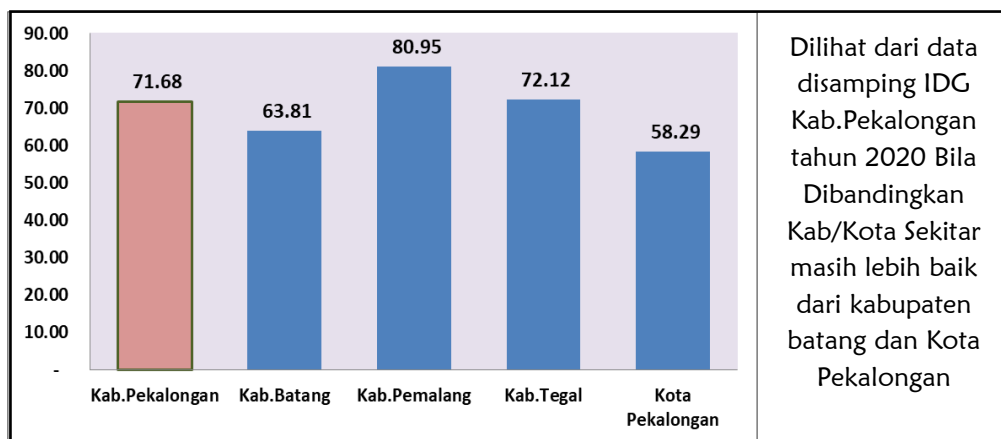
Dari tabel dan gambar diatas. apabila dianalisis lebih lanjut dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Pekalongan ke depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih menjadi perhatian ke depan adalah masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), kurangnya peran serta perempuan khususnya di bidang politik, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan

dan laki-laki. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.49
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan
Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	68,09	68,38	73,19	70,87	71,68
2	Kab. Batang	68,12	66,58	66,29	63,78	63,81
3	Kab. Pemalang	68,73	70,52	68,95	80,08	80,95
4	Kab. Tegal	77,06	68,90	69,25	72,58	72,12
5	Kota Pekalongan	67,44	65,11	68,62	60,95	58,29

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar 2.53 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Pekalongan Dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020

h. Tingkat Pengangguran Terbuka

1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

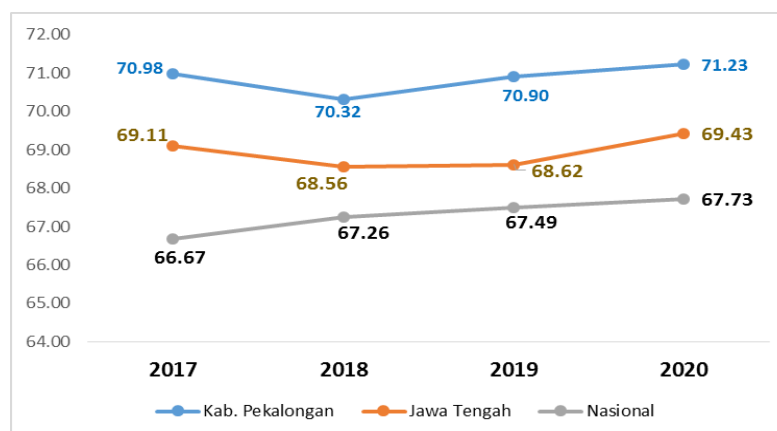
Jumlah pengangguran akan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana partisipasi angkatan kerja dalam aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Keterlibatan penduduk yang aktif dalam kegiatan ekonomi diukur dari banyaknya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masuk dalam pasar kerja, baik mereka yang statusnya bekerja atau yang mencari pekerjaan (menganggur). Indikator yang digunakan untuk mengukur adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi. Indikator ini diperoleh dari perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja inilah yang menunjukkan seberapa besar persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah atau negara. TPAK yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu wilayah. Karena semakin tinggi TPAK, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi; semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Capaian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.50
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan	64,80	70,98	70,32	70,90	71,23
2.	Jawa Tengah	67,15	69,11	68,56	68,62	69,43
3.	Nasional	66,34	66,67	67,26	67,49	67,73

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar 2.54 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

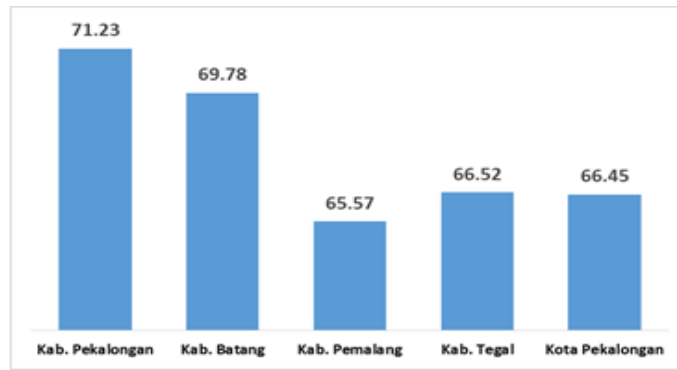
Berdasarkan tabel dan gambar diatas, TPAK Kabupaten Pekalongan pada 2020 sebesar 71,23 persen naik dibandingkan dengan TPAK 2019 sebesar 70,90 persen. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa sehingga berpengaruh kepada nilai TPT. Namun demikian analisis TPAK ini tanpa dibarengi dengan variabel lainnya belum dapat menggambarkan baik buruknya kondisi ketenagakerjaan di suatu wilayah. TPAK yang besar belum menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik. Jika besarnya TPAK berasal dari jumlah penduduk bekerja, maka dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan yang baik karena penyerapan tenaga kerja tinggi, tetapi jika berasal dari yang menganggur justru akan menimbulkan persoalan tersendiri.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.51
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	64,80	70,98	70,32	70,90	71,23
2	Kab. Batang	-	67,70	70,05	68,53	69,78
3	Kab. Pemasang	-	65,57	65,01	66,14	65,57
4	Kab. Tegal	-	66,41	65,26	66,24	66,52
5	Kota Pekalongan	-	69,28	70,21	72,32	66,45

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar 2.55 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020

Dari tabel dan gambar diatas, TPAK Kabupaten Pekalongan pada 2020 sebesar 71,23 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 69,78 persen, Kabupaten Pemalang sebesar 65,57 persen, Kabupaten Tegal sebesar 66,52 persen dan Kota Pekalongan sebesar 66,45 persen.

2) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

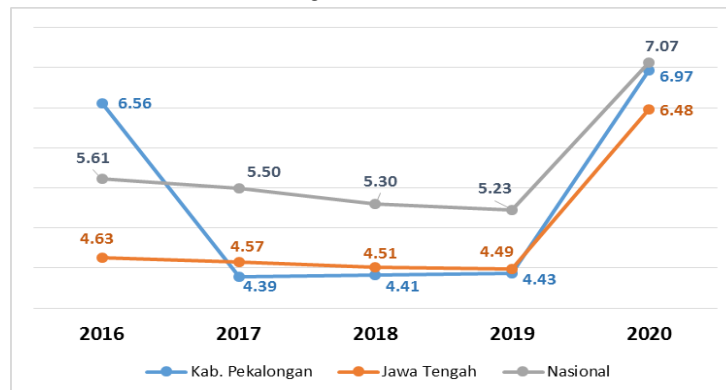
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. TPT yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.52 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

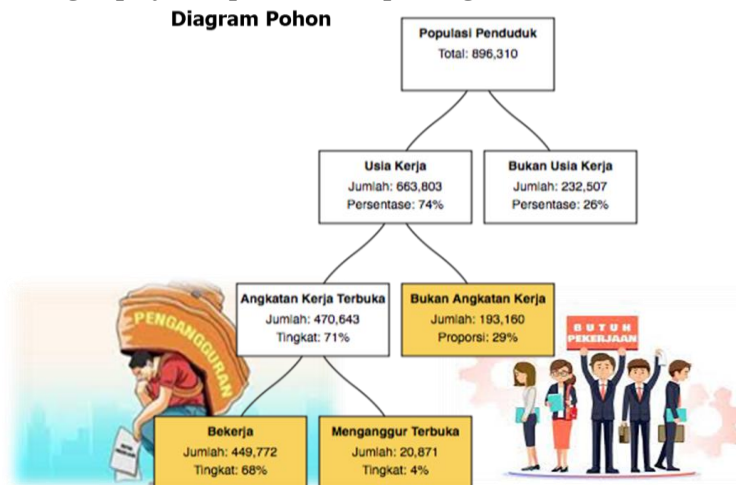
No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan	6,56	4,39	4,41	4,43	6,97
2.	Jawa Tengah	4,63	4,57	4,51	4,49	6,48
3.	Nasional	5,61	5,50	5,30	5,23	7,07

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



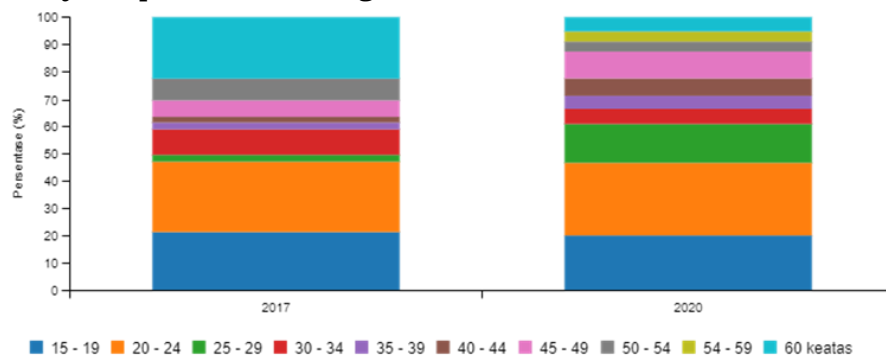
Gambar 2.56 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan, dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Dari tabel dan gambar di atas, perkembangan TPT di Kabupaten Pekalongan selama periode 2016-2020 cenderung mengalami kenaikan selama 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2017 sebesar 4,39 persen naik tajam menjadi 6,97 persen di Tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan ketenagakerjaan masih menjadi isu utama dalam pembangunan. Kemudian dilihat dari capaian nilai TPT Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 menggambarkan adanya dampak pengangguran dari lokasi, bahwa peningkatan pengangguran di kota jauh lebih tinggi dibandingkan desa. Pandemi ini dampaknya jauh tajam untuk di kota. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar di berikut.

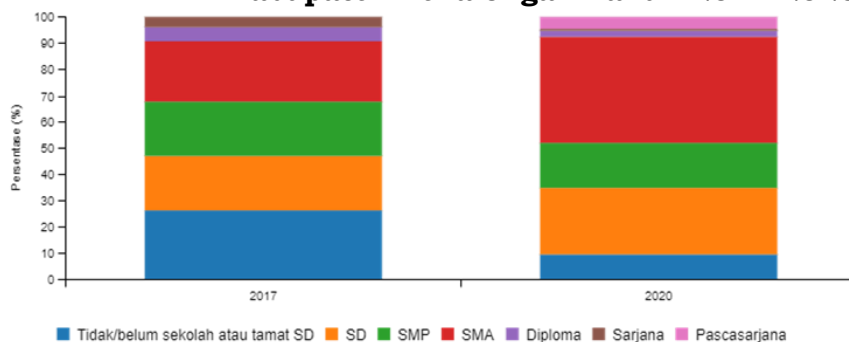


Gambar 2.57 Diagram Pohon Pengangguran Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

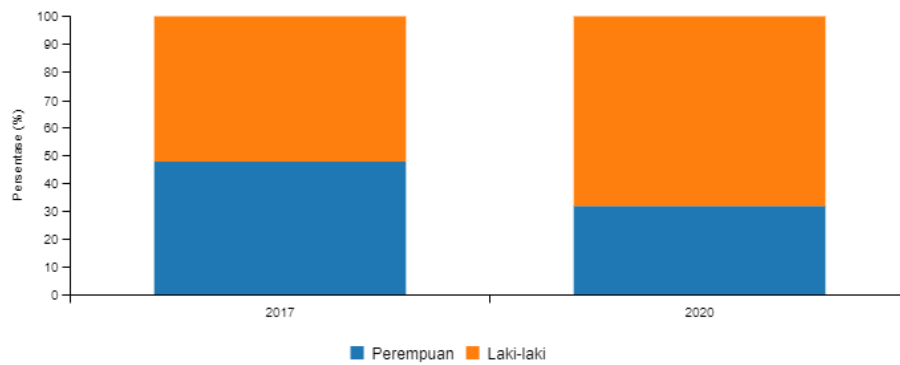
Pengangguran terbuka 2019 sebesar 4,43%, dan meningkat menjadi 6,97% di 2020. Salah satunya akibat Pandemi Covid-19, Dengan tingkat kemiskinan 10,19 %, diasumsikan terdapat 3% orang bekerja tetapi tetap saja miskin. Hal ini mengindikasikan: selain ada **persoalan pengangguran**, ada juga **persoalan rendahnya produktivitas kerja dan pendapatan penduduk**. Untuk mengetahui siapa pengangguran pada usia berapa dan pendidikannya dapat dilihat dari gambar berikut.



Gambar 2.58 Rata-Rata Usia Penduduk Menganggur Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2020



Gambar 2.59 Klasifikasi Ketrampilan Penduduk Menganggur Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2020



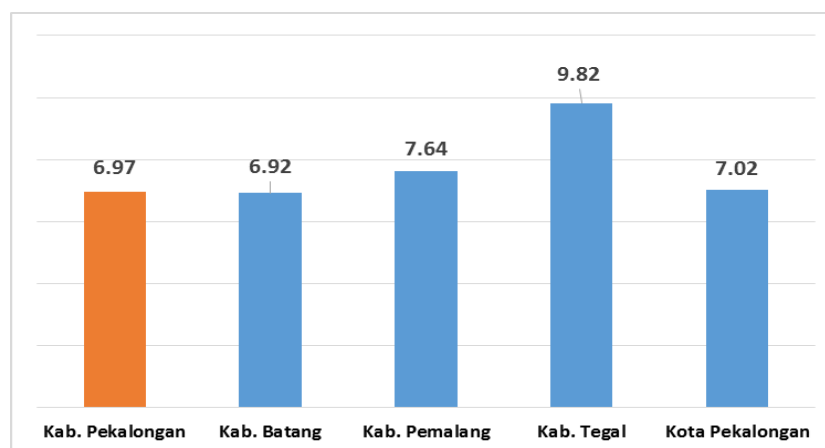
Gambar 2.60 Jenis Kelamin Penduduk Menganggur Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2020

Profil Pengangguran: Penduduk menganggur usia muda (15-29 tahun) sebesar 80,93%; 68% adalah laki-laki dan 40% berpendidikan SMA. Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitar tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.53 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Pekalongan dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2016-2020

No	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1	Kab. Pekalongan	6,56	4,39	4,41	4,43	6,97
2	Kab. Batang	-	5,82	4,23	4,16	6,92
3	Kab. Pemasang	-	5,59	6,21	6,50	7,64
4	Kab. Tegal	-	7,33	8,45	8,21	9,82
5	Kota Pekalongan	-	5,05	6,13	5,77	7,02

Sumber : BPS Provinsi Jateng, Data Maret 2021



Gambar 2.61 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan Dibandingkan dengan Kabupaten/Kota Sekitar Tahun 2020 (%)

Dari tabel dan gambar diatas, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sebesar 6,97 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Batang sebesar 6,92 persen dan lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pemasang sebesar 7,64 persen, Kabupaten Tegal sebesar 9,82 persen dan Kota Pekalongan sebesar 7,02 persen.

3. Fokus Seni Budaya

a. Kebudayaan

Kelompok kesenian pada tahun 2020 sejumlah 257 kelompok yang tersebar di 19 kecamatan se-Kabupaten Pekalongan. Seni budaya di Kabupaten Pekalongan termasuk berkembang dan beraneka ragam. Dalam rangka melestarikan seni dan budaya maka di Kabupaten Pekalongan pada tiap tahun menyelenggarakan festival seni dan budaya masyarakat. Kelompok kesenian yang ada di masyarakat sudah terorganisir dengan kesenian tradisional khas Kabupaten Pekalongan, antara lain adalah tari sintren, kuda kepang, kunthulan, terbang jawan (campuran musikrebana dan pencak silat), dan lain-lain. Kesenian yang paling berkembang dan penggemarnya juga paling banyak adalah tari sintren. Gedung kesenian ada satu buah di Kecamatan Kajen. Gambaran jumlah grup dan gedung kesenian Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Jumlah Grup dan Gedung Kesenian
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah grup kesenian	221	235	257	257	257
2	Jumlah gedung kesenian	1	1	1	1	1
3	Jumlah penduduk	880.092	886.197	891.892	897.711	968.821
4	Rasio grup kesenian (per 10.000 penduduk)	3	3	3	3	3

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan 2021

b. Pemuda dan Olahraga

Pada tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah klub olahraga karena adanya pendataan klub olahraga di semua kecamatan. Gedung yang disediakan pemerintah secara fisik sudah cukup memadai untuk kebutuhan kegiatan olahraga tingkat kabupaten, selain itu juga didukung dengan tempat-tempat pertemuan di tingkat desa/kelurahan yang sebagian besar juga digunakan untuk kegiatan olahraga tingkat desa/kelurahan. Gambaran jumlah klub olahraga dan gedung olahraga dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.55
Jumlah Klub dan Gedung Olahraga
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah klub olahraga (unit)	18	19	20	20	23
2	Jumlah gedung olahraga (unit)	210	210	213	214	214
3	Jumlah penduduk (orang)	880.092	886.197	891.892	897.711	968.821
4	Jumlah klub olahraga per 10.000 pddk (unit)	1	1	1	1	1

Sumber : Dinporapar Kab. Pekalongan, 2021

Dari tabel diatas, jumlah klub olahraga tahun 2020 sebanyak 23 klub yang aktif dari jumlah seluruh organisasi cabang olahraga yang ada di Kabupaten Pekalongan yang terdaftar secara resmi sebanyak 36 klub.

C. Aspek Pelayanan Umum

1. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Urusan pendidikan dengan perincian pembagian kewenangan sebagaimana termuat dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi kewenangan wajib daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan pendidikan di daerah seperti Kabupaten Pekalongan, meliputi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan Kesetaraan. Kewenangan penyelenggaraan pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota antara lain meliputi pengelolaan pendidikan Dasar, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non formal. Penyelenggaraan pelayanan pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan pembangunan pendidikan memberikan kontribusi bagi pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), karena indikator pembentuk IPM dari bidang pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan lama Sekolah. Apabila mengacu pada dokumen RPJMN 2020-2024, salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia adalah peningkatan kualitas pendidikan. Dalam rangka pembangunan daerah di Kabupaten Pekalongan khususnya terkait bidang pendidikan, perlu digambarkan terlebih dahulu kondisi umum pendidikan di Kabupaten Pekalongan. Berikut ini kondisi pendidikan di Kabupaten Pekalongan.

1) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Penyediaan pendidikan yang berkualitas merupakan salah satu poin tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Target Agenda Pendidikan 2030 untuk PAUD adalah memastikan seluruh anak laki-laki dan perempuan memperoleh akses perkembangan, perawatan dan pendidikan pra-SD(PAUD) yang bermutu untuk menjamin kesiapan memasuki pendidikan dasar.

Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (TK/Taman Kanak-Kanak) Kabupaten Pekalongan sejumlah 336 (tiga ratus tiga puluh enam) Lembaga yang terdiri dari :

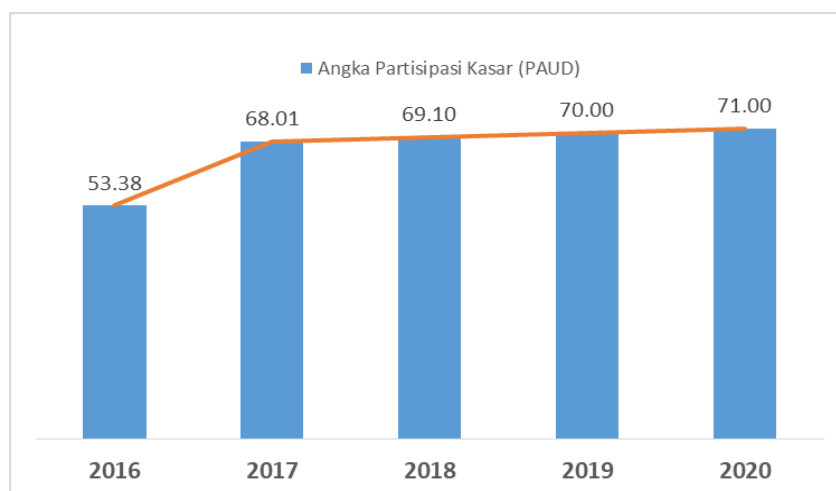
- a. Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri : 3 Lembaga, yang terdiri dari :
 - TK Negeri Pembina Kabupaten Pekalongan
 - TK Negeri Pembina Kec. Kajen
 - TK Negeri Pembina Kec. Karanganyar
- b. Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta : 333 Lembaga

Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak/TK Kabupaten Pekalongan sebanyak 1084 PTK yang terdiri dari Guru PNSD sejumlah 107 Orang, Tenaga Kependidikan PNSD sejumlah 3 Orang, Guru Swasta sejumlah 642 Orang, dan Tenaga Kependidikan Swasta sejumlah 333 Orang.

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini perlu adanya Pengembangan menyeluruh yang meliputi aspek pengasuhan, kesehatan, pendidikan dan perlindungan. Pengembangan menyeluruh tersebut akan dapat dicapai secara optimal pemberian layanan PAUD

yang bermutu dan berkualitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Persentase anak usia 5 - 6 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di PAUD menjadi salah satu indikator SPM yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah.

Selama kurun waktu tahun 2016-2020, perkembangan Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (APK PAUD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 sebagaimana gambar berikut.



Gambar 2.62. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Tahun 2016-2020

Kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan dari 58,38 di Tahun 2016 menjadi 71,00 di Tahun 2020. Sedangkan jumlah siswa PAUD sampai dengan Tahun 2020 sebanyak 41.631 anak. Meski capaian APK PAUD dari tahun ke tahun terus meningkat, namun masih terdapat beberapa kendala dalam upaya peningkatan APK PAUD, terutama masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD. Hal ini paling dirasakan di desa-desa yang sebagian besar masih menganggap bahwa PAUD kurang begitu penting dibanding masuk sekolah dasar. Hal ini tentunya menjadi tugas bersama bagaimana menumbuhkan kesadaran masyarakat betapa pentingnya PAUD bagi anak-anak sebagai landasan wajib belajar sembilan tahun

2) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK mengindikasikan partisipasi sekolah penduduk sesuai jenjang pendidikannya. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut.

Tahun 2016-2020, Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan cenderung meningkat. Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi partisipasi penduduk usia sekolah PAUD, SD, SMP dan SMA mengalami peningkatan walaupun tidak drastis. APK apabila digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi pendidikan terjadi bias, karena kurang mencerminkan partisipasi penduduk pada kelompok umur sebagaimana ditetapkan dalam UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu 0

- 6 tahun untuk jenjang pendidikan PAUD/TK, 7 – 12 tahun untuk jenjang pendidikan SD ; 13- 15 tahun untuk pendidikan SMP dan 16 – 18 tahun untuk pendidikan SMA/SMK. APK dapat melampaui angka 100% karena peserta didik saat ini yang berusia kurang dari 7 tahun sudah masuk ke SD dan atau usia 13 tahun masih menempuh pendidikan di SD, demikian juga untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA / SMK terdapat peserta didik yang berusia “di luar” 13 – 15 tahun untuk jenjang SMP dan 16 – 18 tahun untuk jenjang SMA/SMK. Angka partisipasi penduduk usia 13 – 15 tahun dalam menempuh pendidikan di SMP dan SMA masih belum optimal. Masih terdapat penduduk usia sekolah SMP dan SMA yang belum menempuh pendidikan pada jenjang tersebut.

Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.56.
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Menurut Jenjang Pendidikan Kabupaten Pekalongan
dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No.	Tahun	SD/MI (%)		SMP/MTS (%)		SMA/SMK/MA (%)	
		Kab.	Prov.	Kab.	Prov.	Kab.	Prov.
1.	2016	103,74	109,46	99,86	89,96	72,26	86,27
2.	2017	103,77	108,44	99,89	91,09	55,13	84,35
3.	2018	103,82	108,18	99,89	91,96	60,36	84,15
4.	2019	103,85	107,74	99,90	91,70	61,24	86,76
5.	2020	103,89	106,32	99,92	93,21	64,22	86,83

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, Dindikbud Kab. Pekalongan, 2020

3) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Tahun 2016-2020, Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang pendidikan meningkat. Capaian Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pekalongan untuk jenjang pendidikan SMP/MTs berada di atas Provinsi Jawa Tengah, namun untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMA/SMK/MA masih di bawah Provinsi Jawa Tengah.

Secara Rinci APM pada semua jenjang pendidikan Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.57.
APM Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah
Pada semua jenjang pendidikan Tahun 2016-2020

No.	Tahun	SD/MI (%)		SMP/MTS (%)		SMA/SMK/MA (%)	
		Kab	Prov	Kab	Prov	Kab	Prov
1.	2016	92,63	96,64	81,35	78,89	44,73	58,49
2.	2017	92,65	97,13	81,36	79,13	48,14	59,20
3.	2018	92,67	97,75	81,37	79,31	46,62	59,31
4.	2019	92,75	97,77	81,46	79,84	45,74	59,35
5.	2020	93,06	97,70	81,47	80,53	45,91	59,74

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Susenas, Dindikbud Kab. Pekalongan, 2020

Data tersebut menunjukkan bahwa kondisi partisipasi penduduk usia sekolah SD, SMP dan SMA mengalami peningkatan walaupun tidak drastis. APM lebih tepat digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi pendidikan karena yang diperbandingkan adalah usia yang sama. Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Pekalongan untuk jenjang SD/MI Tahun 2020 sebesar 93,06% naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 92,75%. Untuk jenjang SMP/MTs Tahun 2020 sebesar 81,47% meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 81,46%. Untuk jenjang SMA/SMK/MA Tahun 2020 sebesar 45,91% naik dibandingkan tahun 2019 sebesar 45,74%. Apabila dikaitkan dengan target SDGs dalam bidang pendidikan di mana penduduk usia sekolah harus semuanya sekolah (100%) maka masih perlu upaya keras untuk mengajak penduduk usia sekolah untuk sekolah.

4) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan proporsi anak sekolah pada usia jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok usia yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Secara Rinci APS Jenjang Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.58.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar
Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 (%)

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
APS Kab. Pekalongan						
1	SD/MI (7-12 tahun)	100,00	99,73	99,70	99,70	99,99
2	SLTP/MTs (13-15 tahun)	87,90	90,29	90,53	90,38	91,45
3.	SMA/SMK/MA(16-18 tahun)	55,41	60,76	66,65	66,34	66,69

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
APS Provinsi Jawa Tengah						
1	SD/MI (7-12 tahun)	99,58	99,62	99,76	99,77	99,73
2	SLTP/MTs (13-15 tahun)	95,41	95,48	95,79	96,11	96,37
3.	SMA/SMK/MA(16-18 tahun)	67,95	68,48	69,02	69,65	70,14

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Pekalongan secara umum mengalami peningkatan. Pada jenjang pendidikan SD/MI perkembangan APS fluktuatif cenderung meningkat. Pada tahun 2020 terdapat 99,99% penduduk telah bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI. Kondisi tersebut menunjukkan pada tahun 2019 masih ada sekitar 0,01% anak berumur 7-12 tahun yang tidak sekolah di SD/MI manapun baik di lingkungan Kabupaten Pekalongan maupun di luar wilayah Kabupaten Pekalongan. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Tengah APS SD/MI Kabupaten Pekalongan diatas rata-rata. APS penduduk umur 13-15 tahun yang sedang bersekolah di tingkat SLTP/MTs menunjukkan perkembangan fluktuatif cenderung meningkat. APS SLTP/MTs tahun 2020 sebesar 91,45%, jika dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah APS SLTP/MTs Kabupaten Pekalongan di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Kondisi partisipasi sekolah penduduk usia 13-15 tahun perlu mendapatkan perhatian, karena masih terdapat penduduk 8,55% penduduk usia SMP yang tidak menempuh pendidikan pada SMP/MTs manapun baik di lingkungan Kabupaten Pekalongan maupun di luar wilayah Kabupaten Pekalongan. Keadaan seperti ini menjadi penghambat dalam rangka upaya mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang.

Demikian juga pada jenjang pendidikan SMA/SMK, APS Penduduk umur 16-18 tahun yang masih sekolah di tingkat SMA/SMK/MA juga mengalami peningkatan. Jika dibandingkan rata-rata Provinsi Jawa Tengah APS SMA/SMK/MA Kabupaten Pekalongan dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data pada tabel di bawah, APS penduduk usia SMA masih kurang terdapat sebesar 66,69% penduduk usia SMA yang tidak menempuh pendidikan SMA/SMK/MA manapun baik di lingkungan Kabupaten Pekalongan maupun di luar wilayah Kabupaten Pekalongan. Kondisi ini juga menghambat upaya untuk meningkatkan kualitas penduduk atau SDM di masa mendatang. Selain itu kondisi ini apabila tidak ditangani juga akan menghambat peningkatan rata-rata lama sekolah pada 10 tahun yang akan datang. Selain itu kondisi seperti ini juga akan menjadi beban bagi pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Upaya untuk menangani penduduk usia sekolah yang tidak sekolah salah satunya melalui pendidikan kesetaraan.

5) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah merupakan proporsi anak menurut anak usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Kelompok umur yang dimaksud adalah kelompok umur 7-12 tahun untuk jenjang pendidikan

SD, 13-15 tahun untuk jenjang pendidikan SMP dan 16-18 tahun untuk jenjang pendidikan SMA. Pada kurun waktu 2016-2020, Angka Putus Sekolah Kabupaten Pekalongan pada semua jenjang pendidikan baik pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) maupun menengah (SMA/SMK/MA) menunjukkan penurunan.

Perkembangan Angka Putus Sekolah (APS) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.59.

Angka Putus Sekolah Pada Semua Jenjang Pendidikan Di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (%)

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	0,30	0,29	0,22	0,14	0,12
2.	SMP/MTs	0,18	0,17	0,16	0,12	0,11
3.	SMA/SMK/MA	0,36	0,34	0,30	0,28	0,27

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Data di atas menggambarkan bahwa Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan SD/MI di Kabupaten Pekalongan rendah pada tahun 2020, namun demikian apabila ditelusuri lebih lanjut penyebab putus sekolah peserta didik pada jenjang pendidikan SD ada dua faktor. Faktor tersebut adalah faktor ekonomi dan faktor motivasi peserta didik dalam menempuh pendidikan. Penyebab anak putus sekolah pada jenjang pendidikan SD karena faktor ekonomi keluarga, karena orang tua tidak mampu membiayai anaknya untuk tetap bersekolah pada jenjang pendidikan SD. Walaupun sudah ada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD serta adanya dana bantuan sekolah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), dana tersebut belum cukup untuk membiayai anak untuk tetap sekolah pada jenjang pendidikan SD. Orang tua di beberapa wilayah Kabupaten Pekalongan kesulitan untuk membiayai biaya tambahan untuk pembelian seragam, sepatu, alat tulis, serta uang saku anak. Selain faktor ekonomi juga faktor dari diri siswa sendiri dan lingkungan keluarganya. Putus sekolah pada anak usia SD juga disebabkan oleh rendahnya motivasi anak untuk serius menempuh pendidikan yang disebabkan karena lingkungan keluarga yang kurang mendukung pendidikan anak.

Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs di Kabupaten Pekalongan rendah pada tahun 2020 dan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA tinggi. Penyebab anak putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA, juga disebabkan faktor ekonomi, motivasi peserta didik dan lingkungan pergaulan peserta didik. Lokasi SMP dan SMA yang jauh dari tempat tinggal, menyebabkan orangtua harus menyediakan biaya tambahan untuk transport dan uang saku. Dana KIP (Kartu Indonesia Pintar) bagi peserta didik kurang mampu belum mencukupi untuk menutup biaya transport, uang saku, buku, alat tulis, sepatu dan seragam anak. Selain itu anak usia 13 – 18 tahun, sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan pergaulan anak. Anak menjadi tidak serius belajar dan cenderung untuk membolos atau terlibat kenakalan remaja sehingga dikeluarkan oleh pihak sekolah.

6) Angka Kelulusan

Angka kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian Angka Kelulusan Kabupaten Pekalongan pada tahun 2016-2020 mencapai 100,00% selama 5 (lima) tahun terakhir untuk setiap jenjang.

Perkembangan Angka Kelulusan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.60.
Angka Kelulusan Sekolah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (%)

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	SMP/MTs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Angka Kelulusan jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA di Kabupaten Pekalongan mencapai 100%, yang berarti mengindikasikan bahwa kualitas pembelajaran di Kabupaten Pekalongan pada semua jenjang pendidikan baik. Hasil kelulusan 100% pada semua jenjang pendidikan tersebut menggambarkan bahwa semua peserta didik mampu memenuhi standar kompetensi minimal dalam setiap mata pelajaran. Kondisi ini perlu dipertahankan karena kondisi masing-masing peserta didik pada setiap angkatan berbeda.

7) Angka Melanjutkan

Angka Melanjutkan Sekolah merupakan persentase dari jumlah lulusan yang melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi. Persentase lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya di Kabupaten Pekalongan mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir, dari 91,80% tahun 2016 menjadi 94,17% tahun 2020. Sementara itu persentase lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya di Kabupaten Pekalongan juga mengalami peningkatan selama 5 (lima) tahun terakhir, dari 76,90 tahun 2016 meningkat menjadi 80,03% tahun 2020.

Perkembangan angka melanjutkan Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.61.
Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (%)

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI ke SLTP/MTs	91,80	92,00	93,00	94,00	94,17
2	SLTP/MTs ke SMA/SMK/MA	76,90	78,50	78,50	79,00	80,03

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa angka melajutan peserta didik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi belum optimal di Kabupaten Pekalongan. Kemungkinan besar peserta didik yang baru lulus tersebut melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi ke sekolah di luar Kabupaten Pekalongan. Angka melanjutkan dari SMPP/MTs ke jenjang SMA/SMK/MA perlu mendapatkan perhatian karena angkanya cukup rendah yaitu 80,03%. Lulusan SMP/MTs yang diperkirakan tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA sebesar 29,97%.

8) Fasilitas Pendidikan Kondisi Baik

Bangunan sekolah sekolah yang baik akan memberikan kenyamanan pada kegiatan belajar dan mengajar. Kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menunjukkan peningkatan. Untuk jenjang SD/MI dari 83,00% di Tahun 2016 meningkat menjadi 83,00% di Tahun 2020. Pada jenjang SMP/MTs meningkat dari 88% di Tahun 2016 menjadi 95,04% di Tahun 2020. Jenjang pendidikan SMA/ SMK/MA meningkat dari 90% di Tahun 2016 menjadi 94,50% di Tahun 2020.

Perkembangan Fasilitas Pendidikan Kondisi Baik dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.62.
Perkembangan Fasilitas Pendidikan Kondisi Baik
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	SD/MI	83,00	83,00	84,00	85,00	87,11
2.	SMP/MTs	88,00	90,00	91,00	94,00	95,04
3.	SMA/SMK/MA	90,00	92,00	93,00	94,00	94,50

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik. Untuk jenjang SD/MI, kondisi bangunan kondisi baik lebih rendah dibandingkan dengan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Kondisi bangunan SD/MI lebih banyak yang kurang baik dibandingkan dengan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA. Perhatian pemerintah daerah terhadap peningkatan prasarana pendidikan khususnya jenjang SD harus lebih besar, sehingga mampu menyediakan layanan pendidikan lebih baik khususnya dari aspek infrastruktur.

9) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Pekalongan untuk SD, digunakan untuk mengetahui ketersediaan sekolah bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Pekalongan. Rasio ketersediaan sekolah terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.63.
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah
Pendidikan Dasar Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah SD/MI (unit)	637	637	634	633	631
2	Jumlah penduduk 7-12 th (jiwa)	92.491	93.189	94.611	96.032	96.570
1	Jumlah SMP/MTs (unit)	116	116	116	118	121
2	Jumlah penduduk 13-15 th (jiwa)	42.454	42.497	42.294	42.490	42.620
1	Jumlah SD/MI dan SMP/MTs (unit)	753	753	750	751	752
2	Jumlah Total Penduduk	134.945	135.686	136.905	138.522	139.190
	Rasio	55,80	55,50	54,78	54,22	54,03

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah sekolah yang ada di Kabupaten Pekalongan sudah memadai untuk pendidikan dasar standar rasio ketersediaan sekolah adalah 60 sekolah per 10.000 penduduk usia pendidikan dasar (7 - 15 tahun), namun demikian saat ini pemerintah kabupaten masih membuka perijinan pembukaan sekolah (swasta) untuk jenjang pendidikan SD dan SMP. Pemerintah Kabupapten Pekalongan tidak perlu membangun sekolah baru baik SD maupun SMP.

10) Rasio Guru/Murid Sekolah

Ketersediaan pendidik atau guru sangat penting dan vital bagi dunia pendidikan. Jumlah guru yang memadai diikuti dengan kompetensi guru yang baik menjadi faktor utama dalam peningkatan kualitas pendidikan. Rasio guru ideal untuk jenjang pendidikan SD dan SMP adalah 1 orang guru berbanding dengan 20 orang siswa. Rasio guru dan murid untuk sekolah pendidikan dasar di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa ketersediaan guru tidak menjadi permasalahan. Selama 5 (tahun) terakhir rata-rata terdapat 578 guru per 10.000 penduduk usia sekolah pendidikan dasar. Atau dengan kata lain terdapat 1 guru yang mengajar sebanyak 17 murid. Hal ini mendekati angka ideal yang ditetapkan yaitu 15-20 murid per guru. Permasalahan yang ada adalah belum terwujudnya pemerataan distribusi guru khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Pada kenyataannya persebaran jumlah guru SD/MI maupun SMP/MTs kurang merata baik secara kewilayahan maupun guru mata pelajaran.

Gambaran rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.64.
Rasio Guru/Murid Sekolah Pendidikan Dasar
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
a	Jumlah Guru (orang)	6.013	5.377	5.219	5.650	5.868

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
b	Jumlah Murid (anak)	95.429	94.540	93.856	95.441	95.949
2	SMP/MTs					
a	Jumlah Guru (orang)	2.215	2.214	2.158	2.304	2.363
b	Jumlah Murid (anak)	41.800	41.323	39.847	40.622	42.183
a	Jumlah Guru SD/MI dan SMP/MTs	8,228	7,591	7,377	7.954	8.231
b	Jumlah Murid SD/MI dan SMP/MTs	137,229	135,863	133,703	136.063	138.132
	Rasio per 10.000 murid	600	559	552	585	596
	Rata-rata 1 guru/murid	16,68	17,90	18,12	17,11	16,78

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa dari aspek jumlah, ketersediaan guru pendidikan dasar sudah mencukupi. Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu melakukan antisipasi terhadap ketersediaan guru, karena banyak guru yang memasuki masa purna tugas atau pensiun, namun belum ada rekrutmen guru baru. Kondisi ini pada lima tahun mendatang apabila tidak ada pengangkatan guru baru, kemungkinan Kabupaten Pekalongan akan kekurangan guru.

11) Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV

Kualitas pelayanan pendidikan salah satunya ditentukan dengan banyaknya guru sesuai kualifikasi yaitu tamat D IV atau sarjana. Semakin banyak guru memenuhi kualifikasi semakin baik pula kualitas pembelajarannya. Persentase guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV pada semua jenjang pendidikan baik SD/MI menunjukkan peningkatan dari 85% tahun 2016 meningkat menjadi 97,05% tahun 2020. Sementara itu pada jenjang pendidikan SMP/MTs juga menunjukkan peningkatan dari 93,5% tahun 2016 meningkat menjadi 97,59% tahun 2020. Permasalahan yang muncul berkaitan dengan kualifikasi guru sebetulnya terletak pada guru PAUD dan TK, namun kualifikasi guru PAUD dan TK belum sesuai dengan ketentuan. Banyak guru PAUD yang belum memenuhi kualifikasi. Sedangkan Guru SD/MI pada tahun 2020 sudah mendekati angka 100%.

Perkembangan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.65.
Persentase Guru Berkualifikasi SI/D4
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Guru SD/MI	85,00	95,00	96,00	97,00	97,06
2	Guru SLTP/MTs	93,50	95,00	95,50	97,59	97,59
3	Guru SMA/SMK/MA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

12) Persentase Sekolah Berakreditasi

Kualitas lembaga pendidikan salah satunya diukur dengan peringkat akreditasi yang diperoleh. Semakin tinggi peringkat akreditasi sekolah yang diperoleh semakin baik kualitas satuan pendidikan tersebut. Persentase sekolah berakreditasi menunjukkan kondisi yang sangat baik. Pada tingkat pendidikan PAUD jumlah sekolah berakreditasi meningkat mencapai 100% di tahun 2019, demikian pula pada jenjang pendidikan SD/MI. Sementara itu pada jenjang pendidikan SMP/MTS persentase sekolah berakreditasi baru mencapai 87% sampai dengan tahun 2019. Perkembangan sekolah berakreditasi selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.66.
Persentase Sekolah Berakreditasi di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2019

No Indikator	Sat	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PAUD berakreditasi minimal B	%	98	100	100	100	100
Persentase SD/MI berakreditasi minimal B	%	98	100	100	100	100
Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B	%	85	87	87	87	87

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa kondisi kualitas pendidikan di Kabupaten Pekalongan sudah sangat baik. Semua SD/MI sudah terakreditasi minimal B, demikian juga untuk SMP/MTs juga sebagian besar sudah terakreditasi minimal B.

13) Capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan

Untuk capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan di Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2020 rata-rata menunjukkan peningkatan. Peningkatan persentase anak usia 5 - 6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di PAUD meningkat dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 81,6% pada tahun 2020. Persentase anak usia 7 - 12 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SD/MI meningkat dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 104,9% tahun 2020. Persentase anak usia 13 - 15 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SMP/MTs tahun meningkat dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 99% tahun 2020. Persentase anak usia 7 - 18 tahun yg sudah taat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 2,6%.

Melihat hasil capaian SPM pelayanan dasar bidang pendidikan menunjukkan bahwa Kabupaten Pekalongan telah memberikan pelayanan dasar yang baik dalam bidang pendidikan. Peningkatan capaian pelayanan pendidikan ini juga didukung oleh implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah didisain oleh OPD terkait. Selain itu Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga memiliki konsentrasi dalam mendorong masyarakat untuk bersekolah melalui “Gerakan Kudu Sekolah” Gerakan kudu sekolah dimulai sejak bulan Desember 2018 oleh Tim Sekretariat Pendidikan untuk Semua (PUS) dan kemudian dilakukan pembahasan secara komprehensif melibatkan semua stakeholder di Kab. Pekalongan. Gerakan ini dicanangkan pada tanggal 2 Mei 2019 yang selanjutnya menjadi ikhtiar seluruh elemen pemerintah

dan masyarakat dalam menurunkan jumlah ATS di Kabupaten Pekalongan. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.67.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pendidikan Kabupaten Pekalongan Tahun 2019-2020

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian	
				2019	2020
1.	Persentase anak usia 5 - 6 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di PAUD	%	100	58,85	81,60
2.	Persentase anak usia 7 - 12 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SD/MI	%	100	92,57	104,90
3.	Persentase anak usia 13 - 15 tahun yg sudah tamat atau sedang belajar di SMP/MTs tahun	%		81,82	99
4.	Persentase anak usia 7 - 18 tahun yg sudah taat atau sedang belajar di Pendidikan Kesetaraan	%	100	1,01	2,60

Sumber : isian data Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, 2020, dan https://biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota, diakses tahun 2021

Selain jal tersebut di atas, Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada masa Pandemi Covid-19 dapat dilaksanakan secara efektif dengan memperhatikan prinsip pembelajaran yang diadaptasikan dengan protokol kesehatan dan keselamatan sehingga dapat memberikan gambaran tentang perencanaan dan syarat minimal yang perlu dipersiapkan satuan pendidikan sebelum melaksanakan PTM. Mengantisipasi hilangnya kesempatan/minat belajar (learning loss) bagi peserta didik pada masa pandemi Covid-19 maka diperlukan kebijakan PTM dengan mekanisme dan strategi yang beragam sesuai dengan kondisi satuan pendidikan dan kondisi wilayah.

b. Kesehatan

Urusan Kesehatan dalam Undang-Undang Nomer 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memiliki 4 sub urusan upaya kesehatan, sumber daya manusia, Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan. Pembangunan kesehatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dimana salah satu indikatornya adalah Usia Harapan Hidup (UHH). Keberhasilan pembangunan kesehatan akan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), mengingat salah satu indikator pembentUk IPM ini adalah UHH. Sejalan dengan hal ini kalau kita perhatikan dokumen RPJMN 2020-2024, salah sisu strategis yang akan ditangani secara nasional adalah peningkatan UHH dibarengi dengan penurunan kasus-kasus kesehatan lainnya. Dalam rangka pembangunan daerah di Kabupaten Pekalongan khususnya terkait bidang Kesehatan, perlu digambarkan terlebih dahulu kondisi umum kesehatan di Kabupaten Pekelongan, sebagai berikut.

1) Angka Kematian Ibu

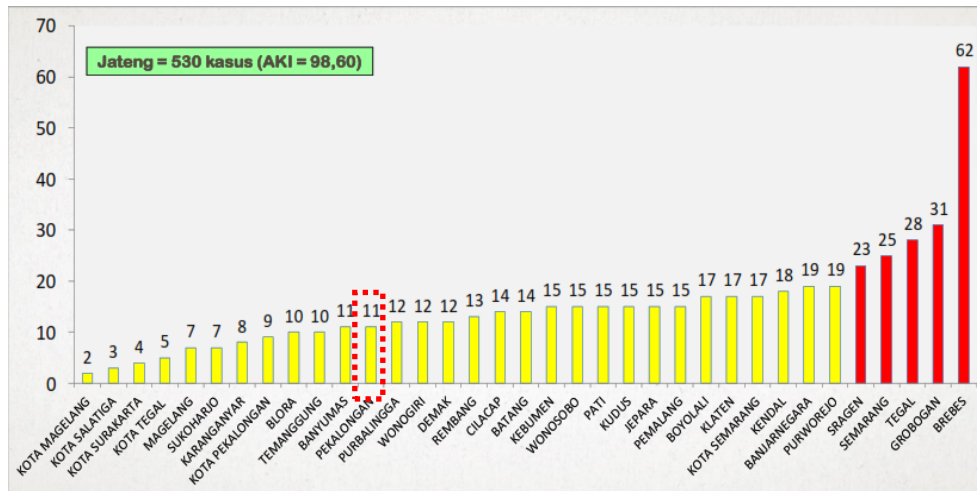
Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan indikator makro dalam pembangunan kesehatan. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan AKI dari tahun 2016 sampai 2019 mengalami penurunan hingga mencapai 60,45 (10 kasus) akan tetapi tahun 2020 naik menjadi 66,43 (11 kasus). Pencapaian AKI di Kabupaten Pekalongan telah

melampaui Target tujuan ke 3 SDGs. Target SDGs untuk AKI pada tahun 2030 adalah 70 per 100.000 kelahiran hidup.

Tabel 2.68.
Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan	115,02 (18 kasus)	102,01 (16 kasus)	68,51 (11 kasus)	60,45 (10 kasus)	66,43 (11 kasus)
2.	Jawa Tengah	109,65 (602 kasus)	88,58 (475 kasus)	78,60 (421 kasus)	76,93 (416 kasus)	98,60 (530 kasus)

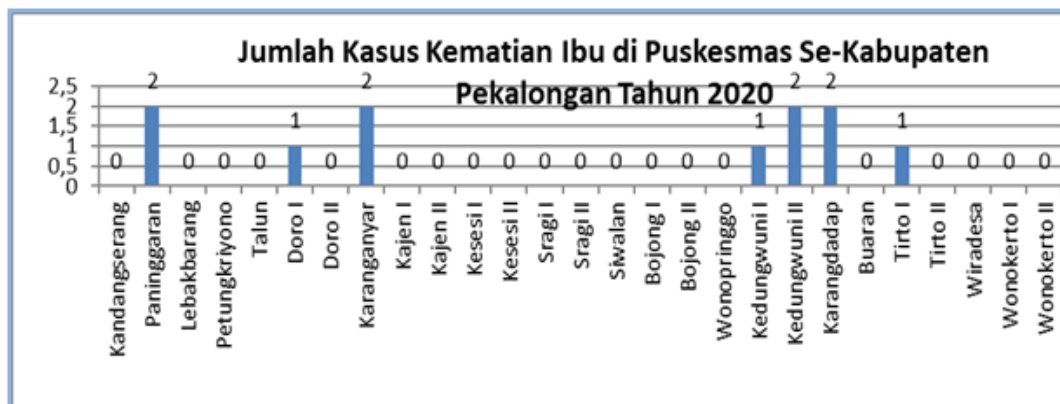
Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan dan Dinkes Prov. Jateng, 2021



Gambar 2.63. Jumlah Kasus Kematian Ibu Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2020

Dari tabel dan gambar di atas, dapat dijelaskan bahwa, Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Pekalongan mengalami kenaikan dari 60,45 per 100.000 kelahiran hidup (10 kasus) pada tahun 2019 menjadi 66,43 per 100.000 kelahiran hidup (11 kasus) pada tahun 2020. Capaian ini lebih baik dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah selama 2 (dua) tahun terakhir sebesar 98,60 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 dengan jumlah total sebanyak 530 kasus.

Kasus kematian ibu sejumlah 11 tersebar di 7 Puskesmas yaitu: Puskesmas Panningaran terdapat 2 kasus, Puskesmas Doro I terdapat 1 kasus, Puskesmas Karanganyar terdapat 2 kasus, Puskesmas Kedungwuni I terdapat 1 kasus, Puskesmas Kedungwuni II terdapat 2 kasus, Puskesmas Karangdadap terdapat 2 kasus serta Puskesmas Tirtto I terdapat 1 kasus. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.64. Jumlah Kasus Kematian Ibu Menurut Wilayah Puskesmas di Kabupaten Pekalongan tahun 2020

Upaya penurunan AKI di Kabupaten Pekalongan dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan kesehatan ibu hamil, adanya Program Puskesmas Mampu Persalinan di setiap Puskesmas dan peran lintas sektoral dan Gerakan Masyarakat Selamatkan Ibu dan Anak (GEMA SETIA) di seluruh kecamatan. Adanya dukungan oleh semua sektor ini dapat diperoleh informasi dengan baik dan cepat sehingga dapat membantu dalam menentukan langkah atau kebijakan yang sesuai dengan masalah yang ada. Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas seperti pelayanan kesehatan ibu hamil serta pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di setiap puskesmas.

Sealin itu, penurunan kematian ibu melahirkan ini antara lain dikarenakan implementasi program percepatan persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) berjalan efektif. Pelayanan kesehatan ibu hamil, ibu bersalin sebagaimana Standar Pelayanan Minimal Kesehatan telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari cakupan pemeriksaan kehamilan (K4) telah mencapai 100%, artinya semua ibu hamil telah mendapatkan pelayanan pemeriksaan minimal 4 kali selama masa kehamilannya. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.69.

**Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)
Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020**

No.	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (K4)	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan	90,94	91,57	94,68	100,00	100,00
2.	Provinsi Jawa Tengah	93,27	92,53	93,07	93,25	94,15

Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan, dan Dinkes Jateng 2021

2) Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) juga merupakan indikator makro dalam pembangunan kesehatan. AKB dihitung pada bayi baru lahir sampai umur 12 bulan. AKB Kabupaten Pekalongan dari tahun 2016-2020 fluktuatif tetapi cenderung menurun. Tahun 2020 AKB kabupaten Pekalongan sebesar 6,47 (107 kasus). Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah AKB Kabupaten Pekalongan dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Penyebab kematian pada Bayi dikarenakan asfeksia kondisi saat bayi kekurangan oksigen sebelum atau selama kelahiran. Penyebab kedua adalah infeksi yang terdiri dari infeksi paru (*pneumonia*), tetanus, diare dan sepsis. Penyebab ke tiga adalah bayi dengan berat lahir rendah. (Kementerian Kesehatan, 2018).

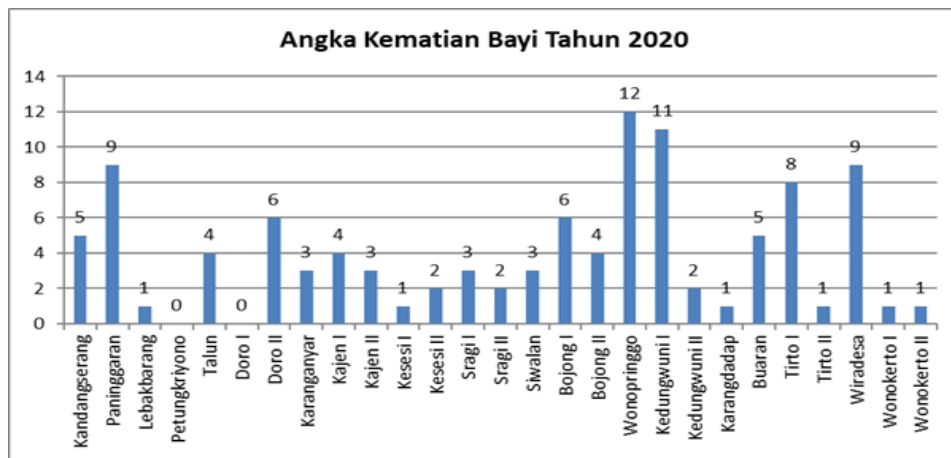
Tabel 2.70.

Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No.	Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kab. Pekalongan	10,99 (172 kasus)	8,35 (131 kasus)	7,16 (115 kasus)	8,70 (144 kasus)	6,47 (107 kasus)
2.	Jawa Tengah	9,99 (5.485 kss)	8,93 (4.791 kss)	8,37 (4.481 kss)	8,22 (4.450 kss)	7,79 (4.189 kss)

Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan dan Dinkes Prov. Jateng, 2021

Angka Kematian Bayi terbanyak ada pada Puskesmas Wonopringgo dengan jumlah kematian sebanyak 12 kasus, dan Puskesmas dengan 0 kematian ada di 2 Puskesmas yaitu Puskesmas Petungkriyono dan Puskesmas Doro I. Penyebab kematian bayi di Kabupaten Pekalongan antara lain Asfeksia, Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), dan kelainan congenital. Adapun langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mencapai target yaitu dengan cara pembinaan puskesmas mampu bersalin oleh dokter spesialis anak, peningkatan kapasitas petugas dalam pencegahan dan penanganan Berat badan lahir rendah (BBLR), pemeriksaan ibu hamil resti di tiap kecamatan, pendidikan kesehatan reproduksi remaja di sekolah. Selengkapnya dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 2.65. Angka Kematian Bayi menurut Puskesmas Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

3) Kondisi Gizi dan Stunting

a) Kondisi Gizi

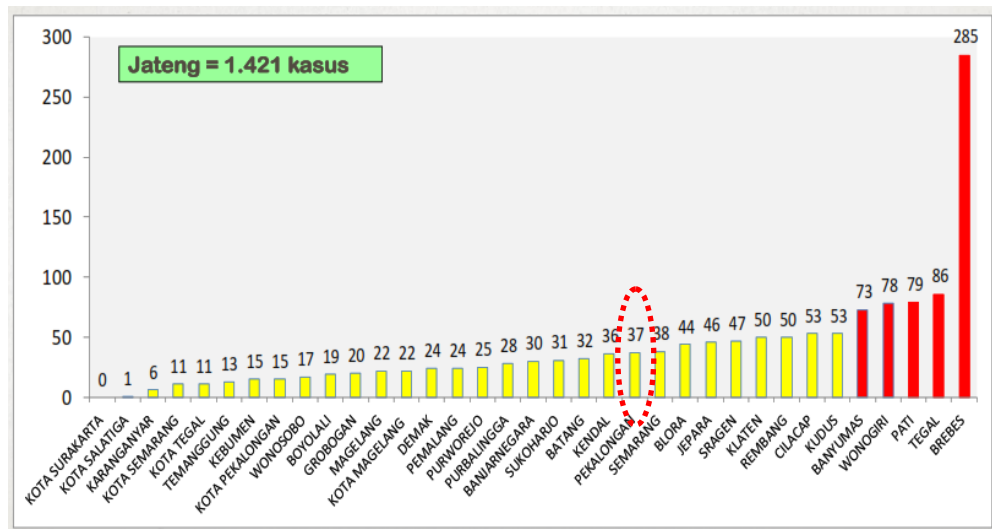
Pendataan gizi buruk di Kabupaten Pekalongan berdasarkan pada 2 (dua) kategori yaitu kategori pertama dengan membandingkan berat badan dengan umur (BB/U) dan kategori kedua adalah membandingkan berat badan dengan tinggi badan (BB/TB). Pemeriksaan pertama dilakukan di Posyandu dengan membandingkan berat badan dengan umur melalui kegiatan penimbangan, jika ditemukan balita yang berada di bawah garis merah (BGM) atau dua kali tidak naik (2T), maka dilakukan konfirmasi status gizi dengan menggunakan indikator berat badan menurut tinggi badan.

Secara rinci Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.71. Kasus Gizi Buruk Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No.	Wilayah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	Gizi Buruk						
1.	Kab. Pekalongan	Kasus	49	53	48	45	37
2.	Jawa Tengah	Kasus	982	922	961	1.216	1.421

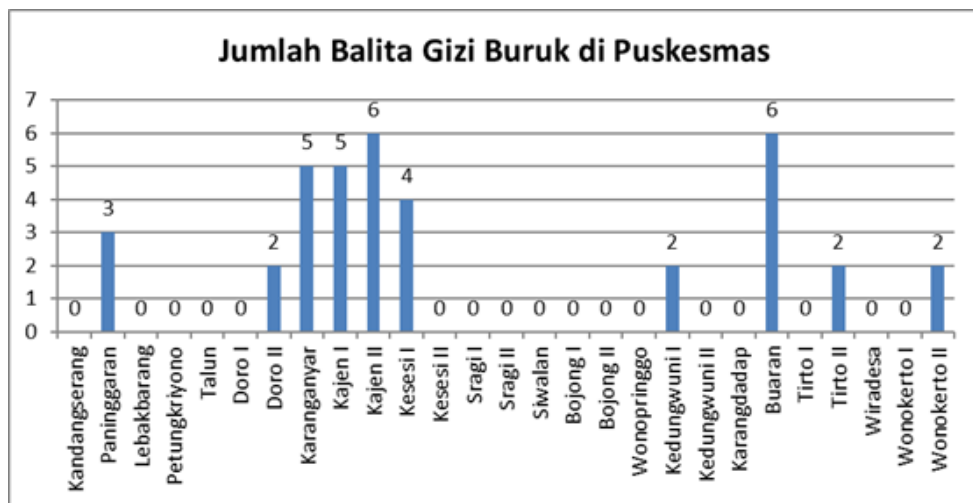
Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan dan Dinkes Jateng 2021



Gambar 2.66. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2020

Dari tabel dan gambar di atas, capaian jumlah kasus balita gizi buruk di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2020 sebesar **37 kasus** turun dari Tahun 2019 sebesar 45 kasus. Angka ini tergolong cukup besar (**22 besar**) dari capaian seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2020. Faktor penyebab gizi buruk dikelompokkan menjadi 2 yaitu penyebab langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung gizi buruk meliputi kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan menderita penyakit infeksi, sedangkan penyebab tidak langsung gizi buruk yaitu ketersediaan pangan rumah tangga, kemiskinan, pola asuh yang kurang memadai dan pendidikan yang rendah.

Sebaran data jumlah kasus balita gizi buruk terdapat di Puskesmas Kajen II dan Puskesmas Buaran masing-masing sejumlah 6 kasus, Puskesmas Karanganyar dan Puskesmas Kajen I masing-masing sejumlah 5 kasus, Puskesmas Kesesi 1 sejumlah 4 kasus, Puskesmas Paninggaran sejumlah 3 kasus, serta Puskesmas Kedungwuni I, Doro II, Tirta II dan Wonokerto II masing-masing sebanyak 2 kasus. Adapun sebaran balita gizi buruk di masing-masing wilayah Puskesmas selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2.67. Jumlah Kasus Balita Gizi Buruk di Wilayah Puskesmas Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

b) Kondisi Stunting

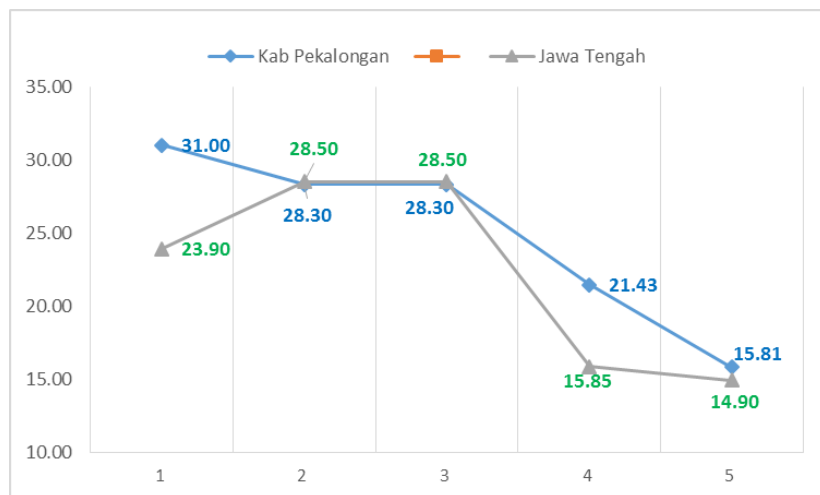
Stunting (kerdil) adalah kondisi dimana balita memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Kondisi ini diukur dengan panjang atau tinggi badan yang lebih dari minus dua standar deviasi median standar pertumbuhan anak dari WHO. Balita stunting termasuk masalah gizi kronik yang disebabkan oleh banyak faktor seperti kondisi sosial ekonomi, gizi ibu saat hamil, kesakitan pada bayi, dan kurangnya asupan gizi pada bayi. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan dalam mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.

Kasus stunting Kabupaten Pekalongan memiliki persentase yang cukup tinggi yaitu 15,81% merupakan penyumbang stunting di Jawa Tengah (14,90%). Adapun persentase stunting Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.72.
Persentase Stunting Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

No.	Wilayah	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	Stunting						
1	Kab. Pekalongan	%	31,00	28,30	28,30	21,43	15,81
2	Jawa Tengah	%	23,90	28,50	28,50	15,85	14,90

Sumber : Dinkes Kab. Pekalongan, dan Dinkes Jateng 2021



Gambar 2.68. Persentase Stunting Kabupaten Pekalongan dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2020

Dari tabel dan gambar di atas, kondisi balita yang *stunting* di Kabupaten Pekalongan berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebanyak 15,81%, turun dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar 21,43%. Jumlah baduta stunting Tahun 2020 sebanyak 1.631 baduta dari jumlah total sebanyak 10.316 baduta. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.73.
Jumlah Kasus Stunting Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

No	Puskesmas	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Kasus	
			2019	2020
1	Kandangserang	2	2	44
2	Paninggaran	15	54	45
3	Petungkriyono	8	25	48
4	Lebakbarang	-	-	9
5	Talun	1	1	26
6	Doro I	7	28	54
7	Doro li	2	8	
8	Karanganyar	6	18	41
9	Sragi I	7	150	65
10	Sragi li	4	16	
11	Siwalan	7	21	100
12	Wonopringgo	12	114	115
13	Karangdadap	5	21	192
14	Tirto I	12	218	220
15	Tirto li	4	83	
16	Kedungwuni I	16	251	185
17	Kedungwuni li	9	143	
18	Bojong I	12	60	16
19	Bojong li	4	12	
20	Kesesi I	9	72	192
21	Kesesi li	3	10	
22	Kajen I	7	58	105
23	Kajen li	16	119	
24	Wiradesa	11	51	19
25	Wonokerto I	2	2	49
26	Wonokerto II	1	2	
27	Buaran	-	-	106
	Jumlah	182	1.540	1.631
	Jumlah Total Baduta		7.186	10.316

Sumber : Dinas kesehatan Kab. Pekalongan, 2021

Masih tingginya angka stunting di Kabupaten Pekalongan dikarenakan minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, seimbang secara sehat dan aman. Pemerintah Daerah telah melakukan upaya mengatasi masalah balita *stunting* yang terintegrasi dengan kegiatan perbaikan gizi pada masa kehamilan, penerapan ASI eksklusif dan pemberian makanan pendamping ASI pada balita.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memiliki Kebijakan dalam penurunan kasus stunting yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Salinan Penurunan Stunting di Kabupaten Pekalongan. Dalam Peraturan Bupati tersebut telah ditetapkan sasaran dan kegiatan intervensi yang perlu dilakukan dalam penurunan kasus stunting serta pelibatan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam penurunan kasus stunting.

4) Kondisi Penyakit Menular dan Tidak Menular

Morbiditas atau angka kesakitan yang menjadi prioritas nasional adalah DBD, TBC, HIV serta penyakit pandemi COVID 19, Hipertensi, Diabetes Mellitus dan Jantung. Pada Pelayanan dasar masyarakat yang diamanatkan dalam SPM bidang kesehatan adalah Penyakit TBC, HIV, Hipertensi, ODGJ (Orang dengan Gangguan Jiwa Berat), dan Diabetes Melitus. Masyarakat yang terduga penyakit diatas harus mendapatkan pelayanan dasar dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Penyakit menular yang menjadi prioritas di Kabupaten Pekalongan adalah Demam Berdarah Dengue (DBD), Tuberculosis (TB) dan HIV/AIDS. Angka Kesakitan/Incidence Rate (IR) penyakit DBD di Kabupaten Pekalongan selama 3 (tiga) tahun terakhir mengalami fluktuasi yang perlu diwaspadai agar tidak terjadi kejadian luar biasa. Pada tahun 2018, Angka kesakitan penyakit DBD sebesar 19,17 per 10.000 penduduk (77 kasus). Pada tahun 2019, angka Kesakitan DBD menjadi 24,70 per 10.000 penduduk (222 kasus). Angka ini mengalami kenaikan di tahun 2020 menjadi 26,00 per 10.000 penduduk (246 kasus).

Sedangkan Angka Kematian/Case Fatality Rate (CFR) akibat penyakit DBD masih terjadi, namun sudah mengalami penurunan kasus kematian akibat DBD selama 4 (empat) tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 sebesar 0,99% menurun menjadi 0.85% di tahun 2018 dan menurun lagi dengan tidak ada kasus (0,00%) di tahun 2019 dan 2020.

Angka Penemuan Pasien baru Case Detection Rate/CDR) Tuberculosis (TB) BTA positif didapat dari perhitungan persentase jumlah penderita TBC BTA (+) yang ditemukan dan diobati dibagi dengan jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+) di wilayah kerja pada kurun waktu yang lalu. CDR TB di Tahun 2020 sebesar 9,00% naik dari tahun 2019 sebesar 8,50%. Sedangkan angka keberhasilan pengobatan (Success Rate/SR) TB turun di Tahun 2020 sebesar 96,00% dari 96,60% di Tahun 2019.

Tabel 2.74.
Kondisi Penyakit Menular
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	IR DBD/100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CDR TB (%)	SR TB (%)	Cakupan HIV/AIDS tertangani (%)
2016	36,00	2,00	8,75	93,56	100,00
2017	22,12	0,99	8,80	95,40	100,00
2018	19,17	0,85	9,21	89,45	100,00
2019	24,70	0,00	8,50	96,60	100,00
2020	26,00	0,00	9,00	96,00	100,00

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Pekalongan, 2021

Peningkatan kasus penyakit ini harus diselesaikan dengan 2 pendekatan yaitu pendekatan promotif dan pendekatan kuratif. Pendekatan promotif dilakukan dengan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat, peningkatan STBM (Sanitasi Total berbasis Masyarakat). Pencapaian Rumah tangga PHBS harus bisa mencapai 100%. PHBS memiliki 16 indikator Terdapat beberapa indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga yang dapat dijadikan acuan untuk mengenali keberhasilan dari praktek perilaku hidup bersih dan sehat pada tingkatan rumah tangga. Berikut ini 16 Indikator PHBS pada tingkatan rumah tangga meliputi: 1) Persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, 2) Pemberian ASI eksklusif, 3) Anggota rumah tangga mengkonsumsi beranekaragam makanan dalam jumlah cukup untuk mencapai gizi seimbang, 4) Pemeriksaan Kehamilan K4, 5) Penimbangan Balita, 6) Anggota rumah tangga menggunakan air bersih, 7) Anggota rumah tangga menggunakan jamban sehat, 8) Anggota rumah tangga menggunakan lantai rumah kedap air, 9) Anggota rumah tangga membuang sampah pada tempatnya, 10) Anggota rumah tangga

melakukan aktifitas fisik/olah raga, 11) Anggota rumah tangga tidak merokok, 12) Anggota rumah tangga terbiasa mencuci tangan sebelum makan dan sesudah Buang Ari Besar (BAB), 13) Anggota rumah tangga menggosok gigi minimal 2 kali sehari, 14) Anggota rumah tangga tidak minum Miras dan tidak menyalahgunakan narkoba 15) Anggota rumah tangga menjadi peserta JPK (jaminan pemeliharaan kesehatan) dan 16) Anggota rumah tangga melakukan PSN minimal seminggu sekali.

Kasus covid 19 di Kabupaten Pekalongan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif selama kurun waktu Juli tahun 2020 hingga Mei 2021. Jumlah kasus selama periode tersebut sebanyak 2.518 kasus, jumlah kasus tertinggi terjadi di Bulan November yaitu sebanyak 536 kasus dan menurun pada bulan-bulan berikutnya. Pada tahun 2021 lonjakan kasus Covid 19 terjadi di bulan April mencapai 410 kasus. Dalam rangka mencegah peningkatan kasus Covid 19, Kabupaten Pekalongan mengikuti anjuran Pemerintah Pusat untuk melakukan PPKM Darurat yang dilakukan di wilayah Jawa-Bali, serta meningkatkan protokol kesehatan dan mempercepat pelaksanaan vaksinasi. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.75.
Jumlah Kasus Covid-19
Kabupaten Pekalongan Bulan Juli 2020-Mei 2021

No	Kecamatan	2020						2021					Total
		Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	
1	Kandangserang	0	0	0	0	12	0	5	0	3	31	5	56
2	Paninggaran	0	0	0	15	36	1	2	5	14	14	11	98
3	Lebakbarang	0	0	0	22	16	2	0	0	0	4	12	56
4	Petungkriyono	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4
5	Talun	4	0	0	1	20	8	9	1	0	1	12	56
6	Doro	0	9	2	5	8	17	8	11	14	11	8	93
7	Karanganyar	0	0	5	7	17	8	11	6	4	26	13	97
8	Kajen	0	2	7	15	55	35	37	12	26	36	20	245
9	Kesesi	2	3	8	15	17	10	23	7	19	23	18	145
10	Sragi	0	0	8	5	31	12	10	9	20	18	10	123
11	Siwalan	0	2	6	4	17	17	9	6	19	6	4	90
12	Bojong	0	1	0	0	23	22	28	17	32	52	25	200
13	Wonopringgo	16	4	0	17	27	9	5	2	7	12	4	103
14	Kedungwuni	0	2	15	44	107	47	40	17	53	49	16	390
15	Karangdadap	16	5	4	10	42	9	9	4	4	8	5	116
16	Buaran	0	16	6	0	8	5	1	0	2	6	4	48
17	Tirto	0	5	6	22	35	22	29	13	25	56	9	222
18	Wiradesa	10	19	14	16	53	36	40	11	17	46	28	290
19	Wonokerto	4	6	4	1	8	15	11	7	11	11	8	86
	Jumlah	52	74	85	199	536	275	277	128	270	410	212	2518

Sumber : https://data.pekalongankab.go.id/fa_IR/dataset/jumlah-kasus-covid-19-menurut-kecamatan-di-kabupaten-pekalongan

5) Rasio Tenaga Medis dan Dokter

Ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini sangat dibutuhkan. Berdasarkan data yang ada rasio tenaga medis sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 1,90

per 1.000 penduduk. Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk di Kabupaten Pekalongan berdasarkan data dimana untuk tahun 2020 terdapat 1 tenaga medis di setiap 528 jiwa penduduk. Sementara di masa pandemik 1 pasien 1 tenaga kesehatan, ini menunjukkan bahwa kita masih kekurangan tenaga kesehatan.

Tabel 2.76.
Rasio Tenaga Medis per satuan penduduk
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Tenaga Medis (orang)	1.875	1.875	1.925	2.095	1.836
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	880.092	886.197	891.892	897.711	968.821
	Rasio	2,13	2,12	2,16	2,33	1,90
	Rasio 1 tng medis/1.000 pddk	469	473	463	429	528

Sumber : Dinas kesehatan Kab. Pekalongan, 2021

Jumlah dokter di Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan dari 55 orang tahun 2016 meningkat menjadi 135 orang tahun 2020. Rasio dokter sebesar 7.176 per 1000 penduduk. Kondisi tersebut belum memenuhi kebutuhan yang ideal.

Tabel 2.77.
Rasio Dokter per satuan penduduk
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Dokter (orang)	55	55	63	91	135
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	880.092	886.197	891.892	897.711	968.821
	Rasio	0,062	0,062	0,071	0,101	0,139
	Rasio 1 dokter/1.000 pddk	16.002	16.113	14.157	9.865	7.176

Sumber : Dinas kesehatan Kab. Pekalongan, 2021

6) Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Pelayanan kesehatan dilakukan oleh Rumah sakit sebagai sarana rujukan dan FKTP (Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama) yaitu Puskesmas dan jaringannya, poliklinik. Kabupaten Pekalongan memiliki 3 RS, 2 RSUD dan 1 RS Swasta. RSUD telah mencapai akreditasi dengan 16 pelayanan. Pada masa pandemi COVID ini jumlah RSUD sangat diperlukan dan berdasarkan perhitungan rasio RS dengan jumlah penduduk baru mencapai 0,003. Kondisi tersebut masih belum dapat memenuhi kebutuhan.

Tabel 2.78.
Rasio Rumah Sakit Per Jumlah Penduduk
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah RSUD (unit)	2	2	2	2	2

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Jumlah RS Swasta (unit)	1	1	1	1	1
	Total RS	3	3	3	3	3
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	880.092	886.197	891.892	897.711	968.821
	Rasio	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003
	Rasio 1 RS/ 1.000 pddk	293.364	295.399	297.297	299.237	322.940

Sumber : Dinas kesehatan Kab. Pekalongan, 2021

7) Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Poliklinik Kesehatan Desa

Rasio Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Poliklinik Kesehatan Desa di Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 cenderung fluktuatif. rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa per 1.000 penduduk pada tahun 2020 adalah 0,24 artinya satu puskesmas melayani 35.882 jiwa. Rasio ini masih dibawah standar Kementerian Kesehatan RI yaitu 1 Puskesmas melayani 30.000 penduduk. Namun demikian dengan adanya puskesmas pembantu dan poliklinik kesehatan desa dapat membantu melayani kesehatan masyarakat. Dari 27 Puskesmas di Kabupaten Pekalongan, terdapat 26 Puskesmas terakreditasi dan 1 (satu) puskesmas belum terakreditasi yaitu Puskesmas Wonokerto dikarenakan baru teregister tahun 2019.

Tabel 2.79.
Rasio Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Puskesmas Induk (unit)	27	27	27	27	27
2.	Jumlah Puskemas Pembantu (unit)	49	49	49	49	49
3.	Jumlah Poliklinik Kesehatan Desa	181	181	159	159	159
4.	Jumlah Penduduk (jiwa)	880.092	886.197	891.892	897.711	968.821
5.	Rasio	0,29	0,29	0,26	0,26	0,24
	Rasio 1 Puskesmas, Pustu dan Poliklinik Kesehatan Desa /1.000 pddk	3.424	3.448	3.795	3.820	4.123
	Rasio 1 puskesmas/1.000 pddk	32.596	32.822	33.033	33.249	35.882

Sumber : Dinas kesehatan Kab. Pekalongan, 2021

8) Capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan

Sementara itu untuk capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan di Kabupaten Pekalongan rata-rata menunjukkan kondisi yang relatif baik. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil sudah mencapai 100% di tahun 2020, begitu juga untuk Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat. Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang telah tertangani 100 %, tahun 2020 indikator tersebut baru mencapai 96,76%. Cakupan Pelayanan

Kesehatan Balita sesuai Standar baru mencapai 83, 57%, Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 96,30%. Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar mencapai 73,80%, Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard menunjukkan penurunan dari 83,34 pada tahun 2018 menjadi 53,25% tahun 2020. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi menunjukkan penurunan dari 94,56% pada tahun 2018 menjadi 58,8% di tahun 2020. Persentase Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) juga menunjukkan penurunan dari 115,75% tahun 2018 menurun menjadi 88,7%. Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai menunjukkan perkembangan yang fluktuatif tetapi kecenderungan meningkat, mencapai 94% di tahun 2020. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar juga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif tetapi kecenderungan meningkat, mencapai 97,33% di tahun 2020. Jika dilihat dari capaian kinerja pelayanan dasar SPM bidang kesehatan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memenuhi pelayanan dasar sampai dengan tahun 2020, ditunjukkan dengan capaian beberapa indikator yang telah mencapai 100%. Perkembangan SPM selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.80.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2020

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian		
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	99,61	100	100
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	96,76
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	100	83,42	100	83,57
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	96,30
6	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	71,71	74,57	73,80
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standard	%	100	83,34	73,92	53,25
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	100	94,56	53,28	58,8
9	Persentase Pelayanan	%	100	115,75	91,71	88,7

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Capaian		
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
	Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)					
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	%	100	78,02	100	100,55
11	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	%	100	97,75	100	94
12	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	89,35	100	97,33

Sumber : isian data Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan, 2020

dan

https://biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kab/kota, diakses tahun 2021

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terbagi atas 11 sub urusan yaitu 1) sumber daya air (SDA); 2) air minum; 3) persampahan; 4) air limbah; 5) drainase; 6) permukiman; 7) bangunan gedung; 8) penataan bangunan dan lingkungannya; 9) jalan; 10) jasa konstruksi; dan 11) Penataan Ruang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 mengatakan bahwa jalan merupakan suatu prasarana transportasi yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Jalan mempunyai peranan penting terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar wilayah yang seimbang, pemerataan hasil pembangunan serta pemantapan pertahanan dan keamanan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dijelaskan bahwa penyelenggaraan jalan yang konsepsional dan menyeluruh perlu melihat jalan sebagai suatu kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat kegiatan.

1) Kondisi Jalan dan Jembatan

Kondisi jalan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan selama 5 tahun terakhir, kondisi jalan baik sampai dengan tahun 2020 sebesar 76,81%, kondisi sedang sebesar 16,91%, kondisi rusak berat sebesar 4,32%, dan kondisi rusak sebesar 1,96%. Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya untuk melakukan peningkatan kualitas jalan, meskipun seringkali jalan tidak akan dapat mempunyai umur sesuai rencana. Jalan merupakan penghubung yang sangat penting sebagai salah satu faktor yang mendorong perkembangan ekonomi suatu wilayah.

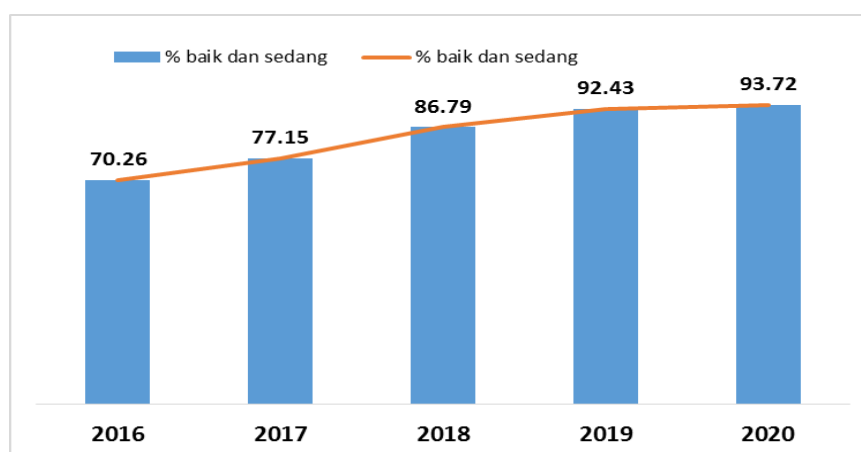
Kondisi jembatan juga tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan jalan, karena jembatan berfungsi untuk menghubungkan dua bagian jalan yang terputus oleh adanya rintangan-rintangan seperti lembah yang dalam, alur sungai saluran irigasi dan pembuang. Kondisi

jembatan baik di Kabupaten Pekalongan terus menunjukkan peningkatan, sampai dengan tahun 2020 persentase jembatan kondisi baik dan sedang mencapai 93,72%. Perkembangan kondisi jalan dan jembatan di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

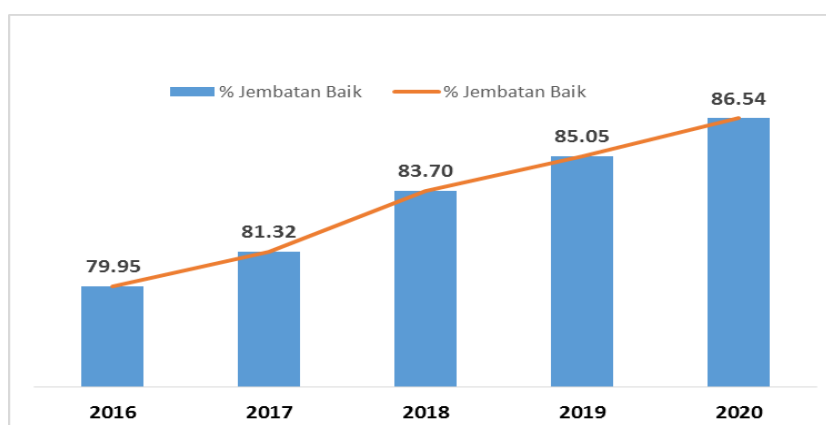
Tabel 2.81.
Kondisi Jalan dan Jembatan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Kondisi Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
Kondisi Jalan						
1.	Baik (km)	321,250	422,929	480,729	493,376	514,548
2.	Sedang (km)	92,316	93,881	100,681	125,781	113,288
3.	Rusak (km)	62,915	32,506	18,006	20,247	13,132
4.	Rusak Berat (km)	112,114	120,579	70,479	30,491	28,927
	Total (km)	588,595	669,895	669,895	669,895	669,895
	% baik dan sedang	70,26	77,15	86,79	92,43	93,72
Kondisi Jembatan						
1.	Baik (unit)	291	296	308	313	319
2.	Sedang (unit)	19	14	17	17	17
3.	Rusak (unit)	54	51	41	38	32
4.	Rusak Berat (unit)	0	3	2	0	0
	Total (unit)	364	364	368	368	368
	% Jembatan Baik	79,95	81,32	83,70	85,05	86,54

Sumber : DPU dan Taru Kab. Pekalongan, 2021



Gambar 2.69. Persentase Jalan Baik dan Sedang Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020



Gambar 2.70. Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

Dari tabel dan gambar di atas, Berdasarkan kondisi fisiknya, panjang jalan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 yaitu 514,548 km dalam kondisi baik, sepanjang 113,288 km kondisi sedang atau sebesar 93,72% naik di bandingkan tahun 2019 dengan panjang jalan yang baik sebesar 493,376 km dan jalan sedang sebesar 125,781 km atau sebesar 92,43% dari jumlah total seluruh 669,895 km. Sedangkan untuk jembatan juga mengalami peningkatan dari persentase jembatan dalam kondisi baik sebesar 85,05% di Tahun 2019 meningkat menjadi 86,54% di Tahun 2020

Selanjutnya, jika dilihat dari jenis perkerasan jalan pada tahun 2020 sebanyak 88,8% merupakan perkerasan jalan aspal, sebesar 3,65% merupakan perkerasan jalan batu/kerikil, sebesar 7,47% merupakan jalan beton. Perkembangan kondisi perkerasan jalan di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.82.
Kondisi Jalan berdasarkan Jenis Permukaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Jenis Jalan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jalan Aspal (km)	542,54	604,185	595,42	593,624	595,37
2.	Jalan Batu/kerikil (km)	12,88	26,12	23,65	26,23	24,47
3.	Jalan Beton (km)	27,96	34,81	46,85	47,80	50,06
4.	Jalan Tanah (km)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Jalan Paving (km)	5,22	4,78	3,975	2,64	0,00
	Total (km)	588,60	669,895	669,895	669,895	669,895

Sumber : DPU dan Taru Kab. Pekalongan, 2021

Sedangkan prasarana jembatan tahun 2020 di Kabupaten Pekalongan sejumlah 368 buah, berdasarkan jenis konstruksinya terdapat 42 buah jembatan komposit, 3 buah jembatan busur, 294 buah jembatan beton, 23 buah jembatan plat dan 6 buah jembatan rangka baja, serta 0 buah jembatan gantung, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.83.
Jenis Jembatan berdasarkan Konstruksinya Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Jenis Jembatan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Komposit (unit)	44	44	43	42	42
2.	Busur (unit)	3	3	3	3	3
3.	Beton (unit)	288	289	294	294	294
4.	Plat (unit)	23	23	23	23	23
5.	Rangka Baja (unit)	5	5	5	6	6
6.	Gantung (unit)	1	0	0	0	0
	Total (unit)	364	364	368	368	368

Sumber : DPU dan Taru Kab. Pekalongan, 2021

2) Sumberdaya Air

Pengelolaan sumber daya air terpadu, yang mengacu kepada tiga pilar yaitu konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Sumberdaya air dapat dimanfaatkan di bidang pertanian, industri, rumah tangga, rekreasi, dan aktivitas lingkungan. Kabupaten Pekalongan memanfaatkan sumberdaya air yang

ada dalam mendukung pertanian melalui sistem irigasi. Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya terus menunjukkan peningkatan mencapai 78,45% pada tahun 2020. Luasan jaringan irigasi kondisi baik menunjukkan perkembangan fluktuaktif namun cenderung menurun, dari 11.093,29 Ha tahun 2016 meningkat menjadi 11.129,99 Ha tahun 2017, namun sampai dengan tahun 2020 menurun menjadi 10.840,30 Ha

Perkembangan Pengelolaan Sumberdaya air untuk mendukung pertanian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.84.
Capaian Layanan Bidang Irigasi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Panjang Jaringan Irigasi Baik (km)	341,990	347,811	360,390	372,636	382,085
2.	Luas Irigasi Kondisi Baik (ha)	11.093,29	11.129,99	10.204,51	10.680,34	10.840,30
3.	Rasio Jaringan Irigasi (%)	3,08	3,10	3,14	3,40	3,525
4.	Persentase tersedianya air irigasi utk pertanian rakyat pada sistem irigasi yg sudah ada sesuai dng kewenangannya (%)	58,00	60,00	65,00	77,00	78,45

Sumber : DPU dan Taru Kab. Pekalongan, 2021

3) Drainase

Drainase merupakan salah satu komponen penting dalam perencanaan infrastruktur sebuah kota. Drainase telah menjadi prasarana umum yang dibutuhkan masyarakat khususnya diperkotaan dalam rangka menuju kehidupan kota yang nyaman, bersih, dan sehat. Drainase sendiri berarti mengalirkan, menguras, membuang, atau mengalihkan air. Jadi, drainase ini pada umumnya berfungsi sebagai pengendali kebutuhan air permukaan untuk memperbaiki dan mengurangi daerah becek, genangan air, dan banjir.

Kondisi drainase di Kabupaten Pekalongan menunjukkan kondisi baik selama 5 tahun terakhir, capaian persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat mencapai 92% tahun 2020. Sementara itu fungsi drainase sebagai untuk mengurangi genangan banjir dan rob belum optimal di Kabupaten Pekalongan. Persentase penurunan wilayah genangan banjir dan rob baru mencapai 25% di tahun 2020. Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun menunjukkan perkembangan fluktuaktif dari 40% tahun 2016 meningkat menjadi 100% tahun 2018, tetapi menurun mencapai 71,79% tahun 2020 dikarenakan sistem drainase jalan kurang berfungsi maksimal karena adanya banyak longsor dan belum adanya sistem drainase jalan yang baik. Perkembangan drainase selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.85.
Kondisi Drainase Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat (%)	45,3	75,00	90,00	90,00	92,00
2	Persentase penurunan wilayah genangan banjir dan rob (%)	-	9,30	12,30	24,00	25,00
3.	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun	40,00	45,00	100,00	86,51	71,79

Sumber : DPU Taru Kab. Pekalongan, 2021

4) Air Minum dan Air Limbah (Sanitasi)

Air minum merupakan air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya keras mewujudkan 100 persen akses air minum aman dan dapat dinikmati seluruh masyarakat. Target tersebut sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030. Capaian cakupan air minum di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2020 belum dapat mencapai target Nasional yang ditetapkan 100% pada tahun 2019, maupun target SDGs tahun 2030. Sementara itu kondisi yang sama di cakupan pelayanan sanitasi jg belum dapat mencapai target nasional sebesar 100% tahun 2020. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86.
Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

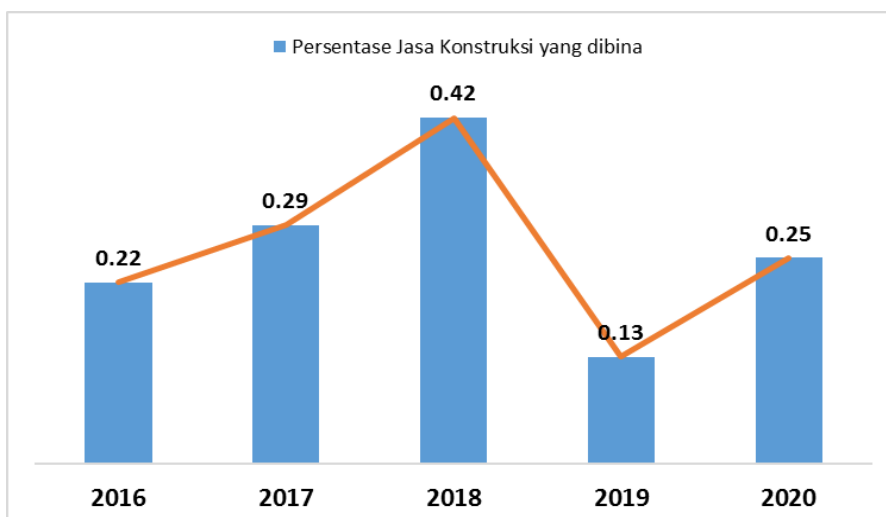
No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Pelayanan Air Minum (%)	77,23	77,58	85,71	86,51	87,83
2	Cakupan Pelayanan Sanitasi (%)	69,71	76,49	79,00	84,41	86,06

Sumber : Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan, 2021

5) Jasa Konstruksi

Jasa konstruksi menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (UUJK) merupakan suatu kegiatan untuk membangun sarana ataupun prasarana yang pada pengerjaannya meliputi pembangunan gedung (*building construction*), instalasi mekanikal & elektrik, dan juga pembangunan prasarana sipil (*civil engineer*). Jasa ini sangat dibutuhkan dalam pembangunan fasilitas umum hingga kantor. Persentase Jasa Konstruksi yang dibina di Kabupaten Pekalongan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Persentase pembinaan tergolong kecil tahun 2019 sebesar 0,13% lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,42%. Perkembangan

persentase jasa konstruksi yang dibina selengkapya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Sumber : DPU Taru Kab. Pekalongan, 2020

Gambar 2.71. Persentase Jasa Konstruksi yang dibina Tahun 2016-2020

6) Penataan Ruang

Penataan Ruang merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan (Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang). Kabupaten Pekalongan melakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040. RTRW Daerah digunakan sebagai acuan koordinasi penataan ruang wilayah Daerah, penyusunan rencana pembangunan Daerah, dan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis Daerah. Persentase Ketaatan terhadap RTRW Kabupaten Pekalongan tahun 2019 baru mencapai 74,3%. Persentase tersedianya informasi mengenai RTR wilayah kabupaten beserta rinciannya melalui peta analog dan peta digital (%) menunjukkan peningkatan mencapai 84% tahun 2020.

Capaian kinerja Penataan Ruang selengkapya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.87. Capaian Kinerja Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan (%)	-	40,5	47,8	50	65,00
2	Persentase tersedianya informasi mengenai RTR wilayah kabupaten beserta rinciannya melalui peta analog dan peta digital (%)	75	80	83	84	84,00
3	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	34	35	37	38	38,00
4	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	-	-	-	74,30	74,50

Sumber : DPU Taru Kab. Pekalongan, 2021

7) Capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

Sementara itu untuk capaian indikator kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum di Kabupaten Pekalongan pada Tahun 2017-2020 menunjukkan perkembangan yang cukup baik dan cenderung mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2020. Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi menunjukkan peningkatan dari 73,98 tahun 2017 meningkat menjadi 87,8% di tahun 2020, untuk Persentase Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD tahun 2020 mencapai 61,2%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.88.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2017-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja			
				2017	2018	2019	2020
1	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	%	100,00	73,98	83,77	86,51	87,8
2	Persentase Rumah yang memiliki akses pengolahan air limbah domestik	%	-	76,49	79,00	84,41	86,06
3	Persentase Rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	%	-	NA	NA	NA	61,20

Sumber : isian data Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan, 2020 dan https://biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota, diakses tahun 2021

d. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan 5 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kelima sub urusan tersebut adalah: 1) Perumahan; 2) Kawasan Permukiman; 3) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; 4) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); dan 5) Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 capaian kinerja urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman diukur berdasarkan 8 indikator yang telah ditetapkan, yaitu : 1) Backlog kepemilikan rumah; 2) Backlog penghunian rumah; 3) Rasio rumah tidak layak huni; 4) Luas kawasan kumuh; 5) Kawasan yang ditangani; 6) Sisa luas kawasan kumuh; 7) Persentase kawasan kumuh yang ditangani; dan 8) persentase kawasan kumuh.

Secara umum backlog perumahan dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat. Dengan pengertian ini, Backlog Perumahan adalah kuantitas rumah yang belum/ tidak tertangani. Backlog Perumahan dihitung berdasarkan konsep bahwa satu unit rumah per satu rumah tangga atau kepala keluarga. Capaian kinerja indikator backlog kepemilikan rumah selama kurun waktu 5 tahun (2016-2020) menunjukkan tren yang selalu meningkat, hal ini dapat dilihat dari capaian tahun 2016 sebanyak 20.518 unit, mengalami peningkatan sebanyak 57.693 pada tahun 2020. Capaian indikator kinerja backlog penghunian rumah setiap tahun juga mengalami

trend peningkatan yang cukup signifikan. Tahun 2016 capaian backlog penghunian rumah sebanyak 18.788 unit, meningkat menjadi 50.113 unit tahun 2020. Rata-rata peningkatan backlog penghunian rumah adalah sebanyak 9256 unit per tahun.

Capaian kinerja rasio rumah tidak layak huni di Kabupaten Pekalongan menunjukkan trend yang terus menurun setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir (2016-2020) Rasio rumah tidak layak huni merupakan perbandingan antara rumah tidak layak huni dengan jumlah penduduk. Tahun 2016 rasio rumah tidak layak huni di Kabupaten Pekalongan sebesar 11,06 %, mengalami penurunan secara bertahap setiap tahunnya menjadi 7,08 % di tahun 2020. Penurunan rumah tidak layak huni dilakukan dengan berbagai program seperti bantuan sosial RTLH yang anggarannya bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah itu sendiri.

Penanganan kawasan kumuh, dengan ditetapkannya SK Bupati Pekalongan No. 667/220 Tahun 2018 yang menetapkan luas kawasan kumuh sebesar 538,21 ha. Luas kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan setiap tahunnya, pada tahun 2016 luas kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan sebesar 671,84 Ha, mengalami penurunan secara bertahap setiap tahunnya, sehingga tahun 2020 menjadi 96,46 Ha. Rata-rata pengurangan/ penanganan kawasan kumuh setiap tahunnya adalah sebesar 191, 79 Ha/ tahun selama jangka waktu 3 tahun. Hal ini dikarenakan penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan baru berjalan efektif mulai tahun 2017, dimana pengurangannya sebanyak 538,21 Ha. Secara keseluruhan luas kawasan kumuh di Kabupaten Pekalongan yang belum tertangani saat ini tersisa 96,46 Ha atau jika di konversi dalam persen (persentase kawasan kumuh) sebesar 14,36 %. Meskipun mengalami penurunan yang signifikan setiap tahunnya, akan tetapi belum memenuhi target 100-0-100 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, dimana luas kawasan kumuh ditargetkan 0 % ditahun 2019. Selengkapny capain kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.89.
Capaian Kinerja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Backlog Kepemilikan Rumah (unit)	20.518	32.780	45.042	57.304	57.693
2	Backlog Penghunian Rumah (unit)	18.788	29.183	39.578	49.973	50.113
3	Rasio Rumah Tidak Layak Huni (%)	11,06	9,8	9,07	7,07	7,08
4	Luas Kawasan Kumuh (Ha)	671,84	671,84	538,21	96,46	96,46
5	Kawasan yang ditangani (ha)	-	133,63	259,09	182,66	37,21
6	Sisa Luas Kawasan Kumuh	-	538,21	279,15	96,46	59,25
7	Persentase Kawawan Kumuh yang ditangani (%)		19,89	58,45	85,64	91,18
8	Persentase Kawasan kumuh (%)	-	80,11	41,55	14,36	8,81

Sumber : Dinas PERKIM dan LH Kab. Pekalongan, 2021

Sementara itu pada indikator Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Pekalongan pada indikator Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan Persentase

Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni selama 3 tahun terakhir telah mencapai 100%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.90.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar
Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2020

No	Indikator Pencapaian SPM	Satuan	Target	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
1	Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : isian data Dinas Perkim dan LH Kab. Pekalongan, 2020, dan https://biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota, diakses tahun 2021

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terbagi menjadi 3 sub urusan, yaitu ketenteraman dan ketertiban umum, bencana, dan kebakaran.

Terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum, dapat diukur dari terjadinya kasus pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dan juga tingkat penyelesaiannya. Kasus pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Pekalongan jumlahnya mengalami tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah ini juga diiringi dengan meningkatnya penanganan/penyelesaian. Meskipun belum mampu menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran peraturan daerah yang terjadi namun tingkat penyelesaiannya sudah mampu mencapai angka 87,14% di tahun 2020.

Tabel 2.91.
Penyelesaian Pelanggaran Perda
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jml Pelanggar Perda	Jml Penyelesaian	Persentase (%)
1.	2016	150	130	86,67
2.	2017	240	203	84,50
3.	2018	269	230	85,50
4.	2019	300	263	87,66
5.	2020	70	61	87,14

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Pekalongan, 2021

Meningkatnya kemampuan penyelesaian kasus pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Pekalongan, salah satunya didukung oleh semakin meningkatnya kuantitas personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dimiliki. Jumlah personil Satpol PP yang ada di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sebanyak 128 orang. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada, maka rasionya adalah sebesar 1,32 per 10.000 penduduk. Meskipun demikian, jika dilihat dari kondisi ideal maka rasio

Satpol PP di Kabupaten Pekalongan masih sangat kurang jika dibandingkan dengan banyaknya jumlah penduduk yang ada.

Tabel 2.92.
Rasio Jumlah Satpol PP per 10.000 Penduduk
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Satpol PP	Jumlah penduduk	Rasio
1.	2016	87	880.092	0,99
2.	2017	86	886.197	0,97
3.	2018	115	891.892	1,29
4.	2019	128	897.711	1,43
5.	2020	128	968.821	1,32

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Pekalongan, 2021

Salah satu upaya yang dilakukan untuk menjaga kondusifitas Kabupaten Pekalongan adalah dengan mengoptimalkan kinerja Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada. Hal tersebut menjadi salah satu alternatif yang diambil karena keberadaan Linmas yang tersebar di seluruh wilayah, baik Linmas di tingkat Kabupaten bahkan sampai Linmas di tingkat desa. Jumlah anggota Linmas di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2016 sampai 2018 tidak mengalami perubahan yakni sebanyak 4.160 orang. Hal tersebut berdampak pada rasio ketersediaan Linmas per satuan penduduk yang mengalami penurunan karena jumlah penduduk yang semakin meningkat. Baru pada tahun 2019 anggota Linmas jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 5.758 orang, dan meningkat mencapai 6.469 orang tahun 2020 dengan rasio 66,77%. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.93.
Rasio Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah penduduk	Rasio
1.	2016	4.160	880.092	47,27
2.	2017	4.160	886.197	46,94
3.	2018	4.160	891.892	46,64
4.	2019	5.758	897.711	64,14
5.	2020	6.469	968.821	66,77

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Pekalongan, 2021

Partisipasi masyarakat juga memiliki peranan penting dalam upaya mewujudkan wilayah yang kondusif. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah dengan penyelenggaraan penjagaan lingkungan secara mandiri dengan mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling). Rata-rata setiap desa di Kabupaten Pekalongan memiliki 5 pos keamanan lingkungan yang dimanfaatkan untuk pelaksanaan siskamling masyarakat. Hal tersebut tentu menjadi sebuah potensi yang besar jika dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Jumlah poskamling di Kabupaten Pekalongan terus menunjukkan peningkatan, dari 1,664 unit tahun 2016 meningkat menjadi 1,685 unit.

Tabel 2.94.
Rasio Jumlah Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Poskamling	Jml Desa/Kelurahan	Rasio
1.	2016	1.664	285	5,84
2.	2017	1.664	285	5,84
3.	2018	1.675	285	5,88
4.	2019	1.675	285	5,88
5.	2020	1.685	285	5,91

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Pekalongan, 2021

Salah satu bentuk gangguan yang terjadi di Kabupaten Pekalongan adalah adanya kegiatan unjuk rasa/demo. Meskipun demikian jumlahnya tidak banyak, yaitu hanya 5 kali kejadian di tahun 2019. Sementara itu untuk tahun 2020 tidak ada kejadian unjuk rasa.

Tabel 2.95.
Jumlah Unjuk Rasa
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Jenis Unjuk Rasa	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Politik	0	1	0	0	0
2.	Ekonomi	1	0	0	0	0
3.	Lainnya	6	5	3	5	0
	Total	8	6	3	5	0

Sumber : Satpol PP dan Damkar, 2021

Selain penegakan aturan hukum daerah, kewenangan lain yang perlu diperhatikan adalah permasalahan penanganan kebakaran. Selama 5 tahun terakhir pelayanan terhadap bencana kebakaran di wilayah Kabupaten Pekalongan telah mencapai 100%, yang berarti semua kejadian kebakaran telah mampu terlayani oleh unit pemadam kebakaran yang ada. Meskipun demikian hal yang perlu diperhatikan adalah masih rendahnya tingkat waktu tanggap yang dibutuhkan oleh unit pelaksana pelayanan pemadam kebakaran untuk menangani kasus kebakaran. Tahun 2020 tingkat waktu tanggap pemadam kebakaran masih di angka 25,02%. Adapun Kinerja Sub-Urusan Kebakaran di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.96.
Kinerja Sub-Urusan Kebakaran
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	0	0	25,49	24,52	25,02

Sumber : Satpol PP dan Damkar Kab. Pekalongan, 2021

Terdapat 5 (lima) layanan yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam penyelenggaraan SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat. Capaian SPM bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut.

Tabel 2.97.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2020

No	Indikator Pelayanan Dasar	Satuan	Target	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
A.	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan					
	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada (Indikator SPM Trantibum)	%	100	100	100	100
B.	SPM Pelayanan Dasar Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Sub Urusan Kebencanaan					
1.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100
2.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100
3.	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100
4.	Persentase (%)layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	%	100	25,49	24,53	100

Sumber : isian data Satpol PP, BPBD Kab. Pekalongan, 2021

f. Sosial

Pelaksanaan urusan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah di tingkat kabupaten mencakup 6 sub urusan, yaitu Pemberdayaan Sosial, Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan, Rehabilitasi Sosial, Perlindungan dan Jaminan Sosial, Penanganan Bencana, dan Taman Makam Pahlawan. beberapa kewenangan tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan dapat diukur kinerjanya berdasarkan capaian di beberapa indikator.

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) atau yang sekarang diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih menjadi sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh seluruh tingkat pemerintahan. Di wilayah Kabupaten Pekalongan sendiri, penanganan terhadap PMKS/PPKS yang ada masih jauh dari kondisi yang diharapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari masih sangat rendahnya capaian kinerja pemberian bantuan maupun pemberdayaan terhadap PMKS yang ada. Meskipun demikian dalam kurun waktu 5 tahun, ada sedikit

peningkatan dalam upaya peningkatan pelayanan/penanganan terhadap PMKS yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan.

Dalam penanganan masalah sosial yang ada di Kabupaten Pekalongan, salah satu fasilitas yang ada adalah panti sosial. Jumlah panti sosial di Kabupaten Pekalongan cukup banyak, yakni 23 unit lembaga yang tersebar di seluruh wilayah. Panti-panti sosial itu terdiri atas panti asuhan, panti jompo, dan juga panti rehabilitasi.

Sementara itu untuk persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan 0,47% tahun 2016 meningkat menjadi 4,96% tahun 2020. Persentase fakir miskin yang menerima program pemberdayaan ekonomi menunjukkan peningkatan dari 0,03% tahun 2016 meningkat menjadi 0,45% tahun 2020. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.98.
Perkembangan Pelayanan Urusan Sosial
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Panti Sosial seperti panti asuhan, panti jompo, dan pusat rehabilitasi yang menyediakan sarana, dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.	11	11	23	23	23
2.	Persentase PMKS yang Memperoleh bantuan sosial (%)	0,47	0,90	1,94	3,10	4,96
3.	Persentase fakir miskin yang menerima program pemberdayaan ekonomi (%)	0,03	0,10	0,24	0,37	0,45
4.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat lengkap (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Sosial dan BPBD Kab. Pekalongan, 2021

Selain indikator-indikator di atas, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga harus melaksanakan pelayanan minimal urusan sosial. Standar pelayanan minimal ini wajib dan harus diberikan kepada kelompok sasaran yang ada. Terdapat 5 indikator standar pelayanan minimal urusan sosial dan pada tahun 2020 indikator tersebut telah mencapai 100%. Rata – rata capaian kinerja SPM di bidang urusan sosial secara lengkap dalam tabel berikut.

Tabel 2.99.
Capaian Kinerja SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial
Kabupaten Pekalongan Tahun 2018-2020

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja		
				2018	2019	2020
1	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Persentase (%) anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar Panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Persentase (%) Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian Kinerja		
				2018	2019	2020
4	Persentase (%) Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	%	100,00	100,00	100,00	100,00
5	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan, 2021 dan https://biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota, diakses tahun 2021

2. Fokus Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Kewenangan pemerintah kabupaten terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup pelatihan tenaga kerja, produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan tenaga kerja dan pengawasan industrial. Selain itu, permasalahan ketenagakerjaan juga menjadi salah satu permasalahan yang secara bersama-sama perlu ditangani melalui komitmen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ SDGs. Di dalam komitmen tersebut, target yang ingin dicapai adalah memberikan pekerjaan penuh dan produktif yang layak bagi semua wanita dan pria, termasuk bagi orang-orang muda dan penyandang disabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.

Masalah pokok ketenagakerjaan yang dihadapi adalah adanya kesenjangan antara angkatan kerja (pencari kerja) dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga menyebabkan pengangguran. Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk mengurangi tingkat penangguran dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja adalah melalui pelaksanaan bursa kerja. Bursa kerja ini dilaksanakan dalam satu tahun mencapai 32 kali. Selain pelaksanaan bursa kerja, hal lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan penyaluran para pencari kerja dalam hal ini adalah yang melakukan permohonan kartu kuning (AK-1) ke pasar kerja yang sesuai. Upaya ini cukup berhasil, karena pencari kerja yang ditempatkan mengalami kecenderungan peningkatan yang signifikan. Persentase pencari kerja yang ditempatkan mengalami peningkatan dari sebesar 2,81% pada tahun 2016 menjadi sebesar 30,95% pada tahun 2020.

Hal lain yang menjadi kewenangan kabupaten dalam urusan ketenagakerjaan adalah terkait dengan perlindungan tenaga kerja. Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah masih partisipasi lembaga usaha untuk melindungi tenaga kerjanya dalam program BPJS ketenagakerjaan. Persentase pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten pekalongan dari tahun ke tahun mengalami perkembangan fluktuatif namun cenderung menurun, pada tahu 2017 sebesar 60,01%, menurun menjadi 46,09%.

Permasalahan penempatan tenaga kerja dari program pelatihan juga masih menjadi masalah di Kabupaten Pekalongan. Tahun 2019 hanya 68,07% dari peserta pelatihan ketrampilan yang mampu tersalurkan ke pasar kerja. Hal tersebut tentunya harus menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi (sertifikasi). Selain itu karena dampak pandemi COVID-19, menyebabkan kesempatan kerja menurun, lowongan pekerjaan bagi pencari kerja menurun, banyak perusahaan yang kolaps sehingga banyak PHK dan

merumahkan karyawan, serta adanya PSBB menyebabkan proses produksi perusahaan juga menurun.

Selanjutnya, capaian kinerja Urusan tenaga kerja Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.100.
Perkembangan Pelayanan Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah bursa tenaga kerja (unit)	32	32	32	32	34
2.	Jumlah pencari kerja (orang)	6.236	6.514	7.657	7.580	4.811
3.	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	2,81	22,87	50,54	58,66	30,95
4.	Persentase tenaga kerja yang memperoleh Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) (%)	33,58	60,01	55,11	55,12	46,09
5.	Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%)	9,97	22,55	54,40	54,69	68,07
6.	Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yang terselesaikan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	93,33
7.	UMK (Rp)	1.463.000	1.583.698	1.721.637	1.859.885	2.018.161

Sumber : DPMPSTSP DAN NAKER Kab. Pekalongan, 2021

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana termuat dalam UU 23 tahun 2014 memiliki 6 sub urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. 6 sub urusan tersebut adalah:

- 1) Kualitas Hidup Perempuan;
- 2) Perlindungan Perempuan;
- 3) Kualitas Keluarga;
- 4) Sistem Data Gender dan Anak;
- 5) Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
- 6) Perlindungan Khusus Anak

Indikator-indikator yang secara umum menggambarkan keberhasilan dari urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah meningkatnya Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan juga menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain indikator utama tersebut, pengukuran keberhasilan urusan ini juga dapat dilihat dari indikator-indikator pembentuk/pendukung indikator utama.

Berdasarkan data yang ada, capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Pekalongan menunjukkan kondisi yang semakin membaik. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan, lembaga swasta dan legislatif cenderung mengalami peningkatan, walaupun kondisinya masih relatif kecil. Sedangkan yang perlu mendapat perhatian serius adalah peningkatan rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang terjadi, karena dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan kasus ini, salah satunya disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap tindakan kekerasan yang dialami.

Terkait pelayanan terhadap korban kekerasan, saat ini di Kabupaten Pekalongan telah memiliki lembaga konsultasi berupa Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). P2TP2A di Kabupaten Pekalongan telah dibentuk sampai tingkat desa/kelurahan, dan saat ini berjumlah sebanyak 179 unit. Pembentukan P2TP2A sampai tingkat desa/kelurahan ini bertujuan untuk mempermudah akses korban kekerasan untuk mendapatkan pelayanan. Sampai tahun 2020, penanganan korban kekerasan sudah mampu mencapai 100%. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan P2TPA, setiap tahun diselenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas bagi para petugasnya.

Upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak belum bisa di implementasikan dengan optimal di Kabupaten Pekalongan, kondisi tersebut dapat dilihat dari evaluasi Kabupaten Layak Anak yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana Kabupaten Pekalongan memperoleh penghargaan di tingkat madya selama 5 tahun berturut-turut dan belum mengalami peningkatan.

Adapun Perkembangan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.101.
Perkembangan Pelayanan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	4,45	2,93	4,20	13,11	13,31
2.	Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga swasta (%)	6,23	6,95	6,83	9,11	9,11
3.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif (%)	24,44	24,44	26,66	26,66	26,66
4.	Rasio KDRT dalam setiap rumah tangga	0,0008	0,00091	0,00091	0,000012	0,000018
5.	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan (%)	100	100	100	100	100
6.	Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di tingkat kab dan kec. (unit)	20	20	29	175	179

Sumber : DPMDP3AP2KB Kab. Pekalongan, 2021

c. Pangan

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, salah satunya mengamanatkan ketersediaan dan keamanan pangan, yang menugaskan kepada Kabuapten/Kota untuk selalu menjaga ketersediaan dan keamanan pangan. Dalam Lampiran UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam sub urusan penyelenggaraan ketahanan pangan adalah penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga.

PP 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan menyebutkan bahwa Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Keamanan Pangan dalam PP 86 tahun 2019 tentang Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.

Untuk mengimplementasikan amanat dalam undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan pemerintah Nomor 86 tentang Keamanan Pangan, di Kabupaten Pekalongan membentuk lumbung pangan untuk menjamin ketersediaan/logistik pangan dan keamanan pangan di Kabupaten Pekalongan. Lumbung pangan dimaksudkan untuk menyediakan pangan bagi masyarakat. Jumlah lumbung pangan di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sebanyak 11 Desa dari 272 desa yang ada di Kabupaten Pekalongan. Jumlah lumbung pangan tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.102.
Jumlah Lumbung Pangan
di Kabupaten Pekalongan dan Tahun Pendiriannya

No	Lokasi	Tahun pendirian	Nama kelompok
1	Desa Paninggaran Kec. Paninggaran	2010	TaniJaya
2	Desa Werdi Kec. Wonokerto	2010	Sido Makmur
3	Desa Tengeng Wetan Kec. Siwalan	2011	Sidodadi
4	Desa Sidosari Kec. Kesesi	2011	Karya Makmur
5	Desa Sumub Lor kec. Sragi	2011	Sumber Rejeki
6	Desa Pantirejo Kec. Kesesi	2013	Makmur Sejahtera
7	Desa Blimbing Wuluh Kec. Siwalan	2013	Srikandi
8	Desa Krandon Kec. Kesesi	2014	Sri Rejeki
9	Desa Getas Kec. Wonopringgo	2016	Randu Jaya
10	Desa Kedungjaran Kec. Sragi	2016	Kedungrejo
11	Desa Ketanonageng, Kecamatan Sragi	2019	Gemah Ripah

Sumber : DKPP Kab. Pekalongan, 2020

Ketersediaan pangan di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 2016-2020 fluktuatif. Selama kurun waktu tersebut ketersediaan beras mengalami surplus walaupun sifatnya fluktuatif. Neraca bahan pangan lain, yaitu jagung juga mengalami surplus walaupun dalam jumlah tidak begitu banyak. Surplus bahan pangan ini menjadikan Kabupaten Pekalongan penyuplai beras bagi wilayah sekitar terutama Kota Pekalongan. Sementara itu untuk kedelai antara produksi dengan konsumsi lebih besar

konsumsi, sehingga terjadi defisit. Gambaran neraca pangan Kabupaten Pekalongan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103.
Neraca Pangan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Ketersediaan Pangan					
	▪ Produksi Gabah Kering Giling (GKG) (ton)	233.753	223.647	229.536	205.772	193.724
	▪ Beras (ton)	233.755	134.660	143.498	117.721	127.157
	▪ Jagung (ton)	10.152	6.074	8.281	11.315	14.287
	▪ Kedelai (ton)	26,4	32	248	293	337
2.	Kebutuhan Pangan					
	▪ Beras (ton)	73.353	84.401	82.594	80.000	69.720
	▪ Jagung (ton)	2.883	2.907	3.125	3.241	3.673
	▪ Kedelai (ton)	17.366	9.039	9.334	9.537	9.821
3.	Surplus/Defisit					
	▪ Beras (ton)	160.402	50.259	60.904	37.721	57.437
	▪ Jagung (ton)	7.268	3.166	5.156	8.074	10.614
	▪ Kedelai (ton)	-17.340	-9.007	-9.086	-9.244	-9.484

Sumber : DKPP Kab. Pekalongan, 2021

Ketersediaan pangan juga termasuk didalamnya ketersediaan energy dan protein. Ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 2015- 2019 fluktuatif. Ketersediaan energi dan protein melalui ketersediaan beras atau karbohidrat dan daging serta telur. Kondisi tersebut menyebabkan skor Pola Pangan harapan juga mengalami fluktuatif pada kurun waktu 2015-2019. Secara rinci ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Pekalongan terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.104.
Capaian Pelayanan Urusan Pangan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Ketersediaan energi & protein per Kapita					
	a. ketersediaan energi per kapita (kkal/kapita/hari)	2.425,57	2.343,30	2.343,30	2.440,00	2.600,00
	a. ketersediaan protein per kapita (gr/kapita/hari)	69,04	67,09	70,51	72,91	73,20
2.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	74,00	82,20	85,80	84,10	88,60

Sumber : DKPP Kab. Pekalongan, 2021

Data di atas menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Pekalongan cukup baik. Pangan yang dikonsumsi rumah tangga terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis dengan satuan yang berbeda, sehingga dilakukan konversi ke dalam satuan dan jenis komoditas yang sama. Selanjutnya dihitung asupan energi menurut kelompok pangan per kapita/hari. Setelah itu dilanjutkan dengan menghitung skor PPH. PPH hasil perhitungan selanjutnya digolongkan berdasarkan empat kategori yaitu sangat kurang (< 55), kurang (55 – 69), cukup (70 – 84) dan baik (>85). Skor PPH pada tahun 2020 sebesar 88,60 termasuk dalam kategori cukup. Oleh karena itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan pola pangan dengan

menambah konsumsi pangan. Ada sembilan kelompok pangan yang digunakan untuk menghitung PPH yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, buah dan sayur serta lain-lain. Pangan yang dikonsumsi rumah tangga terdapat dalam berbagai bentuk dan jenis dengan satuan yang berbeda, sehingga dilakukan konversi ke dalam satuan dan jenis komoditas yang sama. Selanjutnya dihitung asupan energi menurut kelompok pangan per kapita/hari. Standar Kebutuhan energi penduduk sebesar 2.000 kkal per hari dan kebutuhan protein sebesar 52 gram protein per hari. Dengan ketersediaan energi dan protein sebagaimana tersebut dalam tabel di atas, kebutuhan kalori energi dan protein sudah memadai.

d. Pertanahan

Kewenangan Urusan Pertanahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah meliputi 1) Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota, 2) Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah kabupaten/kota, 3) Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 4) Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah kabupaten/kota, 5) Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota, 6) Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota, 7) Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah kabupaten/kota, 8) Penerbitan izin membuka tanah, dan 9) Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah kabupaten/kota.

Persentase terselesaikannya konflik-konflik pertanahan tahun 2020 sebesar 100% dengan perincian 3 (tiga) yang dilaporkan dan dapat diselesaikan semua. Sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 100,00% dengan perincian permasalahan pertanahan yang dilaporkan/dimohonkan untuk fasilitasi penyelesaiannya ada 3 (tiga) dan sudah diselesaikan semua yaitu (1)Fasilitasi permohonan pemanfaatan tanah sempadan sungai di Desa Sumub Kidul Kecamatan Sragi, (2)Fasilitasi pengadaan tanah untuk perluasan TPA Bojonglarang di Desa Linggo Asri Kecamatan Kajen dan (3) Fasilitasi tanah sisa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol trans jawa di Kabupaten Pekalongan.

Pada tahun 2018 sebesar 0,00% dikarenakan selama tahun 2018 tidak ada konflik dan sengketa pertanahan yang cukup besar. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2017 sebesar 70,00%. Hal ini disebabkan penetapan lokasi belum keluar, sementara tahap pelaksanaan pengadaan lahan baru bisa dilaksanakan setelah adanya penetapan lokasi. Pada tahun 2017 permasalahan pertanahan yang mendapatkan penyelesaian ada 7 dari 10 permasalahan.

e. Lingkungan Hidup

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 11 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Kesebelas sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Lingkungan Hidup; 2) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS); 3) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; 4) Keanekaragaman Hayati (Kehati); 5) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);

6) Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH); 7) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH; 8) Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 9) Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; 10) Pengaduan Lingkungan Hidup dan 11) Persampahan.

Dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2015-2019 capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup diukur berdasarkan 8 indikator, yaitu : 1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); 2) Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air; 3) Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak; 4) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk; 5) Persentase pengurangan sampah diperkotaan; 6) Persentase pengangkutan sampah; 7) Persentase pengoperasian TPA; 8) Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS).

Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. IKLH Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mengalami fluktuatif yang cenderung meningkat meskipun sempat terjadi penurunan secara signifikan di tahun 2018-2019, namun tahun 2020 IKLH meningkat mencapai 62,52. Nilai tersebut masuk pada kategori sangat baik.

Persentase pelayanan pencegahan pencemaran air merupakan layanan/ tindakan yang dilakukan atas pengaduan pencemaran air dari masyarakat. Selama kurun tahun 2016-2020 pelayanan pencegahan pencemaran air semakin meningkat, dari 70% di tahun 2016 menjadi 90 % di tahun 2020. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak juga mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir, dari 40 % di tahun 2016 menjadi 60 % di tahun 2020.

Rasio tempat pembuangan sampah per satuan penduduk merupakan jumlah daya tampung TPS per 1.000 penduduk, mengalami peningkatan meskipun sangat kecil, dari 0,01 di tahun 2016 meningkat menjadi 0,02 di tahun 2020. Persentase pengurangan sampah di perkotaan setiap tahun juga mengalami perkembangan fluktuatif namun cenderung menurun, tahun 2016 sebesar 33,30 % menjadi 26,34 % di tahun 2019. Upaya pengurangan sampah yang dilakukan adalah dengan membentuk Bank Sampah dan melakukan inovasi secara digital dengan aplikasi Yowaste, yaitu aplikasi yang bisa digunakan masyarakat yang ingin membuang sampah. Capaian indikator persentase pengangkutan sampah di Kabupaten Pekalongan juga mengalami peningkatan setiap tahun, pada tahun 2016 sebesar 33,45 % menjadi 52,67% di tahun 2019.

Persentase pengoperasian TPA, ini merupakan tahapan pengelolaan/ operasional yang ada di TPA yang mencakup: 1) Pembuatan rencana tindak rutin terhadap penanganan sampah dalam area pengurangan serta yang terkait dengan pengoperasian sarana dan prasarana lain; 2) Kegiatan konstruksi dan pemasangan berjalan sistem pelapis dasar TPA, sistem ventilasi gas; 3) Konstruksi sistem pengumpul lindi; 4) Pemasangan sistem penangkap gas; 5) Pengaturan dan pencatatan sampah yang masuk ke TPA; 6) Pengurangan sampah pada bidang kerja; 7) Aplikasi tanah penutup; 8) Pengoperasian unit pengolahan lindi; 9) Pemeliharaan area/sel yang sudah dikerjakan; 10) Pengoperasian dan pemeliharaan sarana, khususnya alat berat, prasarana, sarana dan utilitas; 11) Pemantauan lingkungan dan operasi sesuai ketentuan analisis dampak lingkungan; 12) Pemantauan rutin

terhadap berfungsinya sarana dan prasarana yang ada. Jika dilihat dari semua tahapan pengoperasian TPA, sampai dengan tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Perkim LH baru melaksanakan 97,19 %, Untuk jumlah Tempat Pembuangan Sampah mengalami peningkatan, dari 95 unit di tahun 2016 menjadi 120 unit pada tahun 2020. TPS tersebut, terbagi atas 21 unit merupakan TPS-3R, yang didalamnya terdapat proses pemilahan sampah. TPS-3R yang tersebar di pemukiman warga bukan hanya sekedar tempat pembuangan sanpah sementara tetapi juga diarahkan untuk dapat mengubah sampah menjadi kompos sehingga dapat mengurangi beban TPA dalam menampung sampah. Selengkapnya capain kinerja urusan Lingkungan Hidup tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.105.
Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	67,42	53,56	48,26	48,26	62,52
2	Persentase Pelayanan Pencegahan pencemaran air (%)	70,00	75,00	80,00	80,00	90,00
3	Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak(%)	40,00	48,00	52,00	52,00	60,00
4	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,01	0,11	0,11	0,02	0,02
5	Persentase pengurangan sampah diperkotaan (%)	33,30	33,50	34,50	18,00	26,34
6	Persentase pengangkutan sampah (%)	33,45	33,50	34,00	44,98	52,67
7	Persentase pengoperasian TPA (%)	58,00	59,20	60,35	73,00	97,19
8	Jumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) (unit)	95	105	108	120	120

Sumber : Dinas PERKIM dan LH Kab. Pekalongan, 2021

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Adminduk, dinyatakan bahwa bagi Penduduk yang wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk tetapi belum melakukan perekaman, wajib segera melakukan perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Perkembangan Persentase Kepemilikan KTP-Elektronik Pemula Bagi Wajib KTP-Elektronik Pemula di Kabupaten Pekalongan tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan peningkatan signifikan dari 99,54% menjadi 86,66%. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan telah berupaya salah satunya memberikan pelayanan jemput bola ke lembaga/sekolah melakukan perekaman bagi peserta didik wajib KTP yang belum melakukan perekaman, namun upaya ini dirasa belum optimal karena tidak dapat menjangkau Wajib KTP-Elektronik Pemula yang berada di luar lingkungan sekolah. Kondisi Kepemilikan KTP-Elektronik Pemula Bagi Wajib KTP-Elektronik

Pemula, salah satunya yang mempengaruhi capaian Cakupan kepemilikan KTP-el pada semua penduduk WNI tahun 2020 sebesar 98,66%, menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai 100%. Tidak hanya Wajib KTP-Elektronik Pemula yang berada di luar lingkungan sekolah, namun Wajib KTP-Elektronik lainnya yang perlu dijangkau dan difasilitasi kepemilikan KTP-el oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, diantaranya seperti Penyandang Disabilitas, Lansia, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Penyelenggaraan KIA di Kabupaten Pekalongan baru dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun capaian cakupan kepemilikan NIK pada penduduk WNI usia 0-17 Tahun (KIA) meningkat sangat signifikan, yaitu tahun 2018 sebesar 24,77% dan tahun 2020 menjadi sebesar 75,18%.

Pemerintah mempunyai Program Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran. Dalam rangka meningkatkan angka kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Pekalongan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan telah melakukan beberapa inovasi. Beberapa inovasinya adalah program 3 in 1, yaitu pembuatan akta kelahiran, KK, dan KIA secara bersamaan, serta Layanan Jekduk (Ojek Pelayanan Kependudukan). Selain itu, juga telah dilakukan jemput bola menggunakan mobil keliling, penerbitan akta kelahiran melalui penyelenggaraan Itsbat Nikah bekerjasama dengan instansi terkait maupun Layanan Online.

Capaian cakupan penerbitan akta kematian di Kabupaten Pekalongan tiap tahun hingga tahun 2020 mencapai 100%. Namun sebatas kematian seseorang yang dilaporkan dan tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan. Jumlah lembaga yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dalam pemanfaatan data kependudukan hingga tahun 2019 masih 1 MoU yang diterbitkan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan dalam memberikan informasi kependudukan yang up to date setiap tahun menyediakan Profil Kependudukan dan melaksanakan Pengelolaan Database Kependudukan secara rutin. Secara rinci capaian penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 hingga tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.106.
Perkembangan Pelayanan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan kepemilikan dok. kependudukan (%)	63,83	69,85	76,18	85,89	86,78
2	Rasio Bayi Berakte Kelahiran	87,93	90,99	91,53	95,57	95,26
3	Persentase Kepemilikan KTP EL-Pemula Bagi Bagi Wajib KTP EL-Pemula (%)	99,54	91,29	98,12	97,17	98,66
4	Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran (%)	70,40	81,79	86,71	91,94	100,00
5	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	-	100,00	100,00	100,00	100,00
7	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	-	-	24,77	71,59	75,18

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pekalongan, 2021

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. LPMD/LPMK mempunyai peran khusus dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa atau kelurahan. Di setiap desa dan kelurahan telah dibentuk LPMD/ LPMK dengan ruang lingkup peran dalam satu wilayah desa atau kelurahan. Pada setiap tahunnya LPMD/K dibina oleh kecamatan dan kabupaten baik melalui program desa/kelurahan binaan yang dilaksanakan secara terpadu dengan DPMDP3AP2KB Kab. Pekalongan maupun program lainnya. Tugas dan fungsi dari LPM diatur dalam pasal 150 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Program pemberdayaan masyarakat memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap kesempatan kerja maupun kesempatan berusaha, serta diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi melalui swadaya di desa/kelurahannya masing-masing. Program pemberdayaan masyarakat merupakan stimulan atau perangsang saja untuk menumbuhkan swadaya masyarakat. Kunci keberhasilan program pemberdayaan masyarakat ada di tangan masyarakat itu sendiri, masyarakat-lah yang merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan memanfaatkan serta memelihara hasil kegiatan dari program pemberdayaan masyarakat. Dalam tahap perencanaan, swadaya masyarakat dapat berupa tenaga, alat-alat dan uang. Dalam tahap pelaksanaan swadaya masyarakat berupa bahan/material, tenaga dan alat-alat. Sedangkan swadaya uang tidak ada. Dalam tahap pelestarian partisipasi masyarakat diwujudkan dengan kesanggupan masyarakat untuk memelihara hasil pembangunan dengan swadaya tenaga. Pada Kabupaten Pekalongan, persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat Swadaya mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat, pada tahun 2016 sebesar 18,88% meningkat menjadi tahun 2020 sebesar 23,15%.

Ketersediaan sarana dan prasarana sebagai faktor penunjang kemajuan sebuah desa, sarana dan prasarana juga menjadi salah satu faktor yang dapat membantu keberlangsungan kehidupan masyarakat. Cakupan sarana prasarana desa di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus meningkat tiap tahunnya, yaitu dari 55% menjadi 92,54%. Kondisi cakupan sarana prasarana desa di Kabupaten Pekalongan perlu lebih dioptimalkan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi dan informasi, air bersih, sanitasi, energi, penerangan, peribadatan, dan sarana dan prasarana lainnya di Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menunjang mobilitas perekonomian di Desa, terutama dalam menunjang keberlangsungan kehidupan, kesejahteraan dan memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat miskin dan termarginal di desa. Secara rinci capaian penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.107.
Capaian Pelayanan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,47	0,49	0,48	1,00	1,00
2.	Persentase swadaya masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%)	18,00	6,60	21,47	18,88	23,15
3.	Cakupan sarana prasarana desa (%)	55,00	80,32	88,95	89,37	92,54

Sumber : DPMDP3AP2KB Kab. Pekalongan, 2021

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kewenangan daerah dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana meliputi 3 sub urusan yaitu pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera. Kewenangan kabupaten/kota berkaitan dengan sub urusan pengendalian penduduk meliputi : 1) Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk, dan 2) Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan Daerah kabupaten/kota. Pengendalian penduduk berupa pengaturan kelahiran dengan pengendalian *TFR (Total Fertility Rate)*. *TFR* adalah **jumlah** rata-rata **anak** yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada akhir masa reproduksinya apabila perempuan tersebut mengikuti pola fertilitas saat **TFR** dihitung (Kasto, 1995). *TFR* Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 adalah 2,11 artinya rata-rata perempuan di Jawa Tengah memiliki kemampuan melahirkan diatas 2 anak. Dalam rangka mengendalikan *TFR* maka perlu dilakukan program pengaturan kelahiran.

Sampai dengan tahun 2020 cakupan peserta KB Aktif mencapai angka 80,42% angka ini cukup baik dibandingkan dengan target nasional (65%). Namun demikian Kabupaten Pekalongan memiliki *Unmet Need* (persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) mencapai 8,68%. Capaian ini juga cukup baik dibandingkan rata-rata capaian Jawa Tengah (9,6%). Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan keluarga Pemerintah Pusat menganjurkan untuk memiliki pasangan dengan usia di atas 20 tahun. Kabupaten Pekalongan masih memiliki PUS dengan istri dibawah 20 tahun yaitu 1,64% tahun 2019.

Capaian *Unmet Need* tahun 2020 sebesar 8,68% lebih rendah dari tahun 2016 sebesar 10,10%. Sampai dengan tahun 2020 Jumlah PUS tidak ingin punya anak tetapi tidak ber-KB dan jumlah PUS ingin anak ditunda tetapi tidak ber-KB sebanyak 15.332 orang dari jumlah total Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 176.559 orang. Sedangkan di tahun 2019 jumlah PUS yang tidak menginginkan punya anak tetapi tidak ber-KB dan jumlah PUS ingin anak ditunda tetapi tidak ber-KB sebanyak 16.442 orang dari jumlah total Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 184.879 orang. Persentase peserta KB mandiri yang tergabung dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) tahun 2020 tercapai sebesar 84,68% lebih tinggi dibanding capaian tahun 2016 sebesar 81,13%. Sampai dengan tahun 2020, Jumlah anggota UPPKS yang ber-KB sebanyak 7.629 orang dari jumlah total anggota UPPKS PUS sebanyak 9.009 orang. Sedangkan untuk tahun 2019, jumlah anggota UPPKS yang ber-KB sebanyak 7.776 orang dari jumlah total anggota UPPKS PUS sebanyak 9.082 orang.

Cakupan PUS dengan istri usia di bawah 20 tahun tahun 2020 sebesar 1,71% lebih tinggi dibanding tahun 2016 sebesar 1,20%. Sampai dengan tahun 2020, jumlah PUS kelompok umur istri kurang dari 20 tahun sebanyak 3.074 orang dari jumlah total Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 176.559 orang. Sedangkan untuk tahun 2019, jumlah PUS dengan istri usia di bawah 20 tahun sebanyak 3.028 orang dari jumlah total Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 184.879 orang.

Persentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber KB tahun 2020 tercapai sebesar 78,37% lebih rendah dari capaian tahun 2016 sebesar 82,88%. Sampai dengan tahun 2020, Jumlah anggota BKB, BKR dan BKL yang ber-KB sebanyak 16.863 orang dari jumlah total anggota BKB, BKR dan BKL PUS sebanyak 21.517 orang. Sedangkan untuk tahun 2019, jumlah anggota BKB, BKR dan BKL yang sudah ber KB sebanyak 17.196 orang dari total jumlah anggota BKB, BKR dan BKL PUS sebanyak 21.577 orang. Adapun Perkembangan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.108.
Perkembangan Pelayanan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan peserta KB aktif (%)	80,22	82,64	81,86	80,86	80,42
2.	Unmet Need	10,10	8,40	8,99	8,89	8,68
3.	Rata-rata jml anak per keluarga (anak)	2,40	2,19	2,06	2,09	2,11
4.	Persentase peserta KB mandiri yang tergabung dalam UPPKS (%)	81,13	83,93	83,94	85,62	84,68
5.	Cakupan PUS dengan istri usia di bawah 20 tahun (%)	1,20	1,30	1,09	1,64	1,71
6.	Persentase anggota BKB, BKR dan BKL yang ber KB (%)	82,88	81,28	81,42	79,70	78,37

Sumber : DPMDP3AP2KB Kab. Pekalongan, 2021

i. Perhubungan

Kewenangan urusan perhubungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi 1) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); 2) Pelayaran; 3) Penerbangan; dan 4) Perkeretapian. Kabupaten Pekalongan hanya melaksanakan sub urusan pertama yaitu Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Dalam mendukung pelayanana lalu lintas dan angkutan jalan diperlukan sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya (APILL), Persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya berupa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) naik dari tahun 2016 sebesar 45,00% menjadi sebesar 65,00% di tahun 2020. Tingkat pelayanan transportasi daerah naik dari tahun 2016 sebesar 52,50% menjadi 70,40% di tahun 2020. Pemasangan APILL dilaksanakan secara bertahap dan rasio ijin trayek akan terus diupayakan agar dapat melayani kebutuhan masyarakat akan jasa transportasi.

Rasio ijin trayek naik dari tahun 2016 sebesar 60,00% menjadi sebesar 75,80% di tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020 belum ada penambahan trayek baru namun sudah dilakukan tahapan penetapan jalur trayek baru yang meliputi pelaksanaan survey, pembuatan kajian teknis trayek Doro - Petungkriyono dan sudah dibahas serta disepakati di Forum

Lalu Lintas Angkutan Jalan guna mendukung Petungkriyono sebagai destinasi wisata di Kabupaten Pekalongan. Kemudian ada tambahan pengadaan bus antar jemput anak sekolah pada ruas jalan Talun – Doro – Karangdadap bantuan Kementerian Perhubungan. Jumlah terminal tipe C di tahun 2016 sebanyak 6 unit dan tahun 2017-2020 berkurang 1 unit yaitu menjadi 5 (lima) unit karena pengalihan pengelolaan Terminal Kajen dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.109.
Perkembangan Pelayanan Perhubungan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat pelayanan transportasi daerah (%)	52,50	58,30	62,50	70,00	70,40
2.	Persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya (APILL) (%)	45,00	50,00	55,00	60,00	65,00
3.	Rasio ijin trayek (%)	60,00	66,00	70,00	80,00	75,80
4.	Jumlah kendaraan wajib uji kir	4.688	4.792	4.491	4.538	4.259
5.	Jumlah uji kir angkutan umum	6.251	6.484	7.764	7.767	6.106
6.	Jumlah Terminal Tipe C	6	5	5	5	5
7.	Jumlah Perusahaan Angkutan Penumpang	120	121	17	25	25
8.	Jumlah Armada Angkutan Penumpang (unit)	380	387	387	566	571
9.	Jumlah Perusahaan Angkutan Barang	567	448	293	71	76
10.	Jumlah Armada Angkutan Barang (unit)	3.554	3.724	3.526	3.781	3.531

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Pekalongan, 2021

j. Komunikasi dan Informatika

Kewenangan urusan perhubungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika Informasi dan Komunikasi Publik Aplikasi Informatika. Memasuki era 4.0 komunikasi dan informatika merupakan bagian penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sarana/prasarana komunikasi dan informatika yang berkembang dengan pesat telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya. Melalui teknologi komunikasi dan informasi, segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu dan efektif. Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan status menjadi digital, mobile, virtual, serta personal dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Keberadaan sarana/prasarana teknologi komunikasi dan informasi dapat digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang dapat digunakan untuk berbagai

kepentingan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintah (*e-Government*) sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. Pemanfaatan TIK tersebut salah satunya dilakukan melalui penyediaan data yang akurat, muthakir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan serta di kelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tetang Satu Data Indonesia.

Berdasarkan amanat Peraturan Presiden tersebut penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi daerah sangat erat kaitanya dalam mengakomodir ketersediaan data dan informasi daerah. Dalam mengakomodir amanat Peraturan Presiden tentang satu data tersebut Pemerintah Kabupaten Pekalongan telah memiliki 1 website utama dari tahun 2016 hingga 2020. Namun keberadaan website tersebut masih perlu terus ditingkatkan mengingat ketersediaan data tidak hanya di ukur dari adanya website, namun juga pengelolaan website yang harus terus terupdate dengan data-data terbaru sehingga penggunaan juga akan lebih optimal dan mempermudah membatu masyarakat memperoleh informasi, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan,.

Persentase Perangkat Daerah di Kabupaten Pekalongan yang memiliki website tahun naik dari 27,27% di tahun 2016 menjadi 100,00% di tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020 semua Perangkat Daerah (45 perangkat daerah) telah mempunyai website. Setiap perangkat daerah telah dilengkapi infrastruktur pendukung web berupa software, hardware, tenaga pemeliharaan serta operator. Jumlah sistem informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah turun naik dari 12 buah sistem di tahun 2016 menjadi 70 buah sistem di tahun 2020. Sebagai upaya untuk mempermudah akses informasi dan komunikasi yaitu dengan memberikan fasilitas hotspot di 45 titik dan 20 titik, jaringan antar OPD yaitu 25 OPD dengan kapasitas 110 mbps pada tahun 2018 dan terjadi peningkatan kapasitas pada tahun 2019 yaitu 210 mbps, ketersediaan Broadband Acces 19 Kecamatan, ketersediaan jaringan 4G/3G pada 19 Kecamatan dalam area publik Kabupaten Pekalongan. Demikian pula dengan Sistem Manajemen Pemerintah Daerah juga telah memanfaatkan teknologi Informasi yaitu dengan menggunakan Aplikasi, yaitu : Monev LPSE, SAKIP, SIMONEV, SIMPEG, SIMPEL, SIPEDU, e-Planning, E-TAX MONITORING, SIMKEUDA dan KAJEN RODO.

Secara umum, capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.110.
Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase OPD yg memiliki <i>website</i> (%)	27,27	29,55	34,09	100,00	100,00
2.	Jumlah sistem informasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah berbasis IT (buah)	12	14	14	10	70
3.	Persentase ketersediaan infrastruktur TIK (%)	50,00	60,00	75,00	80,00	80,00
4.	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	5	5	5	5	5

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
5.	Web site milik pemerintah daerah	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pekalongan, 2021

k. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan Koperasi, usaha keil dan menengah sebagaimana termuat dalam UU 23 tahun 2014 memiliki 8 sub urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. 6 sub urusan tersebut adalah:

- 1) badan hukum koperasi;
- 2) izin usaha simpan pinjam;
- 3) pengawasan dan pemeriksaan;
- 4) penilaian KSP/USP Koperasi;
- 5) pendidikan dan pelatihan perkoperasiaan;
- 6) pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- 7) pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM);
- 8) Pengembangan UMKM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Persentase kinerja koperasi dan UMKM aktif fluktuatif namun mengalami penurunan dari 48,12% di tahun 2016 menjadi 37,18% di tahun 2020. Sampai dengan Tahun 2019, jumlah koperasi aktif menurun dengan tahun sebelumnya, sehingga ada penurunan capaian. Kemudian jumlah UMKM di Tahun 2020 sebanyak 45.683 unit yang mendapatkan binaan meningkat khususnya di masa pandemi COVID-19, namun jumlah ini tidak terlalu memberikan peningkatan capaian yang tinggi. Kondisi Koperasi/KUD di Kabupaten Pekalongan selalu meningkat setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016 berjumlah 571 unit dan meningkat menjadi 623 unit di tahun 2020. Pada Persentase koperasi yang aktif, mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 60,30% menjadi 37,56% di tahun 2020. Sampai dengan tahun 2020, jumlah koperasi aktif sebanyak 234 unit dari jumlah total koperasi 623 unit, menurun dari Tahun 2019 sebanyak 390 unit dari jumlah total koperasi 586 unit.

Persentase koperasi sehat mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 30,00% menjadi 35,04% pada tahun 2020. Hal ini dapat menunjukkan bahwa koperasi semakin bagus dalam melaksanakan tata kelola keuangan dan usahanya, sehingga mendapatkan penilaian sebagai koperasi sehat. Sampai dengan tahun 2020, jumlah koperasi sehat sebanyak 82 koperasi dari jumlah total 234 koperasi, jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 177 koperasi dari jumlah total 586 koperasi. Jumlah Usaha Kecil Mikro (UKM) binaan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami peningkatan, dimana tahun 2016 sebanyak 537 unit menjadi 825 unit di tahun 2020; dan sedangkan Persentase Usaha Mikro Kecil terhadap jumlah UKM juga mengalami kenaikan dari 87,75% di

tahun 2016 menjadi 84,65% di tahun 2020. Kondisi capaian kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah secara rinci dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.111.
Capaian Kinerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase kinerja koperasi dan UMKM aktif (%)	48,12	48,30	49,50	46,58	37,18
2.	Jumlah Koperasi/KUD (unit)	571	579	586	586	623
3.	Persentase Koperasi Aktif (%)	60,30	61,50	65,70	66,55	37,56
4.	Persentase Koperasi Sehat (%)	30,00	30,40	30,20	30,20	35,04
5.	Jumlah UKM Binaan (unit)	537	535	546	775	825
6.	Persentase Jumlah Usaha Mikro Kecil terhadap jumlah UKM (%)	87,75	70,00	83,00	83,79	84,65

Sumber : Dinperindagkop UKM Kab. Pekalongan, 2021

1. Penanaman Modal

Menghitung pertumbuhan ekonomi di suatu daerah penanaman modal atau investasi menjadi salah satu variabel pendukung yang sangat penting. Kehadiran investor baik internasional maupun domestik sangat penting dalam pembentukan modal daerah. Penyerapan tenaga kerja, peningkatan output, penghematan devisa atau bahkan penambahan devisa, merupakan multiplier effect dari kegiatan investasi di suatu daerah. Rasionalnya semakin banyak nilai realisasi investasi PMDN dan PMA maka semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

Sejak tahun 2016 hingga 2020 jumlah nilai Realisasi jumlah nilai investasi berskala nasional untuk PMDN turun dari tahun 2019 sebesar 1,297 trilyun menjadi 1,193 trilyun di tahun 2020. Hal ini merupakan realisasi investasi penanaman modal sektor PMDN berdasarkan data dari OSS (online single submission) yang telah memiliki hak akses, secara otomatis dimulai dari 1 milyar dari rata-rata non perseorangan.

Untuk tahun 2016 dan tahun 2017 jumlah investor dihitung berdasarkan Perka BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Modal, jumlah investor dihitung berdasarkan nilai investasi sebesar 1 milyar ke atas. Jumlah investor tahun 2016 sebesar 16 investor dan Tahun 2017 sebesar 8 investor. Sedangkan untuk tahun 2018 jumlah investor sebesar 55 investor, tahun 2019 sebesar 111 investor dan tahun 2020 sebesar 210 investor yang merupakan data realisasi investasi penanaman modal Sektor PMDN berdasar perizinan diterbitkan melalui *Online Single Submission (OSS)* dan realisasi investasi berdasarkan LKPM online minimal 1 M sehingga **datanya naik secara signifikan**. Meskipun menunjukkan peningkatan namun inovasi promosi peluang penanaman modal provinsi, penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan, dan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan masih perlu dilakukan peningkatan

Capaian kinerja urusan penanaman modal secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.112.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.Juta)	1,766	2,315	1,266	1,297	1,193
2.	Lama proses perijinan (hari)	7	7	5	5	5
3.	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN) (investor)	16	8	52	111	210

Sumber : DPMPSTSP NAKER Kab. Pekalongan, 2021

m. Kepemudaan dan Olahraga

Kepemudaan dan Olahraga Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Pemuda dan Olahraga. Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) Kepemudaan; 2) keolahragaan; dan 3) kepramukaan. Dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2015-2019 capaian kinerja urusan Kepemudaan dan Olahraga diukur berdasarkan 11 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Tingkat kualitas pemuda, olahraga dan teknologi; 2) Persentase prestasi pemuda tingkat provinsi dan nasional; 3) Persentase prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional; 4) Cakupan pembinaan olahraga; 5) Cakupan Pelatih yang bersertifikasi; 6) Cakupan pembinaan atlet muda; 7) Jumlah organisasi pemuda; 8) Persentase organisasi pemuda yang aktif; 9) Persentase wirausaha muda; 10) Jumlah organisasi olahraga dan 11) Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta).

Berkaitan dengan kepemudaan tahun 2020-2030 Indonesia berpeluang menikmati *the window of opportunity* sebagai berkah dari bonus demografi, dengan syarat disokong oleh SDM usia produktif yang berkualitas dan berkapasitas. Pembangunan pemuda memiliki peran penting untuk mewujudkan *the window of opportunity*, yaitu dengan menyiapkan pemuda yang berkualitas dan berkapasitas. Tantangan pemuda masa depan adalah meningkatkan penguasaan iptek sekaligus menekan ekses negatif dari kemajuan iptek. Ekses negatif tersebut muncul dalam beragam bentuk, mulai dari penyalahgunaan internet dalam produksi atau konsumsi pornografi. Kejahatan yang dilakukan oleh sebagian kalangan pemuda dengan memanfaatkan teknologi, seperti pemalsuan dokumen, pembajakan kartu kredit, perusakan domain pihak lain, penyebarluasan informasi yang destruktif, peningkatan potensi terorisme kekerasan, dan sebagainya. Oleh karena itu, penguasaan dan pemanfaatan iptek harus juga diikuti dengan penguatan nilai-nilai moralitas yang ditanamkan kepada kalangan pemuda, baik melalui pendidikan, olahraga.

Pada indikator tingkat kualitas pemuda, oleh raga dan teknologi merupakan capaian dari **3 (tiga) indikator yang meliputi** : prestasi pemuda tingkat provinsi dan nasional, persentase prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional dan persentase jumlah hasil riset dan krenova yang bisa direkomendasikan untuk dimanfaatkan dengan capaian di tahun 2020 sebesar 33,33% menurun dari capaian tahun 2019 sebesar 60,83% karena adanya pandemi COVID-19 sehingga ada kegiatan kepemudaan dan olahraga yang tidak dapat dilaksanakan.

Untuk indikator persentase prestasi pemuda tingkat provinsi dan nasional tahun 2019 sebesar 62,50% lebih tinggi dibandingkan tahun 2016

sebesar 20,00%. Realisasi tahun 2019 diperoleh dari target 8 prestasi dan tercapai 5 prestasi (3 prestasi tingkat provinsi dan 2 prestasi tingkat nasional). Jika dibandingkan tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 7 prestasi (87,50%). Sedangkan untuk tahun 2020 capaian 0,00% karena kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19.

Persentase prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional tahun 2019 sebesar 53,33% lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 sebesar 25,64%. Pada tahun 2019 realisasi persentase prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional dari 15 cabang yang dikirimkan, sebanyak 8 cabang olahraga mendapatkan medali/ juara. Dibandingkan dengan tahun 2018 mengalami kenaikan capaian prestasi yaitu sebesar 6 cabang olahraga. Sedangkan untuk tahun 2020 capaian 0,00% karena kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya pandemi COVID-19. Berikut disajikan capaian kinerja pada urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pekalongan.

Tabel 2.113.
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat kualitas pemuda, olahraga dan teknologi (%)	35,21	41,67	59,72	60,83	33,33
2.	Persentase prestasi pemuda tingkat provinsi dan nasional (%)	20,00	25,00	87,50	62,50	0,00
3.	Persentase prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional (%)	25,64	33,34	25,00	53,33	0,00
4.	Jumlah organisasi pemuda (unit)	40	40	44	44	47
5.	Jumlah organisasi olahraga (klub)	24	24	20	20	23
7.	Gelanggang / balai remaja (selain milik swasta) (unit)	1	1	1	1	1

Sumber : DINPORAPAR Kab. Pekalongan, 2021

n. Statistik

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 1 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Statistik yaitu sub urusan Statistik Sektoral. Dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2015-2019 capaian kinerja urusan statistik diukur berdasarkan 3 indikator yang telah ditetapkan, yaitu: 1) Persentase data/informasi/statistik daerah yang digunakan dalam perencanaan; 2) Buku Kabupaten Dalam Angka; dan 3) Buku PDRB Kabupaten.

Capaian kinerja Statistik Kabupaten Pekalongan dapat dilihat dari indikator Persentase data/informasi/statistik daerah yang digunakan dalam perencanaan kinerja sudah sebesar 100 %. Dilihat dari capaian indikator jumlah buku Kabupaten dalam angka pada tahun 2016 hingga 2020 sebanyak 1 dokumen, dan jumlah buku PDRB Kabupaten pada tahun 2016 hingga 2020 sebanyak 1 dokumen.

Dalam rangka peningkatan kualitas data statistik di Kabupaten Pekalongan, masih diperlukan inovasi dan sinergitas dengan berbagai sektor sehingga data yang disajikan akan lebih valid dan sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah. Sampai dengan tahun 2020 penerapan single data masih belum optimal dalam menyediakan data yang valid dan up to date. Berikut disajikan capaian kinerja pada urusan Statistik Kabupaten Pekalongan.

Tabel 2.114.
Capaian Kinerja Urusan Statistik
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase data/informasi/statistik daerah yang digunakan dalam perencanaan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Buku Kabupaten Dalam Angka (dok)	1	1	1	1	1
3.	Buku PDRB Kabupaten (dokumen)	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pekalongan, 2021

o. Persandian

Berdasarkan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 1 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Persandian yaitu sub urusan Persandian untuk pengamanan informasi. Dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 capaian kinerja urusan Persandian diukur berdasarkan 1 indikator yaitu Persentase pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah, yang capaiannya sudah sebesar 100%. Berikut ini disajikan capaian kinerja pada urusan persandian Kabupaten Pekalongan.

Tabel 2.115.
Capaian Kinerja Urusan Persandian
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pekalongan, 2021

p. Kebudayaan

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan dalam masyarakat harus kita jaga dan lestarikan. Seni dan budaya merupakan identitas suatu bangsa, selain menjaga dan melestarikan kita juga harus mempromosikannya kepada masyarakat luas. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat mengenal budayanya sendiri sehingga bisa berpartisipasi dalam upaya pemajuan, perlindungan dan pengembangan kebudayaan yang ada.

Urusan kebudayaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Pekalongan meliputi sub urusan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya dan permuseuman. Pengembangan kebudayaan di Kabupaten Pekalongan ditunjukkan dengan indikator Persentase penyelenggaraan fasilitasi seni dan budaya (%), Persentase Organisasi Seni dan Budaya yang dibina (%), Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk, Persentase keikutsertaan festival seni dan budaya (%), Jumlah grup kesenian (unit), Jumlah Misi Kesenian (kali), Jumlah gedung kesenian (unit), Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali), Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit).

Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang dilakukan di Kabupaten Pekalongan melibatkan grup kesenian yang menampilkan seni dan budaya khas Kabupaten Pekalongan. Festival seni dan budaya merupakan ajang

untuk mempertunjukkan, melestarikan dan mengenalkan seni dan budaya khas Kabupaten Pekalongan pada masyarakat luas.

Persentase penyelenggaraan fasilitas seni dan budaya dari tahun 2016-2020 selalu dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan capaian 100%. Tahun 2019 sebanyak 82 penyelenggaraan seni dan budaya yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Sedangkan untuk tahun 2020 hanya ada 2 penyelenggaraan seni dan budaya yang telah difasilitasi karena adanya pandemi COVID-19.

Persentase keikutsertaan festival seni dan budaya juga meningkat dari tahun 2016 sebesar 56,00% menjadi 66,00% di tahun 2020. Jumlah keikutsertaan festival seni dan budaya tingkat provinsi dan nasional tahun 2020 sebanyak 4 kali dari jumlah total 6 kali. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2019 karena adanya pandemi COVID-19 dengan jumlah keikutsertaan festival seni dan budaya tingkat provinsi dan nasional sebanyak 40 kali dari jumlah total 63 kali. Berikut capaian kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.116.
Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase penyelenggaraan fasilitas seni dan budaya (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.	Persentase Organisasi Seni dan Budaya yang dibina (%)	99,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.	Rasio grup kesenian per 10.000 penduduk	3	3	3	3	3
4.	Persentase keikutsertaan festival seni dan budaya (%)	56,00	61,00	63,20	63,49	66,00
5.	Jumlah grup kesenian (unit)	221	235	257	257	257
6.	Jumlah Misi Kesenian (kali)	12	15	12	13	2
7.	Jumlah gedung kesenian (unit)	1	1	1	1	1
8.	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	37	40	82	101	2
9.	Sarana penyelenggaraan seni dan budaya (unit)	1	1	1	1	1

Sumber : Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021

q. Perpustakaan

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Pekalongan meliputi sub urusan pembinaan perpustakaan, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno serta sertifikasi pustakawan dan akreditasi pendidikan dan pelatihan perpustakaan. Capaian kinerja dari tahun 2016 hingga 2020 menunjukkan untuk indikator tingkat koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah dan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun menunjukkan peningkatan, begitu juga Jumlah

perpustakaan desa/Taman Bacaan Masyarakat (TBM). Hal yang perlu perhatian terkait dengan perpustakaan desa/Taman Bacaan Masyarakat adalah sebaran disetiap desa. Terkait jumlah koleksi buku, keberagaman koleksi perlu selalu ditingkatkan, karena akan menambah jumlah pengunjung perpustakaan.

Pada indikator Jumlah perpustakaan desa/Taman Bacaan Masyarakat (TBM) meningkat dari tahun 2016 sebanyak 175 unit menjadi 187 unit di Tahun 2020. Sedangkan jumlah perpustakaan desa yang sudah memenuhi standart pada tahun 2019 sebanyak 82 perpustakaan dan ada penambahan sebanyak 2 unit di tahun 2020 sehingga total menjadi 84 unit. Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar 53.819 orang menjadi 71.699 orang di tahun 2019. Namun demikian jumlah pengunjung mengalami penurunan di Tahun 2020 sebesar 14.469 orang karena pandemi COVID -19 sehingga perpustakaan tutup sepanjang Bulan Maret-Juni 2020 tutup, armada perpustakaan dan pameran juga tidak dilaksanakan.

Sedangkan jumlah koleksi buku bacaan yang tersedia di perpustakaan semakin bertambah dari tahun 2016 sebanyak 39.863 eksemplar menjadi 52.778 eksemplar di tahun 2020. Ada tambahan sekitar 2.364 eksemplar di tahun 2020 dari tahun 2019. Untuk lebih lengkapnya gambaran capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.117.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah perpustakaan desa/Taman Bacaan Masyarakat (TBM) (unit)	175	177	178	186	187
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)	53.819	53.151	55.936	71.699	14.469
3.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (eksemplar)	39.863	41.743	46.780	50.414	52.778

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan, 2021

r. Kearsipan

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urusan kearsipan sesuai dengan kewenangan yang wajib dilakukan di wilayah Kabupaten Pekalongan meliputi sub urusan pengelolaan arsip, perlindungan dan penyelamatan arsip serta perizinan.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam pembangunan urusan kearsipan yaitu alih media arsip menjadi arsip digital, pengelolaan arsip dimasing-masing perangkat daerah serta ketersediaan SDM arsiparis dan pengelola arsip yang memadai. Selain itu sarana dan prasarana dalam penyimpanan arsip juga harus menjadi perhatian.

Persentase pengelolaan arsip secara baku meningkat dari tahun 2016 sebesar 26,67% menjadi 40,00% di tahun 2020. Namun capaian ini menurun dari Tahun 2019 sebesar 60,00%. Tahun 2017 jumlah Perangkat

Daerah yang sudah melakukan pengelolaan arsip secara baik sebanyak 17 Perangkat Daerah, tahun 2018 ada 22 Perangkat Daerah dan Tahun 2019-2020 ada sebanyak 27 Perangkat Daerah.

Jumlah alih media arsip ke media elektronik tahun 2017 sebanyak 1.191 berkas arsip, tahun 2018 sebanyak 1.687 berkas arsip, tahun 2019 sebanyak 2.207 berkas arsip dan tahun 2020 sebanyak 2.527 berkas arsip sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk indicator Jumlah penyelamatan arsip tekstual (dokumen) pada tahun 2017 jumlah arsip yang sudah tertata sebanyak 140.733 dokumen, tahun 2018 sebanyak 143.216 dokumen, tahun 2019-2020 sebanyak 224.591 dokumen.

Capaian kinerja kearsipan selama 5 tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Berikut capaian kinerja urusan kearsipan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.118.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase pengelolaan arsip secara baku (%)	26,67	37,78	48,89	60,00	60,00
2.	Jumlah arsip tekstual permanen (berkas)	769	1.191	1.687	2.207	2.527
3.	Jumlah penyelamatan arsip tekstual (dokumen)	103.233	140.733	143.216	224.591	224.591

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Pekalongan, 2021

3. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Kewenangan Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan: Perikanan Tangkap, dan Perikanan Budidaya. Potensi perikanan yang dimiliki Kabupaten Pekalongan mencakup perikanan tangkap dengan total produksi menunjukkan peningkatan dari sebesar 9.739,63 ton pada tahun 2016 menjadi sebesar 13.898,00 ton pada tahun 2020. Peningkatan produksi tersebut terjadi baik pada perikanan tangkap, perikanan budidaya di tambak maupun produksi perikanan di kolam.

Jumlah produksi hasil olahan perikanan tangkap di Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan dari sebesar 3.270,29 ton pada tahun 2016 menjadi sebesar 5.381,26 ton pada tahun 2020. Pada Perikanan budidaya, luas lahan tambak yang diusahakan pada tahun 2020 seluas 567,50 Ha menurun dari tahun 2016 sebesar 791,35 Ha. Sedangkan jumlah pembudidaya tambak tahun 2020 sebesar 983 orang, menurun dari tahun 2016 sebesar 1.508 orang. Namun demikian produksi tambak pada tahun 2020 mencapai 7.135,43 ton meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 5.465,26 ton.

Sedangkan untuk budidaya kolam, lahan yang digunakan pada tahun 2020 seluas 73,20 Ha dengan jumlah produksi sebesar 1.381,31 ton, lebih banyak dari tahun 2016 yang mencapai 50,90 ha dengan produksi sebanyak 1.004,26 ton. Jumlah pembudidaya kolam menurun dari tahun 2016 sebesar 2.203 orang menjadi 1.647 orang di tahun 2020. Sementara itu Produksi Benih BBI meningkat dari tahun 2016 sebesar 986.000 ekor menjadi 1.286.633 ekor di tahun 2020.

Rata-rata pendapatan nelayan menunjukkan adanya peningkatan dari sebesar Rp 961.623 pada tahun 2016 menjadi Rp 1.403.178, sedangkan Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan meningkat dari sebesar Rp 1.614.506 menjadi Rp 2.156.844. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada peningkatan pendapatan nelayan dan pembudidaya ikan di Kabupaten Pekalongan. Hal ini berbanding lurus dengan tingkat konsumsi ikan di masyarakat sebesar 23,69 kg/kap/tahun di Tahun 2020 yang meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 23,32 kg/kap/tahun. Secara rinci capaian kinerja urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.119.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	ton	9.739,63	11.162,22	12.805,51	13.705,00	13.898,00
2.	Perikanan Tangkap	ton	3.270,29	4.036,18	5.178,13	5.305,58	5.381,26
3.	Perikanan Budidaya						
	a. Tambak	ton	5.465,26	6.384,62	6.662,77	7.129,89	7.135,43
	b. Kolam	ton	1.004,08	1.052,24	1.178,48	1.269,53	1.381,31
4.	Rata-rata Pendapatan Nelayan	Rp/bulan	961.623	1.020.900	1.179.787	1.291.621	1.403.178
5.	Rata-rata Pendapatan Pembudidaya Ikan	Rp/bulan	1.614.506	1.803.051	1.961.685	2.026.438	2.156.844
6.	Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/ th	21,77	21,8	22,8	23,32	23,69

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, 2021

Potensi Perikanan budidaya, luas lahan tambak yang diusahakan pada tahun 2020 seluas 567,50 Ha menurun dari tahun 2016 sebesar 791,35 Ha. Sedangkan jumlah pembudidaya tambak tahun 2020 sebesar 983 orang, menurun dari tahun 2016 sebesar 1.508 orang. Namun demikian produksi tambak pada tahun 2020 mencapai 7.135,43 ton meningkat dibandingkan tahun 2016 sebesar 5.465,26 ton.

Sedangkan untuk budidaya kolam, lahan yang digunakan pada tahun 2020 seluas 73,20 Ha dengan jumlah produksi sebesar 1.381,31 ton, lebih banyak dari tahun 2016 yang mencapai 50,90 ha dengan produksi sebanyak 1.004,08 ton. Jumlah pembudidaya kolam menurun dari tahun 2016 sebesar 2.203 orang menjadi 1.647 orang di tahun 2020. Sementara itu Produksi Benih BBI meningkat dari tahun 2016 sebesar 986.000 ekor menjadi 1.286.633 ekor di tahun 2020. Secara rinci perkembangan perikanan budidaya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.120.
Perkembangan Perikanan Budidaya
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Luas Lahan Tambak	Ha	791,35	791,35	791,35	789,65	567,50
2.	Jumlah Pembudidaya Tambak	Orang	1.474	1.508	902	808	983
3.	Produksi Tambak	Ton	5.465,26	6.384,62	6.662,77	7.129,89	7.135,43

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
4.	Luas Lahan Kolam	Ha	50,90	50,90	50,90	68,40	73,20
5.	Produksi Kolam	Ton	1.004,26	1.052,24	1.178,48	1.269,53	1.381,31
6.	Jumlah Pembudidaya Kolam	Orang	2.203	2.203	1.648	1.674	1.674
7.	Produksi Benih BBI	Ekor	986.000	1.081.000	1.140.000	1.230.460	1.286.633

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, 2021

Potensi terkait Produksi perikanan tangkap pada tahun 2019 sebesar 5.305,58 ton meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 3.172,25 ton. Hal ini karena adanya dukungan kegiatan untuk penyediaan sarana dan prasarana penangkapan ikan dan juga karena faktor cuaca yang cukup mendukung untuk operasi penangkapan ikan sepanjang tahun 2016-2020. Jumlah produksi ikan di TPI Wonokerto dan TPI Jambean pada tahun 2020 sebesar 4.039,86 ton meningkat dibandingkan tahun 2016 sebanyak 3.000,26 ton. Nilai raman TPI Wonokerto dan TPI Jambean tahun 2020 mencapai Rp. 16.134.790,00 meningkat jika dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp. 9.000.135,00. Secara rinci perkembangan perikanan tangkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.121.
Perkembangan Perikanan Tangkap
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	3.270,29	4.036,18	5.178,13	5.305,58	5.381,26
2.	Jumlah Alat Tangkap	Unit	377	340	445	405	336
3.	Jumlah Perahu Motor Tempel	Unit	341	341	425	387	305
4.	Jumlah Kapal Motor	Unit	36	38	20	18	31
5.	Jumlah Nelayan	Ha	10.197	11.157	11.318	12.999	10.226
6.	Produksi TPI Wonokerto	Ton	1.321,50	1.815,81	2.687,59	1.694,50	2.042,73
7.	Nilai Raman Lelang TPI Wonokerto	Ribu (Rp)	4.500.086	5.001.322	7.442.459	5.698.829	8.789.488
8.	Produksi TPI Jambean	Ton	1.678,76	1.700,50	2.066,42	1.267,81	1.997,13
9.	Nilai Raman Lelang TPI Jambean	Ribu (Rp)	4.500.049	5.000.540	6.140.456	5.707.100	7.345.302

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, 2021

Potensi terkait pengolahan ikan terlihat dari perkembangan jumlah unit pengolah ikan tahun 2019 sebanyak 430 unit tidak ada penambahan pada tahun 2020, jumlah pengolah/ pemasar ikan tahun 2019 sebanyak 732 orang dan tidak ada penambahan di tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.122.
Perkembangan Produksi Pengolahan Ikan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Capaian	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Unit Pengolah Ikan	Unit	421	421	430	430	430
2.	Jumlah Pengolah/ Pemasar Ikan	Orang	732	732	732	732	732

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pekalongan, 2021

b. Pariwisata

Urusan pariwisata menjadi pintu gerbang promosi/pemasaran terhadap jasa-jasa wisata/obyek wisata yang berkembang di masyarakat. Empat pilar utama dalam pengembangan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata untuk senantiasa diupayakan penanganan yang terpadu lintas sektor, sehingga dapat menggambarkan satu bentuk daya tarik yang sinergi dalam menarik wisata, tidak terkecuali budaya/seni tradisi yang masih sangat membutuhkan sentuhan dan dukungan prasarana lebih lanjut.

Perkembangan pariwisata di Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Destinasi wisata dalam satu kawasan wisata dan pengembangan desa wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah, baru 3 (tiga) obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah yaitu Objek Wisata Linggoasri, Objek Wisata Pantai Depok dan Bumi Perkemahan Linggoasri. Jumlah kunjungan wisatawan tahun 2020 sejumlah 115.756 orang menurun dari tahun 2019 sebesar 236.244 orang sebagai akibat ditutupkan sejumlah obyek wisata akibat pandemi COVID-19. Jumlah tersebut diperoleh dari kunjungan objek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah yaitu Objek Wisata Linggoasri, Objek Wisata Pantai Depok dan Bumi Perkemahan Linggoasri.

Jika dilihat dari Nilai pendapatan sektor pariwisata turun dari tahun 2019 sebesar Rp 1,697 milyar menjadi sebesar Rp 802,136 juta sebagai akibat ditutupkan sejumlah obyek wisata akibat pandemi COVID-19 sepanjang Tahun 2020. Secara rinci, capaian kinerja urusan pariwisata tahun 2016-2020 Kabupaten pekalongan bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.123.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Indikator (Ha)	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah kunjungan wisatawan (orang)	115.307	129.542	140.430	236.244	115.756
2.	Nilai pendapatan sektor pariwisata (Rp.ribu/tahun)	600.358,5	611.293	667.865,5	1.697.036,5	802.135,5

Sumber : Dinporapar Kab.Pekalongan, 2021

c. Pertanian

Kewenangan Kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mencakup sub urusan: sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian, dan perizinan usaha pertanian.

Sektor pertanian menjadi sektor yang memberikan kontribusi cukup besar dalam PDRB Kabupaten Pekalongan. Namun demikian kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB ADHK semakin menurun dari sebesar 16,58% pada tahun 2016 menjadi 15,05% pada tahun 2020. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian mulai tergantikan sektor-sektor lainnya yang tumbuh di Kabupaten Pekalongan.

Produktivitas tanaman pangan utama meliputi padi, jagung dan kedelai menunjukkan peningkatan, namun relatif kecil. Pada tahun 2020 produktivitas padi mencapai 53,02 kuintal per hektar, produktivitas jagung mencapai 52,15 kuintal per hektar; dan produktivitas kedelai sebesar 14,04 kuintal per hektar. Produksi komoditas hortikultura menunjukkan kecenderungan meningkat pada jenis komoditas: Durian, Mangga, Pisang, Kentang, Bawang Daun, Alpukat, dan Manggis. Sementara itu jenis komoditas Rambutan, Cabe dan Jambu air jumlah produksinya cenderung menurun. Jenis komoditas yang produksinya paling banyak pada tahun 2020 adalah pisang sebanyak 219.965 kuintal, Mangga 125.874 kuintal, dan Durian 105.581 kuintal.

Produksi tanaman perkebunan yang potensial pada tahun 2020 meliputi kelapa, tebu, cengkeh dan kopi. Produksi kelapa mencapai 24.301.110 butir, tebu mencapai 713.415 kuintal, cengkeh sebanyak 488,13 ton, dan kopi sebanyak 658 ton.

Populasi produksi komoditas peternakan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan selama kurun waktu tahun 2016-2020 pada semua jenis komoditas. Populasi Sapi potong pada tahun 2020 mencapai 22.375 Ekor, Kerbau sebanyak 2.904 Ekor, Kambing sebanyak 51.112 Ekor, Domba sebanyak 31.445 Ekor, Ayam broiler sebanyak 9.073.782 Ekor, Ayam Buras sebanyak 1.287.030 Ekor dan ayam petelur sebanyak 143.170 ekor. Untuk produksi daging meningkat dari sebesar 8.218.292 kg pada tahun 2016 menjadi 8.892.964 kg pada tahun 2020. Sementara itu untuk produksi telur dan susu mengalami peningkatan, pada tahun 2020 produksi telur mencapai 5.648.954 kg dan produksi susu sebanyak 365.094 liter.

Secara rinci perkembangan kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.124.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
A. PERTANIAN							
1.	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHK 2010	Persen	16,58	15,73	15,12	14,62	15,05
2.	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB ADHB 2010	Persen	18,86	17,70	17,07	16,48	17,01
3.	Persentase produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Persen	531,44	534,71	533,10	536,59	535,79
3.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar						
	a. Padi	kuintal/ha	52,68	52,42	52,46	52,86	53,02
	b. Jagung	kuintal/ha	46,63	49,75	50,39	53,32	52,15
	c. Kedelai	kuintal/ha	10,15	14,00	14,56	14,64	14,04
3.	Produktivitas komoditas hortikultura						
	a. Durian	Kuintal	15.311	115.888	131.047	102.961	105.581
	b. Mangga	Kuintal	71.085	80.786	112.808	125.824	125.874
	c. Rambutan	Kuintal	186.939	275.557	81.539	55.654	56.214
	d. Pisang	Kuintal	45.545	30.942	32.182	218.647	219.965

No	Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
	e. Kentang	Kuintal	12.024	3.630	13.442	14.994	15.411
	f. Bawang Daun	Kuintal	3.871	3.644	11.341	4.877	4.912
	g. Alpukat	Kuintal	-	1.141	13.368	5.719	5.841
	h. Manggis	Kuintal	-	793	9.828	7.710	8.714
	i. Cabe	Kuintal	-	7.536	9.342	11.670	11.741
	j. Jambu Air	Kuintal	-	3.399	2.844	12.219	12.541
B.	PERKEBUNAN						
	a. Kelapa	Butir	17.579.360	16.162.297	15.942.345	20.972.836,05	24.301.110
	b. Tebu	Kuintal	532.204	545.920	567.410	401.315,93	713.415
	c. Cengkeh	Ton	228	227,93	227,93	550,47	488,13
	d. Kopi	Ton	435	434,46	433,64	497,57	658
C.	PETERNAKAN						
1.	Populasi Produksi Komoditas Peternakan Utama						
	a. Sapi potong	Ekor	22.375	22.489	22.511	22.619	22.650
	b. Kerbau	Ekor	2.883	2.885	2.925	2.899	2.904
	c. Kambing	Ekor	50.499	50.788	50.873	51.073	51.112
	d. Domba	Ekor	31.171	31.236	31.465	31.425	31.445
	e. Ayam broiler	Ekor	5.528.418	5.557.500	5.756.833	5.698.750	5.822.750
	f. Ayam Buras	Ekor	984.750	990.623	991.110	1.287.000	1.287.030
	g. Ayam Petelur	Ekor	195.875	140.844	141.100	142.210	143.170
2.	Produksi Peternakan						
	a. Daging	Kg	8.218.292	8.610.563	8.776.349	8.892.964,05	9.073.782
	b. Telur	Kg	5.530.612	5.500.662	5.585.647	5.622.421,49	5.648.954
	c. Susu	Liter	357.779	364.959	364.967	364.982	365.094

Sumber : DKPP Kabupaten Pekalongan, 2021

d. Perdagangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan bidang Perdagangan untuk Pemerintah Daerah mengatur bahwa Kabupaten Pekalongan diantaranya melakukan Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat; pelakunya dalam Daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan berbahaya di tingkat Daerah kabupaten/kota; Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan masyarakat; Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya; Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah kabupaten/kota; Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota; Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten/kota; Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Perdagangan sebagai salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi daerah diharapkan dapat berperan dalam pengembangan iklim usaha yang kompetitif. Tujuannya adalah untuk membangun perilaku bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan dan profesionalisme pelaku usaha. Iklim usaha yang sehat akan meningkatkan efisiensi alokasi dan penggunaan sumberdaya ekonomi di dalam negeri, sehingga dunia usaha akan mempunyai daya saing yang tinggi terutama dalam menghadapi pasar global. Meskipun demikian untuk upaya perlindungan konsumen serta pengawasan barang beredar, serta pengembangan sarana dan prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional sesuai standar masih terbatas.

Perekonomian Kabupaten Pekalongan banyak didorong dan didukung oleh sektor perdagangan. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya sumbangan dari sub sektor perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHB maupun ADHK Kabupaten Pekalongan. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Berlaku

meningkat dari tahun 2016 sebesar 13,38% menjadi 13,42% di tahun 2020. Sedangkan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan relatif naik dari tahun 2016 sebesar 14,87% menjadi 14,90% di tahun 2020. Untuk nilai ekspor perdagangan dari tahun 2019 sebesar 32.910 ribu US\$ menurun menjadi 14.289 ribu US\$ di tahun 2020. Karena adanya pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020. Sedangkan jumlah pasar modern/toserta/pasar swalayan meningkat dari 20 unit di tahun 2026 menjadi 67 unit di Tahun 2020.

Secara rinci capaian kinerja urusan perdagangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.125.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHB (%)	13,38	13,38	13,40	13,50	13,42
2.	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB ADHK (%)	14,87	14,84	14,88	14,93	14,90
3.	Nilai Ekspor Perdagangan (ribu US\$)	16.659	19.913	33.773	32.910	14.289
4	Jumlah pasar modern/toserta/pasar swalayan (unit)	20	20	20	49	67

Sumber : Dinperidagkop UKM; BPS Kabupaten Pekalongan, 2021

e. Perindustrian

Penyelenggaraan pemeritahan urusan perindustrian dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan 3 sub urusan, yaitu Perencanaan Pembangunan Industri, Perizinan, dan Sistem Informasi Industri Nasional. Kewenangan Kabupaten dari 3 sub urusan tersebut sebagai berikut.

- 1) Perencanaan Pembangunan Industri
 - Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten/kota.
- 2) Perizinan
 - Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah.
 - Penerbitan IPUi bagi industri kecil dan menengah.
 - Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.
- 3) Sistem Informasi Industri Nasional
 - Penyampaian laporan informasi industri untuk: IUI Kecil dan Izin Perluasannya; IUI Menengah dan Izin Perluasannya; dan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Capaian penyelenggaraan pemeritahan urusan perindustrian di Kabupaten Pekalongan dalam RPJMD 2016-2021 ditunjukkan dengan 4 indikator. Indikator tersebut, yaitu (1) Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku; (2) Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan; (3) Tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah dan (4) Bidang Industri terdiri dari (a) Jumlah Usaha Industri; (b) Jumlah Tenaga Kerja; (c) Jumlah Investasi; (d) Nilai Produksi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkatan regional (kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah/kabupaten untuk menciptakan output (nilai tambah) pada waktu tertentu. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan nilai tambah bruto yang mampu

diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Lapangan usaha tersebut salah satunya kategori industri pengolahan.

Kategori industri pengolahan meliputi kegiatan ekonomi dibidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industry pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebesar 30,75%, angka ini sedikit menurun dari tahun 2016 sebesar 31,25%, meskipun demikian kategori industri pengolahan merupakan peranan terbesar dalam pembentukan PDRB ADHB Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan Harga Konstan 2010, Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK 2010) tahun 2020 mencapai sebesar 30,84%. Dalam proses produksi sektor industri pengolahan belum banyak memanfaatkan teknologi sehingga produk industri yang dihasilkan masih kurang berkembang. Sementara itu beberapa industri mikro kecil masih belum memiliki kapasitas dalam mengakses permodalan dan pemasaran.

Peranan sektor industri pengolahan terhadap PDRB sejalan dengan perkembangan tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah tahun 2015 hingga tahun 2020 yang mengalami peningkatan tiap tahun, yaitu dari 0,08% pada tahun 2016 menjadi 0,60% pada tahun 2020. Adapun indikator capaian pelayanan urusan perindustrian Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 seperti terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.126.
Indikator Capaian Pelayanan Urusan Perindustrian
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB	31,25	31,05	31.16	31,07	30,75
2.	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHK	31,95	31,69	31.66	31,49	30,84
3.	Tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)	0.08	0,10	0,14	0,58	0,60
4.	Bidang Industri					
	a. Jumlah Usaha Industri (unit)	32.276	6.133	13.259	13.336	13.416
	b. Jumlah Tenaga Kerja (org)	184.586	308.871	61.754	62.449	62.681
	c. Jumlah Investasi (Rp 000)	1.081.934.043	162.175.238	993.174.275	1.006.736.775	1.008.043.725
	d. Nilai Produksi (Rp 000)	4.621.117.190	22.147.200.162	2.755.965.360	2.761.885.610	2.763.948.810

Sumber : Dinperdagkop UKM; BPS Kabupaten Pekalongan, 2021

Jumlah usaha industri di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 terdiri dari Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka dan Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan tercatat sebanyak 13.416 usaha, turun sangat signifikan dibandingkan tahun 2016 sebanyak 32.276 usaha. Adapun jumlah usaha industri menurut kelompok industri Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.127.
Jumlah Usaha Industri Menurut Kelompok Industri
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka					
	a. Skala Besar	9	-	10	10	10
	b. Skala Menengah	4.803	-	237	242	242
	c. Skala Kecil	7.507	5.069	6.278	6.302	6.337
	d. Skala Rmh Tangga	7.983	-	-	-	-
2	Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan					
	a. Skala Besar	-	-	-	-	-
	b. Skala Menengah	109	8	3	5	5
	c. Skala Kecil	1.409	1.056	6.731	6.777	6.882
	d. Skala Rmh Tangga	10.456	-	-	-	-
	Jumlah					
	a. Skala Besar (unit)	9	-	10	10	10
	b. Skala Menengah	4.912	8	240	247	247
	c. Skala Kecil	8.916	6.125	13.009	13.079	13.159
	d. Skala Rmh Tangga	18.439	-	-	-	-
	Jumlah Total	32.276	6.133	13.259	13.336	13.416

Sumber : Dinperdagkop UKM; BPS Kabupaten Pekalongan, 2021

Usaha Industri Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebanyak 13.416 usaha mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 62.681 orang dengan proporsi antara tenaga kerja pada usaha industri skala menengah sebanyak 8.047 orang, skala besar sebanyak 14.075 orang dan skala kecil sebanyak 40.559 orang. Tenaga kerja di usaha industri biasanya merupakan pekerja dibayar dan pekerja tidak dibayar. Tenaga kerja tak dibayar ini termasuk pemilik atau pengusaha itu sendiri dan pekerja keluarga. Pekerja anak dan pekerja lansia yang bekerja di usaha industri sebagian besar merupakan pekerja yang tidak dibayar yang biasanya merupakan pekerja keluarga yang sifatnya hanya membantu dalam kegiatan produksi suatu usaha.

Tenaga kerja Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka sebagian besar merupakan pekerja dibayar, selebihnya merupakan pekerja tidak dibayar. Sedangkan tenaga kerja Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan relatif lebih besar merupakan pekerja tidak dibayar.

Usaha Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan paling banyak menjadi pilihan tenaga kerja perempuan, karena selain membutuhkan keterampilan seorang wanita, usaha industri tersebut juga dapat menjadi pekerjaan sampingan dari mengurus rumah tangga. Tenaga kerja perempuan dalam usaha industri biasanya diasosiasikan dengan pekerjaan domestik di dalam rumah tangga, sedangkan tenaga kerja laki-laki diasosiasikan dengan tugas sebagai pencari nafkah utama di luar rumah. Secara rinci tenaga kerja menurut kelompok industri di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.128.
Jumlah Tenaga Kerja Menurut Kelompok Industri
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (orang)

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka					
	a. Skala Besar	12.075	-	14.075	14.075	14.075
	b. Skala Menengah	93.286	2.247	7.536	7.903	7.903
	c. Skala Kecil	42.431	304.436	26.484	26.662	26.784
	d. Skala Rmh Tangga	9.898	-	-	-	-
2	Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan					
	a. Skala Besar	-	-	-	-	-
	b. Skala Menengah	1.012	-	98	144	144
	c. Skala Kecil	6.022	2.188	13.561	13.665	13.775

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
	d. Skala Rmh Tangga	19.862	-	-	-	-
	Jumlah					
	a. Skala Besar (orang)	12.075	-	14.075	14.075	14.075
	b. Skala Menengah (orang)	94.298	2.247	7.634	8.047	8.047
	c. Skala Kecil (orang)	48.453	306.624	40.045	40.327	40.559
	d. Skala Rmh Tangga(orang)	29.760	-	-	-	-
	Jumlah Total (orang)	184.586	308.871	61.754	62.449	62.681

Sumber : Dinperidagkop UKM; BPS Kabupaten Pekalongan, 2021

Investasi usaha industri di Kabupaten Pekalongan dalam 3 tahun terakhir menunjukkan kenaikan, yaitu tahun 2017 sebesar Rp162.175.238,- dan tahun 2020 menjadi sebesar Rp. 1.008.043.725,-. Hal ini menjadi indikasi relatif lebih tingginya permintaan terhadap produk-produk usaha industri skala menengah dibandingkan usaha industri skala kecil. Kesulitan usaha industri skala kecil setelah bahan baku adalah modal. Modal merupakan pondasi penting dalam membangun dan mengembangkan sebuah usaha. Tidak hanya usaha industri skala besar dan skala menengah, usaha industri skala kecil juga memerlukan modal untuk mengembangkan usahanya. Secara rinci Jumlah Investasi Menurut Kelompok Industri Kabupaten Pekalongan tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.129.
Jumlah Investasi Menurut Kelompok Industri
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka					
	a. Skala Besar	348.544.360	-	348.544.360	348.544.360	348.544.360
	b. Skala Menengah	572.288.567	6.321.000	41.723.895	44.403.895	44.403.895
	c. Skala Kecil	97.740.768	147.310.028	525.667.183	536.096.183	536.096.183
	d. Skala Rmh Tangga	4.850.450	-	-	-	-
2	Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan					
	a. Skala Besar	-	-	-	-	-
	b. Skala Menengah	21.238.615	-	495.000	695.000	695.000
	c. Skala Kecil	19.730.912	14.865.210	76.743.837	76.997.337	77.531.787
	d. Skala Rmh Tangga	16.540.371	-	-	-	-
	Jumlah					
	a. Skala Besar (Rp)	348.544.360	-	348.544.360	348.544.360	348.544.360
	b. Skala Menengah (Rp)	593.527.182	6.321.000	42.218.895	45.098.895	45.098.895
	c. Skala Kecil (Rp)	118.471.680	155.854.238	602.411.020	613.093.520	614.400.470
	d. Skala rmh (Rp)	21.390.821	-	-	-	-
	Jumlah Total (Rp 000)	1.081.934.043	162.175.238	993.174.275	1.006.736.775	1.008.043.725

Sumber : Dinperidagkop UKM; BPS Kabupaten Pekalongan, 2021

Jumlah nilai produksi Usaha Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka dan Usaha Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan, skala menengah lebih tinggi dibandingkan skala kecil. Hal ini menjadi indikasi relatif tingginya produktivitas tenaga kerja usaha industri skala menengah dibandingkan skala kecil. Pendidikan/kapasitas SDM tenaga kerja merupakan sebuah investasi yang akan mendorong produktivitas tenaga kerja. Kesulitan yang dialami oleh usaha industri skala kecil yang cukup besar lainnya adalah pemasaran. Usaha industri skala kecil bukan hanya sekedar membuat atau memproduksi barang saja, tapi juga harus ada strategi pemasarannya agar banyak permintaan dan lancar produksinya. Secara rinci Jumlah Nilai Produksi Menurut Kelompok Industri Kabupaten Pekalongan tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.130.
Jumlah Nilai Produksi Menurut Kelompok Industri
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka					
	a. Skala Besar	1.303.538.100	-	1.303.538.100	1.303.538.100	1.303.538.100
	b. Skala Menengah	2.323.952.992	26.914.000	79.145.939	80.929.939	80.929.939
	c. Skala Kecil	697.840.201	20.371.678.856	1.077.761.066	1.079.749.616	1.080.932.716
	d. Skala Rmh Tangga	43.053.380	-	-	-	-
2.	Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan					
	a. Skala Besar	-	-	-	-	-
	b. Skala Menengah	35.006.621	-	2.224.000	2.784.000	2.784.000
	c. Skala Kecil	168.630.949	1.748.607.307	293.296.255	294.883.955	295.764.055
	d. Skala Rmh Tangga	49.094.947	-	-	-	-
	Jumlah					
	a. Skala Besar (Rp)	1.303.538.100	-	1.303.538.100	1.303.538.100	1.303.538.100
	b. Skala Menengah (Rp)	2.358.959.613	26.914.000	81.369.939	83.713.939	83.713.939
	c. Skala Kecil (Rp)	866.471.150	22.120.286.162	1.371.057.321	1.374.633.571	1.376.696.771
	d. Skala rmh (Rp)	92.148.327	-	-	-	-
	Jumlah Total (Rp 000)	4.621.117.190	22.147.200.162	2.755.965.360	2.761.885.610	2.763.948.810

Sumber : Dinperidagkop UKM Kabupaten Pekalongan, 2021

f. Transmigrasi

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 3 sub urusan yang menjadi kewenangan urusan Transmigrasi di Pemerintah Kabupaten/ Kota. Ketiga sub urusan tersebut adalah: 1) Perencanaan Kawasan Transmigrasi; 2) Pembangunan Kawasan Transmigrasi dan 3) Pengembangan Kawasan Transmigrasi. Dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 capaian kinerja urusan Transmigrasi diukur berdasarkan 3 indikator yang telah ditetapkan, yaitu : 1) Persentase pelaksanaan pengiriman calon transmigran ke lokasi transmigrasi; 2) Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi; 3) Jumlah calon transmigran.

Minat masyarakat dalam mengikuti program transmigrasi masih cukup tinggi, dengan harapan dapat mengubah hidup menjadi lebih baik. Akan tetapi jumlah kuota transmigran setiap daerah kuotanya ditentukan oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan Pemerintah Provinsi melalui APBD Provinsi yang nantinya oleh Provinsi kuota tersebut akan dibagi ke semua daerah. Pada tahun 2020 persentase pelaksanaan pengiriman calon transmigran ke lokasi transmigrasi tahun 2020 sebesar 0,00%, tidak ada pemberangkatan transmigrasi karena adanya pandemi COVID-19. Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK) tidak ada di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Sedangkan jumlah transmigran tahun 2019 yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi UPT Tanjung Buka SP-6 B Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebanyak 2 KK berjumlah 6 Jiwa. Namun demikian untuk penempatan transmigrasi berdasarkan alokasi target dari kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi sebanyak 2 KK.

Jumlah calon transmigran/animo ke lokasi transmigrasi tahun 2019-2020 sebanyak 12 Kepala Keluarga. Faktor penghambatnya adalah disebabkan masih banyak pilihan lain dalam meningkatkan taraf hidupnya selain transmigrasi, misal berdagang atau buruh serabutan serta adanya persepsi dan informasi yang salah tentang warga transmigrasi yang ditempatkan banyak yang mengalami kesulitan hidup baik dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun dalam pemasaran hasil pertanian/bercocok tanam di lokasi transmigrasi, dan adanya ketakutan timbulnya konflik antara warga lokal dengan para transmigran. Selengkapnya capaian kinerja urusan Transmigrasi tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131.
Indikator Capaian Pelayanan Urusan Transmigrasi
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pelaksanaan pengiriman calon transmigran ke lokasi transmigrasi (%)	40,00	50,00	40,00	100,00	0,00
2	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK)	2	2	2	2	0
3	Jumlah calon transmigran (KK)	2	4	5	12	12

Sumber: DPMPSTP dan NAKER Kab. Pekalongan, 2021

4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-program pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan harus sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah dan juga nasional.

Masalah yang dihadapi dalam penyusunan rencana pembangunan daerah adalah ketidak lengkapan data dan informasi yang akurat dan pilah gender. Data pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil penelitian belum cukup memadai mendukung perencanaan pembangunan yang ideal. Kelengkapan data dan informasi yang ada dirasakan kurang untuk mempertajam isu strategis, perhitungan dan prediksi perubahan lima atau sepuluh tahun mendatang, karena perubahan lingkungan strategis dan kebijakan nasional yang dinamis.

Pada indikator Persentase Penjabaran program yang ada dalam RPJMD ke dalam RKPD dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan peningkatan. Dilihat dari capaian tahun 2016 sebesar 85% meningkat menjadi 100% pada tahun 2020. Hal ini artinya program dalam RKPD telah mengaju dalam RPJMD Kabupaten Pekalongan. Adapun kesesuaian program dalam RKPD ke dalam APBD juga telah 100% hingga tahun 2020. Pada indikator Persentase kpencaapaian indikator pembangunan daerah telah menunjukka kinerja yang baik, dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2016 sebesar 50% meningkat menjadi 86,27% pada tahun 2020.

Secara rinci capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.132.
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Dokumen Perencanaan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	1	1	1	1	1
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	1	1	1	1	1

No	Dokumen Perencanaan	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	2	2	2	2	2
4.	Persentase Penjabaran program yang ada dalam RPJMD ke dalam RKPD (%)	85,00	90,29	100,00	100,00	100,00
5.	Persentase kesesuaian Program dalam RKPD ke dalam APBD (%)	60,00	80,00	100,00	100,00	100,00
6.	Persentase pencapaian indikator pembangunan daerah (%)	50,00	68,00	75,23	80,30	86,27

Sumber : Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2021

b. Keuangan

Kinerja terkait pengelolaan keuangan daerah tergambar dari Opini BPK terhadap laporan keuangan dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan Kabupaten Pekalongan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Opini WTP ini diperoleh Kabupaten Pekalongan sejak tahun 2016 hingga 2020 secara berturut-turut. Kinerja tersebut didukung ketepatan waktu penetapan APBD yang selalu tepat waktu, dan ketepatan waktu perangkat daerah menyerahkan laporan keuangan yang selalu tepat waktu. Kinerja pelayanan bidang keuangan terlihat dari rasio PAD terhadap total penerimaan daerah tahun 2020 sebesar 16,24% lebih besar dari tahun 2019 sebesar 15,85%. Kemudian jumlah barang aset Daerah dari 3.063.289 unit di tahun 2016 menjadi 4.371.887 unit di tahun 2020. Hal ini diikuti dengan nilai aset daerah yang mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar Rp. 2,74 trilyun naik menjadi Rp 4,11 trilyun di tahun 2020.

Secara rinci kinerja terkait keuangan daerah selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.133.
Capaian Pelayanan Bidang Keuangan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah	14,79	15,30	15,30	15,85	16,24
2	Obyek Tahun Pemeriksaan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Jumlah barang (unit)	3.063.289	3.807.028	4.479.648	4.181.508	4.371.887
4	Jumlah Harga (Rp. juta)	2.747.401	3.123.972	3.578.285	3.856.412	4.114.828

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2021

c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Urusan penunjang kepegawaian, pendidikan dan diklat menyelenggarakan pengembangan karier ASN dan peningkatan kompetensi ASN. Jumlah ASN Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu 2016-2020 mengalami penurunan. Penurunan ASN mengakibatkan adanya peningkatan beban kerja ASN karena ASN yang menjalani masa pensiun tida segera

mendapatkan gantinya. Urusan penunjang kepegawaian mengurus rekrutimen ASN, penempatan ASN, mutasi ASN, kenaikan pangkat ASN, sampai dengan pemberhentian ASN.

Penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan; pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan; pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan; pelaksanaan fungsi kesekretariatan badan; pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kepegawaian dan Pendidikan dan Pelatihan mencakup pelayanan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN. Data kepegawawaian secara rinci terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.134.
Nominatif Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kabupaten Pekalongan Berdasarkan Pendidikan
Per 31 Desember 2020

No	Pendidikan	CPNS		PNS		2019	2020
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan		
1	SD	0	0	44	6	59	50
2	SMP	0	0	145	9	187	154
3	SMA/SMK	0	0	1069	303	1.500	1372
4	D1/D2/D3	0	0	331	882	1.361	1213
5	D4/S1	0	0	2159	2792	5.111	4951
6	S2	0	0	256	117	349	373
Jumlah Total						8.567	8.113

Sumber : BKD Kabupaten Pekalongan, 2021

d. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan daerah pada Pasal 209 menjadi bagian dari fungsi penunjang Urusan Pemerintahan. Penelitian dan pengembangan memiliki peran penting untuk mengembangkan, memperluas, dan menggali lebih dalam sebuah teori yang dimiliki oleh ilmu tertentu. Bagi pemerintahan daerah, penelitian dan pengembangan itu sendiri hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar perencanaan (*planning by research*), fungsi formulasi kebijakan (*formulating policy*), dan fungsi kontrol (*controlling*).

Secara khusus, penelitian dan pengembangan yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah memiliki fungsi dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem yang mewadahi proses interaksi antara komponen penguatan sistem inovasi. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dan telah ditindaklanjuti Pemerintah Jawa Tengah melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan regulasi dalam pengembangan inovasi di daerah.

Implementasi terhadap penelitian dan pengembangan di Kabupaten Pekalongan dilihat berdasarkan hasil kreatifitas masyarakat dan berbagai riset yang dimenangkan. Hasil-hasil kreatif dimasyarakat di Kabupaten Pekalongan untuk saat ini sudah semakin berkembang. Tahun 2020,

masyarakat yang mendapatkan penghargaan jumlahnya sudah mencapai 6 orang, baik dari sisi pemenang krenova maupun dari kategori pemenang riset. Kondisi tersebut lebih banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya 6 orang. Kondisi ini menunjukkan ide dan kreasi masyarakat terhadap penemuan atau karya di bidang IPTEK.

Tabel 2.135.
Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pemenang Krenova (orang)	3	3	3	6	6
2.	Jumlah Pemenang Riset Daerah (orang)	3	3	3	6	5

Sumber : Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2021

e. Pengawasan

Salah satu unsur dalam rangka menuju sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah adanya sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, baik yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi, berabagai program dan kegiatan pembangunan kemasayarakatan maupun kegiatan lainnya dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah. Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Pekalongan antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Pekalongan.

Implementasi atas pelaksanaan pengawasan secara umum ditunjukkan dengan banyaknya temuan yang dihasilkan dari lembaga-lembaga pengawasan tersebut di atas. Berbagai temuan ini disampaikan kepada pemerintah daerah, baik yang sifatnya hanya rekomendasi maupun kondisi dan situasi yang harus ditindaklanjuti dengan perbaikan atau penyesuaian. Mendasarkan pada hasil temuan pada tahun 2019, pemerintah Kabupaten Pekalongan mampu menindaklanjuti hasil temuan BPK dengan baik dibandingkan dengan pelaksanaan tindaklanjut pada tahun-tahun sebelumnya. Namun untuk hasil temuan yang ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Pekalongan implementasinya tidak seefektif terhadap tindaklanjut temuan dari BPK. Tindaklanjut temuan inspektorat baik provinsi maupun kabupaten cenderung efektivitasnya menurun ditahun 2019. Dalam hal ini, kepatuhan untuk menindaklanjuti hasil temuan lebih besar pada temuan BPK dibandingkan pada hasil temuan inspektorat.

Di sisi lain, hasil pengawasan memiliki fungsi memberikan umpan balik untuk perbaikan-perbaikan perencanaan dan pelaksanaan serta memberikan jaminan kualitas (*Quality Insurence*) agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat tercapai secara efisien, efektif dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dari sisi manajerial, pengawasan ini akan memberikan motivasi untuk melakukan perbaikan terhadap kinerja-kinerja yang tidak memuhi target maupun tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Berbagai hasil temuan atas kegiatan pengawasan diharapkan menjadi perhatian bagi penyelenggara pemerintahan di daerah, sehingga dapat mendorong pada perwujudan penyelenggaraan pemerintah yang lebih akuntabel.

Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik. Sistem pengendalian ini pencapaian keberhasilannya dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP di Kabupaten Pekalongan sampai pada tahun 2020 masih ada pada level 3 atau tahap terdefinisi di mana kondisi tersebut kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal sudah diimplementasikan namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Ke depan masih perlu pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas maturitas SPIP pada level yang lebih baik lagi.

Capaian indikator pengawasan di Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat melalui indikator yang tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2.136.
Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi Pengawasan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3
2.	Hasil Temuan yang ditindaklanjuti					
	a. BPK	91,84	88,19	89,17	93,00	94,22
	b. Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	95,38	94,50	100,00	96,00	100,00
	c. Inspektorat Kabupaten Pekalongan	86,34	96,00	96,57	91,01	98,63

Sumber : Inspektorat Kab. Pekalongan, 2021

f. Pemerintahan Umum

Pemerintahan umum di daerah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bupati sebagai kepala pemerintahan ditingkat kabupaten. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum lebih banyak pada pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan mengarah pada pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan, dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pada kegiatan koordinasi dilakukan pada pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di daerah dan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Pekalongan yang dapat terlaksana dengan baik. Indikator kinerja pada pemerintahan umum meliputi Capaian Predikat SAKIP, Capaian Nilai SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi dan Kategori.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dijadikan sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilihat dari sisi kerjanya masih berada diangka 64,02, artinya masih berada pada peringkat B, lebih baik dibanding tahun 2019 yang mendapat

predikat “B” dengan nilai 63,51. Penilaian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Pekalongan sudah menunjukkan hasil baik, namun masih memerlukan perbaikan.

Secara keseluruhan, ukuran capaian kinerja pada urusan pemerintahan umum di Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.137.
Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi Pemerintahan Umum Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Capaian Predikat SAKIP	CC	CC	B	B	B
2.	Capaian Nilai SAKIP	55,70	58,72	60,52	63,51	64,02
3.	Indeks Reformasi Birokrasi	-	53,75	60,53	64,24	64,60
4.	Kategori	-	CC	B	B	B

Sumber : Bagian Organisasi Setda, 2021

D. Aspek Daya Saing

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kemampuan ekonomi Daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah bahwa kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Aspek daya saing daerah terdiri kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pekalongan menurut Pengeluaran

Tidak jauh berbeda dengan kondisi perekonomian global dan nasional, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan juga mengalami kontraksi sebagai akibat pandemi COVID-19. Penyebaran COVID-19 di Kabupaten Pekalongan selama tahun 2020 berada di zona merah. Kondisi ini tentu membawa kebijakan daerah untuk melakukan PSBB sepanjang tahun 2020 dan awal 2021. Kebijakan PSBB dari dalam maupun pengaruh PSBB dari luar, sangat berdampak pada ekonomi Kabupaten Pekalongan. Secara global kontraksi ekonomi Kabupaten Pekalongan lebih baik. Dengan posisi masih di bawah Jawa Tengah.

Perekonomian Kabupaten Pekalongan mengalami kontraksi dampak dari pandemi covid-19 pada tahun 2020, dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan ekonomi negative yaitu sebesar -1,89 persen. Kondisi yang sama dengan Jawa Tengah secara umum juga mengalami pertumbuhan ekonomi negatif yaitu sebesar -2,65 persen di tahun 2020. Kontraksi ekonomi yang terjadi secara umum merupakan dampak massif dari pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020. Sebagian besar komponen dari PDRB

Pengeluaran mengalami pertumbuhan negatif jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya. Selengkapnya gambaran perekonomian melalui Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut pengeluaran sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.138.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pekalongan
Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No.	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14.447.972,52	15.432.326,22	16.323.146,45	17.322.221,08	17.294.590
a.	Makanan, Minuman selain Restoran	6.038.795,59	6.358.542,83	6.698.135,27	7.041.405,74	-
b.	Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	765.789,17	806.412,62	845.607,25	883.808,42	-
c.	Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1.633.713,44	1.736.386,16	1.825.178,97	1.906.071,64	-
d.	Kesehatan dan Pendidikan	979.085,26	1.049.563,24	1.130.847,98	1.210.664,52	-
e.	Transportasi dan Komunikasi	3.223.007,27	3.523.560,55	3.689.707,28	3.946.062,29	-
f.	Restoran dan Hotel	1.538.693,28	1.670.839,23	1.825.017,15	2.011.139,50	-
g.	Lainnya	268.888,51	287.021,59	308.652,55	323.068,97	-
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	290.563,83	311.659,78	346.570,53	393.333,58	390.400
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.659.470,8	1.715.309,04	1.797.038,66	1.877.491,34	1.791.440
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.912.453,79	4.466.792,57	5.174.333,00	5.621.641,33	5.237.970
a.	Bangunan	3.020.144,05	3.470.127,93	3.935.114,62	4.268.243,57	-
b.	Non Bangunan	892.309,74	996.664,64	1.239.218,38	1.353.397,76	-
5.	Perubahan Inventori	251.124,51	276.081,00	374.411,37	391.106,00	406.180
6.	Net Ekspor	-2.305.289,81	-2.492.942,91	-2.701.188,10	-2.748.729,73	-2.317.380
	PDRB	18.256.295,67	19.709.225,70	21.314.311,91	22.857.063,60	22.803.190

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2021 *Angka Sementara **Angka Sangat Sementara

Dari tabel diatas, Nilai PDRB Kabupaten Pekalongan ADHB selama periode tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan, sedangkan tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan nilai tersebut sebagian besar adalah dampak langsung dari pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020. Di sisi lain pengaruh adanya perubahan harga dan juga perubahan volume mengalami kesulitan produksi hingga pemasaran. Nilai konsumsi rumah tangga dengan nilai yang paling besar tersebut menggambarkan bahwa struktur perekonomian ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Dari struktur ekonomi di Kabupaten Pekalongan, investasi sebuah barang modal memiliki peranan yang sangat penting. Hal tersebut tercermin dalam nilai PMTB yang merupakan nilai terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga. Sama halnya dengan konsumsi rumah tangga, dampak dari kesulitan bahan baku dan kurangnya permintaan juga merupakan salah satu penyebab turunnya nilai PMTB dari tahun sebelumnya. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dan Pemerintah pun tidak luput dari pandemi global COVID-19, dengan turunnya nilai PDRB menurut Pengeluaran tahun 2020.

Kemudian gambaran perekonomian PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 (ADHK 2010) menurut pengeluaran Tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.139.
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Juta Rupiah)

No.	Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	10.891.643,30	11.323.082,70	11.719.193,61	12.188.235,41	12.011.210
a.	Makanan,Minuman selain Restoran	4.218.171,08	4.340.700,66	4.455.341,38	4.606.187,98	-
b.	Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	699.215,23	731.524,03	758.089,64	782.131,35	-
c.	Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	1.232.663,0	1.266.616,18	1.311.800,48	1.340.191,29	-
d.	Kesehatan dan Pendidikan	772.754,69	802.048,78	834.104,43	868.312,60	-
e.	Transportasi dan Komunikasi	2.641.919,35	2.773.703,01	2.865.784,37	2.992.421,60	-
f.	Restoran dan Hotel	1.109.953,41	1.181.454,24	1.258.042,22	1.355.532,09	-
g.	Lainnya	216.966,46	227.035,80	236.031,09	243.458,50	-
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	206.616,71	217.154,16	235.003,69	257.119,98	250.770
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.154.193,0	1.155.229,79	1.188.753,47	1.231.375,06	1.181.180
4.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.946.502,32	3.292.108,83	3.665.358,45	3.838.479,61	3.566.120
a.	Bangunan	2.270.817,12	2.558.450,78	2.804.250,15	2.943.616,26	-
b.	Non Bangunan	675.685,20	733.658,05	861.108,30	894.863,35	-
5.	Perubahan Inventori	240.184,14	233.860,85	217.139,06	235.358,13	373.210
6.	Net Ekspor	-1.517.487,73	-1.542.307,61	-1.500.397,34	-1.394.217,20	-1.334.970
	PDRB	13.921.651,83	14.679.128,72	15.525.050,94	16.356.350,99	16.047.510

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2021 *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel diatas, sama halnya dengan nilai PDRB ADHB, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK Konstan 2010 juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2016-2020, sedangkan yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif pada tahun 2020.

Selanjutnya Persentase Distribusi PDRB Kabupaten Pekalongan Menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 2.140.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Pekalongan Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Tahun 2016-2020 (Persen)

No.	Komponen Pengeluaran	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
1.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	79,14	78,24	78,30	77,14	76,58	75,49	75,78	74,52	75,84	74,85
a.	Makanan,Minuman selain Restoran	33,08	30,30	32,26	29,57	31,43	28,70	30,81	28,16	-	-
b.	Pakaian, Alas Kaki dan Jasa Perawatannya	4,19	5,02	4,09	4,98	3,97	4,88	3,87	4,78	-	-
c.	Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga	8,95	8,85	8,81	8,63	8,56	8,45	8,34	8,19	-	-
d.	Kesehatan dan Pendidikan	5,36	5,55	5,33	5,46	5,31	5,37	5,30	5,31	-	-
e.	Transportasi dan Komunikasi	17,65	18,98	17,88	18,90	17,31	18,46	17,26	18,30	-	-
f.	Restoran dan Hotel	8,43	7,97	8,48	8,05	8,56	8,10	8,80	8,29	-	-
g.	Lainnya	1,47	1,56	1,46	1,55	1,45	1,52	1,41	1,49	-	-
2.	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,59	1,48	1,58	1,48	1,63	1,51	1,72	1,57	1,71	1,56
3.	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	9,09	8,29	8,70	7,87	8,43	7,66	8,21	7,53	7,86	7,36
4.	Pembentukan Modal	21,43	21,16	22,66	22,43	24,28	23,61	24,59	23,47	22,97	22,22

No.	Komponen Pengeluaran	2016		2017		2018		2019*		2020**	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
	Tetap Bruto										
a.	Bangunan	16,54	16,31	17,61	17,43	18,46	18,06	18,67	18,00	-	-
b.	Non Bangunan	4,89	4,85	5,06	5,00	5,81	5,55	5,92	5,47	-	-
5.	Perubahan Inventori	1,38	1,73	1,40	1,59	1,76	1,40	1,71	1,44	1,78	2,33
6.	Net Ekspor	-12,63	-10,90	-12,65	-10,51	-12,67	-9,66	-12,03	-8,52	-10,16	-8,32
	PDRB	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2021 *)Angka Sementara **)Angka Sangat Sementara

Dari Tabel di atas, distribusi produk yang dikonsumsi di Kabupaten Pekalongan sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (lebih dari 75 persen), walaupun proporsi pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut terhadap PDRB cenderung menurun. Tahun 2016 proporsinya merupakan yang paling tinggi yaitu 79,14 persen, kemudian berangsur berkurang hingga tahun 2019 dengan proporsi 75,78 persen dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2020 sebesar 75,84 persen. Penurunan proporsi ini dikarenakan laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga tidak secepat pertumbuhan komponen lainnya.

Ekspor dan Impor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sebagian produk Kabupaten Pekalongan diperdagangkan ke luar daerah, baik ke luar negeri maupun ke Kabupaten/Kota lain dalam satu provinsi ataupun ke provinsi lain di Indonesia. Namun, impor yang terjadi lebih besar dari ekspor, sehingga sebagian besar permintaan produk untuk kebutuhan Kabupaten Pekalongan masih harus dipenuhi dari impor. Pada tahun 2016-2020 perdagangan Kabupaten Pekalongan yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa arus barang yang dijual keluar wilayah selalu lebih rendah dari arus barang yang dibeli, yang berarti bahwa perdagangan Kabupaten Pekalongan selalu menunjukkan posisi “defisit”. Hal ini dapat dilihat dari nilai net ekspor yang bernilai negatif. Persentase distribusi selanjutnya adalah pengeluaran untuk kapital (PMTB), yaitu mencapai sekitar 21-24 persen, hal ini menunjukkan bahwa lebih dari seperlima perekonomian ditunjang untuk barang modal. Untuk distribusi pada konsumsi akhir pemerintah pada PDRB, ada pada rentang 7-9 persen, hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam struktur perekonomian masih tidak terlalu besar.

Agregat makro lain yang dapat diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau lebih dikenal dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), yang menggambarkan kinerja pembangunan di bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan dari tahun 2016-2020 secara rata-rata mencapai 3,97 persen, dengan masing-masing pertumbuhan sebesar 5,19 persen (2016); 5,44 persen (2017); 5,76 persen (2018) dan 5,35 persen (2019) dan kontraksi sebesar -1,89 persen (2020). Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2018 yakni sebesar 5,76 persen, sebaliknya yang terendah terjadi pada tahun 2020 (kontraksi -1,89 persen) sebagai dampak pandemi COVID-19.

b. Konsumsi dan Pengeluaran

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata

sebulan. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk

a) Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Makanan

Pada tahun 2020, Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Makanan penduduk Kabupaten Pekalongan mencapai Rp. 523.869,00 lebih besar dari tahun 2019 sebesar Rp. 469.830,00. Dari total pengeluaran makanan, sebesar 40,65% digunakan untuk konsumsi makanan dan minuman jadi. Pengeluaran konsumsi makanan yang relatif besar lainnya adalah konsumsi rokok dan padi-padian masing-masing sebesar 11,62% dan 10,31% dari total pengeluaran konsumsi makanan. Sedangkan pengeluaran konsumsi makanan yang paling sedikit adalah konsumsi umbi-umbian yaitu 0,55%. Secara rinci persentase rata-rata pengeluaran per kapita kelompok makanan penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.141.
Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Makanan Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Kelompok Barang	2016	2017	2018	2019	2020
A	Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Makanan (Rupiah)	349.696	420.338	478.113	469.830	523.869
B	Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita (%)					
1	Padi-padian	14,30	11,47	10,11	9,83	10,31
2	Umbi-umbian	0,55	0,52	0,59	0,48	0,55
3	Ikan/udang/cumi/kerang	3,20	3,49	3,33	4,40	4,76
4	Daging	2,95	3,61	4,03	3,61	3,41
5	Telur dan Susu	5,41	4,56	4,45	5,56	5,38
6	Sayur-sayuran	6,75	7,03	7,53	5,51	6,50
7	Kacang-kacangan	3,27	2,44	2,19	2,34	2,37
8	Buah-buahan	4,06	3,67	3,48	4,70	4,28
9	Minyak dan lemak	2,45	2,47	2,46	2,07	2,08
10	Bahan minuman	3,98	3,90	4,04	3,61	3,63
11	Bumbu-bumbuan	2,33	2,15	2,15	2,04	2,20
12	Konsumsi lainnya	1,90	2,08	2,27	1,90	2,25
13	Makanan dan minuman jadi	36,20	40,56	41,28	43,52	40,65
14	Rokok dan tembakau	12,65	12,05	12,10	10,43	11,62
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2021

b) Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan

Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan Kabupaten Pekalongan tahun 2020 menunjukkan angka yang relatif besar dimana rata-rata pengeluaran untuk non makanan mencapai Rp. 452.112,00 lebih besar dari tahun 2019 sebesar Rp. 407.691,00. Secara rinci persentase rata-rata pengeluaran per kapita kelompok bukan makanan penduduk Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.142.
Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan Penduduk Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Kelompok Barang	2016	2017	2018	2019	2020
A.	Rata-rata Konsumsi Perkapita Sebulan menurut Kelompok Bukan Makanan (Rupiah)	301.655	335.680	456.696	407.691	452.112

No.	Kelompok Barang	2016	2017	2018	2019	2020
B.	Persentase Rata-Rata Pengeluaran per Kapita (%)					
1.	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	47,83	44,44	47,22	42,26	45,32
2.	Aneka barang dan jasa	26,40	23,24	18,17	24,16	24,21
3.	Pakaian, alas kaki dan tutup kepala	7,31	7,93	7,51	6,74	6,68
4.	Barang tahan lama	10,21	12,02	12,94	16,77	8,84
5.	Pajak, pungutan dan asuransi	3,51	5,79	6,69	5,58	6,13
6.	Keperluan pesta dan upacara/kenduri	4,74	6,59	7,49	4,50	8,82
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Pekalongan, 2021

2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Salah satu aspek yang mendukung daya saing Daerah adalah keberadaan infrastruktur perhubungan, yang akan memudahkan akses distribusi barang dan jasa. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. **Aksesibilitas Wilayah**, Kabupaten Pekalongan berbatasan dengan Laut Jawa dan Kota Pekalongan di utara, Kabupaten Batang di timur, Kabupaten Banjarnegara di selatan, serta Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Purbalingga di barat. Kabupaten Pekalongan berada di jalur pantura yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya.
- b. **Perhubungan Darat** di Kabupaten Pekalongan, sampai dengan tahun 2020 didukung dengan 5 buah Terminal Tipe C yang dikelola Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan 1 buah terminal yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, 25 perusahaan angkutan penumpang beserta 571 armadanya dan 76 perusahaan angkutan barang beserta 3.531 armadanya sangat mendukung perekonomian daerah;
- c. **Prasarana jalan**, berdasarkan status jalan Kabupaten Pekalongan di tahun 2020 mempunyai 9,20 km Jalan Nasional, 86,39 km jalan provinsi dan 669,90 km jalan kabupaten. Jumlah jalan yang kondisi baik di tahun 2020 sebesar 514,548 km dan jalan kondisi sedang sebesar 113,288 km (93,72%) naik di dibandingkan kondisi jalan baik di tahun 2019 sebesar 493,376 km dan jalan kondisi sedang sebesar 125,781 km (92,43%) dari jumlah seluruh panjang jalan Kabupaten Pekalongan sebesar 669,895 km. Hal ini menunjukkan pembangunan infrastruktur jalan mendapat perhatian yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.143.

Panjang Jalan Kabupaten Pekalongan dan Tingkat Kewenangan Pemerintahan Tahun 2018-2020

Tahun	Kewenangan (Km)			Jumlah Total
	Negara	Provinsi	Kab/Kota	
2018	9,20	86,37	669,90	765,47
2019	9,20	86,39	669,90	765,49
2020	9,20	86,39	669,90	765,49

Sumber : DPU Taru Kab. Pekalongan, 2021

- d. Adanya pelaksanaan program pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan di Kabupaten Pekalongan difokuskan untuk mendukung program nasional pembangunan jalan tol trans Jawa. Jalan Tol Trans Jawa adalah jaringan jalan tol antar kota-kota di pulau Jawa dengan tujuan utama

menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya melalui jalan tol. Semua jalan tol di pulau Jawa merupakan bagian dari Trans- Jawa, namun pemerintah memprioritaskan 9 (sembilan) ruas jalan tol Cikampek – Surabaya sepanjang 617 KM. Kesembilan ruas jalan tol tersebut disebut Ruas Prioritas Jalan Tol Trans Jawa (RPUT) yang terdiri atas:

- 1) Ruas Tol Cikampek – Palimanan sepanjang 117 Km
- 2) Ruas Tol Pejagan – Pemalang sepanjang 58 Km
- 3) Ruas Tol Pemalang – Batang sepanjang 29 Km
- 4) Ruas Tol Batang – Semarang sepanjang 75 Km
- 5) Ruas Tol Semarang – Solo sepanjang 72 Km
- 6) Ruas Tol Solo – Ngawi sepanjang 90 Km
- 7) Ruas Tol Ngawi – Kertosono sepanjang 87 Km
- 8) Ruas Tol Mojokerto – Kertosono sepanjang 41 Km
- 9) Ruas Tol Surabaya – Mojokerto sepanjang 36 Km

Hal ini didukung pula adanya exit toll di Kecamatan Bojong sehingga mempermudah aksesibilitas menuju ibukota Kabupaten Pekalongan di Kecamatan Kajen maupun wilayah lainnya



Gambar 2.72. Jaringan Jalan Tol Trans Jawa yang Melewati Wilayah Kabupaten Pekalongan



Gambar 2.73. Exit Tol Bojong Kabupaten Pekalongan Pekalongan

3. Fokus Iklim Berinvestasi

Daya tarik investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi faktor-faktor seperti tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan dan regulasi perbankan, sebagai infrastruktur dasar yang berpengaruh terhadap kegiatan investasi. Iklim investasi juga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang mendorong berkembangnya investasi antara lain kondisi keamanan dan ketertiban Daerah serta kemudahan proses perizinan.

a. Keamanan dan Ketertiban

Untuk membantu menciptakan keamanan dan ketertiban di masyarakat, diperlukan partisipasi masyarakat yang terhimpun dalam organisasi Perlindungan Masyarakat (LINMAS) atau dulu dikenal Pertahanan Sipil (Hansip) disamping peran dari aparat TNI dan POLRI.

b. Kemudahan Perizinan

Proses perizinan dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perizinan satu pintu, melalui **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan**. Penyelesaian ijin usaha bagi investor dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan publik dengan konsep **Mall Pelayanan Publik (MPP)**

Melalui kebijakan Daerah dibidang pelayanan perizinan terpadu yang memberikan kemudahan dalam mengurus perizinan didukung kondisi keamanan yang kondusif, infrastruktur, dan promosi investasi maka akan berdampak pada meningkatnya investor yang menanamkan modalnya di Kabupaten Pekalongan dan pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan daya serap tenaga kerja.

c. Pengenaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kewenangan dan jenis pajak yang dipungut Pemerintah Daerah ada sebelas jenis, yaitu Pajak Hotel; Pajak Restoran; Pajak Hiburan; Pajak Reklame; Pajak Penerangan Jalan; Pajak Parkir; Pajak Air Tanah; Pajak Sarang Burung Walet; Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2); serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang semula dipungut oleh Pemerintah Pusat.

Terkait dengan hal tersebut diatas Pemerintah Daerah telah menyusun Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, sesuai dengan Perda tersebut maka mulai tanggal 1 Januari 2011 pemungutan BPHTB dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, sedangkan PBB-P2 dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2013 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

Merujuk pada aturan tersebut bagi investor yang akan menanamkan modal di Daerah, hal tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan selain faktor-faktor kemudahan lain seperti keamanan ketertiban, kemudahan perizinan dan pengenaan pajak.

4. Fokus Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan Daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai

ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing Daerah dan perkembangan investasi di Daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing Daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

a. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan S1, S2 dan S3. Hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.144.
Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

Tahun	Tidak mempunyai ijazah	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (%)				Total
		SD/MI/Paket A	SMP/MTS / Paket B	SMA/SMK/MA/Paket C	Diploma/ Universitas	
2016	23,80	46,05	15,10	10,71	4,34	100,00
2017	26,51	36,26	20,88	12,43	3,92	100,00
2018	26,84	33,73	22,50	12,75	4,18	100,00
2019	19,71	36,03	23,59	15,12	5,55	100,00
2020	19,68	34,34	22,63	18,70	4,65	100,00
Rata-Rata	23,31	37,28	20,94	13,94	4,53	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021

Dari tabel di atas, persentase penduduk umur 15 Tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kabupaten Pekalongan sepanjang tahun 2016-2020 rata-rata didominasi lulusan SD/MI sebanyak 37,28%, Tidak mempunyai ijazah sebesar 23,31%, SMP/MTS/Paket B sebesar 20,94%, SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 13,94% dan lulusan diploma/universitas sebesar 4,53%.

b. Angka Kriminalitas

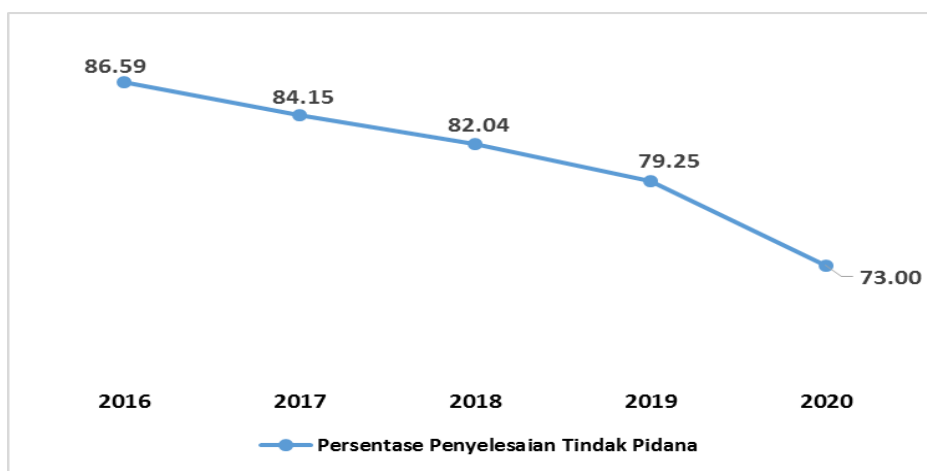
Jumlah Tindak Pidana (*crime total*) di Tahun 2020 sebanyak 222 kasus dengan tingkat penyelesaian 73,00%, sedikit menurun dari Tahun 2019 sebesar 188 kasus dengan tingkat penyelesaian 79,25%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.145.
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		
		Lapor	Selesai	% Selesai
1.	2016	179	155	86.59
2.	2017	246	207	84.15
3.	2018	206	169	82,04

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		
		Lapor	Selesai	% Selesai
4.	2019	188	149	79,25
5.	2020	222	162	73,00

Sumber : Polres Pekalongan, 2021



Gambar 2.74. Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

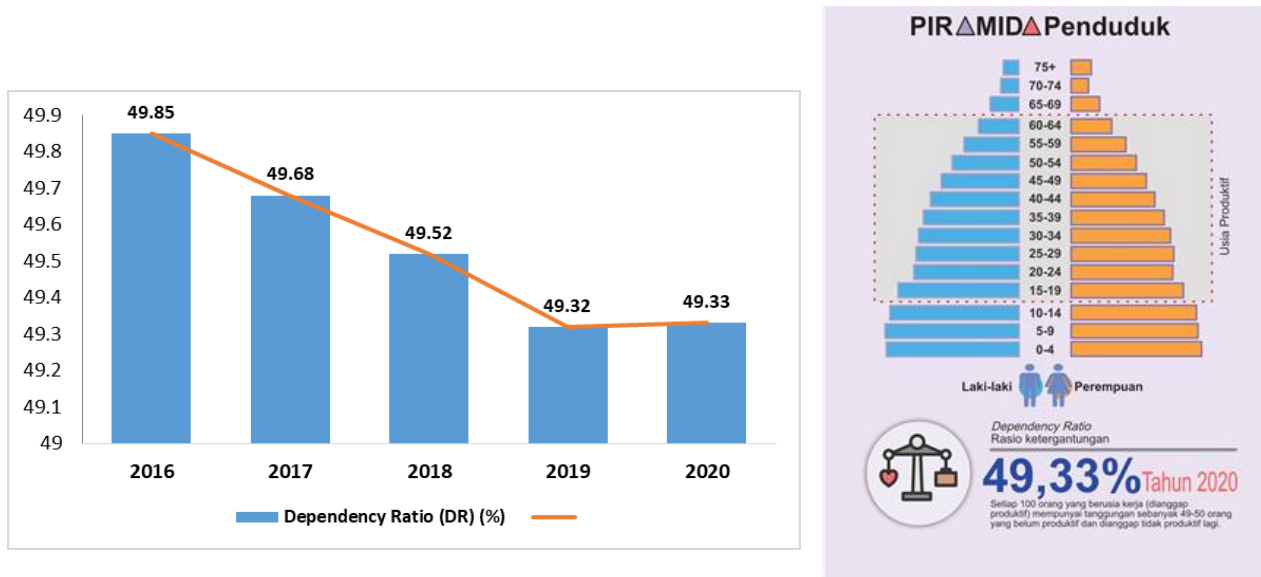
c. Rasio Ketergantungan

Perubahan struktur penduduk menurut umur mempengaruhi besarnya angka rasio ketergantungan. Angka rasio ketergantungan adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) dengan penduduk usia tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) dan penduduk yang belum produktif (0-14 tahun). Tingkat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya rasio ketergantungan. Semakin tinggi rasio ketergantungan, beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif akan semakin besar. Hal ini diakibatkan hambatan atas upaya perkembangan daerah akan semakin besar pula. Rasio ketergantungan Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dilihat dalam tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.146. Rasio Ketergantungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Tahun	Usia Bukan Produktif		Usia Produktif	Dependency Ratio (DR) (%)
		0-14 th	>65 th	15-64 th	
1.	2016	237.893	54.897	587.302	49,85
2.	2017	236.880	56.974	592.343	49,68
3.	2018	235.920	59.247	596.725	49,52
4.	2019	235.470	61.044	601.197	49,32
5.	2020	251.797	68.205	648.819	49,33

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021



Gambar 2.75. Rasio Ketergantungan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

Dari tabel dan gambar diatas, dapat dijelaskan bahwa, persentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) terus meningkat. Proporsi penduduk usia produktif sebesar 69,82 persen dari total populasi di tahun 2020. Peningkatan tersebut menjadikan rasio ketergantungan menjadi semakin rendah. Pada tahun 2020, tercatat bahwa setiap 100 penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun) hanya menanggung sekitar **49-50** penduduk usia belum produktif (penduduk usia 0-14 tahun) dan penduduk yang dianggap sudah tidak produktif (65 tahun ke atas). Kabupaten Pekalongan tengah menghadapi periode bonus demografi karena **66,97 persen penduduknya berada pada usia produktif**.

Kesempatan ini perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Proyeksi Penduduk 2010-2035 (BPS,Bappenas,UNFPA,2013), Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota di Jawa Tengah mempunyai waktu/peluang bonus demografi yang relatif lebih pendek. Rasio ketergantungan mencapai dibawah 50,00; pada tahun 2015 sebesar 46,50%, menurun Tahun 2020 sebesar 45,40%, titik terendah Tahun 2025 sebesar 45,30%, tetapi tahun 2030 diperkirakan meningkat menjadi 48,30%, bahkan pada tahun 2035 dapat meningkat menjadi 51,70%. Artinya peluang bonus demografi hanya terjadi pada tahun 2015- 2030. Peluang singkat ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin melalui kerja keras semua pihak.

Generasi Z bersama milenial akan menjadi aktor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam bonus demografi. Struktur penduduk dapat menjadi salah satu modal pembangunan ketika jumlah penduduk usia produktif sangat besar. Hasil SP2020 mencatat mayoritas penduduk Kabupaten Pekalongan didominasi oleh *Generasi Z (5-25 tahun)*, *Generasi Y/Milenial (26-40 tahun)*, dan *Generasi X (41-55 tahun)*. Generasi ini sebagian besar termasuk dalam usia produktif yang dapat menjadi peluang untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dari sisi demografi, seluruh Generasi X dan Generasi Milenial merupakan penduduk yang berada pada kelompok usia produktif pada tahun 2020. Sedangkan sebagian dari Generasi Z masih berada di kelompok penduduk usia belum produktif. Sekitar tujuh tahun lagi, seluruh Generasi Z akan berada pada kelompok penduduk usia produktif. Hal ini merupakan peluang dan

tantangan bagi Kabupaten Pekalongan, baik di masa sekarang maupun masa depan, karena generasi inilah yang berpotensi menjadi aktor dalam pembangunan yang akan menentukan masa depan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.147.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Generasi dan Jenis Kelamin Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

Kelompok Umur Generasi	Laki - Laki	Perempuan	Total
Post Generasi Z	64.884	61.767	126.651
Generasi Z	130.016	122.579	252.595
Milenial	135.187	125.532	260.719
Generasi X	97.963	98.039	196.002
Boomer	57.621	60.457	118.078
Pre Boomer	5.936	8.840	14.776
Total	491.607	477.214	968.821

Sumber : Hasil Sensus Penduduk 2020 -BPS Kabupaten Pekalongan



Gambar 2.76. Generasi Penduduk berdasarkan kelompok umur

E. Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021

Capaian indikator kinerja memuat bidang urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terbagi menjadi 6 urusan wajib pelayanan dasar, 18 urusan wajib non pelayanan dasar, 6 urusan pilihan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan umum.

Capaian tersebut dikelompokkan menjadi 5 kategori sebagai berikut :

- ⬆️ : Apabila realisasi capaian indikator TW IV Tahun 2020 \geq target akhir RPJMD 2016-2021
- ⬆️ : Apabila realisasi capaian indikator TW IV tahun 2020 $>$ target RKPD tahun 2020
- : Apabila realisasi capaian indikator TW IV Tahun 2020 sama dengan target RKPD 2020
- : Apabila realisasi capaian indikator TW IV Tahun 2020 dalam interval $65 \leq$ sampai dengan $< 100\%$ terhadap target RKPD 2020
- ⬇️ : Apabila realisasi capaian indikator pada TW IV tahun 2020 kurang dari $\leq 65\%$ terhadap target RKPD 2020.

Secarap lengkap capaian kinerja RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2021 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indikator Visi

Jumlah indikator visi total 11 indikator. Indikator visi merupakan penjabaran dari komponen visi ke dalam 11 indikator visi. Setiap indikator mendukung pencapaian visi. Visi RPJMD Kabupaten Pekalongan 2016-2021 adalah “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Religius dan Berkelanjutan Berbasis Potensi Lokal. Berikut adalah tabel realisasi dan tingkat capaian indikator visi berdasarkan penjabaran visi.

Tabel 2.148.
Realisasi Indikator Visi Tahun 2020 dan
Tingkat Capaian terhadap Target RPJMD 2016-2021

No	Komponen Visi/ Indikator Visi	Target kinerja akhir RPJMD (2016- 2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sejahtera							
1	Pertumbuhan ekonomi	6,0	5,8	-1,89	-32,59	-31,5	↓
2	PDRB ADH berlaku tahun 2010 (Juta Rp)	24.065.358,25	22.766.413,82	22.803.192,93	100,16	94,76	△
3	PDRB ADH konstan tahun 2010 (Juta Rp)	16.772.679,78	16.178.055,50	16.047.511,77	99,19	95,68	□
4	PDRB per kapita	26.873.827	25.526.261,00	25.526.261,00	100,00	94,99	○
5	Laju inflasi	3-4	3 – 4	2,36	78,67	78,67	□
6	Persentase penduduk miskin	7,10	8,07	10,19	73,73	56,48	□
7	Nilai tukar petani	106,71	106,33	105,94	99,63	99,28	□
Religius							
8	Persentase penyelenggaraan pendidikan keagamaan	100	100	100	100	100	↑
Pembangunan yang berkelanjutan							
9	IPM (%)	68,60	68,45	69,63	101,72	101,5	↑
10	TPT (%)	4,37	4,36	6,97	40,14	40,50	↓
Potensi local							
11	Persentase penyelenggaraan wisata religi dan heritage	100	100	100	100	100	↑
Rata-rata capaian kinerja					78,07	Tinggi	

Sumber: BPS, Perangkat Daerah terkait, 2021 (data diolah)

Tabel 2.149.
Realisasi Indikator Tujuan Tahun 2020 dan
Tingkat Capaian terhadap Target RPJMD 2016-2021

No	Misi/ Indikator Tujuan	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian	
			Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Misi 1 : Meningkatkan Fasilitas Pembangunan Sosial dan Ekonomi Kerakyatan Berbasis pada UMKM,Pertanian,Peternakan dan Perikanan							
	1	Angka Harapan Hidup	73,67	73,58	73,69	100,15	100,03	↑
	2	Angka Harapan Lama Sekolah	12,00	12	12,41	103,42	103,42	↑
	3	Angka Rata-rata lama Sekolah	7,5	7,4	6,91	93,38	92,13	□
	4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	56,11	57,63	71,23	123,60	126,95	↑
	5	Cakupan Penanganan PMKS	2,84	2,16	2,70	125,00	95,07	△
	6	Persentase penyelenggaraan seni dan budaya yang difasilitasi	100,00	100	0,02	0,02	0,02	↓
	7	Persentase desa tangguh bencana	21,05	17,54	0,35	1,99	1,66	↓
	8	Kontribusi sektor industry pengolahan terhadap PDRB (%)	33,15	32,95	30,75	93,32	92,76	□
	9	Kontribusi sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor thd PDRB (%)	13,72	13,71	13,42	97,88	97,81	□
	10	Jumlah kunjungan wisatawan	115.000	114.000	115.756	101,54	100,66	↑
	11	Kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (%);	16,00	16,10	17,01	105,65	106,32	↑
	12	Skor Pola Pangan Harapan menggunakan data SUSENAS (%)	88,00	84,00	88,60	105,48	100,68	↑
2	Misi 2 : mewujudkan rasa aman dan adil pada seluruh masyarakat							
	1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) (%)	100,00	100	100	100,00	100	↑
	2	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	92,60	92,50	92,48	99,98	99,87	□
	3	IDG (Indeks Pemberdayaan)	80,60	79,4	73,21	92,2	90,83	□

No	Misi/ Indikator Tujuan	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Gender)						
3	Misi 3 : Meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan masyarakat yang lebih baik						
1	Persentase terjadinya konflik sosial (%)	0	0	0	100	100	↑
4	Misi 4 : menyelenggarakan birokrasi pemerintahan yang profesional, bersih, dan berakhlak						
1	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	77	76	82,13	108,07	106,66	↑
2	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	100,00	100	↑
5	Misi 5 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berbasis pada pemerataan wilayah dan berwawasan lingkungan						
1	Tingkat kualitas infrastruktur wilayah (%)	71,66	69,84	86,30	123,57	120,43	↑
2	Tingkat pelayanan transportasi daerah (rata 2 apill dan ijin trayek	81,65	75,80	100	131,93	122,47	↑
3	Cakupan pelayanan sarana prasarana dasar permukiman	100,00	70,00	74,52	106,46	74,52	△
4	Indek Kualitas Lingkungan Hdup (IKLH)	77,37	75,91	62,52	81,36	80,81	□
6	Misi 6 : Memantapkan potensi sosial budaya lokal untuk peningkatan daya saing daerah						
1	Tingkat kualitas pemuda, olahraga dan teknologi (%)	41,05	40,54	33,33	82,21	81,19	□
7	Misi 7 : Mendorong iklim investasi yang berbasis pada potensi ekonomi daerah						
1	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA) (Rp.Juta)	451.071,62	437.934,59	1.173.436,44	267,95	260,14	↑
Rata-rata capaian kinerja					89,26		
Predikat Kinerja					Tinggi		

Sumber: BPS, Perangkat Daerah terkait, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, ada 13 indikator kinerja tujuan mencapai dan melampaui target RPJMD 2016-2021, 2 indikator mencapai melebihi target indikator RKPd tahun 2020, 7 indikator kinerjanya meningkat dengan cukup baik walaupun belum mencapai target RKPd tahun 2020, dan 2 indikator kinerjanya kurang dari ≤ 65% terhadap target RKPd tahun 2020.

Indikator kinerja tujuan tahun 2020 yang mencapai target ada 15 indikator, persentase ketercapaian sebesar 62,50%. Rata-rata capaian kinerja tujuan sebesar 89,26 predikat penilaian tinggi. Ada 20 indikator mencapai predikat kinerja sangat tinggi, 2 indikator mencapai predikat kinerja sedang, dan 2 indikator kinerja mencapai predikat kinerja sangat rendah. Adapun capaian indikator kinerja tujuan terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 13 indikator yang telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

2. Indikator Sasaran

Jumlah indikator sasaran total 106 indikator. Indikator sasaran yang merupakan penjabaran dari 7 misi ke dalam 36 sasaran. Indikator sasaran merupakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Berikut adalah tabel realisasi dan tingkat capaian indikator sasaran berdasarkan RPJMD 2016-2021 Kabupaten Pekalongan.

Tabel 2.150.
Realisasi indikator sasaran tahun 2020 dan tingkat capaian terhadap target RPJMD 2016-2021

No	Misi/ Indikator Sasaran	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan derajat kesehatan masyarakat							
Sasaran 1: Meningkatnya derajat kesehatan Ibu dan Anak							
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi	992,50	992,40	993,53	100,10	100,10	↑
2	Angka Kematian Ibu Melahirkan / 100.000 KH	81,25	87,50	66,43	124,08	118,24	↑
3	Angka Kematian Bayi / 1000 KH	9,50	10,00	6,47	135,30	131,89	↑
Sasaran 2 : Menurunnya angka gizi buruk.							
4	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	0,04	0,05	0,05	100,00	75,00	○
5	Prevalensi anemia pd Ibu Hamil (%)	15,00	16	17,26	92,13	84,93	□
6	Bayi dengan berat badan lahir rendah (%)	4,00	4,2	5,38	71,90	65,50	□
7	Persentase bayi usia kurang dari 6 bln yang mendapat ASI eksklusif (%)	52,00	51	81,14	159,11	156,04	↑
8	Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita (%)	15,00	16	3,25	179,69	178,33	↑
9	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak bawah 2 tahun (%)	26,00	27	15,81	141,44	139,19	↑
Sasaran 3 : Menurunnya angka kesakitan penduduk							
10	CNR Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk	121	120	112	106,67	107,44	↑
11	Prevalensi HIV pada populasi dewasa (%)	0,4	0,42	0,47	88,10	82,50	□
12	Jumlah kecamatan	19	19	19	100,00	100,00	↑

No	Misi/ Indikator Sasaran	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	mencapai eliminasi malaria (kec)						
13	Jumlah kecamatan mencapai eliminasi filariasis(kec)	19	19	19	100,00	100,00	↑
14	Persentase Desa yang memenuhi sarat kualitas kesehatan lingkungan (%)	60,00	50,00	56,14	112,28	93,57	△
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin							
15	Cakupan Pelayanan Dasar dan Rujukan Masy. Miskin (%)	100,00	95,00	94,69	99,67	94,69	□
Sasaran 5: Meningkatnya peserta Keluarga Berencana (KB) aktif.							
16	Cakupan peserta KB aktif (%)	80,82	80,72	80,42	99,63	99,51	□
17	<i>Unmet Need</i>	9,40	9,50	8,68	108,63	107,66	↑
Tujuan 2: Meningkatkan pemerataan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pelayanan Pendidikan							
Sasaran 6: Meningkatnya pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan untuk semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan Non Formal							
18	Persentase Ketersediaan PAUD (%)	72,00	71,00	70,52	99,32	97,94	□
Sasaran 7 : Tersedianya pelayanan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat di seluruh pelosok Kabupaten Pekalongan untuk semua jenjang Pendidikan							
19	APK PAUD (%)	72,00	71,00	71,02	100,03	98,64	△
20	APK SD/MI/ Paket A (%)	103,81	103,81	108,47	104,50	104,5	↑
21	APK SMP/MTs/ Paket B (%)	100,00	100,00	95,57	95,57	95,57	□
22	APM SD/MI/Paket A (%)	93,60	93,40	96,57	103,39	103,17	↑
23	APM SMP/MTs/Paket B (%)	84,00	83,50	77,93	93,33	92,77	□
Sasaran 8 : Meningkatnya kualitas, kesetaraan dan keterjaminan pendidikan pada semua jenjang pendidikan termasuk pendidikan non formal.							
24	Angka Buta Huruf Aksara usia 15 th ke atas selesai tahap pelestarian (%)	99,99	99,85	99,80	99,95	99,81	□
Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan serta penempatan tenaga pendidik							
25	Rasio guru PAUD dan	97,67	96,67	96,55	99,88	98,85	□

No	Misi/ Indikator Sasaran	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pendidikan dasar berkualitas S1/D4 (%)						
26	Rasio guru PAUD dan pendidikan dasar bersertifikasi Pendidik (%)	93,33	88,67	83,23	93,86	89,18	<input type="checkbox"/>
Sasaran 10 : Meningkatkan minat baca masyarakat							
27	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang);	52.520	52.250	14.469	27,69	27,55	↓
Tujuan 3: Meningkatkan kesempatan kerja dan Penanganan PMKS dalam rangka mendukung penanggulangan kemiskinan							
Sasaran 11: Meningkatnya kesempatan kerja							
28	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja (%)	12	11,5	69,23	602,0	576,92	↑
29	Persentase Pelaksanaan Pengiriman calon transmigran ke lokasi transmigrasi (%)	100,00	100,00	0	0	0	↓
Sasaran 12: Meningkatnya penanganan PMKS.							
30	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	5,24	3,96	4,96	125,25	94,66	△
31	Persentase fakir miskin yang menerima program pemberdayaan ekonomi (%)	0,43	0,35	0,45	128,57	104,65	↑
Tujuan 4: Mengoptimalkan dan menggali kearifan lokal dalam rangka meningkatkan ketahanan nilai-nilai budaya dan pelestarian peninggalan sejarah serta aset kesenian dan budaya lokal							
Sasaran 13 : Meningkatnya pembinaan kelompok kesenian, organisasi budaya dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal							
32	Persentase Organisasi Seni dan Budaya yang dibina	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
33	Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk	0,0119	0,0114	1,0115	887,28	8.500	↑
Sasaran 14 : Meningkatnya jumlah kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah							
34	Persentase keikutsertaan festival seni dan budaya	67,00	66,00	66,00	100,00	98,51	○
Tujuan 5: Mengoptimalkan pengurangan resiko pada masyarakat di daerah rawan							

No	Misi/ Indikator Sasaran	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
bencana							
Sasaran 15: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menghadapi resiko bencana, pemanasan global dan dampak perubahan iklim							
35	Persentase pemenuhan kebutuhan logistik korban bencana alam dan korban bencana sosial pada saat bencana (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
Tujuan 6: Mengoptimalkan fasilitasi ekonomi kerakyatan dalam rangka peningkatan kinerja koperasi, industri kecil dan menengah, Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta pariwisata							
Sasaran 16 : Meningkatnya kinerja Koperasi dan UMKM							
36	Persentase kinerja Koperasi dan UMKM aktif (%)	50,47	49,95	37,18	74,43	73,67	□
Sasaran 17: Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Peningkatan Produktivitas Industri Kecil							
37	Tingkat pertumbuhan industri kecil dan menengah (%)	0,21	0,18	0,60	333,33	285,71	↑
Sasaran 18: Meningkatnya aktivitas perdagangan							
38	Ekspor Bersih Perdagangan (ribu US\$)	28.000	27.900	14.288,66	51,21	51,03	↓
Sasaran 19 : Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PAD							
39	Nilai Pendapatan sektor pariwisata (Rp/tahun)	608.000.000	606.000.000	802.135.500	132,37	131,93	↑
Tujuan 7: Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya lingkungan							
Sasaran 20 : Meningkatnya produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan dengan memperhatikan pelestarian sumberdaya lingkungan							
40	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (%)	535,18	534,59	535,79	100,22	100,11	↑
41	Jumlah produksi perikanan budidaya tambak dan Perikanan tangkap (ton)	14.135,99	13.238,13	13.898,00	104,98	98,32	△
42	Rata-rata pendapatan nelayan (Rp/bulan)	1.444.865	1.325.564	1.403.178	105,86	97,11	△
43	Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (Rp/Bulan) Produksi ternak	2.259.421	2.131.530	2.156.844	101,19	95,46	△
44	- daging (Kg)	9.357.567	9.072.7	9.073.782	100,01	96,97	○

No	Misi/ Indikator Sasaran	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			72				
45	- telur (Kg)	5.730.321	5.648.952	5.648.954	100,00	98,58	○
46	- susu (liter)	357.948	357.806	365.094	102,04	102,00	↑
Sasaran 21: Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat							
47	Ketersediaan energi per kapita (kkal/kap/hari)	2.600	2.575	2.600	100,97	100,00	↑
48	Ketersediaan protein per kapita (gram/kap/har)	72,00	71,50	73,20	102,38	101,67	↑
Tujuan 8 : Menciptakan rasa aman yang berkeadilan dalam masyarakat dan mewujudkan iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas							
Sasaran 22: Meningkatnya penegakan hukum dan perlindungan terhadap Hak Azasi Manusia (HAM)							
49	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	46,22	46,06	64,69	140,45	139,96	↑
50	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kel	5,88	5,88	5,91	100,51	100,51	↑
51	Persentase Penegakan PERDA (%)	88,30	87,10	83,00	95,29	94,00	□
52	Cakupan patroli petugas Satpol PP	1,00	0,67	0,79	117,91	79,00	○
Sasaran 23 : Meningkatnya keamanan dan perlindungan masyarakat berbasis pada masyarakat							
53	Angka Kriminalitas yang tertangani (%)	95,00	94,00	73,00	77,66	76,84	□
Sasaran 24: Terciptanya kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan anak, serta mengoptimalkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender							
54	Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga pemerintahan (%)	15,65	14,87	13,31	89,51	85,05	□
55	Persentase partisipasi perempuan bekerja di lembaga swasta (%)	6,58	6,51	9,11	139,94	138,45	↑
56	Rasio KDRT	0,00094	0,00095	0,000018	198,11	198,09	↑
57	Persentase keterwakilan politik perempuan di lembaga parlemen (%)	30,00	30,00	26,66	88,67	88,67	□

No	Misi/ Indikator Sasaran	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tujuan 9 : Menciptakan praktek kehidupan agama dan kerukunan beragama yang lebih baik							
Sasaran 25 : Meningkatnya kegiatan fasilitasi pemerintah untuk penyelenggaraan pendidikan agama dan perwujudan kondisi kerukunan beragama							
58	Cakupan penyelenggaraan kegiatan keagamaan yg difasilitasi (%)	100.00	100.00	Ktp	80,30	80,30	<input type="checkbox"/>
59	Persentase lembaga pendidikan keagamaan yg mendapat bantuan (%)	100.00	100.00	92,85	92,85	92,85	<input type="checkbox"/>
Tujuan 10 : Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah kabupaten Pekalongan yang mencakup unsur sistem, kelembagaan dan individu atau aparat sipil negara							
Sasaran 26: Terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan, yang mencakup sistem, kelembagaan, aparatur dan pengelolaan keuangan daerah serta pelayanan publik sesuai prinsip-prinsip <i>good governance</i>							
60	Persentase OPD yang memiliki website (%)	100.00	90,00	100.00	111,00	100,00	↑
61	Persentase pengelolaan dan perlindungan informasi berklasifikasi milik pemerintah	100.00	100,00	100,00	100.00	100,00	↑
62	Persentase penyelesaian Peraturan Perundangan tepat waktu (%)	100.00	100.00	100,00	100,00	100,00	↑
63	Hasil Implementasi SAKIP	BB	B	B	100,00	95,00	○
64	Persentase Pengelolaan arsip secara baku (%)	88,89	66,67	40	59,99	44,99	↓
65	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (%)	95.00	92,33	86,78	93,99	91,35	<input type="checkbox"/>
66	Tingkat Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah)	Level 3	Level 3	Level 3	100,00	100,00	↑
67	Persentase Pegawai berkompeten sesuai kebutuhan organisasi (%)	80.00	78,00	76,58	98,18	95,73	<input type="checkbox"/>
68	Rasio PAD terhadap total	15.62	15,29	16,24	106,21	103,97	↑

No	Misi/ Indikator Sasaran	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	penerimaan APBD						
Sasaran 27 : Meningkatnya kualitas perencanaan PD dan lintas PD							
69	Persentase Penjabaran program yang ada dalam RPJMD ke dalam RKPD (%)	100.00	100.00	100,00	100,00	100,00	↑
70	Persentase kesesuaian Program dalam RKPD ke dalam APBD (%)	100.00	100.00	100,00	100,00	100,00	↑
71	Persentase pencapaian indikator kinerja pembangunan	95.00	92,50	86,27	93,26	90,81	□
Sasaran 28: Meningkatnya kualitas layanan jalan dan jembatan kabupaten serta layanan perizinan usaha jasa konstruksi							
72	Persentase tingkat kondisi jalan Kabupaten baik dan Sedang (%)	100.00	98,00	93,72	95,63	93,72	□
73	Persentase terhubungnya pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kabupaten	100	100	100	100,00	100,00	↑
74	Persentase Jembatan dalam kondisi Baik (%)	100	99,00	86,54	87,41	86,50	□
75	Persentase tersedianya layanan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dengan waktu penerbitan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	100.00	100.00	100,00	100.00	100,00	□
76	Persentase Tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat kabupaten pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI)	70.00	65	65	100,00	92,86	△
Sasaran 29 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas jaringan irigasi untuk 9 mendukung peningkatan produktivitas pertanian							
77	Rasio Jaringan Irigasi	3,28	3,23	3,523	109,07	107,41	↑

No	Misi/ Indikator Sasaran		Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
				Target	Realisasi			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	78	Persentase tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada sesuai dengan kewenangannya	80,00	75,00	100,00	142,86	125,00	↑
	79	Persentase tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari	100	100	100	100,00	100,00	↑
Sasaran 30: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur								
	80	Cakupan sarana prasarana desa (%)	80,00	70	92,54	132,20	115,67	↑
	81	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	0,56	0,54	1,00	185,19	178,57	↑
	82	Swadaya Masyarakat thd Program pemberdayaan masyarakat (%)	20,00	19,50	23,15	118,72	115,75	↑
Sasaran 31: Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur perhubungan dan transportasi								
	83	Persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya (APILL) (%)	70,00	65,00	65,00	100,00	92,86	○
	84	Rasio Ijin Trayek (%)	93,30	86,00	75,80	88,14	81,24	□
Sasaran 32 : Meningkatnya penyediaan sarana prasarana dasar permukiman dan tertib pembangunan bangunan gedung								
	85	Rasio rumah layak huni (%)	6,00	7,00	7,08	101,14	118,00	↑
	86	Persentase kawasan permukiman kumuh (%)	0,00	10,00	10,00	100,00	100,00	↑
	87	Cakupan Pelayanan Air Minum	100,00	100	87,83	87,83	87,83	□
	88	Cakupan Pelayanan Sanitasi	100,00	100	86,06	86,06	86,06	□
	89	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	87,00	84,00	87,83	104,56	100,95	↑
	90	Persentase Penduduk yang terlayani sistem	67,00	65,00	61,22	94,18	91,37	□

No	Misi/ Indikator Sasaran	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	air limbah yang memadai (%)						
91	Persentase pengurangan sampah di perkotaan (%)	30,00	25,00	18,00	72,00	60,00	<input type="checkbox"/>
92	Persentase pengangkutan sampah (%)	80,00	75,00	52,67	70,23	65,84	<input type="checkbox"/>
93	Persentase pengoperasian TPA (%)	72,00	70,00	97,19	138,84	134,99	↑
94	Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) lebih dari 2 kali setahun (%)	60,00	60,00	86,51	144,18	144,18	↑
95	Berkurangnya permukiman kumuh di perkotaan (ha)	15,00	13,00	39,40	303,08	262,67	↑
96	Persentase jumlah IMB yang diterbitkan (%)	70,00	65	100	153,00	142,86	↑
Sasaran 33: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan ketersediaan RTH serta informasi penataan ruang							
97	Persentase Pelayanan Pencegahan pencemaran air	100	90	90	100,00	90	○
98	Persentase pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	64,00	60,00	60,00	100,00	93,75	○
99	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,06	0,05	0,02	40,00	33,33	↓
100	Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah Kabupaten beserta rincian nya melalui peta analog dan peta digital (%)	100,00	100,00	14,29	14,29	14,29	↓
101	Persentase tersedianya	60,00	55,00	1,84	3,35	3,07	↓

No	Misi/ Indikator Sasaran	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan						
Tujuan 12 : Merevitalisasi potensi sosial dan budaya lokal yang mampu bersaing dengan meningkatkan branding produk daerah							
Sasaran 34: Meningkatnya prestasi pemuda, olahraga dan teknologi.							
102	Persentase prestasi pemuda Tingkat Provinsi dan Nasional (%)	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	↓
103	Persentase prestasi Olahraga Tingkat Provinsi dan Nasional (%)	32,49	30,94	0,00	0,00	0,00	↓
104	Persentase jumlah hasil riset dan krenova yg bisa direkomendasikan utk dimanfaatkan (%)	66,67	100	100	100,00	149,99	↑
Tujuan 13 : Menciptakan iklim investasi yang kondusif dengan mengandalkan pada potensi ekonomi daerah.							
Sasaran 35: Meningkatnya iklim investasi daerah dengan meningkatkan inovasi pelayanan perijinan dan peningkatan infrastruktur ekonomi daerah							
105	Lama proses perijinan (hari)	6	6	5	116,67	116,67	↑
106	Jumlah investor berskala nasional (PMA/PMDN(investor))	95	95	210	221,05	221,05	↑
Rata - rata capaian kinerja					77,72	i	
Predikat Kinerja					Tingg		

Sumber: BPS, Perangkat Daerah terkait, 2021 (data diolah)

Dari tabel diatas, terdapat 50 indikator kinerja sasaran mencapai dan melampaui target RPJMD 2016-2021, 7 indikator mencapai melebihi target indikator RKPD tahun 2020, 9 indikator mencapai target RKPD 2020, 30 indikator kinerjanya meningkat dengan cukup baik walaupun belum mencapai target RKPD tahun 2020, dan 10 indikator kinerjanya kurang dari ≤ 65% terhadap target RKPD tahun 2020.

Indikator kinerja sasaran terhadap target tahun 2020 yang mencapai target ada 64 indikator, persentase ketercapaian sebesar 64,15%. Rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 77,72 predikat penilaian tinggi. Ada 80 indikator mencapai predikat kinerja sangat tinggi, 8 indikator mencapai predikat kinerja tinggi, 4 indikator mencapai predikat kinerja sedang, 2 indikator mencapai predikat kinerja rendah, dan 5 indikator kinerja mencapai predikat kinerja sangat rendah. Adapun capaian indikator kinerja sasaran terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 52 indikator yang telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

3. Indikator Program

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Urusan pendidikan dilaksanakan melalui 5 program untuk mencapai 36 indikator kinerja. Urusan Bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan pendidikan tahun 2020.

Tabel 2.151.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Pendidikan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
				Target	Realisasi			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN								
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini							
	1	APK PAUD/TK/RA (%)	72,00	71,00	71,02	100,03	98,64	
	2	Persentase Anak usia 4-6 tahun yang masuk PAUD (%)	72,00	71,00	79,00	111,27	109,71	
	3	Persentase TK/RA memiliki perpustakaan (%)	85,00	80,00	39,79	49,74	46,81	
	4	Persentase TK/RA layak sanitasi (%)	85,00	80,00	79,01	98,76	92,95	
2	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun							
	1	Angka Putus Sekolah SD/MI (%)	0,10	0,15	0,12	120,00	80,00	
	2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)	0,14	0,15	0,11	126,67	121,43	
	3	Angka kelulusan UN SD/MI (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	4	Angka kelulusan UN SMP/MTs (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	5	Persentase SD/MI dengan kondisi bangunan baik (%)	90,00	90,00	87,11	96,79	96,79	
	6	Persentase SMP/MTs dengan kondisi bangunan baik (%)	98,00	98,00	95,04	96,98	96,98	
	7	Angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs (%)	98,00	98,00	94,17	96,09	96,09	
	8	Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA (%)	80,00	80	80,03	100,04	100,04	
	9	Persentase SD/MI Sesuai standar nasional pendidikan (%)	70,00	70	65,09	92,98	92,98	
	10	Persentase SMP/MTs Sesuai standar nasional pendidikan (%)	41,00	41,00	36,00	87,80	87,80	
	11	Persentase SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar (%)	60,00	60,00	70,71	117,85	117,85	
	12	Persentase SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
	13	Persentase SD/MI yang memiliki sanitasi layak (%)	90,00	90,00	64,15	71,28	71,28	
	14	Persentase SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak (%)	95,00	95,00	71,05	74,79	74,79	

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
				Target	Realisasi			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	15	Persentase Penerima Kartu Kajian Cerdas (%)	10,38 (6000 orang)	10,38 (6000 orang)	13,56 (56.075 org)	130,64	130,64	↑
3	Program Pendidikan Non Formal							
	1	Angka lulus paket A (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
	2	Angka lulus paket B (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
	3	Angka lulus paket C (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
	4	Persentase Taman Bacaan masyarakat (TBM) di Desa/Kelurahan(%)	29,12	29,12	26,32	90,38	90,38	□
	5	Persentase lembaga kursus yang bersertifikasi (%)	68,00	68,00	55,56	81,71	81,71	□
	6	Persentase desa vokasi (sentra penyelenggaraan kursus) yang dikembangkan (%)	2,60	2,60	2,81	108,08	108,08	↑
	7	Persentase lembaga PNF terakreditasi (%)	60,00	60,00	36,04	60,07	60,07	↓
4	Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan							
	1	Persentase guru PAUD, TK/RA berkualifikasi S1/D4 (%)	93,00	93,00	90,05	96,83	96,83	□
	2	Persentase guru SD/MI Yang berkualifikasi S1/D4 (%)	100,00	100,00	98,53	98,53	98,53	□
	3	Persentase Guru SMP/MTs yang berkualifikasi S1/D4 (%)	100,00	100,00	98,03	98,03	98,03	□
	4	Persentase guru PAUD, TK/RA bersertifikasi pendidik (%)	70,00	70,00	58,06	82,94	82,94	□
	5	Persentase guru SD/MI Yang bersertifikasi pendidik (%)	100,00	100,00	89,31	89,31	89,31	□
	6	Persentase guru SMP/MTs yang bersertifikasi pendidik (%)	100,00	100,00	93,09	93,09	93,09	□
5	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan							
	1	Persentase SD/MI terakreditasi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
	2	Persentase SMP/MTs terakreditasi (%)	91,00	91,00	99,12	108,92	108,92	↑
	3	Persentase SD/MI yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik (%)	61,00	61,00	100,00	163,93	163,93	↑
	4	Persentase SMP/MTs yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dengan baik (%)	61,00	61,00	100,00	163,93	163,93	↑
Rata-rata capaian kinerja						93,22		
Predikat kinerja						Sangat Tinggi		

Sumber: Dindikbud Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Dari tabel diatas, ada 16 indikator kinerja program urusan pendidikan mencapai dan melampaui target RPJMD 2016-2021, 16 indikator kerjanya meningkat dengan cukup baik walaupun belum

mencapai target RKPD tahun 2020, dan 2 indikator kinerjanya kurang dari $\leq 65\%$ terhadap target RKPD tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan pendidikan tahun 2020 yang mencapai target ada 18 indikator, persentase ketercapaian sebesar 50,00%. Rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 93,22 predikat penilaian sangat tinggi. Ada 27 indikator mencapai predikat kinerja sangat tinggi, 6 indikator mencapai predikat kinerja tinggi, 3 indikator mencapai predikat kinerja sedang, 2 indikator mencapai predikat kinerja rendah, dan 1 indikator kinerja mencapai predikat kinerja sangat rendah. Adapun capaian indikator kinerja sasaran terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 52 indikator yang telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

2) Kesehatan

Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes), RSUD Kraton, dan RSUD Kajen. Urusan Kesehatan melaksanakan 16 Program dan 64 Indikator. Berikut Capaian target indikator kinerja urusan kesehatan pada tahun 2020.

Tabel 2.152.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Kesehatan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian	
			Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
DINAS KESEHATAN								
1	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan							
1	1	Persentase penggunaan obat rasional dan perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							
2	1	Jumlah Posyandu Mandiri (buah)	300	300	414	138,00	138,00	↑
3	2	Jumlah Posyandu Purnama (buah)	750	730	637	84,93	84,93	□
3	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan							
4	1	Persentase sampel makanan yang memenuhi syarat kesehatan (%)	95,00	95,00	100,00	105,26	105,26	↑
4	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
5	1	Persentase desa siaga aktif (%)	10,00	10,00	69,82	698,20	698,20	↑
5	Program Perbaikan Gizi Masyarakat							
6	1	Cakupan bayi mndpt vitamin A	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
7	2	Cakupan anak balita mendapat kapsul vitamin A 2 kali per tahun	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
8	3	Persentase Baduta Bawah Garis Merah (BGM)	0,50	0,50	0,71	58,00	58,00	↓
6	Program Pengembangan Lingkungan Sehat							
9	1	Persentase rumah dibina yang sehat	80,00	80,00	61,18	76,48	76,48	□
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular							

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
				Target	Realisasi			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	1	Angka kesembuhan pasien TB Paru BTA+ (Cure Rate)	98,00	98,00	96,00	97,96	97,96	<input type="checkbox"/>
11	2	Penderita Diare ditangani	100,00	100	96,42	96,42	96,42	<input type="checkbox"/>
12	3	NCDR (New Case Detection Rate)	12,00	12,00	9,00	125,00	125,00	↑
13	4	Angka Kesakitan DBD (Incidence Rate)	30,00	30,00	26	113,33	113,33	↑
14	5	Angka Kesakitan Filariasis	4,00	4,00	0,83	120,00	120,00	↑
15	6	Cakupan Imunisasi Dasar lengkap pada bayi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
16	7	Persentase kejadian luar biasa (KLB) di Desa/Kelurahan yang ditanggulangi <24 jam	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
17	8	Cakupan ibu hamil mendapat imunisasi TT2+	90,00	90,00	100,00	111,11	111,11	↑
8	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan							
18	1	Persentase Puskesmas Terakreditasi (%)	100,00	100,00	96,97	96,97	96,97	<input type="checkbox"/>
19	2	Jumlah tenaga Kesehatan Daerah atas yang menerima Insentif (orang)	365	365	156	42,74	42,74	↓
9	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin							
20	1	Persentase penduduk yang terintegrasi layanan JKN-BPJS	100,00	100,00	95,00	95,00	95,00	<input type="checkbox"/>
21	2	Persentase penduduk miskin penerima manfaat jaminan kesehatan bersumber APBD Kabupaten (%)	25,24	25,24	90,61	358,99	358,99	<input type="checkbox"/>
10	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya							
22	1	Persentase puskesmas dalam kondisi baik	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
11	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan							
23	1	Persentase yankes swasta yang terintegrasi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
12	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak							
24	1	Cakupan kunjungan ibu hamil K4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
25	2	Cakupan KN lengkap	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
26	3	Persentase bayi yang diberi ASI eksklusif (0-6 bulan)	70,00	70,00	81,14	115,91	115,91	↑
27	4	Cakupan pelayanan kesehatan bayi	100,00	100,00	96,76	96,76	96,76	<input type="checkbox"/>
28	5	Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100,00	100,00	95,00	95,00	95,00	<input type="checkbox"/>
29	6	Cakupan kasus balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
30	7	Persentase pertolongan persalinan oleh	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
				Target	Realisasi			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		tenaga kesehatan						
31	8	Cakupan pelayanan ibu nifas	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
13	Program Manajemen Pelayanan Kesehatan							
32	1	Index Kepuasan Masyarakat (IKM)	90,00	90,00	78,21	89,90	86,90	□
14	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD							
33	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Puskesmas BLUD	90,00	90,00	77,78	86,42	86,42	□
34	2	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan Ibu hamil	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
35	3	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
36	4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00	100,00	96,76	96,76	96,76	□
37	5	Persentase anak usia 0-59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100,00	100,00	83,57	83,57	83,57	□
38	6	Persentase orang dengan Tuberkulosis (TB) mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100,00	100,00	83,95	83,95	83,95	□
39	7	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100,00	100,00	97,33	97,33	97,33	□
40	8	Persentase anak usia pendidikan yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	96,30	96,30	96,30	□
41	9	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	73,80	73,80	73,80	□
42	10	Persentase warga usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	53,22	53,22	53,22	↓
43	11	Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	58,76	58,76	58,76	↓
44	12	Persentase penyandang Diabetes Mellitus (DM) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	88,66	88,66	88,66	□

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
				Target	Realisasi			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45	13	Persentase orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
RSUD KRATON								
46	1	Persentase Peningkatan pemanfaatan tempat tidur perawatan /BOR (%)	72,00	71,00 (60 – 85%)	36,63	51,59	50,88	↓
47	2	Rata-rata hari perawatan /Av Los (hari)	4,60	4,60 (3-4 hari)	4,03	87,61	87,61	□
48	3	Frekuensi pemakaian tempat tidur /BTO (kali)	59,00	59,90 (>50 kali)	33,83	56,48	57,34	↓
49	4	Jumlah efisiensi pemakaian tempat tidur /TOI (hari)	1,70	1,70 (1-3 hari)	6,85	402,94	402,94	↑
50	5	Angka kematian bersih /NDR (%)	20,00	20,00 (25/100)	34,94	25,30	25,30	↓
51	6	Angka kematian kasar /GDR (%)	40,00	40,00 (45/100)	66,15	34,63	34,63	↓
RSUD KAJEN								
52	1	Persentase Peningkatan pemanfaatan tempat tidur perawatan/BOR	75,00	74,90 (60 – 85%)	56,74	75,75	75,65	□
53	2	Rata-rata hari perawatan /Av Los (hari)	4,31	4,32 (3-4 hari)	4,33	100,23	100,46	↑
54	3	Frekuensi pemakaian tempat tidur /BTO (kali)	40,00	50,00 (>50 kali)	65,67	131,34	164,18	↑
55	4	Jumlah efisiensi pemakaian tempat tidur /TOI (hari)	1,82	1,83 (1-3 hari)	2,14	116,94	117,58	↑
56	5	Angka kematian bersih /NDR (%)	15,00	15,00 (25/100)	28,88	7,47	7,47	↓
57	6	Angka kematian kasar /GDR (%)	36,54	36,56 (45/100)	58,28	40,59	40,50	↓
15	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata							
58	1	Persentase Pembangunan RSUD Kesesi (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
RSUD KRATON								
59	1	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai Permenkes No 56 Tahun 2014 (%)	100,00	100,00	95,00	95,00	95,00	□
60	2	Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan (%)	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	□
RSUD KAJEN								
61	1	Persentase sarana dan prasarana rumah sakit sesuai Permenkes No 56 Tahun 2014 (%)	100,00	100,00	64,76	64,76	64,76	↓

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
				Target	Realisasi			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
62	2	Persentase sarana dan prasarana penunjang pelayanan (%)	100,00	100,00	84,55	84,55	84,55	<input type="checkbox"/>
16	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular							
63	1	Cakupan pengukuran tekanan darah	100,00	100,00	82,78	82,78	82,78	<input type="checkbox"/>
64	2	Persentase hipertensi	60,00	60,00	58,76	97,93	97,93	<input type="checkbox"/>
Rata-rata capaian kinerja						86,66		
Predikat kinerja						Tinggi		

Sumber: Dinkes, RSUD Kraton, RSUD Kajen Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Dari tabel diatas, terdapat 28 indikator kinerja program urusan kesehatan mencapai dan melampaui target RPJMD 2016-2021, 25 indikator kinerjanya meningkat dengan cukup baik walaupun belum mencapai target RKPD tahun 2020, dan 11 indikator kinerjanya kurang dari ≤ 65% terhadap target RKPD tahun 2020.

Indikator kinerja program terkait urusan kesehatan tahun 2020 yang mencapai target ada 28 indikator, persentase ketercapaian sebesar 43,73%. Rata-rata capaian kinerja program terkait urusan kesehatan sebesar 86,66 predikat penilaian tinggi. Ada 40 indikator mencapai predikat kinerja sangat tinggi, 11 indikator mencapai predikat kinerja tinggi, 2 indikator mencapai predikat kinerja sedang, 6 indikator mencapai predikat kinerja rendah, dan 5 indikator kinerja mencapai predikat kinerja sangat rendah. Adapun capaian indikator kinerja urusan kesehatan terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 29 indikator yang telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU dan TARU), Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dinas PERKIM LH). Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 9 Program dan 14 Indikator. Berikut Capaian target indikator kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2020.

Tabel 2.153.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
				Target	Realisasi			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	DPU TARU							
1	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan							
	1	Persentase Jalan yang ditangani (%)	100,00	100,00	95,99	95,99	95,99	<input type="checkbox"/>
	2	Persentase Jembatan yang ditangani (%)	100,00	100,00	80,70	80,70	80,70	<input type="checkbox"/>

No	OPD/ Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
				Target	Realisasi			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3	Persentase Drainase Gorong-gorong dlm Kondisi Baik (%)	80,00	80	78,64	98,30	98,30	□
	4	Persentase Jalan yang Berdrainase(%)	15,00	15,00	20,10	134,00	134,00	↑
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Ke-PU-an							
	1	Persentase pemenuhan kebutuhan alat-alat KePUan dalam kondisi baik (%)	100,00	100,00	81,25	81,25	81,25	□
3	Program Perencanaan Teknis Infrastruktur							
	1	Jumlah Dokumen Perencanaan teknis Infrastruktur yang disusun tepat waktu (dokumen)	12	12	11	91,67	91,67	□
4	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)							
	1	Persentase RTH Publik di kawasan perkotaan	20	20	55,06	275,30	275,30	↑
5	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang							
	1	Jumlah bangunan ber-IMB per tahun (buah)	1.293	1.268	1.886	148,74	148,74	↑
6	Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh							
	1	Persentase Penataan lingkungan Perkotaan dan perbatasan (%)	9,2	9,2	4,77	51,85	51,85	↓
7	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya							
	1	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik (%)	47,79	47,79	48,77	102,05	102,05	↑
	2	Persentase jaringan irigasi yang ditangani (%)	12,36	12,36	1,21	9,79	9,79	↓
8	Program Penanggulangan dan Penanganan Banjir dan Rob							
	1	Persentase penurunan wilayah genangan banjir dan rob (%)	35,00	35,00	49,73	142,09	142,09	↓
DINAS PERKIM LH								
9	Program Peningkatan dan Pengembangan Lampu Penerangan Jalan U							
	1	Persentase penggantian LPJU yang ada dengan Lampu LED (%)	100,00	100,00	90,20	90,20	90,20	□
	2	Persentase Jalan yang Sudah Terpasang LPJU (%)	43,21	43,21	65,42	151,40	151,40	↑
Rata-rata capaian kinerja						85,69		
Predikat kinerja						Tinggi		

Sumber: DPU TARU Kab. Pekalongan, DINAS PERKIM LH Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Dari tabel diatas, terdapat 5 indikator kinerja program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencapai dan melampaui target RPJMD 2016-2021, 6 indikator kinerjanya meningkat dengan cukup baik

walaupun belum mencapai target RKPD tahun 2020, dan 3 indikator kinerjanya kurang dari $\leq 65\%$ terhadap target RKPD tahun 2020.

Indikator kinerja program terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2020 yang mencapai target ada 6 indikator, persentase ketercapaian sebesar 42,86%. Rata-rata capaian kinerja program terkait urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 85,69 predikat penilaian tinggi. Ada 9 indikator mencapai predikat kinerja sangat tinggi, 3 indikator mencapai predikat kinerja tinggi, 1 indikator mencapai predikat kinerja rendah, dan 1 indikator kinerja mencapai predikat kinerja sangat rendah. Adapun capaian indikator kinerja sasaran terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 6 indikator yang telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim LH). Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengampu 5 Program dan 8 Indikator. Berikut Capaian target indikator kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun 2020.

Tabel 2.154.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman						
1	Presentase sarana dan prasarana dasar permukiman yang tertangani (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2	Program Lingkungan Sehat Perumahan						
1	Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani (%)	100,00	100,00	90,00	90,00	90,00	□
3	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kelurahan						
1	Persentase infrastruktur di kelurahan yang terpelihara (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
4	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah						
1	Terbangunnya Jaringan Air Bersih bagi MBR per tahun (%)	100,00	100,00	87,83	87,83	87,83	□
5	Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi						
1	Persentase rumah tangga yang belum dilayani air minum (%)	12,17	12,17	12,17	100,00	100,00	↑
2	Persentase rumah tangga yang belum bersanitasi (%)	15,59	15,59	15,59	100,00	100,00	↑
6	Program Pengelolaan Taman dan Areal Pemakaman						
1	Persentase taman dan pemakaman umum yang terpelihara (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
7	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan						
1	Persentase Pelayanan Persampahan di	16,00	15,00	45,20	301,33	282,50	↑

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kabupaten Pekalongan (%)						
Rata-rata capaian kinerja					97,23		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: Dinas Perkim LH Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Dari tabel diatas, terdapat 6 indikator kinerja program urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman mencapai dan melampaui target RPJMD 2016-2021, 2 indikator kinerjanya meningkat dengan cukup baik walaupun belum mencapai target RKPd tahun 2020.

Indikator kinerja program terkait urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman tahun 2020 yang mencapai target ada 6 indikator, persentase ketercapaian sebesar 75,00%. Rata-rata capaian kinerja program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 97,23 predikat penilaian sangat tinggi. Ada 6 indikator mencapai predikat kinerja sangat tinggi, 2 indikator mencapai predikat kinerja tinggi. Adapun capaian indikator kinerja program urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 6 indikator yang telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

5) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satpol PP dan Damkar, dan Kesbang Linmas. Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mengampu 10 program dan 25 indikator. Berikut capaian target indikator kinerja Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Tabel 2.155.

Evaluasi Kinerja Program Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian	
			Target	Realisasi				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	
SATPOL PP & DAMKAR								
1	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal							
	1	Persentase terselenggaranya kegiatan keamanan Pejabat dalam Acara Resmi (Prosentase)	100,00	100,00	100,00	100,00	↑	
	2	Persentase Terselenggaranya Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat (Persen)	50,00	45,00	100,00	222,22	200,00	↑

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)		Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
				Target	Realisasi			
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
	3	Persentase Penugasan Anggota Linmas LRC (Persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2	Program Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Linmas Desa							
	1	Persentase Pembinaan/sosialisasi Linmas desa (%)	50,00	40,00	0,00	0,00	0,00	↓
3	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)							
	1	Persentase Penanganan Penyakit Masyarakat (Pekat) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
4	Program Peningkatan Pemahaman Kesadaran dan Penegakan Perda dan Perbub							
	1	Persentase Penegakan Perda dan Perbub (Persen)	50,00	45,00	87,14	193,64	174,28	↑
5	Program Peningkatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran							
	1	Persentase tanggap darurat terhadap pencegahan bahaya kebakaran (persen)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
KESBANG LINMAS								
6	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan							
	1	Persentase Kader Bela Negara yang terbina	100,00	90,74	74,37	81,96	74,37	□
	2	Persentase pelaksanaan pembinaan/sosialisasi pemahaman dan semangat kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi pelajar/ mahasiswa, ormas, aparat desa/kelurahan, guru PPKN SLTA, toga, toda, tomas (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
	3	Persentase pelaksanaan pembinaan/sosialisasi nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai Pancasila dan budaya bagi guru PPKn, Ormas/LSM, PTN/PTS dan aparatur pemerintah, tomas, toga dan generasi muda	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	↓
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan							
	1	Persentase pembentukan FKDM. Tk Desa/kel	100,00	80,70	21,40	26,52	21,40	↓
	2	Persentase pembentukan FPBI. Tk Kecamatan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
	3	Persentase terselenggaranya Forum Kerukunan Umat Beragama	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
	(FKUB)						
8	Program Peningkatan Keamanan & Kenyamanan Lingkungan						
1	Persentase terselenggaranya Pengamanan Acara Pemda, Hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2	Persentase terselenggaranya Pengamanan Kunjungan Tamu VIP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
3	Persentase tersusunnya laporan kejadian aktual anggota Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dalam menjaga kondusifitas wilayah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
4	Persentase SDM anggota KOMINDA yang mengikuti pelatihan bidang keamanan dan ketertiban (%)	100,00	100,00	0	0	0	↓
5	Persentase konflik sosial yang tertangani menurut Dokumen Rencana Aksi Terpadu(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
6	Persentase laporan Penanganan Konflik Sosial yang tersusun (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
9	Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil						
1	Persentase Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi Ormas/LSM yang diterbitkan (%)	85,00	80,00	42,47	53,09	49,96	↓
2	Persentase Ormas/LSM/LNL yang aktif (%)	100,00	84,07	50,39	59,94	50,39	↓
3	Persentase pembinaan Ormas/LSM/LNL	100,00	100,00	64,06	64,06	64,06	↓
10	Program Pendidikan Politik Masyarakat						
1	Persentase Pembinaan politik di daerah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2	Persentase peningkatan SDM pengurus parpol	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	↓
3	Persentase Penduduk yang menggunakan hak pilih dlm pilkada (%)	75,00	74,00	77,72	105,03	103,63	↑
Rata-rata capaian kinerja					75,42		
Predikat kinerja					Sedang		

Sumber: Satpol PP Kab. Pekalongan, Kesbang Linmas Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Dari tabel diatas, terdapat 16 indikator kinerja program urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mencapai dan melampaui target RPJMD 2016-2021, 1 indikator kinerjanya meningkat dengan cukup baik walaupun belum mencapai target RKPD tahun 2020, dan 8 indikator kinerjanya kurang dari $\leq 65\%$ terhadap target RKPD tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2020 yang mencapai target ada 16 indikator, persentase ketercapaian sebesar 64,00%. Rata-rata capaian kinerja program urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebesar 75,42 predikat penilaian sedang. Ada 16 indikator mencapai predikat kinerja sangat tinggi, 1 indikator mencapai predikat kinerja tinggi, 3 indikator mencapai predikat kinerja rendah, dan 5 indikator kinerja mencapai predikat kinerja sangat rendah. Adapun capaian indikator kinerja program urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 16 indikator yang telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

6) Sosial

Penyelenggaraan Urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Urusan sosial mengampu 11 Program dan 11 Indikator. Berikut capaian target indikator kinerja Urusan Sosial pada tahun 2020.

Tabel 2.156.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Sosial
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
DINAS SOSIAL							
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS Lainnya						
1	Persentase faskir miskin yang menerima pemberdayaan ekonomi (KUBE/UEP/WRSE)	0,43	0,35	0,45	128,57	104,65	↑
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial						
1	Persentase anak yang mendapatkan layanan sosial berbasis keluarga dan masyarakat	100,00	78,53	111,67	142,20	111,67	↑
2	Persentase LUT yang mendapatkan layanan sosial yang berbasis keluarga dan masyarakat	44,64	31,25	33,48	107,14	75,00	△
3	Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS, SIBI, dan SIGI)						
1	Jumlah Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan Pemutakhiran Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Penyandang Masalah	19	19	19	100,00	100,00	↑

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Kesejahteraan Sosial (PMKS) (lokasi)						
4	Program pembinaan penyandang cacat dan trauma						
1	Persentase penyandang disabilitas yang mendapatkan layanan rehabilitasi sosial yang berbasis keluarga dan masyarakat	42,11	31,82	37,44	117,66	88,91	△
5	Program Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)						
1	Jumlah tuna sosial selain orang dengan HIV/AIDS yang mendapatkan rehabilitasi berbasis keluarga dan masyarakat	155	155	157	101,29	101,29	↑
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
1	Persentase Penguatan PSKS dalam penanganan PMKS	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
7	Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial						
1	Jumlah peserta bimbingan pelastarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial	750	750	350	46,67	46,67	↓
8	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial						
1	Jumlah Fasilitas Layanan Santunan Kematian bagi Fakir Miskin (Jiwa)	2.000	2.000	2.000	100,00	100,00	↑
9	Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial						
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH							
10	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan korban Bencana Alam						
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan dukungan logistik penampungan sementara dan phisiko sosial pada saat pasca bencana	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
11	Program Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana						
1	Persentase sarana dan prasarana yang terrehabilitasi dan terekontruksi pasca bencana dalam 1 tahun (%)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	↓
Rata-rata capaian kinerja					86,06		
Predikat kinerja					Tinggi		

Sumber: Dinsos Kab. Pekalongan, BPBD Kab. Pekalongan, 2020 (data diolah)

Dari tabel diatas, terdapat 7 indikator kinerja program urusan sosial mencapai dan melampaui target RPJMD 2016-2021, 2 indikator kinerjanya mencapai melalui target tahun 2020, dan 2 indikator kinerjanya kurang dari ≤ 65% terhadap target RKPD tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan sosial tahun 2020 yang mencapai target ada 9 indikator, persentase indikator yang mencapai target sebesar 81,81%. Rata-rata capaian kinerja program terkait urusan sosial sebesar 86,06 predikat penilaian sangat tinggi. Ada 9 indikator mencapai predikat kinerja sangat tinggi, dan 2 indikator kinerja mencapai predikat kinerja sangat rendah. Adapun capaian indikator kinerja program urusan sosial terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 7 indikator yang telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

Indikator Jumlah peserta bimbingan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial targetnya tidak teralisasi 100% dikarenakan adanya *refocusing* untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19. Target indikator Persentase sarana dan prasarana yang terhabilitasi dan terekonstruksi pasca bencana dalam 1 tahun juga tidak tercapai karena tidak mendapat anggaran untuk Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana.

b. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan melalui 3 program untuk mencapai 17 indikator kinerja. Urusan Tenaga Kerja dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinas PM, PTSP, dan Nakertrans). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan tenaga kerja tahun 2020.

Tabel 2.157.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja						
1	Persentase peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja yang diterima kerja (%)	40,00	35,00	68,07	194,49	170,18	↑
2	Rasio penduduk yang bekerja terhadap angkatan kerja (%)	95,80	95,60	66,26	69,31	69,16	□
2	Program Peningkatan kesempatan Kerja						
1	Jumlah AKAD dan AKAN	1.535	1.500	493	32,87	32,12	↓
2	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan (%)	28,00	28,00	30,95	110,54	110,54	↑
3	Produktivitas Tenaga Kerja (juta rupiah per tenaga kerja)	41,44	39,93	37,61	94,19	90,76	□
4	Jumlah bursa tenaga Kerja (unit)	30	29	34	117,24	113,33	↑
3	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						
1	Persentase kasus perselisihan tenaga kerja yg terselesaikan (%)	95,00	93,00	93,33	100,35	98,24	△
2	Persentase tenaga kerja yang memperoleh jaminan	38,50	37,51	46,09	122,87	119,71	↑

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
	sosial tenaga kerja (Jamsostek) BPJS Ketenagakerjaan (%)						
3	Persentase tenaga kerja yang memperoleh jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) BPJS Kesehatan (%)	32,70	31,7	38,37	121,04	117,34	↑
4	Angka Sengketa Pengusaha pekerja per tahun (%)	100,00	105,00	104,00	100,95	96,00	△
5	Persentase Keselamatan & Perlindungan Tenaga Kerja (%)	36,00	35,00	25,00	71,43	69,44	□
6	Persentase kasus kecelakaan kerja di dalam perusahaan (%)	0,328	0,329	0,31	105,78	105,49	↑
7	Persentase kasus kecelakaan kerja di luar perusahaan (%)	0,215	0,216	0,059	172,69	172,56	↑
8	Persentase Kasus kecelakaan kerja yang meninggal dunia (%)	0,009	0,11	0,1	109,09	-911,11	△
9	UMK ditentukan berdasarkan: $UMK = UMK_{skr} + (UMK_{skr} \times (infasi + PE))$	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
10	Jml peraturan perusahaan/perjanjian kerjasama di perusahaan	12,00	11,5	28,93	251,57	241,08	↑
11	Penerapan struktur dan skala upah	20,00	16,00	63,00	393,75	315,00	↑
Rata-rata capaian kinerja					92,22		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: Dinas PM, PTSP, dan Nakertrans Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Dari tabel diatas, terdapat 10 indikator kinerja program terkait urusan tenaga kerja mencapai dan melampaui target RPJMD 2016-2021, 3 indikator kinerjanya meningkat dengan cukup baik walaupun belum mencapai target RKPD tahun 2020, 3 indikator kinerjanya mencapai melampaui target tahun 2020, dan 1 indikator kinerjanya kurang dari ≤ 65% terhadap target RKPD tahun 2020.

Indikator kinerja program terkait urusan tenaga kerja tahun 2020 yang mencapai target ada 13 indikator, persentase indikator yang mencapai target sebesar 76,47%. Rata-rata capaian kinerja program terkait urusan tenaga kerja sebesar 85,69 predikat penilaian tinggi. Ada 9 indikator mencapai predikat kinerja sangat tinggi, 3 indikator mencapai predikat kinerja tinggi, 1 indikator mencapai predikat kinerja rendah, dan 1 indikator kinerja mencapai predikat kinerja sangat rendah. Adapun capaian indikator kinerja sasaran terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 6 indikator yang telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

Tingkat capaian indikator kinerja program terkait urusan tenaga kerja tahun 2020 terhadap target dari 17 indikator, menunjukkan bahwa sebanyak 14 (82,35%) indikator mencapai predikat kinerja sangat tinggi, 2 (11,76%) indikator mencapai predikat kinerja sedang, sebanyak 1 (5,88%) indikator mencapai predikat kinerja sangat rendah yaitu Jumlah AKAD dan AKAN. Indikator tersebut tidak memenuhi target pada tahun 2020

disebabkan karena efek pandemi covid ini kesempatan kerja menurun, lowongan pekerjaan bagi pencari kerja menurun, banyak perusahaan yang kolaps sehingga banyak PHK dan merumahkan karyawan, serta adanya PSBB menyebabkan proses produksi perusahaan juga menurun.

Tingkat capaian kinerja program bidang tenaga kerja tahun 2020 terhadap target akhir RPJMD sebesar 58,82%, atau 10 indikator kinerja dari 17 telah mencapai target akhir RPJMD, 6 indikator berstatus akan tercapai dan 1 indikator berstatus perlu upaya keras yaitu Persentase Kasus kecelakaan kerja yang meninggal dunia.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan melalui 4 program untuk mencapai 10 indikator kinerja. Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PMD, P3A, dan PPKB). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020.

Tabel 2.158.

Evaluasi Kinerja Program Usuran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan						
1	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung PPPA	1	1	0	0	0	↓
2	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak						
1	% P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) tingkat kabupaten, kecamatan dan desa (%)	27,54	20,98	58,68	279,69	213,07	↑
2	% penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari kekerasan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
3	% PD yang memanfaatkan data SIGA (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
4	Rasio desa/kecamatan menuju Kab. Layak Anak	17,54	14,04	64,91	462,32	370,07	↑
5	Persentase forum anak di tingkat kabupaten dan kecamatan (%)	100,00	80,00	100,00	125,00	100,00	↑
6	Persentase PD yang mengintegrasikan PUG dan PUHA (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
3	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak						
1	Persentase petugas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan (%)	66,36	52,47	38,86	74,06	58,56	□
2	Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur (%)	0,10	0,15	0	200,00	200,00	↑

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Program Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan						
1	Persentase perempuan yang terlatih usaha (%)	20,00	18,00	62,88	349,33	314,4	↑
Rata-rata capaian kinerja					87,41		
Predikat kinerja					Tinggi		

Sumber: Dinas PMD,P3A dan PPKB Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, ada 8 indikator kinerja program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mencapai dan melampaui target RPJMD 2016-2021, 1 indikator kinerjanya meningkat meskipun belum mencapai target tahun 2020, dan 1 indikator kinerjanya kurang dari ≤ 65% terhadap target RKPd tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2020 yang mencapai target ada 8 indikator, persentase indikator yang mencapai target sebesar 70%. Rata-rata capaian kinerja program urusan sosial sebesar 87,41 predikat penilaian tinggi. Ada 8 indikator mencapai predikat kinerja sangat tinggi, 1 indikator mencapai kinerja sedang dan 1 indikator kinerja mencapai predikat kinerja sangat rendah. Adapun capaian indikator kinerja program urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 8 indikator yang telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

3) Bidang Pangan

Urusan Pangan dilaksanakan melalui 2 program untuk mencapai 6 indikator kinerja. Urusan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program bidang pangan tahun 2020.

Tabel 2.159.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Pangan
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan						
1	Jumlah Pengelolaan cadangan pangan pemerintah (ton)	18,00	16,00	22,00	137,50	122,22	↑
2	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah (Komoditas; Pasar; Bln)	9;7;12	9;7;12	9;7;12	100,00	100,00	↑
3	% pengawasan dan pembinaan keamanan pangan segar (%)	66,31	55,78	45,61	81,77	68,78	□
4	% penanganan daerah rawan pangan (%)	73,68	68,42	68,42	100,00	92,86	○
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan						
1	Konsumsi energi dan protein per kapita						
1	^Energi (Kkal/Kap/Hari)	2.150	2.150	2.275	105,81	105,81	↑

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	'-Protein (Gr/Kap/Hari)	57.00	57,00	80,5	141,23	141,23	↑
Rata-rata capaian kinerja					96,96		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: DKPP Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 4 indikator kinerja program urusan pangan mencapai dan melampaui target RPJMD 2016-2021, 1 indikator realisasinya sama dengan target tahun 2020 dan 1 indikator kinerjanya meningkat dengan cukup baik walaupun belum mencapai target RKPD tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan pangan tahun 2020 yang mencapai target ada 5 indikator, persentase ketercapaian sebesar 83,33%. Rata-rata capaian kinerja program urusan pangan sebesar 96,96 predikat penilaian sangat tinggi. Ada 5 indikator mencapai predikat kinerja sangat tinggi, 1 indikator mencapai predikat kinerja sedang. Adapun capaian indikator kinerja program urusan pangan terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 4 indikator yang telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

4) Bidang Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan melalui 1 program untuk mencapai 1 indikator kinerja. Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU TARU). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program bidang pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2020.

Tabel 2.160.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Pertanian
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah						
1	Persentase Penyediaan lahan untuk kepentingan umum (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
Rata-rata capaian kinerja					100,00		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber: DPU Taru Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 1 indikator kinerja program urusan pertanian, indikator tersebut telah mencapai target RPJMD 2016-2021. Indikator kinerja program urusan pertanian tahun 2020 yang mencapai target ada 1 indikator, persentase ketercapaian sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja program urusan pangan sebesar 100

predikat penilaian sangat tinggi. Adapun capaian indikator kinerja program urusan pertanahan terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 1 indikator tersebut telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

5) Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan melalui 3 program untuk mencapai 7 indikator kinerja. Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (Dinas Perkim LH). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program bidang lingkungan hidup tahun 2020.

Tabel 2.161.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program pengendalian pencemaran dan perusakan LH						
1	Persentase Bank Sampah Desa	100,0	90,00	90,00	100,00	90,00	○
2	Persentase sarana pengolahan limbah (%)	100,0	96,00	100,00	104,17	100,00	↑
3	% pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan LH (%)	100,0	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2	Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan LH						
1	Persentase penyediaan informasi LH (%)	100,0	80,95	100,00	123,53	100,00	↑
2	Persentase desa yang tersosialisasi kelestarian lingkungan hidup(%)	17,65	15,44	100,00	647,67	566,57	↑
3	% pembentukan sekolah adiwiyata (%)	100,00	85,71	80,00	93,34	80,00	□
4	% pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
Rata-rata capaian kinerja					99,05		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: Dinas Perkim LH Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, ada 5 indikator kinerja program urusan lingkungan hidup mencapai dan melampaui target RPJMD 2016-2021, 1 indikator realisasinya sama dengan target tahun 2020, dan 1 indikator kinerjanya meningkat dengan cukup baik walaupun belum mencapai target RKPDP tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan lingkungan hidup tahun 2020 yang mencapai target ada 6 indikator, persentase ketercapaian sebesar 85,71%. Rata-rata capaian kinerja program terkait urusan pangan sebesar 99,05 predikat penilaian sangat tinggi. Ada 7 indikator mencapai predikat kinerja sangat tinggi. Adapun capaian indikator kinerja program urusan lingkungan hidup terhadap target akhir RPJMD 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 5 indikator yang telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan melalui 1 program untuk mencapai 6 indikator kinerja. Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020.

Tabel 2.162.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan						
1	Rasio Bayi Berakte Kelahiran (%)	100,00	99,00	95,26	96,22	95,26	<input type="checkbox"/>
2	Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	75,00	70,00	75,18	107,40	100,24	<input type="checkbox"/>
3	Persentase Penduduk Usia 0 - 18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran	100,00	95,00	100,00	105,26	100,00	<input type="checkbox"/>
4	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Per 1000 Penduduk (%)	95,00	90,00	63,27	70,30	66,60	<input type="checkbox"/>
5	Persentase Kepemilikan KTP EL - Pemula Bagi Wajib KTP EL- Pemula	100,00	100,00	98,66	98,66	98,66	<input type="checkbox"/>
6	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	100,00	100,00	75,18	75,18	75,18	<input type="checkbox"/>
Rata-rata capaian kinerja					92,17		
Predikat kinerja					Sangat Tinggi		

Sumber: Dindikcapil Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, ada 2 indikator kinerja program urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, ada 4 indikator kinerjanya meningkat dengan cukup baik walaupun belum mencapai target RKPDP tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020 yang mencapai target ada 2 indikator, persentase ketercapaian sebesar 33,33. Rata-rata capaian kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sebesar 92,17 dengan predikat penilaian sangat tinggi. Ada 4 Indikator mencapai target kinerja sangat tinggi dan 2 indikator mencapai predikat kinerja sedang. Adapun capaian indikator kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 2 indikator telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

7) Pemberdayaan Masyarakat Desa

Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui 9 program untuk mencapai 20 indikator kinerja. Urusan Pemberdayaan

Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PMD, P3A, dan PPKB). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa tahun 2020.

Tabel 2.163.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan						
1	Persentase kelompok pengelola sarana prasarana desa (%)	100,00	95,00	175,23	184,45	175,23	↑
2	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan						
1	Persentase UP2K yang aktif (%)	44,91	39,65	52,88	133,37	117,75	↑
2	Persentase BUMDes yang terbentuk (%)	42,28	36,76	66,18	180,03	156,53	↑
3	Persentase pasar desa yang berfungsi (%)	100,00	93,75	100,00	106,67	100,00	↑
4	Jumlah UED – SP yang aktif (unit)	10	8	21	262,50	210,00	↑
3	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa						
1	Persentase swadaya masyarakat (%)	20,00	19,50	23,15	118,72	115,75	↑
2	Persentase posyandu aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
3	Persentase PKK aktif di kabupaten/kota (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
4	Program Penguatan Kelembagaan Desa / Kelurahan						
1	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ (LPMD) yang aktif (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2	Persentase kelompok binaan LPM yang aktif (%)	61,27	55,15	100,00	181,32	163,21	↑
3	Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang terlatih (%)	80,00	73,09	93,97	128,57	117,46	↑
4	Persentase Pengurus dan Anggota PKK yang terlatih (%)	82,19	72,22	98,54	136,44	119,89	↑
5	Jumlah kelompok masyarakat desa yang aktif (%)	73,16	65,81	100,00	151,95	136,69	↑
5	Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna (TTG)						
1	Persentase pemanfaat TTG yang aktif (%)	15,86	13,79	17,86	129,51	112,61	↑
6	Program Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar						
1	Jumlah kebijakan pengakuan hak-hak masyarakat adat dan budaya lokal	4	3	1	33,33	25,00	↓
2	Jumlah kelompok pelestarian adat dan budaya lokal yang dibentuk Kelompok	19	16	11	68,75	57,89	↓
7	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan						
1	Jumlah kebijakan pembangunan kawasan perdesaan yang disusun	2	2	3	150,00	150,00	↑
2	Jumlah kelompok pelestarian adat dan budaya lokal yang dibentuk Kelompok	20	20	18	90,00	90,00	□
8	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						
1	Persentase perangkat desa yang terlatih (%)	100,00	91,92	88,00	95,74	88,00	□

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9 Program Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa							
1	Persentase Administrasi Pemerintahan Desa yang dibina (%)	100,00	90,00	100,00	111,11	100,00	↑
Rata-rata capaian kinerja					96,89		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: Dinas PMD,P3A Dan PPKB Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 16 indikator kinerja program urusan pemberdayaan masyarakat desa mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, ada 2 indikator kinerjanya meningkat dengan cukup baik walaupun belum mencapai target RKPD tahun 2020, ada 1 indikator kinerjanya rendah, dan ada 1 indikator kinerjanya yang sangat rendah.

Indikator kinerja program urusan pemberdayaan masyarakat desa tahun 2020 yang mencapai target ada 16 indikator, persentase ketercapaian sebesar 80,00. Rata-rata capaian kinerja terkait urusan pemberdayaan masyarakat desa sebesar 96,86 dengan predikat penilaian sangat tinggi. Ada 16 Indikator mencapai target kinerja sangat tinggi, 2 indikator mencapai predikat kinerja tinggi, 1 indikator dengan predikat rendah dan 1 indikator mencapai predikat sangat rendah. Adapun capaian indikator kinerja urusan pemberdayaan masyarakat desa terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 16 indikator telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan melalui 1 program untuk mencapai 10 indikator kinerja. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinas PMD, P3A, dan PPKB)). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2020.

Tabel 2.164.

Evaluasi Kinerja Program Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga							
1	Persentase kelompok tribina terlatih (%)	90,72	83,15	85,01	102,24	93,71	□
2	% penurunan angka ketdkberlangsungan pemakaian (tingkat putus pakai) Kontrasepsi / DO (%)	9,10	9,22	13,51	53,47	51,54	↓
3	Persentase keluarga yang memiliki pemahaman dan kesadaran tentang	51,19	46,19	44,81	97,01	87,54	□

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	fungsi keluarga (%)						
4	Persentase Balita yang mempunyai KKA (%)	100,00	94,54	51,48	54,45	51,48	↓
5	Persentase kelompok BKB HI (%)	28,76	25,23	25,35	100,48	88,14	□
6	Ketersediaan data dan informasi keluarga (pendataan keluarga) yang akurat dan tepat waktu (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
7	Rata-rata jumlah anak per keluarga (anak)	2,24	2,25	2,11	106,22	105,80	↑
8	Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) < 20 tahun (%)	2,31	2,32	1,71	126,29	125,97	↑
9	Persentase anggota BKB, BKR dan BKL yang ber KB	65,50	65,25	78,37	120,11	119,65	↑
10	Persentase anggota UPPKS yang ber-KB (%)	84,50	84,25	84,68	100,51	100,21	↑
Rata-rata capaian kinerja					90,49		
Predikat kinerja					Tinggi		

Sumber: Dinas PMD,P3A, dan PPKB, Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 5 indikator kinerja program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, ada 3 indikator kinerjanya meningkat dengan cukup baik walaupun belum mencapai target RKPD tahun 2020, dan ada 2 indikator kinerjanya yang sangat rendah.

Indikator kinerja program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2020 yang mencapai target ada 8 indikator, presentase ketercapaian sebesar 80,00%. Rata-rata capaian kinerja program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebesar 90,49 dengan predikat penilaian sangat tinggi. Ada 8 Indikator mencapai target kinerja sangat tinggi, dan 2 indikator dengan predikat rendah. Adapun capaian indikator kinerja program urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 5 indikator telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

9) Perhubungan

Urusan Bidang Perhubungan dilaksanakan melalui 4 program untuk mencapai 6 indikator kinerja. Urusan Bidang Perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan. Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program bidang perhubungan tahun 2020.

Tabel 2.165.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Perhubungan
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ						
1	Persentase sarana dan prasarana terminal dengan kondisi yang baik (%)	100,00	95,00	95,00	100,00	95,00	○
2	Persentase alat uji kendaraan bermotor dengan kondisi baik (%)	80,00	70,00	70,00	100,00	87,50	○
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan						
1	Jumlah capaian uji kir kendaraan bermotor	7.798	7.427	6.106	82,21	78,30	□
2	Rasio ijin trayek (jumlah jaringan trayek yang terlayani/ jumlah jaringan trayek yang tersedia)	93,30	86,60	85,40	98,61	91,53	□
3	Program Peningkatan Pengamanan dan pengendalian Lalu Lintas						
1	Persentase ketersediaan prasarana keselamatan jalan (%)	100,00	95,00	95,00	100,00	95,00	○
4	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor						
1	Persentase ketersediaan alat uji kendaraan bermotor (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
Rata-rata capaian kinerja					96,80		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, ada 1 indikator kinerja program urusan perhubungan mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, 3 indikator kinerjanya sama dengan target RKPD tahun 2020, 2 indikator kinerjanya meningkat dengan cukup baik walaupun belum mencapai target RKPD tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan perhubungan tahun 2020 yang mencapai target ada 4 indikator, presentase ketercapaian sebesar 66,66. Rata-rata capaian kinerja program terkait perhubungan sebesar 96,60 dengan predikat penilaian sangat tinggi. Ada 5 Indikator mencapai target kinerja sangat tinggi, dan 1 indikator dengan predikat tinggi. Adapun capaian indikator kinerja program urusan perhubungan terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 1 indikator telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

10) Komunikasi dan Informatika

Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan melalui 4 program untuk mencapai 9 indikator kinerja. Urusan Bidang Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi. Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program bidang komunikasi dan informasi tahun 2020.

Tabel 2.166.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa						
1	Persentase optimalisasi jaringan komunikasi dan informasi layanan publik (%)	100,00	95,00	100	105,26	100,00	↑
2	Jumlah sistem informasi Pemerintah kabupaten (sistem)	11	11	70	636,36	636,36	↑
3	Persentase kajian dan penelitian untuk menetapkan kebijakan di bidang Kominfo (%)	100,00	90,00	100,00	111,11	100,00	↑
2	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa						
1	Persentase pembinaan anggota forum komunikasi media Tradisional (%)	100,00	100,00	100	100,00	100,00	↑
2	Persentase kerjasama informasi dan media massa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
3	Program Pengelolaan Jaringan Komunikasi						
1	Persentase pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2	Persentase ketersediaan infrastruktur TIK (%)	100,00	90,00	55,55	61,71	55,55	↓
4	Program Peningkatan Kualitas Diseminasi Informasi						
1	Persentase perempuan yang terlatih usaha (%)	100,00	100,00	0	0	0	↓
2	Persentase pelaksanaan diseminasi informasi kebijakan nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten (%)		100,00	100,00	100,00	100,00	↑
Rata-rata capaian kinerja					84,63		
Predikat kinerja					Tinggi		

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, Kab. Pekalongan , 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 7 indikator kinerja program urusan komunikasi dan informatika mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, 2 indikator kinerjanya kurang dari ≤ 65% terhadap target RKPd Tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan komunikasi dan informatika tahun 2020 yang mencapai target ada 7 indikator, presentase ketercapaian sebesar 77,78. Rata-rata capaian kinerja program urusan komunikasi dan informatika sebesar 84,63 dengan predikat penilaian sangat tinggi. Ada 7 Indikator mencapai target kinerja sangat tinggi, 1 indikator dengan capaian predikat rendah dan 1 indikator capaian kinerjanya sangat rendah. Adapun capaian indikator kinerja program urusan komunikasi dan informatika terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 7 indikator telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

11) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan melalui 5 program untuk mencapai 7 indikator kinerja. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Dinperindagkop dan UKM). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tahun 2020.

Tabel 2.167.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif						
1	Persentase jumlah usaha mikro terhadap jumlah UMKM (%)	88,88	88,60	84,65	95,94	95,24	□
2	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM						
1	Jumlah UKM yang berkembang (unit)	44.980	44.930	45.683	101,68	101,56	↑
3	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah						
1	Jumlah UKM binaan (unit)	788	738	825	111,79	104,70	↑
4	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi						
1	Jumlah koperasi/KUD (unit)	620	605	623	102,98	100,48	↑
2	Persentase koperasi aktif (%)	52,00	51,00	37,56	73,65	72,23	□
3	Persentase koperasi Sehat (%)	28,50	28,20	35,04	124,26	122,95	↑
5	Program Peningkatan kualitas Pembiayaan koperasi						
1	Persentase koperasi yang mendapatkan pembiayaan (%)	33,00	32,00	18,29	57,18	55,42	↓
Rata-rata capaian kinerja					89,54		
Predikat kinerja					Tinggi		

Sumber: Dinperindagkop dan UKM Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 4 indikator kinerja program urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, 2 indikator kinerjanya meningkat tetapi belum mencapai target RKPD tahun 2020, 1 indikator kinerjanya kurang dari ≤ 65% terhadap target RKPD Tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah tahun 2020 yang mencapai target ada 4 indikator, presentase ketercapaian sebesar 57,14. Rata-rata capaian kinerja program urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah sebesar 89,54 dengan predikat penilaian tinggi. Ada 5 Indikator mencapai target kinerja sangat tinggi, 1 indikator dengan capaian predikat sedang., dan 1 indikator capaian kinerjanya sangat rendah. Adapun capaian indikator kinerja program urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 4 indikator telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

12) Penanaman Modal

Urusan Penanaman Modal dilaksanakan melalui 2 program untuk mencapai 2 indikator kinerja. Urusan Penanaman Modal dilaksanakan oleh DINAS PM, PTSP DAN NAKER. Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan penanaman modal tahun 2020.

Tabel 2.168.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Penanaman Modal
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi						
1	Jumlah penyelenggaraan promosi dan kerja sama investasi (kali)	6	6	6	100,00	100,00	↑
2	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi						
1	Jumlah Pelayanan perijinan dan non Perijinan melalui PTSP (ijin)	4.344	4.259	4.951	116,25	113,97	↑
Rata-rata capaian kinerja					100		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: Dinas PM, PTSP DAN NAKERTRANS Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 indikator kinerja program urusan Penanaman Modal mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja program urusan Penanaman Modal tahun 2020 mencapai target semua yaitu 2 indikator, presentase ketercapaian sebesar 100. Rata-rata capaian kinerja program urusan Penanaman Modal sebesar 100 dengan predikat penilaian sangat tinggi. Adapun capaian indikator kinerja program terkait urusan Penanaman Modal terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa 2 indikator telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

13) Kepemudaan dan Olah Raga

Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan melalui 2 program untuk mencapai 9 indikator kinerja. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata (Dinporapar). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2020.

Tabel 2.169.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Kepemudaan dan Olah Raga
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda						
1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang aktif (%)	78,00	78,00	78,00	100,00	100,00	↑
2	Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat	6	6	0	0,00	0,00	↓

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Provinsi						
3	Jumlah Prestasi Pemuda Tingkat Nasional	2	2	0	0,00	0,00	↓
4	Persentase Organisasi Pemuda yang dibina (%)	76,19	76,19	76,6	100,54	100,54	↑
5	Jumlah pemuda pelopor berprestasi tingkat Kab/Prov/Nas	13	13	0	0,00	0,00	↓
6	Jumlah kelompok wirausaha pemuda	19	18	18	100,00	94,74	○
7	Jumlah pemuda yang memiliki pengetahuan tentang P4GN	290	240	240	100,00	82,76	○
2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga						
1	Persentase organisasi olahraga yang aktif (%)	81,00	77,00	63,89	82,97	78,88	□
2	Persentase pelaksanaan pembinaan terhadap atlet, pelatih dan wasit cabang olahraga (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
Rata-rata capaian kinerja					64,77		
Predikat kinerja					Rendah		

Sumber: Dinporapar Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 indikator kinerja program urusan Kepemudaan dan Olah Raga mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, 2 indikator kerjanya sama dengan target RKPD tahun 2020, 1 indikator meningkat capaian indikatornya tetapi belum mencapai target tahun 2020, dan 3 indikator capaian kerjanya kurang dari ≤ 65% terhadap target RKPD Tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan Kepemudaan dan Olah Raga tahun 2020 yang mencapai target ada 5 indikator, presentase ketercapaian sebesar 71,43. Rata-rata capaian kinerja program urusan Kepemudaan dan Olah Raga sebesar 64,77 dengan predikat penilaian rendah. Ada 5 Indikator mencapai target kinerja sangat tinggi, 1 indikator dengan capaian predikat tinggi, dan 2 indikator capaian kerjanya sangat rendah. Adapun capaian indikator kinerja program urusan Kepemudaan dan Olah Raga terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa ada 3 indikator telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

14) Statistik

Urusan Statistik dilaksanakan melalui 1 program untuk mencapai 1 indikator kinerja. Urusan Statistik dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan statistik tahun 2020.

Tabel 2.170.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Statistik
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah						
1	Tersedianya data statistik umum, dasar, dan sektoral skala kabupaten (jenis)	4	4	4	100	100	↑
Rata-rata capaian kinerja					100		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: Dinkominfo Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 1 indikator kinerja program urusan statistik mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja program urusan statistik tahun 2020 mencapai target, persentase ketercapaian sebesar 100. Rata-rata capaian kinerja program urusan statistik sebesar 100 dengan predikat penilaian sangat tinggi. Adapun capaian indikator kinerja program urusan statistik terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa 1 indikator telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

15) Persandian

Urusan Persandian dilaksanakan melalui 1 program untuk mencapai 3 indikator kinerja. Urusan Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan persandian tahun 2020.

Tabel 2.171.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Persandian
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)
1	Program Optimalisasi Sistem Persandian Daerah						
1	Ketersediaan SOP Persandian	10	10	10	100,00	100,00	↑
2	Tingkat Kapasitas SDM Persandian	3	3	3	100,00	100,00	↑
3	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SOP Persandian	19	19	19	100,00	100,00	↑
Rata-rata capaian kinerja					100		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: Dinkominfo Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 indikator kinerja program urusan persandian mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021. Indikator kinerja program urusan persandian tahun 2020 mencapai

target, presentase ketercapaian sebesar 100. Rata-rata capaian kinerja program urusan statistik sebesar 100 dengan predikat penilaian sangat tinggi. Adapun capaian indikator kinerja program urusan statistik terhadap target akhir RPJMD tahun 2016-2021 menunjukkan bahwa 3 indikator telah mencapai target RPJMD 2016-2021.

16) Kebudayaan

Urusan Kebudayaan dilaksanakan melalui 2 program untuk mencapai 4 indikator kinerja. Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program Urusan kebudayaan tahun 2020.

Tabel 2.172.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Kebudayaan
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pengembangan Nilai Budaya						
1	Jumlah penyelenggaraan pegelaran, festival seni & budaya (keg)	85	84	2	2,38	2,35	↓
2	Cakupan SDM Kesenian (%)	68,00	66,00	62,00	93,94	91,18	□
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya						
1	Jumlah Grup Kesenian yang dibina (unit)	119	114	104	91,23	87,39	□
2	Jumlah Misi Kesenian (kali)	19	16	2	12,50	10,53	↓
Rata-rata capaian kinerja					50,01		
Predikat kinerja					Sangat rendah		

Sumber: Dindikbud Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 indikator kinerja program urusan kebudayaan meningkat capaian kerjanya tetapi tidak mencapai target RKPd tahun 2020 dan 2 indikator capaian kerjanya kurang dari ≤ 65% terhadap target RKPd Tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan kebudayaan tahun 2020 tidak ada yang mencapai target Rata-rata capaian kinerja program urusan kebudayaan sebesar 50,01 dengan kriteria sangat rendah. Ada 2 Indikator mencapai target kinerja sangat tinggi, dan 2 indikator mencapai target kinerja sangat rendah. Belum ada indikator kinerja program urusan kebudayaan mencapai target akhir RPJMD tahun 2016-2021.

17) Perpustakaan

Urusan Perpustakaan dilaksanakan melalui 1 program untuk mencapai 4 indikator kinerja. Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program Urusan Perpustakaan tahun 2020.

Tabel 2.173.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Perpustakaan
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan						
1	Koleksi buku yang tersedia dipergustakaan	45.216	44.166	52.778	119,50	116,72	↑
2	Persentase SDM Perpustakaan yang telah mengikuti Bintek Perpustakaan (%)	100,00	95,00	0,00	0,00	0,00	↓
3	Persentase pengembangan perpustakaan (%)	53,33	52,63	187	355,00	350,00	↑
4	Persentase Perpustakaan desa yang memenuhi standard perpustakaan (%)	50,00	45,00	45,00	100,00	90,00	○
Rata-rata capaian kinerja					75		
Predikat kinerja					Sedang		

Sumber: Dinarpus Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 indikator kinerja program urusan perpustakaan mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, 1 indikator mencapai target sama dengan target RKPDP tahun 2020, dan 1 indikator capaian kinerjanya kurang dari $\leq 65\%$ terhadap target RKPDP Tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan perpustakaan yang mencapai target RKPDP tahun 2020 sebanyak 3 indikator atau sebesar 75,00%. Rata-rata capaian kinerja program urusan perpustakaan sebesar 75,00 dengan kriteria sedang. 3 Indikator mencapai target kinerja sangat tinggi, dan 1 indikator mencapai target kinerja sangat rendah. Ada 2 indikator kinerja program urusan perpustakaan mencapai target akhir RPJMD tahun 2016-2021.

18) Kearsipan

Urusan Kearsipan dilaksanakan melalui 4 program untuk mencapai 7 indikator kinerja. Urusan Kearsipan dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan kearsipan tahun 2020.

Tabel 2.174.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Kearsipan
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan						
1	Persentase Penyusunan Pedoman Kearsipan	100,00	81,25	84,61	104,14	84,61	△

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah						
1	Persentase alih media arsip tekstual permanen ke media elektronik (%)	20,00	17,5	20	114,3	100,00	↑
2	Jumlah Penyelamatan Arsip Tekstual	153.233	143.233	224591	156,00	146,57	↑
3	Persentase PD yang melakukan pengelolaan arsip secara baik (%)	43,48	39,13	39,13	100,00	89,99	○
3	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan						
1	Persentase PD yang terfasilitasi sarana prasarana arsip (%)	100,00	95,00	88,40	93,05	88,40	□
4	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi						
1	Jumlah pengunjung/pengguna arsip (kunjungan per tahun)	100,00	95,00	150,00	157,89	150,00	↑
2	Persentase SDM yang memiliki kompetensi pelayanan arsip sesuai standard (%)	88,89	66,67	92,31	138,46	103,85	↑
Rata-rata capaian kinerja					99,01		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: Dinarpus Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 4 indikator kinerja program urusan kearsipan mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, 1 indikator mencapai target sama dengan target RKPd tahun 2020, dan 1 indikator meningkat capaian kinerjanya tetapi tidak mencapai target RKPd tahun 2020.

Indikator kinerja program terkait urusan kearsipan yang mencapai target RKPd tahun 2020 sebanyak 6 indikator atau sebesar 85,71%. Rata-rata capaian kinerja program urusan kearsipan sebesar 99,01 dengan kriteria sangat tinggi. Semua Indikator yaitu sebanyak 7 indikator mencapai target kinerja sangat tinggi, Ada 4 indikator kinerja program urusan kearsipan mencapai target akhir RPJMD tahun 2016-2021.

c. Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui 5 program untuk mencapai 7 indikator kinerja. Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program Urusan kelautan dan perikanan tahun 2020.

Tabel 2.175.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pengembangan Perikanan Budidaya						
1	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Tambak (ton)	8.160,67	7.626,80	7,135,43	93,56	87,44	□
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya Kolam (ton)	1.475,32	1.366,03	1.381,31	101,12	93,63	△
3	Jumlah Produksi Benih BBI (ekor)	1.310.614	1.248.203	1.286.633	103,08	98,17	△
2	Program Pengembangan Perikanan Tangkap						
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	4.500,00	4.245,30	5.381,26	126,76	119,58	↑
3	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan						
1	Tingkat Konsumsi Makan Ikan (Kg/Kapita/Tahun)	24,20	23,5	23,69	100,81	97,89	△
4	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Laut, Air Payau dan Air Tawar						
1	Jumlah Produksi Penangkapan Ikan di Perairan Umum (ton)	293,50	275,90	276,07	100,06	94,06	△
5	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan						
1	Prosentase pemenuhan Data Statistik Kelautan dan Perikanan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
Rata-rata capaian kinerja					99,08		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber : Dinlutkan Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, ada 2 indikator kinerja program urusan Kelautan dan Perikanan mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, 4 indikator mencapai melampaui target RKPDP tahun 2020, dan 1 indikator meningkat capaian kinerjanya tetapi tidak mencapai target RKPDP tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan Kelautan dan Perikanan yang mencapai target RKPDP tahun 2020 sebanyak 6 indikator atau sebesar 85,71%. Rata-rata capaian kinerja program urusan Kelautan dan Perikanan sebesar 99,08 dengan kriteria sangat tinggi. Semua Indikator yaitu sebanyak 7 indikator mencapai target kinerja sangat tinggi, Ada 2 indikator kinerja program urusan Kelautan dan Perikanan mencapai target akhir RPJMD tahun 2016-2021.

2) Pariwisata

Urusan Pariwisata dilaksanakan melalui 3 program untuk mencapai 3 indikator kinerja. Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga dan Pariwisata (Dinporapar). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan pariwisata tahun 2020.

Tabel 2.176.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Pariwisata
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						
1	Persentase pelaksanaan promosi pariwisata	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata						
1	Persentase jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan	100,00	100,00	93,75	93,75	93,75	□
3	Program Pengembangan Kemitraan						
1	Persentase pelaksanaan kerjasama dengan mitra pariwisata (Pokdarwis)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
Rata-rata capaian kinerja					97,92		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: Dinporapar Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 indikator kinerja program urusan pariwisata mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, dan 1 indikator meningkat capaian kerjanya tetapi tidak mencapai target RKPD tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan pariwisata yang mencapai target RKPD tahun 2020 sebanyak 2 indikator atau sebesar 66,67%. Rata-rata capaian kinerja program urusan pariwisata sebesar 97,92 dengan kriteria sangat tinggi. Dua Indikator urusan pariwisata mencapai target kinerja sangat tinggi, Ada 2 indikator kinerja program urusan pariwisata mencapai target akhir RPJMD tahun 2016-2021.

3) Pertanian

Urusan Pertanian dilaksanakan melalui 8 program untuk mencapai 28 indikator kinerja. Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP). Berikut adalah capaian indikator kinerja program urusan pertanian tahun 2020.

Tabel 2.177.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Pertanian
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani						
1	Persentase penyelenggaraan pelatihan Gapoktan PUAP (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian / Perkebunan						
1	Produktivitas bahan pangan utama lokal:						
	- Padi (kuintal/ha)	52,54	52,52	53,02	100,95	100,91	↑
	- Jagung (kuintal/ha)	46,84	46,34	52,15	112,54	111,34	↑
	- Kedelai (kuintal/ha)	11,05	11,03	14,04	127,29	127,06	↑
2	Produksi komoditas						

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	hortikultura:						
	- Durian (kuintal)	105.979	104.881	105.581	100,67	99,62	△
	- Mangga (kuintal)	124.614	120.984	125.874	104,04	101,01	↑
	- Pisang (kuintal)	224.052	219.659	219.965	100,14	98,18	△
	- Rambutan (kuintal)	56.763	56.201	56.214	100,02	99,03	△
	- Kentang (ton)	15.591	15.285	15.411	100,82	98,85	△
	- Bawang daun (ton)	5.033	4.784	4.912	102,68	97,60	△
	- Alpukat (kuintal)	2.568	2.543	5.841	222,69	222,45	↑
	- Manggis (kuintal)	8.051	7.971	8.714	109,32	108,24	↑
	- Cabe (kuintal)	11.444	11.348	11.741	103,46	102,60	↑
	- Jambu Air (kuintal)	12.482	12.359	12.541	101,47	100,47	↑
3	Program Peningkatan pemasaran hasil produksi Pertanian/ Perkebunan						
1	Persentase peningkatan pengetahuan pelaku agribisnis (%)	50,13	44,37	47,09	106,13	93,94	△
2	Persentase penyelenggaraan event-event promosi hasil produksi Pertanian/ Perkebunan (%)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	↓
4	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan						
1	Produksi komoditas Perkebunan:						
	- Kelapa (butir)	21.719.509	20.884.143	24.301.110	116,36	111,89	↑
	- Tebu (kuintal)	1.417.226	1.362.718	713.415	52,35	50,34	↓
	- Cengkeh (ton)	229.72	220,88	488,13	220,99	212,49	↑
	- Kopi (ton)	543,00	522	658	126,05	121,18	↑
5	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan						
1	Persentase Penerapan teknologi bagi petani(%)	42,11	36,84	37,54	101,90	89,15	△
6	Program peningkatan produksi hasil peternakan						
1	Populasi produksi komoditas peternakan utama						
	- sapi potong (ekor)	22.682	22.617	22.650	100,15	99,86	△
	- kambing (ekor)	51.247	51.070	51.112	100,08	99,74	△
2	Produksi ternak						
	- daging (Kg)	9.357.567	9.072.772	9.073.782	100,01	96,97	△
	- telur (Kg)	5.730.821	5.648.952	5.648.954	100,00	98,57	△
	- susu (liter)	357.948	357.806	365.094	102,04	102,00	↑
7	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak						
1	Persentase penanganan penyakit hewan (%)	83,00	77,00	72,22	100,29	93,04	△
8	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan						
1	Persentase Penyelenggaraan penyuluhan Pertanian/Perkebunan (%)	78,44	77,34	88,51	114,44	112,84	↑
Rata-rata capaian kinerja					94,73		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: DKPP Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 14 indikator kinerja program urusan pertanian mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, 12 indikator mencapai melampaui target RKPD tahun 2020 dan 2 indikator capaian kinerjanya kurang dari $\leq 65\%$ terhadap target RKPD Tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan pertanian yang mencapai target RKPD tahun 2020 sebanyak 26 indikator atau sebesar 92,86%. Rata-rata capaian kinerja program urusan pertanian sebesar 94,73 dengan kriteria sangat tinggi. 1 indikator mencapai target dengan kriteria rendah, dan 1 indikator mencapai target kinerja sangat rendah, ada 15 indikator kinerja program urusan pertanian mencapai target akhir RPJMD tahun 2016-2021.

4) Perdagangan

Urusan Perdagangan dilaksanakan melalui 4 program untuk mencapai 6 indikator kinerja. Urusan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, UKM (Dinperindagkop dan UKM). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan perdagangan tahun 2020.

Tabel 2.178.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Perdagangan
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan						
1	Jumlah UTP yang ditera	425	406	928	228,57	218,35	↑
2	Persentase penyelesaian sengketa konsumen (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2	Program Peningkatan dan Pengembangan ekspor						
1	Nilai Ekspor (US \$)	30.500	30.400	14.288.66	47,00	46,85	↓
3	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri						
1	Jumlah Unit Usaha Perdagangan (unit)	12.000	11.850	14.239	120,16	118,66	↑
4	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar Tradisional						
1	Jumlah Pasar dengan kondisi sehat (pasar)	9	9	9	100,00	88,89	○
2	Persentase realisasi retibusi pasar terhadap target (%)	100,00	100,00	70,52	70,52	70,52	□
Rata-rata capaian kinerja					86,25		
Predikat kinerja					Tinggi		

Sumber: Dinperindagkop dan UKM Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, ada 3 indikator kinerja program urusan perdagangan mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, 1 indikator mencapai target sama dengan RKPD tahun 2020, 1 indikator capaian indikatornya meningkat tetapi tidak mencapai target RKPD tahun 2020, dan 1 indikator capaian kinerjanya kurang dari $\leq 65\%$ terhadap target RKPD Tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan perdagangan yang mencapai target RKPD tahun 2020 sebanyak 4 indikator atau sebesar 66,67%. Rata-

rata capaian kinerja program urusan perdagangan sebesar 86,25 dengan kriteria tinggi. Empat indikator mencapai target dengan kriteria sangat tinggi, dan 1 indikator mencapai target kinerja sedang, 1 indikator sangat rendah, Ada 3 indikator kinerja program urusan perdagangan mencapai target akhir RPJMD tahun 2016-2021.

5) Perindustrian

Urusan Perindustrian dilaksanakan melalui 2 program untuk mencapai 2 indikator kinerja. Urusan Perindustrian dilaksanakan oleh Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi, UKM (Dinperindagkop dan UKM). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program Urusan Perindustrian tahun 2020.

Tabel 2.179.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Perindustrian
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Program Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi							
1	Cakupan Bina Kelompok (%)	81,00	80,00	80,00	100,00	98,77	○
2 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							
1	Persentase industri kecil dan menengah yang berkembang (%)	28,00	26,00	26,00	100,00	92,86	○
Rata-rata capaian kinerja					100		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: Dinperindagkop dan UKM Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 2 indikator kinerja program urusan Perindustrian mencapai sama dengan target RKPD tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan Perindustrian mencapai target RKPD tahun 2020 sebanyak 2 indikator atau sebesar 1007%. Rata-rata capaian kinerja program urusan Perindustrian sebesar 100 dengan kriteria sangat tinggi. Belum ada indikator kinerja program urusan Perindustrian mencapai target akhir RPJMD tahun 2016-2021.

6) Transmigrasi

Urusan Transmigrasi dilaksanakan melalui 1 program untuk mencapai 2 indikator kinerja. Urusan Transmigrasi dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (Dinas PM,PTSP, dan Naker). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan transmigrasi tahun 2020.

Tabel 2.180.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Transmigrasi
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi							

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigran (KK)	5	5	0	0,00	0,00	↓
2	Jumlah calon transmigran/animo (KK)	14	12	12	100,00	85,71	○
Rata-rata capaian kinerja					50		
Predikat kinerja					Sangat rendah		

Sumber: Dinas PM,PTSP, dan Nakertrans, Kab. Pekalongan 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 1 indikator kinerja program urusan transmigrasi mencapai target sama dengan RKPD tahun 2020 dan 1 indikator capaian kinerjanya kurang dari ≤ 65% terhadap target RKPD Tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan Transmigrasi yang mencapai target RKPD tahun 2020 sebanyak 1 indikator atau sebesar 50%. Rata-rata capaian kinerja program urusan transmigrasi sebesar 50 dengan kriteria sangat rendah. Belum ada indikator kinerja program urusan transmigrasi mencapai target akhir RPJMD tahun 2016-2021.

d. Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Urusan Perencanaan dilaksanakan melalui 4 program untuk mencapai 7 indikator kinerja. Urusan Perencanaan dilaksanakan oleh Bappeda Litbang. Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan perencanaan tahun 2020.

Tabel 2.181.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Perencanaan
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
1	Jumlah dokumen perencanaan yg disusun dng Perkada (dokumen)	2	2	2	100,00	100,00	↑
2	Persentase wanita dlm partisipasi musrenbang (%)	30,00	30,00	39,05	130,17	130,17	↑
2	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi						
1	Persentase hasil kajian bidang ekonomi yang ditindaklanjuti PD (%)	90,00	80,00	100	125,00	111,11	↑
2	Rasio jumlah klaster yang meningkat omsetnya (kesejahteraanya) dengan jumlah klaster yang dibina	7:7	6:7	10:11	106,06	90,91	△
3	Program Perencanaan Sosial Budaya						
1	Persentase hasil kajian bidang pemerintahan dan sosial budaya yang ditindaklanjuti PD (%)	100,00	90,00	97,78	108,64	97,78	△
2	Persentase dokumen perencanaan bidang	85,00	80,00	100,00	125,00	117,65	↑

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	pemerintahan dan sosial budaya yang ditindaklanjuti PD (%)						
4	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Tata Ruang						
1	Persentase dokumen perencanaan penunjang prasarana wilayah SDA dan Tata Ruang yg ditindaklanjuti (%)	70,00	60,00	100,00	166,67	142,86	↑
Rata-rata capaian kinerja					100		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 5 indikator kinerja program urusan Perencanaan mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, 2 indikator mencapai melebihi target RKPd tahun 2020 sama dengan RKPd tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan perencanaan semua mencapai target RKPd tahun 2020 sebanyak 7 indikator atau sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja program urusan perencanaan sebesar 100 dengan kriteria sangat tinggi. Empat indikator mencapai target dengan kriteria sangat tinggi, dan 1 indikator mencapai target kinerja sedang, 1 indikator sangat rendah, Ada 5 indikator kinerja program urusan perencanaan mencapai target akhir RPJMD tahun 2016-2021.

2) Keuangan

Urusan Keuangan dilaksanakan melalui 2 program untuk mencapai 4 indikator kinerja. Urusan keuangan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan Keuangan tahun 2020.

Tabel 2.182.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Keuangan Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah						
1	Ketepatan waktu penyusunan Laporan Keuangan Daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2	Persentase capaian PAD terhadap target	100,00	100,00	65,96	65,96	65,96	□
3	Ketepatan penyusunan Raperda APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2	Program Pengelolaan Aset Daerah						
1	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab. Pekalongan	60,00	100,00	102,35	102,35	170,58	↑
Rata-rata capaian kinerja					91,49		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: BPKD Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 3 indikator kinerja program urusan keuangan mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, 1 indikator capaian indikatornya meningkat tetapi tidak mencapai target RKPD tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan keuangan yang mencapai target RKPD tahun 2020 sebanyak 3 indikator atau sebesar 75%. Rata-rata capaian kinerja program urusan keuangan sebesar 91,49 dengan kriteria sangat tinggi. Tiga indikator mencapai target dengan kriteria sangat tinggi, dan 1 indikator mencapai target kinerja rendah. Ada 3 indikator kinerja program urusan keuangan mencapai target akhir RPJMD tahun 2016-2021.

3) Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan melalui 2 program untuk mencapai 9 indikator kinerja. Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Dan Pelatihan (BKD Diklat). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan tahun 2020.

Tabel 2.183.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
1	Persentase terpeliharanya aplikasi dan website kepegawaian selaras dengan terwujudnya pengelolaan arsip pegawai serta akurasi database yang tertib dan profesional (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2	Terlayannya pengajuan Karis, karsu dan karpeg	4.100	4.100	4.184	102,05	105,05	↑
3	Tingkat pengelolaan arsip kepegawaian yang tertib dan profesional (OPD)	80,00	78,00	78,00	100,00	97,50	○
2	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						
1	Tertibnya urusan kepegawaian PD	237	237	279	117,72	117,72	↑
2	Pahaminya PNS terhadap peraturan perundang - undangan	100,00	80,00	80,00	100,00	100,00	↑
3	Persentase penyelesaian administrasi kepegawaian yang tepat waktu (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
4	Persentase penyelenggara negara yang telah melaporkan harta kekayaan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
5	Persentase penanganan pelanggaran disiplin dan ijin perceraian (%)	100,00	86,18	80,37	93,26	80,37	□
6	Persentase PNS yang tepat untuk menduduki jabatan pimpinan tertinggi serta terwujudnya obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan, pembinaan, pemberhentian jabatan struktural	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
Rata-rata capaian kinerja					97,54		

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: BKD Diklat Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 8 indikator kinerja program urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, dan 1 indikator capaian indikatornya meningkat tetapi tidak mencapai target RKPd tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan yang mencapai target RKPd tahun 2020 sebanyak 8 indikator atau sebesar 88,89%. Rata-rata capaian kinerja program urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar 94,54 dengan kriteria sangat tinggi. Sembilan indikator mencapai target dengan kriteria sangat tinggi. Ada 7 indikator kinerja program urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan mencapai target akhir RPJMD tahun 2016-2021.

4) Penelitian dan Pengembangan

Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan melalui 1 program untuk mencapai 4 indikator kinerja. Urusan Penelitian dan Pengembangan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang). Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan penelitian dan pengembangan tahun 2020.

Tabel 2.184.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Penelitian dan Pengembangan						
1	Jumlah hasil riset	6	6	6	100,00	100,00	↑
2	Persentase Penerapan Hasil Riset (%)	30,00	30,00	30,00	100,00	100,00	↑
3	Jumlah hasil kreatifitas dan inovasi teknologi masyarakat	5	5	5	100,00	100,00	↑
4	Persentase hasil tindak lanjut kerja sama kelitbangan	33,33	33,33	33,33	100,00	100,00	↑
Rata-rata capaian kinerja					100		
Predikat kinerja					Sangat tinggi		

Sumber: Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 8 indikator kinerja program terkait urusan Penelitian dan Pengembangan mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021. Semua indikator kinerja program terkait urusan Penelitian dan Pengembangan sebanyak 4 indikator mencapai target RKPd tahun 2020 atau sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja program terkait urusan Penelitian dan Pengembangan sebesar 100 dengan

kriteria sangat tinggi. Semua indikator kinerja program terkait urusan Penelitian dan Pengembangan telah mencapai target akhir RPJMD tahun 2016-2021.

5) Pengawasan

Urusan Pengawasan dilaksanakan melalui 3 program untuk mencapai 5 indikator kinerja. Urusan Pengawasan dilaksanakan oleh Inspektorat. Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan pengawasan tahun 2020.

Tabel 2.185.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Pengawasan
Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan						
1	Persentase pejabat fungsional P2UPD dan Auditor yang bersertifikat kompetensi (%)	100,00	93,33	97,14	104,08	97,14	△
2	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan						
1	Persentase perbup di bidang pengawasan terhadap lingkup tugas pengawasan (kebijakan, pemeriksaan, evaluasi, reviu, monitoring, asistensi) (%)	100,00	90,00	93,33	103,7	93,33	△
3	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah						
	Persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan (%)						
	- BPK (%)	93,00	92,00	94,22	102,41	101,31	↑
	- Provinsi (%)	96,00	95,50	100,00	104,71	104,17	↑
	- Kabupaten (%)	98,00	97,50	98,63	101,16	100,64	↑
Rata-rata capaian kinerja					100		
Persentase realisasi retibusi pasar terhadap target (%)					Sangat tinggi		

Sumber: Inspektorat Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 indikator kinerja program urusan Pengawasan mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, dan 2 indikator capaian indikatornya mencapai melebihi target RKPD tahun 2020.

Indikator kinerja program urusan Pengawasan yang mencapai target RKPD tahun 2020 sebanyak 5 indikator atau sebesar 100%. Rata-rata capaian kinerja program urusan Pengawasan sebesar 100 dengan kriteria sangat tinggi. Semua indikator mencapai target kinerja dengan kriteria sangat tinggi. Ada 3 indikator kinerja program urusan Pengawasan mencapai target akhir RPJMD tahun 2016-2021.

6) Pemerintahan Umum

Urusan Pemerintahan Umum dilaksanakan melalui 11 program untuk mencapai 25 indikator kinerja. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, dan

Kecamatan. Berikut adalah tabel capaian indikator kinerja program urusan pemerintahan umum tahun 2020.

Tabel 2.186.
Evaluasi Kinerja Program Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Pekalongan tahun 2020

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SETDA							
1 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM							
1	% perkara yg terselesaikan tepat wkt(%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2	Persentase perkara yang terselesaikan dan besaran bantuan hukum kepada masyarakat miskin (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2 Program Penataan Peraturan Perundang-undangan							
1	% Raperda yg menjadi Perda tepat waktu (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
2	Persentase Raperbup yang menjadi Perbup tepat waktu (%)	100,00	100,00	153,00	153,00	153,00	↑
3 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum							
1	Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang bersertifikasi ISO	4	4	0	0	0	↓
2	Jml UPP yang melakukan pengukuran IKM	3	2	44	2200	1466,67	↑
3	% meningkatnya kesepakatan MoU dan tindak lanjut kerjasama dengan PD Kab/kota, Provinsi dan Pusat (%)	50,00	45	150	428,57	300	↑
4 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah							
1	Tingkat pelayanan kedinasan KD dan Wakil KD (%)	100,00	100,00	102,00	102,00	102,00	↑
5 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat							
1	Persentase Anak dari keluarga miskin yang dkhitan*) (%)	100,00	64,29	45,50	70,77	45,50	□
2	Persentase Terfasilitasinya penyelenggaraan ibadah haji (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
6 Program Peningkatan Capaian Kinerja Aparatur							
7 Program Penyelenggaraan Koordinasi Sumber Daya Alam							
1	Jenis potensi SDA yang teridentifikasi	2	2	2	100,00	100,00	↑
8 Program Pengendalian Pembangunan							
1	Persentase realisasi pelaksanaan kegiatan belanja langsung APBD Kab, Bantuan Kab/Kota dan TP(%)	100,00	100,00	94,24	94,24	94,24	□
2	Persentase terlaksananya pengadaan barang dan jasa melalui ULP (%)	100,00	100,00	97,69	97,69	97,69	□
3	Persentase pemahaman PD terkait peraturan pengadaan barang dan jasa (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑

No	OPD/Program/Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target kinerja akhir RPJMD (2016-2021)	Tahun 2020		Tingkat Capaian kinerja tahun 2020	Tingkat capaian kinerja tahun 2020 terhadap akhir RPJMD	Status Capaian
			Target	Realisasi			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
SEKRETARIAT DPRD							
9	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah						
1	Persentase peningkatan profesionalisme dan kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (%)	100,00	100,00	94,00	94,00	94,00	<input type="checkbox"/>
KECAMATAN							
10	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kecamatan dan Pelimpahan Kewenangan						
1	Persentase organisasi pemuda yang dibina di tingkat kecamatan(%)	100,00	100,00	40,85	40,85	40,85	↓
2	Persentase terlaksananya promosi produk unggulan lokal tingkat kecamatan (%)	100,00	100,00	8,80	8,80	8,80	↓
3	Persentase terlaksananya Lomba tertib administrasi desa (%)	100,00	100,00	29,13	29,13	29,13	↓
4	Persentase Terlaksananya Lomba tertib administrasi desa (%)	100,00	100,00	99,06	99,06	99,06	<input type="checkbox"/>
5	Persentase terlaksananya fasilitasi musrenbangdes dan musrenbangkec (%)	100,00	100,00	96,00	96,00	96,00	<input type="checkbox"/>
6	Persentase terlaksananya pembinaan PKK di setiap desa (%)	100,00	100,00	97,97	97,97	97,97	<input type="checkbox"/>
7	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	↑
11	Program Pelayanan Masyarakat Tingkat Kelurahan						
1	Persentase sarana dan prasarana di kelurahan yang terbangun(%)	100,00	100,00	83,51	83,51	83,51	<input type="checkbox"/>
2	Persentase terlaksananya fasilitasi lembaga di kalurahan	100,00	100,00	98,47	98,47	98,47	<input type="checkbox"/>
Rata-rata capaian kinerja					83,77		
Predikat kinerja					Tinggi		

Sumber: Setda, Setwan, 19 Kecamatan Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 11 indikator kinerja program terkait urusan pemerintahan umum mencapai dan melampaui target RPJMD Tahun 2016-2021, 9 indikator capaian indikatornya meningkat tetapi tidak mencapai target RKPD tahun 2020 dan 5 indikator realisasi capaiannya kurang dari ≤ 65% terhadap target RKPD Tahun 2020.

Indikator kinerja program terkait urusan pemerintahan umum yang mencapai target RKPD tahun 2020 sebanyak 11 indikator atau sebesar 44%. Rata-rata capaian kinerja program terkait urusan pemerintahan umum sebesar 83,77 dengan kriteria tinggi. Delapan belas indikator

mencapai target dengan kriteria sangat tinggi. Ada 11 indikator kinerja program terkait urusan pemerintahan umum mencapai target akhir RPJMD tahun 2016-2021.

Dari uraian di atas, kinerja pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan diukur dari realisasi ketercapaian kinerja indikator program pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2020 dibandingkan dengan target RKPD Tahun 2020 dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yaitu: < 50% Sangat Rendah; 51% < 65% Rendah; 66 % < 75% Sedang; 76 % < 90% Tinggi dan 91% < 100% Sangat Tinggi. Nilai peringkat kinerja realisasi RKPD Tahun 2020 mendasarkan urusan sebagaimana secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat tinggi dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.187.
Rekapitulasi Rata-rata Realiasi Ketercapaian Kinerja RKPD Tahun 2020 Berdasarkan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan

No.	Urusan	Rata-rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Predikat	OPD Penanggungjawab
A.	IKU	77,72	Tinggi	
B.	IKD	89,37	Tinggi	
C.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar			
1.	Pendidikan	93,22	Sangat tinggi	Dindikbud
2.	Kesehatan	86,66	Tinggi	Dinkes, RSUD Kajen, RSUD Kraton
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85,69	Tinggi	DPU Taru
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	97,23	Sangat tinggi	Dinas Perkim dan LH
5.	Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	75,42	Sedang	Satpol PP dan Damkar, Kesbangpol
6.	Sosial	86,06	Tinggi	Dinsos, BPBD
D.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			
1.	Tenaga Kerja	92,22	Sangat tinggi	DPMPSTSP dan Naker
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	87,41	Tinggi	DPMDP3AP2KB
3.	Pangan	96,96	Sangat tinggi	DKPP
4.	Pertanahan	100,00	Sangat tinggi	DPU Taru
5.	Lingkungan Hidup	99,05	Sangat tinggi	Dinas Perkim dan LH
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92,17	Sangat tinggi	Dindikcapil
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	96,89	Sangat tinggi	DPMDP3AP2KB
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90,49	Tinggi	DPMDP3AP2KB
9.	Perhubungan	96,80	Sangat tinggi	Dinhub
10.	Komunikasi dan Informatika	84,63	Tinggi	Dinkominfo
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	89,54	Tinggi	DinperindagkopUKM
12.	Penanaman Modal	100,00	Sangat tinggi	DPMPSTSP dan Naker
13.	Kepemudaan dan Olah Raga	64,77	Rendah	Dinporapar
14.	Statistik	100,00	Sangat tinggi	Dinkominfo
15.	Persandian	100,00	Sangat tinggi	Dinkominfo
16.	Kebudayaan	50,01	Sangat rendah	Dindikbud
17.	Perpustakaan	75,00	Sedang	Dinarpus

No.	Urusan	Rata-rata Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Predikat	OPD Penanggungjawab
18.	Kearsipan	99,01	Sangat tinggi	Dinarpus
E.	Urusan Pilihan			
1.	Kelautan dan Perikanan	99,08	Sangat tinggi	Dinlutkan
2.	Pariwisata	97,92	Sangat tinggi	Dinporapar
3.	Pertanian	94,73	Sangat tinggi	DKPP
4.	Perdagangan	86,25	Tinggi	DinperindagkopUKM
5.	Perindustrian	100,00	Sangat tinggi	DinperindagkopUKM
6.	Transmigrasi	50,00	Sangat rendah	DPMPTSP dan Naker
F.	Urusan Penunjang Pemerintahan			
1.	Perencanaan	100,00	Sangat tinggi	Bappeda Litbang
2.	Keuangan	91,49	Sangat tinggi	BPKD
3.	Kepegawaian dan Diklat	97,54	Sangat tinggi	BKD Diklat
4.	Penelitian dan Pengembangan	100,00	Sangat tinggi	Bappeda Litbang
5.	Pengawasan	100,00	Sangat tinggi	Inspektorat
6.	Pemerintahan Umum	83,77	Tinggi	Setda, Setwan dan Kecamatan

Sumber : Hasil Analisis Tim 2021

Evaluasi mendasarkan pada realisasi kinerja RPJMD di tahun 2020 dibandingkan dengan target akhir RPJMD Tahun 2016-2021 dapat digambarkan dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah IKD) dan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah (IKPD). Struktur APBD Pemerintah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020-2021 mengalami sedikit perbedaan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Perubahan dan perbedaan itu terjadi karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang memfokuskan penggunaan anggaran baik APBN maupun APBD untuk Pencegahan, penanganan, dan Pemulihan disegala sektor akibat adanya pandemi COVID-19. Kebijakan Refocusing anggaran ini menyebabkan target pendapatan maupun alokasi belanja daerah secara umum mengalami penurunan pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020-2021. Kondisi tersebut berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali target tahun 2020-2021 yang telah di tetapkan dalam RKPD Tahun 2020-2021. Penyesuaian kermbali rencana target 2021 yang kemudian akan menjadi *baseline* perhitungan kembali rencana target tahun 2021-2026 disamping tetap memperhatikan capaian tahun 2020 dan target RPJMD Tahun 2016-2021 serta target dalam RKPD Tahun 2021-2022.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

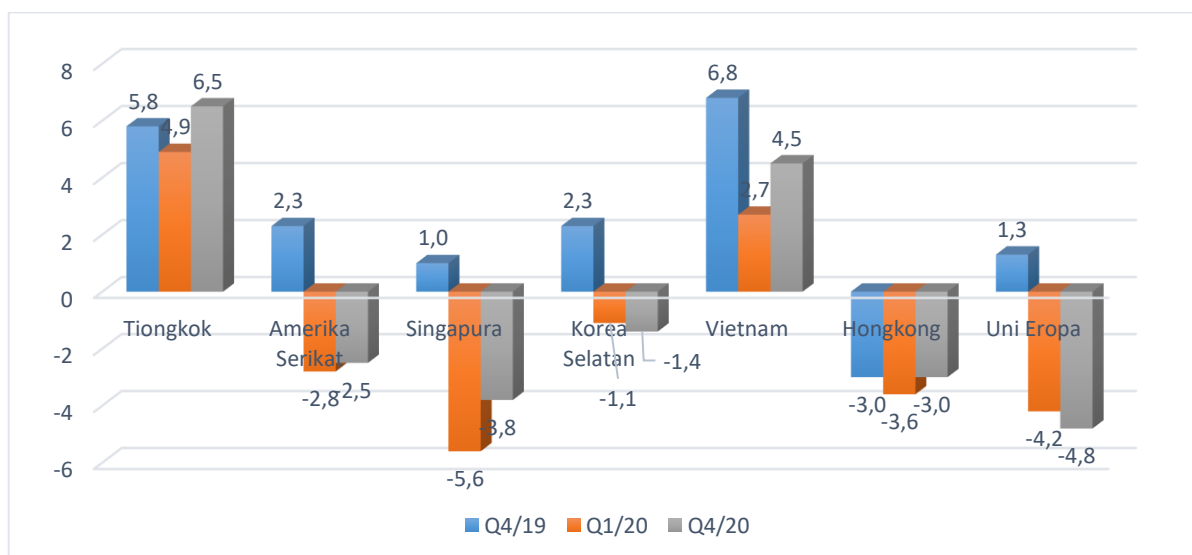
A. Prospek Perekonomian Daerah

Proyeksi Keuangan Daerah tahun 2021–2026 Kabupaten Pekalongan, dipengaruhi oleh 3 (tiga) kondisi, yaitu: (1) Perekonomian Global, (2) Perekonomian Nasional, dan (3) Kondisi Perekonomian di Provinsi Jawa Tengah. Prospek perekonomian tersebut akan menjadi dasar dalam penentuan asumsi dalam menyusun dokumen perencanaan (RPJMN/D dan RKP/RKPD) dan juga penyusunan dokumen penganggaran (APBN/APBD).

Gambaran secara umum dari ketiga kondisi di atas, selengkapnya akan dibahas dalam bagian berikut:

1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Laporan Berita Resmi Statistik tanggal 5 Februari 2021, perekonomian beberapa negara mitra dagang Indonesia pada Triwulan 4 tahun 2020 masih menunjukkan kontraksi sebagai akibat dari adanya Pandemi COVID-19. Dari 7 mitra dagang yang potensial, hanya Tiongkok dan Vietnam yang pada kuartal 4 tahun 2020 (Q4/20) yang menunjukkan pertumbuhan positif, masing-masing sebesar 6,5% dan 4,5%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

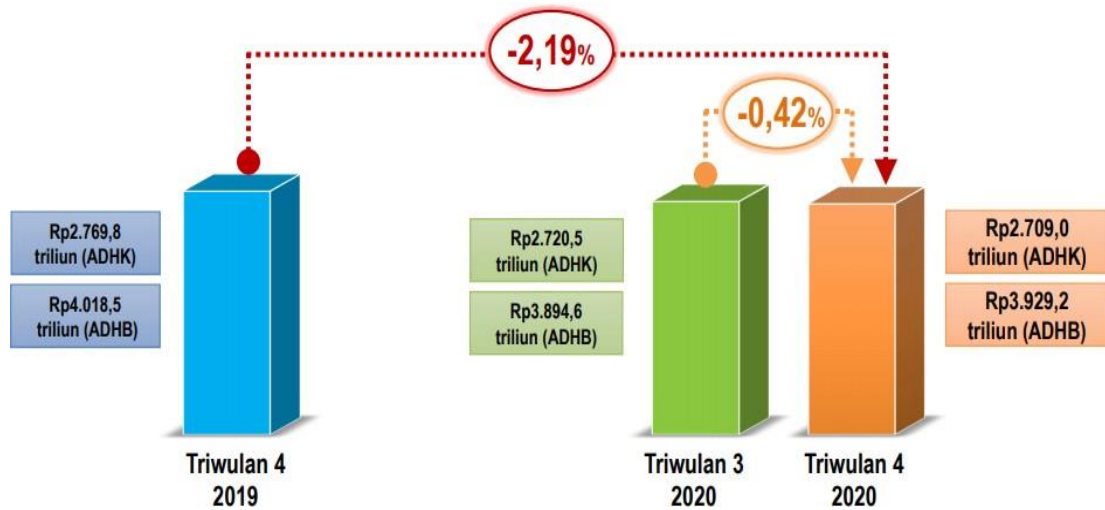


Sumber: BPS, (2021). *Berita Resmi Statistik*, Hal. 3

Gambar 3.1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Mitra Dagang Indonesia (year-on-year) pada Kuartal 4-2019 (Q4/19), Kuartal 3-2020 (Q3/20) dan Kuartal 4-2020 (Q4/20) (dalam persen)

Prospek perekonomian domestik di Indonesia diperkirakan akan terus membaik dalam jangka menengah, yang didukung oleh perbaikan ekonomi global dan peningkatan produktivitas. Prospek perbaikan pertumbuhan ekonomi dunia juga didukung oleh beberapa faktor, yaitu: (i) peran ekonomi negara berkembang yang makin besar dalam pemulihan ekonomi global, (ii) berkurangnya ketegangan perdagangan antar negara besar, khususnya antara Amerika Serikat dan Tiongkok, (iii) risiko geopolitik di banyak negara yang semakin kecil/membaik, dan (iv) kebijakan moneter akomodatif yang ditempuh oleh banyak negara. Dengan membaiknya kondisi di atas, volume perdagangan dunia diperkirakan akan tumbuh membaik dan mendorong kenaikan harga komoditas dunia. Hasil akhir dari kejadian ini diharapkan akan meningkatkan pendapatan dalam APBN Pemerintah Indonesia.

Perekonomian Indonesia pada Kuartal 4-2020 juga masih mengalami kontraksi (tumbuh negatif) sebagai akibat adanya wabah Pandemi COVID-19 yang besarnya mencapai 2,19% (bebasis y-on-y). Jika dijumlahkan secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2019 terkontraksi sebesar 2,07% (-2,07). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: BPS. (2021). *Berita Resmi Statistik*, Hal. 6

Gambar 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Triwulan 4-2020 (Q4/20), Berbasis Data y-on-y (dalam persen)

Bila dikaji lebih jauh berdasar sektor pembentuk PDB di Indonesia selama tahun 2020, dapat dilihat bahwa hingga Kuartal 4-2020 (Q4/20) ada 7 (tujuh) sektor yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu: (i) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (sektor 1); (ii) Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah dan Daur Ulang (sektor 5); (iii) Informasi dan Komunikasi (sektor 10); (iv) Jasa Keuangan dan Asuransi (sektor 11); (v) Real Estat (sektor 12); (vi) Jasa Pendidikan (sektor 15); dan (vii) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (sektor 16). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Sumber: BPS. (2021). *Berita Resmi Statistik*, Diolah dari hal. 12-13.

Gambar 3.3. Pertumbuhan Sektor PDB di Indonesia Selama Tahun 2020 dalam persen)

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sektor pembentuk PDB yang mempunyai daya tumbuh di atas 10% ada 2 (dua) sektor, yaitu: (i) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (sektor 16) dan Informasi dan Komunikasi (sektor 10).

Perekonomian di Indonesia dalam jangka menengah diperkirakan akan terus mengalami perbaikan, selain dilihat dari semakin membaiknya kondisi perekonomian dari sisi pertumbuhan PDB dari kuartal ke kuartal selama tahun 2020, juga diharapkan akan semakin membaik dengan semakin banyaknya penduduk yang mendapatkan vaksinasi sehingga daya tahan meningkat, sekaligus peningkatan rasa percaya diri dalam menjalankan aktifitas ekonomi. Perpaduan dari peningkatan aktifitas ekonomi dan semakin membaiknya derajat kesehatan masyarakat, diharapkan akan mempercepat proses pemulihan ekonomi dan terjadinya peningkatan dalam pos-pos pendapatan yang masuk ke APBN maupun ke APBD.

Pada satu sisi, pemulihan ekonomi global yang mendorong aktivitas perdagangan dunia dan harga komoditas global akan memberikan peluang juga bagi Indonesia untuk meningkatkan kinerja sektor eksternal. Pada sisi lain, produktivitas Indonesia juga diperkirakan meningkat sejalan dengan dampak positif reformasi struktural yang telah ditempuh dan pemanfaatan bonus demografi. Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2024 diperkirakan berada pada kisaran 5,5-6,1% dengan inflasi yang terjaga di kisaran sarannya, serta defisit transaksi berjalan yang berada pada kisaran 2,2-2,7% dari PDB.

Peningkatan produktivitas dicapai melalui penguatan infrastruktur yang disertai dengan perbaikan iklim investasi. Peningkatan produktivitas juga didukung oleh perbaikan kualitas sumber daya manusia yang berkontribusi pada penyediaan tenaga kerja berkeahlian (skilled labor). Prospek kondisi Neraca Pembayaran Internasional (NPI) dalam jangka menengah diperkirakan juga akan membaik, yang didukung oleh terjaganya defisit transaksi berjalan dan meningkatnya aliran modal asing. Inflasi dalam jangka menengah diperkirakan tetap berada pada kisaran sasaran inflasi, ditunjang oleh peningkatan efisiensi dan produktivitas perekonomian. Perkiraan pencapaian inflasi tersebut disertai dengan disparitas inflasi antar wilayah dan antar waktu yang mengecil.

Dari sisi pengeluaran dalam PDRB di Indonesia selama masa Pandemi COVID-19 yang berlangsung selama tahun 2020, dapat dilihat adanya pengeluaran yang positif selama Kuartal 4-2020 (Q4/20) yaitu ada 2 (dua) sektor yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu: (i) Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (G: Government Expenditures) sebesar 1,76% dan, (ii) Pengeluaran yang terkait dengan sumber daya hayati yang dibudidayakan atau sering diistilahkan dengan Cultivated Biological Resources (CBR) yang besarnya mencapai 4,48%.

Pos Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada periode yang sama (Q4/20) mengalami kontraksi (pertumbuhan negatif) sebesar - 3,61, dengan rincian: (i) Makanan dan Minuman, selain Restoran sebesar -1,39%; (ii) Pakaian, Alas Kaki, dan Jasa Perawatannya sebesar -4,09%; (iii) Perumahan dan Perlengkapan Rumah Tangga sebesar 0,71%; (iv) Kesehatan dan Pendidikan sebesar 0,64%; (v) Transportasi dan Komunikasi -9,45%; (vi) Restoran dan Hotel sebesar - 7,28%; serta (vii) Lainnya sebesar -0,88. Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Pertumbuhan Pengeluaran dalam PDB di Indonesia Selama Tahun 2020
(dalam persen)

No.	Sektor Pengeluaran dalam PDRB	I-2020	II-2020	III-2020	IV-2020
1.	Konsumsi Rumah Tangga (C1)	- 2.83	- 5.52	- 4.05	- 3.61
2.	Konsumsi Lembaga Non Profit Melayani RT (C2)	- 5.01	- 7.82	-1,97	- 2.14
3.	Konsumsi Pemerintah (G)	3,77	-6,90	9,76	1,76
4.	Investasi: PMTDB (I)	1.70	- 8.61	- 6,48	- 6.15
	- Inv. Bangunan	5.03	- 5.26	-5,60	- 6.63
	- Inv. Mesin dan Perlengkapan	7.79	- 12.86	-21,01	- 7.57
	- Inv. Kendaraan	- 6.34	- 34.12	-14,63	- 7.57
	- Inv. Peralatan Lainnya	- 1.13	- 26.09	-15,23	- 3.77
	- Inv. CBR	3,00	-14,89	23,08	4,48
	- Inv. Produk Kekayaan Intelektual	- 4.14	- 11.45	-3.61	- 10.36
5.	Ekspor (X)	0.36	- 12.02	-11,68	- 7.21
6.	Impor (M)	- 3.62	- 18.29	-23,00	- 13.52
	PDB	2.97	- 5.32	-3,49	- 2.19

Sumber: BPS. (2021). Berita Resmi Statistik, Diolah dari hal. 23.

2. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah

Dampak pandemi COVID-19 telah berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 2020 dan diperkirakan juga masih berdampak hingga tahun 2021. Tekanan eksternal akibat penurunan permintaan negara mitra dagang utama diperkirakan telah mempengaruhi kinerja ekspor utama di Provinsi Jawa Tengah, khususnya ekspor dari tekstil dan produk tekstil. Hal ini juga diindikasikan dengan keberadaan Sektor Industri Pengolahan yang selama Kuartal 4-2020 (Q4/20) tumbuh negatif sebesar -6,10%. Secara umum selama Kuartal 4-2020 (Q4/20), ada 5 (lima) sektor yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu: (i) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (sektor 1), sebesar 7,56%; (ii) Pengadaan Listrik dan Gas (sektor 4) sebesar 0,10%; (iii) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (sektor 5) sebesar 2,79%; (iv) Informasi dan Komunikasi (sektor 10) sebesar 14,82%; dan (v) Jasa Lainnya (sektor 17) sebesar 5,33%. Gambaran selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.2.
Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Y-on-Y)
Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 2020 (dalam Persen)

No.	Sektor Ekonomi Pembentuk PDRB	2020-1	2020-2	2020-3	2020-4
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-4,73	0,94	6,61	7,56
02.	Pertambangan dan Penggalian	4,99	-4,74	0,52	-3,79
03.	Industri Pengolahan	3,01	-4,41	-7,10	-6,10
04.	Pengadaan Listrik dan Gas	4,60	-1,29	3,88	0,10
05.	Pengadaan Air, Pengel. Sampah, Limbah & Daur Ulang	3,04	1,15	2,19	2,79
06.	Konstruksi	1,08	-5,85	-5,62	-4,40
07.	Perdag. Besar & Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,28	-10,33	-5,59	-2,27

08.	Transportasi dan Pergudangan	3,03	-62,95	-37,68	-33,53
09.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,98	-19,52	-7,34	-8,62
10.	Informasi dan Komunikasi	11,27	18,79	17,65	14,82
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,93	1,50	0,32	-2,33
12.	Real Estat	3,82	-2,85	-1,07	-0,90
13.	Jasa Perusahaan	5,35	-17,47	-10,66	-5,36
14.	Adm Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wjib	1,56	-1,35	-0,58	-4,50
15.	Jasa Pendidikan	4,56	-0,76	-1,86	-2,48
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,65	-5,91	-3,79	-3,34
17.	Jasa Lainnya	5,12	5,52	5,63	5,33
	PDB	2,65	- 5,91	-3,79	-3,34

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah. (2021). Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Edisi Maret 2021. Hal. 21.

Dari tabel di atas dapat dilihat dengan jelas, bahwa Sektor Informasi dan Komunikasi merupakan satu-satunya sektor yang mempunyai pertumbuhan yang relatif besar selama Pandemi COVID-19. Bahkan selama kuartal 1 (Q1/20) sampai dengan kuartal 4 (Q4/20) pertumbuhannya selalu di atas 10%. Pembatasan aktivitas masyarakat berdampak pada penurunan permintaan domestik yang cukup signifikan. Konsumsi swasta diperkirakan mengalami penurunan sehingga berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat, termasuk pekerja di Sektor Industri yang padat karya. Kinerja investasi juga diperkirakan tumbuh melambat seiring dengan tertundanya penyelesaian beberapa proyek infrastruktur.

Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Y On Y) Menurut Pengeluaran di Jawa Tengah Tahun 2020 (dalam Persen)

Tabel 3.3.

Laju Pertumbuhan PDRB Triwulanan Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Y-on-Y) Menurut Pengeluaran di Jawa Tengah Tahun 2020 (dalam Persen)

No.	PDRB Pendekatan Pengeluaran	I-2020	II-2020	III-2020	IV-2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Konsumsi Rumah Tangga (C1)	3,46	- 4.75	- 1.89	- 2.38
2.	Konsumsi Lembaga Non Profit Melayani RT (C2)	1,88	- 5.41	- 1.63	- 2.88
3.	Konsumsi Pemerintah (G)	2.89	- 7.14	- 0.23	- 8.41
4.	Investasi: PMTDB (I)	0.16	- 11.94	- 10.06	- 5.64
5.	Ekspor (X)	2.38	- 21.20	- 19.47	- 16.12
6.	Impor (M)	2.08	- 23.48	- 19.98	- 16.53
	PDB	2.65	- 5.91	- 3.79	- 3.34

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah. (2021). Beberapa Indikator Makro Sosial Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Edisi Maret 2021. Hal. 22.

Dari tabel di atas mengisyaratkan bahwa investasi, baik berupa bangunan dan non bangunan dari perusahaan swasta mengalami banyak kendala, yang antara lain disebabkan oleh: (i) akses masuk tenaga kerja ahli asing, (ii) pembatasan aktivitas perkantoran, dan (iii) penundaan karena perilaku wait and see dari para pelaku usaha. Meski demikian perlambatan pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat tertahan oleh besarnya konsumsi pemerintah yang meningkat untuk penanganan dan upaya meminimalkan dampak COVID-19, khususnya yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

B. Kinerja Keuangan Tahun 2016 - 2021

Keuangan Daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan yang efektif dan efisien mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, untuk itu diperlukan suatu analisis terhadap kondisi dan potensi keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah.

Analisis keuangan daerah merupakan suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang ada, diantaranya berupa analisis perbandingan atau perkembangan daerah dari waktu ke waktu. Analisis perkembangan keuangan terhadap APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya, sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Disamping itu perlu dilakukan analisis ratio-ratio keuangan dalam APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah). Dengan analisis ini diharapkan dapat mengetahui kondisi keuangan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta dapat melihat pertumbuhan dan perkembangan pendanaan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu.

Analisis keuangan Daerah dalam penyusunan RPJMD, dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, kerangka pendanaan dan pendanaan indikatif sebagai dasar penentuan kebijakan keuangan Daerah. Besarnya kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Analisis pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan pelaksanaan APBD atau Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan dari 1,787 trilyun rupiah tahun 2016 menjadi 2,182 trilyun rupiah tahun 2020. Perkembangan pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2021

Gambar 3.4. Perkembangan Pendapatan Daerah Pekalongan Tahun 2016 - 2020 (Trilyun Rupiah)

Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Pekalongan selama 5 tahun terakhir sebesar 3,91%. Persentase pertumbuhan pendapatan asli daerah selama tahun 2016-2020 sebesar 2,51%. Jika dilihat tren pertumbuhan PAD menunjukkan kecenderungan fluktuatif, tertinggi pada tahun 2019 sebesar 9,66% dan terendah pada tahun 2017 sebesar -1,67%.

Dana transfer Kabupaten Pekalongan juga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, tertinggi pada tahun 2017 sebesar 8,50% dan terendah di tahun 2020 sebesar -8,70%. Dana transfer bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Rata-rata pertumbuhan dana transfer selama 5 tahun terakhir sebesar 0,71%.

Lain-lain pendapatan yang sah selama tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan fluktuatif, tertinggi pada tahun 2017 sebesar 62,91% dan terendah pada tahun 2020 sebesar -1,25%. Rata-rata pertumbuhan dana perimbangan selama 5 tahun terakhir sebesar 17,45%.

Pertumbuhan APBD Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

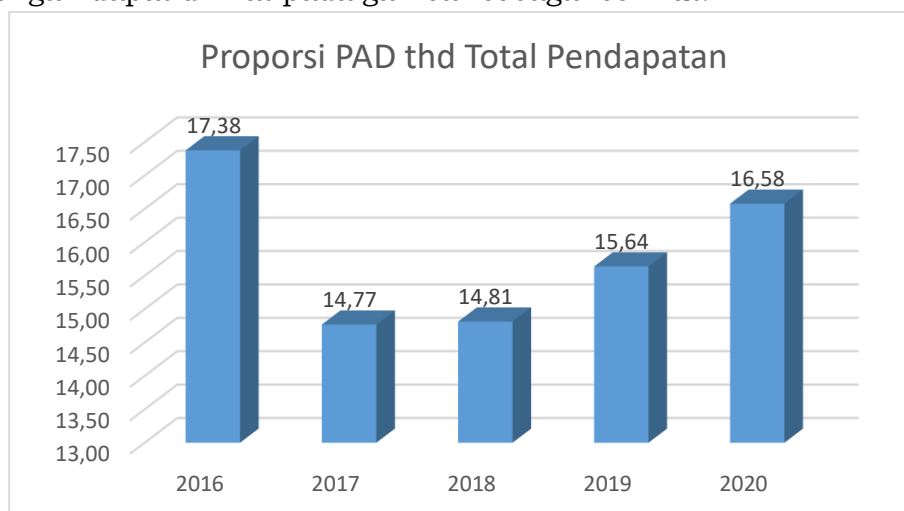
Tabel 3.4. Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No	Uraian	Persentase Realisasi (%)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	
1	Pendapatan Asli Daerah	-1,67	1,93	9,66	0,13	2,51
1.1	Hasil Pajak Daerah	16,01	38,31	19,57	-5,08	17,20
1.2	Hasil Retribusi Daerah	16,03	18,44	26,00	-0,78	14,92
1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29,23	-2,03	135,66	-41,58	30,32
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	-5,69	-5,64	2,03	5,03	-1,07
2	Dana Transfer	8,50	0,42	2,62	-8,70	0,71
2.1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	-10,93	-11,57	-17,88	42,72	0,58
2.2	Dana Alokasi Umum	-1,76	0,53	6,46	-9,15	-0,98
2.3	Dana Alokasi Khusus	54,12	1,14	-5,96	-10,77	9,63
2.4	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	16,62	11,98	-0,06	-8,98	4,89
2.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	77,85	-24,12	24,97	3,40	20,52

No	Uraian	Persentase Realisasi (%)				Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2017	2018	2019	2020	
3.	Lain-Lain Pendapatan yg Sah	62,91	4,65	3,49	-1,25	17,45
3.1	Pendapatan Hibah	778,17	260,31	13,51	6,92	264,73
3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	47,27	56,26	-69,38	-56,07	-5,48
Pendapatan Daerah		15,70	1,62	3,87	-5,55	3,91

Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2021

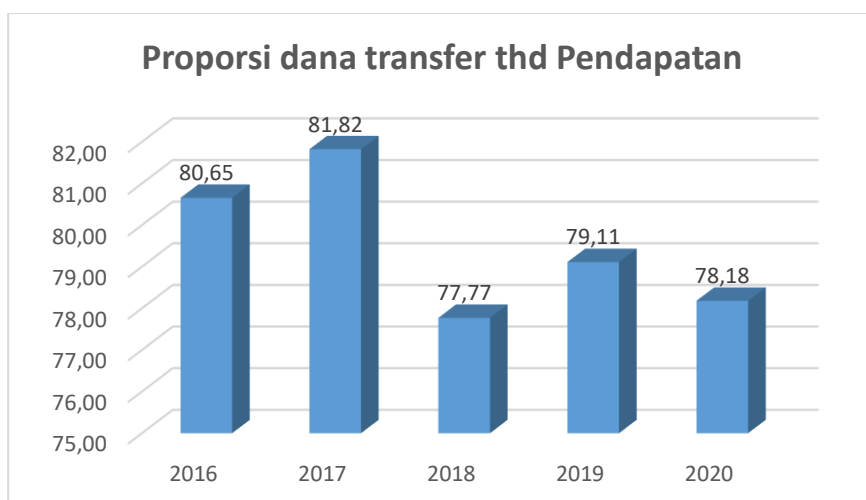
Derajat desentralisasi fiskal Kabupaten Pekalongan selama 5 tahun terakhir berada pada kisaran 14,77%-17,38%. Derajat desentralisasi fiskal dihitung berdasarkan perbandingan antar jumlah Pendapatan Asli Daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Derajat desentralisasi tahun 2020 sebesar 16,58%, menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal Kabupaten Pekalongan termasuk pada tingkat desentralisasi fiskal kurang. Perkembangan derajat desentralisasi Kabupaten Pekalongan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2021

Gambar 3.5. Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (%)

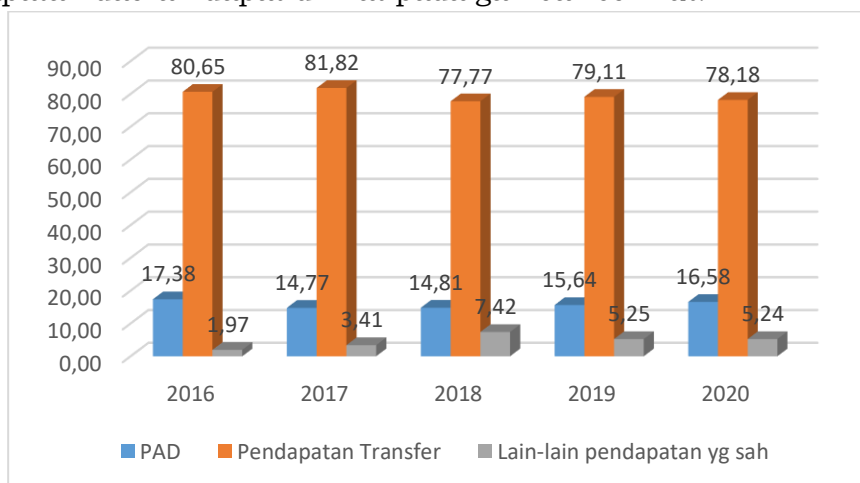
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu menggali potensi yang ada di daerah tersebut guna meningkatkan pendapatan asli daerah, sehingga ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat bisa berkurang. Rasio ketergantungan keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Tahun 2020 rasio ketergantungan keuangan sebesar 78,18% menurun dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 79,11%. Meskipun menurun rasio ketergantungan keuangan Kabupaten Pekalongan terhadap pemerintah pusat dan provinsi termasuk kategori sangat tinggi dengan rasio diatas 50%. Perkembangan rasio ketergantungan Kabupaten Pekalongan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2021

Gambar 3.6. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (%)

Dilihat dari proporsinya terhadap total pendapatan daerah, unsur-unsur pendapatan daerah dengan proporsi terbesar adalah dana perimbangan dengan kisaran antara 77,77% hingga 81,82% antara tahun 2016 hingga 2020. Sementara itu pendapatan asli daerah berkisar antara 14,82% hingga 17,38%. Adapun lain-lain pendapatan yang sah berkisar antara 16,47% hingga 27,56%. Secara rinci perkembangan proporsi unsur-unsur pendapatan terhadap total pendapatan daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2021

Gambar 3.7. Proporsi Unsur Pendapatan Daerah terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2016-2020 (%)

Secara rinci perkembangan masing-masing unsur-unsur pendapatan daerah pendapatan daerah tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5. Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Rp. 000)

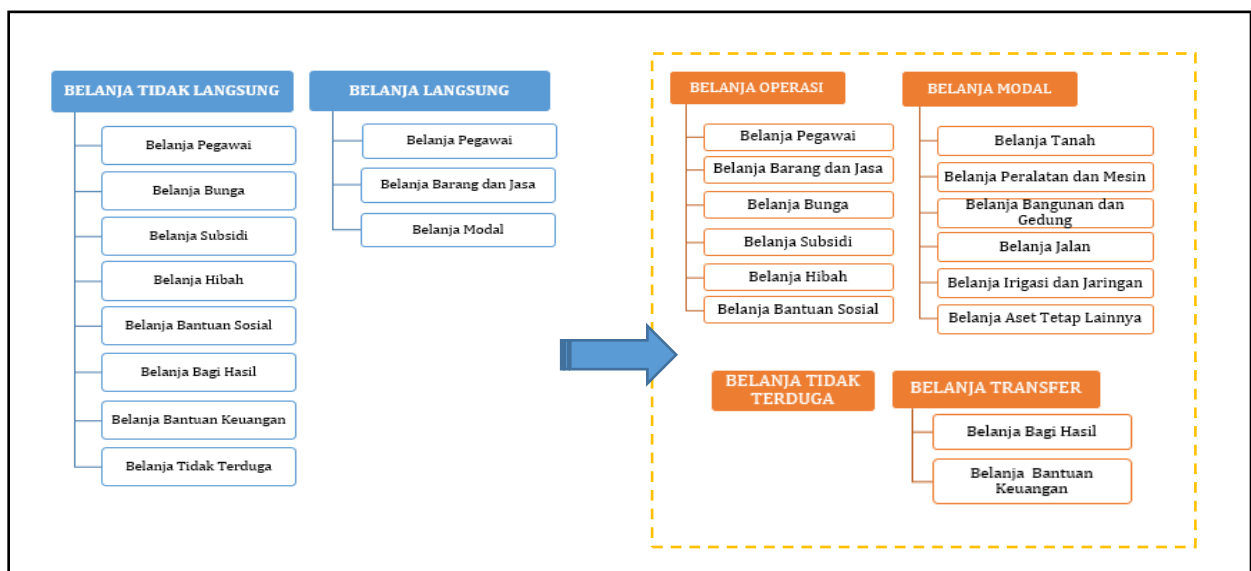
No.	Uraian	Realisasi (Rp.000)					Rata-rata Pertumbuhan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Pendapatan Asli Daerah	310.572.582	305.394.299	311.288.144	341.344.416	341.786.559	2,51
1.	1 Hasil Pajak Daerah	40.771.237	47.296.813	65.416.345	78.217.365	74.247.140	17,20
1.	2 Hasil Retribusi Daerah	7.397.615	8.583.645	10.166.247	12.809.087	12.708.738	14,92

No.	Uraian	Realisasi (Rp.000)					Rata-rata Pertumbuhan	
		2016	2017	2018	2019	2020		
1.	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.809.131	7.506.942	7.354.576	17.331.867	10.124.616	30,32
1.	4	Lain-lain PAD yang Sah	256.594.599	242.006.900	228.350.975	232.986.096	244.706.065	-1,07
2		Dana Transfer	1.182.370.555	1.282.878.564	1.288.217.218	1.321.954.447	1.206.915.408	0,71
2.	1	Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	33.291.841	29.653.264	26.222.396	21.533.683	30.732.286	0,58
2.	2	Dana Alokasi Umum	926.571.243	910.294.366	915.154.037	974.248.885	885.145.414	-0,98
2.	3	Dana Alokasi Khusus	222.507.471	342.930.934	346.840.786	326.171.879	291.037.708	9,63
3.	3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	84.684.003	98.757.216	110.590.263	110.523.017	100.595.200	4,89
3.	4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	174.527.576	310.399.175	235.517.071	294.328.778	304.324.192	20,52
3		Lain-Lain Pendapatan yg Sah	294.408.538	479.634.989	501.943.940	519.472.090	512.981.597	17,45
3.	1	Pendapatan Hibah	2.550.859	22.400.806	80.711.266	91.613.302	97.954.838	264,73
3	5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	32.646.100	48.077.793	75.125.339	23.006.993	10.107.367	-5,48
JUMLAH DAERAH		PENDAPATAN	1.787.351.675	2.067.907.852	2.101.449.302	2.182.770.952	2.061.683.564	3,91

Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2021

2. Kinerja Belanja Daerah

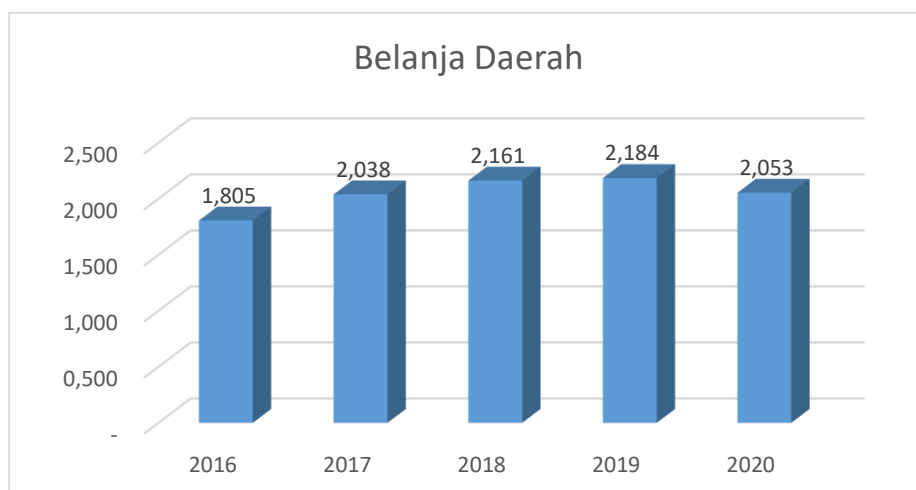
Penyajian belanja daerah masih mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Belanja Daerah dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu: Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada tahun 2020, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Klasifikasi Belanja Daerah berubah dari belanja langsung dan tidak langsung menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.



Gambar 3.8. Perubahan Klasifikasi Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Perkembangan belanja daerah Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu tahun 5 tahun terakhir (2016-2020). Pada tahun 2016 sebesar Rp1,805 trilyun rupiah meningkat menjadi Rp2,814 trilyun rupiah. Perkembangan Belanja

Daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2021

Gambar 3.9. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Triyun Rupiah)

Rata-rata peningkatan belanja Kabupaten Pekalongan dalam 5 tahun terakhir sebesar 3,50%. Persentase kenaikan belanja tertinggi terjadi di tahun 2017 yaitu sebesar 12,89%, dan terendah tahun 2019 sebesar 1,05%. Komponen Belanja Tidak Langsung (BTL) selama kurun waktu 5 (lima) tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan fluktuaktif, tertinggi tahun 2016 sebesar 15,09%. Selama 5 tahun terakhir rata-rata belanja tidak langsung sebesar 9,78%. Pada tahun 2020 Belanja tidak langsung mencapai -11,65%. Komponen Belanja Langsung menunjukkan perkembangan yang fluktuaktif. Belanja langsung tertinggi di tahun 2017 sebesar 12,89%. Rata-rata pertumbuhan belanja langsung sebesar 9,78%.

Perkembangan persentase belanja daerah selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

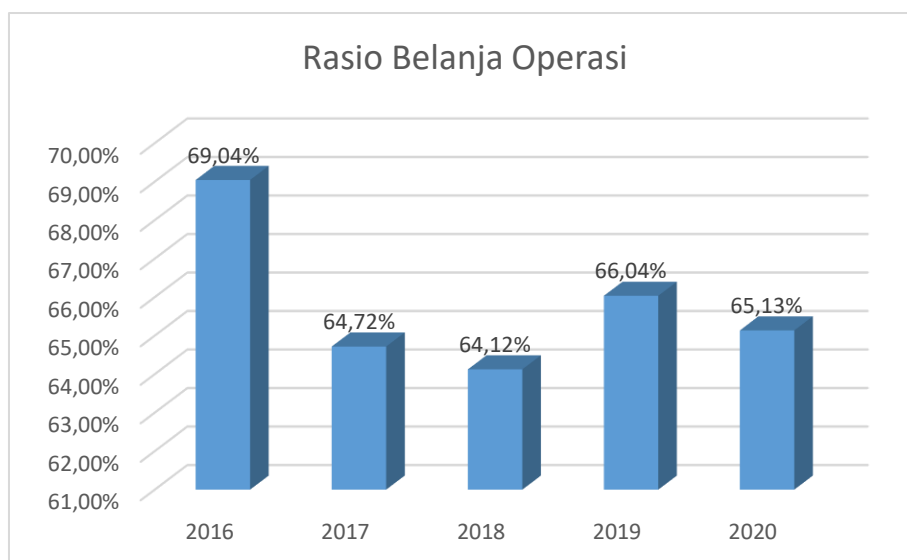
Tabel 3.6. Persentase Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (%)

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
A	Belanja Operasi	5,87	5,07	4,07	-1,36	3,41
1	Belanja Pegawai	-3,06	2,41	5,11	-5,22	-0,19
2	Belanja Barang dan Jasa	35,15	15,82	1,65	-4,38	12,06
3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4	Belanja Hibah	3,16	-37,81	15,99	162,02	35,84
5	Belanja Bantuan Sosial	480,93	50,24	-12,88	-8,08	127,55
B	Belanja Modal	41,56	28,09	-19,99	-30,62	4,76
1	Belanja Modal Tanah	1.945,88	-51,57	161,35	-74,63	495,26
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-26,97	7,12	13,07	12,39	1,40
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-6,41	69,61	37,38	-30,91	17,42
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	93,57	26,00	-37,16	-44,97	9,36
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.173,41	-18,97	-40,76	-39,01	268,67
6	Belanja Modal BLUD	18,44	82,52	-	-	-
				100,00		
C	Belanja tak Terduga	1.300,96	-75,15	118,28	-14,19	332,48

No	Uraian	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan
1	Belanja Tidak Terduga	1.300,96	-75,15	118,28	-14,19	332,48
D	Transfer	16,83	-8,58	14,70	-1,15	5,45
1	Tranfer bagi Hasil Pendapatan	5,03	16,44	13,01	-25,84	2,16
a.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	7,81	21,91	14,76	-25,40	4,77
b.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	-5,05	-6,02	3,68	-28,42	-8,95
2	Tranfer Bantuan Keuangan	17,03	-8,96	14,73	-0,68	5,53
1	Transfer Bantuan Keuangan Ke desa	17,06	-9,10	14,92	-0,39	5,62
2	Transfer bantuan keuangan lainnya	8,91	0,00	-0,08	-	-22,79
	Jumlah Belanja	12,95	6,04	1,05	-5,98	3,50

Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2021

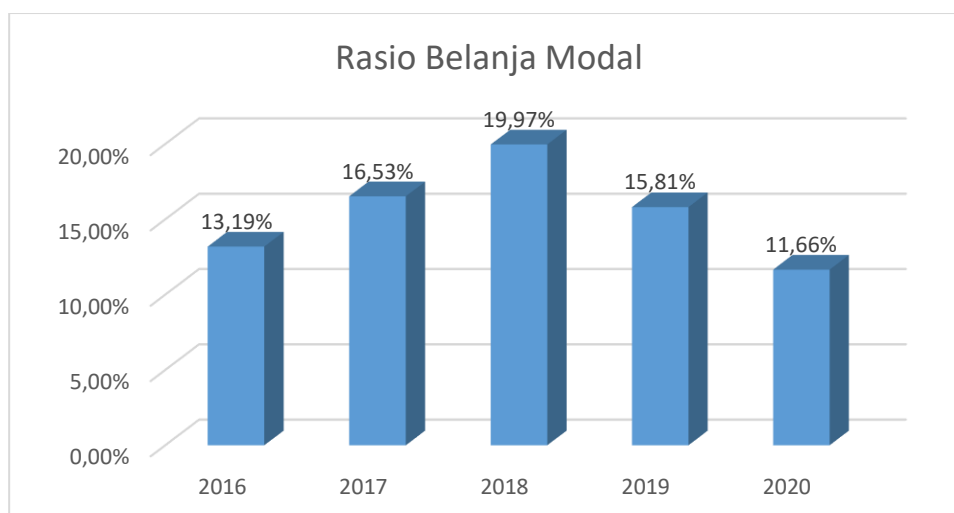
Jika dilihat rasio Belanja Operasi terhadap total Belanja Daerah di Kabupaten Pekalongan menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2016-2020 berkisar antara 64,12% - 69,04%. Kondisi ini menunjukkan bahwa belanja di luar program dan kegiatan pembangunan proporsinya relatif besar. Perkembangan selengkapnya rasio Belanja Operasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2021

Gambar 3.10. Rasio Belanja Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Tahun 2016-2020 (%)

Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah di Kabupaten Pekalongan menunjukkan perkembangan fluktuatif. Rasio Belanja Modal terhadap total belanja daerah tahun 2020 sebesar 11,66%, cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dari tahun 2016 sebesar 13,19%. Perkembangan rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah di Kabupaten Pekalongan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2021

Gambar 3.11. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Tahun 2016-2020 (%)

Perincian belanja daerah Kabupaten Pekalongan selama kurun waktu tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Rp.000)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
A	Belanja Operasi	1.245.506.415	1.318.662.172	1.385.548.639	1.441.899.258	1.422.244.907	0,79
1	Belanja Pegawai	945.118.848	916.182.468	938.298.816	986.238.927	934.743.679	-2,65
2	Belanja Barang dan Jasa	255.779.849	345.683.053	400.381.256	406.983.972	389.154.355	-
3	Belanja Bunga	5.213	0	0	0	0	37,80
4	Belanja Hibah	42.345.305	43.683.976	27.168.517	31.513.710	82.571.723	127,55
5	Belanja Bantuan Sosial	2.257.200	13.112.675	19.700.050	17.162.650	15.775.150	2,16
B	Belanja Modal	237.938.809	336.815.994	431.412.971	345.165.298	239.471.535	5,53
1	Belanja Modal Tanah	336.976	6.894.124	3.338.880	8.726.016	2.213.381	332,48
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	70.016.848	51.134.776	54.773.203	61.934.637	69.608.029	9,78
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.093.903	48.757.180	82.698.309	113.607.015	78.490.710	15,00
4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	98.292.215	190.267.775	239.728.028	150.634.918	82.899.943	12,46
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.679.001	21.380.642	17.324.470	10.262.712	6.259.473	4,76
6	Belanja Modal BLUD	15.519.865	18.381.497	33.550.080	0	0	0
C	Belanja tak Terduga	596.728	8.359.950	2.077.863	4.535.641	3.892.046	9,65
1	Belanja Tidak Terduga	596.728	8.359.950	2.077.863	4.535.641	3.892.046	9,65
D	Transfer	319.925.644	373.762.853	341.704.958	391.934.592	387.409.224	5,45
1	Tranfer bagi Hasil Pendapatan	5.401.648	5.673.142	6.605.825	7.465.203	5.536.295	2,16
a.	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	4.232.027	4.562.593	5.562.182	6.383.107	4.761.769,15	4,77
b.	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	1.169.621	1.110.549	1.043.643	1.082.096	774.525,51	-8,95
c.	Transfer Bagi Hasil Pendaptan Lainnya	0	0	0			
2	Tranfer Bantuan Keuangan	314.523.996	368.089.711	335.099.133	384.469.389	381.872.929	5,53
a.	Transfer Bantuan Keuangan Ke desa	313.525.617	367.002.386	333.611.808	383.382.904	381.872.929	5,62
b.	Transfer bantuan keuangan lainnya	998.379	1.087.325	1.087.325	1.086.485	-	2,21
	Jumlah Belanja	1.804.967.597	2.037.600.969	2.160.744.430	2.183.534.790	2.053.055.598	3,50

Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2021

3. Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan keuangan daerah menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dihitung dari besaran pendapatan umum daerah dengan belanja pegawai aparatur sipil negara, yang merupakan realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan. Gambaran kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8.
Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016– 2020 (Rp.000)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021*)
	Pendapatan Daerah	1.787.351.675	2.067.907.853	2.101.449.302	2.182.770.953	2.061.683.564	2.086.680.666
A	BELANJA OPERASI	945.118.848	916.182.468	938.298.816	986.238.927	934.743.679	972.078.413
	Belanja Gaji dan Tunjangan	945.118.848	916.182.468	938.298.816	986.238.927	934.743.679	972.078.413
B.	Belanja Modal	98.292.215	190.267.775	239.728.028	150.634.918	82.899.943	133.571.453
	Belanja Jalan, irigasi, jaringan	98.292.215	190.267.775	239.728.028	150.634.918	82.899.943	133.571.453
C	Pembiayaan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Penyertaan Modal	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	TOTAL A+B+C	1.050.411.064	1.113.450.243	1.185.026.844	1.143.873.844	1.024.643.621	1.112.649.866
	Kemampuan Keuangan Daerah	736.940.611	954.457.610	916.422.458	1.038.897.109	1.037.039.943	974.030.800

*) APBD P tahun 2021

Sumber : Data diolah dari LRA 2016 – 2020

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa kemampuan riil keuangan Kabupaten Pekalongan pada tahun Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2019, namun pada tahun 2020 kemampuan riil turun menjadi sebesar Rp974.030.800.000,00. Nilai tersebut termasuk ke dalam kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi bagi daerah Kabupaten/Kota, karena kemampuan keuangan daerah Kabupaten Pekalongan telah melebihi Rp550.000.000.000,00, sebagaimana pasal 5 ayat 2 poin a Permendagri Nomor 62 Tahun 2017.

4. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan mencakup :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).
- b. Pencairan Dana Cadangan.
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah.
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.
- f. Penerimaan Piutang Daerah.
- g. Penerimaan Dana Bergulir.
- h. Penerimaan Hasil Penarikan.

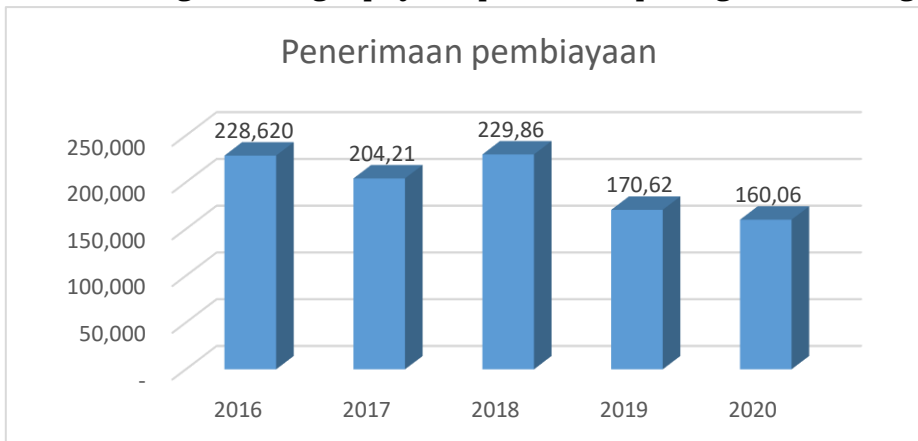
Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perludibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dapat ditempuh melalui:

- a. Pembentukan dana cadangan.

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

Penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Pekalongan menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Penerimaan Pembiayaan daerah Kabupaten Pekalongan berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya; Penerimaan Piutang Daerah; dan Penerimaan Kembali Investasi Data Bergulir.

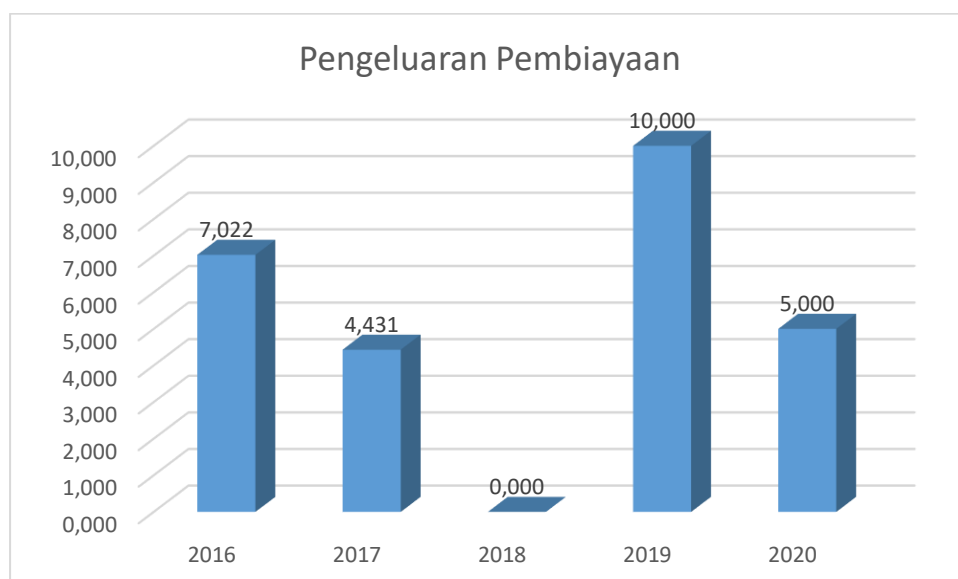
Perkembangan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Pekalongan menunjukkan perkembangan fluktuatif, tertinggi tahun 2018 sebesar Rp. 229,86 milyar, tetapi tahun 2020 turun menjadi Rp160,06 milyar. Perkembangan selengkapnya dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2021

Gambar 3.12. Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Pengeluaran pembiayaan Daerah merupakan uang yang keluar dari kas daerah. Pengeluaran pembiayaan di Kabupaten Pekalongan berasal dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah dan pembayaran pokok hutang. Pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun 2016 sebesar Rp70,22 milyar dan pada tahun 2020 turun menjadi Rp5,00 milyar. Perkembangan Pengeluaran pembiayaan selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2021

Gambar 3.13. Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020 (Milyar Rupiah)

Perkembangan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah secara rinci tercantum pada tabel berikut.

Tabel 3.9.
Perkembangan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp.000)				
		2016	2017	2018	2019	2020*)
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	228.623.900	204.206.856	229.856.829	170.620.432	160.068.910
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	228.606.971	203.986.175	229.787.303	170.564.364	159.978.997
2	Penerimaan Piutang Daerah	-	1.258	-	-	-
3	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	16.929	219.423	69.526	56.068	89.912
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.021.802	4.431.161	-	10.000.000	5.000.000
1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.935.000	4.431.161	-	10.000.000	5.000.000
2	Pembayaran Pokok Hutang	86.802	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO		221.602.097	199.775.695	229.856.829	160.620.432	155.068.910

Sumber : BPKD Kab. Pekalongan, 2021

Keterangan :

*) realisasi *unaudited*

C. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Masa Lalu

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam pengambilan keputusan baik terkait pendapatan maupun belanja daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu tahun anggaran dengan menggunakan basis atau pendekatan kinerja, dimana setiap alokasi biaya yang direncanakan harus dikaitkan dengan pencapaian tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan pembiayaan dari APBD harus memiliki tujuan, sasaran yang jelas, mampu memberikan manfaat yang besar dan dampak yang terukur pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Dalam implementasinya, APBD Kabupaten Pekalongan mulai anggaran tahun 2016-2020, penyusunannya telah mengacu kepada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Secara berkesinambungan, sistem evaluasi dan pelaporan juga telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan DAerah Kepada Masyarakat dan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Pemerintahan Daerah.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka mengharuskan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan untuk berupaya meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu terus diupayakan melalui proses analisa dan perencanaan yang matang tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.

Pelaksanaan Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, secara legal formal, dituangkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Selain itu, terdapat juga UU No 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal-hal mengenai kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan kepada masyarakat daerah guna mendapatkan sumber pendanaan bagi pembangunan daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Dalam prakteknya, instrumen utama yang digunakan adalah pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak (*taxing power*) dan transfer ke daerah. UU Nomor 28 Tahun 2009 merupakan salah satu wujud upaya penguatan *taxing power* daerah, yaitu dengan perluasan basis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah ada, penambahan jenis pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan tarif maksimum beberapa jenis pajak daerah, dan pemberian diskresi penetapan tarif pajak.

1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Kabupaten Pekalongan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

a. Proporsi Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja

Analisis realisasi belanja daerah dibanding anggaran dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tingkat realisasi belanja Kabupaten Pekalongan secara keseluruhan fluktuatif. Pada tahun 2016 realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 84,38% dengan defisit sebesar Rp17.615.922.371,15; pada tahun 2017 realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 89,54% dengan surplus sebesar Rp30.306.883.150,02; pada tahun 2018 realisasi belanja terhadap anggaran belanja sebesar 89,78% dengan defisit sebesar Rp59.295.127.826,17; pada tahun 2019 realisasi belanja sebesar 89,15% dengan defisit anggaran sebesar Rp783.837.649,49,- ; pada tahun 2019 realisasi belanja sebesar 89,89% dengan Surplus anggaran sebesar Rp8.780.762.502,15. Data di atas menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah pada atahun 2016 – 2020 bekisar 84,38% - 89,89%.

b. Proporsi Belanja untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Gambaran tentang belanja daerah yang menginformasikan mengenai proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Pekalongan Realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur, dari Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 mengalami peningkatan, terutama pada Belanja Operasi mengalami fluktuasi. Alokasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama 4 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.10.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Belanja	Persentase (%)
		(a)	(b)	(a)/(b) x 100 (%)
1.	2016	945.118.848	1.803.967.596	52,39%
2.	2017	916.182.468	2.037.600.969	44,96%
3.	2018	938.298.816	2.160.744.430	43,42%
4.	2019	986.238.927	2.183.534.789	45,17%
5.	2020	934.743.679	2.053.017.712	45,53%

Sumber : Data diolah dari LPKD 2016 – 2020 diolah

Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tahun 2016 persentasenya sebesar 52,39% dan tahun 2020 sebesar 45,53%.

c. Analisis Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam suatu tahun anggaran. Realisasi pengeluaran wajib dan mengikat dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 3.11.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 – 2020 (Rp.000)

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021*)
A	BELANJA OPERASI	945.118.848	916.182.468	938.298.816	986.238.927	934.743.679	972.078.413
	Belanja Gaji dan Tunjangan	945.118.848	916.182.468	938.298.816	986.238.927	934.743.679	972.078.413
B.	Belanja Modal	98.292.215	190.267.775	239.728.028	150.634.918	82.899.943	133.571.453
	Belanja Program Prioritas Bupati	98.292.215	190.267.775	239.728.028	150.634.918	82.899.943	133.571.453
C	Pembiayaan	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Penyertaan Modal	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	TOTAL A+B+C	1.050.411.064	1.113.450.243	1.185.026.844	1.143.873.844	1.024.643.621	1.112.649.866

Sumber : Data diolah dari LPKD 2016 – 2020 diolah

2. Lesson Learnt Kebijakan Pengelolaan keuangan Masa Lalu dan Arah Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa yang Akan Datang

Arah kebijakan pengelolaan keuangan pada tahun 2016 – 2020 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan PAD dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah tanpa menimbulkan *high cost economy* terhadap perkembangan arus investasi.
- b. Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tahun 2016 persentasenya sebesar 52,39% dan tahun 2020 sebesar 45,53%.
- c. Realisasi belanja dibandingkan dengan target 2016 – 2020 menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah pada tahun 2016 – 2020 berkisar 84,38% - 89,89%.

Pada periode tahun 2021 – 2026 kebijakan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah dengan melakukan berbagai upaya antara lain:
 - 1) Melakukan perhitungan kembali terhadap potensi pajak daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah dapat menetapkan target pajak daerah mendekati potensi riil.
 - 2) Melakukan identifikasi ulang dan pemutakhiran data setiap tahun dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi dan menetapkan wajib pajak prioritas berdasarkan potensi kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah.

- 3) Melakukan kebijakan *reward and punishment* kepada wajib pajak dan petugas yang melakukan pemungutan pajak.
 - 4) Melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi agar mereka melakukan pembayaran pajak tepat waktu.
 - 5) Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, bila perlu dilakukan upaya mendatangi langsung pada wajib pajak daerah potensial.
- b. Mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap kesehatan dan bagi hasil laba BUMD ke dalam PAD.
 - c. Pemanfaatan asset daerah untuk meningkatkan PAD.
 - d. Upaya peningkatan kinerja untuk memperoleh peningkatan Dana Insentif Daerah (DID). Peningkatan kinerja yang dapat meningkatkan perolehan pendapatan melalui Dana Insentif Daerah adalah dengan meningkatkan upaya penetapan APBD tepat waktu, pengiriman LPPD tepat waktu, Opini BPK harus WTP, penggunaan e-procurement, penggunaan e-budgetting; Kategori Kinerja (Batas Nilai Minimal = 76 (B) yaitu kesehatan fiskal dan kinerja pengelolaan keuangan daerah, pengendalian inflasi daerah, pelayanan dasar bidang pendidikan (APM, peta mutu pendidikan); pelayanan dasar bidang kesehatan (Balita mendapatkan imunisasi lengkap, penanganan Balita Stunting, persalinan fasilitas kesehatan); pelayanan dasar bidang infrastruktur (akses sanitasi layak, sumber air minum layak); Pelayanan dasar bidang perumahan dan permukiman (Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni); pelayanan dasar bidang sosial (PPKS yang terlayani); pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum (penanganan korban penertiban olrh trantibum) kesejahteraan masyarakat (IPM); Penurunan angka pengangguran, penurunan angka kemiskinan), pelayanan umum pemerintahan (inovasi pelayanan publik, inovasi pemerintahan daerah, penghargaan pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, SAKIP), peningkatan ekspor, peningkatan investasi dan pengelolaan sampah.
 - e. Belanja daerah dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah.
 - f. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel dengan menerapkan basis akrual.
 - g. Belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan mengarah pada pencapaian visi dan misi daerah.
 - h. Belanja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah dialokasikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - i. Proporsi belanja modal ditingkatkan untuk memenuhi proporsi di atas 20% dari total belanja.
 - j. Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah agar program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Perbandingan kebijakan pengelolaan masalah dengan kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada masa yang akan datang terlihat pada matriks berikut:

Tabel 3.12.
Perbandingan Kebijakan Pengelolaan Keuangan RPJMD 2016-2021
dengan Kebijakan Pengelolaan Keuangan RPJMD 2021-2026

Unsur APBD	Kebijakan RPJMD 2016-2021	Kebijakan RPJMD 2021-2026
Kebijakan Pendapatan daerah	Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan meningkatkan PAD sebagai sumber utama pendapatan daerah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya peningkatan PAD dilakukan dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah tanpa menimbulkan <i>high cost economy</i> terhadap perkembangan arus investasi.	<p>1. Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi daerah dengan melakukan berbagai upaya antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan perhitungan kembali terhadap potensi pajak daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah melalui pajak daerah dapat menetapkan target pajak daerah mendekati potensi riil. Melakukan identifikasi ulang dan pemutakhiran data setiap tahun dengan menggunakan teknologi informasi yang memadai dan terintegrasi dan menetapkan wajib pajak prioritas berdasarkan potensi kontribusi terhadap pendapatan pajak daerah. Melakukan kebijakan <i>reward and punishment</i> kepada wajib pajak dan petugas yang melakukan pemungutan pajak. Melakukan penyuluhan terhadap wajib pajak dan retribusi agar mereka melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, bila perlu dilakukan upaya mendatangi langsung pada wajib pajak daerah potensial. <p>2. Mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD yang berdampak terhadap kesehatan dan bagi hasil laba BUMD ke dalam PAD.</p> <p>3. Pemanfaatan asset daerah untuk meningkatkan PAD</p> <p>Peningkatan pendapatan daerah melalui peningkatan PAD dan upaya peningkatan dana transfer melalui upaya meraih Dana Insentif Daerah (DID) dengan meningkatkan upaya penetapan APBD tepat waktu, pengiriman LPPD tepat waktu, Opini BPK harus WTP, penggunaan e-procurement, penggunaan e-budgetting; Kategori Kinerja (Batas Nilai Minimal = 76 (B) yaitu kesehatan fiskal dan kinerja pengelolaan keuangan daerah,</p>

Unsur APBD	Kebijakan RPJMD 2016-2021	Kebijakan RPJMD 2021-2026
		<p>pengendalian inflasi daerah, pelayanan dasar bidang pendidikan (APM, peta mutu pendidikan); pelayanan dasar bidang kesehatan (Balita mendapatkan imunisasi lengkap, penanganan Balita Stunting, persalinan fasilitas kesehatan); pelayanan dasar bidang infrastruktur (akses sanitasi layak, sumber air minum layak), kesejahteraan masyarakat (IPM, Penurunan angka pengangguran, penurunan angka kemiskinan), pelayanan umum pemerintahan (inovasi pelayanan publik, inovasi pemerintahan daerah, penghargaan pembangunan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, SAKIP), peningkatan ekspor, peningkatan investasi dan pengelolaan sampah</p>
Kebijakan Belanja daerah	<p>Persentase belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah relatif menurun dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, tahun 2016 persentasenya sebesar 52,39% dan tahun 2020 sebesar 45,53%</p> <p>Realisasi belanja dibandingkan dengan target 2016 – 2020 menunjukkan bahwa realisasi belanja daerah pada tahun 2016 – 2020 berkisar 84,38% - 89,89%.</p>	<p>Proporsi belanja modal ditingkatkan untuk memenuhi proporsi di atas 20% dari total belanja.</p> <p>Peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah agar program prioritas dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.</p> <p>Belanja daerah dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata pada seluruh lapisan masyarakat dan seluruh wilayah.</p> <p>Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, transparan dan akuntabel dengan menerapkan basis akrual.</p> <p>Belanja pegawai dan tunjangan kinerja pegawai dianggarkan sesuai regulasi yang berlaku dan mengarah pada pencapaian visi dan misi daerah.</p> <p>Belanja perangkat daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dan belanja pembangunan daerah dialokasikan secara proporsional sesuai kemampuan keuangan daerah.</p>

D. Neraca

Analisis Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Aset pemerintah Kabupaten Pekalongan selama tahun 2016-2020 rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 8,25%. Pada tahun 2016, aset yang dimiliki mencapai Rp1.315.863.098.360, meningkat menjadi sebesar Rp1.778.508.132.757,34. Namun jika dibandingkan dengan kondisi di tahun 2019 sebesar Rp1.813.559.498.130, aset pemerintah Kabupaten Pekalongan di tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp35.051.365.372,66 (1,97%). Keberadaan aset daerah ini memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai pemerintah Kabupaten Pekalongan yang mampu memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah dan masyarakat.

Kewajiban merupakan sebuah gambaran tentang kondisi utang Pemerintah Kabupaten Pekalongan dengan pihak ketiga. Kewajiban daerah Kabupaten Pekalongan dalam lima tahun terakhir rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 8,22%. Pada tahun 2020 kewajiban daerah mencapai sebesar Rp54.362.781.581,12, naik sebesar 48,31% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp28.102.289.578,18 Kewajiban daerah sendiri dapat dibagi menjadi dua, yakni kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Jumlah kewajiban jangka panjang sampai tahun 2020 tidak ada atau 0. Sedangkan jumlah kewajiban jangka pendek terbesar adalah utang belanja . Pada tahun 2020 kewajiban jangka pendek pada utang belanja sebesar Rp37.448.295.371,00

Ekuitas dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban Pemerintah Daerah. Dalam lima tahun terakhir, ekuitas dana di Kabupaten Pekalongan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 8,10%. Dilihat dari besarnya, ekuitas dana Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 mencapai sebesar Rp3.011.702.120.201,71, meningkat sebesar 0,63% dibandingkan kondisi tahun 2019 sebesar Rp2.992.578.617.239,9.

Gambaran kondisi neraca daerah pada tabel dapat digunakan sebagai bahan analisis kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio, di mana terdapat 2 jenis Rasio yang digunakan, yakni rasio likuiditas dan solvabilitas.

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah entitas dengan kewajiban lancarnya untuk melihat kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban lancarnya. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas Kabupaten Pekalongan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13.
Rasio Likuiditas Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

Rasio	Rumus	Tahun 2020
Rasio Lancar	<u>Aset Lancar</u>	3.066.064.901.782,83
	Kewajiban Jangka Panjang	0,00
Rasio Quick (<i>Quick Ratio</i>)	<u>Aset Lancar - Persediaan</u>	208.697.917.012,89
	Kewajiban Jangka Pendek	54.362.781.581,12
	<u>Total hutang</u>	54.362.781.581,12
		0,018

Rasio total hutang terhadap total aset	Total aset	3.066.064.901.782,83	
--	------------	----------------------	--

Berdasarkan tabel di atas, nilai rasio perhitungan dengan analisis rasio lancar pada tahun 2020 sangat besar, hal inikarenakan Kabupaten Pekalongan tidak memiliki kewajiban jangka panjang Kondisi tersebut menunjukkan rasio lancar Kabupaten Pekalongan termasuk kategori baik. Nilai rasio pada perhitungan Rasio *Quick* mencapai sebesar 384%, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan Kabupaten Pekalongan dalam kondisi baik. Sementara itu, kondisi rasio total hutang terhadap total aset berdasarkan perhitungan menunjukkan angka sebesar 0,018 termasuk sangat kecil. Dengan demikian, kondisi kapabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan cukup kuat dalam pelunasan kewajiban-kewajiban daerahnya.

2. Rasio Solvabilitas

Rasio Solvabilitas atau disebut juga *Ratio Leverage* yaitu mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh suatu entitas dengan dana yang dipinjam dari kreditur entitas tersebut. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Rasio solvabilitas Kabupaten Pekalongan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.14.
Rasio Solvabilitas Kabupaten Pekalongan Tahun 2020

Rasio	Rumus		Tahun 2020 (%)
Rasio Kewajiban terhadap Aset	<u>Kewajiban</u>	<u>54.362.781.581,12</u>	1,77
	Aset	3.066.064.901.782,83	
Rasio Kewajiban terhadap Ekuitas	<u>Kewajiban</u>	<u>54.362.781.581,12</u>	1,80
	Ekuitas	3.011.702.120.201,71	

Berdasarkan tabel di atas, rasio kewajiban terhadap aset di Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sangat rendah hanya 1,77%. Kecilnya nilai rasio ini menunjukkan bahwa kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi terkait anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan masih jauh di bawah nilai total aset yang dimiliki. Sementara itu pada rasio kewajiban terhadap ekuitas (modal) juga rendah, yaitu sebesar 1,80%, yang menunjukkan bahwa nilai total utang masih jauh dibawah nilai modal yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Tabel 3.15.
Neraca Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2016 - 2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
ASET	2.166.875.317.645,29	2.469.666.568.415,46	2.763.481.985.690,28	3.020.680.906.818,08	3.066.064.901.782,83	8,22
ASET LANCAR	317.359.834.646,88	324.546.654.199,40	309.179.045.819,24	304.010.079.136,24	252.945.695.664,84	- 6,16
Kas dan Setara Kas	204.443.347.505,77	229.883.946.746,88	170.885.143.205,71	159.978.997.375,22	163.759.759.877,37	- 6,99
Kas di Kas Daerah	125.703.540.181,00	35.930.032.731,00	31.398.678.041,00	40.873.869.060,00	20.755.929.781,00	- 84,51
Kas di Bendahara Penerimaan	61.785,00	14.299.648,00	1.245.000,00	0,00	18.192.115,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kas di BLUD	62.074.880.142,86	85.982.317.052,63	87.941.770.167,46	105.668.596.284,97	140.490.859.278,12	17,90
Kas Lainnya	813.837.020,91	2.086.931.485,25	1.543.449.997,25	13.436.532.030,25	2.494.778.703,25	- 81,07
Kas di Puskesmas	15.851.028.376,00	12.870.365.830,00	0,00			
Setara Kas	0,00	93.000.000.000,00	50.000.000.000,00	0,00	0,00	
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Piutang Pendapatan	55.537.632.675,52	45.310.511.884,73	68.421.524.918,77	86.867.595.492,46	44.226.448.089,78	- 15,99
Piutang Pajak Daerah		6.466.109.263,69	7.180.110.242,00	9.090.715.032,67	9.220.149.748,00	33,09
Piutang Pajak Daerah		20.259.194.488,00	21.327.992.218,00	24.791.585.893,00	26.039.176.816,00	30,94
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		-13.793.085.224,31	-14.147.881.976,00	-15.700.870.860,33	-16.819.027.068,00	9,76
Piutang Retribusi		278.145.185,50	488.111.105,36	240.442.048,14	118.677.232,00	- 15,65
Piutang Retribusi		279.542.900,00	497.035.680,36	241.943.772,00	119.273.600,00	- 16,13
Penyisihan Piutang Retribusi		-1.397.714,50	-8.924.575,00	-1.501.723,86	-596.368,00	- 115,44
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		38.349.094.195,54	55.885.874.147,41	64.796.989.257,65	17.620.638.959,38	- 30,65
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		40.322.511.101,09	58.764.945.398,45	68.670.096.147,15	22.276.482.913,83	- 15,61

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		-1.973.416.905,55	-2.879.071.251,04	-3.873.106.889,50	-4.655.843.954,45	43,48
Piutang Transfer		0,00	4.619.147.774,00	12.174.867.450,00	15.437.895.200,00	
Piutang Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi		0,00	4.619.147.774,00	12.174.867.450,00	15.437.895.200,00	
Piutang Lain-lain	1.098.407.271,00	217.163.240,00	248.281.650,00	137.743.000,00	28.100.000,00	- 215,93
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		576.572.500,00	720.242.500,00	738.092.500,00	737.292.500,00	30,56
Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		59.983.090,00	6.900.000,00	4.500.000,00	3.900.000,00	- 184,51
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		-419.392.350,00	-478.860.850,00	-604.849.500,00	-713.092.500,00	37,11
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				426.838.704,00	1.800.986.950,40	
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				426.838.704,00	1.800.986.950,40	
Penyisihan Piutang	-13.356.219.648,32					
Beban Dibayar Dimuka	478.215.936,88	600.504.249,51	599.671.372,00	827.482.529,45	711.709.045,74	7,87
Persediaan	69.158.450.906,03	48.751.691.318,28	69.272.706.322,76	56.336.003.739,11	44.247.778.651,95	- 15,63
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00			
Jumlah Aset Lancar	317.359.834.646,88	324.546.654.199,40	309.179.045.819,24	304.010.079.136,24	252.945.695.664,84	- 6,16
INVESTASI JANGKA PANJANG	64.895.345.175,99	70.547.539.366,17	73.219.229.463,86	71.343.633.933,41	74.723.528.151,94	3,39

Uraian		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Investasi Non Permanen	571.450.000,00	255.510.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	
	Investasi dalam Pinjaman Dana Bergulir	571.450.000,00	255.510.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	
	Jumlah Investasi Non Permanen	571.450.000,00	255.510.000,00	48.400.000,00	0,00	0,00	
	Investasi Permanen	64.323.895.175,99	70.292.029.366,17	73.170.829.463,86	71.343.633.933,41	74.723.528.151,94	3,60
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	64.323.895.175,99	70.292.029.366,17	73.170.829.463,86	71.343.633.933,41	74.723.528.151,94	3,60
	Jumlah Investasi Permanen	64.323.895.175,99	70.292.029.366,17	73.170.829.463,86	71.343.633.933,41	74.723.528.151,94	3,60
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	64.895.345.175,99	70.547.539.366,17	73.219.229.463,86	71.343.633.933,41	74.723.528.151,94	3,39
	ASET TETAP	1.774.353.773.692,58	2.063.342.375.474,59	2.354.154.800.039,53	2.613.128.199.566,94	2.705.387.574.153,95	9,92
	Tanah	740.883.182.396,11	776.138.103.842,03	784.555.690.876,03	795.960.216.227,03	884.008.334.706,33	4,25
	Peralatan dan Mesin	414.366.368.008,86	481.520.709.767,09	554.256.665.843,04	611.861.631.678,63	690.628.711.811,36	11,97
	Gedung dan Bangunan	743.255.179.739,22	781.187.843.742,86	858.626.369.619,13	996.762.409.554,69	1.070.628.219.890,26	8,66
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	721.011.977.142,78	917.747.705.693,69	1.160.089.266.677,00	1.312.625.664.823,68	1.460.940.763.020,85	16,02
	Aset Tetap Lainnya	55.623.092.042,46	98.746.692.840,61	113.286.852.645,01	127.487.566.236,01	134.865.754.052,49	18,28
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	24.794.833.101,25	20.924.440.067,92	25.207.412.803,86	21.092.404.184,41	5.026.213.547,96	- 85,17
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-925.580.858.738,10	1.012.923.120.479,61	1.141.867.458.424,53	1.252.661.693.137,51	1.540.710.422.875,30	11,86
	Jumlah Aset Tetap	1.774.353.773.692,58	2.063.342.375.474,59	2.354.154.800.039,53	2.613.128.199.566,94	2.705.387.574.153,95	9,92
	DANA CADANGAN						
	ASET LAINNYA	10.266.364.129,84	11.229.999.375,30	26.928.910.367,65	32.198.994.181,49	33.008.103.812,10	21,42
	Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	156.050.000,00	153.050.000,00	153.050.000,00	153.050.000,00	153.050.000,00	- 0,49
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	979.000.000,00	979.000.000,00	979.000.000,00	979.000.000,00	979.000.000,00	

Uraian		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Aset tidak berwujud	1.551.173.328,00	1.847.530.206,38	1.786.267.333,87	1.938.292.922,65	1.470.600.105,50	- 2,84
	Aset tidak berwujud	4.927.843.568,68	5.753.743.647,33	6.360.953.721,66	7.581.874.659,01	7.612.287.036,01	10,10
	Akumulasi Amortisasi Aset tidak berwujud	-3.376.670.240,68	-3.906.213.440,95	-4.574.686.387,79	-5.643.581.736,36	-6.141.686.930,51	13,80
	Aset Lain-Lain	7.580.140.801,84	8.250.419.168,92	24.010.593.033,78	29.128.651.258,84	30.405.453.706,60	23,88
	Aset Lain-Lain	20.098.353.182,45	21.174.396.512,30	56.451.267.905,11	63.750.510.174,10	61.975.088.442,28	19,04
	Akumulasi Amortisasi Aset lain-lain	-12.518.212.380,61	-12.923.977.343,38	-32.440.674.871,33	-34.621.858.915,26	-31.569.634.735,68	14,98
	Jumlah Aset Lainnya	10.266.364.129,84	11.229.999.375,30	26.928.910.367,65	32.198.994.181,49	33.008.103.812,10	21,42
JUMLAH ASET		2.166.875.317.645,29	2.469.666.568.415,46	2.763.481.985.690,28	3.020.680.906.818,08	3.066.064.901.782,83	8,22
KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA							
	KEWAJIBAN	28.877.203.783,22	24.510.703.563,62	27.308.927.798,84	28.102.289.578,18	54.362.781.581,12	10,89
	Kewajiban Jangka Pendek	28.877.203.783,22	24.510.703.563,62	27.308.927.798,84	28.102.289.578,18	54.362.781.581,12	10,89
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	262.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Pendapatan Dibayar Dimuka	495.059.247,13	469.795.105,00	621.824.659,00	755.085.706,00	611.251.405,00	3,30
	Utang Belanja	15.649.456.965,00	13.164.143.885,00	6.047.183.263,57	7.198.578.922,00	37.448.295.371,00	- 9,95
	Utang BLUD	12.732.425.011,09	10.876.764.573,62	15.725.467.446,27	20.148.624.950,18	16.303.234.805,12	3,03
	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00	4.914.452.430,00	0,00	0,00	
	Utang Lain-lain		0,00	0,00			
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	28.877.203.783,22	24.510.703.563,62	27.308.927.798,84	28.102.289.578,18	54.362.781.581,12	10,89

Uraian		2016	2017	2018	2019	2020	Rata-rata Pertumbuhan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Kewajiban	28.877.203.783,22	24.510.703.563,62	27.308.927.798,84	28.102.289.578,18	54.362.781.581,12	10,89
	EKUITAS	2.137.998.113.862,07	2.445.155.864.851,84	2.736.173.057.891,44	2.992.578.617.239,90	3.011.702.120.201,71	8,10
	Ekuitas	2.137.998.113.862,07	2.445.155.864.851,84	2.736.173.057.891,44	2.992.578.617.239,90	3.011.702.120.201,71	8,10
	Ekuitas	1.934.011.938.924,28	2.445.155.864.851,84	2.736.173.057.891,44	2.992.578.617.239,90	3.011.702.120.201,71	10,19
	Ekuitas SAL	203.986.174.937,79			0,00	0,00	
	Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00			
	Jumlah Ekuitas	2.137.998.113.862,07	2.445.155.864.851,84	2.736.173.057.891,44	2.992.578.617.239,90	3.011.702.120.201,71	8,10
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	2.166.875.317.645,29	2.469.666.568.415,46	2.763.481.985.690,28	3.020.680.906.818,08	3.066.064.901.782,83	8,22

Sumber: BPKD Kabupaten Pekalongan 2021

E. Kerangka Pendanaan Tahun 2021-2026

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya.

Suatu kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan kebijakan pengelolaan keuangan daerah tahun 2021 – 2026 di atas, maka proyeksi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pekalongan tahun 2021 – 2026 disusun dengan berbasis pada asumsi:

- (1) Kondisi Pandemi Covid 19 yang berlangsung sejak tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2021 belum menunjukkan berakhir menyebabkan pertumbuhan ekonomi melambat. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi diasumsikan berkisar 1% – 4,5%.
- (2) Asumsi Inflasi Kabupaten Pekalongan yang digunakan untuk proyeksi adalah 2% – 4%.
- (3) Proyeksi pendapatan daerah diproyeksikan selama tahun 2021 – 2026 sebesar 1% - 3% pertahun.
- (4) Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dihitung dengan memperhatikan kinerja realisasi PAD tahun 2016 – 2020 dan perilaku potensi masing-masing sumber PAD.
- (5) Dana tranfer menyesuaikan kebijakan pemerintah berdasarkan pada kebijakan keuangan RPJMN tahun 2020 – 2024. Dalam proyeksi pendapatan transfer tahun 2022-2026 diasumsikan dana transfer dari pemerintah pusat mengalami peningkatan yang moderat dengan pertumbuhan kurang lebih 2% dengan baseline dana transfer pada APBD tahun 2022. Hal ini seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian nasional dengan semakin meningkatnya *herd immunity* dengan vaksin seiring dengan upaya penanganan dampak pandemi yang dilakukan Pemerintah yang semakin baik, sehingga kondisi keuangan negara diperkirakan semakin membaik yang berimbas pada penambahan transfer ke daerah. Pendapatan Transfer dari dana DAK diasumsikan sesuai dengan rencana program/kegiatan/sub kegiatan DAK Tahun 2022-2026, yang dilakukan dengan menggunakan alokasi setiap sumber dana atas setiap kegiatan/sub kegiatan yang berpotensi akan didanai melalui sumber pendanaan DAK.

1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah; dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD yang akan digunakan untuk mendanai belanja daerah Tahun 2022 – 2026 didasarkan atas asumsi dari masing-masing komponen PAD. Asumsi tersebut termasuk telah memperhitungkan adanya pandemi

Covid-19 yang berpotensi mempengaruhi resiko fiskal atas optimalisasi PAD.

- a) Proyeksi pajak daerah Tahun 2022-2026, didasarkan atas baseline tahun 2020 dan 2021, dengan memasukkan adanya variabel pandemi Covid-19, yang menekan penurunan potensi pajak daerah. Tekanan tersebut tercermin dari penurunan PDB Tahun 2020 sebesar -1,89%. Variabel pandemi penting untuk dimasukkan dalam model, karena terdapat pengaruh pertumbuhan PDB dengan potensi pajak yang dapat diraih. Penurunan sektor PDB akibat pandemi Covid-19, telah menyebabkan adanya koreksi pada komponen pajak daerah, antara lain : pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir, pajak hiburan, pajak penerangan jalan umum, PPB dan BPHTB. Pengaruh tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan sosial *distancing* dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Dengan rata-rata pertumbuhan Pajak Daerah dari tahun 2016 – 2020 sebesar 17,20%, proyeksi Pertumbuhan Pajak Daerah diasumsikan 10% per tahun.
- b) Proyeksi Retribusi daerah tahun 2021 – 2026, analog dengan tekanan pandemi Covid-19 pada pos pajak daerah, penurunan potensi juga terjadi pada pos retribusi daerah, khususnya yang bersumber dari retribusi jasa usaha. Penurunan terbesar bersumber dari koreksi atas asumsi penerimaan retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang menyesuaikan dengan daya tarik investasi yang tertekan akibat pandemi Covid-19 dan retribusi pelayanan pasar tradisional, menyesuaikan dengan kebijakan pembatasan sosial *distancing* dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Beberapa pos retribusi daerah menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, antara lain penghapusan retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan penyesuaian model atas Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Jika asumsi pandemi Covid-19 masih berlangsung dalam periode RPJMD tahun 2022-2026, maka penerimaan retribusi mengalami trend yang meningkat rata-rata 5% per tahun, khususnya atas retribusi jasa usaha yang bersumber dari retribusi IMB dan retribusi pelayanan pasar tradisional. Sebagai *benchmarking* realisasi retribusi daerah tahun 2020 sebesar Rp12.798.738.000,00 dan baseline retribusi daerah tahun 2021 sebesar Rp12.861.008.641,00.
- c) Proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang bersumber dari Perusda yang ada di Kabupaten Pekalongan didasarkan atas perilaku pertumbuhan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami fluktuasi yang tinggi, maka hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% per tahun pada periode 2022 – 2026, dengan baseline pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan perubahan RAPBD tahun 2021 yaitu sebesar Rp8.728.490.728,00
- d) Proyeksi lain-lain PAD yang sah didasarkan pada perilaku pertumbuhan selama tahun 2016 – 2020 dengan rata-rata pertumbuhan -1,07%. Sumber terbesar pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah, bersumber dari pendapatan layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dengan skema fleksibilitas PPK BLUD untuk menjamin kualitas layanan BLUD. Sumber pendapatan BLUD rata-

rata diproyeksikan tumbuh 5% per tahun. Kontribusi terbesar pendapatan BLUD bersumber dari pendapatan 2 RSUD Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Puskesmas, namun demikian pendapatan ini, selanjutnya digunakan kembali untuk meningkatkan kualitas layanan BLUD menuju pada kemandirian BLUD.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Proyeksi pendapatan transfer pemerintah pusat, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi tahun 2020 dan tahun 2021 serta memperhitungkan kebijakan APBN Tahun 2022-2026. Termasuk dalam proyeksi, dimasukkan variabel pandemi Covid-19 yang berpotensi menimbulkan adanya resiko fiskal yang akan dihadapi pemerintah daerah, terkait dengan transfer ke daerah. Resiko pandemi Covid-19 telah dimasukkan dalam kebijakan APBN tahun berjalan, dan asumsi perekonomian nasional dan global yang berdampak terhadap Penerimaan Dalam Negeri Netto (PMDN). Kecermatan dan kehati-hatian terhadap asumsi dan proyeksi dana transfer pemerintah pusat menjadi penting, mengingat share pendapatan transfer pusat, mencapai 65,40% terhadap total pendapatan daerah, yang diartikan daerah memiliki derajat ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Secara umum sumber utama pendapatan transfer pemerintah pusat, bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik maupun non fisik dan Dana Insentif Daerah (DID). Dana *block grant* melalui DAU sebagai instrumen menutup kesenjangan fiskal antar daerah dan Dana Alokasi Khusus (DAK) baik Fisik dan Non Fisik, dengan pola proposal based yang disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional. Potensi kenaikan DAU diasumsikan sebesar 2% per tahun dalam model, dan akan diikuti dengan kenaikan beban belanja pegawai, seiring dengan rekrutmen penerimaan ASN mulai tahun 2022. Proyeksi DAU berdasarkan baseline DAU Tahun 2022 sebesar Rp871.105.712.000,00

Pencermatan terhadap Dana Transfer, bersumber dari kebijakan *refocusing* anggaran untuk penanganan Covid-19 yang masih terus berpotensi terjadi, baik terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil serta DAK (Fisik dan Non Fisik). Pendapatan DAK telah dimasukkan dalam model, dengan asumsi baseline DAK Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Sedangkan pendapatan transfer pemerintah pusat, yang berasal dari Dana Insentif Daerah (DID), dalam proyeksi Tahun 2022-2026 diasumsikan meningkat, per tahun dengan baseline DID Tahun 2022 sebesar Rp1.482.507.000,00. Termasuk dalam hal ini, kebijakan penggunaan Dana Insentif Daerah (DID) sebagai stimulan bagi daerah dengan peningkatan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, menyesuaikan dengan kebijakan penggunaan DID tahun 2022-2026, termasuk dalam hal ini kriteria DID yang digunakan untuk penanganan Covid-19.

3) Pendapatan Transfer Antar Daerah

Proyeksi pendapatan transfer antar daerah, didasarkan atas asumsi dengan menggunakan baseline data realisasi tahun 2020 dan tahun 2021. Pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari bagi hasil dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, sangat

dipengaruhi dari asumsi dan potensi pendapatan DBH pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota tahun 2022 – 2026. Diasumsikan penerimaan pajak kendaraan bermotor akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan keadaan perekonomian yang semakin membaik. Sedangkan proyeksi bantuan keuangan kepada kabupaten/ kota akan disinkronkan dengan pembangunan Provinsi Jawa Tengah ke depan. Proyeksi pendapatan transfer antar daerah menggunakan baseline RAPBD Perubahan tahun 2021.

4) Lain-lain pendapatan yang Sah.

Proyeksi lain-lain pendapatan yang sah tahun 2022 – 2026 didasarkan pada dana hibah dengan baseline pada tahun 2021 yaitu RAPBD Perubahan.

b. Belanja Daerah

1) Belanja Operasi

Rasio belanja operasi terhadap total belanja pada tahun 2016 – 2020 sebesar rata-rata 65,13% per tahun. Proyeksi belanja operasi tahun 2022 – 2026 yang didominasi rasio belanja pegawai rata-rata sebesar 40,30% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar 2% per tahun. Sedangkan proyeksi belanja barang dan jasa pada tahun 2022 – 2026 rata-rata proposi sebesar 23,63% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan 8,18%.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah baik berupa uang maupun barang akan dianggarkan pada perangkat daerah berkenaan, sehingga harus ada kepastian by name by address penerima hibah. Belanja hibah pada tahun 2024 besar untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemilu serentak.

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan

Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian belanja bantuan sosial baik berupa uang maupun barang dianggarkan pada perangkat daerah berkenaan, sehingga harus ada kepastian by name bg address penerima bansos.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/ atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak / retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak / bukan pajak dari pemerintah pusat.

2) Belanja Modal

Belanja modal tahun 2022-2026 diproyeksikan dengan proporsi pada kisaran 14,09 - 15,05% dari total belanja daerah. Komponen terbesar pada belanja modal adalah pada belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan dengan proporsi 40,85% dari total belanja modal. Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah yang mengarah pada pengembangan peningkatan infrastruktur perkotaan dan sumberdaya air, dan layanan dasar permukiman.

c. Kebijakan dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2021–2026

Proyeksi penerimaan pembiayaan daerah direncanakan secara selektif dan berimbang antara kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kapasitas keuangan daerah. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) diproyeksikan sebagai salah satu sumber penerimaan pembiayaan berdasarkan analisa realisasi SiLPA selama 5 (lima) tahun sebelumnya. Pada sisi pengeluaran pembiayaan, dalam lima tahun ke depan Pemerintah Kabupaten Pekalongan merencanakan adanya penyertaan modal kepada beberapa BUMD guna meningkatkan kinerja dan penguatan struktur modal BUMD serta pengembalian pinjaman daerah.

Pada tabel berikut dicantumkan hasil proyeksi Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pekalongan untuk 5 tahun ke depan berdasarkan persentase rata-rata pertumbuhan pendapatan dan belanja dari data APBD tahun 2016 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 3.16.
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026

No	U R A I A N	APBD PERUBAHAN 2021 (Rp)	RAPBD 2022 (Rp)	TAHUN RENCANA 2023 (Rp)	TAHUN RENCANA 2024 (Rp)	TAHUN RENCANA 2025 (Rp)	TAHUN RENCANA 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	PENDAPATAN	2.087.721.836.280	2.138.175.704.560	2.205.938.992.467	2.277.331.295.101	2.351.933.596.232	2.429.940.251.079
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	339.693.849.261	439.706.805.546	466.356.649.284	494.805.435.553	525.189.756.518	557.657.698.449
a	Pajak Daerah	77.131.232.673	93.290.069.200	102.619.076.120	112.880.983.732	124.169.082.105	136.585.990.316
b	Retribusi Daerah	12.861.008.641	24.499.937.915	25.724.934.811	27.011.181.551	28.361.740.629	29.779.827.660
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.728.490.728	10.801.701.491	11.341.786.566	11.908.875.894	12.504.319.689	13.129.535.673
d	Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah	240.973.117.219	311.115.096.940	326.670.851.787	343.004.394.376	360.154.614.095	378.162.344.800
							-
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.650.485.233.316	1.689.868.899.014	1.731.582.343.183	1.774.525.859.548	1.818.743.839.714	1.864.282.552.630
a	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.520.185.651.302	1.561.777.317.000	1.600.928.929.529	1.641.259.377.621	1.682.812.028.148	1.725.632.104.833
1)	Dana Perimbangan	1.223.499.360.302	1.296.425.937.000	1.322.354.455.739	1.348.801.544.855	1.375.777.575.753	1.403.293.127.267
a)	Dana Transfer Umum	902.499.633.302	891.773.352.000	909.608.819.039	927.800.995.421	946.357.015.330	965.284.155.636
(1)	Dana Bagi Hasil	31.432.232.302	20.667.640.000	21.080.992.799	21.502.612.656	21.932.664.910	22.371.318.208
(2)	Dana Alokasi Umum	871.067.401.000	871.105.712.000	888.527.826.240	906.298.382.765	924.424.350.420	942.912.837.428
b)	Dana Transfer Khusus	320.999.727.000	404.652.585.000	412.745.636.700	421.000.549.434	429.420.560.423	438.008.971.631
(1)	DAK Fisik	95.165.850.000	84.647.794.000	86.340.749.880	88.067.564.878	89.828.916.175	91.625.494.499
(2)	DAK Non Fisik	225.833.877.000	320.004.791.000	326.404.886.820	332.932.984.556	339.591.644.248	346.383.477.132
2)	Dana Insentif Daerah	33.289.185.000	1.482.507.000	1.512.157.140	1.542.400.283	1.573.248.288	1.604.713.254
3)	Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0
4)	Dana Keistimewaan	0	0	0	0	0	0
5)	Dana Desa	263.397.106.000	263.868.873.000	277.062.316.650	290.915.432.483	305.461.204.107	320.734.264.312
2.2	TRANSFER ANTAR-DAERAH	130.299.582.014	128.091.582.014	130.653.413.654	133.266.481.927	135.931.811.566	138.650.447.797
a	Pendapatan Bagi Hasil	123.091.582.014	128.091.582.014	130.653.413.654	133.266.481.927	135.931.811.566	138.650.447.797
b	Bantuan Keuangan	7.208.000.000	0	0	0	0	0

No	U R A I A N	APBD PERUBAHAN 2021 (Rp)	RAPBD 2022 (Rp)	TAHUN RENCANA 2023 (Rp)	TAHUN RENCANA 2024 (Rp)	TAHUN RENCANA 2025 (Rp)	TAHUN RENCANA 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	97.542.753.703	8.600.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
a	Hibah	9.500.000.000	8.600.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
b	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundangan	88.042.753.703	-	-	-	-	-
B	BELANJA	2.245.481.596.157	2.122.675.704.560	2.184.438.992.467	2.311.331.295.101	2.320.933.596.232	2.408.940.251.079
1	Belanja Operasi	1.614.090.376.725	1.509.408.154.092	1.559.026.090.990	1.673.530.135.594	1.670.496.413.534	1.745.614.324.728
a	Belanja Pegawai	1.007.104.707.945	1.001.923.275.841	1.021.161.741.358	1.040.784.976.185	1.060.800.675.709	1.081.216.689.223
b	Belanja Barang dan Jasa	523.273.345.451	425.792.852.652	470.200.478.343	493.547.241.000	538.917.750.876	591.992.177.956
c	Belanja Bunga	0	0	0	0	0	0
d	Belanja Hibah	67.183.356.180	60.223.922.599	51.134.904.140	122.668.951.260	54.249.019.800	55.876.490.400
e	Belanja Bantuan Sosial	16.528.967.149	21.468.103.000	16.528.967.149	16.528.967.149	16.528.967.149	16.528.967.149
2	Belanja Modal	247.321.585.793	227.247.027.946	231.791.968.505	236.427.807.875	241.156.364.033	245.979.491.313
a	Belanja Modal Tanah	9.112.538.135	7.599.458.500	7.751.447.670	7.906.476.623	8.064.606.156	8.225.898.279
b	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	61.015.884.897	64.504.952.518	65.795.051.568	67.110.952.600	68.453.171.652	69.822.235.085
c	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.363.056.555	55.427.007.894	56.535.548.052	57.666.259.013	58.819.584.193	59.995.975.877
d	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	101.429.917.229	92.849.365.700	94.706.353.014	96.600.480.074	98.532.489.676	100.503.139.469
e	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.400.188.977	6.866.243.334	7.003.568.201	7.143.639.565	7.286.512.356	7.432.242.603
f	Belanja Modal BLUD	0	0	0	0	0	0
3	Belanja tak Terduga	5.604.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
	Belanja Tidak Terduga	5.604.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
4	Transfer	378.465.633.639	380.020.522.522	387.620.932.972	395.373.351.632	403.280.818.665	411.346.435.038
	Surplus / Defisit	(157.759.759.877)	15.500.000.000	21.500.000.000	6.000.000.000	31.000.000.000	21.000.000.000
C	PEMBIAYAAN						
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	157.759.759.877	(15.500.000.000)	(21.500.000.000)	34.000.000.000	(31.000.000.000)	(21.000.000.000)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	163.759.759.877	9.000.000.000	9.000.000.000	49.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000

No	U R A I A N	APBD PERUBAHAN 2021 (Rp)	RAPBD 2022 (Rp)	TAHUN RENCANA 2023 (Rp)	TAHUN RENCANA 2024 (Rp)	TAHUN RENCANA 2025 (Rp)	TAHUN RENCANA 2026 (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Penerimaan Piutang Daerah	163.759.759.877	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000	9.000.000.000
3	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0	0
4	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	0
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	6.000.000.000	24.500.000.000	30.500.000.000	15.000.000.000	40.000.000.000	30.000.000.000
1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.000.000.000	4.500.000.000	10.500.000.000	15.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000
2	Pembayaran Pokok Hutang	0	0	0	0	0	0
3	Pembentukan Dana Cadangan	0	20.000.000.000	20.000.000.000	0	20.000.000.000	20.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	157.759.759.877	(15.500.000.000)	(21.500.000.000)	34.000.000.000	(31.000.000.000)	(21.000.000.000)
	SILPA Tahun Berjalan	-	-	-	-	-	-

Keterangan: *) RAPBD tahun 2021 perubahan

Sumber : Data Pendapatan Hasil Proyeksi BPKD Kab. Pekalongan

2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

a. Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Proyeksi Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2021 sampai dengan 2026 menggunakan data rata-rata pertumbuhan belanja wajib kurun waktu 2016-2020. Direncanakan nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 mengalami kenaikan sebagaimana ditunjukkan melalui Tabel berikut ini:

Tabel 3.17.
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021 – 2026 (Rp)

No	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026
A.	PENDAPATAN DAERAH	2.087.721.836.280	2.138.175.704.560	2.205.938.992.467	2.277.331.295.101	2.351.933.596.232	2.429.940.251.079
B.	BELANJA DAERAH	1.655.762.655.361	1.644.947.862.916	1.677.046.820.174	1.739.787.756.577	1.743.183.511.710	1.777.247.181.943
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.007.104.707.945	1.001.923.275.841	1.021.161.741.358	1.040.784.976.185	1.060.800.675.709	1.081.216.689.223
2.	Belanja BLUD	174.859.088.777	178.356.270.553	181.923.395.964	185.561.863.883	189.273.101.161	193.058.563.184
3.	Belanja Jalan, Irigasi Jaringan (Prioritas Bupati)	95.333.225.000	84.647.794.000	86.340.749.880	88.067.564.878	89.828.916.175	91.625.494.499
4.	Dana Desa dan Bagi Hasil Pajak/Retribusi	378.465.633.639	380.020.522.522	387.620.932.972	395.373.351.632	403.280.818.665	411.346.435.038
5.	Penyelenggaraan Pilkada	-	-	-	30.000.000.000	-	-
C.	PEMBIAYAAN	6.000.000.000	24.500.000.000	30.500.000.000	15.000.000.000	40.000.000.000	30.000.000.000
1.	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000	4.500.000.000	10.500.000.000	15.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000
2.	Pembentukan Dana Cadangan	-	20.000.000.000	20.000.000.000	-	20.000.000.000	20.000.000.000
	PENGELUARAN WAJIB MENGIKAT	1.661.762.655.361	1.669.447.862.916	1.707.546.820.174	1.754.787.756.577	1.783.183.511.710	1.807.247.181.943
	KAPASITAS RIIL	425.959.180.919	468.727.841.644	498.392.172.293	522.543.538.524	568.750.084.522	622.693.069.136

Ket= *) APBD Perubahan tahun 2021

Sumber : Data diolah dari LRA 2016-2020 dan RAPBDP 2021 (BPKD Kab. Pekalongan)

b. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 3 (tiga). Kelompok Prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum Kelompok Prioritas II. Kelompok Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah Kelompok Prioritas I dan II terpenuhi kebutuhan dananya.

Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:

- 1) **Prioritas I**, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat;
- 2) **Prioritas II**, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar. Alokasi pemenuhan pelayanan dasar dihitung pada prioritas II dengan pertimbangan bahwa prioritas Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah juga termasuk hal tersebut.
- 3) **Prioritas III**, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

A. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat. Perumusan analisis permasalahan pembangunan daerah didasarkan pada analisis masa lalu dan masa datang. Permasalahan Pembangunan Daerah. Permasalahan Kabupaten Pekalongan dirumuskan berdasarkan kondisi masa lalu dari capaian kinerja Tahun 2016-2019 serta memperbandingkan dengan kondisi yang akan datang. Kondisi/harapan yang akan datang dapat dilihat dari target RPJMD, Kesepakatan Internasional SDGs, serta amanat Undang-Undang.

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pendidikan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih adanya anak usia sekolah yang belum bersekolah. Pemerintah Kabupaten Pekalongan harus melaksanakan amanat SDGs yaitu semua penduduk usia sekolah harus sekolah yang berarti partisipasi anak sekolah harus 100%. Pada tahun 2020 terdapat sekitar 0,27% yang tidak sekolah di SD/MI manapun baik di lingkungan Kabupaten Pekalongan maupun di luar wilayah Kabupaten Pekalongan. Partisipasi sekolah penduduk usia 13 – 15 tahun perlu mendapatkan perhatian, karena masih terdapat penduduk 3,63% penduduk usia SMP yang tidak menempuh pendidikan pada SMP/MTs manapun baik di lingkungan Kabupaten Pekalongan maupun di luar wilayah Kabupaten Pekalongan;
- 2) Masih adanya anak putus sekolah, pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs. Pada tahun 2020 9 anak putus sekolah SD sebesar 0,12% dan Putus Sekolah SMP sebesar 0,11%, perlu dicarikan solusi berkaitan dengan faktor penyebab putus sekolah bagi anak-anak tersebut;
- 3) Masih adanya anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Pada tahun 2020 anak yang tidak dapat melanjutkan sekolah ke SMP/MTs sebesar 5,83% dari jumlah lulusan pada tahun tersebut dan sebesar 19,97% lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MTs;
- 4) Sarana dan prasarana sekolah belum semuanya dalam kondisi baik. Pada tahun 2020 masih terdapat 12,89% SD/MI masih dalam kondisi kurang baik, dan 4,96 % SMP/MTs dalam kondisi kurang baik; dan
- 5) Belum semua guru SD/MI memiliki kualifikasi pendidikan S1/D4. Pada tahun 2020 masih terdapat 2,94% guru SD/MI dan 2,41% Guru SMP belum memenuhi kualifikasi.

b. Kesehatan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kesehatan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih ditemukan kematian ibu, pada tahun 2020 sebesar 66,43 per 100.000 kelahiran hidup walaupun sudah diatas melampaui target SDGs (70 per 100.000 kelahiran hidup) dan Provinsi Jawa tengah

- (98,60 per 100.000 per 100.000 kelahiran hidup), namun ini harus dikendalikan;
- 2) Masih ditemukan kematian bayi , pada tahun 2020 sebesar 6,47 per 1.000 kelahiran hidup dengan capaian diatas rata-rata Provinsi Jawa Tengah yaitu 7,79 per 1.000 kelahiran hidup;
 - 3) Masih tingginya stunting dan masih ditemukannya gizi buruk. Stunting pada Balita tahun 2020 mencapai kasus 3.896;
 - 4) Masih tingginya penyakit menular dan penyakit tidak menular. Tahun 2020 Insident Rate DBD masih diangka 26 per 100.000 penduduk, CDR TBC 9%. Hipertensi belum semua terlayani pelayanan baru mencapai 53%;
 - 5) Masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan dan sarana kesehatan. Rasio tenaga medis baru mencapai 1,90 per 1.000 penduduk, rasio RS dengan jumlah penduduk baru mencapai 0,003; dan
 - 6) Rumah tangga ber PHBS dan Kelurahan/Desa STBM belum optimal.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih tingginya kerusakan jalan di Kabupaten Pekalongan. Tahun 2020 kondisi sedang sebesar 16,91%, kondisi rusak berat sebesar 4,32%, dan kondisi rusak sebesar 1,96%;
- 2) Masih tingginya kerusakan jembatan sebesar 13,46% tahun 2020;
- 3) Belum optimalnya pelayanan air minum bagi masyarakat. Tahun 2020 cakupan pelayanan air minum baru mencapai 87,83%, belum mencapai target nasional yang ditetapkan 100%;
- 4) Belum optimalnya pelayanan sanitasi bagi masyarakat. Tahun 2019 cakupan pelayanan sanitasi baru mencapai 86,06%, belum mencapai target nasional yang ditetapkan 100%;
- 5) Belum optimalnya penyediaan air irigasi pertanian rakyat, tahun 2020 baru mencapai 78,45%;
- 6) Masih rendahnya kualitas bangunan irigasi, tahun 2020 Panjang Jaringan Irigasi Baik sebesar 382,085 km;
- 7) Belum optimalnya penanganan banjir dan rob. Tahun 2019 Persentase penurunan wilayah genangan banjir dan rob hanya mencapai 24%; dan
- 8) Belum optimalnya pembinaan jasa konstruksi. Tahun 2019 baru 0,53% jasa konstruksi yang dibina;
- 9) Belum optimalnya ketaatan terhadap RTRW (Tahun 2019 sebesar 74,3%);
- 10) Belum optimalnya informasi mengenai RTR wilayah kabupaten, tahun 2020 baru mencapai 84%.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Pekalongan, sampai dengan tahun 2020, rasio rumah tidak layak huni 7,08; dan
- 2) Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani, tahun 2020 sebanyak 8,82 % atau sekitar 96,46 Ha.
- 3) Belum optimalnya penanganan backlog perumahan. Capaian backlog penghunian rumah sebanyak 18.788 unit, meningkat menjadi 50.113 unit tahun 2020. Rata-rata peningkatan backlog penghunian rumah adalah sebanyak 9256 unit per tahun.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Semakin meningkatnya kasus pelanggaran peraturan daerah yang terjadi. Tahun 2020 terjadi sebanyak 70 kasus pelanggaran peraturan daerah;
- 2) Belum optimalnya penanganan/penyelesaian pelanggaran peraturan daerah. Dari 70 kasus pelanggaran, baru 61 kasus (87,14%) yang mampu diselesaikan;
- 3) Belum optimalnya patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dan terbatasnya jumlah anggota Satpol PP. Jumlah Petugas Satpol PP sampai dengan tahun 2020 sebesar 128 orang yang melayani 968.821 penduduk;
- 4) Belum optimalnya tingkat waktu tanggap bencana kebakaran. Di tahun 2019 baru mencapai 24,52% dari tingkat waktu tanggap yang dibutuhkan untuk menangani kebakaran;
- 5) Belum optimalnya upaya penjagaan ketertiban dan ketenteraman. Persentase penyelesaian pelanggaran Perda sebesar 87,14% di tahun 2020 dengan jumlah pelanggar perda sebanyak 70 kasus dan terselesaikan sebesar 61 kasus; dan
- 6) Belum optimalnya standar pelayanan minimal bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

f. Sosial

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Sosial di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya upaya penanganan PMKS di Kabupaten Pekalongan. Tercatat baru 4,96% PMKS yang mendapatkan bantuan sosial;
- 2) Penanganan kemiskinan juga masih belum optimal, khususnya dari sisi pemberdayaan terhadap fakir miskin yang ada. Tahun 2020 hanya 0,45% fakir miskin terintervensi program pemberdayaan ekonomi; dan
- 3) Belum optimalnya standar pelayanan minimal bidang sosial.

2. Urusan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Tenaga Kerja di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kemampuan untuk menyalurkan pencari kerja ke pasar kerja yang tersedia. Tahun 2020 baru sebanyak 30,95% pencari kerja yang mampu ditempatkan dan disalurkan ke pasar kerja;
- 2) Belum optimalnya pencari kerja yang dilatih ketrampilan diterima di pasar kerja. Tahun 2020 hanya 68,07% peserta pelatihan ketrampilan yang mampu diterima di pasar kerja;
- 3) Rendahnya persentase tenaga kerja yang telah terlindungi program jaminan social tenaga kerja/BPJS ketenagakerjaan. Dimana tahun 2020 persentasenya justru mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, capaian tahun 2020 hanya 46,09%; dan
- 4) Masih relatif tingginya angka TPT. Capaian TPT tahun 2020 sebesar 6,97% mengalami kenaikan tahun 2019 sebesar 4,43% akibat pandemi COVID-19.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut

- 1) Masih ditemukannya kasus kekerasan perempuan dan anak (rasio KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dari tahun 2016 sampai 2020 cenderung mengalami peningkatan, pada tahun 2020 rasio KDRT meningkat menjadi 0,000018);
- 2) Masih belum optimalnya partisipasi perempuan dilembaga eksekutif, legislatif dan swasta. Keterlibatan perempuan di DPRD sebesar 26,66% di tahun 2020, partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, pada tahun 2020 hanya mencapai 13,31%, mengalami kenaikan dari sebesar 13,11%. Rendahnya perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi di lembaga swasta. Tahun 2020 persentase perempuan sebagai tenaga profesional di lembaga swasta sebesar 9,11%;
- 3) Belum optimalnya kelembagaan PUG dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Hal ini dapat dilihat dengan capaian APE yang belum mencapai Utama;
- 4) Belum optimalnya pemenuhan hak anak, hal ini dapat dilihat dari pencapaian KLA belum mencapai Nindya;
- 5) Masih adanya ketimpangan gender dalam masyarakat. Capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020 yaitu sebesar 92,48 dari kondisi ideal 100, sementara itu apabila dibandingkan dengan IPG Provinsi Jawa Tengah angka tersebut lebih tinggi. Angka IPG provinsi Jawa Tengah sebesar 92,18; dan
- 6) Masih rendahnya keberdayaan perempuan ditunjukkan dengan capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2019 sebesar 72,82 dengan rata-rata masih di bawah capaian rata-rata Provinsi Jawa Tengah.

c. Pangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pangan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih sedikitnya jumlah desa yang memiliki lumbung pangan desa. Pada tahun 2020 baru 11 desa yang memiliki lumbung pangan dari sebanyak 272 desa di Kabupaten Pekalongan;
- 2) Surplus ketersediaan beras dan bahan pangan lain di Kabupaten Pekalongan cenderung menurun. Tahun 2020 surplus beras sebesar 127.157 ton menurun di bandingkan dengan tahun 2018 sebesar 143.498 ton. Produksi kedelai tahun 2020 sebanyak 337 ton masih belum mampu memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk Kabupaten Pekalongan yang mencapai 9.821 ton; dan
- 3) Masih rendahnya kualitas konsumsi pangan penduduk dan belum sesuai dengan pola konsumsi pangan yang aman, beragam dan bergizi seimbang. Hal ini ditandai dengan dengan skor PPH walaupun naik sebesar 88,60 di tahun 2020 dari 84,10 di tahun 2019.

d. Pertanahan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanahan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya mekanisme penyelesaian konflik pertanahan;
- 2) Belum optimalnya data base tentang pemanfaatan lahan/tanah. Ketidakakuratan data pertanahan dalam hal substansi/kelas/status, maupun koordinat menyebabkan benturan antar sektor/kepentingan

dan di kawasan budidaya menyebabkan benturan antar pemangku kepentingan atas tanah; dan

- 3) Masih minimnya fasilitasi pemerintah daerah dalam pensertifikatan (proses penerbitan sertifikat) tanah warga. Peran pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan pensertifikatan tanah warga masih belum optimal. Selama ini berbagai program sertifikasi dilakukan oleh pemerintah pusat lewat BPN (program Prona).

e. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang dihadapi pada urusan lingkungan hidup di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya kualitas lingkungan hidup. Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) naik dari tahun 2019 sebesar 48,26 menjadi 62,52 di tahun 2020.;
- 2) Masih rendahnya penanganan sampah, ditunjukkan dengan kondisi Persentase pengurangan sampah diperkotaan tahun 2020 sebesar 26,34%;
- 3) Masih rendahnya pengelolaan sampah pada sistem pengangkutan, ditunjukkan dengan persentase pengangkutan sampah tahun 2020 sebesar 52,67% artinya 47,33% sampah masih belum terangkut;
- 4) Permasalahan utama pengangkutan sampah di Kabupaten Pekalongan adalah wilayah yang terkena rob, sehingga pelayanan pengangkutan sulit dijangkau; dan
- 5) Masih terbatasnya Tempat Pembuangan Sampah, Kebutuhan kontainer sampah sebesar 514 unit, sedangkan sampai dengan tahun 2020, baru terdapat 120 unit kontainer sampah di Kabupaten Pekalongan.
- 6) Belum optimalnya pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak, tahun 2020 baru mencapai 60%.

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya capaian kinerja pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase Kepemilikan KTP EL-Pemula Bagi Wajib KTP EL-Pemula tahun 2020 sebesar 98,66%;
- 2) Masih adanya anak usia 0-5 tahun yang belum terlayani kepemilikan akta kelahiran sebesar 7,24%;
- 3) Belum optimalnya kepemilikan kartu identitas anak. persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 75,18%; dan
- 4) Belum optimalnya cakupan kepemilikan dokumen kependudukan tahun 2020 hanya mampu tercapai 86,78% meskipun trennya selalu meningkat dari tahun ke tahun.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat, rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) Tahun 2020 masih cukup rendah berkisar 1,00;
- 2) Masih rendahnya swadaya masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa. Hal ini dapat dilihat dari persentase

swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar 23,15% pada tahun 2020; dan

- 3) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi, komunikasi dan informasi, air bersih, sanitasi, energi, penerangan, peribadatan, dan sarana dan prasarana lainnya di Desa. Persentase Desa yang belum memiliki sarana prasarana desa di Kabupaten Pekalongan dari tahun 2020 sebesar 7,46%.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pengendalian dan Keluarga Berencana di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih belum optimalnya pengendalian penduduk, hal ini dilihat dari capaian TFR dan LPP. TFR Kabupaten Pekalongan mencapai 2,11;
- 2) Masih belum optimalnya kesertaan KB MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
- 3) Masih ditemukannya PUS dengan istri dibawah usia 20 tahun. Hal ini ditunjukkan bahwa cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun sebesar 1,71% pada tahun 2020;
- 4) Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana, dilihat dari cakupan peserta KB aktif pada tahun 2020 sebesar 80,42%; dan
- 5) Masih tingginya angka Cakupan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need) pada tahun 2020 mencapai angka sebesar 8,68%.

i. Perhubungan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Perhubungan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas. Persentase sarana dan prasarana lalu lintas jalan raya (APILL) baru mencapai 65,00% di tahun 2020;
- 2) Belum optimalnya pemanfaatan terminal tipe C yang ada di Kabupaten Pekalongan;
- 3) Masih rendahnya kualitas alt uji kendaraan bermotor. Persentase alat uji kendaraan bermotor dengan kondisi baik baru mencapai 70 % pada tahun 2020
- 4) Belum semua wilayah terlayani oleh jaringan trayek. Rasio jaringan trayek tahun 2020 sebesar 85,40%

j. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya jaringan komunikasi dan informasi layanan publik. Tercatat masih terdapat 10% jaringan komunikasi dan informasi layanan publik yang belum optimal;
- 2) Belum optimalnya sistem informasi terpadu yang mengarah pada e-Government dan penerapan blueprint e-Government belum optimal. Tercatat system informasi yang pemerintah daerah berbasis IT hanya ada 70 buah;
- 3) Belum optimalnya penerapan *smart city* ;
- 4) Belum adanya kebijakan pendukung pengelolaan satu data yang terintegrasi;
- 5) Kurangnya SDM yang memiliki kompetensi di bidang IT;

- 6) Kurang optimalnya pemanfaatan IT di ruang publik dan strategis (hotspot area);
- 7) Kurangnya inovasi media promosi dan penyebaran informasi Pemerintah Daerah; dan
- 8) Belum adanya unit pengaduan online terpadu.

k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

- 1) Rendahnya kinerja koperasi aktif dan UMKM aktif, Pada tahun 2020 sebesar 37,56% koperasi yang tidak aktif dari total 623 koperasi;
- 2) Rendahnya persentase koperasi sehat tercatat hanya ada 35,04%, tahun 2020;
- 3) Belum optimalnya peran dan partisipasi UKM Binaan dalam mendorong perekonomian daerah;
- 4) Belum optimalnya kinerja koperasi dan UMKM yang aktif. Persentase kinerja koperasi dan UMKM yang aktif di Tahun 2020 baru mencapai 37,18%; dan
- 5) Masih tingginya persentase koperasi yang tidak sehat. Pada Tahun 2020 terdapat 65,94% koperasi yang tidak sehat.

l. Penanaman Modal

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya inovasi promosi peluang penanaman modal provinsi, penyediaan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan, dan fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan;
- 2) Kurangnya pengembangan potensi daerah yang berluang sebagai daya Tarik investasi. Rendahnya jumlah investor berskala nasional (PMA dan PMDN). Tahun 2020 sebesar 210 investor;
- 3) Belum optimalnya pelayanan perijinan. Lama rata-rata pelayanan perijinan di tahun 2020 sebesar 5 hari; dan
- 4) Belum optimalnya peningkatan nilai investasi. Walaupun mengalami peningkatan jumlah investor di tahun 2020 sebanyak 210 namun nilai investasi turun dari tahun 2019 sebesar 1,297 triliun menjadi 1,193 triliun di tahun 2020.

m. Kepemudaan dan Olah Raga

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya prestasi pemuda dan olahraga di tingkat Provinsi dan Nasional. Persentase prestasi pemuda tingkat provinsi dan nasional tahun 2020 sebesar 33,33% menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar mencapai 62,50% karena pandemi COVID-19;
- 2) Belum optimalnya pembinaan atlet olahraga prestasi. Persentase prestasi olahraga tingkat provinsi dan nasional baru mencapai 0,00% di tahun 2020 karena pandemi COVID-19;
- 3) Terbatasnya sarana dan prasarana pemuda dan olahraga yang memenuhi standar, seperti Gelanggang / balai remaja (selain milik) yang berjumlah 1 dan untuk cakupan pelatih yang bersertifikat sebesar 75,1% hal tersebut juga perlu di optimalkan agar bisa semakin meningkat; dan

n. Statistik

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Statistik di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penerapan *single data*;
- 2) Belum optimalnya ketersediaan dan validitas data statistik sektoral;
- 3) Belum lengkapnya data yang disajikan dalam buku statistik daerah sesuai dengan kebutuhan informasi pembangunan daerah;
- 4) Belum tepatnya waktu penerbitan buku statistik daerah;
- 5) Belum tersedianya database yang berisi data dan informasi yang *valid* dan *up to date*; dan
- 6) Belum optimalnya peran dan fungsi Institusi Statistik dalam Satu Data.

o. Persandian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Persandian di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya kompetensi SDM yang menangani persandian; dan
- 2) ahli persandian sehingga persandian masih sebatas sarana komunikasi antar instansi pemerintah.

p. Kebudayaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kebudayaan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pembelajaran budaya, melalui pembelajaran budaya, kita dapat mengetahui pentingnya budaya lokal dalam membangun budaya bangsa serta bagaimana cara mengadaptasi budaya lokal di tengah perkembangan zaman;
- 2) Belum tersedianya gedung kesenian/sarana dan prasarana yang representatif untuk menampung aktivitas seni. Sampai dengan tahun 2020 baru terdapat 1 gedung kesenian yang belum optimal pengelolaannya.

q. Perpustakaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perpustakaan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap ketersediaan fasilitas perpustakaan desa. Belum semua desa memiliki perpustakaan desa, pada tahun 2020 baru mencapai 84 unit dari jumlah total sebanyak 187 unit.
- 2) Masih terbatasnya jumlah mobil perpustakaan keliling hanya 3 unit di tahun 2020 yang melayani seluruh wilayah kabupaten; dan
- 3) Menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan mengalami penurunan di Tahun 2020 sebesar 14.469 orang karena pandemi COVID -19 sehingga perpustakaan tutup sepanjang Bulan Maret-Juni 2020 tutup, armada perpustakaan dan pameran juga tidak dilaksanakan.

r. Kearsipan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan kearsipan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya pengelolaan arsip secara baku. Capaian 2020 sebesar 60,00%;
- 2) Masih belum optimalnya duplikasi arsip ke dalam bentuk digital, tahun 2020 baru mencapai 2.527 dokumen; dan

- 3) Belum optimalnya jumlah penyelamatan arsip tekstual. Tahun 2020 sebesar 224.591 dokumen.

3. Urusan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Berkurangnya jumlah pembudidaya ikan. Hal ini terlihat Jumlah pembudidaya kolam menurun dari tahun 2016 sebesar 2.203 orang menjadi 1.647 orang di tahun 2020;
- 2) Kurangnya cakupan pembinaan terhadap nelayan, pembudidaya ikan dan kelompok pengawas masyarakat. Hal ini terlihat dari cakupan bina kelompok nelayan selama kurun waktu 5 tahun fluktuatif pada kisaran 36,14% hingga 80%, sedangkan cakupan bina kelompok pembudidaya ikan pada kisaran 5,57% hingga 6,25%, dan persentase kelompok masyarakat pengawas yang terbina pada kisaran 14,28% hingga 42,86%;
- 3) Kurangnya tingkat konsumsi ikan Hal ini terlihat dari capaian tingkat konsumsi ikan pada tahun 2019 baru mencapai 23,32 kg/kapita/tahun, lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar 55,95 kg/kapita/tahun;
- 4) Masih rendahnya rata-rata pendapatan nelayan Kabupaten Pekalongan tahun 2020 sebesar Rp. 1.403.178,- masih di bawah UMK 2020 sebesar Rp. 2.018.161,27; dan
- 5) Masih belum optimalnya produksi perikanan budidaya. Pada tahun 2020, produksi perikanan budidaya mencapai 8.516,74 ton sedangkan untuk perikanan tangkap mencapai 5.381,26 ton yang disebabkan lemahnya permodalan, manajemen dan ketampilan.

b. Pariwisata

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pariwisata di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata dalam satu kawasan wisata dan pengembangan desa wisata yang dikelola oleh pemerintah daerah. Baru 3 (tiga) obyek wisata yang dikelola oleh pemerintah yaitu : Objek Wisata Linggoasri, Objek Wisata Pantai Depok dan Bumi Perkemahan Linggoasri;
- 2) Menurunnya Jumlah kunjungan wisatawan. Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisatawan sejumlah 115.756 orang menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar 236.244 orang. Penurunan jumlah kunjungan wisata sebagai akibat ditutupkan sejumlah obyek wisata akibat pandemi COVID-19;
- 3) Masih rendahnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Nilai pendapatan sektor pariwisata turun dari tahun 2019 sebesar Rp 1,697 milyar menjadi sebesar Rp 802,136 juta sebagai akibat ditutupkan sejumlah obyek wisata akibat pandemi COVID-19 sepanjang Tahun 2020;
- 4) Belum berkembangnya usaha pendukung pariwisata yang berbasis ekonomi kreatif;
- 5) Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata; dan
- 6) Belum optimalnya koordinasi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.

c. Pertanian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Menurunnya kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB. Hal ini terlihat dari persentase kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB ADHK semakin menurun dari sebesar 16,58% pada tahun 2016 menjadi 15,05% pada tahun 2020, perkembangan kontribusi sektor pertanian tahun 2016-2019 cenderung menurun namun sedikit mengalami peningkatan di tahun 2020;
- 2) Produksi beberapa jenis tanaman hortikultura mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun, yaitu jenis komoditas Rambutan; dan
- 3) Terdapat komoditas perkebunan yang produksinya menurun dalam kurun waktu lima tahun yaitu tebu.

d. Perdagangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perdagangan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya perlindungan konsumen serta pengawasan barang beredar
- 2) Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana perdagangan khususnya pasar tradisional sesuai standar;
- 3) Belum optimalnya ekspor komoditas. Nilai ekspor perdagangan dari tahun 2019 sebesar 32.910 ribu US\$ menurun menjadi 14.289 ribu US\$ di tahun 2020. Karena adanya pandemi COVID-19 sepanjang tahun 2020.

e. Perindustrian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Peindustrian di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya pertumbuhan industri kecil dan menengah sehingga memperlambat dalam penyerapan tenaga kerja; Pada tahun 2020 pertumbuhan industri 0,60% sehingga hanya mampu menambah penyerapan tenaga kerja sebanyak 62.681 orang;
- 2) Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses produksi dan pemasaran produk industri yang ditandai kurang berkembangnya inovasi sistem produksi; dan
- 3) Masih terbatasnya akses permodalan dan pemasaran bagi industri mikro kecil.

f. Transmigrasi

Permasalahan yang dihadapi pada urusan transmigrasi di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya daerah tujuan transmigrasi yang sesuai dengan minat calon transmigran. Jumlah transmigran yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi (KK) tidak ada di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Sedangkan jumlah transmigran tahun 2019 yang diberangkatkan ke lokasi transmigrasi UPT Tanjung Buka SP-6 B Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara tahun 2019 sebanyak 2 KK berjumlah 6 Jiwa; dan
- 2) Masih kurangnya kesesuaian ketrampilan dan minat dari calon transmigran dengan kebutuhan dan potensi daerah tujuan transmigrasi.

4. Penunjang Urusan Pemerintah

a. Perencanaan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan perencanaan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- 2) Masih rendahnya kesesuaian perencanaan pembangunan daerah dengan penganggarannya.

b. Keuangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya intensifikasi pendapatan asli daerah guna meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Hal ini terlihat dari rasio PAD terhadap total penerimaan daerah tahun 2020 sebesar 16,24%;
- 2) Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasil guna dengan sistem informasi manajemen (SIM) yang bersifat terpadu;
- 3) Belum optimalnya intensifikasi pajak daerah dan ekstensifikasi serta intensifikasi retribusi daerah; dan
- 4) Belum optimalnya inventarisasi dan pemanfaatan aset dan barang milik daerah.

c. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- 2) Belum optimalnya manajemen ASN (Aparatur Sipil Negara).

d. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya implementasi sistem inovasi daerah dalam mendukung penciptaan penelitian dan pengembangan di Kabupaten Pekalongan;
- 2) Kurangnya fasilitasi dan pendampingan terhadap kelompok-kelompok masyarakat dalam pengembangan kreatifitas dan penggunaan teknologi tepat guna;
- 3) Masih kurangnya jumlah SDM yang memiliki kemampuan dalam penelitian dan pengembangan dalam mendukung proses pengembangan kebijakan yang berkualitas; dan
- 4) Belum optimalnya kualitas penelitian dan pengembangan dalam pembangunan daerah.

e. Pemerintahan Umum

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pemerintahan Umum di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas yang terlihat dari skor nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 82,23;
- 2) Belum semua perangkat daerah memiliki SOP dan SPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yang ditunjukkan dengan perangkat

- daerah yang menerapkan standar pelayanan masih diangka 73,33%; dan
- 3) Belum optimalnya koordinasi dan pengendalian dalam perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan penerapan anggaran berbasis kinerja pada setiap perangkat daerah dalam mendukung peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), di mana pencapaiannya pada tahun 2019 baru mencapai 63,51, artinya masih berada pada peringkat B.

f. Pengawasan

Permasalahan yang dihadapi pada urusan Pengawasan di Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang direkomendasi oleh lembaga pemeriksa, terutama pada rekomendasi perlu ditindaklanjuti dari Inspektorat Provinsi sebesar 94%;
- 2) Belum optimalnya implementasi SPIP pada seluruh perangkat daerah yang ditunjukkan dengan Tingkat Maturitas SPIP pada level 3, di mana kondisi tersebut kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal sudah diimplementasikan namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai;
- 3) Meningkatnya regulasi yang baru dalam pelaksanaan pengawasan sehingga memerlukan pemahaman dari pemeriksa dan obyek pemeriksaan (PD);
- 4) Masih kurangnya kuantitas APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah); dan
- 5) Belum optimalnya SPIP (Sistem Pengawasan Internal Pemerintah) pada masing masing Perangkat Daerah.

B. Isu strategis

Isu strategis merupakan pernyataan mengenai suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan/dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah selama 5 tahun. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Kriteria isu strategis sebagai berikut :

1. Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dikelompokkan menjadi satu kesatuan, jika ditangani/dipecahkan secara simultan hasilnya saling mempengaruhi untuk menyelesaikan permasalahan, sebagai dasar perumusan pernyataan isu strategis;
2. Pernyataan isu memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
3. Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah(kewenangan)
4. Luasnya dampak yang ditimbulkannya untuk memecahkan permasalahan pembangunan guna meningkatkan pembangunan daerah;
5. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
6. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola; dan
7. Prioritas utk memenuhi janji politik Kepala Daerah yang perlu diwujudkan.

Perumusan isu strategis Kabupaten Pekalongan juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut ini :



Gambar 4.1. Perumusan Isu Strategis Kabupaten Pekalongan 2021-2026

1. Isu dan Tantangan Global dan Nasional

a. Isu dan Tantangan dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0

Kehadiran era revolusi industri keempat (Industri 4.0) sudah tidak dapat dielakkan lagi. Indonesia perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis agar mampu beradaptasi dengan era industri digital ini. Indonesia berkomitmen untuk membangun industri manufaktur yang berdaya saing global melalui percepatan implementasi Industri 4.0. Hal ini ditandai dengan peluncuran Making Indonesia 4.0 sebagai sebuah *roadmap* dan strategi Indonesia memasuki era digital ini. Dengan menerapkan Industri 4.0, Kementerian Perindustrian menargetkan, aspirasi besar nasional dapat tercapai. Industri 4.0 melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun di sisi lain digitalisasi industri ini akan berdampak negatif pada penyerapan tenaga kerja dan mengacaukan bisnis konvensional. Pemerintah harus mengantisipasi dampak negatif dari Industri 4.0. Pada saat pemerintah memutuskan untuk beradaptasi dengan sistem Industri 4.0, maka pemerintah juga harus memikirkan keberlangsungannya. Jangan sampai penerapan sistem industri digital ini hanya menjadi beban karena tidak dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah melaksanakan langkah-langkah strategis yang ditetapkan berdasarkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Upaya ini dilakukan untuk mempercepat terwujudnya visi nasional yang telah ditetapkan untuk memanfaatkan peluang di era revolusi industri keempat. Salah satu visi penyusunan Making Indonesia 4.0 adalah menjadikan Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang memiliki perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030.

Dunia saat ini sedang menghadapi perubahan industry ke-4 atau yang dikenal dengan Industri 4.0. Berdasarkan analisis *Mckinsey Global Institute*, Industri 4.0 memberikan dampak yang sangat besar dan luas, terutama pada sektor lapangan kerja, di mana robot dan mesin akan menghilangkan banyak lapangan kerja di dunia. Untuk itu era revolusi industri ini harus disikapi oleh pelaku industry dengan bijak dan hati-hati. Di satu sisi, era industry ini melalui konektivitas dan digitalisasinya mampu meningkatkan efisiensi rantai manufaktur dan kualitas produk. Namun

demikian, di sisi lain, revolusi industri ini juga akan menghilangkan 800 juta lapangan kerja di seluruh dunia hingga tahun 2030 karena diambilalih oleh robot. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi Indonesia sebagai negara yang memiliki angkatan kerja dan angka pengangguran yang cukup tinggi. Untuk itu pemerintah perlu menyikapi perubahan ini dengan tepat melalui penyusunan strategi yang mampu meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Bagi negara-negara maju, Industri 4.0 dapat menjadi cara untuk mendapatkan kembali daya saing infrastruktur. Bagi negaranegara berkembang, Industri 4.0 dapat membantu menyederhanakan rantai suplai produksi, yang dalam hal ini sangat dibutuhkan guna menyasiasi biaya tenaga kerja yang kian meningkat. Untuk itu, dalam menghadapi era revolusi industri keempat, sektor industri nasional perlu banyak berbenah, terutama dalam aspek penguasaan teknologi yang menjadi kunci penentu daya saing. Setidaknya terdapat lima teknologi utama yang menopang pembangunan sistem Industri 4.0, yaitu **Internet of Things, Artificial Intelligence, Human-Machine Interface, teknologi robotik dan sensor, serta teknologi 3D Printing**. Kelima unsur tersebut harus mampu dikuasai oleh perusahaan manufaktur Indonesia agar dapat bersaing.

Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak negative dari Industri 4.0 seperti disruptive technology. Kehadiran disruptive technology ini akan membuat perubahan besar dan secara bertahap akan mematikan bisnis tradisional. Peran Industri 4.0 juga ini masih dipertanyakan bila dilihat dari gejala deindustrialisasi global yang terjadi akhir-akhir ini. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya peran sektor jasa. Kombinasi antara proyeksi pertumbuhan ekonomi yang tidak bertambah dengan cepat dan penurunan peran sektor manufaktur telah menimbulkan keraguan tentang kehebatan Industri 4.0. Selain itu Industri 4.0 juga berdampak negatif terhadap penciptaan lapangan pekerjaan.

Di kawasan ASEAN, hanya Singapura yang telah siap mengadapi era industri baru ini. Pada saat pemerintah memutuskan untuk beradaptasi dengan sistem Industri 4.0, maka pemerintah juga harus memikirkan keberlangsungannya. Jangan sampai penerapan sistem industri digital ini hanya menjadi beban karena tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Banyak hal yang harus dipersiapkan seperti: peran para pengambil keputusan, tata kelola, manajemen risiko implementasi sistem, akses publik pada teknologi, dan faktor keamanan sistem yang diimplementasikan. Selain itu pemerintah juga harus mempersiapkan sistem pendataan yang berintegritas, menetapkan total harga/biaya kepemilikan sistem, mempersiapkan payung hukum dan mekanisme perlindungan terhadap data pribadi, menetapkan standar tingkat pelayanan, menyusun peta jalan strategis yang bersifat aplikatif dan antisipatif, serta memiliki design thinking untuk menjamin keberlangsungan industri.

b. Tantangan SDGs dan Peluang Bisnis Ramah Lingkungan

SDGs telah disepakati oleh lebih dari 150 pemimpin negara pada Sidang Umum PBB di New York, 25 September 2015. Dalam kesempatan itu, Presiden Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden, juga telah menandatangani kesepakatan internasional tersebut. SDGs yang sudah disepakati terdiri dari berisikan 17 tujuan dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik di negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan

ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum).

Isu dan tantangan yang harus dijawab oleh seluruh negara yang menandatangani kesepakatan tersebut termasuk Indonesia meliputi:

- 1) *No Poverty* / Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja;
- 2) *Zero Hunger* / Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan;
- 3) *Good Health and Well Being* / Kesehatan Yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia;
- 4) *Quality Education* / Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas;
- 5) *Gender Equality* / Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan;
- 6) *Clean Water dan Sanitation*/Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang;
- 7) *Affordable and Clean Energy*/Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang;
- 8) *Decent Work and Economic Growth*/Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang;
- 9) *Industry, Innovation and Infrastructure*/Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi;
- 10) *Reduced Inequality*/Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara;
- 11) *Sustainable Cities and Communities*/Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh;
- 12) *Responsible Consumption and Production*/Pemakaian Yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan;
- 13) *Climate Action* / Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) *Life Below Water* / Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya;
- 15) *Life on Land* / Kehidupan di Darat : Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas penggersion lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keanekaragaman hayati;
- 16) *Peace and Justice Strong Institutions* / Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata; dan
- 17) *Partnerships for The Goals* / Kemitraan untuk Tujuan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disebutkan bahwa dalam penyusunan RPJMD, salah satu dokumen yang harus dipedomani adalah dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP. Dokumen KLHS ditujukan untuk mengintegrasikan pertimbangan lingkungan dan konsep Pembangunan Berkelanjutan (PB) ke dalam suatu KRP dimana keluaran KLHS merupakan suatu dokumen telaah (*assessment document*) yang disertai dengan berbagai rekomendasi untuk penyempurnaan KRP tergantung pada kedudukan dan sasaran penyelenggaraan KLHS. Sejalan dengan penyusunan RPJMD, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga telah Menyusun dokumen KLHS. Rekomendasi-rekomendasi dari dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Pekalongan ini nantinya akan dijadikan salah satu pedoman dalam pengambilan kebijakan dalam dokumen RPJMD.

Isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dalam dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- 1) Air Minum, Sanitasi, Kualitas Kesehatan Lingkungan.
 - Ketersediaan dan kualitas air minum belum optimal, sebesar 86,51%
 - Desa yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan masih rendah, baru sebesar 7%.
 - Belum optimalnya pemenuhan sanitasi layak (baru mencapai 81,87%).
- 2) Masih terdapat penduduk miskin, terlebih dengan adanya pandemi Covid 19, sebesar 9,71%.
- 3) Pandemi covid 19.
- 4) Masih ada kawasan rawan bencana (seperti rob, banjir, longsor, abrasi, penurunan tanah); Penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut.
- 5) Perekonomian
 - Masih rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pekalongan, pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid 19 (baru mencapai 50% dari target).
 - Kontribusi sektor pariwisata kurang maksimal, baru mencapai 5,31% dari target 8%.
 - Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB menurun
- 6) Persampahan
 - Pengelolaan sampah belum optimal.
 - Penerapan green waste di kawasan perkotaan menurun.
- 7) Alih fungsi lahan non terbangun menjadi kawasan budidaya, merusak ekosistem
- 8) Pengelolaan Limbah industri (termasuk limbah B3) belum optimal
- 9) Pangan
 - Pola konsumsi pangan belum sesuai standar, baru mencapai 84,10 dari target sebesar 9.
 - Daya dukung pangan bersyarat/ sedang (swasembada terbatas).
- 10) Peningkatan jumlah penyakit menular dan tidak menular
- 11) Emisi GRK dari sektor Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga
- 12) Belum optimalnya pelayanan pendidikan (SDM, sarana prasarana);

- 13) .Pengangguran
 - Tingkat pengangguran meningkat, terutama masa pandemi Covid 19, sebesar 4,43%.
 - Jumlah penduduk yang bekerja menurun (menjadi 70%), kesempatan kerja berkurang.
- 14) Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi terbarukan.
- 15) Belum seluruh RT memiliki listrik, baru mencapai 84,67% dari target 96,6%.
- 16) Belum optimalnya upaya pencegahan perkawinan dini dan perkawinan anak (target penurunan 1,64%).
- 17) Gender & Hak Anak
 - Belum optimalnya pelaksanaan penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah.
 - Pengarusutamaan gender dan hak anak masih rendah.
- 18) KB & Kesehatan Reproduksi
 - Kurangnya pemahaman masyarakat untuk ber-KB, sebesar 4,14%.
 - Masih kurangnya cakupan PUS yang menggunakan kontrasepsi dan kurangnya pemahaman masyarakat akan reproduksi sehat, baru mencapai 80,86% dari target 85%.
 - Kepesertaan KB aktif semakin menurun.
- 19) Masih terbatasnya akses permodalan dan informasi bagi UMKM/UKM ke lembaga keuangan.
- 20) Belum optimalnya pelaksanaan penegakan dan evaluasi atas regulasi daerah baik Perda/Perkada.
- 21) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Akte Kelahiran, baru mencapai 59,09% dari target 77,4%.
- 22) Terbatasnya akses publik terhadap data/ informasi statistik.

Isu-isu strategis KLHS tersebut di atas akan menjadi salah satu bahan pertimbangan dan acuan dalam merumuskan isu strategis RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026.

2. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024)

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Kabupaten Pekalongan ke depan harusnya selaras dengan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam setiap perencanaan program dan kegiatan hendaknya mengacu pada isu-isu strategis pembangunan nasional pada periode yang sama. Isu-isu strategis pembangunan dalam RPJMN yang harus dijadikan salah satu acuan pembangunan Kabupaten Pekalongan 5 tahun ke depan yaitu:

- a. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
 - 1) Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan;
 - 2) Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk;
 - 3) Pemenuhan Layanan Dasar;
 - 4) Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
 - 5) Pengentasan Kemiskinan;
 - 6) Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.
- b. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa
 - 1) Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa;
 - 2) Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia;
 - 3) Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama;
 - 4) Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan

- Kerukunan;
- 5) Belum Optimalnya Peran Keluarga;
 - 6) Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.
- c. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
 - 1) Keberlanjutan Sumber Daya Alam;
 - 2) Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi;
 - 3) Transformasi Struktural Berjalan Lambat;
 - 4) Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital.
 - d. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
 - 1) Infrastruktur Pelayanan Dasar:
 - a) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau;
 - b) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman;
 - c) Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan;
 - d) Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
 - e) Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur;
 - f) Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi.
 - 2) Infrastruktur Ekonomi:
 - a) Konektivitas Jalan;
 - b) Konektivitas Kereta Api;
 - c) Konektivitas Laut;
 - d) Konektivitas Udara;
 - e) Konektivitas Darat.
 - 3) Infrastruktur Perkotaan:
 - a) Transportasi Perkotaan;
 - b) Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan;
 - c) Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan;
 - d) Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan;
 - e) Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan.
 - 4) Energi dan Ketenagalistrikan:
 - a) Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - b) Akses Serta Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - c) Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan;
 - d) Transformasi Digital;
 - e) Penuntasan Infrastruktur TIK;
 - f) Pemanfaatan Infrastruktur TIK;
 - g) Fasilitas Pendukung Transformasi Digital.
 - e. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
 - a) Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah.
 - f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
 - a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim;
 - c) Pembangunan Rendah Karbon.
 - g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
 - a) Konsolidasi Demokrasi;
 - b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
 - c) Penegakan Hukum Nasional;

- d) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
- e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota yang menjadi koridor pertumbuhan dan koridor pemerataan dalam RPJMN 2020-2024. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah ke depan harus memperhatikan arah kebijakan dalam RPJMN yang harus didukung. Arah pengembangan pembangunan nasional dalam RPJMN berupa proyek prioritas nasional tahun 2020-2024 untuk Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

- Desa Digital (P3PD);
- Penetapan Batas Desa;
- Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat;
- Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional;
- Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (P3PD);
- Pendampingan pada 74.957 Desa;
- Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa;
- Pengendalian Penggunaan Dana Desa;
- Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes.

3. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah 2018-2023

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 yaitu: “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi. Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018.

Isu strategis pembagunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan adalah:

- a. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia;
- b. Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
- d. Kedaulatan pangan dan energi;
- e. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam;
- f. Kesenjangan wilayah;
- g. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam;
- h. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

Pengembangan untuk wilayah Petanglong (Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota Pekalongan) dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah diarahkan pada sektor unggulan (industry, perdagangan dan jasa, pertanian, perikanan), dan pengembangan Kawasan agopolitan dan minapolitan. Sedangkan arah kebijakan pembangunan untuk Kawasan ini adalah “Pengembangan wilayah Petanglong berbasis industry pengolahan kreatif dan pertanian dengan berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Pekalongan selama tahun 2018-2023 seperti yang termuat dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1
Indikator Sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah
untuk Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 - 2023

No	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,00-5,40	5,40-5,80	5,70-6,10	5,90-6,30	6,10-6,50
2	Kemiskinan	8,36-9,36	7,67-8,67	6,98-7,98	6,29-7,29	5,60-6,60
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,20-4,30	4,20-4,30	4,15-4,25	4,10-4,20	4,05-4,15
4	Indeks Pembangunan Manusia	69,03	69,65	70,01	70,30	70,60

Sumber: RPJMD Jawa Tengah Tahun 2018-2023

4. Isu Strategis Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pekalongan 2005-2025

Pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka panjang Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025. Oleh karena itu dalam perumusan isu strategis, tujuan sasaran, dan juga rancangan program pembangunan harus juga memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka panjang yang ada dalam dokumen RPJPD Kabupaten Pekalongan.

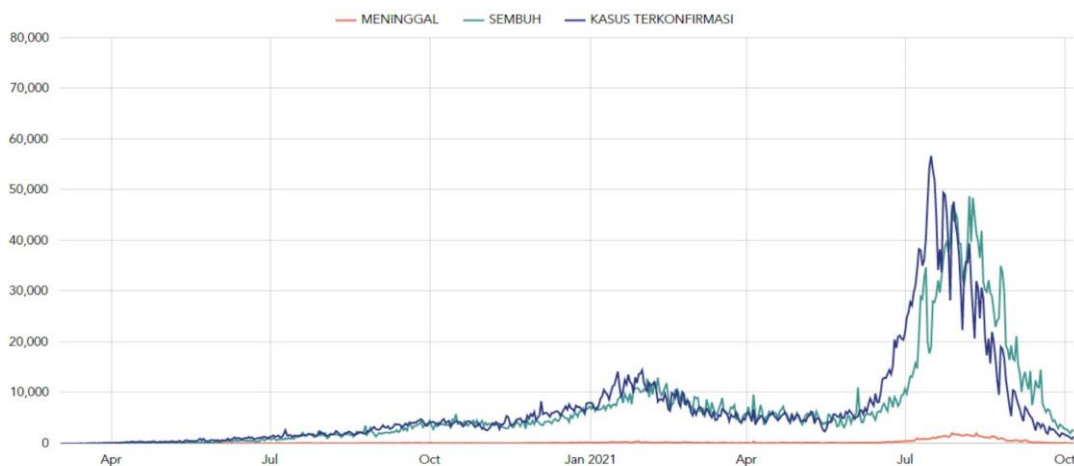
Beberapa isu strategis pembangunan jangka panjang Kabupaten Pekalongan yang dapat dijadikan acuan dalam perumusan isu strategis jangka menengah yaitu:

- a. Erosi nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat selama ini;
- b. Jumlah penduduk miskin serta pengangguran yang cukup besar;
- c. Kabupaten Pekalongan menghadapi permasalahan kualitas penduduk yang masih rendah (ranking menengah ke bawah dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah) Jumlah anak kurang gizi yang cukup besar merupakan masalah yang memiliki dampak jangka panjang;
- d. Kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah;
- e. Jumlah penduduk buta huruf dan berpendidikan rendah yang cukup besar juga merupakan permasalahan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah;
- f. Meskipun kehidupan beragama berkembang lebih baik, pembangunan bidang agama masih akan dihadapkan pada gejala negatif di tengah masyarakat yang sangat memprihatinkan, seperti perilaku asusila, praktek KKN, penyalahgunaan narkoba dan perjudian;
- g. Pertumbuhan ekonomi rendah;
- h. Perekonomian Kabupaten Pekalongan sampai saat ini masih bertumpu pada sektor industri pengolahan, dengan kontribusi terhadap PDRB selama ini rata-rata lebih dari 27%;
- i. Peningkatan produksi tanaman pangan (padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan) dengan kondisi semakin berkurangnya lahan pertanian dan semakin banyaknya alih fungsi lahan, produksi komoditas perkebunan, produksi perikanan laut dan perairan umum serta produksi peternakan yang berkualitas menuju pada terciptanya swasembada pangan;
- j. Pembangunan sektor perdagangan perlu lebih memberdayakan usaha

- mikro, kecil dan menengah;
- k. Peningkatan koperasi;
 - l. Peningkatan lapangan kerja;
 - m. Kurang memadainya dan masih relatif tingginya tingkat kerusakan jalan, baik jalan kabupaten, jalan kecamatan maupun jalan desa;
 - n. Peningkatan daya listrik baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan industri yang semakin berkembang pesat serta peningkatan pemerataan listrik perdesaan se-wilayah Kabupaten Pekalongan;
 - o. Terbatasnya sumber air baku yang berkualitas baik yang alami maupun buatan, baik untuk air bersih keperluan rumah tangga maupun untuk industri di Kabupaten Pekalongan;
 - p. masih kurang terawatnyajaringan irigasi yang ada, sehingga pada saat dibutuhkan kadang kurang berfungsi secara optimal;
 - q. Masih tingginya tipe rumah hunian C, yaitu rumah belum layak huni dan belum memenuhi standar kesehatan;
 - r. Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi secara merata sampai ke seluruh wilayah perdesaan;
 - s. Kebijakan yang seringkali bersifat spatial dan kurang sinkron dengan penataan wilayah dan ruang yang dilakukan oleh wilayah tetangga (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Banjarnegara). Kebijakan ini akan berpotensi mengakibatkan ataupun memicu persoalan peruntukan wilayah;
 - t. Masih banyaknya pemanfaatan peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang wilayah dan tata ruang (RTRW) akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk hukum yang mengatur tentang tata ruang dan perwilayahan;
 - u. Kondisi sumber daya alam dan lingkungan saat ini, apabila tidak ditangani secara terpadu akan mengakibatkan adanya krisis pangan, air bersih dan udara bersih;
 - v. Pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek akan mengakibatkan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan;
 - w. Meningkatnya kasus pencemaran lingkungan yang disebabkan kurang bertanggungjawabnya perilaku pelanggaran lingkungan;
 - x. Pengembangan teknologi informasi;
 - y. Peningkatan kemampuan penguasaan dan penerapan IPTEK baik oleh aparat maupun masyarakat, agar dapat menerapkan dan memanfaatkan untuk peningkatan pelayanan dan perbaikan ekonomi;
 - z. Kurangnya perhatian dan tingkat kesadaran masyarakat maupun aparatur pemerintah tentang pemanfaatan hasil-hasil penelitian, terutamaatas teknologi pendukung pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian;
 - aa. Mewujudkan pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang akuntabel, transparan, berwibawa dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menuju pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);
 - bb. Peningkatan kesadaran hukum masyaakat yang bermuara kepada upaya penegakan hukum; dan
 - cc. Peningkatan profesionalisme pegawai agar lebih maju selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang berbasis pada *e-government*.

5. Isu Pandemi Covid 19

Tahun 2020, kejadian global yang luar biasa, yaitu Pandemic COVID-19 telah memicu serangkaian tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh negara-negara untuk menanggulangi penyebaran pandemic COVID-19 dan mengurangi kondisi terburuk akibat pandemi COVID-19, yaitu Kasus Kematian. Pada saat ini di awal Oktober 2021, masyarakat Indonesia bisa bernafas lega karena tren positif kasus COVID-19 menunjukkan penurunan atau melandai di semua wilayah Indonesia. Kunci dari kondisi baik tersebut karena munculnya semangat gotong royong yang tinggi. Dengan semangat tersebut, terbentuk sinergitas kuat antara pemerintah dengan masyarakat dalam upayanya melakukan berbagai kebijakan untuk menghadapi COVID-19. Contohnya seperti, PPKM, sosialisasi penerapan protokol kesehatan serta percepatan dan pemerataan vaksinasi. Kondisi seperti ini, harus dijaga seraya terus berupaya agar kasus positif makin merosot dalam dan pada akhirnya hilang sama sekali. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.2. Data Pandemi Covid-19 di Indonesia dan Dunia (hingga 5 Oktober 2021)¹

Sampai dengan 5 Oktober 2021, ketika jumlah kasus di seluruh dunia mencapai lebih dari 219 juta kasus dan angka kematian telah melewati 4,55 juta orang, Berdasarkan data <https://covid19.go.id/peta-sebaran> per 5 Oktober 2021, data pandemi COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi positif sebanyak 4.221.610 kasus, 4.049.449 sembuh, 142.338 meninggal, seperti terlihat pada gambar berikut.

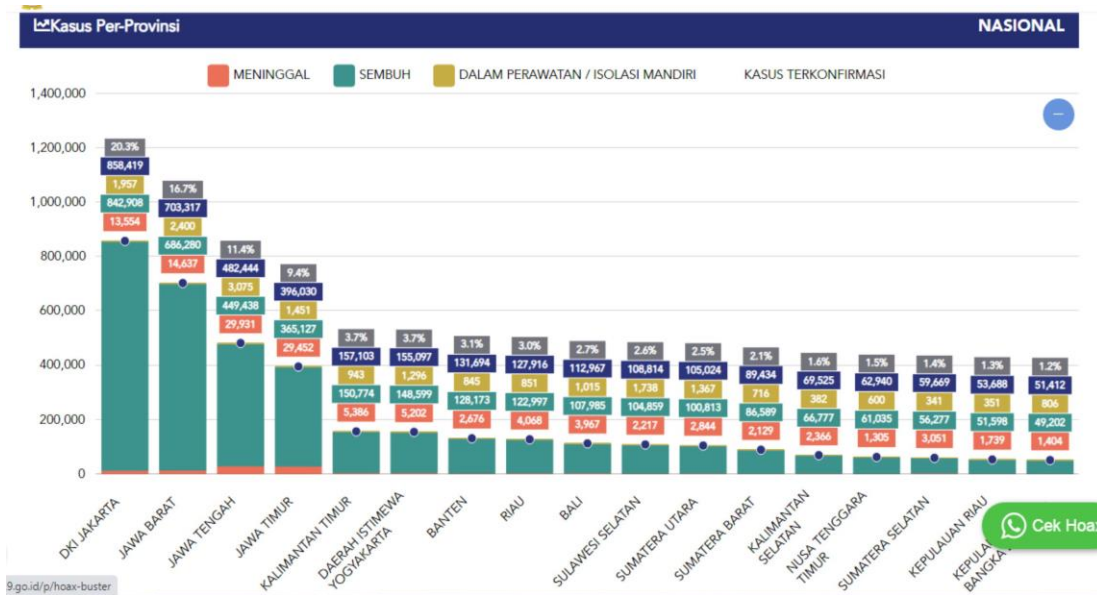


Gambar 4.3. Data Sebaran Pandemi Covid-19 di Indonesia (hingga 5 Oktober 2021)²

¹ <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

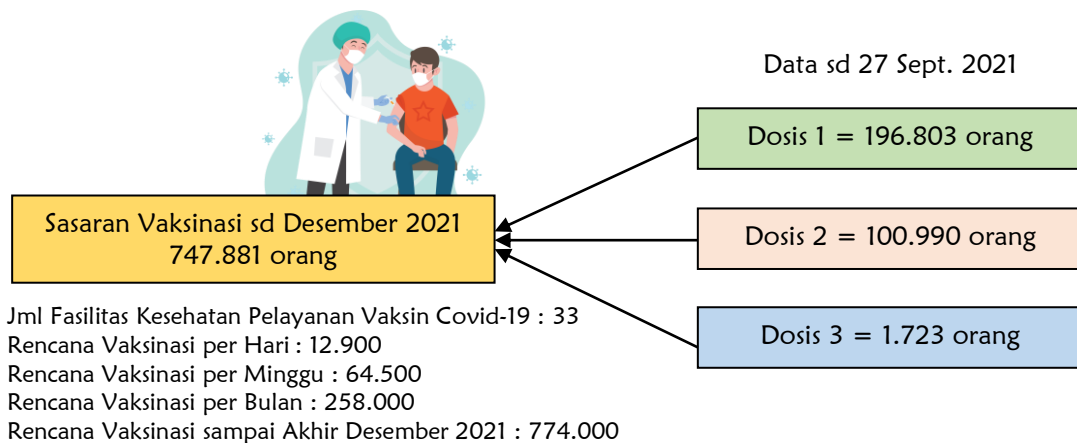
² <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

Sedangkan data terkini pandemi COVID-19 per provinsi, khususnya di Jawa Tengah berdasarkan sumber data <https://covid19.go.id/peta-sebaran> per 5 Oktober 2021, terkonfirmasi positif sebanyak 482.444 kasus, 3.075 dalam perawatan/isolasi mandiri, 449.438 sembuh dan 29.931 meninggal. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.4. Data Perkembangan Pandemi COVID-19 di Jawa Tengah (hingga 5 Oktober 2021)³

Sedangkan data pantauan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan data terakhir (update) per tanggal 5 Oktober 2021 terkonfirmasi positif sebanyak 7916 kasus, 7341 sembuh, 568 meninggal dan 7 dirawat/isolasi mandiri. Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus mendukung program percepatan vaksinasi nasional guna akselerasi pemulihan ekonomi nasional dan daerah. Rencana Percepatan Vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Pekalongan sampai akhir Desember 2021 sebanyak 747.881 orang dengan capaian sampai dengan 27 September 2021 sebesar 299.525 orang (40,05 %) dengan perincian Dosis 1 sebanyak 196.803 orang (26,31%), Dosis 2 sebanyak 100.990 orang (13,50%) dan Dosis 3 sebanyak 1.732 orang (0,23 %). Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.5. Rencana Percepatan Vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Pekalongan sd Akhir Desember 2021⁴

³ <https://covid19.go.id/peta-sebaran>

⁴ <http://corona.pekalongankab.go.id>

6. Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Dari beberapa hasil telaah terhadap isu-isu strategis pembangunan di atas, maka dapat diidentifikasi 5 isu strategis pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

a. Perlunya pengembangan gotong royong dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama

- 1) Kabupaten Pekalongan memiliki kebudayaan yang khas, yang merupakan bagian dari nilai budaya sebagai bangsa Indonesia yang dikenal ramah dan menjunjung tinggi nilai luhur kebudayaan yang diwariskan oleh generasi terdahulu. Salah satu budaya yang masih dipegang oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan yaitu budaya gotong royong. Budaya yang mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Gotong royong merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan tujuan menolong secara sukarela. Gotong royong masyarakat dapat memperoleh beberapa keuntungan, diantaranya: “Pertama, pekerjaan menjadi lebih mudah dan ringan dibandingkan apabila dilakukan secara perorangan. Kedua, memperkuat dan mempererat hubungan antarwarga komunitas dimana mereka berada bahkan dengan kerabatnya yang telah bertempat tinggal di tempat lain. Ketiga, menyatukan seluruh warga komunitas yang terlibat di dalamnya”.
- 2) Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan mengarah pada pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan, dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga perlu dilakukan dalam rangka peningkatan kerukunan hidup.
- 3) Peningkatan kegiatan keagamaan perlu didorong secara aktif, Cakupan penyelenggaraan kegiatan keagamaan yang difasilitasi (%) sebesar 80,3 %. Penyelenggaraan forum kerukunan umat beragama juga perlu ditingkatkan.
- 4) Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, juga perlu ditingkatkannya hal tersebut dapat diukur dari terjadinya kasus pelanggaran peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah dan juga tingkat penyelesaiannya. Kasus pelanggaran peraturan daerah di Kabupaten Pekalongan jumlahnya mengalami tren yang meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah kasus pelanggaran peraturan daerah ini juga diiringi dengan meningkatnya penanganan/penyelesaian. Meskipun belum mampu menyelesaikan seluruh kasus pelanggaran peraturan daerah yang terjadi namun tingkat penyelesaiannya sudah mampu mencapai angka 87,14% di tahun 2020.

b. Perlunya pengembangan dan pemanfaatan IT guna penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah

- 1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pada dasarnya tidak terlepas dari bagaimana pemerintah daerah itu sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan mampu menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Konsep *good governance* dilaksanakan dengan pendekatan yang berorientasi pada pembangunan

sektor-sektor publik yang mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik. Masyarakat sebagai penerima layanan ataupun pengguna layanan diberikan keterbukaan untuk memberikan pemikiran kritis mengenai kebijakan yang sudah seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya.

- 2) Untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, unsur paling menonjol adalah ketersediaan SDM aparatur yang berkualitas dan dukungan sarana dan prasarana. Kondisi ini tidak terlepas dari pelayanan birokrasi pemerintahan yang memerlukan kecepatan, ketepatan dan keterpaduan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Jika ini tidak terpenuhi, maka yang perlu dikedepankan adalah melakukan pembaharuan terhadap sistem birokrasi melalui reformasi birokrasi. Dalam reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur.
- 3) Kondisi teknologi informasi yang berkembang begitu cepat dari waktu ke waktu, maka pemerintah harus terbuka terhadap perkembangan tersebut. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah daerah dalam memberikan layanan kepada masyarakat merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik secara efektif, efisien dan mudah diakses. Pemanfaatan teknologi informasi yang smart dengan memperhatikan asas keterpaduan, peningkatan kualitas SDM, asas kemanfaatan atau dayaguna, asas keamanan dan kehandalan, asas legalitas, asas kesetaraan hak akses, asas fleksibilitas, dan open system.
- 4) Pemanfaatan teknologi informasi secara smart diharapkan mampu memberikan perubahan yang lebih mendasar dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, tidak sekedar sebagai penunjang manajemen pemerintahan. Adanya dukungan teknologi informasi mampu memberikan pelayanan yang responsif dan berkualitas pada masyarakat umum, dunia usaha ataupun pelayanan antar perangkat daerah dilingkup pemerintah Kabupaten Pekalongan, sehingga ke depan kondisi ideal tata kelola pemerintahan yang baik dapat tercapai.

c. Perlunya upaya akseleratif untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19

- 1) Struktur perekonomian Kabupaten Pekalongan didominasi oleh sektor: (1) industri pengolahan, (2) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (3) pertanian, kehutanan, dan perikanan; (4) konstruksi; dan (5) penyediaan akomodasi dan makan minum. Dari kelima sektor tersebut, sebanyak tiga sektor yang terkena dampak Pandemi Covid-19 cukup besar yaitu sektor: (1) perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; (2) penyediaan akomodasi dan makan minum; dan (3) industri pengolahan. Nilai PDRB Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 mengalami kontraksi. Kontraksi tersebut dipengaruhi oleh sulitnya produksi baik barang maupun jasa di masa pandemi COVID-19. Nilai PDRB Kabupaten Pekalongan atas dasar harga konstan 2010, mencapai 16,05 triliun rupiah. Angka tersebut turun dari 16,36 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan bahwa

selama tahun 2020 terjadi kontraksi pertumbuhan ekonomi sebesar -1,89 persen, dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 5,35 persen.

- 2) Disisi yang lain, pendapatan masyarakat juga mengalami penurunan sebagai akibat pembatasan aktivitas masyarakat (social distancing) sebagai antisipasi pencegahan penularan Covid-19. Tentunya diperlukan upaya pemulihan ekonomi agar pelaku usaha disektor-sektor ekonomi utama Kabupaten Pekalongan dapat kembali tumbuh dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.
- 3) Pengembangan investasi yang sesuai dengan potensi wilayah menjadi kebutuhan yang perlu diwujudkan dalam rangka perluasan kesempatan kerja, sehingga mampu mengurangi pengangguran. Salah satu potensi yang perlu terus dikembangkan adalah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, diharapkan sektor ini mampu memberikan *multiplier effect* bagi tumbuhnya industri pariwisata di Kabupaten Pekalongan.
- 4) Penurunan lahan pertanian baik irigasi maupun tadah hujan mengancam penurunan produksi pangan pokok dan daya dukung pangan. Pada daya dukung pangan terdapat ancaman berkurangnya lahan pertanian akibat dari meningkatnya akan kebutuhan untuk lahan terbangun (dalam kondisi bersyarat)

d. Perlunya peningkatan kualitas daya saing sumberdaya manusia yang berkeadilan dan upaya penanggulangan* kemiskinan dan pengangguran

- 1) Pencapaian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang masih dibawah rata rata Jawa Tengah. Capaian Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Pekalongan pada tahun 2020 sebesar 69,63 dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73 dan Nasional sebesar 71,92. Hal ini mengandung pengertian bahwa masyarakat Kabupaten Pekalongan pembangunan kesehatan, pendidikan serta pengeluaran perkapita belum optimal;
- 2) Angka kemiskinan masih relatif tinggi. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Pekalongan tahun 2019 sebesar 9,71% naik menjadi 10,19% di tahun 2020, dengan rata-rata capaian di bawah Provinsi Jawa Tengah dan di atas nasional. Adanya kenaikan angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan diakibatkan oleh pandemi COVID-19;
- 3) Penduduk miskin yang mendapat jaminan perlindungan sosial belum optimal;
- 4) Mengoptimalkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial; dan
- 5) Tingkat pengangguran yang relatif masih tinggi, naik tajam menjadi 6,97 persen di Tahun 2020 akibat pandemi COVID-19.

e. Perlunya peningkatan ketersediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan resiko bencana daerah

- 1) Pengembangan infrastruktur masyarakat yang nyaman aman dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisi saat ini minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum semakin menurun. Peningkatan kendaraan pribadi dan angkutan online berdampak pada penurunan penggunaan angkutan umum di Kabupaten Pekalongan sampai tahun 2020 sebesar 0,53%, kondisi tersebut menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu fasilitas keselamatan lalu lintas perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya dalam mendukung keselamatan masyarakat menggunakan moda transportasi;

- 2) Pemenuhan akses sanitasi, air bersih dan penataan kawasan kumuh serta pengurangan rumah tidak layak huni(termasuk di dalamnya penataan tanah). Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus berupaya keras mewujudkan 100% akses air minum aman dan sanitasi yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Target tersebut sesuai dengan RPJMN 2020-2024 dan Sustainable Development Goals (SDGs) tahun 2030. Capaian cakupan air minum di Kabupaten Pekalongan sampai dengan tahun 2020 belum dapat mencapai target Nasional yang ditetapkan 100% pada tahun 2019, maupun target SDGs tahun 2030. Daya dukung air di Kabupaten Pekalongan termasuk dalam daya air terlampaui atau buruk. Penurunan kualitas sumberdaya air yang dibuktikan dengan IKA pada kategori kurang, selain itu masih adanya kawasan dengan penyedia jasa ekosistem penyedia air yang rendah;
- 3) Penanganan permukiman kumuh juga belum optimal tahun 2020 terdapat 8,81% kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani. Berkaitan dengan penanganan permukiman kumuh masih ada permasalahan yang harus harus diantisipasi yaitu kawasan dengan kondisi lingkungan, kualitas dan kelayakan bangunan rumah tempat tinggal dan fasilitas sarana prasarannya kurang memadai antara lain kelayakan jalan lingkungan, ketersediaan sanitasi lingkungan dan sistem drainase lingkungan yang perlu ditingkatkan;
- 4) Pengurangan pencemaran lingkungan perlu dilakukan antisipasi, dan penanganan yang baik. Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Pekalongan tahun 2019 menunjukkan kondisi baik dengan nilai IKLH sebesar 83,8%, meskipun demikian IKLH pernah turun drastis di tahun 2018. Meskipun IKLH dalam kondisi cukup baik namun dengan kondisi Indeks Kualitas Air (IKA) menurun setiap tahunnya. Pencemaran lingkungan di Kabupaten Pekalongan menunjukkan peningkatan baik pencemaran udara maupun penurunan kualitas sumberdaya air yang dibuktikan dengan IKA pada kategori kurang. Selain itu emisi Gerakan Rumah Kaca (GRK) juga perlu diwaspadai. Gas Rumah Kaca (GRK) merupakan gas yang terkandung dalam atmosfer baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Metana merupakan salah satu jenis GRK penyebab pemanasan global. Gas ini lebih dianggap sebagai polutan daripada sumber energi yang berguna. Gas metana pada kadar tinggi dapat mengurangi kadar oksigen pada atmosfer bumi. Gas metana dapat menyebabkan penurunan oksigen sampai sekitar 19,5%. Pada kadar yang lebih tinggi, gas metana dapat menyebabkan kebakaran dan ledakan apabila bercampur dengan udara. Emisi GRK dari sektor Proses Industri dan Penggunaan Produk tahun 2018 mencapai 9,30 Gg CO₂e. Emisi GRK dari sektor Pengolahan dan Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga pada tahun 2018 mencapai angka 88,12 Gg CO₂e dan meningkat setiap tahun. Emisi GRK dari sektor pengadaan dan penggunaan energi pada tahun 2018 mencapai 250,18 Gg CO₂e dengan sub sektor transportasi mencapai 156,5 Gg CO₂e. Emisi GRK dari sektor Pengolahan Limbah Padat secara Biologi pada tahun 2018 mencapai angka 1.312 Gg CO₂e. Emisi GRK dari sektor Pembakaran Sampah melalui incinerator & Pembakaran sampah secara terbuka pada tahun 2018 mencapai angka 5,77 Gg CO₂e dan meningkat setiap tahun. Perubahan iklim memicu dampak baik di hulu maupun di hilir;
- 5) Permasalahan persampahan juga harus menjadi perhatian, belum optimalnya pengelolaan sampah dari sumbernya dan di TPS

menyebabkan peningkatan sampah secara terus menerus tanpa pengurangan yang signifikan. Persentase pengurangan sampah di perkotaan setiap tahun juga mengalami peningkatan meskipun relatif kecil, tahun 2016 sebesar 33,30% menjadi 26,34% di tahun 2020. Masyarakat belum mengimplementasikan konsep pengelolaan sampah *Reduce, Reuse, Recycle (3R)* dengan baik diseluruh wilayah Kabupaten Pekalongan. Sementara itu untuk Daya Tampung sampah di TPA terbatas.

- 6) Peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim perlu dilakukan mengingat Kabupaten Pekalongan merupakan wilayah rawan bencana. BPBD mendata sebanyak tujuh kecamatan di daerah selatan atau pegunungan Kabupaten Pekalongan dinilai rawan longsor, masing-masing di Kecamatan Kesesi (2 desa), Kajen (3 desa), Lebakbarang (11 desa), Paninggaran (6 desa), Kandangserang (7 desa), Petungkriyono (4 desa), dan Doro (2 desa). Sementara, potensi ancaman serangan angin kencang merata di 19 kecamatan di Kabupaten Pekalongan. Potensi bencana banjir dan angin kencang pada 19 kecamatan. Berdasarkan Indek Rawan Bencana Indonesia, Kabupaten Pekalongan termasuk pada kategori kelas rawan tinggi dengan skor 76. IRBI Kabupaten termasuk rangking 116 di Indonesia. Berdasarkan KLHS Kabupaten Pekalongan akan mengalami peningkatan resiko bencana alam banjir, longsor, abrasi dan kekeringan. Perlu diwaspadai juga **Dampak Penurunan Muka Tanah dan Kenaikan Muka Air Laut** seperti semakin meluasnya daerah genangan rob di wilayah utara;
- 7) Banjir rob di pesisir Kota dan Kabupaten Pekalongan diakibatkan oleh penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut. Penurunan muka tanah disebabkan oleh kompaksi alamiah sedimen muda pada dataran alluvial yang membentuk wilayah pesisir tersebut, yang dipercepat penurunannya oleh faktor antropogenik yang berupa pengambilan air tanah yang tidak terkendali dan tekanan bangunan dan infrastruktur. Kenaikan muka laut disebabkan oleh dampak perubahan iklim sebagai dampak dari berbagai aktivitas manusia yang meningkatkan gas rumah kaca. Banyaknya lokasi titik – titik sumur air tanah dalam yang tersebar pada wilayah bahaya banjir rob memperparah kondisi banjir rob tersebut (Andreas, 2018). Penurunan tanah ini juga merupakan akumulasi dari eksploitasi air tanah berlebihan dari berbagai aktivitas manusia seperti pertanian, industri, dan kebutuhan masyarakat (Kota Pekalongan dalam Angka 2018);
- 8) Bencana banjir di wilayah Kota dan Kabupaten Pekalongan merupakan fenomena yang terjadi setiap tahun. Banjir yang terjadi di wilayah ini dipengaruhi oleh penurunan muka tanah yang membentuk cekungan-cekungan baru pada wilayah dengan topografi datar, pengelolaan drainase yang belum baik, konversi lahan hutan di wilayah hulu dan faktor curah hujan yang tinggi pada saat musim penghujan. Berbagai hal di atas meningkatkan kerentanan wilayah Kota dan Kabupaten Pekalongan, sehingga kajian pemetaan dan analisis Kerentanan (V) perlu dilakukan;
- 9) Menurut sistem klasifikasi jasa ekosistem dari *Millenium Ecosystem Assessment* (2005), jasa ekosistem dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (*provisioning*), jasa pengaturan (*regulating*), jasa pendukung (*supporting*), dan jasa kultural (*cultural*). Jasa ekosistem Kabupaten Pekalongan menunjukkan Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air dan Banjir (JER 2) sebagian berada pada kelas

rendah 12,39%. Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim (JER 1) sebagian berada pada kelas rendah 12,39%. Jasa Ekosistem Pendukung Biodeversitas (JED 4) di Kabupaten Pekalongan sebagian besar berada di kelas tinggi 57,97%. Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik (JEP 5) di Kabupaten Pekalongan sebagian besar berada di kelas tinggi yaitu 68,34%.

Tabel 4.2
Rumusan Isu Strategis RPJMD Kabupaten Pekalongan

Bidang	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJPD Kab. Pekalongan	Isu Global Revolusi Industri 4.0 dan SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis KLHS Kab. Pekalongan	Rumusan Isu Strategis RPJMD Kab. Pekalongan
Sosial dan Budaya	<p>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan • Perlindungan Sosial Bagi Seluruh Penduduk • Pemenuhan Layanan Dasar • Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda • Pengentasan Kemiskinan • Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing <p>Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melemahnya Ideologi Pancasila dan Ketahanan Budaya Bangsa • Belum Optimalnya Pemajuan Kebudayaan Indonesia • Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai- 	<p>Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Penanggulangan Kemiskinan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Erosi nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki masyarakat selama ini. • Jumlah penduduk miskin serta pengangguran yang cukup besar • Kabupaten Pekalongan menghadapi permasalahan kualitas penduduk yang masih rendah (ranking menengah ke bawah dari 35 kabupaten/ kota di Jawa Tengah) Jumlah anak kurang gizi yang cukup besar merupakan masalah yang memiliki dampak jangka panjang • Kualitas hidup dan peran perempuan dan anak di berbagai bidang pembangunan masih rendah. • Jumlah penduduk buta huruf dan berpendidikan rendah yang cukup besar juga merupakan permasalahan yang berdampak pada kualitas sumber daya manusia (SDM) daerah • Meskipun kehidupan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan Yang Baik: Memastikan hidup sehat dan menggalakkan kesejahteraan bagi semua orang pada segala usia. • Pendidikan Berkualitas: Memastikan pendidikan inklusif bagi semua orang, dan menggalakkan kesetaraan serta kesempatan belajar seumur hidup yang berkualitas. • Kesetaraan Gender: Mencapai kesetaraan gender melalui pemberdayaan kaum wanita dan anak perempuan. • Tidak Ada Kemiskinan: Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di mana saja. • Menghapuskan Kelaparan: Mengakhiri kelaparan dan kematian akibat kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan 	<p>Hasil survei sosial demografi dampak covid 19 Provinsi Jateng Tahun 2020 : Pada sektor ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengeluaran barang kesehatan selama covid 19 • Masyarakat yang di rumahkan mengalami penurunan pendapatan • Kelompok masyarakat miskin dan masyarakat rentan mengalami penurunan pendapatan terutama mereka yang bekerja pada sektor informal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengangguran • Pandemi covid 19 • Pangan • Peningkatan jumlah penyakit menular dan tidak menular • Belum optimalnya pelayanan pendidikan (SDM, sarana prasarana); • Belum optimalnya upaya pencegahan perkawinan dini dan perkawinan anak (target penurunan 1,64%) • Gender dan Hak Anak • KB dan kesehatan reproduksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya pengembangan gotong royong dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama 2. Perlunya peningkatan kualitas daya saing sumberdaya manusia yang berkeadilan dan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

Bidang	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJPD Kab. Pekalongan	Isu Global Revolusi Industri 4.0 dan SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis KLHS Kab. Pekalongan	Rumusan Isu Strategis RPJMD Kab. Pekalongan
	<p>Nilai Ajaran Agama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum Kukuhnya Moderasi Beragama untuk Memperkuat Toleransi dan Kerukunan • Belum Optimalnya Peran Keluarga • Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas 		<p>beragama berkembang lebih baik, pembangunan bidang agama masih akan dihadapkan pada gejala negatif di tengah masyarakat yang sangat memprihatinkan, seperti perilaku asusila, praktek KKN, penyalahgunaan narkoba dan perjudian.</p>	<p>nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan</p>			
Ekonomi	<p>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas</p> <p>Isu strategis meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan Sumber Daya Alam • Efektivitas Tata Kelola Sumber Daya Ekonomi • Transformasi Struktural Berjalan Lambat • Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital 	<p>a. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha</p> <p>b. Kedaulatan pangan dan energi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan ekonomi rendah • Perekonomian Kabupaten Pekalongan sampai saat ini masih bertumpu pada sektor industri pengolahan, dengan kontribusi terhadap PDRB selama ini rata-rata lebih dari 27%. • peningkatan produksi tanaman • 41 pangan (padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan) dengan kondisi semakin berkurangnya lahan pertanian dan semakin banyaknya alih fungsi lahan, produksi komoditas perkebunan, produksi perikanan laut dan perairan umum serta produksi peternakan yang berkualitas menuju pada 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Yang Baik dan Pertumbuhan Ekonomi: Menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang terus menerus, inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang lengkap dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua orang. • Pemakaian Yang Bertanggungjawab: Memastikan pemakaian dan pola produksi yang berkelanjutan. 	<p>Hasil survey sosial demografi dampak covid 19 Provinsi Jateng Tahun 2020 :</p> <p>Pada sektor ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pendapatan sebagian besar masyarakat mengalami penurunan • Industri pariwisata mengalami penurunan, dikarenakan ada pembatasan dan larangan kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara • Pekerjaan pada tiga jenis lapangan usaha yang terdampak perdagangan besar eceran reparasi mobil dan sepeda 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih terdapat penduduk miskin, terlebih dengan adanya pandemi Covid 19, sebesar 9,71% • Perekonomian • Masih terbatasnya akses permodalan dan informasi bagi UMKM/UKM ke lembaga keuangan 	<p>Perlunya upaya akseleratif untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19</p>

Bidang	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJPD Kab. Pekalongan	Isu Global Revolusi Industri 4.0 dan SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis KLHS Kab. Pekalongan	Rumusan Isu Strategis RPJMD Kab. Pekalongan
			terciptanya swasembada pangan <ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan sektor perdagangan perlu lebih memberdayakan usaha mikro, kecil dan menengah • Peningkatan koperasi • Peningkatan lapangan kerja 		motor, sektor transportasi dan pergudangan serta sektor akomodasi makan dan minum <ul style="list-style-type: none"> • Pengeluaran meningkat dibandingkan dengan kondisi biasa mencapai 26-50% • Peningkatan pengeluaran bahan • makanan selama covid • Peningkatan pengeluaran pulsa/paket data 		
Infrastruktur dan LH	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar Infrastruktur Pelayanan Dasar: <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau • Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman • Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan • Keselamatan dan Keamanan Transportasi • Ketahanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam • Kesenjangan wilayah • Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam 	<ul style="list-style-type: none"> • kurang memadainya dan masih relatif tingginya tingkat kerusakan jalan, baik jalan kabupaten, jalan kecamatan maupun jalan desa • peningkatan daya listrik baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan industri yang semakin berkembang pesat serta peningkatan pemerataan listrik perdesaan se-wilayah Kabupaten Pekalongan • terbatasnya sumber air baku yang berkualitas baik yang alami maupun buatan, baik untuk air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> • Industri, Inovasi dan Infrastruktur: Membangun infrastruktur yang kukuh, menggalakkan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, serta membantu mengembangkan inovasi. • Kota dan Masyarakat Berkelanjutan: Membangun kota dan pemukiman warga yang inklusif, aman dan kukuh. • Air Bersih dan Sanitasi: Memastikan 	Hasil survei sosial demografi dampak covid 19 Provinsi Jateng Tahun 2020: <ul style="list-style-type: none"> • Pada sektor ekonomi • Perubahan pengeluaran konsumsi listrik. Kegiatan WFH dan studi from home meningkatkan kebutuhan listrik rumah tangga • Sektor transportasi mengalami penurunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Air Minum, Sanitasi, Kualitas Kesehatan Lingkungan • Masih ada kawasan rawan bencana (seperti rob, banjir, longsor, abrasi, penurunan tanah); Penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut • Persampahan • Alih fungsi lahan non terbangun menjadi kawasan budidaya, merusak ekosistem • Pengelolaan Limbah industri (termasuk limbah B3) belum optimal • Emisi GRK dari sektor Pengolahan dan 	Perlunya peningkatan ketersediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan resiko bencana daerah

Bidang	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJPD Kab. Pekalongan	Isu Global Revolusi Industri 4.0 dan SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis KLHS Kab. Pekalongan	Rumusan Isu Strategis RPJMD Kab. Pekalongan
	<p>Kebencanaan Infrastruktur</p> <ul style="list-style-type: none"> Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi <p>Infrastruktur</p> <p>Ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Konektivitas Jalan Konektivitas Kereta Api Konektivitas Laut Konektivitas Udara Konektivitas Darat <p>Infrastruktur Perkotaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Transportasi Perkotaan Energi dan Ketenagalistrikan Perkotaan Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman di Perkotaan Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan <p>Energi dan Ketenagalistrikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan Akses Serta Keterjangkauan Energi dan 		<p>keperluan rumah tangga maupun untuk industri di Kabupaten Pekalongan.</p> <ul style="list-style-type: none"> masih kurang terawatnyajaringan irigasi yang ada, sehingga pada saat dibutuhkan kadang kurang berfungsi secara optimal masih tingginya tipe rumah hunian C, yaitu rumah belum layak huni dan belum memenuhi standar kesehatan. Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi secara merata sampai ke seluruh wilayah perdesaan. kebijakan yang seringkali bersifat spatial dan kurang sinkron dengan penataan wilayah dan ruang yang dilakukan oleh wilayah tetangga (Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kabupaten Pemasang, Kabupaten Banjarnegara). Kebijakan ini akan berpotensi mengakibatkan mengakibatkan ataupun memicu persoalan peruntukan 	<p>ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi berkelanjutan bagi semua orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> Energi Terbarukan: Memastikan akses ke energy yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan terbarukan bagi semua orang. Berkurangnya Ketidaksetaraan: Mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara-negara. Aksi Iklim: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya Kehidupan di Bawah Air: Mengambil tindakan segera untuk memberantas perubahan iklim dan dampaknya Kehidupan di Darat : Melindungi, memulihkan dan menggalakkan penggunaan ekosistem bumi yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memberantas 		<p>Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga</p> <ul style="list-style-type: none"> Belum optimalnya pemanfaatan sumber energi terbarukan Belum seluruh RT memiliki listrik, baru mencapai 84,67% dari target 96,6% 	

Bidang	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJPD Kab. Pekalongan	Isu Global Revolusi Industri 4.0 dan SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis KLHS Kab. Pekalongan	Rumusan Isu Strategis RPJMD Kab. Pekalongan
	<p>Ketenagalistrikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kecukupan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan • Transformasi Digital • Penuntasan Infrastruktur TIK • Pemanfaatan Infrastruktur TIK • Fasilitas Pendukung Transformasi Digital <p>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah <p>Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup • Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim • Pembangunan Rendah Karbon 		<p>wilayah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya pemanfaatan peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah tentang wilayah dan tata ruang (RTRW) akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap produk-produk hukum yang mengatur tentang tata ruang dan perwilayahan. • kondisi sumber daya alam dan lingkungan saat ini, apabila tidak ditangani secara terpadu akan mengakibatkan adanya krisis pangan, air bersih dan udara bersih • Pemanfaatan sumberdaya alam secara berlebihan untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek akan mengakibatkan kegiatan eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup kurang memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan • Meningkatnya kasus 	<p>penggersangan lahan, dan menghentikan serta membalikkan degradasi lahan dan menghentikan penyusutan keekaragaman hayati.</p>			

Bidang	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJPD Kab. Pekalongan	Isu Global Revolusi Industri 4.0 dan SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis KLHS Kab. Pekalongan	Rumusan Isu Strategis RPJMD Kab. Pekalongan
			pencemaran lingkungan yang disebabkan kurang bertanggungjawabnya perilaku pelanggaran lingkungan				
Pemerintahan	<p>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Konsolidasi Demokrasi • Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri • Penegakan Hukum Nasional • Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola • Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional 	Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan teknologi informasi • peningkatan kemampuan penguasaan dan penerapan IPTEK baik oleh aparat maupun masyarakat, agar dapat menerapkan dan memanfaatkan untuk peningkatan pelayanan dan perbaikan ekonomi. • kurangnya perhatian dan tingkat kesadaran masyarakat maupun aparatur pemerintah tentang pemanfaatan hasil-hasil penelitian, terutama atas teknologi pendukung pertanian dan industri pengolahan hasil pertanian • mewujudkan pemerintahan Kabupaten Pekalongan yang akuntabel, transparan, berwibawa dan bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menuju pada terciptanya tata kelola 	<ul style="list-style-type: none"> • Perdamaian dan Keadilan: Menggalakkan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pengembangan yang berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang, serta membangun berbagai lembaga yang efektif, bertanggungjawab dan inklusif di semua strata. • Kemitraan: Memperkuat sarana pelaksanaan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk perkembangan yang berkelanjutan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terhambatnya aktivitas pelayanan publik dan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya pelaksanaan penegakan dan evaluasi atas regulasi daerah baik Perda/Perkada. • masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Akte Kelahiran, baru mencapai 59,09% dari target 77,4% • Terbatasnya akses publik terhadap data/informasi statistik 	Perlunya pengembangan dan pemanfaatan IT guna penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah

Bidang	Isu Strategis Nasional dalam RPJMN	Isu strategis RPJMD Provinsi Jawa Tengah	Isu Strategis RPJPD Kab. Pekalongan	Isu Global Revolusi Industri 4.0 dan SDGs	Isu Global Covid-19	Isu Strategis KLHS Kab. Pekalongan	Rumusan Isu Strategis RPJMD Kab. Pekalongan
			pemerintahan yang baik (good governance). <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang bermuara kepada upaya penegakan hukum • Peningkatan profesionalisme pegawai agar lebih maju selaras dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang berbasis pada e-government 				

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. Visi

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2020. Visi tersebut menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin diraih atau diwujudkan (*desired future*) selama masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka telah pula dirumuskan misi, tujuan dan sasaran beserta indikator-indikatornya yang dapat menjadi tolok ukur keberhasilan dari visi yang ingin dicapai.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan sesuai dengan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”

Rumusan visi tersebut merupakan kumpulan dari beberapa frase yang perlu dijabarkan kembali sehingga dapat diketahui maknanya. Penjabaran frase ini berguna untuk memberikan batasan mengenai kondisi yang ingin dicapai oleh visi tersebut. Penjabaran dari masing-masing frase visi pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah sebagai berikut:

1. Sejahtera

Sejahtera menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah aman sentosa dan makmur; selamat (terlepas dari segala macam gangguan). Sedangkan sejahtera yang dimaksud dalam frase visi ini adalah:

- a. Terpenuhinya kebutuhan dasar yang meliputi sandang, pangan dan papan bagi warga masyarakat Kabupaten Pekalongan.
- b. Memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan yang layak dan memadai.
- c. Terbukanya lapangan kerja yang seluas-luasnya.
- d. Penyerapan tenaga kerja dengan penghasilan yang memadai.
- e. Mampu bersaing dan berinovasi dalam dunia perekonomian dengan berbasis penguatan ekonomi kerakyatan yang mandiri.

2. Adil

Adil menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kondisi yang sama berat; tidak berat sebelah; tidak memihak; berpihak kepada yang benar; berpegang pada kebenaran; sepatutnya; tidak sewenang-wenang. Penjelasan frase “ADIL” dalam visi pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah:

- a. menghilangkan kesenjangan antar wilayah di Kabupaten Pekalongan
- b. menghilangkan ego struktural
- c. menghilangkan diskriminasi dan segala bentuk ketidakadilan didalam kehidupan masyarakat kabupaten pekalongan
- d. pelaksanaan segala regulasi dan perundang – undangan yang berkeadilan.

3. Merata

Merata berasal dari kata dasar rata, yang memiliki arti mencakup semua bagian; tersebar ke segenap penjuru; sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sehingga merata dapat diartikan sebagai menjadi rata atau tersebar ke segala penjuru. Frase merata dalam visi pembangunan Kabupaten Pekalongan ini adalah:

- a. Pendistribusian kegiatan pembangunan secara merata disemua wilayah dan sektor atau bagian;
- b. Terpenuhinya infrastruktur publik yang memadai;
- c. Terbukanya konektivitas antar wilayah.

4. Bergotong Royong

Bergotong royong artinya adalah dengan bekerja bersama-sama, yaitu kondisi dimana dalam pelaksanaan pembangunan, semua komponen harus bergerak bersama untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Bergotong royong juga dapat diartikan sebagai sebuah sikap persaudaraan dan toleransi. Adapun frase bergotong royong dalam visi pembangunan Kabupaten Pekalongan adalah:

- a. Bahu membahu dalam menyelesaikan masalah dan atau pekerjaan;
- b. Menumbuhkan sikap sukarela dan ikhlas;
- c. Menumbuhkan sikap tolong menolong;
- d. Mempererat tali silaturahmi dan atau persaudaraan;
- e. Meningkatkan rasa solidaritas;
- f. Memperkokoh persatuan.

B. Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian tersebut serta berlandaskan pada makna visi pembangunan Kabupaten Pekalongan, maka ditetapkan misi pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026 sebagaimana berikut:

1. **Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Religius.**
2. **Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif.**
3. **Menyediakan infrastruktur publik yang merata.**
4. **Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau.**
5. **Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing.**
6. **Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian Rakyat.**
7. **Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran.**
8. **Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.**
9. **Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas.**
10. **Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti.**
11. **Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga.**

Dengan pertimbangan bahwa jumlah misi yang dirumuskan di awal terlalu banyak, dan ada beberapa rumusan misi yang secara substansi saling terkait, maka dilakukan pengelompokan misi. Sehingga didapatkan jumlah misi yang tidak terlalu banyak, namun secara substansi masih memiliki arti yang sama dari misi semula. Pengelompokan misi tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.1.
Penyempurnaan dan Pengelompokan Misi**

No	Misi Awal		Penyempurnaan Misi	
1	Misi 1	Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Religius.	Misi 1	Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong
	Misi 10	Memperkokoh kerukunan hidup beragama, bergotong royong dan berbudi pekerti.		
2	Misi 2	Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif	Misi 2	Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif

				berbasis kemajuan teknologi informasi
3	Misi 6	Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat	Misi 3	Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.
	Misi 7	Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran.		
	Misi 8	Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.		
	Misi 9	Menyediakan kebutuhan petani dan nelayan yang memadai serta menyediakan peluang pasar yang luas.		
4	Misi 4	Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau.	Misi 4	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal
	Misi 5	Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing.		
	Misi 11	Mengembangkan potensi kepemudaan, seni budaya dan olahraga.		
5	Misi 3	Menyediakan infrastruktur publik yang merata.	Misi 5	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan

Dari tabel di atas terlihat bahwa misi yang semula berjumlah 11 setelah dilakukan pengelompokan dan penyempurnaan tanpa mengurangi substansinya menjadi 5. Penjelasan dari 5 misi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong

Kabupaten Pekalongan adalah wilayah dengan karakteristik religiusitas yang kuat. Nilai-nilai agama sangat kuat mempengaruhi gaya hidup masyarakat Kabupaten Pekalongan. Kehidupan beragama di Kabupaten Pekalongan harus didukung dengan nilai-nilai kerukunan dan toleransi yang merupakan salah satu ajaran baik dari tiap kepercayaan/agama. Kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kerjasama yang baik akan terwujud apabila diantara para penganut agama merasa saling membutuhkan, saling menghormati perbedaan, saling tolong-menolong, saling membantu dan mampu mempersatukan pendapat atau toleransi. Nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Pekalongan harus menjadi landasan filosofis kehidupan bermasyarakat, sehingga cita-cita pembangunan yang diharapkan akan dapat terwujud dan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pekalongan.

2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi

Pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas utama dalam mewujudkan *good and clean government*. Tahun 2020-2024 merupakan penguatan tahun ketiga dari grand design reformasi birokrasi nasional, dimana tahun ketiga ini tema yang diangkat adalah peningkatan secara terus menerus kapasitas birokrasi sebagai kelanjutan dari reformasi birokrasi tahun kedua dalam rangka mewujudkan pemerintahan kelas dunia.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan tentu berupaya mendukung cita-cita pembangunan nasional di bidang pemerintahan ini. Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam kurun waktu lima tahun ke depan tentu tidak lepas dari tema

ketiga grand desain reformasi birokrasi. Penguatan di 8 area perubahan reformasi birokrasi masih menjadi prioritas yang harus diwujudkan. Penguatan tersebut dilakukan baik di komponen pengungkit maupun di sisi hasil dari reformasi birokrasi.

3. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.

Pertumbuhan ekonomi dan pengurangan angka kemiskinan menjadi dua hal utama yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan di sektor perekonomian. Pertumbuhan ekonomi diharapkan akan memberi dampak riil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan juga pemerataan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga diharapkan akan mampu mendorong iklim usaha dan investasi semakin meningkat.

Pembangunan perekonomian akan diupayakan melalui penggalian potensi dan peningkatan investasi pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri olahan, dan juga perdagangan. Selain itu konsep pembangunan dari tingkat desa melalui optimalisasi dana desa juga akan semakin didorong dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya local

Pembangunan sumberdaya manusia menjadi komponen utama dalam mendukung cita-cita pembangunan nasional. Ketersediaan SDM yang memiliki daya saing perlu diupayakan dan menjadi prioritas dalam pembangunan ke depan. Peningkatan daya saing SDM tentunya harus dilakukan secara adil kepada seluruh komponen masyarakat. Artinya pembangunan SDM akan memperhatikan kesempatan dan kemampuan untuk mendapatkan hak-hak bagi kelompok masyarakat rentan.

Pembangunan SDM juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan sosial. Artinya bahwa proses pembangunan yang akan dilakukan harus mampu dirasakan manfaatnya oleh seluruh kelompok masyarakat. Aspek pengakuan terhadap kebutuhan-kebutuhan khusus yang dimiliki oleh kelompok perempuan, anak, lansia, penyandang difabel juga akan dijadikan pedoman dalam pengambilan kebijakan pembangunan SDM.

Pembangunan kualitas dan daya saing SDM dilakukan di sektor pendidikan dalam rangka menjadikan masyarakat yang cerdas. Hal tersebut akan didukung dengan meningkatkan budaya literasi di masyarakat. Sedangkan pembangunan kesehatan masyarakat dibangun melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat, dengan dukungan dari peningkatan aktifitas fisik masyarakat, pemenuhan gizi, dan perencanaan keluarga bahagia.

Pembangunan SDM juga perlu dilakukan dengan memperhatikan keluhuran budaya local. Nilai-nilai religiusitas, tradisi dan adat istiadat yang ada perlu dilestariak supaya generasi mendatang tidak akan kehilangan jati diri di era modern ini. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas, berdaya saing dan tentunya berahlak baik.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur mengedepankan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Berkelanjutan disini artinya adalah dengan memperhatikan harmonisasi antara aktifitas pembangunan dengan kelestarian lingkungan. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan akan tetap mampu menjaga aspek perlindungan lingkungan hidup.

Selain itu, pembangunan infratsruktur juga akan dilakukan dengan merata dan simultan untuk setiap kawasan. Artinya seluruh wilayah harus

dapat kesempatan yang sama untuk berkembang, sehingga tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dari sisi pembangunan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Pekalongan yang maju dan sejahtera bersama.

Pembangunan infrastruktur juga dilakukan dalam rangka meningkatkan akses keterhubungan antar wilayah. Dengan semakin terbukanya akses keterhubungan, maka diharapkan akan mampu membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang akan terhubung dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang sudah ada.

Seperti yang telah dijelaskan, bahwa misi merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai visi, oleh karena itu perlu dilihat keterkaitan antara unsur-unsur visi dengan rumusan misi yang telah ditetapkan.

Tabel 5.2.

Keterkaitan Unsur Visi dengan Rumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Unsur Visi	Uraian Misi
Sejahtera	Misi 3, Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.
Adil	Misi 4, Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal Misi 2, Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi
Merata	Misi 5, Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan
Bergotong Royong	Misi 1, Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong

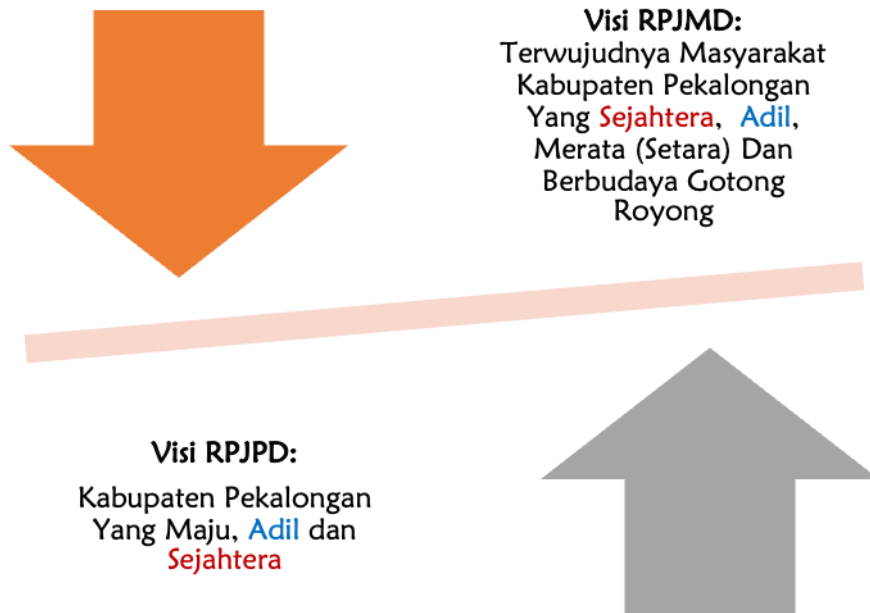
Selain hal tersebut di atas, dapat dijelaskan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterkaitan Visi, Misi RPJMD dengan Visi, Misi RPJPD

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 memiliki keselarasan dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pekalongan tahun 2005-2025. Hal ini dikarenakan RPJMD tahun 2021-2026 merupakan salah satu bagian dari tahapan pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025, tepatnya merupakan tahap ke-empat atau tahap terakhir dari pelaksanaan RPJPD.

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2005-2025 menyebutkan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pekalongan adalah **Kabupaten Pekalongan yang Maju, Adil, dan Sejahtera**. Visi tersebut menjadi salah satu pedoman dalam merumuskan visi jangka menengah Kabupaten Pekalongan.

Keselarasan antara visi jangka panjang dengan visi jangka menengah dapat dilihat dalam gambar berikut.



Gambar 5.1.
Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Panjang dengan Visi Pembangunan Jangka Menengah

Jika dilihat dari gambar di atas, terlihat bahwa visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Pekalongan tahun 2005-2025.

Selanjutnya perlu dilihat kesesuaian antara misi dalam RPJMD dengan misi dalam RPJPD.

Tabel 5.3.
Keterkaitan Misi Jangka Menengah dengan Misi Jangka Panjang

No Misi	Misi RPJMD 2021-2026	No Misi	Misi RPJPD 2005-2025
1	Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong	8	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab serta beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2	Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi	3	Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan demokratis
3	Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.	1	Mewujudkan daya saing daerah
		2	Mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang berkualitas
		5	Mewujudkan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan sosial
4	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya local	6	Mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas

No Misi	Misi RPJMD 2021-2026	No Misi	Misi RPJPD 2005-2025
5	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan	4	Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan
		7	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkesinambungan untuk kesejahteraan masyarakat

2. Keterkaitan Isu Strategis RPJMD dengan Misi RPJPD

Visi dan misi pembangunan jangka menengah merupakan upaya untuk menjawab isu strategis yang dihadapi atau harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan dalam kurun waktu 5 tahun, oleh karena itu antara isu strategis dengan misi harus terkait.

Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan sudah selaras dengan isu strategis yang ada.

Tabel 5.4.
Keterkaitan Isu Strategis dengan Rumusan Misi
Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021-2026

Isu Strategis	No Misi	Rumusan Misi
Perlunya pengembangan gotong royong dan peningkatan kerukunan hidup antar umat beragama	1	Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong
Perlunya pengembangan dan pemanfaatan IT guna penguatan tata kelola pemerintahan, reformasi birokrasi, dan peningkatan kapasitas fiskal daerah	2	Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi
Perlunya upaya akseleratif untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta upaya penanggulangan dampak pandemi Covid-19	3	Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.
Perlunya peningkatan kualitas daya saing sumberdaya manusia dan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	4	Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal
Perlunya peningkatan ketersediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan resiko bencana daerah	5	Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan

3. Keterkaitan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan 2021-2026 dengan Visi, Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 dan RPJMN 2020-2024

Pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan hendaknya dapat mendukung upaya pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu perlu dipastikan adanya

keselaran antara misi pembangunan Kabupaten Pekalongan dengan misi pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan misi pembangunan nasional dalam RPJMN.

Tabel 5.5.
Keterkaitan Visi, Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan dengan Visi, Misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan RPJMN

RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023		RPJMD Kabupaten Pekalongan 2021-2026		RPJMN 2020-2024
Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	←	Misi 1: Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong	→	Misi 1: Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	←	Misi 2: Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi	→	Misi 2: Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdayasaing
Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	←	Misi 3: Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.	→	Misi 3: Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan	←	Misi 4: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya local	→	Misi 4: Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
		Misi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan	→	Misi 5: Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
			→	Misi 6: Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermatabat dan Terpercaya
			→	Misi 7: Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman kepada Setiap Warga
			→	Misi 8: Pengelolaan Pemetintahan yang Bersih, Efektif dan Terpercaya
			→	Misi 9: Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara

C. Tujuan dan Sasaran

Tujuan (*goal*) adalah pernyataan-pernyataan yang merupakan penjabaran atau implementasi tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Dalam rangka melaksanakan misi pembangunan jangka menengah daerah, maka dirumuskan tujuan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Sasaran (*objective*) adalah penjabaran dari tujuan, yaitu merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai lima tahun ke depan. Sasaran diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai dan rasional. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung fokus, efektif, dan efisien.

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Pekalongan berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

1. Tujuan dari misi 1, adalah **menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman dan nyaman**. Dengan rumusan sasaran:
 - a. Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat
 - b. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan daerah
2. Tujuan dari misi 2 adalah **meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih**. Sasaran yang ingin dicapai adalah:
 - a. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah
 - b. Menguatnya kinerja pengawasan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan
 - c. Meningkatnya pengelolaan kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam menjalankan pemerintahan daerah
 - d. Meningkatnya efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi
3. Tujuan dari misi 3 adalah **meningkatkan daya saing ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan**. Sasarannya meliputi:
 - a. Meningkatnya kontribusi dari sektor-sektor potensial pendukung perekonomian daerah
 - b. Meningkatnya daya tarik investasi
 - c. Menurunnya angka pengangguran, PPKS dan meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat
 - d. Menguatnya peran desa dalam mengembangkan potensi masyarakat
4. Tujuan dari misi 4 adalah:
 - a. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudi luhur**; dengan sasaran
 - 1) Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan masyarakat;
 - 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan
 - 3) Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan Hak Anak.
 - b. **Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat**, dengan sasaran:
 - 1) Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan.
5. Tujuan dari misi 5 adalah **Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan responsif terhadap bencana**. Sasaran yang ingin dicapai:
 - a. Meningkatnya pembangunan infrastruktur, pemanfaatan ruang, dan keterhubungan antar wilayah
 - b. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup
 - c. Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana yang ada

Tabel 5.6.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target dalam Pencapaian
Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026


Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pekalongan Yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara) dan Berbudaya Gotong Royong”

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong														
Menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman dan nyaman		Rata-rata capaian penurunan konflik dan pelanggaran ketertiban umum	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan ditambah persentase penegakkan perda dibagi 2	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
	1	Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Persentase potensi konflik yang terselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
	2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan daerah	Persentase Penegakkan Perda	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakkan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$	%	87,14	88,30	88,50	89,00	90,00	90,10	90,20	90,20	Sekretariat Daerah
Misi 2 : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi														
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih		Indeks Reformasi Birokrasi	Skor hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dari kementerian PAN RB	Indeks	B	B	B	B	B	BB	BB	BB	BB	Sekretariat Daerah
					(64,60)	(66,60)	(66,00)	(70,00)	(71,00)	(73,00)	(74,00)	(74,00)		
	1	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	1. Nilai SAKIP Kabupaten	Skor Nilai SAKIP hasil evaluasi MENPAN-RB	Nilai	B (64,02)	B (64,02)	B (65,00)	B (67,00)	BB (70,00)	BB (73,00)	BB (75,00)	BB (75,00)	Sekretariat Daerah
					WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sekretariat Daerah

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
			Pemerintah Daerah											
	2	Menguatnya kinerja pengawasan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan	Maturitas SPIP yang terintegrasi	Hasil evaluasi BPKP	Level (skor)	1 (1,75)	2 (2,03)	2 (2,55)	2 (2,75)	3 (3,0)	3 (3,08)	3 (3,23)	3 (3,23)	Sekretariat Daerah
	3	Meningkatnya pengelolaan kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam menjalankan pemerintahan daerah	Indeks Sistem Merit	Nilai Sistem Merit/Nilai Maksimal Sistem Merit	Indeks	-	0,47	0,61	0,63	0,65	0,66	0,67	0,67	Sekretariat Daerah
	4	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	1. Indeks Inovasi Daerah	Hasil pengukuran berdasarkan pengisian pada http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan .	Indeks	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	Sekretariat Daerah
2. Indeks SPBE			Hasil pengukuran dari evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,60	2,90	3,10	3,30	3,60	4,20	4,50	4,50	4,50	Sekretariat Daerah
3. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan			Jumlah persentase perekaman KTP El ditambah Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 th ditambah persentase penerbitan akte Kematian dibagi 3 x 100%	%	96,55	97,41	97,86	97,98	98,06	98,16	98,26	98,26	98,26	98,26

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		4. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	$IKM = \frac{\text{Total dan Nilai Persegi Per Usur} \times \text{Nilai}}{\text{Total usur yang terisi} \times \text{penimbang}}$ <p>Dimana:</p> $\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Usur}} = \frac{1}{14} = 0,071$	Nilai	76,00	76,00	78,00	78,00	79,00	80,00	80,00	80,00	Sekretariat Daerah
Misi 3: Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal													
meningkatkan daya saing ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan		1. Pertumbuhan Ekonomi	(PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK tahun sebelumnya dikali 100	%	-1,89	1,50	3,24	4,35	4,56	4,88	5,30	5,30	Sekretariat Daerah
		2. PDRB perkapita	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$	Juta Rp	25,25	25,50	25,75	26,00	26,25	26,50	26,75	26,75	Sekretariat Daerah
		3. Angka Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk dikali 100	%	10,19	10,57	9,97	9,61	9,27	8,94	8,63	8,63	Sekretariat Daerah
1	Meningkatnya kontribusi dari sektor-sektor potensial pendukung perekonomian daerah	1. Kontribusi sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan terhadap PDRB ADHK	Jumlah kontribusi sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan terhadap PDRB ADHK dibagi jumlah PDRB ADHK x 100%	%	15,05	15,23	15,48	15,67	15,73	15,86	15,93	15,93	Sekretariat Daerah
		2. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	Jumlah kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK dibagi jumlah PDRB ADHK x 100%	%	14,90	14,93	14,95	15,00	15,05	15,10	15,15	15,15	Sekretariat Daerah
		3. Kontribusi Sektor Industri	Jumlah kontribusi sektor	%	30,84	30,87	30,95	31,15	31,25	31,36	31,54	31,54	Sekretariat Daerah

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		Pengolahan terhadap PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan	Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK dibagi jumlah PDRB ADHK x 100%										
		4. Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK	Jumlah kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK dibagi jumlah PDRB ADHK x 100%	%	5,54	5,55	5,56	5,57	5,58	5,59	5,60	5,60	Sekretariat Daerah
	2	Meningkatnya daya tarik investasi	Pertumbuhan nilai investasi	%	-5,79	-14,74	-7,11	-1,03	0,10	1,01	1,50	1,50	Sekretariat Daerah
	3	Menurunnya angka pengangguran, PPKS dan meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	%	6,97	4,28	4,10	4,00	3,90	3,80	3,70	Sekretariat Daerah
2. Persentase Penanganan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)			Jumlah PPKS yang ditangani dibagi jumlah Total PPKS x 100 %	%	-	-	0,12	0,25	0,37	0,49	0,59	0,59	Sekretariat Daerah
3. Pertumbuhan koperasi aktif dan usaha mikro			Pertumbuhan koperasi aktif ditambah Pertumbuhan usaha mikro	%	-9,74	-4,24	5,18	5,42	5,64	5,83	5,97	5,97	Sekretariat Daerah
4. Tingkat partisipasi wirausaha pemuda			Jumlah pemuda sebagai wirausaha dibagi jumlah pemuda wirausaha yang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
			dibina											
	4	Menguatnya peran desa dalam mengembangkan potensi masyarakat	Indeks Desa Membangun	Rata-rata dari Indeks Desa Membangun seluruh desa. Indeks Desa Membangun dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan	Indeks	0,6601	0,6650	0,6701	0,6801	0,6901	0,7001	0,7101	0,7201	Sekretariat Daerah
Misi 4: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal														
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudi luhur			1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)		Indeks	69.63	70.11	70.32	70.71	71.08	71.43	71.79	71.79	Sekretariat Daerah
			2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPM perempuan dibagi IPM Laki-laki x 100	Indeks	92,48	92,55	92,61	92,74	92,87	93,00	93,13	93,13	Sekretariat Daerah
	1	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^{21} x_i$ <small>dimana: RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke-<i>i</i> yang berumur 25 tahun n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</small>	Tahun	6,91	7,17	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,25	Sekretariat Daerah
			2. Harapan Lama Sekolah	$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{B_i^t}{P_i^t}$ <small>dimana: HLS_a^t = Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t B_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t i = Usia (a, a + 1, ..., 15)</small>	Tahun	12,41	12,42	12,43	12,44	12,45	12,46	12,47	12,47	Sekretariat Daerah
	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi	Tahun	73,69	73,74	73,80	73,85	73,90	73,95	74,00	74,00	Sekretariat Daerah

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
			tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur											
	3	Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDJ = 1/3 [(I par + I Dm + I inc-dis)]; I par = Indeks keterwakilan di Parlemen I Dm = Indeks pengambilan keputusan I inc-dis = Indeks distribusi pendapatan	Indeks	71,68	71,75	71,85	72,25	72,45	72,65	72,75	72,85	Sekretariat Daerah
			2. Kategori Kabupaten Layak Anak	Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Sekretariat Daerah
2. Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat			Indeks Pembangunan Kebudayaan	$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \cdot Indeks D_j)$ Keterangan : IPK adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan Dj adalah Dimensi ke-j Wj adalah Bobot Dimensi ke-j	Indeks	-	-	67,05	67,75	68,45	69,15	69,85	69,85	Sekretariat Daerah
	1	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dibagi jumlah total obyek pemajuan budaya x 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Misi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan													
Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan responsif terhadap bencana		1. Tingkat Pembangunan Infrastruktur	Rata-rata dari 8 indikator infrastruktur (Persentase rumah layak huni; Persentase kawasan perkotaan non kumuh; Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman; Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman; Persentase jalan mantap; Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; dan Persentase sarana perhubungan kondisi baik)	%	86,30	86,40	86,45	86,50	86,55	86,60	86,65	86,70	Sekretariat Daerah
		2. Indeks Ketahanan Daerah	Penilaian indeks ketahanan daerah (71 indikator) dari	Indeks	-	-	0.48	0.51	0.53	0.55	0.60	0.60	Sekretariat Daerah

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
			BNPB										
	1 Meningkatkan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan ruang, dan keterhubungan antar wilayah	1. Persentase pemenuhan air minum dan air limbah domestik	Persentase penduduk mengakses air minum layak dan aman ditambah persentase penduduk mengakses air limbah domestik dibagi 2	%	65,50	68,46	70,97	73,97	76,47	77,47	78,47	78,47	Sekretariat Daerah
		2. Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Penduduk	%	93,00	93,66	94,00	94,40	94,80	94,90	95,30	95,30	Sekretariat Daerah
		3. Persentase infrastruktur jalan, drainase, irigasi kondisi baik	Persentase infrastruktur jalan kondisi baik ditambah persentase drainase kondisi baik ditambah persentase irigasi kondisi baik dibagi 3	%	58,60	62,43	65,44	69,34	73,20	77,92	82,63	82,63	Sekretariat Daerah
		4. Persentase Pelayanan Sampah	Total volume sampah yang dapat ditangani dibagi Total volume timbunan sampah kabupaten	%	16,00	26,50	26,50	27,50	28,00	28,50	29,00	29,00	Sekretariat Daerah
		5. Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Jumlah ruas jalan kabupaten yang terlayani trayek dibagi jumlah panjang ruas jalan kabupaten dikali 100%	%	46,03	46,03	47,07	49,79	53,56	56,09	58,58	58,58	Sekretariat Daerah

Misi / Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Indikator Sasaran	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
		6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Realisasi RTRW dibagi rencana peruntukan x 100%	%	-	10,53	15,79	21,05	26,32	31,58	36,84	36,84	Sekretariat Daerah
	2	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	75,91	58,11	58,20	59,04	59,50	59,97	60,44	60,44	Sekretariat Daerah
	3	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana yang ada	1. Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Indeks	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
			2. Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	%	9,69	9,21	8,72	8,23	7,74	7,26	6,77	6,77	Sekretariat Daerah

Keterangan : Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah Koordinator pencapaian Visi-Misi Kepala yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu urusan

Selanjutnya, untuk menjelaskan kerangka logis keterkaitan Indikator RPJMD dan Renstra Perangkat daerah Kabupaten Pekalongan guna penyusunan **pohon kinerja (cascading)** dan indikator kinerja di masing-masing Perangkat Daerah dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 5.7.
Keterkaitan Indikator RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah
Guna penyusunan Pohon Kinerja (Cascading) Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

RPJMD 2021-2026				Renstra PD 2021-2026				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi 1 : Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong								
Menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman dan nyaman	Rata-rata capaian penurunan konflik dan pelanggaran ketertiban umum							
		1. Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Persentase potensi konflik yang terselesaikan	Meningkatkan penanganan potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Persentase potensi konflik yang terselesaikan	Menurunnya potensi konflik ideology, politik, ekonomi, sosial (antar suku, ras, budaya, agama, dan kemasyarakatan) yang terselesaikan	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial (antar suku, ras, budaya, agama, dan kemasyarakatan) yang terselesaikan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan daerah	Persentase Penegakkan Perda	Meningkatkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman dan nyaman	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penegakkan Perda	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Misi 2 : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi								
Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi							
		1. Meningkatnya kualitas perencanaan,	1. Nilai SAKIP Kabupaten	Meningkatkan Akuntabilitas	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Akuntabilitas	1. Nilai SAKIP Kabupaten	Sekretariat Daerah

RPJMD 2021-2026				Renstra PD 2021-2026						
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah Penanggungjawab		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
yang yang baik dan bersih		pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah		Kinerja Instansi Pemerintah		Kinerja Perangkat Daerah	2. Tingkat Kematangan Organisasi	Sekretariat Daerah		
				Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Tingkat Capaian Kinerja pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan		
				Meningkatkan Kinerja Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	19 Kecamatan		
				2. Opini BPK	Meningkatkan kapasitas fiskal dan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintah daerah	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan keuangan daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Rasio PAD terhadap APBD		Meningkatnya pendapatan asli daerah	Pertumbuhan PAD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			
		2. Menguatnya kinerja pengawasan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan	Maturitas SPIP Terintegrasi			Meningkatkan penguatan kinerja pengawasan dan pembinaan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan	Maturitas SPIP Terintegrasi	Meningkatnya penguatan kinerja pengawasan dan pembinaan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan	Kapabilitas APIP	Inspektorat
						3. Meningkatnya pengelolaan kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam menjalankan pemerintahan daerah	Indeks Sistem Merit	Meningkatkan kompetensi dan pelayanan kepegawaian yang prima berbasis teknologi	Indeks Sistem Merit	1. Meningkatnya kompetensi ASN

RPJMD 2021-2026				Renstra PD 2021-2026				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				informasi		2. Meningkatnya pelayanan kepegawaian berbasis teknologi informasi	Nilai Sistem Merit	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
				Meningkatkan kualitas dukungan penyelenggaraan sekretariat Dewan yang bersih dan bermartabat	Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	Terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan yang mapan dan berkelanjutan yang didukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	Sekretariat DPRD
				Meningkatkan pengelolaan kearsipan perangkat daerah	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Meningkatnya pengelolaan kearsipan perangkat daerah	Persentase Jumlah arsip yang diselamatkan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		4. Meningkatnya efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	1. Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan Indeks Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
			2. Indeks SPBE	Meningkatkan efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	Indeks SPBE	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	1. Tingkat Kematangan Manajemen Layanan SPBE 2. Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral 3. Tingkat keamanan informasi pemerintah	Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika
			3. Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkatkan efektifitas pelayanan publik bidang	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik bidang	1. Persentase Kepemilikan KTP EL-Pemula Bagi Bagi Wajib KTP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

RPJMD 2021-2026				Renstra PD 2021-2026				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis teknologi informasi		Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berbasis teknologi informasi	EL-Pemula (%) 2. Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran (%) 3. Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			4. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten			Meningkatkan efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	1. Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan 3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Sekretariat Daerah Dinas Kesehatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
						Meningkatnya kinerja pelayanan perijinan dan kualitas pelayanan perijinan yang mudah, murah, cepat dan tepat dalam rangka mendukung kemudahan bisnis dan investasi	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Misi 3: Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal								
meningkatkan daya saing ekonomi dan mengurangi tingkat	1. Pertumbuhan Ekonomi 2. PDRB perkapita 3. Angka Kemiskinan							
		1. Meningkatnya	1. Kontribusi	Meningkatkan	1. Persentase	1. Meningkatnya	1. Produktivitas padi	Dinas Ketahanan

RPJMD 2021-2026				Renstra PD 2021-2026				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
kemiskinan		kontribusi dari sektor-sektor potensial pendukung perekonomian daerah	sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan terhadap PDRB ADHK	produksi pertanian dan ketahanan pangan	peningkatan produksi pertanian	produktivitas pertanian peternakan	atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Pangan dan Pertanian
							2. Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Terhadap Standar	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							2. Meningkatkan ketahanan pangan	
			Meningkatkan persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya	Persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya	Meningkatnya persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya	1. Persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
						2. Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya	Dinas Kelautan Dan Perikanan	
			2. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	Mengoptimalkan usaha perdagangan dalam dan luar negeri	1. Persentase Pertambahan Jumlah Unit Usaha Perdagangan	Meningkatnya stabilitas iklim usaha dan promosi perdagangan	1. Persentase pelaku usaha yang berijin	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							2. Pertumbuhan Nilai Ekspor	2. Persentase kerjasama usaha perdagangan
			3. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK	Mengoptimalkan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Persentase pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Meningkatnya Cakupan Bina Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Cakupan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dibina	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			4. Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK	1. Meningkatkan daya tarik pariwisata	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	1. Persentase peningkatan kunjungan wisata	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
2. Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata							

RPJMD 2021-2026				Renstra PD 2021-2026					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		2. Meningkatnya daya tarik investasi	Pertumbuhan nilai investasi	Meningkatkan daya tarik investasi	Pertumbuhan nilai investasi	Meningkatnya realisasi investasi PMDN/PMA	Nilai Realisasi investasi PMDN/PMA	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		3. Menurunnya angka pengangguran, PPKS dan meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Meningkatkan kesempatan kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Meningkatnya ketersediaan kesempatan kerja	1. Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan pendaftar pelatihan	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja	
							2. Persentase pelaksanaan pengiriman calon transmigran ke lokasi transmigrasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja	
			2. Persentase Penanganan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan penanganan PPKS	Persentase Penanganan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Meningkatnya PPKS yang memperoleh bantuan sosial	2. Meningkatnya PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Dinas Sosial
								Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS	Dinas Sosial
			3. Pertumbuhan koperasi Aktif dan Usaha Mikro	Meningkatkan koperasi Aktif dan Usaha Mikro	Pertumbuhan koperasi Aktif dan Usaha Mikro	Meningkatnya koperasi Aktif dan Usaha Mikro	1. Pertumbuhan koperasi aktif	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja	
								2. Pertumbuhan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja
		4. Tingkat partisipasi wirausaha pemuda dan prestasi olahraga pemuda	Meningkatkan wirausaha pemuda dan prestasi olahraga	Tingkat partisipasi wirausaha pemuda	Meningkatnya wirausaha pemuda terbina dan atlet berprestasi tingkat regional dan nasional.	1. Persentase pemuda wirausaha yang dibina	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata		
							Prestasi Olahraga Tingkat regional, dan Nasional	2. Persentase Atlet Berprestasi Tingkat regional, dan Nasional	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata

RPJMD 2021-2026				Renstra PD 2021-2026				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		4. Menguatnya peran desa dalam mengembangkan potensi masyarakat	Indeks Desa Membangun	Menguatkan peran desa dalam mengembangkan potensi masyarakat	Indeks Desa Membangun	1. Meningkatkan peran masyarakat dalam membangun desa melalui lembaga desa yang ada	Persentase Desa Maju	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
						2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan efisien	Persentase kelembagaan pemerintahan desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Misi 4: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal								
1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudi luhur	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)							
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)							
		1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan masyarakat	1. Rata-Rata Lama Sekolah 2. Harapan Lama Sekolah	1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan yang inklusif bagi masyarakat	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar dan PAUD usia 5-6 tahun	1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dasar yang inklusif	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI 2. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						2. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan PAUD usia 5-6 tahun yang inklusif	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD usia 5-6 tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						3. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan Pendidikan Kesetaraan yang inklusif	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

RPJMD 2021-2026				Renstra PD 2021-2026					
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
				2. Meningkatkan pembangunan literasi masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Persentase ketersediaan bahan pustaka	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Indeks Keluarga Sehat	1. Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat	1. Angka Kematian Ibu (AKI)	Dinas Kesehatan	
								2. Angka Kematian Bayi (AKB)	Dinas Kesehatan
								3. Prevalensi Stunting pada Balita	Dinas Kesehatan
							2. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit Tidak menular	1. Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Dinas Kesehatan
								2. Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Dinas Kesehatan
				3. Meningkatnya fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	Persentase Fasyankes (Rumas Sakit dan Puskesmas) yang terakreditasi	Dinas Kesehatan			
				Meningkatkan Upaya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Total Fertility Rate (TFR)	Meningkatnya Upaya Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Cakupan peserta KB aktif	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		3. Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan pengarusutamaan hak anak	1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dan pengarusutamaan hak anak	Indeks PUG	Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	

RPJMD 2021-2026				Renstra PD 2021-2026				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			2. Kategori Kabupaten Layak Anak		Kategori Kabupaten Layak Anak	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak	Skor Kabupaten Layak Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan							
		Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Meningkatkan objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi 5: Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan								
Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan responsif terhadap bencana	1. Tingkat Pembangunan Infrastruktur							
	2. Indeks Ketahanan Daerah							
		1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur, pemanfaatan ruang, dan keterhubungan antar wilayah	1. Persentase pemenuhan air minum dan air limbah domestik	Meningkatkan Pemenuhan Air Minum dan Akses Air Limbah Domestik	Persentase pemenuhan air minum dan air limbah domestik	Meningkatnya cakupan Pemenuhan Air Minum dan Akses Air Limbah Domestik	1. Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			2. Rasio Rumah Layak Huni	Meningkatkan pemenuhan rumah layak huni yang terjangkau bagi masyarakat	Rasio Rumah Layak Huni	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni yang aman dan terjangkau serta kawasan permukiman yang berkualitas	2. Persentase Penduduk mengakses air limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	1. Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 hektar yang ditangani	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
						2. Persentase satuan perumahan yang dilengkapi PSU	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan	

RPJMD 2021-2026				Renstra PD 2021-2026				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								Lingkungan Hidup
			3. Persentase infrastruktur jalan, drainase dan irigasi kondisi baik	Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan, drainase dan irigasi	Persentase infrastruktur jalan, drainase, irigasi kondisi baik	Meningkatnya kualitas Infrastruktur jalan, drainase dan irigasi	1. Persentase jalan kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							2. Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							3. Persentase Drainase kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			4. Persentase Pelayanan Sampah	Meningkatkan pelayanan persampahan	Persentase Pelayanan Sampah	Meningkatnya pelayanan persampahan	Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
			5. Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Meningkatkan kualitas sarana dan infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Meningkatnya kualitas sarana dan infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan	1. Persentase infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan dalam kondisi baik	Dinas Perhubungan
							2. Persentase Kepemilikan KIR	Dinas Perhubungan
			6. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	1. Persentase Kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RT BL	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							2. Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kinerja pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Meningkatnya kualitas air, udara dan tanah	1. Indeks Kualitas Air	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
							2. Indeks Kualitas Udara	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

RPJMD 2021-2026				Renstra PD 2021-2026				
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Perangkat Daerah Penanggungjawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				beracun (Limbah B3) sesuai ketentuan				Permukiman dan Lingkungan Hidup
							3. Indek Kualitas Tutupan Lahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		3. Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana yang ada	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana	Indeks Ketahanan Daerah	1. Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
						2. Meningkatnya pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahaya kebakaran	Tingkat Waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana banjir dan rob	Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana banjir dan rob	Persentase penurunan Luasan Genangan Banjir dan Rob	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sumber : Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

A. Strategi

Strategi merupakan langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Sedangkan dalam pengelolaan pembangunan daerah perlu adanya manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang merupakan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan, oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Penyusunan strategi pembangunan Kabupaten Pekalongan selain berdasarkan pada permasalahan pembangunan yang dihadapi dan disusun berdasarkan atas misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2021-2026. Selengkapnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Strategi Pembangunan Misi 1 Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah **menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman dan nyaman**. Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

a. Sasaran 1 : Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan penuh toleransi melalui penguatan FKUB, penguatan rasa nasionalisme, dan peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik, serta mengembangkan sikap dan budaya gotong royong dalam bermasyarakat.

b. **Sasaran 2 : Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan daerah.**

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan budaya tertib dan patuh hukum melalui pemasyarakatan produk hukum daerah, pelaksanaan patroli berkala, serta peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam penegakan peraturan hukum daerah

2. **Strategi Pembangunan Misi 2 Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi**

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah **meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih**. Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

a. **Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.**

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas pembangunan melalui perencanaan program yang berorientasi pada hasil, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, serta pelaporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

b. **Sasaran 2 : Menguatnya kinerja pengawasan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan.**

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu menguatkan kualitas pengawasan melalui peningkatan kompetensi APIP dan pemanfaatan partisipasi masyarakat.

c. **Sasaran 3 : Meningkatkan pengelolaan kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam menjalankan pemerintahan daerah.**

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan profesionalisme ASN dan pembentukan lembaga yang efektif.

d. **Sasaran 4 : Meningkatkan efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi.**

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan inovasi, pemanfaatan data dan arsip yang terkelola, serta meningkatkan kualitas *complain handling sistem*.

3. **Strategi Pembangunan Misi 3 Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.**

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah **meningkatkan daya saing ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan**. Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

a. **Sasaran 1 : Meningkatkan kontribusi dari sektor-sektor potensial pendukung perekonomian daerah.**

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah yaitu menguatkan sistem ekonomi melalui peningkatan kompetensi pelaku-pelaku usaha, penguatan jejaring permodalan, produksi, dan juga pemasaran, serta pemberdayaan ekonomi di sektor pertanian, perdagangan, koperasi dan UKM, pariwisata, perikanan, dan sektor-sektor lainnya.

b. Sasaran 2 : Meningkatkan daya tarik investasi.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah yaitu meningkatkan daya tarik berinvestasi melalui penyebarluasan potensi investasi, dan pemberian kemudahan berinvestasi.

c. Sasaran 3 : Menurunnya angka pengangguran, PPKS dan meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu :

- 1) memperluas akses pekerjaan bagi penduduk usia produktif melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dengan cara meningkatkan *skill* dan kompetensi para pencari kerja, serta penyebarluasan informasi peluang kerja;
- 2) meningkatkan penanganan PPKS melalui pemberdayaan dan pelibatan sumberdaya sosial yang ada, pemberdayaan PPKS potensial, serta pemberian bantuan sosial kepada PPKS tidak potensial;
- 3) menguatkan fasilitasi kepada pelaku usaha koperasi dan usaha mikro meliputi pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemudahan perizinan usaha dan perusahaan promosi dagang dan dukungan kelembagaan;
- 4) menguatkan daya saing kepemudaan melalui fasilitasi kegiatan pemuda yang dapat menumbuhkan, prestasi dan peran serta pemuda dan organisasi pemuda, mendorong partisipasi kader pemuda dalam pendidikan kepramukaan, pengembangan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan;
- 5) menguatkan daya saing olahraga melalui peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat, pembinaan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis berjenjang dan berkelanjutan, meningkatkan pola kemitraan olahraga dan mengembangkan sistem penghargaan, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olahraga yang bagi seluruh masyarakat termasuk disabilitas;

d. Sasaran ke 4 : Menguatnya peran desa dalam mengembangkan potensi masyarakat.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu menguatkan keberdayaan desa dalam mengembangkan potensi perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan juga penguatan lembaga pemerintahan desa.

4. Strategi Pembangunan Misi 4 Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah :

a. Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudi luhur;

Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

1) Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan masyarakat

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah yaitu meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan, pengembangan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan

mutu pembelajaran, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan, dan peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan.

2) Sasaran 2 : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan penguatan sistem kesehatan, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik, pengendalian penduduk serta akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR.

3) Sasaran 3 : Meningkatkan implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan yaitu meningkatkan pengarusutamaan gender dalam bidang pembangunan daerah melalui pelembagaan pengarusutamaan gender, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang responsif gender, peningkatan kualitas keluarga kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan hak anak di semua klaster untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya, mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO, peningkatan kualitas perlindungan khusus anak serta peningkatan sinergitas dan kerjasama antara dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

b. Tujuan 2 : Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat,

Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan.

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan pelestarian warisan budaya melalui peningkatan kepedulian masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap warisan budaya, melakukan inventarisasi, termasuk pembaruan dokumentasi terhadap koleksi cagar budaya, peningkatan mutu tata kelola dan perlindungan cagar budaya serta pengelolaan potensi budaya daerah.

5. Strategi Pembangunan Misi 5 Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi ini adalah **Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan responsif terhadap bencana.**

Adapun sasaran pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sebagai berikut:

a. **Sasaran 1 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur, pemanfaatan ruang, dan keterhubungan antar wilayah.**

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan keterhubungan antar wilayah melalui optimalisasi pendayagunaan SDA untuk memenuhi kebutuhan air dan pengendalian daya rusak air serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA, peningkatan jalan dan jembatan untuk mencapai kondisi mantap sebagai sarana aksesibilitas masyarakat serta pengelolaan sistem drainase, pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat, pemenuhan terhadap akses air limbah domestik, peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan serta bangunan gedung, penyusunan rencana rinci tata ruang, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan kualitas Rumah Layak Huni (RLH) milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan fasilitasi prasarana sarana dan utilitas, serta peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keterhubungan antar wilayah.

b. **Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup.**

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan sampah dan indeks kualitas lingkungan hidup.

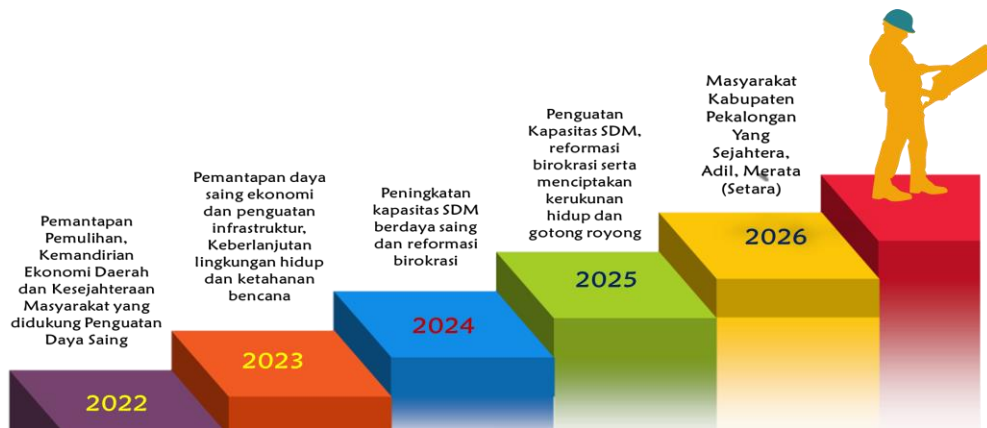
c. **Sasaran 3 : Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana yang ada.**

Strategi yang dirumuskan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana, Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana, Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana, mendorong dan menumbuhkan kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat.

B. Arah Kebijakan Pembangunan Tahunan

Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Arah arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan ditetapkan dengan tema/fokus pembangunan tahunan sejak tahun 2022 hingga tahun 2026. Pada masing-masing tema/fokus disusun prioritas pembangunan yang akan ditangani.



Gambar 6.1. Arah Pembangunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022-2026

Dalam tataran durasi waktu pembangunan jangka menengahnya, Pemerintah Kabupaten Pekalongan tetap memulai dari tahun 2021 mengingat masa berakhir dan pergantian Kepala serta Wakil Kepala Daerah berada pada posisi bulan Juni tahun 2021. Penetapan RPJMD menurut undang-undang adalah 6 bulan setelah kepala daerah dilantik, yakni diperkirakan bulan Desember 2021, maka perencanaan pembangunan tahun 2021 mengacu pada dokumen RPJMD tahun 2016-2021. Jadi, meskipun dokumen RPJMD Kabupaten Pekalongan ini adalah untuk tahun 2021-2026, namun dalam aspek pelaksanaan teknis pembangunan jangka menengah, dimulai dari tahun 2022 dan tentunya berakhir di tahun 2026.

Berikut adalah penjelasan arah kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Pekalongan periode 2021-2026.

1. Arah Kebijakan Tahun Pertama (2022)

Arah kebijakan pembangunan pada tahun 2022 memiliki makna strategis mengingat kinerja yang dicapai akan menjadi dasar atau faktor penentu keberhasilan bagi tema/fokus pembangunan tahap berikutnya. Fokus pembangunan tahun 2022, menitikberatkan pada **“Pemantapan Pemulihan, Kemandirian Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat yang didukung Penguatan Daya Saing”**. Pemantapan pemulihan ekonomi dilakukan dengan Penguatan Perekonomian Daerah Berbasis Potensi Unggulan didukung penguatan daya saing ekonomi. Penguatan perekonomian menjadi fokus karena diharapkan pada tahun 2022, kondisi perekonomian mulai bangkit dari keterpurukan sebagai dampak dari pandemi covid-19. Adapun kebijakan prioritas daerah tahun pertama ini diarahkan untuk :

- a. Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah, melalui upaya :
 - 1) Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri mikro dan kecil, perdagangan dan jasa pasca pandemi COVID-19 melalui peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri (standarisasi produk dan inovasi produk); pengembangan inovasi teknologi produksi; penguatan industri mikro dan kecil (fasilitasi akses permodalan, pemasaran dan standarisasi produk, fasilitasi penyediaan bahan baku industri unggulan), peningkatan promosi pariwisata, perbaikan iklim dan kepastian investasi yang kondusif, serta peningkatan ekspor produk unggulan;

- 2) Penguatan kemampuan teknologi informasi terutama bagi masyarakat dan usaha mikro kecil terdampak COVID-19 melalui pelatihan dan pengembangan kewirausahaan berbasis teknologi informasi, peningkatan prasarana dan sarana teknologi informasi, serta pengembangan *e-commerce* produk-produk industri kreatif di Kabupaten Pekalongan.
- b. Peningkatan dan Kemudahan Investasi, melalui upaya :
Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif dilakukan dengan peningkatan pelayanan kemudahan berusaha (*doing bussiness*), mendorong realisasi investasi, optimalisasi promosi investasi, penyebaran investasi berkualitas, mendorong investasi besar untuk bermitra dengan industri mikro kecil, mendorong peningkatan investasi dalam negeri/PMDN khususnya industri mikro kecil.
- c. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, dilakukan melalui upaya:
 - 1) Mengurangi beban pengeluaran (jaring pengaman sosial) yang berupa:
 - a) Sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan air bersih;
 - b) Berupa bantuan langsung;
 - c) Bersifat hibah/bansos.
 - 2) Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin melalui :
 - a) Pelatihan/ketrampilan kewirausahaan pemula (*Start up*);
 - b) Bantuan modal awal;
 - c) Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, melalui pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan yang dijadikan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan daerah.
 - 3) Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil melalui:
 - a) Pendampingan ekonomi pada kelompok rentan lainnya seperti kelompok perempuan kepala rumah tangga dan kelompok masyarakat lainnya yang terdampak pandemi COVID-19;
 - b) Fasilitasi usaha mikro/kecil serta usaha rintisan yang bersinergi dengan BUMDesa dan/atau BUMDesa;
 - c) Penciptaan lapangan kerja dengan padat karya;
 - d) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung penanggulangan kemiskinan.
 - 4) Optimalisasi pelaksanaan sinergitas penanggulangan kemiskinan melalui:
 - a) Peningkatan sumber pembiayaan alternatif diantaranya melalui Baznas dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* PKBL meliputi : pemberdayaan masyarakat dan bantuan sosial;
 - b) Partisipasi masyarakat yang meliputi : pendaftaran perubahan kondisi rumah tangga, peduli lingkungan dan swadaya/gotong royong;
 - c) Penguatan tugas dan fungsi kelembagaan penanggulangan kemiskinan/TKPKD dengan Satgas Kemiskinan yang meliputi pemutakhiran data, perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, padat karya tunai, pengendalian inflasi daerah, pembangunan inklusif dan antisipasi kejadian bencana.

- 5) Peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar panti sesuai Standar Pelayanan Minimal bidang sosial, dan peningkatan akurasi data kemiskinan melalui optimalisasi SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu);
- 6) Peningkatan tenaga kerja yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan berdaya saing tinggi dengan sasaran pada :
 - a) Pelaksanaan pelatihan vokasi berdasarkan kompetensi dan kerjasama dengan industri melalui :
 - (1) Pelaksanaan pelatihan dan pemagangan di daerah;
 - (2) Perizinan dan akreditasi lembaga pendidikan keterampilan di daerah;
 - (3) Sertifikasi kompetensi;
 - (4) Penyediaan Instruktur Aparatur Sipil Negara di daerah;
 - (5) Penguatan fungsi konsultansi dan pengukuran produktivitas.
 - b) Penguatan pengelolaan informasi pasar kerja daerah yang terintegrasi berupa data pencari kerja dan lowongan pekerjaan pada Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER);
 - c) Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha terutama bagi warga terdampak COVID-19 melalui peningkatan ketrampilan, pendidikan dan pelatihan berbasis softskill, penguatan program *link and match* antara Balai Latihan Kerja (BLK) dengan Dunia Usaha/Dunia Industri (DUDI), peningkatan jejaring pemagangan dalam dunia industri;
 - d) Pemberdayaan tenaga kerja disabilitas melalui penyediaan layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan. Fungsi layanan disabilitas dilaksanakan melalui penguatan tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
- d. Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan, dilakukan melalui upaya:
 - 1) Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan, meliputi:
 - a) Peningkatan pelayanan pendidikan terutama adaptasi terhadap perubahan akibat pandemi COVID-19 dengan pengembangan teknologi digital untuk mendukung pembelajaran virtual, dengan tetap melakukan pemerataan layanan pendidikan yang baik;
 - b) Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM Provinsi berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Pendidikan.
 - c) Peningkatan dukungan terhadap fungsi pendidikan dalam percepatan pencegahan anak kerdil atau *stunting* melalui :
 - (a) penyelenggaraan PAUD;
 - (b) penguatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
 - (c) bantuan sanitasi sekolah;
 - (d) kelas parenting.
 - d) Peningkatan dan pengembangan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M);
 - e) Peningkatan dukungan untuk fungsi pendidikan dari urusan pemerintahan bidang lainnya (antara lain: penanganan anak tidak sekolah, IPM, IPG, IDG dan lain-lain);

- f) Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin, dan mendukung terlaksananya “kembali ke sekolah” (back to school) bagi anak usia sekolah;
 - g) Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan berpotensi;
 - h) Peningkatan pemenuhan dan pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - i) Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - j) Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan sesuai standar sarana dan prasarana yang berlaku;
 - k) Mengefektifkan kerjasama dengan perguruan tinggi dalam membangun strategi peningkatan kualitas pendidikan;
 - l) Peningkatan dan penguatan pendidikan karakter dan budaya anti korupsi;
 - m) Pengembangan teknologi informasi dalam mendukung pengembangan pendidikan; dan
 - n) Peningkatan pengembangan pendidikan inklusi yang memberikan kesempatan belajar pada anak-anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak-anak pada umumnya, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan nyata sehari-hari;
 - o) Pengembangan pendidikan non formal dilakukan sampai ke tingkat pemerintahan terkecil dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum, untuk menekan angka buta huruf.
- 2) Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, meliputi :
- a) Optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan.
 - b) Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat melalui percepatan penurunan stunting, antara lain:
 - (a) Memastikan perencanaan dan penganggaran khususnya di lokasi dengan prevalensi stunting tinggi dan/atau kesenjangan kecukupan layanan yang tinggi;
 - (b) Melaksanakan 8 aksi konvergensi program penurunan stunting terintegrasi dengan melibatkan peran seluruh OPD terkait dan multisector;
 - (c) Memperbaiki pengelolaan layanan dan memastikan bahwa sasaran prioritas memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang tersedia;
 - (d) Mengoordinir kecamatan dan pemerintah desa dalam mengoptimalkan sumber daya, sumber dana dan pemutakhiran data.
 - c) Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) pasca pandemi COVID-19 melalui upaya Promotif dan Preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) diantaranya :
 - (a) Peningkatan kualitas lingkungan;
 - (b) Peningkatan perilaku hidup sehat;
 - (c) Penyediaan pangan sehat dan percepatan gizi;
 - (d) Peningkatan aktivitas fisik masyarakat;
 - (e) Peningkatan edukasi hidup sehat.

- d) Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi :
 - (a) Peningkatan fasilitas kesehatan yang sesuai standar;
 - (b) Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
 - (c) Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkualitas.
 - e) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional melalui integrasi program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan Meningkatnya jumlah penduduk yang mendapatkan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS);
 - f) Peningkatan kualitas dan jumlah tenaga medis yang profesional;
 - g) Peningkatan kualitas air minum dan sanitasi layak dan aman melalui Pembinaan Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) serta Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi dengan meningkatnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- e. Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, dilakukan melalui upaya:
- 1) Meningkatkan konektivitas infrastruktur melalui peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan jembatan yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Kabupaten Pekalongan serta wilayah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas wilayah dan regional serta perkotaan-perdesaan, peningkatan sarana prasarana simpul dan pemaduan moda transportasi (terminal dan stasiun);
 - 2) Meningkatkan sistem jaringan irigasi dan pembangunan bangunan penampungan air (embung) pada daerah pertanian produktivitas tinggi/lambung pangan dan daerah rawan kekeringan;
 - 3) Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi, dan drainase di wilayah kumuh perkotaan dan miskin perdesaan, pengelolaan sampah serta pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
 - 4) Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan dan utara, yang diwujudkan dengan pembangunan kawasan industri, pembangunan flyover perlintasan sebidang rel kereta Api di Wiradesa serta pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - 5) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim melalui penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir-rob, tanah longsor dan lain sebagainya.
- f. Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan, dilakukan melalui upaya:
- 1) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk guna peningkatan nilai tambah, pemberian bibit, benih dan pupuk, peningkatan sarana dan prasarana irigasi, pengembangan teknologi tepat guna pertanian, perkebunan dan peternakan serta pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok;
 - 2) Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan keterampilan nelayan, pengembangan cakupan dan layanan asuransi nelayan, penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya; pemberian benih dan pakan ikan serta penyediaan lahan perikanan budidaya.
- g. Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga, dilakukan melalui upaya:

- 1) Peningkatan promosi dan penyelenggaraan event melalui peningkatan peran komunitas, swasta dan dunia pendidikan;
 - 2) Peningkatan pariwisata daerah melalui peningkatan kualitas desa wisata dan pengembangan pada desa lainnya sebagai *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan; peningkatan prasarana dan sarana destinasi pariwisata guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- h. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani, dilakukan melalui upaya:
- 1) Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh hingga menjangkau unit kerja terkecil agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dan dampak pasca pandemi COVID-19 melalui :
 - a) Mengoptimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan pemerintahan yang mudah diakses masyarakat dengan penerapan pelayanan daring/online dan atau pelayanan keliling kepada masyarakat;
 - b) Mengoptimalkan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan pendekatan layanan kepada masyarakat berupa kecepatan, kemudahan, kepastian dan transparansi berbasis teknologi informasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan);
 - c) Terus mendorong pemerintah desa/kelurahan dalam menghadapi pandemi COVID-19 dengan membangun gerakan solidaritas untuk saling membantu, berbagi satu sama lain untuk membangun jejaring sosial komunitas sebagai gerakan perjuangan bersama;
 - d) Memperkuat pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja yang bersih, akuntabel, terpadu dan responsif dengan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pada belanja daerah yang didukung pengawasan pencapaian tujuan/sasaran organisasi. Integrasi perencanaan, penganggaran, dan manajemen kinerja merupakan syarat perubahan pola pikir dan sistem yang mengarah kepada penghematan anggaran;
 - e) Penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern pemerintah melalui perkuatan maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); perkuatan kapabilitas APIP, pembangunan zona integritas, penanganan pengaduan masyarakat melalui berbagai media, optimalisasi SIMWAS-Online guna percepatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan;
 - f) Meningkatkan manajemen SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional dan berkinerja tinggi melalui pengembangan pegawai ASN berbasis kompetensi, penyusunan kelas jabatan dan pola pembinaan karir yang terbuka untuk mewujudkan aparatur yang semakin lincah dan adaptif terhadap perubahan;
 - g) Meningkatkan koordinasi dan harmonisasi serta sinkronisasi kebijakan dan program dalam tahapan pengurangan pembatasan dan transisi penanganan COVID-19 di daerah dengan mendorong kesiapan dunia usaha, dengan penerapan protokol baru dalam menjalankan usaha serta diperlukan program sosialisasi kepada masyarakat sehingga informasi yang diterima masyarakat seragam dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan lain yang dikeluarkan setiap perangkat daerah.

- 2) Peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah pasca pandemi COVID-19 dengan mengoptimalkan pemanfaatan aset agar lebih produktif dengan tetap mendorong pemulihan sumber-sumber PAD utama seperti pajak dan retribusi, serta mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan lain non pemerintah untuk investasi pembangunan (KPBU, CSR dan Kerjasama Pemanfaatan Aset (KSP).

2. Arah Kebijakan Tahun Kedua (2023)

Dengan mendasarkan pada asumsi tahun 2022 berjalan normal, maka arah kebijakan pada tahun 2023 ditujukan untuk **“Pemantapan daya saing ekonomi dan penguatan infrastruktur, Keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana.** Adapun kebijakan prioritas daerah tahun kedua ini diarahkan untuk :

- a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional,
 - 1) Meningkatkan konektivitas infrastruktur dilakukan dengan peningkatan kehandalan dan keselamatan jalan jembatan yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Kabupaten Pekalongan serta wilayah perbatasan; pengembangan angkutan umum lintas wilayah dan regional serta perkotaan-perdesaan, peningkatan sarana prasarana simpul dan pepaduan moda transportasi (terminal dan stasiun);
 - 2) Meningkatkan sistem jaringan irigasi dan pembangunan bangunan penampungan air (embung) pada daerah pertanian produktivitas tinggi/lumbung pangan dan daerah rawan kekeringan;
 - 3) Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi, dan drainase di wilayah kumuh perkotaan dan miskin perdesaan, pengelolaan sampah serta pemantauan kualitas air, udara dan tanah;
 - 4) Pengembangan jaringan transportasi yang strategis dalam mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di wilayah selatan dan utara, yang diwujudkan dengan pembangunan kawasan industri, pembangunan flyover perlintasan sebidang rel kereta Api di Wiradesa serta pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - 5) Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni dan penataan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) kawasan permukiman;
 - 6) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim dengan penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan terhadap bencana banjir-rob, tanah longsor dan lain sebagainya.
- b. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring sumber daya;
- c. Pelayanan Pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat;
- d. Pelayanan kesehatan unggul, peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan *wellness tourism* dan *sport tourism yaitu* wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan;
- e. Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;
- f. Pengembangan produk unggulan dan potensial yang ada di masyarakat
 - 1) Meningkatkan pengembangan produk unggulan lokal daerah yang didukung dengan peningkatan kualitas produk sehingga dapat memiliki nilai jual yang lebih tinggi, pengembangan produk lokal juga

- dilakukan dengan peningkatan kapasitas usaha kecil dan memperluas jejaring usaha;
- 2) Pendampingan intensif *startup*, usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan mendukung sektor wisata kuliner, belanja, dan jasa (Wiskulja).
- g. Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan
- 1) Peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan dan peternakan melalui peningkatan keterampilan petani dalam pengolahan produk guna peningkatan nilai tambah, pemberian bibit, benih dan pupuk, peningkatan sarana dan prasarana irigasi, pengembangan teknologi tepat guna pertanian, perkebunan dan peternakan serta pengembangan jejaring pemasaran berbasis kelompok;
 - 2) Peningkatan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui peningkatan keterampilan nelayan, pengembangan cakupan dan layanan asuransi nelayan, penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya; pemberian benih dan pakan ikan serta penyediaan lahan perikanan budidaya.
- h. Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
- 1) Meningkatkan *Length of Stay* (LoS) kunjungan ke Kabupaten Pekalongan melalui event budaya dan olahraga;
 - 2) Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal;
 - 3) Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha;
 - 4) Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional;
 - 5) Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, dan
 - 6) perumahan;
 - 7) Pengentasan kemiskinan;
 - 8) Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya;
- i. Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital mendukung Kabupaten Pekalongan sebagai kota santri modern;

3. Arah Kebijakan Tahun Ketiga (2024)

- Arah kebijakan pada tahun 2024 ditujukan untuk “**Peningkatan kapasitas SDM berdaya saing dan reformasi birokrasi**”. Percepatan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh hingga menjangkau unit kerja terkecil agar lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan dan dampak pasca pandemi COVID-19 didukung dengan penguatan kapasitas SDM. Pada tahun 2024 juga masih melaksanakan penguatan infrastruktur. Adapun kebijakan prioritas daerah tahun ketiga ini diarahkan untuk :
- a. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin;
 - b. Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;
 - c. Peningkatan ketersediaan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan;
 - d. Pelayanan kesehatan unggul, peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan

- wellness tourism* dan *sport tourism* yaitu wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan;
- e. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
 - f. Peningkatan pengendalian pendudukan dan optimalisasi penyelenggaraan KB untuk mencapai kesejahteraan keluarga.
 - g. Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong pemenuhan anggaran responsif gender dan anak.
 - h. Melanjutkan *smart governance*: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas.
 - i. Meningkatkan manajemen SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional dan berkinerja tinggi.
 - j. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045.

4. Arah Kebijakan Tahun Keempat (2025)

Arah kebijakan pada tahun 2025 disamping melanjutkan arah kebijakan pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai, ditujukan untuk **“Penguatan Kapasitas SDM, reformasi birokrasi serta menciptakan kerukunan hidup dan gotong royong”**. Pada tahun 2025 kapasitas SDM dan reformasi birokrasi masih menjadi fokus pembangunan, namun pada tahun 2025 melangkah pada penguatan kerukunan hidup dan gotong royong. Adapun prioritas daerah tahun keempat diarahkan untuk :

- a. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin;
- b. Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;
- c. Peningkatan ketersediaan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan;
- d. Pelayanan kesehatan unggul, peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan *wellness tourism* dan *sport tourism* yaitu wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan;
- e. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
- f. Melanjutkan *smart governance*: reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas;
- g. Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045.

5. Arah Kebijakan Tahun kelima (2026)

Arah kebijakan pada tahun 2026 merupakan arah kebijakan pada tahun terakhir kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 adalah **Masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Sejahtera, Adil, Merata (Setara)**. Pada tahun 2026 ini di harapkan semua prioritas sudah dapat diselesaikan. Adapun kebijakan prioritas daerah tahun kelima diarahkan untuk :

- a. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
- b. Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan *wellness tourism* dan *sport tourism* yaitu wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan;
- c. Peningkatan ketersediaan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan;
- d. Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin;
- e. Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan;
- f. Ekspansi pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota, melalui: Penguatan orientasi ekspor pelaku Usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan;
- g. Penyelenggaraan Inovasi Pelayanan publik berbasis data digital, inklusif, dan mendukung Kabupaten pekalongan sebagai kota santri modern

Adapun arah kebijakan prioritas tahunan Kabupaten Pekalongan Tahun 2022-2026 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 6.1
Kebijakan Prioritas Pembangunan Tahunan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2022-2026

No.	Kebijakan Prioritas Daerah	2022	2023	2024	2025	2026
1	Pemulihan Ekonomi Pasca COVID-19 melalui pengembangan usaha mikro kecil berbasis potensi unggulan daerah	√				
2	Peningkatan dan Kemudahan Investasi	√				
3	Pengembangan produk unggulan dan potensial yang ada di masyarakat		√			
4	Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat		√			
5	Ekspansi pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota, melalui: Penguatan orientasi ekspor pelaku Usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan mewujudkan <i>smart economy</i>					√
6	Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	√				
7	Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring sumber daya;		√			
8	Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring pemasaran produk/jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga miskin			√	√	√

No.	Kebijakan Prioritas Daerah	2022	2023	2024	2025	2026
9	Peningkatan dan Pemerataan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan	√				
10	Peningkatan ketersediaan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas dan berbudaya unggul untuk semua sepanjang hayat, peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan		√	√	√	√
11	Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan <i>wellness tourism</i> dan <i>sport tourism</i> yaitu wisata minat khusus yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh wisatawan		√	√	√	√
12	Peningkatan pengendalian pendudukan dan optimalisasi penyelenggaraan KB untuk mencapai kesejahteraan keluarga			√		
13	Peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta mendorong pemenuhan anggaran responsif gender dan anak			√		
14	Pemantapan dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	√				
15	Melanjutkan pembangunan infrastruktur kabupaten dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional		√	√	√	√
16	Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan	√	√			
17	Pengembangan potensi wisata, seni budaya dan olahraga	√				
18	Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan produktivitas kelompok rentan		√	√	√	√
19	Pemantapan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	√				
20	Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital mendukung Kabupaten Pekalongan sebagai kota santri modern		√			√
21	Melanjutkan <i>smart governance</i> : reformasi birokrasi dan pelayanan publik saling terhubung secara cerdas			√	√	
22	Meningkatkan manajemen SDM aparatur yang berintegritas, kompeten, kapabel, profesional dan berkinerja tinggi			√		
23	Harmonisasi rencana pembangunan wilayah untuk skenario perencanaan pembangunan jangka panjang 2025–2045			√	√	

Guna mendukung pencapaian kebijakan prioritas tersebut, maka arah kebijakan pembangunan masing-masing misi adalah sebagai berikut.

Tabel 6.2
Rumusan Arah Kebijakan dan Keterkaitannya dengan Tujuan, Sasaran dan
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Urusan Terkait
Misi 1: Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong	Menciptakan tatanan kehidupan bermasyarakat yang harmonis, aman dan nyaman	1. Meningkatnya penanganan potensi konflik sosial yang terjadi di masyarakat	Menciptakan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan penuh toleransi melalui penguatan FKUB, penguatan rasa nasionalisme, dan peningkatan kewaspadaan dini terhadap potensi konflik, serta mengembangkan sikap dan budaya gotong royong dalam bermasyarakat	Penguatan rasa nasionalisme dan toleransi di seluruh lapisan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kesatuan bangsa dan politik • Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
		2. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundangan daerah	Meningkatkan budaya tertib dan patuh hukum melalui pemasyarakatan produk hukum daerah, pelaksanaan patroli berkala, serta peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam penegakan peraturan hukum daerah	Optimalisasi upaya pencegahan pelanggaran peraturan hukum daerah	
Misi 2 : Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi	meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih	1. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah	Meningkatakan kualitas pembangunan melalui perencanaan program yang berorientasi pada hasil, pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, serta pelaporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan	Penguatan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Sekretariat Daerah • Perencanaan • Kecamatan • Keuangan
		2. Menguatnya kinerja pengawasan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan	Menguatkan kualitas pengawasan melalui peningkatan kompetensi APIP dan pemanfaat partisipasi masyarakat	Penguatan pengawasan internal dalam penyelenggaraan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat
		3. Meningkatnya pengelolaan kelembagaan dan sumberdaya manusia dalam menjalankan	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan profesionalisme ASN dan pembentukan lembaga yang efektif	Pengelolaan manajemen organisasi dan SDM yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Kepegawaian • Pendidikan dan pelatihan • Sekretariat DPRD • Kearsipan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Urusan Terkait
		pemerintahan daerah			
		4. Meningkatnya efektifitas pelayanan publik yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan pengembangan inovasi, pemanfaatan data dan arsip yang terkelola, serta meningkatkan kualitas <i>complain handling sistem</i>	Optimalisasi pelayanan berbasis teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian dan pengembangan • Komunikasi dan Informatika • Statistik • Persandian • Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil • Sekretariat Daerah • Kesehatan • Penanaman Modal
Misi 3: Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.	meningkatkan daya saing ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan	1. Meningkatnya kontribusi dari sektor-sektor potensial pendukung perekonomian daerah	Menguatkan sistem ekonomi melalui peningkatan kompetensi pelaku-pelaku usaha, penguatan jejaring permodalan, produksi, dan juga pemasaran, serta pemberdayaan ekonomi di sektor pertanian, perdagangan, koperasi dan UKM, pariwisata, perikanan, dan sektor-sektor lainnya.	Penguatan ekonomi lokal berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanian • Pangan • Kelautan dan Perikanan • Perdagangan • Perindustrian
		2. Meningkatnya daya tarik investasi	Meningkatkan daya tarik berinvestasi melalui penyebarluasan potensi investasi, dan pemberian kemudahan berinvestasi	Pengembangan potensi investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penanaman modal • Pariwisata
		3. Menurunnya angka pengangguran, PPKS dan meningkatnya daya saing ekonomi masyarakat	1. Memperluas akses pekerjaan bagi penduduk usia produktif melalui peningkatan daya saing tenaga kerja dengan cara meningkatkan skill dan kompetensi para pencari kerja, serta penyebarluasan informasi peluang kerja	Penguatan kompetensi tenaga kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Tenaga Kerja • Transmigrasi

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Urusan Terkait
			2. Meningkatkan penanganan PPKS melalui pemberdayaan dan pelibatan sumberdaya sosial yang ada, pemberdayaan PPKS potensial, serta pemberian bantuan sosial kepada PPKS tidak potensial	Penanganan PPKS sesuai standar pelayanan minimal	<ul style="list-style-type: none"> • Sosial
			3. Memperkuat fasilitasi kepada pelaku usaha koperasi dan usaha mikro meliputi pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemudahan perizinan usaha dan perusahaan promosi dagang dan dukungan kelembagaan;	Penguatan fasilitasi pelaku usaha koperasi dan usaha mikro	<ul style="list-style-type: none"> • Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			4. Memperkuat daya saing kepemudaan melalui fasilitasi kegiatan pemuda yang dapat menumbuhkan, prestasi dan peran serta pemuda dan organisasi pemuda, mendorong partisipasi kader pemuda dalam pendidikan kepramukaan, pengembangan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan, dan kepemimpinan dalam pembangunan.	Optimalisasi peran serta pemuda dalam pembangunan sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemudaan dan Olah Raga
			5. Memperkuat daya saing olahraga melalui peningkatan pembudayaan olahraga di masyarakat, pembinaan, pembibitan dan pengembangan prestasi olahraga secara sistematis berjenjang dan berkelanjutan, meningkatkan pola kemitraan olahraga dan mengembangkan sistem penghargaan, peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana olahraga yang bagi seluruh masyarakat termasuk disabilitas	Optimalisasi penyelenggaraan kelembagaan dan organisasi keolahragaan untuk meningkatkan pencapaian prestasi keolahragaan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepemudaan dan Olah Raga

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Urusan Terkait
		4. Menguatnya peran desa dalam mengembangkan potensi masyarakat	Menguatkan keberdayaan desa dalam mengembangkan potensi perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan lembaga ekonomi desa dan juga penguatan lembaga pemerintahan desa	Optimalisasi dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan masyarakat dan desa
Misi 4 : Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya local	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya saing dan berbudi luhur	1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan layanan pendidikan bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan, pengembangan teknologi informasi untuk mendukung peningkatan mutu pembelajaran, peningkatan kompetensi mendukung peningkatan kualitas pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mn, dan peningkatan tata kelola pembangunan pendidikan	Peningkatan layanan pendidikan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> Pendidikan Perpustakaan
		2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, peningkatan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat untuk pencegahan dan penanggulangan permasalahan gizi ganda, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat, pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dan penguatan sistem kesehatan, meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik, pengendalian penduduk serta akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR.	Peningkatan sarana prasarana rumah sakit dan puskesmas, Penguatan pelayanan kesehatan dasar (<i>primary health care</i>) dan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi serta peningkatan pengendalian pendudukan dan optimalisasi penyelenggaraan KB KB untuk mencapai kesejahteraan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Urusan Terkait
		3. Meningkatnya implementasi pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah	Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam bidang pembangunan daerah melalui pelembagaan pengarusutamaan gender, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta anggaran yang responsif gender, peningkatan kualitas keluarga kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan hak anak di semua klaster untuk mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya, mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus) perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO, peningkatan kualitas perlindungan khusus anak serta peningkatan sinergitas dan kerjasama antara dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan Pengarusutamaan gender dalam pembangunan, perlindungan perempuan dan anak serta peningkatan kualitas keluarga	<ul style="list-style-type: none"> Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2. Meningkatkan integrasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat	Meningkatnya objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Meningkatkan pengelolaan kekayaan budaya dan pelestarian warisan budaya melalui peningkatan kepedulian masyarakat untuk melakukan perlindungan terhadap warisan budaya, melakukan inventarisasi, termasuk pembaruan dokumentasi terhadap koleksi cagar budaya, peningkatan mutu tata kelola dan perlindungan cagar budaya serta pengelolaan potensi budaya daerah.	Optimalisasi pengelolaan perlindungan dan pelestarian kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> Kebudayaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Urusan Terkait
<p>Misi 5 : Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan.</p>	<p>Meningkatkan kualitas dan pemerataan infrastruktur, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan responsif terhadap bencana.</p>	<p>1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur, pemanfaatan ruang, dan keterhubungan antar wilayah.</p>	<p>Meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah dan keterhubungan antar wilayah melalui optimalisasi pendayagunaan SDA untuk memenuhi kebutuhan air dan pengendalian daya rusak air serta peningkatan kapasitas kelembagaan dan regulasi dalam pengelolaan SDA, peningkatan jalan dan jembatan untuk mencapai kondisi mantap sebagai sarana aksesibilitas masyarakat serta pengelolaan sistem drainase, pemenuhan akses layanan air minum yang layak bagi masyarakat, pemenuhan terhadap akses air limbah domestik, peningkatan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan serta bangunan gedung, penyusunan rencana rinci tata ruang, sinkronisasi dan koordinasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, peningkatan kualitas Rumah Layak Huni (RTLH) milik Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan fasilitasi prasarana sarana dan utilitas, serta peningkatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keterhubungan antar wilayah</p>	<p>Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah, konektivitas antar wilayah, dan ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Perhubungan
		<p>2. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup melalui pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup, peningkatan pengelolaan sampah dan indeks kualitas lingkungan hidup</p>	<p>Optimalisasi pengelolaan sampah dan indeks kualitas lingkungan hidup</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkungan hidup

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Urusan Terkait
		<p>3. Meningkatnya ketahanan daerah dalam menghadapi ancaman bencana yang ada.</p>	<p>Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui kesiapsiagaan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan di kawasan rawan bencana, Pengembangan desa tangguh bencana di kawasan risiko bencana, Penyediaan infrastruktur mitigasi dan kesiapsiagaan (shelter, jalur evakuasi dan rambu evakuasi) menghadapi bencana, yang difokuskan ada kawasan rawan bencana dan risiko tinggi bencana, mendorong dan menumbuh kembangkan budaya sadar bencana serta meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kebencanaan, penyediaan dan penyebarluasan informasi kebencanaan kepada masyarakat.</p>	<p>Meningkatkan pengurangan resiko bencana dan penurunan kerentanan terhadap bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

C. Arah Kebijakan Kewilayahan

1. Arah Kebijakan Pembangunan Wilayah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019

Selain kebijakan tersebut di atas, arah pembangunan Kabupaten Pekalongan juga akan diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Pekalongan adalah salah satu kawasan di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi lokasi prioritas pembangunan melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak - Pekalongan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Semarang - Pemalang. Dalam Peraturan Presiden tersebut dijabarkan bahwa Kawasan Petanglong yang terdiri atas Pekalongan - Batang - Kota Pekalongan, merupakan Kawasan pendukung yang akan membantu meningkatkan nilai tambah pembangunan Kawasan Kedungsepur, Purwomanggung, dan Bregasmalang.

Selain itu Kabupaten Pekalongan sebagai bagian dari Kawasan Petanglong juga memiliki peranan yang cukup penting dalam pembangunan Jawa Tengah. Hal tersebut karena pengembangan kebijakan yang mencakup kawasan petanglong, yaitu Poros pengembangan utara-utara yang membentang dari Bregasmalang - Petanglong - Kedungsepur - Wanarakuti - Banglor dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi kawasan di Jawa Tengah; dan juga sebagai poros pengembangan utara-utara yang membentang dari Bregasmalang - Petanglong - Kedungsepur - Wanarakuti - Banglor dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi kawasan di Jawa Tengah.

Proyek-proyek strategis yang termuat dalam Peraturan Presiden nomor 79 tahun 2019 yang harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Kabupaten Pekalongan meliputi:

- a. Pembangunan RSUD Kesesi, Kab. Pekalongan
- b. Pembangunan waduk sumber air baku SPAM Regional Petanglong, Kab. Pekalongan
- c. Pengendalian banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/ Kupang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan
- d. Pengendalian banjir Sistem Sungai Sragi Lama dan Sragi Baru, Kab. Pekalongan
- e. Pengendalian banjir Sistem Sungai Sengkarang, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan
- f. Penyempurnaan sistem banjir dan rob, Kab. Pekalongan dan Kota Pekalongan
- g. Pelebaran dan peningkatan Jalan Doro-Petungkriyono, Kab. Pekalongan
- h. Pembangunan perlintasan tak sebidang kereta api Waru Ruas Wiradesa - Kalibening, Kab. Pekalongan
- i. Pelebaran jalan provinsi ruas Wiradesa-Kalibening, Kab. Pekalongan
- j. Pengembangan SPAM Regional Petanglong, Kab. Pekalongan
- k. Pembangunan TPST Regional, Kab. Pekalongan
- l. Revitalisasi Pasar Wiradesa, Kab. Pekalongan

Selain itu, terdapat juga proyek-proyek strategis lintas wilayah yang rencananya akan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pekalongan dan kabupaten lainnya, meliputi:

- a. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Jawa Tengah;
- b. Pengembangan amenities pariwisata berbasis homestay/desa wisata, Kab. Magelang, Kota Surakarta, Kab. Sragen, Kab. Karanganyar, Kab. Banjarnegara, Kab. Wonosobo, Kab. Purbalingga, Kab. Temanggung, Kab. Blora, Kab. Klaten, Kab. Tegal, Kab. Grobogan, ,Kab. Brebes, Kab. Cilacap, Kab. Pekalongan, Kab. Purworejo, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Jepara dan Kab. Semarang
- c. Penanggulangan dan pencegahan stunting dan gizi buruk, Kab. Blora, Kab. Banyumas, Kab. Boyolali, Kab. Purbalingga, Kab. Sragen, Kab. Jepara, Kab. Temanggung, Kab. Pati, Kab. Wonogiri, Kota Tegal, Kab. Brebes, Kab. Kendal, Kab. Rembang, Kab. Wonosobo, Kab. Pemalang, Kab. Pekalongan, Kab. Banjarnegara, Kab. Tegal dan Kab. Magelang
- d. Pengembangan SDM bidang IPTEK di Jawa Tengah
- e. Pembangunan dan Pengembangan prasarana SMK unggulan (sektor industri, pariwisata, industri kreatif, ketahanan pangan, kemaritiman).

2. Arah Kebijakan Kewilayahan berdasarkan RTRW Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040

Arah kebijakan kewilayahan merupakan penetapan kawasan strategis wilayah yang meliputi :

1) Kawasan Strategis Provinsi di Daerah

- (1) Kawasan strategis provinsi di Daerah yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang berada di Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
- (2) Pengembangan kawasan strategis provinsi di Daerah mengikuti kebijakan Pemerintah Provinsi disesuaikan perkembangan di Daerah.

2) Kawasan Strategis Daerah

1) Kawasan strategis bidang pertumbuhan ekonomi, meliputi :

- a) Kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) melalui Kecamatan Tirto - Kecamatan Wiradesa – Kecamatan Siwalan.

Kawasan strategis sepanjang koridor jalan arteri primer pantai utara (pantura) berperan mengoptimalkan peran koridor jalur pantura yang melalui Daerah sebagai koridor pertumbuhan ekonomi.

- b) Kawasan agropolitan KRIDO TALUN ANYAR dengan komoditas unggulan tanaman hortikultura yang meliputi:

- (1) Kecamatan Doro;
- (2) Kecamatan Karanganyar;
- (3) Kecamatan Petungkriyono; dan
- (4) Kecamatan Talun.

Kawasan strategis agropolitan KRIDO TALUN ANYAR berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil komoditas hortikultura.

- c) Kawasan strategis minapolitan SIWO TIRTO meliputi:

- (1) Kecamatan Siwalan;
- (2) Kecamatan Tirto; dan
- (3) Kecamatan Wonokerto.

Kawasan strategis minapolitan SIWO TIRTO berperan meningkatkan produksi dan nilai tambah hasil perikanan.

- d) Kawasan strategis peruntukan industri Siwalan – Sragi dan Bojong – Wonopringgo.

Kawasan strategis peruntukan industri Siwalan – Sragi dan Bojong – Wonopringgo berperan mendorong perkembangan investasi industri di daerah.

2) Kawasan strategis bidang sosial budaya

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi :

- a) **Kawasan pariwisata;** dan
Kawasan pariwisata berupa kawasan wisata Linggoasri di Kecamatan Kajen dan kawasan wisata Petungkriyono.
- b) **Kawasan perbatasan.**
Kawasan perbatasan meliputi :
 - (1) Kawasan perbatasan Tirto - Kota Pekalongan;
 - (2) Kawasan perbatasan Buaran – Kota Pekalongan;
 - (3) Kawasan perbatasan Siwalan – Ulujami (Kabupaten Pemalang);
 - (4) Kawasan perbatasan Kesesi – Bodeh (Kabupaten Pemalang);
 - (5) Kawasan Perbatasan Talun – Wonotunggal (Kabupaten Batang); dan
 - (6) Kawasan Perbatasan Paninggaran – Kalibening (Kabupaten Banjarnegara).

3) Kawasan strategis bidang fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

- a) Kawasan yang memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air, berupa kawasan imbuhan air tanah, meliputi:
 - (1) Kecamatan Doro;
 - (2) Kecamatan Kajen;
 - (3) Kecamatan Kandangserang;
 - (4) Kecamatan Karanganyar;
 - (5) Kecamatan Kesesi;
 - (6) Kecamatan Lebakbarang;
 - (7) Kecamatan Paninggaran;
 - (8) Kecamatan Petungkriyono; dan
 - (9) Kecamatan Talun.
- b) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, berupa kawasan pelestarian mangrove dan tanah timbul di estuari Sungai, meliputi :
 - (1) Kecamatan Siwalan;
 - (2) Kecamatan Tirto; dan
 - (3) Kecamatan Wonokerto.

D. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan disusun dengan mendasarkan pada program unggulan Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2016-2021 dan penjabaran dari tujuan dan sasaran pada masing-masing Misi. Berikut program pembangunan daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026:

1. Membangun masyarakat Kabupaten Pekalongan yang Nasionalis Religius.

- (1) Menciptakan kedaulatan dengan mewujudkan konsep identitas bersama dalam kepentingan nasional dan daerah;

- (2) Mengintegrasikan gagasan nasionalisme Indonesia dengan ide-ide religiusitas dan nilai-nilai keagamaan;
- (3) Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Agama dalam memperkokoh NKRI.

2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif.

- (1) Meningkatkan profesionalisme pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarakat Kabupaten Pekalongan;
- (2) Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja;
- (3) Mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah daerah berdasarkan regulasi yang ada;
- (4) Memberi penghargaan terhadap aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi serta penerapan sangsi tegas yang berkeadilan;
- (5) Mendorong dan mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan transparansi pengelolaan pemerintah, terbuka dan terukur;
- (6) Terciptanya pusat informasi pelayanan publik dan sumber data yang memberikan informasi terbaru dan terbuka serta terukur untuk penerapan *e-government*.

3. Menyediakan infrastruktur publik yang merata.

- (1) Peningkatan jaringan jalan untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi aktifitas masyarakat dan dunia usaha;
- (2) Meningkatkan koneksitas jaringan transportasi sebagai bentuk pelayanan transport bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan;
- (3) Mewujudkan sarana dan prasarana dasar wilayah disesuaikan dengan prinsip keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup;
- (4) Meningkatkan inovasi terhadap ketersediaan dan pemenuhan air minum / baku bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;
- (5) Meningkatkan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan;
- (6) Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan;
- (7) Meningkatkan sistem penanggulangan bencana.

4. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau.

- (1) Menjamin pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;
- (2) Mengembangkan dan menerapkan inovasi program kesehatan khususnya bagi warga miskin (berpenghasilan rendah);
- (3) Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis yang profesional;
- (4) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

5. Menyediakan pendidikan dan meningkatkan mutu layanan serta mutu pendidikan yang memiliki daya saing.

- (1) Menyediakan jaminan dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;
- (2) Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan berpotensi;

- (3) Pengembangan pendidikan non formal dilakukan sampai ke tingkat pemerintahan terkecil dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum, untuk menekan angka buta huruf;
- (4) Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru (pendidik);
- (5) Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas tinggi;
- (6) Mendorong pengaplikasian dan penyesuaian metode IT dalam pembelajaran.

6. Menumbuhkembangkan UMKM sebagai basis perekonomian rakyat.

- (1) Meningkatkan dan mengembangkan industri kecil dan menengah (UMKM) sebagai basis perekonomian rakyat;
- (2) Meningkatkan kualitas dan jumlah produksi industri tekstil dan batik khususnya industri UMKM sehingga dapat diterima pasar internasional;
- (3) Membuka dan mengembangkan akses pemasaran hasil industri UMKM yang lebih luas;
- (4) Meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan industri UMKM;
- (5) Meningkatkan dan mengembangkan produksi industri selaras dengan keseimbangan lingkungan hidup;
- (6) Eksplorasi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan peningkatan kualitas produksi industri dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup;
- (7) Mengembangkan inovasi teknologi terhadap proses produksi;
- (8) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelaku industri dan perekonomian rakyat untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan;
- (9) Mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia usaha mikro sebagai basis peningkatan perekonomian rakyat;
- (10) Menyediakan aksesibilitas dan sistem terhadap lembaga keuangan untuk pengembangan usaha mikro;
- (11) Meningkatkan dan mengembangkan akses pasar bagi UMKM, pertanian dan perikanan;
- (12) Meningkatkan dan mengembangkan produk lokal;
- (13) Mengembangkan festival Desa.

7. Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil untuk mengatasi pengangguran

- (1) Terciptanya sistem untuk mendukung kemudahan dan percepatan investasi untuk mendukung perkembangan serta kemajuan usaha perekonomian kerakyatan;
- (2) Menciptakan kemudahan dan percepatan proses perijinan investasi;
- (3) Menciptakan iklim investasi pro rakyat yang kondusif;
- (4) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung investasi dan pemasaran;
- (5) Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja.

8. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.

- (1) Mengembangkan tujuan wisata dan destinasi wisata;
- (2) Meningkatkan akses infrastruktur dan pemasaran bidang pariwisata di tingkat lokal, regional dan nasional;

- (3) Meningkatkan sistem manajemen dan pengelolaan wisata dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan kelompok masyarakat penggiat pariwisata;
- (4) Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan kebudayaan lokal.

9. Menyediakan kebutuhan`petani dan nelayan yang memadai serta membuka akses pasar yang luas.

- (1) Mengembangkan dan pemanfaatan teknologi modern dan tepat guna dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan;
- (2) Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan;
- (3) Meningkatkan dan memperbaiki sistem pemasaran hasil pertanian dan perikanan melalui pengembangan koperasi dan kelompok petani dan nelayan;
- (4) Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pertanian dan perikanan;
- (5) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian petani dan nelayan;
- (6) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian buruh tani dan buruh nelayan;
- (7) Mewujudkan kawasan agropolitan untuk mendukung keberhasilan agroindustri;
- (8) Mewujudkan kawasan minapolitan untuk mendukung kemajuan industri perikanan.

Tabel 6.3
Program Prioritas Pembangunan untuk mendukung
Visi Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026

Misi	Program Kampanye	Program Nomenklatur	Urusan
1. Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong	1) Menciptakan kedaulatan dengan mewujudkan konsep identitas bersama dalam kepentingan nasional dan daerah	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Kesatuan bangsa dan politik
	2) Mengintegrasikan gagasan nasionalisme Indonesia dengan ide-ide religiusitas dan nilai-nilai keagamaan.		
	3) Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Agama dalam memperkokoh NKRI		
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi	1) Meningkatkan profesionalisme pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarakat Kabupaten Pekalongan.	Program Kepegawaian Daerah	Kepegawaian
	2) Mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah daerah berdasarkan regulasi yang ada.		
	3) Memberi penghargaan terhadap aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi serta penerapan sanksi tegas yang berkeadilan.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan dan pelatihan
	4) Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pendidikan dan pelatihan

Misi	Program Kampanye	Program Nomenklatur	Urusan	
	Kabupaten Pekalongan sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja.			
	5) Mendorong dan mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan transparansi pengelolaan pemerintah, terbuka dan terukur.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Komunikasi dan Informatika	
	6) Terciptanya pusat informasi pelayanan publik dan sumber data yang memberikan informasi terbaru dan terbuka serta terukur untuk penerapan e-government.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Komunikasi dan Informatika	
3. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal.	1) Meningkatkan dan mengembangkan industri kecil dan menengah (UMKM) sebagai basis perekonomian rakyat.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
	2) Meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan industri UMKM.			
	3) Mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia usaha mikro sebagai basis peningkatan perekonomian rakyat.			
	4) Menyediakan aksesibilitas dan sistem terhadap lembaga keuangan untuk pengembangan usaha mikro.			
	5) Meningkatkan dan mengembangkan produk lokal.			
	6) Meningkatkan kualitas dan jumlah produksi industri tekstil dan batik khususnya industri UMKM sehingga dapat diterima pasar internasional.	Program Pengembangan UMKM		
	7) Membuka dan mengembangkan akses pemasaran hasil industri UMKM yang lebih luas.			
	8) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelaku industri dan perekonomian rakyat untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan.			
	9) Meningkatkan dan mengembangkan akses pasar bagi UMKM, pertanian dan perikanan.			
	10) Mengembangkan inovasi teknologi terhadap proses produksi.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		Perindustrian
	11) Mengembangkan festival Desa.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	12) Terciptanya sistem untuk mendukung kemudahan dan percepatan investasi untuk mendukung perkembangan serta kemajuan usaha	Program Pelayanan Penanaman Modal		Penanaman Modal

Misi	Program Kampanye	Program Nomenklatur	Urusan
	perekonomian kerakyatan.		
	13) Menciptakan kemudahan dan percepatan proses perijinan investasi.		
	14) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung investasi dan pemasaran.		
	15) Menciptakan iklim investasi pro rakyat yang kondusif.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	
	16) Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
	17) Mengembangkan tujuan wisata dan destinasi wisata.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pariwisata
	18) Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan kebudayaan lokal.		
	19) Meningkatkan akses infrastruktur dan pemasaran bidang pariwisata di tingkat lokal, regional dan nasional.	Program Pemasaran Pariwisata	
	20) Meningkatkan sistem manajemen dan pengelolaan wisata dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan kelompok masyarakat penggiat pariwisata.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	
	21) Mengembangkan dan pemanfaatan teknologi modern dan tepat guna dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan.	Semua Program Pertanian, dan Program Kelautan dan Perikanan	Pertanian; Kelautan dan perikanan
	22) Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan.		
	23) Meningkatkan dan memperbaiki sistem pemasaran hasil pertanian dan perikanan melalui pengembangan koperasi dan kelompok petani dan nelayan.		
	24) Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pertanian dan perikanan.		
	25) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian petani dan nelayan.		
	26) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian buruh tani dan buruh nelayan.		
	27) Mewujudkan kawasan agropolitan untuk mendukung keberhasilan agroindustri.		
	28) Mewujudkan kawasan minapolitan untuk mendukung kemajuan industri perikanan.		
4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur	1) Menjamin pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Kesehatan

Misi	Program Kampanye	Program Nomenklatur	Urusan		
berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal	2) Mengembangkan dan menerapkan inovasi program kesehatan khususnya bagi warga miskin (berpenghasilan rendah).				
	3) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.				
	4) Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis yang profesional.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan			
	5) Menyediakan jaminan dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.	Program Pengelolaan Pendidikan	Pendidikan		
	6) Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan berpotensi.				
	7) Pengembangan pendidikan non formal dilakukan sampai ke tingkat pemerintahan terkecil dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum, untuk menekan angka buta huruf.				
	8) Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru (pendidik).				
	9) Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas tinggi.				
	10) Mendorong pengaplikasian dan penyesuaian metode IT dalam pembelajaran.				
	5. Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan			1) Peningkatan jaringan jalan untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi aktifitas masyarakat dan dunia usaha.	Program Penyelenggaraan Jalan
2) Meningkatkan inovasi terhadap ketersediaan dan pemenuhan air minum / baku bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan.				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
3) Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan		Program Pengelolaan Air Limbah Domestik Dan Program Pengembangan Sistem Drainase			
4) Meningkatkan koneksitas jaringan transportasi sebagai bentuk pelayanan transport bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan.		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Perhubungan		
5) Mewujudkan sarana dan prasarana dasar wilayah disesuaikan dengan prinsip keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup.		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup		
6) Meningkatkan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan.		Program Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup		
7) Meningkatkan dan mengembangkan produksi industri selaras dengan		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau			

Misi	Program Kampanye	Program Nomenklatur	Urusan
	keseimbangan lingkungan hidup.	Kerusakan Lingkungan Hidup	
	8) Eksplorasi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan peningkatan kualitas produksi industri dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup.		
	9) Meningkatkan sistem penanggulangan bencana.	Program Penanggulangan Bencana	Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

E. Keterkaitan Misi dengan Program Unggulan

1. Memperkokoh kerukunan hidup beragama yang dilandasi dengan nilai-nilai nasionalisme dan gotong-royong

- (1) Menciptakan kedaulatan dengan mewujudkan konsep identitas bersama dalam kepentingan nasional dan daerah;
- (2) Mengintegrasikan gagasan nasionalisme Indonesia dengan ide-ide religiusitas dan nilai-nilai keagamaan; dan
- (3) Meningkatkan aktualisasi nilai-nilai Agama dalam memperkokoh NKRI.

2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan inovatif berbasis kemajuan teknologi informasi

- (1) Meningkatkan profesionalisme pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarakat Kabupaten Pekalongan;
- (2) Mengembangkan potensi dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan sehingga dihasilkan peningkatan efektifitas dan efisiensi kerja;
- (3) Mendukung dan mendorong pengembangan inovasi aparatur pemerintah daerah berdasarkan regulasi yang ada;
- (4) Memberi penghargaan terhadap aparatur pemerintah daerah yang berkualitas dan memiliki inovasi yang tinggi serta penerapan sangsi tegas yang berkeadilan;
- (5) Mendorong dan mendukung penggunaan aplikasi sistem informasi yang modern untuk menciptakan transparansi pengelolaan pemerintah, terbuka dan terukur; dan
- (6) Terciptanya pusat informasi pelayanan publik dan sumber data yang memberikan informasi terbaru dan terbuka serta terukur untuk penerapan *e-governance*.

3. Menumbuhkembangkan ekonomi kerakyatan, investasi, peluang pasar dalam rangka mengurangi pengangguran dan kemiskinan berlandaskan potensi lokal

- (1) Meningkatkan dan mengembangkan industri kecil dan menengah (UMKM) sebagai basis perekonomian rakyat;
- (2) Meningkatkan peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan industri UMKM;
- (3) Mendorong tumbuh dan berkembangnya dunia usaha mikro sebagai basis peningkatan perekonomian rakyat;
- (4) Menyediakan aksesibilitas dan sistem terhadap lembaga keuangan untuk pengembangan usaha mikro;
- (5) Meningkatkan dan mengembangkan produk lokal;

- (6) Meningkatkan kualitas dan jumlah produksi industri tekstil dan batik khususnya industri UMKM sehingga dapat diterima pasar internasional;
- (7) Membuka dan mengembangkan akses pemasaran hasil industri UMKM yang lebih luas;
- (8) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelaku industri dan perekonomian rakyat untuk mengembangkan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan;
- (9) Meningkatkan dan mengembangkan akses pasar bagi UMKM, pertanian dan perikanan;
- (10) Mengembangkan inovasi teknologi terhadap proses produksi;
- (11) Mengembangkan festival desa;
- (12) Terciptanya sistem untuk mendukung kemudahan dan percepatan investasi untuk mendukung perkembangan serta kemajuan usaha perekonomian kerakyatan;
- (13) Menciptakan kemudahan dan percepatan proses perijinan investasi;
- (14) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pendukung investasi dan pemasaran;
- (15) Menciptakan iklim investasi pro rakyat yang kondusif;
- (16) Meningkatkan ketersediaan lapangan kerja;
- (17) Mengembangkan tujuan wisata dan destinasi wisata;
- (18) Meningkatkan investasi di bidang pariwisata dan kebudayaan lokal;
- (19) Meningkatkan akses infrastruktur dan pemasaran bidang pariwisata di tingkat lokal, regional dan nasional;
- (20) Meningkatkan sistem manajemen dan pengelolaan wisata dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan kelompok masyarakat penggiat pariwisata;
- (21) Mengembangkan dan pemanfaatan teknologi modern dan tepat guna dalam upaya peningkatan produksi pertanian dan perikanan;
- (22) Meningkatkan kualitas hasil pertanian dan perikanan;
- (23) Meningkatkan dan memperbaiki sistem pemasaran hasil pertanian dan perikanan melalui pengembangan koperasi dan kelompok petani dan nelayan;
- (24) Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan pertanian dan perikanan;
- (25) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian petani dan nelayan;
- (26) Meningkatkan sistem produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian buruh tani dan buruh nelayan;
- (27) Mewujudkan kawasan agropolitan untuk mendukung keberhasilan agroindustri;
- (28) Mewujudkan kawasan minapolitan untuk mendukung kemajuan industri perikanan.

4. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing, berbudi luhur berlandaskan nilai-nilai keadilan dan mengedepankan kearifan budaya lokal.

- (1) **Menjamin pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;**
- (2) Mengembangkan dan menerapkan inovasi program kesehatan khususnya bagi warga miskin (berpenghasilan rendah);

- (3) Meningkatkan kualitas dan jumlah tenaga medis yang profesional;
- (4) **Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat;**
- (5) Menyediakan jaminan dan pelayanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;
- (6) **Memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi dan berpotensi;**
- (7) Pengembangan pendidikan non formal dilakukan sampai ke tingkat pemerintahan terkecil dengan membuka ruang belajar bagi masyarakat umum, untuk menekan angka buta huruf;
- (8) Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru (pendidik);
- (9) Meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas tinggi; dan
- (10) Mendorong pengaplikasian dan penyesuaian metode IT dalam pembelajaran.

5. Meningkatkan kualitas infrastruktur publik yang merata, pengurangan resiko bencana berlandaskan daya dukung dan kelestarian lingkungan

- (1) **Peningkatan jaringan jalan untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi aktifitas masyarakat dan dunia usaha;**
- (2) Meningkatkan koneksitas jaringan transportasi sebagai bentuk pelayanan transport bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan;
- (3) Mewujudkan sarana dan prasarana dasar wilayah disesuaikan dengan prinsip keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup;
- (4) Meningkatkan inovasi terhadap ketersediaan dan pemenuhan air minum/baku bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan;
- (5) Meningkatkan sistem pengelolaan dan pengolahan persampahan;
- (6) Meningkatkan sistem sanitasi dan drainase di seluruh wilayah Kabupaten Pekalongan; dan
- (7) Meningkatkan dan mengembangkan produksi industri selaras dengan keseimbangan lingkungan hidup;
- (8) Eksplorasi sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat dan peningkatan kualitas produksi industri dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan hidup;
- (9) **Meningkatkan sistem penanggulangan bencana.**

F. Program Unggulan Strategis

1. Pendidikan

Peningkatan layanan akses pendidikan dengan memberikan beasiswa bagi anak usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah melalui:

a. Penanganan Anak Tidak Sekolah



Penanganan anak tidak sekolah Gerakan KUDU Sekolah (Kembali Upayakan DUKungan untuk Sekolah) adalah gerakan berbagai elemen masyarakat dan stakeholder yang saling bersinergi untuk menurunkan Anak Tidak Sekolah (ATS) secara efektif dengan cara mengupayakan dan mendukung pengembalian anak usia sekolah yang tidak bersekolah, melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

Tujuan dari gerakan KUDU Sekolah antara lain :

- 1) Meningkatkan akses layanan pendidikan dasar dan menengah berkualitas;
- 2) Menurunkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS);
- 3) Meningkatkan kualitas SDM dan peluang bekerja bagi Anak Tidak Sekolah (ATS) yang sudah tamat; dan
- 4) Menurunkan angka kemiskinan melalui sektor pendidikan.

Sasaran gerakan KUDU Sekolah adalah anak usia sekolah (7-18 tahun) yang tidak sekolah dengan kategori anak yang belum atau tidak pernah sekolah, anak putus sekolah dan anak yang tidak melanjutkan sekolah.

b. Pendidikan Gratis

Kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2021-2026 meliputi peningkatan akses anak usia sekolah terhadap pendidikan, demi meningkatkan kualitas SDM dan IPM. Pendidikan gratis dilaksanakan melalui pemberian beasiswa anak usia sekolah jenjang pendidikan dasar dan menengah. Tujuan pendidikan gratis adalah untuk mengurangi beban masyarakat, peserta didik. Fungsi pendidikan gratis adalah untuk memberi kesempatan yang seluas-luasnya kepada usia belajar guna mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu. Kebijakan pendidikan gratis merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Kebijakan sekolah gratis dan bermutu jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Membantu meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung oleh masyarakat atau orang tua;
- 2) Mengurangi kesenjangan mutu dan pelayanan pendidikan antar sekolah;
- 3) Meningkatkan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM); dan
- 4) Mengurangi Angka Putus Sekolah (APS).

2. Kesehatan

Kebijakan pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2021-2026 meliputi upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 silam menyebabkan perubahan di berbagai aspek kehidupan, terutama sangat berpengaruh signifikan di aspek kesehatan masyarakat. Sehingga, pelaksanaan program-program bidang kesehatan kini terfokus pada penanganan Covid-19. Covid 19 menuntut untuk melakukan perubahan, baik dalam hal cara berpikir, cara berperilaku, dan cara bekerja. Tantangan selanjutnya adalah cara berpikir dan cara

berperilaku yang dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan tangguh terhadap ancaman penyakit.

Situasi pandemi Covid-19 membutuhkan kemitraan berbagai pihak dan kesiapan sumber daya manusia pendukungnya. Peran tenaga kesehatan masyarakat sangat penting dalam penanganan Covid-19 pada setiap level intervensi. Tenaga kesehatan masyarakat sangat perlu dilibatkan secara optimal dalam banyak aspek promotif dan preventif kesehatan masyarakat. Para tenaga kesehatan masyarakat bisa berinovasi dan menciptakan strategi percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia, dengan fokus utama edukasi dan berdayakan masyarakat dan fokus kedua perkuat pelayanan kesehatan.

Strategi yang akan dilaksanakan seperti menempatkan tenaga kesehatan masyarakat di tempat-tempat umum yang berisiko tinggi penularan virus. Itu dilakukan sebagai upaya mempromosikan adaptasi kebiasaan baru dan protokol kesehatan oleh di tenaga kesehatan masyarakat. Optimalisasi yang perlu dilakukan adalah perlengkapan instrumen sumber daya manusia untuk Unit Kesehatan Masyarakat (UKM) seperti di Puskesmas, penguatan instrumen kebijakan pembiayaan untuk UKM, serta pengembangan kelembagaan rujukan sekunder dan tersier untuk UKM. Selanjutnya, penguatan peran kantor kecamatan dan kantor kelurahan desa untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan, dan integrasi tenaga kesehatan masyarakat di tingkat puskesmas perlu juga dilakukan. Selain itu, kepastian hukum juga diperlukan untuk mengoptimalkan peran tenaga kesehatan masyarakat.

3. Infrastruktur

a. Peningkatan jaringan jalan untuk memberikan akses seluas-luasnya bagi aktifitas masyarakat dan dunia usaha

Pembangunan jalan dengan program pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan serta membuka keterisolasian daerah terpencil, mengurangi biaya kemahalan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

b. Meningkatkan sistem penanggulangan bencana

Salah satu kawasan di pantai utara Pulau Jawa yang sering terdampak banjir dan banjir pasang adalah Kota dan Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Wilayah pesisir Kota dan Kabupaten Pekalongan merupakan daerah dataran aluvial dengan topografi sangat datar yang landai dengan kelerengan antara 0 - 8% (Bappeda Kota Pekalongan, 2016). Elevasi muka tanah di wilayah ini sangat rendah yaitu antara 0 - 1 meter di atas permukaan laut. Menurut data Bappeda Kabupaten Pekalongan (2015), diketahui sebagian dari wilayah Kabupaten Pekalongan memiliki topografi bergelombang, berbukit hingga bergunung (elevasi 1 - 2.177 m DPL) yang merupakan daerah hulu dari pesisir Kota dan Kabupaten Pekalongan. Kelerengan di Kabupaten Pekalongan bervariasi mulai dari 0 - < 8 % yang meliputi wilayah bagian utara yang merupakan daerah pesisir sampai dengan bagian tengah Kabupaten Pekalongan. Bagian tengah Kabupaten Pekalongan memiliki Kelerengan 8 - <15%, dan wilayah bagian atas dengan kelerengan mencapai 15 - <40% yang meliputi bagian selatan Kecamatan Talun, Doro, sebagian Kecamatan Kandangserang. Sebagian wilayah atas Kabupaten Pekalongan ada

yang memiliki kelerengan >40%, yaitu wilayah Kecamatan Lebakbarang, Petungkriyono, Paninggaran, Kajen dan Kandangserang.

Banjir rob di pesisir Kabupaten Pekalongan diakibatkan oleh **penurunan muka tanah dan kenaikan muka air laut**. Penurunan muka tanah disebabkan oleh kompaksi alamiah sedimen muda pada dataran alluvial yang membentuk wilayah pesisir tersebut, yang dipercepat penurunannya oleh faktor antropogenik yang berupa pengambilan air tanah yang tidak terkendali dan tekanan bangunan dan infrastruktur. Kenaikan muka laut disebabkan oleh dampak perubahan iklim sebagai dampak dari berbagai aktivitas manusia yang meningkatkan gas rumah kaca. Banyaknya lokasi titik-titik sumur air tanah dalam yang tersebar pada wilayah bahaya banjir rob memperparah kondisi banjir rob tersebut (*Andreas, 2018*). Penurunan tanah ini juga merupakan akumulasi dari eksploitasi air tanah berlebihan udari berbagai aktivitas manusia seperti pertanian, industri, dan kebutuhan masyarakat (*Kota Pekalongan dalam Angka 2018*).

Bencana banjir di wilayah Kota dan Kabupaten Pekalongan merupakan fenomena yang terjadi setiap tahun. Banjir yang terjadi di wilayah ini dipengaruhi oleh penurunan muka tanah yang membentuk cekungan-cekungan baru pada wilayah dengan topografi datar, pengelolaan drainase yang belum baik, konversi lahan hutan di wilayah hulu dan faktor curah hujan yang tinggi pada saat musim penghujan.

Selanjutnya kerangka pendanaan pembangunan dan program prioritas kepala daerah untuk mendukung Visi Misi RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2021-2026 dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 6.4
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Prioritas Kepala Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.01.	PENDIDIKAN						141.219.474.500		145.591.900.000		146.043.800.000		154.322.000.000		160.173.600.000		747.350.774.500	
	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Pkt A	%	103,81	103,83	103,85	141.219.474.500		145.591.900.000		146.043.800.000		154.322.000.000		160.173.600.000		747.350.774.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	100	100,00	100			100		100		100		100		100	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100	100	100			100		100		100		100		100	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100	100	100			100		100		100		100		100	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Pkt A	%	93,4	93,60	93,8			94		94,2		94,4		94,6		94,6	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs / Pkt B	%	83,5	84,00	84,5			85		85,5		86		86,5		86,5	
		APK PAUD	%	71,00	71,02	71,04			71,06		71,08		72,00		72,02		72,02	
1.02.	KESEHATAN						107.876.827.000		110.458.400.000		115.431.800.000		117.952.600.000		122.425.200.000		574.144.827.000	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Masyarakat	Persentase RS yang terakreditasi minimal Madya	%	66,67	66,67	66,67	107.876.827.000	0	110.408.500.000	0	115.378.200.000	0	117.897.900.000	0	122.368.400.000	0	573.879.827.000	Dinas Kesehatan / RSUD Kraton / RSUD Kajen / RSUD Kesesi
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal Madya	%	77,78	77,78	77,78			81,48		88,89		92,59		96,30		96,30	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	100,00	100	100			100		100		100		100		100	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	96,76	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai Standar	%	100	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	86,57	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,3	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	74,57	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	73,80	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	58,76	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	88,66	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	83,95	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	97,33	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Cakupan Desa/Kal mengalami KLB yang dilakukan penyeledikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100			100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	
		Persentase Kelurahan STBM	%	90	90	92			92,00		93,00		94,00		95,00		95,00	
		Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	95	100	100			100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Angka penemuan kasus kusta baru yang tercatat (CNR) per 100.000 penduduk	%	8,5	9	8		7,00		6,00		5,00		5,00		5,00		
		Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	%	24,7	26	26		25,00		24,00		23,00		22,00		22,00		
		Persentase puskesmas dengan layanan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim	%	100	100	100		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan desa/kecamatan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam	%	100	100	100		100		100		100		100		100		
		Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	%	82,42	79,58	80		83		85		90		95		95		
		Persentase laboratorium terstandarisasi	%	-	-	-		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Capaian Nilai IFK sesuai standar	%	-	-	-		100		100		100		100		100		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan fasyankes milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	55,17	81,48	75		50.000.000	0	49.900.000	0	53.600.000	0	54.700.000	0	56.800.000	265.000.000	Dinas Kesehatan / RSUD Kraton / RSUD Kajen / RSUD Kesesi
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							75.261.159.150		76.131.740.954		80.115.028.920		81.875.284.349		84.799.867.370		398.183.080.743
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak	%	87,83	88,83	92		11.348.702.000		11.467.140.954		11.726.528.920		11.993.384.349		12.268.067.370	58.803.823.593	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses terhadap air limbah domestik	%	-	-	93		6.965.697.150	0	6.938.700.000	0	7.453.600.000	0	7.616.300.000	0	7.905.100.000	36.879.397.150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase (jalan) kondisi baik	%	12,98	13,18	15,18		4.425.000.000	0	4.407.900.000	0	4.734.900.000	0	4.838.300.000	0	5.021.800.000	23.427.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	56,2	63,97	65,18		52.521.760.000	0	53.318.000.000	0	56.200.000.000	0	57.427.300.000	0	59.604.900.000	279.071.960.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							2.055.000.000		2.047.100.000		2.199.000.000		2.247.000.000		2.332.200.000		10.880.300.000
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	93	93,66	94,00		2.055.000.000	0	2.047.100.000	0	2.199.000.000	0	2.247.000.000	0	2.332.200.000	10.880.300.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
1.05.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							701.000.000		698.300.000		750.100.000		766.500.000		795.600.000		3.711.500.000
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warganegara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%			100		701.000.000	-	698.300.000	-	750.100.000	-	766.500.000	-	795.600.000	3.711.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2.01.	TENAGA KERJA							36.000.000		35.900.000		38.600.000		39.400.000		40.900.000		190.800.000
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan berdasarkan lowongan kerja	%	-	-	55		36.000.000	0	35.900.000	0	38.600.000	-	39.400.000	-	40.900.000	190.800.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP					4.086.766.008		4.071.000.000		4.373.100.000		4.468.600.000		4.638.000.000		21.637.466.008			
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Cakupan pemantauan kualitas air	%	43,33	35,10	35	450.000.000	0	448.300.000	0	481.600.000	0	492.100.000	0	510.700.000	35,6	2.382.700.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		2. Cakupan pemantauan kualitas air	%	79,57	79,72	79,87		80,02	80,17	80,32	80,32	80,32	80,47	80,47	80,47	80,47	80,47		
		3. Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	%	10	13,00	20,00		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20			
		4. Cakupan/ luasan lahan kritis terkonservasi, cakupan luasan lahan akses terbuka terpulihkan dan lokasi DDA teridentifikasi	%	63,92	57,63	57,63		60,99	62,67		64,35		66,03		66,03	66,03			
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang ditangani	%	16	26,5	26,5	3.636.766.008	0	3.622.700.000	0	3.891.500.000	0	3.976.500.000	0	4.127.300.000	29	19.254.766.008	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					400.000.000		398.500.000		428.100.000		437.400.000		454.000.000		2.118.000.000			
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	%			4,16	400.000.000		398.500.000		428.100.000		437.400.000		454.000.000	9,8	2.118.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	
2.09.	PERHUBUNGAN					12.116.705.800		12.069.700.000		12.965.300.000		13.248.500.000		13.750.800.000		64.151.005.800			
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rambu Jalan	%	90	92,87	92,87	12.116.705.800	0	12.069.700.000	0	12.965.300.000	0	13.248.500.000	0	13.750.800.000	95,23	64.151.005.800	Dinas Perhubungan	
		Persentase APILL	%	74,57	74,57	74,57		77,9	80,71		82,95		84,34		84,34	84,34			
		Persentase PJU kondisi baik	%	80	81,86	83,4		84,7	85,81		86,77		87,61		87,61	87,61			
		Persentase sarana prasarana terminal tipe c sesuai standar	%	42,42	42,42	42,42		48,48	54,55		60,61		60,61		60,61	60,61			
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					1.199.000.000		1.194.500.000		1.283.100.000		1.311.100.000		1.360.800.000		6.348.500.000			
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah Bobot Nilai Domain Layanan SPBE sesuai dengan PermenPAN No 5 tentang Pedoman Evaluasi SPBE	Nilai	4,07	4,17	4,3	924.000.000	0	920.500.000	0	988.800.000	0	1.010.400.000	0	1.048.700.000	4,7	4.892.400.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
	Program Aplikasi Informatika	Jumlah Bobot Nilai Domain Tata kelola Layanan SPBE sesuai dengan PermenPAN No 5 tentang Pedoman Evaluasi SPBE	Nilai	3,9	4	4,1	275.000.000	0	274.000.000	0	294.300.000	0	300.700.000	0	312.100.000	4,5	1.456.100.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					270.000.000		269.100.000		289.000.000		295.300.000		306.500.000		1.429.900.000			
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	%	-	0,35	0,4	228.000.000		227.200.000		244.000.000		249.300.000		258.800.000	1	1.207.300.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja	
	Program Pengembangan UMKM	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	%	44,4	49,05	49,1	42.000.000		41.900.000		45.000.000		46.000.000		47.700.000	49,5	222.600.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
2.12.	PENANAMAN MODAL						167.587.000		167.000.000		179.500.000		183.400.000		190.200.000		887.687.000	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	%	-	-	1,00	40.000.000		39.900.000	1,00	42.900.000		43.800.000	1,5	45.400.000		212.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ijin yang diterbitkan	%	-	-	100	127.587.000		127.100.000	100	136.600.000		139.600.000	100	144.800.000		675.687.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.270.000.000		1.265.300.000		1.359.200.000		1.388.800.000		1.441.400.000		6.724.700.000	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap						370.000.000	0	368.600.000	0	396.000.000	0	404.600.000	0	419.900.000		1.959.100.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
		Produksi perikanan tangkap	ton	5.381,26	5.457,14	5.534,08			5.900,03		5.983,22		6.067,58		6.153,14		6.153,14	
		Produksi perikanan tangkap PUD	ton	276,07	279,96	283,91			-		-		-		-		-	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya	ton	8.425,15	8.425,15	8.593,65	875.000.000	-	821.800.000	-	882.800.000	-	902.100.000	-	936.300.000	-	4.418.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibina	%	-	25	50,000	-	-	49.900.000	-	53.600.000	-	54.700.000	-	56.800.000	-	215.000.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Tingkat konsumsi Ikan	kg/per kapita/tahun	23,50	24,2	24,68	25.000.000	-	25.000.000	-	26.800.000	-	27.400.000	-	28.400.000	-	132.600.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
									25,17		25,67		26,18		26,70		26,70	
3.02.	PARIWISATA						2.202.000.000		2.193.700.000		2.356.500.000		2.407.900.000		2.499.200.000		11.659.300.000	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan destinasi wisata	%	-	-	3,33	2.132.000.000	0	1.892.700.000	0	2.033.100.000	0	2.077.500.000	0	2.156.300.000	0	10.291.600.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	%	-	-	10	70.000.000	0	69.800.000	0	75.000.000	0	76.600.000	0	79.500.000	0	370.900.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Berbudaya Hak Kekayaan	Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif terbina	%	-	-	5,00	-	0	99.700.000	0	107.100.000	0	109.400.000	0	113.500.000	0	429.700.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pokdarwis Aktif	%	65,52	66,67	68,74	-	0	131.500.000	0	141.300.000	0	144.400.000	0	149.900.000	0	567.100.000	
									68,75		69,7		69,7		69,7		69,7	
3.07.	PERINDUSTRIAN						359.416.000		358.100.000		384.600.000		393.000.000		407.900.000		1.903.016.000	
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan nilai produksi IKM	%	0,14	0,15	0,16	359.416.000	0	358.100.000	0	384.600.000	0	393.000.000	0	407.900.000	0	1.903.016.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja
									0,17		0,18		0,19		0,2		0,2	
5.03.	KEPEGAWAIAN						1.360.000.000		1.354.800.000		1.455.300.000		1.487.100.000		1.543.500.000		7.200.700.000	
	Program Kepegawaian Daerah						1.360.000.000	0	1.354.800.000	0	1.455.300.000	0	1.487.100.000	0	1.543.500.000	0	7.200.700.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Persentase Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang terpenuhi	%			100			100		100		100		100		100	
		Persentase Layanan Mutasi dan Promosi ASN yang terpenuhi	%			100			100		100		100		100		100	
		Persentase Layanan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur yang terpenuhi	%			100			100		100		100		100		100	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
5.04.	PENDIDIKAN DAN RELATIHAN						800.000.000		796.900.000		856.100.000		874.800.000		907.900.000		4.235.700.000	
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang dilakukan pengukuran dimensi dalam standar profesionalitas ASN (dimensi kualifikasi, kompetensi, integritas dan disiplin)	%			100	800.000.000	0	796.900.000	0	856.100.000	0	874.800.000	0	907.900.000	100	4.235.700.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

A. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pada bab ini dicantumkan seluruh program baik yang bersifat strategis maupun operasional yang kinerjanya menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah, beserta indikator kinerja, pagu indikatif target kinerja. Program strategis (Program Pembangunan Daerah) menjadi tanggung jawab bersama Kepala Organisasi Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah pada tingkat kebijakan, sedangkan program operasional murni menjadi tanggung jawab Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Seluruh program yang tercantum akan dimasukkan dalam Rencana Strategis (Renstra) masing-masing Perangkat Daerah.

Penganggaran program perangkat daerah, besarnya masing-masing memperhatikan hasil analisis kerangka pendanaan pembangunan daerah. Alokasi pendanaan dalam RPJMD ini bersifat indikatif, hal ini dimaksudkan bahwa kebutuhan pendanaan setiap tahun dapat berubah disesuaikan dengan perhitungan proyeksi pendapatan tahunan yang tingkat kepastiannya lebih tinggi dan memperhatikan situasi dan kondisi daerah yang berkembang pada tahun berkenaan.

Kerangka pendanaan pembangunan daerah yang akan menjadi dasar perhitungan alokasi anggaran masing-masing program dapat dilihat perinciannya pada tabel berikut :

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2021-2026

NO.	U R A I A N	RENCANA APBD PERUBAHAN 2021	RENCANA TAHUN 2022	RENCANA TAHUN 2023	RENCANA TAHUN 2024	RENCANA TAHUN 2025	RENCANA TAHUN 2026
A	PENDAPATAN	2.085.531.836,28	2.131.184.465,76	2.120.424.945,02	2.198.885.269,49	2.280.840.013,36	2.366.485.860,79
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	339.526.474,26	435.704.120,75	458.657.545,65	483.076.232,72	509.073.234,89	536.771.558,00
a	Pajak Daerah	77.131.232,67	90.287.384	99.316.122,84	109.247.735,12	120.172.508,64	132.189.759,50
b	Retribusi Daerah	12.861.008,64	23.118.317,40	24.043.050,10	25.004.772,10	26.004.962,98	27.045.161,50
c	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.728.490,73	10.801.701,49	11.341.786,57	11.908.875,89	12.504.319,69	13.129.535,67
d	Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah	240.805.742,22	311.496.717,46	323.956.586,15	336.914.849,60	350.391.443,58	364.407.101,33
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.648.462.608,32	1.691.480.345,01	1.657.567.399,36	1.711.399.036,77	1.767.136.278,47	1.824.852.277,79
2.1.	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.520.353.026,30	1.568.388.763,00	1.529.552.154,07	1.578.263.181,67	1.628.674.989,16	1.680.852.536,91
1	Dana Perimbangan	1.223.666.735,30	1.303.037.383,00	1.250.933.205,07	1.285.713.285,22	1.321.497.597,88	1.358.316.276,07
a	Dana Transfer Umum	902.499.633,30	898.384.798,00	923.513.483,53	951.745.169,25	980.850.119,59	1.010.855.848,22
	Dana Bagi Hasil	31.432.232,30	25.061.010,00	26.314.060,50	27.629.763,53	29.011.251,70	30.461.814,29
	Dana Alokasi Umum	871.067.401,00	871.067.401,00	897.199.423,03	924.115.405,72	951.838.867,89	980.394.033,93
b	Dana Transfer Khusus	321.167.102,00	320.999.727,00	327.419.721,54	333.968.115,97	340.647.478,29	347.460.427,86
	DAK Fisik	95.333.225,00	95.165.850,00	97.069.167,00	99.010.550,34	100.990.761,35	103.010.576,57
	DAK Non Fisik	225.833.877,00	225.833.877,00	230.350.554,54	234.957.565,63	239.656.716,94	244.449.851,28
2	Dana Insentif Daerah	33.289.185,00	1.482.507,00	1.556.632,35	1.634.463,97	1.716.187,17	1.801.996,52
3	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	-
4	Dana Keistimewaan	-	-	-	-	-	-
5	Dana Desa	263.397.106,00	263.868.873,00	277.062.316,65	290.915.432,48	305.461.204,11	320.734.264,31
2.2.	TRANSFER ANTAR-DAERAH	128.109.582,01	123.091.582,01	128.015.245,29	133.135.855,11	138.461.289,31	143.999.740,88
1	Pendapatan Bagi Hasil	123.091.582,01	123.091.582,01	128.015.245,29	133.135.855,11	138.461.289,31	143.999.740,88
2	Bantuan Keuangan	5.018.000,00	-	-	-	-	-
B	BELANJA	2.256.232.062,40	2.131.184.465,76	2.179.120.709,95	2.228.412.655,66	2.279.123.656,23	2.331.322.147,75
1	Belanja Operasi	1.570.597.933,55	1.573.994.674,00	1.606.157.122,35	1.638.983.296,31	1.672.487.084,70	1.706.682.672,53
a	Belanja Pegawai	972.078.412,92	1.104.570.413,00	1.126.661.821,26	1.149.195.057,69	1.172.178.958,84	1.195.622.538,02
b	Belanja Barang dan Jasa	493.160.773,63	401.168.774,00	409.192.149,48	417.375.992,47	425.723.512,32	434.237.982,57
c	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
d	Belanja Hibah	76.748.797,60	49.645.538,00	51.134.904,14	52.668.951,26	54.249.019,80	55.876.490,40
	Belanja Bantuan Sosial	28.609.949,40	18.609.949,00	19.168.247,47	19.743.294,89	20.335.593,74	20.945.661,55
2	Belanja Modal	297.110.644,35	246.571.000,00	256.232.420,00	266.463.568,40	277.311.464,77	288.827.866,31
B	Belanja Modal Tanah	23.871.641,00	15.000.000,00	15.750.000,00	16.537.500,00	17.364.375,00	18.232.593,75
C	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.086.125,16	20.000.000,00	22.400.000,00	25.088.000,00	28.098.560,00	31.470.387,20
D	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	78.991.133,40	63.500.000,00	66.675.000,00	70.008.750,00	73.509.187,50	77.184.646,88
E	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	133.571.453,00	135.571.000,00	138.282.420,00	141.048.068,40	143.869.029,77	146.746.410,36
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	17.590.291,80	12.500.000,00	13.125.000,00	13.781.250,00	14.470.312,50	15.193.828,13
	Belanja Modal BLUD	-	-	-	-	-	-
3	Belanja tak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Transfer	383.523.484,50	305.618.791,76	311.731.167,60	317.965.790,95	324.325.106,77	330.811.608,90
	SURPLUS / DEFISIT	(170.700.226,12)	-	(58.695.764,93)	(29.527.386,17)	1.716.357,12	35.163.713,05

NO.	U R A I A N	RENCANA APBD PERUBAHAN 2021	RENCANA TAHUN 2022	RENCANA TAHUN 2023	RENCANA TAHUN 2024	RENCANA TAHUN 2025	RENCANA TAHUN 2026
C	PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	163.759.759.877	0	0	0	0	0
a	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA)	163.759.759.877	0	0	0	0	0
b	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	0
c	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	0	0	0	0	0	0
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	6.000.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	15.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000
a	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	6.000.000.000	10.500.000.000	10.500.000.000	15.000.000.000	20.000.000.000	10.000.000.000
b	Pembayaran Pokok Hutang	0	0	0	0	0	0
	PEMBIAYAAN NETTO	157.759.759.877	-10.500.000.000	-10.500.000.000	-15.000.000.000	-20.000.000.000	-10.000.000.000
	SILPA TAHUN BERKENAAN	0	0	0	0	0	0

B. Program Perangkat Daerah

Indikasi rencana program perangkat daerah Kabupaten Pekalongan berisi program-program prioritas baik untuk mencapai visi misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam penyusunan rencana Strategis PD.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada Akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap PD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPJMD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja yang akan dituangkan dalam APBD. Selanjutnya pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi PD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun.

Program prioritas ini juga merupakan sebuah upaya yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk menjawab permasalahan pembangunan, isu strategis, serta tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Selain itu, penetapan program prioritas ini juga memiliki keterkaitan dengan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan.



Gambar 7.1. Keterkaitan Program Prioritas dengan Permasalahan Pembangunan serta Strategi dan Arah Kebijakan

Program yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026 terbagi dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang yang meliputi:

1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/kesetaraan.

2) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan nonformal/kesetaraan.

3) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah; Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah; pPenyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi; Pengembangan Rumah Sakit Kraton dan Kajen, dan Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah; Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah; dan

Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah.

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga; Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM); dan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah; Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah; dan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Program ini diarahkan pada Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah; dan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah;

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Program ini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah.

3) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional

Program ini diarahkan pada Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan.

4) Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah.

5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah.

6) Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

7) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah.

- 8) **Program Penyelenggaraan Jalan**
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Jalan.
 - 9) **Program Pengembangan Jasa Konstruksi**
Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah; Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil); dan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi.
 - 10) **Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**
Program ini diarahkan pada Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR); dan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**
Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:
- 1) **Program Pengembangan Perumahan**
Program ini diarahkan pada Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program; Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program; Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus; dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
 - 2) **Program Kawasan Permukiman**
Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman; Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha; dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.
 - 3) **Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh**
Program ini diarahkan pada Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah.
 - 4) **Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)**
Program ini diarahkan pada Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.
 - 5) **Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**
Program ini diarahkan pada Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat**
Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
- 1) **Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**
Program ini diarahkan pada Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah; dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 - 2) **Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**
Program ini diarahkan pada Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah.

3) Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada Pelayanan Informasi Rawan Bencana; Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana; Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana; Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penangana Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Program ini diarahkan pada Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal.

2) Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah.

3) Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

4) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar; dan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah.

5) Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial; dan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana dengan cara melakukan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana.

6) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Perencanaan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada penyusunan rencana tenaga kerja makro dan mikro.

2) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi; dan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.

3) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Informasi Pasar Kerja; dan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah.

4) Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah; dan Pencegahan dan Penyelesaian

Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**
Program ini diarahkan pada Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah; dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan.
- 2) Program Perlindungan Perempuan**
Program ini diarahkan pada Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi.
- 3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga**
Program ini diarahkan pada Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah.
- 4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak**
Program ini diarahkan pada Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data.
- 5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)**
Program ini diarahkan pada Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha.
- 6) Program Perlindungan Khusus Anak**
Program ini diarahkan pada Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah; Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah; dan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan**
Program ini diarahkan pada Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah.
- 2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat**
Program ini diarahkan pada Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan; Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan; dan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.
- 3) Program Penanganan Kerawanan Pangan**
Program ini diarahkan pada Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan; Penanganan Kerawanan Pangan; dan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah
- 4) Program Pengawasan Keamanan Pangan**
Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Program ini diarahkan pada Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah

2) Program Penatagunaan Tanah

Program ini diarahkan pada Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam satu Daerah.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH); dan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

4) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini diarahkan pada Penyimpanan Sementara Limbah B3, dan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat.

7) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah.

8) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

9) Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Sampah.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk; Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; dan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

2) Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada Pelayanan Pencatatan Sipil; Penyelenggaraan Pencatatan Sipil; dan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan; Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

4) Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Program ini diarahkan pada Penyusunan Profil Kependudukan

g. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penataan Desa

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Penataan Desa.

2) Program Peningkatan Kerjasama Desa

Program ini diarahkan pada Fasilitasi Kerja sama antar Desa.

3) Program Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.

4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah.

h. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk; dan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah;

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal; Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah; dan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

3) Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

i. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ; Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan; Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C; Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir; Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan; Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan; Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah; dan Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah

j. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah.

2) Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah; dan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah.

k. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah.

2) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah.

3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah.

4) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah.

5) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah.

6) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan.

7) Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

1. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah; dan Pembuatan Peta Potensi Investasi.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah.

5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah.

m. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader;

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah; Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah; Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi; dan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

n. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah.

o. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah; dan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah.

p. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan;

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah; dan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah.

2) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah.

3) Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah.

4) Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat.

5) Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Museum.

q. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah; dan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah.

2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah.

r. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah; Pengelolaan Arsip Statis Daerah; dan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat.

2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun; Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang

Berskala; dan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

3) Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini diarahkan pada Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota; Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah; dan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil; dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

3) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan

Program ini diarahkan pada Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam.

4) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil; dan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah.

b. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Destinasi Pariwisata.

2) Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata.

3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah.

4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

c. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian; Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme; dan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada Pengembangan Prasarana Pertanian; dan Pembangunan Prasarana Pertanian

3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah; dan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner.

4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.

5) Program Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.

6) Program Perizinan Usaha Pertanian

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahnya dalam Daerah.

d. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan.

2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan; dan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota.

4) Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah.

5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

6) Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

e. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI).

3) Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Program ini diarahkan pada Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI.

f. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini diarahkan pada Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah.

4. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a. Sekretariat Daerah

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Bagian Umum); Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah (Bagian Umum); Penataan Organisasi (Bagian Organisasi); dan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Bagian Protokol)

2) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada Administrasi Tata Pemerintahan; Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat; Fasilitasi dan Koordinasi Hukum; dan Fasilitasi Kerjasama Daerah

3) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

b. Sekretariat DPRD

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD; dan Layanan Administrasi DPRD.

2) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan pada Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD; Peningkatan Kapasitas DPRD; Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat; Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD; dan Fasilitasi Tugas DPRD.

5. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan; Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;

2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan pada Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam); dan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

b. Keuangan

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah; Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah; Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah; Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan pada Pengelolaan Barang Milik Daerah

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan pada Pengelolaan pendapatan Daerah.

c. Kepegawaian

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan pada Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN; Mutasi dan Promosi ASN; Pengembangan Kompetensi ASN; dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur.

d. Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan pada Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

e. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan pada Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan; Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

a. Inspektorat Daerah

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Pengawasan Internal.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan; dan Pendampingan dan Asistensi.

7. Unsur Kewilayahan

a. Kecamatan

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan pada Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan; Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan pada Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa; Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan; dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

3) Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Program ini diarahkan pada Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan pada Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan pada Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

8. Unsur Pemerintahan Umum

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan).

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Program ini diarahkan pada Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

9. Non Urusan (Program Setiap Perangkat Daerah)

Rencana program perangkat daerah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Semua Perangkat Daerah); Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Semua Perangkat Daerah); Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Semua Perangkat Daerah); Administrasi Umum Perangkat Daerah (Semua Perangkat Daerah); Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Semua Perangkat Daerah); Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Semua Perangkat Daerah); Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Semua Perangkat Daerah); dan Peningkatan Pelayanan BLUD (RSUD Kraton; dan RSUD Kajen).

Tabel 7.2
Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab					
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp						
				(5)	(6)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)						
1.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						396.360.080.692			403.823.800.000			419.140.100.000			433.381.900.000			449.814.700.000			2.102.520.580.692	
1.01.	PENDIDIKAN						161.712.386.500			166.085.200.000			168.057.700.000			176.816.700.000			183.521.100.000			856.193.086.500	
	Program Pengelolaan Pendidikan						141.219.474.500	-		145.591.900.000	-		146.043.800.000	-		154.322.000.000	-		160.173.600.000	-		747.350.774.500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Pkt A	%	103,81	103,83	103,85			103,87			103,89			103,91			103,93				103,93	
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	%	100,00	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				100,00	
		Angka Kelulusan (AL) SD/MI	%	100,00	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				100,00	
		Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	%	100,00	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				100,00	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Pkt A	%	93,40	93,60	93,80			94,00			94,20			94,40			94,60				94,60	
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs / Pkt B	%	83,50	84,00	84,50			85,00			85,50			86,00			86,50				86,50	
		APK PAUD	%	71,00	71,02	71,04			71,06			71,08			72,00			72,02				72,02	
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru Layak Mengajar	%	-	-	80,00			82,00			85,00			87,00			90,00				90,00	
							20.492.912.000			20.413.400.000			21.928.100.000			22.407.000.000			23.256.600.000			108.498.012.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	Persentase satuan pendidikan yang telah mengembangkan Bahasa dan Sastra Jawa	%	-	-	-			100,00			100,00			100,00			100,00				100,00	
							-			79.900.000			85.800.000			87.700.000			90.900.000			344.300.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1.02.	KESEHATAN						108.458.703.000			111.038.100.000			116.054.600.000			118.588.900.000			123.085.600.000			577.225.903.000	
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat						107.826.827.000	-		110.408.500.000	-		115.378.200.000	-		117.897.900.000	-		122.368.400.000	-		573.879.827.000	Dinas Kesehatan / RSUD Kraton / RSUD Kajen / RSUD Kesesi
		Persentase RS yang terakreditasi minimal Madya	%	66,67	66,67	66,67			66,67			66,67			66,67			66,67				100,00	
		Persentase Puskesmas yang terakreditasi minimal Madya	%	77,78	77,78	77,78			81,48			88,89			92,59			96,30				96,30	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	%	100,00	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				100,00	
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100,00	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				100,00	
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	96,76	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				100,00	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir sesuai Standar	%	100,00	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				100,00	
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	%	86,57	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				100,00	
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	96,30	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				100,00	
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	74,57	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				100,00	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	73,80	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				100,00	
		Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	58,76	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				100,00	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	88,66	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				100,00	
		Persentase ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00			100,00			100,00			100,00			100,00				100,00	

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	%	83,95	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	97,33	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan Desa/Kal mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase Kelurahan STBM	%	90,00	90,00	92,00		92,00		93,00		94,00		95,00		95,00		95,00		
		Cakupan desa/kecamatan Universal Child Immunization (UCI)	%	95,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Angka penemuan kasus kusta baru yang tercatat (CNR) per 100.000 penduduk	%	8,50	9,00	8,00		7,00		6,00		5,00		5,00		5,00		5,00		
		Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk	%	24,70	26,00	26,00		25,00		24,00		23,00		22,00		22,00		22,00		
		Persentase puskesmas dengan layanan deteksi dini kanker payudara dan kanker leher rahim	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Cakupan desa/kecamatan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase penduduk yang memiliki Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	%	82,42	79,58	80,00		83,00		85,00		90,00		95,00		95,00		95,00		
		Persentase laboratorium terstandarisasi	%	-	-	-		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Capaian Nilai IFK sesuai standar	%	-	-	-		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase permintaan layanan masyarakat melalui tim 119 yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	70,00	70,00	70,00		80,00		90,00		95,00		100,00		100,00		100,00		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan fasyankes milik pemerintah yang memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	55,17	81,48	75,00		50.000.000	-	49.900.000	-	53.600.000	-	54.700.000	-	56.800.000		265.000.000	Dinas Kesehatan / RSUD Kraton / RSUD Kajen / RSUD Kesesi	
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan sarana kefarmasian dan sarana pengelolaan pangan yang memenuhi standar	%	35,00	35,00	35,00		421.876.000	-	420.300.000	-	451.500.000	-	461.300.000	-	478.800.000		2.233.776.000	Dinas Kesehatan / RSUD Kraton / RSUD Kajen / RSUD Kesesi	
		Persentase Industri rumah tangga pangan yang memenuhi standar	%	92,20	92,20	93,00		94,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Desa/Kelurahan siaga aktif mandiri	%	7,37	11,60	13,30		160.000.000	-	159.400.000	-	171.300.000	-	175.000.000	-	181.600.000		847.300.000	Dinas Kesehatan / RSUD Kraton / RSUD Kajen / RSUD Kesesi	
		Persentase Rumah tangga ber PHBS	%	75,00	78,00	80,00		81,00		82,00		83,00		84,00		84,00		84,00		
1.03.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							109.017.595.992		109.595.100.000		116.652.900.000		119.200.200.000		123.720.100.000		578.185.895.992		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	%	8,94	9,41	9,65		17.832.757.000	-	17.763.600.000	-	19.081.700.000	-	19.498.400.000	-	20.237.700.000		94.414.157.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Persentase jaringan irigasi kondisi baik	%	48,78	50,64	52,17		53,70		55,23		56,76		58,29		58,29		58,29		
	Program Pengelolaan Dan							11.348.702.000	-	11.304.700.000	-	12.143.500.000	-	12.408.700.000	-	12.879.200.000		60.084.802.000	Dinas Pekerjaan Umum dan	

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak	%	87,83	88,83	92,00		96,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Penataan Ruang	
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase TPA dan TPS-3R kondisi baik	%	100,00	100,00	100,00	1.208.679.842	100,00	1.204.000.000	100,00	1.293.400.000	100,00	1.321.600.000	100,00	1.371.700.000			6.399.379.842	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase penduduk yang mendapatkan akses terhadap air limbah domestik	%	-	-	93,00	6.965.697.150	97,00	6.938.700.000	100,00	7.453.600.000	100,00	7.616.300.000	100,00	7.905.100.000			36.879.397.150	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Drainase (jalan) kondisi baik	%	12,98	13,18	15,18	4.425.000.000	17,18	4.407.900.000	19,18	4.734.900.000	21,18	4.838.300.000	23,18	5.021.800.000	23,18		23.427.900.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase rekomendasi teknis IMB yang diterbitkan	%	100	100	100	6.845.000.000	100	6.818.500.000	100	7.324.400.000	100	7.484.400.000	100	7.768.200.000			36.240.500.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kawasan/ lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungannya	%	48,78	2,44	12,19	7.420.000.000	17,07	7.391.300.000	19,51	7.939.700.000	19,51	8.113.100.000	19,51	8.420.700.000			39.284.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	%	56,2	63,97	65,18	52.521.760.000	70,18	53.318.000.000	75,18	56.200.000.000	80,18	57.427.300.000	85,18	59.604.900.000	85,18		279.071.960.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase Jasa Konstruksi yang memiliki operator/teknisi/analisis yang tersertifikasi	%	4,846939	8,67	14,41	100.000.000	21,43	99.700.000	29,72	107.100.000	39,29	109.400.000	50,13	113.500.000	50,13		529.700.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	% Kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RTBL	%	-	14,29	28,57	350.000.000	42,86	348.700.000	57,14	374.600.000	71,43	382.700.000	85,71	397.300.000	85,71		1.853.300.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.04.	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						11.150.853.000		11.107.800.000		11.932.100.000		12.192.600.000		12.654.900.000			59.038.253.000		
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	%	100	100	100	565.000.000	100	562.900.000	100	604.600.000	100	617.800.000	100	641.200.000	100		2.991.500.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
		Persentase rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	100	100	100		100		100		100		100		100				
	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	0	5	5	8.080.853.000	30	8.049.500.000	45	8.646.800.000	65	8.835.700.000	85	9.170.700.000	85		42.783.553.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	93	93,66	94,00	2.055.000.000	94,40	2.047.100.000	94,80	2.199.000.000	94,90	2.247.000.000	95,30	2.332.200.000	95,30		10.880.300.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung prasarana sarana utilitas umum (PSU)	lokasi	-	-	20	440.000.000	40	438.300.000	60	470.900.000	80	481.100.000	100	499.400.000	100		2.329.700.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Persentase bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil yang telah terdaftar dan memiliki sertifikat	%	-	-	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.800.000	100	11.000.000	100	11.400.000	300		53.200.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	
1.05.	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						2.505.000.000		2.495.400.000		2.680.600.000		2.739.100.000		2.843.000.000			13.263.100.000		
	Program Peningkatan						1.704.000.000	-	1.697.400.000	-	1.823.400.000	-	1.863.200.000	-	1.933.900.000			9.021.900.000	Satuan Polisi Pamong Praja	

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang diselesaikan	%			100		100		100		100		100		100		dan Pemadam Kebakaran		
		Persentase Jumlah Penduduk yang memperoleh layanan akibat Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	%			100		100		100		100		100		100				
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%			25,20	100.000.000	25,20	99.700.000	50,00	107.100.000	75,00	109.400.000	75,00	113.500.000	75,00	529.700.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
		Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban non Kebakaran	%			25,20		25,20		50,00		75,00		75,00		75,00				
	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warganegara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%			100	701.000.000	100	698.300.000	100	750.100.000	100	766.500.000	100	795.600.000	100	3.711.500.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		
1.06.	SOSIAL						3.515.542.200		3.502.200.000		3.762.200.000		3.844.400.000		3.990.000.000		18.614.342.200			
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	%		100	100	-	100	25.000.000	100	26.800.000	100	27.400.000	100	28.400.000	100	107.600.000	Dinas Sosial		
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Warga Negara penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis, yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	%	27,42	28,00	1,17	295.438.200	2,42	294.300.000	3,69	316.200.000	4,98	323.100.000	6,29	335.300.000	6,29	1.564.338.200	Dinas Sosial		
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	%			0,07	2.631.000.000	0,16	2.595.900.000	0,25	2.788.600.000	0,34	2.849.500.000	0,43	2.957.500.000	0,43	13.822.500.000	Dinas Sosial		
	Program Penanganan Bencana	persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	%			100	150.000.000	100	149.500.000	100	160.600.000	100	164.100.000	100	170.300.000	100	794.500.000	Dinas Sosial		
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS	%			6,22	364.104.000	14,54	362.700.000	22,86	389.700.000	31,19	398.200.000	39,51	413.300.000	39,51	1.928.004.000	Dinas Sosial		
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase sarana prasarana taman makam pahlawan yang sesuai dengan standar makam pahlawan	%	60	70	70	75.000.000	80	74.800.000	85	80.300.000	90	82.100.000	100	85.200.000	100	397.400.000	Dinas Sosial		
2.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						40.942.197.808		40.816.400.000		43.847.500.000		44.804.900.000		46.133.642.020		216.544.639.828			
2.01.	TENAGA KERJA						234.000.000		233.300.000		250.600.000		256.000.000		265.700.000		1.239.600.000			
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Dokumen RTK (Rencana Tenaga Kerja) perusahaan yang disusun	%	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja		
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang mendapatkan pelatihan.	%	-	-	1,50	150.000.000	1,50	149.500.000	1,50	160.600.000	1,50	164.100.000	1,50	170.300.000	1,50	794.500.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja		
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan berdasarkan lowongan kerja	%	-	-	55,00	36.000.000	55,00	35.900.000	55,00	38.600.000	55,00	39.400.000	55,00	40.900.000	55,00	190.800.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja		

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	-	-	60	48.000.000	60	47.900.000	61	51.400.000	61	52.500.000	61	54.500.000	61	254.300.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja		
2.02.	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						630.000.000		627.900.000		674.700.000		689.300.000		715.300.000		3.337.200.000			
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase OPD yang melaksanakan PPRG	%			50	350.000.000	60	239.100.000	70	256.900.000	80	262.500.000	90	272.400.000	90	1.380.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan		
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kekerasan yang berhasil ditangani sesuai standar	%			100	130.000.000	100	89.700.000	100	96.400.000	100	98.500.000	100	102.200.000	100	516.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perkawinan usia anak yang berhasil dikendalikan	%	3,66	3,66	3,64	-	3,63	69.800.000	3,6	75.000.000	3,6	76.600.000	3,55	79.500.000	3,55	300.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang dilayani sesuai standar	%			100	150.000.000	100	89.700.000	100	96.400.000	100	98.500.000	100	102.200.000	100	536.800.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Persentase OPD yang memiliki dan memanfaatkan data pilah gender dan anak	%			100	-	100	69.800.000	100	75.000.000	100	76.600.000	100	79.500.000	100	300.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase hak-hak anak yang telah diimplementasikan	%			20	-	30	69.800.000	40	75.000.000	50	76.600.000	60	79.500.000	60	300.900.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		
2.03.	PANGAN						714.000.000		711.400.000		764.200.000		780.900.000		810.500.000		3.781.000.000			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kemandirian Dan Kemandirian Pangan	Persentase infrastruktur kemandirian pangan kondisi baik	%			65,00	566.000.000	70,00	563.900.000	75,00	605.700.000	80,00	618.900.000	85,00	642.400.000	85	2.996.900.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Konsumsi energi perkapita	Kkal/ka p/tahun	2.275	2.150	2.150	132.000.000	2.150	131.500.000	2.150	141.300.000	2.150	144.400.000	2.150	149.900.000	2.150	699.100.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Konsumsi protein perkapita	Gram/k ap/tahun	81	57	57	8.000.000	57	8.000.000	57	8.600.000	57	8.800.000	57	9.100.000	57	42.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase penanganan desa/keurahan rawan pangan	%	70	72	74	8.000.000	76	8.000.000	78	8.600.000	80	8.800.000	80	9.100.000	80	42.500.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
2.04.	PERTANAHAN						25.000.000		5.000.000		6.800.000		7.400.000		8.400.000		52.600.000			
	Program Penatagunaan Tanah	Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan	%	10,00	20,00	-	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase permasalahan pertanahan yang diselesaikan	%	-	-	20	5.000.000	40	5.000.000	60	6.800.000	80	7.400.000	100	8.400.000	100	27.600.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.05.	LINGKUNGAN HIDUP						4.526.766.008		4.509.500.000		4.844.500.000		4.950.300.000		5.137.700.000		23.968.766.008			
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dan informasi lingkungan hidup berkualitas	%	0	0	25	85.000.000	25	84.700.000	25	91.000.000	25	93.000.000	25	96.500.000	- 23.968.766.008	450.200.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Cakupan pemantauan kualitas air	%	43,33	35,10	35,20	450.000.000	35,30	448.300.000	35,40	481.600.000	35,50	492.100.000	35,60	510.700.000	35,60	2.382.700.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup		
		2. Cakupan pemantauan kualitas udara	%	79,57	79,72	79,87	-	80,02	-	80,17	-	80,32	-	80,47	-	80,47	-	-		
		3. Presentase kelompok kampung iklim yang terbentuk	%	10	13,00	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20	-			

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		4. Cakupan/ luasan lahan kritis terkonservasi , cakupan luasan lahan akses terbuka terpulihkan dan luasan DTA terlindungi	%	63,92	57,63	57,63		60,99		62,67		64,35		66,03		66,03			
	Program Pengelolaan Keekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase RTH dalam kondisi baik	%	0	0	0,5	150.000.000	-	0,5	149.500.000	-	160.600.000	-	164.100.000	-	170.300.000	-	794.500.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase pelaku usaha dan/atau yang telah memenuhi rincian teknis pengelolaan limbah B3	%	0	0	20	30.000.000	-	20	29.900.000	-	32.200.000	-	32.900.000	-	34.100.000	-	159.100.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup	%	0	5,26	5,26	55.000.000	-	5,26	54.800.000	-	58.900.000	-	60.200.000	-	62.500.000	-	291.400.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah tingkat kabupaten	sekolah	0	5	10	60.000.000	-	10	59.800.000	-	64.300.000	-	65.700.000	-	68.100.000	-	317.900.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten terbaik	desa	0	0	7	30.000.000	-	7	29.900.000	-	32.200.000	-	32.900.000	-	34.100.000	-	159.100.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase pengaduan masyarakat di bidang Perlindungan dan Pengelolan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten / kota yang terselesaikan	%	100	100	100	30.000.000	-	100	29.900.000	-	32.200.000	-	32.900.000	-	34.100.000	-	159.100.000	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase timbulan sampah yang ditangani	%	16	26,50	26,50	3.636.766.008	-	27,50	3.622.700.000	-	3.891.500.000	-	3.976.500.000	-	4.127.300.000	-	19.254.766.008	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
2.06.	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						82.000.000		101.800.000		109.400.000		111.700.000		115.800.000		520.700.000		
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan KTP elektronik bagi pemula	%	98,66	98,68	98,10	28.000.000	-	98,15	27.900.000	-	30.000.000	-	30.700.000	-	31.800.000	-	148.400.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Cakupan penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	%	91,00	94,20	95,50	34.000.000	-	95,75	33.900.000	-	36.400.000	-	37.200.000	-	38.600.000	-	180.100.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
		Cakupan Penerbitan Akta Kematian	%	100,00	100,00	100,00		-	100,00		-	100,00	-	100,00	-	100,00	-		
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	79,65	80,10	80,15	20.000.000	-	80,20	20.000.000	-	21.500.000	-	21.900.000	-	22.700.000	-	106.100.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan penerbitan profil Kependudukan	%	100	100	100		-	100	20.000.000	-	21.500.000	-	21.900.000	-	22.700.000	-	86.100.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.07.	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						4.931.197.000		4.912.200.000		5.276.800.000		5.392.000.000		5.596.500.000		26.108.697.000		
	Program Penataan Desa	Persentase Desa yang difasilitasi untuk meningkatkan kualitas penataan sarana dan prasarana desa	%			4,7	815.000.000	-	6,1	811.900.000	-	872.100.000	-	891.200.000	-	925.000.000	-	4.315.200.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Kerjasama Pembangunan Kawasan Perdesaan yang terfasilitasi	%			4,7	30.000.000	-	6,1	29.900.000	-	32.200.000	-	32.900.000	-	34.100.000	-	159.100.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang memiliki administrasi pemerintahan desa yang baik	%			14,2	3.686.197.000	18,3	-	3.671.900.000	-	3.944.400.000	-	4.030.500.000	-	4.183.400.000	19.516.397.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	%			4,16	400.000.000	6,1	-	398.500.000	-	428.100.000	-	437.400.000	-	454.000.000	2.118.000.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		
2.08.	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						11.255.815.000			11.212.300.000		12.044.300.000		12.307.200.000		12.404.342.020	59.223.957.020			
	Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya un meet need	%	12,78	12,74	12,5	29.255.000	-	29.200.000	-	31.400.000	-	32.000.000	-	33.300.000	-	155.155.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan		
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Peserta KB aktif dengan metode kontrasepsi jangka panjang	%	17,5	18,2	18,4	6.391.120.000	-	6.366.400.000	-	6.838.800.000	-	6.988.100.000	-	6.883.442.020	-	33.467.862.020	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan		
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase Lembaga ketahanan keluarga yang dibina (BKR, BKL, BKB)	%	52	56	58	4.835.440.000	-	4.816.700.000	-	5.174.100.000	-	5.287.100.000	-	5.487.600.000	-	25.600.940.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan		
2.09.	PERHUBUNGAN						12.116.705.800			12.069.700.000		12.965.300.000		13.248.500.000		13.750.800.000	64.151.005.800			
	Program Penyelenggaraan Lahu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Rambu Jalan	%	90	92,87	92,87	12.116.705.800	-	12.069.700.000	-	12.965.300.000	-	13.248.500.000	-	13.750.800.000	-	64.151.005.800	Dinas Perhubungan		
		Persentase APILL	%	74,57	74,57	74,57		-		-	80,71	-	82,95	-	84,34	-	84,34			
		Persentase PJU kondisi baik	%	80	81,86	83,4		-		-	85,81	-	86,77	-	87,61	-	87,61			
		Persentase sarana prasarana terminal tipe c sesuai standar	%	42,42	42,42	42,42		-		-	54,55	-	60,61	-	60,61	-	60,61			
2.10.	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						1.199.000.000			1.194.500.000		1.283.100.000		1.311.100.000		1.360.800.000	6.348.500.000			
	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Jumlah Bobot Nilai Domain Layanan SPBE sesuai dengan PermenPAN No 5 tentang pedoman Evaluasi SPBE	Nilai	4,07	4,17	4,3	924.000.000	-	920.500.000	-	988.800.000	-	1.010.400.000	-	1.048.700.000	-	4.892.400.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika		
	Program Aplikasi Informatika	Jumlah Bobot Nilai Domain Tata kelola Layanan SPBE sesuai dengan PermenPAN No 5 tentang pedoman Evaluasi SPBE	Nilai	3,9	4	4,1	275.000.000	-	274.000.000	-	294.300.000	-	300.700.000	-	312.100.000	-	1.456.100.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika		
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						770.800.000			798.200.000		857.300.000		876.000.000		909.100.000	4.211.400.000			
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif yang diawasi dan diperiksa	%	-	40	41,46	25.000.000	-	25.000.000	-	26.800.000	-	27.400.000	-	28.400.000	-	132.600.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja		
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase koperasi/unit simpan pinjam koperasi yang mendapatkan pelayanan rekomendasi izin usaha simpan pinjam	%	-	4,88	4,88	-	-	29.900.000	-	32.200.000	-	32.900.000	-	34.100.000	-	129.100.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja		
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	%	-	20,38	21,14	75.000.000	-	74.800.000	-	80.300.000	-	82.100.000	-	85.200.000	-	397.400.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja		
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	persentase pengurus, pengawas dan pengelola koperasi yang mendapatkan diklat	%	-	6,27	6,27	400.800.000	-	299.700.000	-	321.900.000	-	328.900.000	-	341.400.000	-	1.692.700.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja		
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	persentase Koperasi aktif yang mendapatkan fasilitasi pembiayaan	%	-	38,46	40,65	-	-	99.700.000	-	107.100.000	-	109.400.000	-	113.500.000	-	429.700.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja		
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pemberdayaan	%	-	0,35	0,4	228.000.000	-	227.200.000	-	244.000.000	-	249.300.000	-	258.800.000	-	1.207.300.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja		
	Program Pengembangan						42.000.000	-	41.900.000	-	45.000.000	-	46.000.000	-	47.700.000	-	222.600.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil		

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	UMKM	Persentase usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha	%	44,40	49,05	49,10		49,2		49,30		49,40		49,50		49,50		Dan Menengah dan Tenaga Kerja		
2.12.	PENANAMAN MODAL						553.914.000		552.000.000		593.000.000		606.000.000		628.800.000		2.933.714.000			
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan jumlah investor	%	-	-	1,00	40.000.000	1,00	39.900.000	1,5	42.900.000	1,5	43.800.000	1,5	45.400.000	1,5	212.000.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase promosi di kab pekalongan	%	-	-	100	46.000.000	100	45.900.000	100	49.300.000	100	50.300.000	100	52.300.000	100	243.800.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Perusahaan yang melaporkan LKPM	%	-	-	100	326.327.000	100	325.100.000	100	349.200.000	100	356.900.000	100	370.400.000	100	1.727.927.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase ijin yang diterbitkan	%	-	-	100	127.587.000	100	127.100.000	100	136.600.000	100	139.600.000	100	144.800.000	100	675.687.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	persentase jenis pelayanan perijinan yang terintegrasi dalam sistem informasi	%	-	-	100	14.000.000	100	14.000.000	100	15.000.000	100	15.400.000	100	15.900.000	100	74.300.000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
2.13.	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						3.449.000.000		3.435.800.000		3.690.700.000		3.771.300.000		3.914.200.000		18.261.000.000			
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	NA	NA	2,87	475.000.000	2,67	473.200.000	2,78	508.300.000	2,78	519.400.000	2,89	539.100.000	2,89	2.515.000.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata		
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	NA	NA	1,81		1,81		1,85		1,85		1,89		1,89				
	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase kwartir ranting yang aktif	%			100	-	100	99.700.000	100	107.100.000	100	109.400.000	100	113.500.000	100	429.700.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata		
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase atlet berprestasi tingkat provinsi dan nasional (%)	%			35	2.974.000.000	40	2.862.900.000	46	3.075.300.000	50	3.142.500.000	53	3.261.600.000	53	15.316.300.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata		
2.14.	STATISTIK						70.000.000		69.800.000		75.000.000		76.600.000		79.500.000		370.900.000			
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%		100	100	70.000.000	100	69.800.000	100	75.000.000	100	76.600.000	100	79.500.000	100	370.900.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika		
2.15.	PERSANDIAN						65.000.000		64.800.000		69.600.000		71.100.000		73.800.000		344.300.000			
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk	Indeks KAMI	Nilai		I	I	65.000.000	I	64.800.000	II	69.600.000	II	71.100.000	II	73.800.000	II	344.300.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika		
2.16.	KEBUDAYAAN						240.000.000		239.300.000		257.300.000		262.800.000		272.500.000		1.271.900.000			
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	%			100	90.000.000	100	89.700.000	100	96.400.000	100	98.500.000	100	102.200.000	100	476.800.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan gelar seni budaya	%	84	85	86	50.000.000	87	39.900.000	88	42.900.000	89	43.800.000	90	45.400.000	90	222.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pelestarian Sejarah Lokal	%	100	100	100	50.000.000	100	39.900.000	100	42.900.000	100	43.800.000	100	45.400.000	100	222.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan cagar budaya yang dilestarikan	%			100	50.000.000	100	39.900.000	100	42.900.000	100	43.800.000	100	45.400.000	100	222.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Jumlah Pengunjung Museum	%				-		29.900.000		32.200.000		32.900.000		34.100.000		129.100.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
2.17.	PERPUSTAKAAN						25.000.000		25.000.000		26.900.000		27.500.000		28.500.000		132.900.000			
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase ketersediaan bahan pustaka	%			26,76	25.000.000	22,21	15.000.000	19,34	16.100.000	20,34	16.500.000	21,34	17.100.000	21,34	89.700.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
		Rasio Pengunjung Perpustakaan Per Tahun (Penduduk Usia 5 - 60 tahun)	%		0,56	0,56		0,57		0,57		0,57		0,57		0,57				

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	-	-	1	-	2	-	2	-	2	-	3	-	3	-	3		
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno						10.000.000				10.800.000			11.000.000		11.400.000		43.200.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		Persentase naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi) dibagi terdaftar yang ada di wilayahnya	%	-	-	-	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100	-	100		
2.18.	KEARSIPAN						54.000.000				53.900.000			58.000.000		59.200.000		61.400.000	286.500.000	
	Program Pengelolaan Arsip						44.000.000				33.900.000			36.400.000		37.200.000		38.600.000	190.100.000	
		Persentase OPD dengan nilai pengawasan Kearsipan kategori baik	%		20	25		30		35		40		45		45,00		45,00		
	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip						10.000.000				10.000.000			10.800.000		11.000.000		11.400.000	53.200.000	
		Persentase arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun yang dimusnahkan	%			11,24		12,67		14,50		16,96		20,43		20,43		20,43		
	Program Perizinan Penggunaan Arsip						-				10.000.000			10.800.000		11.000.000		11.400.000	43.200.000	
		Persentase layanan izin penggunaan arsip	%			100		100		100		100		100		100		100		
3.	URUSAN PILIHAN						10.982.816.000				10.941.700.000			11.753.600.000		12.009.900.000		12.464.800.000	58.152.816.000	
3.01.	KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.270.000.000				1.265.300.000			1.359.200.000		1.388.800.000		1.441.400.000	6.724.700.000	
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap						370.000.000				368.600.000			396.000.000		404.600.000		419.900.000	1.959.100.000	
		Produksi perikanan tangkap	ton	5.381,26	5.457,14	5.534,08		5.900,03		5.983,22		6.067,58		6.153,14		6.153,14		6.153,14		
		Produksi perikanan tangkap PUD	ton	276,07	279,96	283,91		-		-		-		-		-		-		
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya						875.000.000				821.800.000			882.800.000		902.100.000		936.300.000	4.418.000.000	
		Produksi perikanan budidaya	ton	8.425,15	8.425,15	8.593,65		8.765,52		9.028,49		9.485,33		9.769,89		9.769,89		9.769,89		
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan						-				49.900.000			53.600.000		54.700.000		56.800.000	215.000.000	
		Persentase Kelompok Masyarakat Pengawas yang dibina	%		25,00	50,00		62,50		75		87,50		100		100,00		100,00		
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan						25.000.000				25.000.000			26.800.000		27.400.000		28.400.000	132.600.000	
		Tingkat konsumsi ikan	kg/per kapita/tahun	23,50	24,2	24,68		25,17		25,67		26,18		26,70		26,70		26,70		
3.02.	PARIWISATA						2.202.000.000				2.193.700.000			2.356.500.000		2.407.900.000		2.499.200.000	11.659.300.000	
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata						2.132.000.000				1.892.700.000			2.033.100.000		2.077.500.000		2.156.300.000	10.291.600.000	
		Persentase Pertumbuhan destinasi wisata	%		-	3,33		6,67		10		10		10		10,00		10,00		
	Program Pemasaran Pariwisata						70.000.000				69.800.000			75.000.000		76.600.000		79.500.000	370.900.000	
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan nusantara	%		-	10		10		10		10		10		10,00		10,00		
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan						-				99.700.000			107.100.000		109.400.000		113.500.000	429.700.000	
		Persentase pelaku usaha ekonomi kreatif terbina	%		-	5		10		15		20		25		25		25		
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan						-				131.500.000			141.300.000		144.400.000		149.900.000	567.100.000	
		Persentase Pokdarwis Aktif	%	65,52	66,67	68,74		68,75		69,70		69,70		69,70		69,70		69,70		
3.03.	PERTANIAN						6.013.900.000				5.991.000.000			6.435.400.000		6.575.900.000		6.825.100.000	31.841.300.000	
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian						582.000.000				579.800.000			622.800.000		636.400.000		660.500.000	3.081.500.000	
		Pertumbuhan Produktivitas pertanian unggulan	%	0,3	0,4	0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4		0,4	2	
		Populasi ternak unggulan (sapi dan kambing)	ekor	73.762	73.912	74.062		74.212		74.362		74.512		74.662		74.662		74.662		
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian						4.684.000.000				4.566.300.000			4.905.100.000		5.012.200.000		5.202.200.000	24.369.800.000	
		Persentase pertumbuhan prasarana pertanian	ha			5		5		5		5		5		5		5		
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat						42.000.000				141.600.000			152.100.000		155.400.000		161.200.000	652.300.000	
		Persentase daging ASUH	%			100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	%			5		5		5		5		5		5		5		
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian						555.000.000				552.900.000			593.900.000		606.900.000		629.900.000	2.938.600.000	
		Persentase wilayah bebas bencana pertanian	%			50,00		55,00		60,00		65,00		70,00		70,00		70,00		

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase kelompok tani terbina	%			77,34	150.900.000	79,34	150.400.000	81,34	161.500.000	83,34	165.000.000	85,34	171.300.000	85,34	799.100.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		
3.04.	KEHUTANAN																			
3.05.	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL																			
3.06.	PERDAGANGAN						987.500.000		984.000.000		1.057.100.000		1.080.100.000		1.120.900.000		5.229.600.000			
	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	-	100	100	-	100	39.900.000	100	42.900.000	100	43.800.000	100	45.400.000	100	172.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pasar rakyat yang memenuhi persyaratan (layak)	%	-	75	83,33	340.000.000	85	298.900.000	88	321.100.000	90	328.100.000	100	340.500.000	100	1.628.600.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Agen dan Pasar Rakyat yang dipantau ketersediaan Bapokting	%	62,5	62,5	62,5	32.500.000	68,75	32.400.000	75	34.800.000	81,25	35.600.000	87,5	36.900.000	87,5	172.200.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan pelengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	39,12	79,98	69,23	90.000.000	70,64	89.700.000	71,35	96.400.000	72,20	98.500.000	72,85	102.200.000	72,85	476.800.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase pelaku usaha ekspor yang dibina	%	-	-	100	525.000.000	100	473.200.000	100	508.300.000	100	519.400.000	100	539.100.000	100	2.565.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha yang mendapatkan fasilitasi promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri	%	-	-	-	-	0,14	49.900.000	0,17	53.600.000	0,17	54.700.000	0,2	56.800.000	0,2	215.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3.07.	PERINDUSTRIAN						439.416.000		437.900.000		470.400.000		480.600.000		498.700.000		2.327.016.000			
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan nilai produksi IKM	%	0,14	0,15	0,16	359.416.000	0,17	358.100.000	0,18	384.600.000	0,19	393.000.000	0,2	407.900.000	0,2	1.903.016.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/ Kota	Persentase rekomendasi izin industri	%	100	100	100	40.000.000	100	39.900.000	100	42.900.000	100	43.800.000	100	45.400.000	100	212.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Sistem Informasi Industri Nasional terupdate	%	100	100	100	40.000.000	100	39.900.000	100	42.900.000	100	43.800.000	100	45.400.000	100	212.000.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		
3.08.	TRANSMIGRASI						70.000.000		69.800.000		75.000.000		76.600.000		79.500.000		370.900.000			
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase calon transmigran yang diberangkatkan	%			50	70.000.000	50	69.800.000	50	75.000.000	50	76.600.000	100	79.500.000	100	370.900.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja		
4.	UNSUR PENDUKUNG						35.137.683.600		35.001.700.000		37.598.800.000		38.419.900.000		39.876.700.000		186.034.783.600			
4.01.	SEKRETARIAT DAERAH						12.676.538.600		12.627.700.000		13.564.600.000		13.860.800.000		14.386.400.000		67.116.038.600			
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase laporan penyelenggaraan pemerintah terkait tata pemerintahan yang tersusun sesuai ketentuan	%			100	11.695.840.600	100	11.650.600.000	100	12.515.100.000	100	12.788.400.000	100	13.273.300.000	100	61.923.240.600	Sekretariat Daerah		
		Persentase permohonan kerja sama sesuai ketentuan yang difasilitasi	%			100		100		100		100	100	100	100	100				
		Persentase rancangan produk hukum daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan	%	73,43		100		100		100		100	100	100	100	100				
		Persentase Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	%	70,62		100		100		100		100	100	100	100	100				

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp		
				(5)	(6)	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	(17)	(18)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang difasilitasi	%	70,62		100		100		100				100			100		
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase laporan hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan ekonomi, SDA, BUMD dan BLUD yang tersusun	%	100	100	100	980.698.000	-	977.100.000	-	1.049.500.000	-	1.072.400.000	-	1.113.100.000		5.192.798.000		Sekretariat Daerah
		Persentase laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	%	100	100	100		100		100		100		100		100		100	
		Tingkat Kematangan UKPBJ	angka	3	7	8		9		9		9		9		9		9	
4.02.	SEKRETARIAT DPRD						22.461.145.000		22.374.000.000		24.034.200.000		24.559.100.000		25.490.300.000		118.918.745.000		
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase implementasi tugas dan kewajiban yang terselesaikan sesuai SOP	%	94		100	22.461.145.000	-	22.374.000.000	-	24.034.200.000	-	24.559.100.000	-	25.490.300.000		118.918.745.000		Sekretariat DPRD
5.	UNSUR PENUNJANG						400.604.557.622		402.080.044.769		428.552.615.078		437.913.946.405		454.476.523.678		2.123.627.687.553		
5.01.	PERENCANAAN						2.442.500.000		2.433.100.000		2.613.700.000		2.670.700.000		2.772.000.000		12.932.000.000		
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase capaian indikator kinerja pembangunan daerah	%			75	1.500.000.000	-	1.494.200.000	-	1.605.100.000	-	1.640.100.000	-	1.702.300.000		7.941.700.000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
		Persentase Program APBD selaras dengan RKPD	%			75			77		80		83		87				
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	88,63	83	85	942.500.000	-	938.900.000	-	1.008.600.000	-	1.030.600.000	-	1.069.700.000		4.990.300.000		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang perekonomian dan SDA	%			100			100		100		100		100		100		
		Persentase capaian kinerja RPJMD bidang infrastruktur dan kewilayahan	%			100			100		100		100		100		100		
5.02.	KEUANGAN						395.272.057.622		396.768.044.769		422.846.315.078		432.083.146.405		448.424.623.678		2.095.394.187.553		
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase perangkat daerah yang menyerahkan laporan keuangan tepat waktu	%	100		100	389.654.759.022	-	391.142.800.000	-	416.943.200.000	-	426.048.600.000	-	442.203.700.000		2.065.993.059.022		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD	%	100		100			100		100		100		100				
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase bidang tanah bersertifikat Pemkab Pekalongan	%	45		52,69	2.685.000.000	-	2.704.244.769	-	2.765.415.078	-	2.828.346.405	-	2.893.123.678		13.876.129.931		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
		Persentase aset yang dilakukan pengamanan fisik	%	5		10			15		20		25		30				
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan PAD	%	1,55		9	2.932.298.600	-	2.921.000.000	-	3.137.700.000	-	3.206.200.000	-	3.327.800.000		15.524.998.600		Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
5.03.	KEPEGAWAIAN						1.360.000.000		1.354.800.000		1.455.300.000		1.487.100.000		1.543.500.000		7.200.700.000		
	Program Kepegawaian Daerah						1.360.000.000	-	1.354.800.000	-	1.455.300.000	-	1.487.100.000	-	1.543.500.000		7.200.700.000		Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
		Persentase Layanan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian yang terpenuhi	%			100			100		100		100		100		100		
		Persentase Layanan Mutasi dan Promosi ASN yang terpenuhi	%			100			100		100		100		100		100		
		Persentase Layanan Pengembangan Kompetensi dan Penilaian Kinerja Aparatur yang terpenuhi	%			100			100		100		100		100		100		

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
5.04.	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						800.000.000		796.900.000		856.100.000		874.800.000		907.900.000		4.235.700.000			
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang dilakukan pengukuran dimensi dalam standar profesionalitas ASN (dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin)	%			100	800.000.000	-	796.900.000	-	856.100.000	-	874.800.000	-	907.900.000	-	4.235.700.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		
5.05.	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						730.000.000		727.200.000		781.200.000		798.200.000		828.500.000		3.865.100.000			
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%			30	730.000.000	-	727.200.000	-	781.200.000	-	798.200.000	-	828.500.000	-	3.865.100.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan		
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%			30		-		-		-		-		-				
6.	UNSUR PENGAWASAN						1.149.941.900		1.145.600.000		1.230.600.000		1.257.400.000		1.305.100.000		6.088.641.900			
6.01.	INSPEKTORAT						1.149.941.900		1.145.600.000		1.230.600.000		1.257.400.000		1.305.100.000		6.088.641.900			
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase temuan yang selesai ditindaklanjuti	%	93,07		90,33	927.839.000	-	924.300.000	-	992.900.000	-	1.014.500.000	-	1.053.000.000	-	4.912.539.000	Inspektorat		
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level maturitas SPIP	Level (Scor)	3 (3,0)	3 (3,1)	3 (3,1)	222.102.900	-	221.300.000	-	237.700.000	-	242.900.000	-	252.100.000	-	1.176.102.900	Inspektorat		
7.	UNSUR KEWILAYAHAN						10.670.559.050		10.624.452.700		11.413.000.820		11.661.230.590		12.102.878.620		56.472.121.780			
7.01.	KECAMATAN						10.670.559.050		10.624.452.700		11.413.000.820		11.661.230.590		12.102.878.620		56.472.121.780			
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik						17.500.000	-	17.500.000	-	18.800.000	-	19.200.000	-	19.900.000	-	92.900.000	Kecamatan Kajen		
							55.090.000	-	54.900.000	-	59.000.000	-	60.300.000	-	62.600.000	-	291.890.000	Kecamatan Sragi		
							100.000.000	-	99.700.000	-	107.100.000	-	109.400.000	-	113.500.000	-	529.700.000	Kecamatan Wiradesa		
							58.342.600	-	58.200.000	-	62.500.000	-	63.800.000	-	66.300.000	-	309.142.600	Kecamatan Kedungwuni		
							41.489.000	-	41.400.000	-	44.400.000	-	45.400.000	-	47.100.000	-	219.789.000	Kecamatan Buaran		
							32.000.000	-	31.900.000	-	34.300.000	-	35.000.000	-	36.400.000	-	169.600.000	Kecamatan Tirto		
							45.000.000	-	44.900.000	-	48.200.000	-	49.300.000	-	51.100.000	-	238.500.000	Kecamatan Bojong		
							35.000.000	-	34.900.000	-	37.500.000	-	38.300.000	-	39.800.000	-	185.500.000	Kecamatan Wonopringgo		
							10.000.000	-	10.000.000	-	11.000.000	-	11.400.000	-	11.400.000	-	53.200.000	Kecamatan Karanganyar		
							24.317.100	-	24.300.000	-	26.100.000	-	26.600.000	-	27.600.000	-	128.917.100	Kecamatan Doro		
							15.349.000	-	15.300.000	-	16.500.000	-	16.800.000	-	17.500.000	-	81.449.000	Kecamatan Talun		
							15.000.000	-	15.000.000	-	16.100.000	-	16.500.000	-	17.100.000	-	79.700.000	Kecamatan Lebakbarang		
							16.500.000	-	16.500.000	-	17.700.000	-	18.100.000	-	18.800.000	-	87.600.000	Kecamatan Kandangserang		
							19.000.000	-	19.000.000	-	20.400.000	-	20.800.000	-	21.600.000	-	100.800.000	Kecamatan Pannggaran		
							16.980.700	-	17.000.000	-	18.200.000	-	18.600.000	-	19.300.000	-	90.080.700	Kecamatan Kesesi		
							35.000.000	-	34.900.000	-	37.500.000	-	38.300.000	-	39.800.000	-	185.500.000	Kecamatan Petungkriyono		
							57.000.000	-	56.800.000	-	61.000.000	-	62.400.000	-	64.700.000	-	301.900.000	Kecamatan Wonokerto		
							17.362.000	-	17.300.000	-	18.600.000	-	19.000.000	-	19.800.000	-	92.062.000	Kecamatan Sivalan		
							45.353.000	-	45.200.000	-	48.600.000	-	49.600.000	-	51.500.000	-	240.253.000	Kecamatan Karangdadap		
		Persentase jenis layanan di Kecamatan yang sudah menerapkan SOP tetap	%	100	100	100		-		-		-		-		-		19 Kecamatan		
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan						561.203.000	-	559.100.000	-	600.600.000	-	613.700.000	-	636.900.000	-	2.971.503.000	Kecamatan Kajen		
							585.000.000	-	582.800.000	-	626.000.000	-	639.700.000	-	663.900.000	-	3.097.400.000	Kecamatan Sragi		
							2.565.000.000	-	2.555.100.000	-	2.744.700.000	-	2.804.600.000	-	2.911.000.000	-	13.580.400.000	Kecamatan Wiradesa		
							1.553.478.200	-	1.547.500.000	-	1.662.300.000	-	1.698.600.000	-	1.763.000.000	-	8.224.878.200	Kecamatan Kedungwuni		
							1.536.200.200	-	1.530.300.000	-	1.643.800.000	-	1.679.700.000	-	1.743.400.200	-	8.133.400.200	Kecamatan Buaran		
							175.000.000	-	174.400.000	-	187.300.000	-	191.400.000	-	198.700.000	-	926.800.000	Kecamatan Tirto		
							50.000.000	-	49.900.000	-	53.600.000	-	54.700.000	-	56.800.000	-	265.000.000	Kecamatan Bojong		
							30.000.000	-	29.900.000	-	32.200.000	-	32.900.000	-	34.100.000	-	159.100.000	Kecamatan Wonopringgo		
							74.176.900	-	73.900.000	-	79.400.000	-	81.200.000	-	84.200.000	-	392.876.900	Kecamatan Karanganyar		
							39.808.650	-	39.700.000	-	42.600.000	-	43.600.000	-	45.200.000	-	210.908.650	Kecamatan Doro		
							39.092.000	-	39.000.000	-	41.900.000	-	42.800.000	-	44.400.000	-	207.192.000	Kecamatan Talun		
							43.557.400	-	43.400.000	-	46.700.000	-	47.700.000	-	49.500.000	-	230.857.400	Kecamatan Lebakbarang		
							40.600.000	-	40.500.000	-	43.500.000	-	44.400.000	-	46.100.000	-	215.100.000	Kecamatan Kandangserang		
							31.500.000	-	31.400.000	-	33.800.000	-	34.500.000	-	35.800.000	-	167.000.000	Kecamatan Pannggaran		
							41.907.400	-	41.800.000	-	44.900.000	-	45.900.000	-	47.600.000	-	222.107.400	Kecamatan Kesesi		
							38.000.000	-	37.900.000	-	40.700.000	-	41.600.000	-	43.200.000	-	201.400.000	Kecamatan Petungkriyono		
							15.900.000	-	15.900.000	-	16.100.000	-	16.500.000	-	17.100.000	-	79.700.000	Kecamatan Wonokerto		
							49.742.000	-	49.600.000	-	53.300.000	-	54.400.000	-	56.500.000	-	263.542.000	Kecamatan Sivalan		
							25.960.000	-	25.900.000	-	27.800.000	-	28.400.000	-	29.500.000	-	137.560.000	Kecamatan Karangdadap		
		Persentase lembaga masyarakat aktif	%	100	100	100		-		-		-		-		-		19 Kecamatan		
	Program Koordinasi Ketentrman Dan Ketertiban Umum						23.304.000	-	21.871.700	-	23.463.820	-	23.897.590	-	24.814.620	-	117.351.730	Kecamatan Kajen		
							20.000.000	-	18.780.000	-	20.193.000	-	20.534.000	-	21.275.000	-	100.782.000	Kecamatan Sragi		
							25.000.000	-	23.475.000	-	25.170.000	-	25.691.000	-	26.618.000	-	125.954.000	Kecamatan Wiradesa		
							27.200.000	-	25.229.000	-	27.424.000	-	27.942.000	-	28.961.000	-	136.756.000	Kecamatan Kedungwuni		

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							11.972.600	-	11.268.000	-	12.116.000	-	12.283.000	-	12.747.000		60.386.600	Kecamatan Buaran
							25.000.000	-	23.475.000	-	25.170.000	-	25.691.000	-	26.618.000		125.954.000	Kecamatan Tirto
							25.000.000	-	23.475.000	-	25.170.000	-	25.691.000	-	26.618.000		125.954.000	Kecamatan Bojong
							20.000.000	-	18.780.000	-	20.193.000	-	20.534.000	-	21.275.000		100.782.000	Kecamatan Wonopringgo
							24.998.000	-	23.475.000	-	25.170.000	-	25.691.000	-	26.618.000		125.952.000	Kecamatan Karanganyar
							17.523.000	-	16.433.000	-	17.658.000	-	18.003.000	-	18.652.000		88.269.000	Kecamatan Doro
							11.863.100	-	11.175.000	-	11.928.000	-	12.189.000	-	12.654.000		59.809.100	Kecamatan Talun
							16.176.000	-	15.212.000	-	16.342.000	-	16.596.000	-	17.246.000		81.572.000	Kecamatan Lebakbarang
							12.000.000	-	11.268.000	-	12.116.000	-	12.377.000	-	12.840.000		60.601.000	Kecamatan Kandangserang
							12.500.000	-	11.738.000	-	12.585.000	-	12.846.000	-	13.310.000		62.979.000	Kecamatan Pannggaran
							14.152.000	-	13.240.000	-	14.276.000	-	14.534.000	-	15.090.000		71.292.000	Kecamatan Kesesi
							15.000.000	-	14.085.000	-	15.121.000	-	15.471.000	-	16.027.000		75.704.000	Kecamatan Petungkriyono
							-	-	10.000.000	-	10.500.000	-	11.000.000	-	11.500.000		43.000.000	Kecamatan Wonokerto
							10.190.000	-	9.578.000	-	10.332.000	-	10.502.000	-	10.872.000		51.474.000	Kecamatan Siwalan
							4.990.000	-	4.695.000	-	5.073.000	-	5.158.000	-	5.343.000		25.259.000	Kecamatan Karangdadap
		Persentase Pengaduan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat Kecamatan yang diselesaikan	%	100	100	100			100		100		100		100		100	19 Kecamatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						-	-	15.000.000	-	15.200.000	-	15.400.000	-	15.800.000		61.400.000	Kecamatan Kajen
							15.000.000	-	14.139.000	-	15.229.000	-	15.616.000	-	16.192.000		76.176.000	Kecamatan Sragi
							20.000.000	-	18.852.000	-	20.337.000	-	20.727.000	-	21.495.000		101.411.000	Kecamatan Wiradesa
							10.085.400	-	9.521.000	-	10.216.000	-	10.506.000	-	10.890.000		51.218.400	Kecamatan Kedungwuni
							25.764.100	-	24.225.000	-	26.107.000	-	26.689.000	-	27.745.000		130.530.100	Kecamatan Buaran
							15.000.000	-	14.139.000	-	15.229.000	-	15.616.000	-	16.192.000		76.176.000	Kecamatan Tirto
							15.000.000	-	14.139.000	-	15.229.000	-	15.616.000	-	16.192.000		76.176.000	Kecamatan Bojong
							15.000.000	-	14.139.000	-	15.229.000	-	15.616.000	-	16.192.000		76.176.000	Kecamatan Wonopringgo
							14.996.500	-	14.139.000	-	15.229.000	-	15.521.000	-	16.192.000		76.077.500	Kecamatan Karanganyar
							13.280.000	-	12.537.000	-	13.527.000	-	13.818.000	-	14.299.000		67.461.000	Kecamatan Doro
							25.300.000	-	23.848.000	-	25.634.000	-	26.216.000	-	27.271.000		128.269.000	Kecamatan Talun
							12.011.300	-	11.312.000	-	12.203.000	-	12.493.000	-	12.973.000		60.992.300	Kecamatan Lebakbarang
							10.000.000	-	9.426.000	-	10.216.000	-	10.411.000	-	10.795.000		50.848.000	Kecamatan Kandangserang
							14.000.000	-	13.197.000	-	14.189.000	-	14.575.000	-	15.056.000		71.017.000	Kecamatan Pannggaran
							5.000.000	-	4.713.000	-	5.108.000	-	5.206.000	-	5.398.000		25.425.000	Kecamatan Kesesi
							10.000.000	-	9.426.000	-	10.216.000	-	10.411.000	-	10.795.000		50.848.000	Kecamatan Petungkriyono
							15.000.000	-	14.139.000	-	15.229.000	-	15.616.000	-	16.192.000		76.176.000	Kecamatan Wonokerto
							10.130.000	-	9.521.000	-	10.311.000	-	10.506.000	-	10.890.000		51.358.000	Kecamatan Siwalan
							16.000.000	-	15.088.000	-	16.262.000	-	16.541.000	-	17.241.000		81.132.000	Kecamatan Karangdadap
		Persentase kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100			100		100		100		100		100	19 Kecamatan
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa						95.000.000	-	94.700.000	-	101.700.000	-	103.900.000	-	107.900.000		503.200.000	Kecamatan Kajen
							94.000.000	-	93.700.000	-	100.600.000	-	102.800.000	-	106.700.000		497.800.000	Kecamatan Sragi
							115.000.000	-	114.600.000	-	123.100.000	-	125.800.000	-	130.600.000		609.100.000	Kecamatan Wiradesa
							111.228.800	-	110.800.000	-	119.100.000	-	121.700.000	-	126.300.000		589.128.800	Kecamatan Kedungwuni
							99.713.900	-	99.400.000	-	106.700.000	-	109.100.000	-	113.200.000		528.113.900	Kecamatan Buaran
							125.000.000	-	124.600.000	-	133.800.000	-	136.700.000	-	141.900.000		662.000.000	Kecamatan Tirto
							110.000.000	-	109.600.000	-	117.800.000	-	120.300.000	-	124.900.000		582.600.000	Kecamatan Bojong
							110.000.000	-	109.600.000	-	117.800.000	-	120.300.000	-	124.900.000		582.600.000	Kecamatan Wonopringgo
							120.000.000	-	119.600.000	-	128.500.000	-	131.300.000	-	136.200.000		635.600.000	Kecamatan Karanganyar
							97.372.700	-	97.000.000	-	104.200.000	-	106.500.000	-	110.600.000		515.672.700	Kecamatan Doro
							90.995.000	-	90.700.000	-	97.400.000	-	99.500.000	-	103.300.000		481.895.000	Kecamatan Talun
							93.338.500	-	93.000.000	-	99.900.000	-	102.100.000	-	106.000.000		494.338.500	Kecamatan Lebakbarang
							99.000.000	-	98.700.000	-	106.000.000	-	108.300.000	-	112.400.000		524.400.000	Kecamatan Kandangserang
							85.000.000	-	84.700.000	-	91.000.000	-	93.000.000	-	96.500.000		450.200.000	Kecamatan Pannggaran
							97.500.000	-	97.300.000	-	104.500.000	-	106.800.000	-	110.800.000		517.000.000	Kecamatan Kesesi
							105.000.000	-	104.600.000	-	112.400.000	-	114.900.000	-	119.200.000		556.100.000	Kecamatan Petungkriyono
							110.000.000	-	109.600.000	-	117.800.000	-	120.300.000	-	124.900.000		582.600.000	Kecamatan Wonokerto
							96.365.000	-	96.000.000	-	103.200.000	-	105.400.000	-	109.400.000		510.365.000	Kecamatan Siwalan
							86.000.000	-	85.700.000	-	92.100.000	-	94.100.000	-	97.600.000		455.500.000	Kecamatan Karangdadap
		Persentase desa dengan tertib administrasi	%	100	100	100			100		100		100		100		100	19 Kecamatan
8.	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						2.484.292.100		12.474.900.000		62.658.600.000		2.716.600.000		2.819.600.000		83.153.992.100	
8.01.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						2.484.292.100		12.474.900.000		62.658.600.000		2.716.600.000		2.819.600.000		83.153.992.100	
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan						150.000.000	-	149.500.000	-	160.600.000	-	164.100.000	-	170.300.000		794.500.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase masyarakat yang memperoleh Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan	%	23	6	22,89			32,89		43,11		53,11		63,11		63,11	
	Program Peningkatan Peran						1.497.292.100	-	11.491.500.000	-	61.602.200.000	-	1.637.200.000	-	1.699.300.000		77.927.492.100	Badan Kesatuan Bangsa dan

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran												Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp			
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Berpolitik	Persentase masyarakat yang mengikuti pendidikan Politik dan pengembangan Etika Budaya Berpolitik	%	30	11,25	22,5		33,75		45		56,25		67,5		67,5		Politik		
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg diberdayakan dan mendapatkan pengawasan	%	7,87	11,81	23,62	415.000.000	-	413.400.000	-	47,24	444.100.000	-	59,06	453.800.000	-	71,43	471.000.000	2.197.300.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Bangsa	Persentase masyarakat yang memperoleh pembinaan dan pengembangan Ketahanan Bangsa	%	0	3	6	42.000.000	-	41.900.000	-	9	45.000.000	-	12	46.000.000	-	15	47.700.000	222.600.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik	Persentase penanganan konflik sosial di kabupaten Pekalongan	%	100	100	100	380.000.000	-	378.600.000	-	100	406.700.000	-	100	415.500.000	-	100	431.300.000	2.012.100.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9.	NON URUSAN						1.224.343.575.788		1.267.530.394.997		1.295.136.479.203		1.338.767.819.237		1.389.946.306.760		6.515.724.575.985			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						533.252.663.787	-	558.148.113.059	-	-	560.697.879.203	-	-	583.161.219.236	-	-	605.688.906.760	2.840.948.782.045	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
							402.773.781.747	-	422.210.900.000	-	-	425.981.000.000	-	-	440.392.900.000	-	-	457.092.000.000	2.148.450.581.747	Dinas Kesehatan / RSUD Kraton / RSUD Kajen / RSUD Kesesi
							20.379.217.000	-	20.300.200.000	-	-	21.806.500.000	-	-	22.282.700.000	-	-	23.127.600.000	107.896.217.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							19.918.864.800	-	19.841.600.000	-	-	21.313.900.000	-	-	21.779.300.000	-	-	22.605.200.000	105.458.864.800	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Perumahan dan Lingkungan Hidup
							7.228.868.000	-	7.200.900.000	-	-	7.735.200.000	-	-	7.904.100.000	-	-	8.203.800.000	38.272.868.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
							1.943.857.000	-	1.936.400.000	-	-	2.080.000.000	-	-	2.125.500.000	-	-	2.206.100.000	10.291.857.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							3.689.375.000	-	3.675.100.000	-	-	3.947.800.000	-	-	4.034.000.000	-	-	4.187.000.000	19.533.275.000	Dinas Sosial
							3.163.795.000	-	3.151.600.000	-	-	3.385.400.000	-	-	3.459.300.000	-	-	3.590.500.000	16.750.595.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
							13.169.898.000	-	13.118.800.000	-	-	14.092.300.000	-	-	14.400.000.000	-	-	14.946.000.000	69.726.998.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
							6.271.735.000	-	6.227.500.000	-	-	6.689.600.000	-	-	6.835.700.000	-	-	7.094.900.000	33.119.435.000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
							3.237.553.000	-	3.225.000.000	-	-	3.464.300.000	-	-	3.540.000.000	-	-	3.674.200.000	17.141.053.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
							5.767.753.000	-	5.745.400.000	-	-	6.171.700.000	-	-	6.306.500.000	-	-	6.545.600.000	30.536.953.000	Dinas Perhubungan
							5.112.271.000	-	5.092.500.000	-	-	5.470.300.000	-	-	5.589.800.000	-	-	5.801.800.000	27.066.671.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
							4.970.989.000	-	4.921.900.000	-	-	5.287.100.000	-	-	5.402.500.000	-	-	5.607.400.000	26.189.889.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja
							3.536.469.600	-	3.522.800.000	-	-	3.784.200.000	-	-	3.866.800.000	-	-	4.013.400.000	18.723.669.600	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							4.927.838.000	-	4.908.800.000	-	-	5.273.000.000	-	-	5.388.100.000	-	-	5.592.500.000	26.090.238.000	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
							3.552.368.000	-	3.538.600.000	-	-	3.801.200.000	-	-	3.884.200.000	-	-	4.031.500.000	18.807.868.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
							3.476.394.000	-	3.463.000.000	-	-	3.719.900.000	-	-	3.801.100.000	-	-	3.945.300.000	18.405.694.000	Dinas Kelautan Dan Perikanan
							8.876.600.520	-	8.842.200.000	-	-	9.498.300.000	-	-	9.705.800.000	-	-	10.073.800.000	46.996.700.520	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
							28.214.904.000	-	28.105.700.000	-	-	30.191.200.000	-	-	30.850.500.000	-	-	32.020.300.000	149.382.604.000	Sekretariat Daerah
							36.365.649.000	-	36.224.600.000	-	-	38.912.500.000	-	-	39.762.300.000	-	-	41.270.000.000	192.535.049.000	Sekretariat DPRD
							5.787.160.800	-	5.764.800.000	-	-	6.192.500.000	-	-	6.347.700.001	-	-	6.587.700.000	30.679.860.801	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
							37.450.540.000	-	37.305.300.000	-	-	40.073.300.000	-	-	40.948.500.000	-	-	42.501.200.000	198.278.840.000	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
							4.177.187.500	-	4.161.000.000	-	-	4.469.800.000	-	-	4.567.400.000	-	-	4.740.600.000	22.115.987.500	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
							6.673.064.088	-	6.647.200.000	-	-	7.140.400.000	-	-	7.296.400.000	-	-	7.573.000.000	35.330.064.088	Inspektoral
							2.990.488.400	-	2.978.900.000	-	-	3.200.000.000	-	-	3.269.800.000	-	-	3.393.800.000	15.832.988.400	Kecamatan Kajen
							3.099.532.300	-	3.087.600.000	-	-	3.316.600.000	-	-	3.389.100.000	-	-	3.517.600.000	16.410.432.300	Kecamatan Sragi
							5.170.496.496	-	5.150.500.000	-	-	5.532.600.000	-	-	5.653.500.000	-	-	5.867.800.000	27.374.896.496	Kecamatan Wiradesa

Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Target Kinerja Program dan Anggaran										Target akhir Periode RPJMD 2021-2026		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				2020	2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
							4.676.541.000	-	4.658.400.000	-	5.004.100.000	-	5.113.400.000	-	5.307.300.000		24.759.741.000	Kecamatan Kedungwuni
							3.413.278.400	-	3.400.100.000	-	3.652.400.000	-	3.732.100.000	-	3.873.600.000		18.071.478.400	Kecamatan Buaran
							2.087.969.000	-	2.079.900.000	-	2.234.200.000	-	2.283.000.000	-	2.369.600.000		11.054.669.000	Kecamatan Tirto
							2.581.060.900	-	2.571.100.000	-	2.761.900.000	-	2.822.200.000	-	2.929.200.000		13.665.460.900	Kecamatan Bojong
							1.994.935.000	-	1.987.200.000	-	2.134.700.000	-	2.181.300.000	-	2.264.000.000		10.562.135.000	Kecamatan Wonopringgo
							1.994.539.200	-	1.986.800.000	-	2.134.300.000	-	2.180.900.000	-	2.263.600.000		10.560.139.200	Kecamatan Karanganyar
							1.994.601.850	-	1.986.900.000	-	2.134.300.000	-	2.180.900.000	-	2.263.600.000		10.560.301.850	Kecamatan Doro
							1.739.811.000	-	1.733.100.000	-	1.861.700.000	-	1.902.400.000	-	1.974.500.000		9.211.511.000	Kecamatan Tahun
							1.641.428.700	-	1.635.100.000	-	1.756.400.000	-	1.794.800.000	-	1.862.800.000		8.690.528.700	Kecamatan Lebakbarang
							1.822.566.000	-	1.815.500.000	-	1.950.300.000	-	1.992.800.000	-	2.068.400.000		9.649.566.000	Kecamatan Kandangserang
							1.985.964.000	-	1.978.300.000	-	2.125.100.000	-	2.171.500.000	-	2.253.800.000		10.514.664.000	Kecamatan Paninggaran
							2.542.804.200	-	2.533.000.000	-	2.720.900.000	-	2.780.400.000	-	2.885.800.000		13.462.904.200	Kecamatan Kesesi
							1.751.815.000	-	1.745.100.000	-	1.874.500.000	-	1.915.500.000	-	1.988.100.000		9.275.015.000	Kecamatan Petungkriyono
							1.929.669.100	-	1.922.200.000	-	2.064.900.000	-	2.110.000.000	-	2.190.000.000		10.216.769.100	Kecamatan Wanokerto
							2.312.459.400	-	2.303.500.000	-	2.474.500.000	-	2.528.500.000	-	2.624.400.000		12.243.359.400	Kecamatan Siwalan
							1.734.341.000	-	1.727.700.000	-	1.855.900.000	-	1.896.400.000	-	1.968.300.000		9.182.641.000	Kecamatan Karangdadap
							2.960.478.000	-	2.969.581.938	-	3.167.900.000	-	3.237.000.000	-	3.359.800.000		15.694.759.938	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase ketersediaan laporan capaian kinerja	%			100		100		100		100		100		100		Seluruh Perangkat Daerah
		Persentase ketersediaan layanan administrasi kepegawaian, administrasi umum dan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%			100		100		100		100		100		100		
		Persentase pengadaan / pemeliharaan barang milik daerah	%			100		100		100		100		100		100		
T O T A L							2.122.675.704.560		2.184.438.992.467		2.311.331.295.101		2.320.933.596.232		2.408.940.251.079		11.348.319.839.438	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah disusun untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. **Indikator Kinerja Utama (IKU)** merupakan indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran RPJMD. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026.

Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten sesuai dengan kewenangan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Penetapan **Indikator Kinerja Utama (IKU)** Kabupaten Pekalongan dan **Indikator Kinerja Daerah (IKD)** Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Indikator Tujuan dan/atau Sasaran Daerah												
1.	Rata-rata capaian penurunan konflik dan pelanggaran ketertiban umum	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan ditambah persentase penegakkan perda dibagi 2	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dari kemen PAN RB	Indeks	B (64,60)	B (66,60)	B (66,00)	B (70,00)	B (71,00)	BB (73,00)	BB (74,00)	BB (74,00)	Sekretariat Daerah
3.	Pertumbuhan Ekonomi	(PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK tahun sebelumnya dikali 100	%	-1,89	1,50	3,24	4,35	4,56	4,88	5,30	5,30	Sekretariat Daerah
4.	PDRB perkapita	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$	Juta Rp	25,25	25,50	25,75	26,00	26,25	26,50	26,75	26,75	Sekretariat Daerah
5.	Angka Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk dikali 100	%	10,19	10,57	9,97	9,61	9,27	8,94	8,63	8,63	Sekretariat Daerah
6.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) *	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	%	6,97	4,28	4,10	4,00	3,90	3,80	3,70	3,70	Sekretariat Daerah
7.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{\text{keehatan} \times \text{pendidikan} \times \text{penghasilan}} \times 100$	Indeks	69,63	70,11	70,32	70,71	71,08	71,43	71,79	71,79	Sekretariat Daerah
8.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPM perempuan dibagi IPM Laki-laki dikali 100	Indeks	92,48	92,55	92,61	92,74	92,87	93,00	93,13	93,13	Sekretariat Daerah
9.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	$IPK = \sum_{j=1}^n (W_j * Indeks D_j)$ Keterangan : IPK adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan Dj adalah Dimensi ke-j Wj adalah Bobot Dimensi ke-j	Indeks	-	-	67,05	67,75	68,45	69,15	69,85	69,85	Sekretariat Daerah

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Target Kinerja					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
10.	Tingkat Pembangunan Infrastruktur	Rata-rata dari 8 indikator infrastruktur (Persentase rumah layak huni; Persentase kawasan perkotaan non kumuh; Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman; Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak dan aman; Persentase jalan mantap; Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; dan Persentase sarana perhubungan kondisi baik)	%	86,30	86,40	86,45	86,50	86,55	86,60	86,65	86,70	Sekretariat Daerah
11.	Indeks Ketahanan Daerah	Penilaian indeks ketahanan daerah (71 indikator) dari BNPB	Indeks	-	-	0,48	0,51	0,53	0,55	0,60	0,60	Sekretariat Daerah

Keterangan : Indikator Sasaran Daerah

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD)
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT												
Indikator Tujuan Daerah												
1.	Pertumbuhan Ekonomi	(PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK tahun sebelumnya x 100	%	-1,89	1,50	3,24	4,35	4,56	4,88	5,30	5,30	Sekretariat Daerah
2.	PDRB Perkapita	$\frac{\text{PDRB}}{\text{Penduduk Pertengahan tahun}}$	Juta Rp	25,25	25,50	25,75	26,00	26,25	26,50	26,75	26,75	Sekretariat Daerah
3.	Angka Kemiskinan	Jumlah Penduduk Miskin dibagi Jumlah Penduduk x 100 %	%	10,19	9,97	9,61	9,27	8,94	8,63	8,32	8,32	Sekretariat Daerah
4.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{\frac{1}{3} \left(\frac{1}{pendapatan} + \frac{1}{pendidikan} + \frac{1}{panjang umur} \right)} \times 100$	Indeks	69.63	69.92	70.32	70.71	71.08	71.43	71.79	71.79	Sekretariat Daerah
5.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	IPM perempuan dibagi IPM Laki-laki x 100	Indeks	92,48	92,55	92,61	92,74	92,87	93,00	93,13	93,13	Sekretariat Daerah
6.	Tingkat Pembangunan Infrastruktur	Rata-rata dari 8 indikator infrastruktur (Persentase rumah layak huni; Persentase kawasan perkotaan non kumuh; Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman; Persentase Penduduk mengakses air limbah;	%	86,30	86,40	86,45	86,50	86,55	86,60	86,65	86,70	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Persentase jalan mantap; Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; dan Persentase sarana perhubungan kondisi baik)										
Indikator Sasaran Daerah												
7.	Kontribusi sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan terhadap PDRB ADHK	Jumlah kontribusi sektor Pertanian, Perikanan, Kehutanan terhadap PDRB ADHK dibagi jumlah PDRB ADHK x 100%	%	15,05	15,23	15,48	15,67	15,73	15,86	15,93	15,93	Sekretariat Daerah
8.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK	Jumlah kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHK dibagi jumlah PDRB ADHK xi 100%	%	14,90	14,93	14,95	15,00	15,05	15,10	15,15	15,15	Sekretariat Daerah
9.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK sektor Industri Pengolahan	Jumlah kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB ADHK dibagi jumlah PDRB ADHK x 100%	%	30,84	30,87	30,95	31,15	31,25	31,36	31,54	31,54	Sekretariat Daerah
10.	Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK	Jumlah kontribusi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terhadap PDRB ADHK dibagi jumlah PDRB ADHK x 100%	%	5,54	5,55	5,56	5,57	5,58	5,59	5,60	5,60	Sekretariat Daerah
11.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	$\frac{\text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	%	6,97	5,80	5,74	5,58	5,32	4,96	4,50	4,50	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
12.	Persentase Penanganan Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Jumlah PPKS yang ditangani dibagi jumlah Total PPKS x 100 %	%	-	-	0,12	0,25	0,37	0,49	0,59	0,59	Sekretariat Daerah
13.	Rata-Rata Lama Sekolah	$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana: RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas n = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas xi = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun ke atas</p>	Tahun	6,91	7,17	7,25	7,50	7,75	8,00	8,25	8,25	Sekretariat Daerah
14.	Harapan Lama Sekolah	$HLS_{\alpha}^t = FK \times \sum_{i=\alpha}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ <p>dimana: HLS_α^t = Harapan Lama Sekolah pada umur α di tahun t E^t = Jumlah penduduk usia i yang berselaku pada tahun t i = Usia (α, α + 1, ... n)</p>	Tahun	12,41	12,42	12,43	12,44	12,45	12,46	12,47	12,47	Sekretariat Daerah
15.	Umur Harapan Hidup (UHH)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	73,69	73,74	73,80	73,85	73,90	73,95	74,00	74,00	Sekretariat Daerah
16.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	IDJ = 1/3 [(I par + I Dm + I inc-dis)]; I par = Indeks keterwakilan di Parlemen I Dm = Indeks pengambilan keputusan I inc-dis = Indeks distribusi pendapatan	Indeks	71,68	71,75	71,85	72,25	72,45	72,65	72,75	72,85	Sekretariat Daerah
17.	Kategori Kabupaten Layak Anak	Hasil Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kategori	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Madya	Sekretariat Daerah
18.	Persentase pemenuhan air minum dan air limbah domestik	Persentase penduduk mengakses air minum layak dan aman ditambah persentase penduduk mengakses air	%	65,50	68,46	70,97	73,97	76,47	77,47	78,47	78,47	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		limbah domestik dibagi 2										
19.	Rasio Rumah Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni dibagi Jumlah Penduduk	%	93,00	93,66	94,00	94,40	94,80	94,90	95,30	95,30	Sekretariat Daerah
B. ASPEK PELAYANAN UMUM												
Indikator Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah (IKU PD) yang bukan merupakan IKU Daerah												
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Urusan Pendidikan												
20.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar, PAUD usia 5-6 tahun dan Kesetaraan	Rata-Rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar, PAUD usia 5-6 tahun dan Kesetaraan dibagi 3	%	88,49	88,49	89,19	89,83	90,46	91,10	91,73	91,73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
21.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI	Jumlah Penduduk usia 7 - 12 yang masih bersekolah di bagi jumlah penduduk 6-12 tahun x 100%	%	99,60	99,60	99,68	99,76	99,84	99,92	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
22.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs	Jumlah Penduduk usia 13 - 15 yang masih bersekolah di bagi jumlah penduduk 13-15 tahun x 100%	%	94,85	94,85	95,88	96,91	97,94	98,97	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
23.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD usia 5-6 tahun	Jumlah Penduduk usia 5-6 yang masih bersekolah di bagi jumlah penduduk 5-6 tahun x 100%	%	71,02	71,02	72,00	72,80	73,60	74,40	75,20	75,20	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
24.	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Penduduk usia 7-12 yang masih bersekolah di Pendidikan kesetaraan di bagi	%	4,32	4,32	4,72	5,12	5,52	5,92	6,32	6,32	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		jumlah penduduk 7 - 18 tahun yang belum bersekolah X 100%										
Urusan Kesehatan												
25.	Indek Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga Sehat dibagi jumlah seluruh keluarga yang sudah terdata (IKS: Lebih dari 0,800 Kategori Sehat, 0,500-0,800 Kategori Pra Sehat, Kurang dari 0,500 Tidak Sehat) PMK 39 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Indonesia Sehat	Indeks	0,14	0,30	0,80	0,80	0,81	0,82	0,83	0,83	Dinas Kesehatan
26.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jumlah kematian maternal di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah dalam 1 tahun x 100.000 KLH	Angka	66,43	65,00	64,00	63,00	62,00	61,00	60,00	60,00	Dinas Kesehatan
27.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jumlah kematian bayi di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup di suatu wilayah x 1.000 KLH	Angka	6,47	9,50	9,20	9,00	8,50	8,00	7,80	7,80	Dinas Kesehatan
28.	Prevalensi Stunting pada Balita	Jumlah Stunting pada Balita pada kurun waktu 1 tahun dibagi jumlah Balita pada Tahun yang sama x 100%	%	15,81	13,48	12,50	12,00	11,50	11,00	10,00	10,00	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
29.	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Persentase Keberhasilan Pengobatan Pasien TB (Succses Rate)	%	90,00	90,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00	95,00	Dinas Kesehatan
30.	Persentase pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular	Persentase Pelayanan Hipertensi Mencapai 100% setiap Tahunnya	%	58,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
31.	Persentase Fasyankes (Rumas Sakit dan Puskesmas) yang terakreditasi	Jumlah Fasyankes tang terakreditasi dibagi jumlah Fasyankes keseluruhan x 100%	%	89,66	89,66	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
32.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bidang Kesehatan	Nilai IKM Dinkes ditambah Nilai rata-rata IKM BLUD RS ditambah Nilai Rata-rata IKM BLUD Puskesmas dibagi tiga dikalikan 100	Nilai	77,62	78,37	78,39	80,04	80,90	81,76	82,61	82,61	Dinas Kesehatan
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang												
33.	Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak dan aman	Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaaan terlindungi dibagi total proyeksi rumah tangga x 100%	%	44,93	46,91	48,93	50,93	52,93	54,93	56,93	56,93	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
34.	Persentase Penduduk mengakses Air Limbah Domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses terhadap pengelolaan air limbah domestik/Jumlah rumah dalam wilayah seluruh kabupaten/kota tersebut x 100%	%	86,06	90,00	93,00	97,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
35.	Persentase jalan kondisi mantap	Panjang jalan Dalam Kondisi Mantap dibagi Jumlah total Panjang Jalan Kabupaten/Kota x 100%	%	64,91	73,44	75,65	80,53	85,31	92,65	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
36.	Persentase daerah irigasi terlayani jaringan irigasi	Luas daerah irigasi terlayani jaringan irigasi dibagi luas areal irigasi kab. Pekalongan x 100%	%	78,45	80,91	82,72	84,53	86,34	88,15	89,95	89,95	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
37.	Persentase drainase kondisi mantap	Panjang drainase jalan dalam kondisi baik dibagi panjang drainase jalan seluruhnya x 100%	%	32,45	32,95	37,95	42,95	47,95	52,95	57,95	57,95	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
38.	Persentase Kawasan yang memiliki RDTRK/RTRK/RTBL	Jumlah kawasan yang harus tersusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dibagi jumlah seluruh Kawasan (Pusat Pelayan Kegiatan) x 100%	%	-	14,29	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	85,71	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
39.	Persentase penurunan Luasan Genangan Banjir dan Rob	Luas genangan banjir dan rob dibagi luas daerah yang terkena dampak banjir dan rob x 100%	%	9,69	9,21	8,72	8,23	7,74	7,26	6,77	6,77	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman												
40.	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 hektar yang ditangani	Luas Kawasan Kumuh 10-15 hektar yang ditangani dibagi Luad Kawasan Kumuh x 100 %	%	-	5,00	5,00	30,00	45,00	65,00	85,00	85,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
41.	Persentase satuan perumahan yang dilengkapi PSU	Jumlah satuan perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU dibagi jumlah satuan perumahan dikali 100%	%	-	-	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat												
42.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)	$\frac{\text{Pelanggaran K3 yang terselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP}} \times 100\%$	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
43.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit dibagi Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK x 100%	%	24,45	25,00	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00	30,00	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
44.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun/ jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala x 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Urusan Sosial												
45.	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	Jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial dibagi jumlah populasi PPKS x 100%	%	-	-	0,10	0,19	0,29	0,37	0,44	0,44	Dinas Sosial
46.	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS	Jumlah PSKS yang aktif dalam penanganan PPKS dibagi jumlah populasi PSKS x 100%	%	-	-	6,22	14,54	22,86	31,19	39,51	39,51	Dinas Sosial

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
Urusan Tenaga Kerja												
47.	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pencari kerja yang terdaftar x 100%	%	-	16,54	18,00	18,50	20,00	22,00	24,00	24,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja
48.	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berdasarkan pendaftar pelatihan	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pelatihan dibagi pencari kerja yang mendaftar pelatihan x 100%	%	-	57,10	50,00	50,00	50,00	64,00	64,00	64,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak												
49.	Indeks PUG	Nilai Absolut PUG (Nilai Indek Prasyarat PUG Nilai Indek Pelaksanaan PUG dibagi 2) dibagi 5000	indeks	0,32	0,32	0,32	0,33	0,37	0,41	0,43	0,43	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
50.	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam APBD	Jumlah Anggaran Responsif Gender(ARG) dibagi jumlah APBD x 100%	%	4,00	3,00	3,00	3,00	3,50	3,50	4,00	4,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
51.	Skor Kabupaten Layak Anak	Penilaian dari Penguatan kelembagaan dan klaster hak Anak	angka	650	670	675	680	690	695	700	700	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Urusan Pangan												
52.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor PPH = skor PPH kelompok padi – padian + .. + skor PPH kelompok lain.	%	88,60	89,10	89,60	90,10	90,60	91,10	91,60	91,60	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
53.	Tingkat Kesesuaian Angka Kecukupan Gizi Terhadap Standar	Angka Kecukupan Energi, Protein, Lemak, Karbohidrat, Serat, dan Air yang terpenuhi dibagi standart dikali 100	%	-	-	84,19	85,44	86,69	87,94	89,19	89,19	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Urusan Pertanian												
54.	Persentase permasalahan pertanian yang diselesaikan	Jumlah estimasi permasalahan pertanian yang terselesaikan (kasus) dibagi jumlah proyeksi permasalahan pertanian 5 tahun x 100%	%	-	-	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Urusan Lingkungan Hidup												
55.	Indeks Kualitas Air	$Nilai\ relatif = \frac{C_i}{k_{ij}}$ $Rumus\ metode\ IP:$ $IP = \sqrt{\frac{(C_i/k_{ij})^2}{(C_i/k_{ij})^2 + (C_i/k_{ij})^2}}$ <p> $0 \leq PI \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI \leq 5,0 \rightarrow$ cukup ringan $5,0 < PI \leq 10,0 \rightarrow$ cukup sedang $PI > 10,0 \rightarrow$ cukup berat </p>	Indeks	43,33	35,10	35,20	35,30	35,40	35,50	35,60	35,60	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
56.	Indeks Kualitas Udara	$IKU = 100 - [50 / 0,9 \times (I_{eq} - 0,1)]$	Indeks	79,57	79,72	79,87	80,02	80,17	80,32	80,47	80,47	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
57.	Indek Kualitas Tutupan Lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan </p>	Indeks	63,92	57,63	57,63	60,99	62,67	64,35	66,03	66,03	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
58.	Persentase timbulan sampah di perkotaan yang ditangani	Volume timbulan sampah di perkotaan yang ditangani dibagi total timbulan sampah x 100%	%	16,00	26,50	26,50	27,50	28,00	28,50	29,00	29,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
59.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Bobot nilai rata-rata tertimbang = jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi x = n	Nilai	B 79,65	B 80,10	B 80,15	B 80,20	B 80,25	B 80,30	B 80,35	B 80,35	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
60.	Persentase Kepemilikan KTP EL-Pemula Bagi Bagi Wajib KTP EL-Pemula (%)	Jumlah penduduk usia lebih 17 th yang ber-KTP dibagi jumlah penduduk usia lebih 17 th atau telah menikah	%	98,66	98,05	98,10	98,15	98,20	98,25	98,30	98,30	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
61.	Persentase Penduduk Usia 0-18 Tahun Memiliki Akta Kelahiran (%)	Jumlah penduduk lahir dan memperoleh akte kelahiran di th bersangkutan dibagi jumlah kelahiran di tahun bersangkutan x 100%	%	91,00	94,20	95,50	95,75	96,00	96,25	96,50	96,50	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
62.	Persentase Kepemilikan Akta Kematian (%)	Jumlah yang melaporkan akte kematian dibagi jumlah yang melaporkan x 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa												
63.	Persentase Desa Maju	Jumlah desa maju dibagi jumlah total desa x 100%	%	14,17	18,28	22,06	25,74	29,41	33,09	33,09	33,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
64.	Persentase kelembagaan pemerintahan desa yang memiliki tata kelola pemerintahan yang baik	Jumlah desa yang mempunyai kelembagaan yang baik dibagi	%	14,17	18,28	22,06	25,74	29,41	33,09	33,09	33,09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana												
65.	Total Fertility Rate (TFR)	Rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya (19-49 tahun)	%	2,40	2,40	2,38	2,38	2,38	2,31	2,31	2,31	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
66.	Cakupan peserta KB aktif	Jumlah Peserta KB Aktif dibagi jumlah pasangan Usia Subur x 100%	%	71,25	71,29	71,35	71,45	71,55	7,65	71,75	71,75	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Urusan Perhubungan												
67.	Persentase infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan dalam kondisi baik	Jumlah infrastruktur perhubungan yang berkeselamatan dalam kondisi baik dibagi jumlah total infrastruktur perhubungan x 100%	%	43,63	44,40	44,57	46,55	49,76	50,98	51,06	51,06	Dinas Perhubungan
68.	Persentase Kepemilikan KIR	Jumlah kendaraan yang memiliki KIR dibagi jumlah kendaraan wajib uji KIR	%	71,68	83,85	83,87	83,87	83,89	83,93	83,97	83,97	Dinas Perhubungan
Urusan Komunikasi dan Informatika												
69.	Tingkat Kematangan Manajemen Layanan SPBE	Kriteria Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 59 Tahun 2020	Tingkat	-	-	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah												
70.	Pertumbuhan koperasi aktif	Jumlah koperasi aktif tahun n dikurangi jumlah koperasi aktif tahun n-1 dibagi jumlah koperasi aktif tahun n-1 x 100%	%	-10,26	-4,76	0,43	0,43	0,85	0,85	0,85	0,85	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja
71.	Pertumbuhan Usaha mikro	Jumlah usaha mikro tahun n dikurangi jumlah usaha mikro tahun n-1 dibagi jumlah usaha mikro tahun n-1 x 100%	%	0,52	0,52	0,18	0,18	0,21	0,25	0,28	0,28	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Tenaga Kerja
Urusan Penanaman Modal												
72.	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan	Skor IKM Layanan sesuai PermenPAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Skor	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	90,00	90,00	90,00	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
73.	Nilai Realisasi investasi PMDN/PMA	Jumlah Nilai Investasi Tahun n	Milyar Rupiah	450	451	464	478	492	492	500	500	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Kepemudaan dan Olah Raga												
74.	Persentase pemuda wirausaha yang dibina	Jumlah pemuda wirausaha yang dibina dibagi jumlah total pemuda yang ikut organisasi x 100%	%	2,22	2,22	2,67	2,67	2,78	2,78	2,89	2,89	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
75.	Prestasi Olahraga Tingkat regional, dan Nasional	Jumlah Prestasi Olahraga Tingkat regional dan Nasional dibagi jumlah cabang yang	%	40,00	41,00	41,00	44,44	50,00	50,00	52,63	52,63	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dibina x 100%										
76.	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat regional dan Nasional	Jumlah Atlet Berprestasi Tingkat regional dan nasional dibagi Jumlah Atlet yang dikirim x 100%	%	30,00	33,00	35,00	40,00	46,00	50,00	53,00	53,00	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
Urusan Statistik												
77.	Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan data statistik sektoral	Jumlah PD yang menyediakan data statistik sektoral dibagi jumlah PD x 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Persandian												
78.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi dibagi Jumlah area penilaian x 100%	Tingkat	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
Urusan Kebudayaan												
79.	Persentase Seni Budaya yang dilestarikan	Jumlah Seni Budaya yang dilestarikan dibagi jumlah total seni budaya yang dimiliki daerah x 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Perpustakaan												
80.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Unsur Pembangunan Literasi masyarakat (dibagi jumlah penduduk x 100%	Indeks	-	-	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
81.	Persentase ketersediaan bahan pustaka	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah dalam kondisi baik dibagi Jumlah total koleksi judul buku yang	%	21,45	22,45	22,76	23,61	24,68	25,95	27,23	27,23	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		tersedia di Perpustakaan daerah x 100%										
Urusan Kearsipan												
82.	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dibagi jumlah perangkat daerah x 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
83.	Persentase Jumlah arsip yang diselamatkan	Jumlah arsip yang diselamatkan dibagi jumlah total arsip x 100%	%	23,60	26,70	50,00	60,00	70,00	80,00	100,00	100,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
Urusan Kelautan dan Perikanan												
84.	Persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap dan budidaya	Jumlah pertumbuhan produksi perikanan tangkap ditambah dan pertumbuhan produksi perikanan budidaya dibagi 2	%	1,41	1,47	1,53	1,55	1,57	1,59	1,61	1,61	Dinas Kelautan Dan Perikanan
85.	Persentase pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap tahun n dikurangi Jumlah produksi perikanan tangkap tahun n-1 dibagi Jumlah produksi perikanan tangkap tahun n x 100%	%	1,42	1,44	1,45	1,46	1,47	1,48	1,49	1,49	Dinas Kelautan Dan Perikanan
86.	Persentase pertumbuhan produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi perikanan budidaya tahun n dikurangi Jumlah produksi perikanan budidaya	%	1,39	1,50	1,60	1,63	1,66	1,69	1,72	1,72	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		tahun n-1 dibagi Jumlah produksi perikanan budidaya tahun n x 100%										
Urusan Pariwisata												
87.	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD	PAD sektor pariwisata tahun n dibagi Jumlah PAD pemerintah Daerah dikali 100%	%	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	0,28	0,28	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
88.	Persentase peningkatan kunjungan wisata	Jumlah kunjungan wisata tahun n dikurang jumlah kunjungan wisata tahun n-1 dibagi kunjungan wisata tahun n-1 x 100%	%	-51,00	-13,61	10,00	10,00	10,00	15,00	15,00	15,00	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
89.	Persentase Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina	Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif yang dibina dibagi Jumlah Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif x 100%	%	-	-	-	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Dinas Kepemudaan Dan Olahraga dan Pariwisata
Urusan Pertanian												
90.	Persentase peningkatan produksi pertanian	Jumlah total produksi pertanian tahun n dikurangi jumlah total produksi pertanian tahun n-1 dibagi jumlah total produksi pertanian tahun n-1 x 100%	%	4,25	4,50	4,75	5,00	5,25	5,50	5,75	5,75	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
91.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	jumlah produksi padi atau bahan pangan utama lokal lainnya dibagi luas panen	Kw/Ha	53,02	53,12	53,20	53,30	53,42	53,46	53,62	53,62	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
92.	Persentase penurunan kasus penyakit hewan menular	Jumlah kasus hewan tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n-1 dikali 100%	%	-	-	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	2,22	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Urusan Perdagangan												
93.	Persentase Pertambahan Jumlah Unit Usaha Perdagangan	Jumlah Unit Usaha Perdagangan tahun n dikurangi Jumlah Unit Usaha Perdagangan tahun n-1 dibagi Jumlah Unit Usaha Perdagangan tahun n-1 x 100%	%	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
94.	Pertumbuhan Nilai Ekspor	Nilai ekspor tahun n dikurangi nilai ekspor tahun n-1 dibagi nilai ekspor tahun n-1 x 100%	%	2,00	1,90	1,90	1,90	2,00	2,00	2,00	2,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
95.	Persentase pelaku usaha yang berijin	Jumlah pelaku usaha yang berijin dibagi jumlah pelaku usaha x 100%	%	94,00	94,50	95,18	96,57	97,72	97,87	97,82	97,82	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
96.	Persentase kerjasama usaha perdagangan	jumlah kerjasama usaha perdagangan dibagi jumlah event promosi perdagangan x 100%	%	-	0,01	0,015	0,02	0,022	0,024	0,026	0,026	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Urusan Perindustrian												
97.	Persentase pertambahan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Jumlah IKM tahun n dikurangi jumlah IKM tahun n-1 dibagi jumlah IKM tahun n-1 x 100%	%	30,84	31,00	31,72	32,60	33,48	34,36	35,24	35,24	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
98.	Cakupan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang dibina	Jumlah IKM yang dibina dibagi jumlah IKM x 100%	%	0,40	0,40	0,40	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Urusan Transmigrasi												
99.	Persentase pelaksanaan pengiriman calon	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	%	-	20,00	20,00	20,00	20,00	40,00	40,00	40,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	transmigrasi ke lokasi transmigrasi	dibagi jumlah transmigrasi yang mendaftar x 100%										Menengah dan Tenaga Kerja
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN												
Urusan Perencanaan												
100.	Tingkat Capaian Kinerja pembangunan Daerah	Jumlah IKD yang mencapai target dibagi jumlah total IKD dikali 100%	%	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	87,00	87,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
101.	Persentase Program RKPD selaras dengan RPJMD	Jumlah Program RKPD tahun n dibagi jumlah program RPJMD tahun n dikali 100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
Urusan Keuangan												
102.	Persentase ketepatan waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan keuangan daerah	Waktu penyusunan Raperda APBD dan pelaporan keuangan daerah dibagi target waktu diali 100	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
103.	Rasio PAD terhadap APBD	Jumlah PAD dibagi Jumlah APBD x 100%	%	17,79	16,27	20,59	20,13	20,45	20,79	21,14	21,14	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
104.	Pertumbuhan PAD	Nilai pertumbuhan PAD per tahun	%	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Urusan Kepegawaian												
105.	Nilai Sistem Merit	Hasil hasil evaluasi oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Skor	-	191,50 Kurang	250,00 Baik	260,00 Baik	265,00 Baik	270,00 Baik	275,00 Baik	275,00 Baik	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia
Urusan Pendidikan dan Pelatihan												
106.	Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah Total hasil perkalian dari bobot	Indeks	-	34,51 Sangat	54,50 Sangat	69,00 rendah	75,00 sedang	80,50 sedang	82,00 tinggi	82,00 tinggi	Badan Kepegawaian Pengembangan

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		dimensi/ indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator $IP = \sum_{i=1}^n IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$			rendah	rendah						Sumber Daya Manusia
Urusan Penelitian dan Pengembangan												
107.	Persentase Pemanfaatan Hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan	Jumlah Hasil penelitian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Hasil penelitian dalam renja PD dikali 100% (Jumlah Hasil penelitian yang ditindaklanjuti adalah Hasil penelitian (sesuai Renja PD tahun n) yang dimanfaatkan Pemangku kepentingan	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan
Sekretariat Daerah												
108.	Tingkat Kematangan Organisasi	Permendagri 99 tahun 2018	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD												
109.	Tingkat capaian pelayanan administrasi dan dukungan pelayanan tugas dan fungsi DPRD	Persentase penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ditambah persentase administrasi keuangan DPRD ditambah persentase penyelenggaraan rapat DPRD, ditambah persentase penyediaan tenaga ahli yang	%	94,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00	Sekretariat DPRD

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		diperlukan oleh DPRD										
110.	Persentase layanan dukungan penyelenggaraan Tugas dan fungsi DPRD	Jumlah dari Persentase Capaian Kegiatan Pelayanan DPRD dibagi Jumlah persentase Keseluruhan Kegiatan Pelayanan DPRD dikali 100%	%	94,00	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00	95,00	Sekretariat DPRD
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
Inspektorat Daerah												
111.	Kapabilitas APIP	Hasil penilaian evaluasi BPKP	Level (Skor)	3 (3,00)	3 (3,00)	3 (3,10)	3 (3,20)	3 (3,30)	3 (3,40)	3 (3,50)	3 (3,50)	Inspektorat
UNSUR KEWILAYAHAN												
Kecamatan												
112.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tingkat Kecamatan	Nilai rata-rata IKM dari 19 kecamatan		78,21	79,00	79,50	80,00	80,50	81,00	81,50	81,50	19 Kecamatan
113.	Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	Rata-rata persentase Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Publik, Pemberdayaan Masyarakat dan Trantibum	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	19 Kecamatan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM												
Kesatuan Bangsa dan Politik												
114.	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial (antar suku, ras, budaya, agama, dan kemasyarakatan) yang	Jumlah potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial (antar suku, ras, budaya, agama, dan kemasyarakatan) yang	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	terselesaikan	terselesaikan dibagi jumlah jumlah potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial (antar suku, ras, budaya, agama, dan kemasyarakatan) dikali 100%										
C. ASPEK DAYA SAING												
Indikator Tujuan Daerah												
115.	Rata-rata capaian penurunan konflik dan pelanggaran ketertiban umum	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan ditambah persentase penegakkan perda dibagi 2	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
116.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor hasil evaluasi Reformasi Birokrasi dari kemen PAN RB	Indeks	B (64,60)	B (66,60)	B (66,00)	B (70,00)	B (71,00)	BB (73,00)	BB (74,00)	BB (74,00)	Sekretariat Daerah
117.	Indeks Pembangunan Kebudayaan	$IPK = \sum_{j=1}^7 (W_j \cdot Indeks D_j)$ Keterangan : IPK adalah Indeks Pembangunan Kebudayaan Dj adalah Dimensi ke-j Wj adalah Bobot Dimensi ke-j	Indeks	-	-	67,05	67,75	68,45	69,15	69,85	69,85	Sekretariat Daerah
118.	Indeks Ketahanan Daerah	Penilaian indeks ketahanan daerah (71 indikator) dari BNPB	Indeks	-	-	0,48	0,51	0,53	0,55	0,60	0,60	Sekretariat Daerah
Indikator Sasaran Daerah												
119.	Persentase potensi konflik yang terselesaikan	Jumlah potensi konflik yang terselesaikan dibagi jumlah total potensi konflik dikali 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
120.	Persentase Penegakkan Perda	$\frac{\text{Jumlah penyelesaian penegakan PERDA}}{\text{Jumlah pelanggaran PERDA}} \times 100\%$	%	87,14	88,30	88,50	89,00	90,00	90,10	90,20	90,20	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
121.	Nilai SAKIP Kabupaten	Skor Nilai SAKIP hasil evaluasi MENPAN-RB	Nilai	B (64,02)	B (64,02)	B (65,00)	B (67,00)	BB (70,00)	BB (73,00)	BB (75,00)	BB (75,00)	Sekretariat Daerah
122.	Opini BPK	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sekretariat Daerah
123.	Maturitas SPIP yang terintegrasi	Hasil evaluasi BPKP	Level (skor)	1 (1,75)	2 (2,03)	2 (2,55)	2 (2,75)	3 (3,0)	3 (3,08)	3 (3,23)	3 (3,23)	Sekretariat Daerah
124.	Indeks Sistem Merit	Nilai Sistem Merit/Nilai Maksimal Sistem Merit	Indeks	-	0,47	0,61	0,63	0,65	0,66	0,67	0,67	Sekretariat Daerah
125.	Indeks Inovasi Daerah	Hasil pengukuran berdasarkan pengisian pada http://indeks.inovasi.otda.go.id/layanan .	Indeks	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	inovatif	Sekretariat Daerah
126.	Indeks SPBE	Hasil pengukuran dari evaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,60	2,90	3,10	3,30	3,60	4,20	4,50	4,50	Sekretariat Daerah
127.	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	Jumlah persentase perekaman KTP El ditambah Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran 0-18 th ditambah persentase penerbitan akte Kematian dibagi 3 x 100%	%	96,55	97,41	97,86	97,98	98,06	98,16	98,26	98,26	Sekretariat Daerah
128.	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$ Dimana: $\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$	Nilai	76,00	76,00	78,00	78,00	79,00	80,00	80,00	80,00	Sekretariat Daerah
129.	Pertumbuhan nilai investasi	Nilai investasi tahun n dikurangi nilai investasi tahun n-1 dibagi nilai investasi tahun n-1 dikali 100%	%	-5,79	-14,74	-7,11	-1,03	0,10	1,01	1,50	1,50	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
130.	Pertumbuhan koperasi aktif dan usaha mikro	Pertumbuhan koperasi aktif ditambah Pertumbuhan usaha mikro	%	-9,74	-4,24	5,18	5,42	5,64	5,83	5,97	5,97	Sekretariat Daerah
131.	Tingkat partisipasi wirausaha pemuda	Jumlah pemuda sebagai wirausaha dibagi jumlah pemuda wirausaha yang dibina	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
132.	Indeks Desa Membangun	Rata-rata dari Indeks Desa Membangun seluruh desa. Indeks Desa Membangun dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, Indeks Ketahanan Ekologi/ Lingkungan	Indeks	0,6601	0,6650	0,6701	0,6801	0,6901	0,7001	0,7101	0,7201	Sekretariat Daerah
133.	Persentase objek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilestarikan dibagi jumlah total obyek pemajuan budaya x 100%	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
134.	Persentase infrastruktur jalan, drainase, irigasi kondisi baik	Persentase infrastruktur jalan kondisi baik ditambah persentase drainase kondisi baik ditambah persentase irigasi kondis baik dibagi 3	%	58,60	62,43	65,44	69,34	73,20	77,92	82,63	82,63	Sekretariat Daerah
135.	Persentase Pelayanan Sampah	Total Volume sampah yang dapat ditangani dibagi Total volume timbunan sampah kabupaten	%	16,00	26,50	26,50	27,50	28,00	28,50	29,00	29,00	Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Indikator Kinerja Pembangunan	Formula Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Tahun					Kondisi Akhir RPJMD	Perangkat Daerah Koordinator/ Penanggungjawab
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
136.	Rasio Konektivitas Angkutan Jalan	Jumlah ruas jalan kabupaten yang terlayani trayek dibagi jumlah panjang ruas jalan kabupaten dikali 100%	%	46,03	46,03	47,07	49,79	53,56	56,09	58,58	58,58	Sekretariat Daerah
137.	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Realisasi RTRW dibagi rencana peruntukan dikali 100%	%	-	10,53	15,79	21,05	26,32	31,58	36,84	36,84	Sekretariat Daerah
138.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	0,376 dikali IKA) ditambah (0,405 dikali IKU) ditambah (0,219 dikali IKL))	%	-	58,11	58,20	59,04	59,50	59,97	60,44	60,44	Sekretariat Daerah
139.	Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob	Luas genangan banjir dan rob dibagi luas daerah yang terkena dampak banjir dan rob dikali 100	%	9,69	9,21	8,72	8,23	7,74	7,26	6,77	6,77	Sekretariat Daerah

Sumber : Bappeda Litbang Kab. Pekalongan, 2021 (data diolah)

BAB IX

PENUTUP

A. Pedoman Transisi

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Mendasarkan pada ketentuan tersebut, maka masa berlaku RPJMD adalah 5 tahun, yaitu tahun 2021 sampai tahun 2026.

Sebagai pedoman transisi, pada saat RPJMD Kabupaten Pekalongan tahun 2026-2031 belum tersusun, untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD Tahun 2027 di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD, dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023-2028.

B. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan yang harus dipedomani dalam pelaksanaan RPJMD adalah sebagai berikut:

1. Bupati Pekalongan berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada masyarakat.
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan semua pemangku kepentingan agar mendukung pelaksanaan program dan pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya.
3. Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah pada periode yang sama sebagai dokumen perencanaan lima tahunan Perangkat Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD. Selanjutnya Renstra Perangkat Daerah akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Perangkat Daerah.
4. RPJMD ini selanjutnya akan dijabarkan kedalam RKPD tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun.
5. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan RPJMD dan mewujudkan sinergitas pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pekalongan berkewajiban melakukan pemantauan terhadap penjabaran RPJMD kedalam Renstra Perangkat Daerah dan RKPD, serta evaluasi terhadap hasil pelaksanaan

RPJMD untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran jangka menengah daerah.

6. RPJMD ini menjadi dasar bagi DPRD dan masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan daerah dan melakukan penilaian kinerja pemerintah daerah.

BUPATI PEKALONGAN,

TTD

FADIA ARAFIQ

Diundangkan di Kajen

Pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN,

TTD

M. YULIAN AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN



AGUS DWI NUGROHO, S.STP.

Pembina Tk. I

NIP. 19770906 199703 1 005